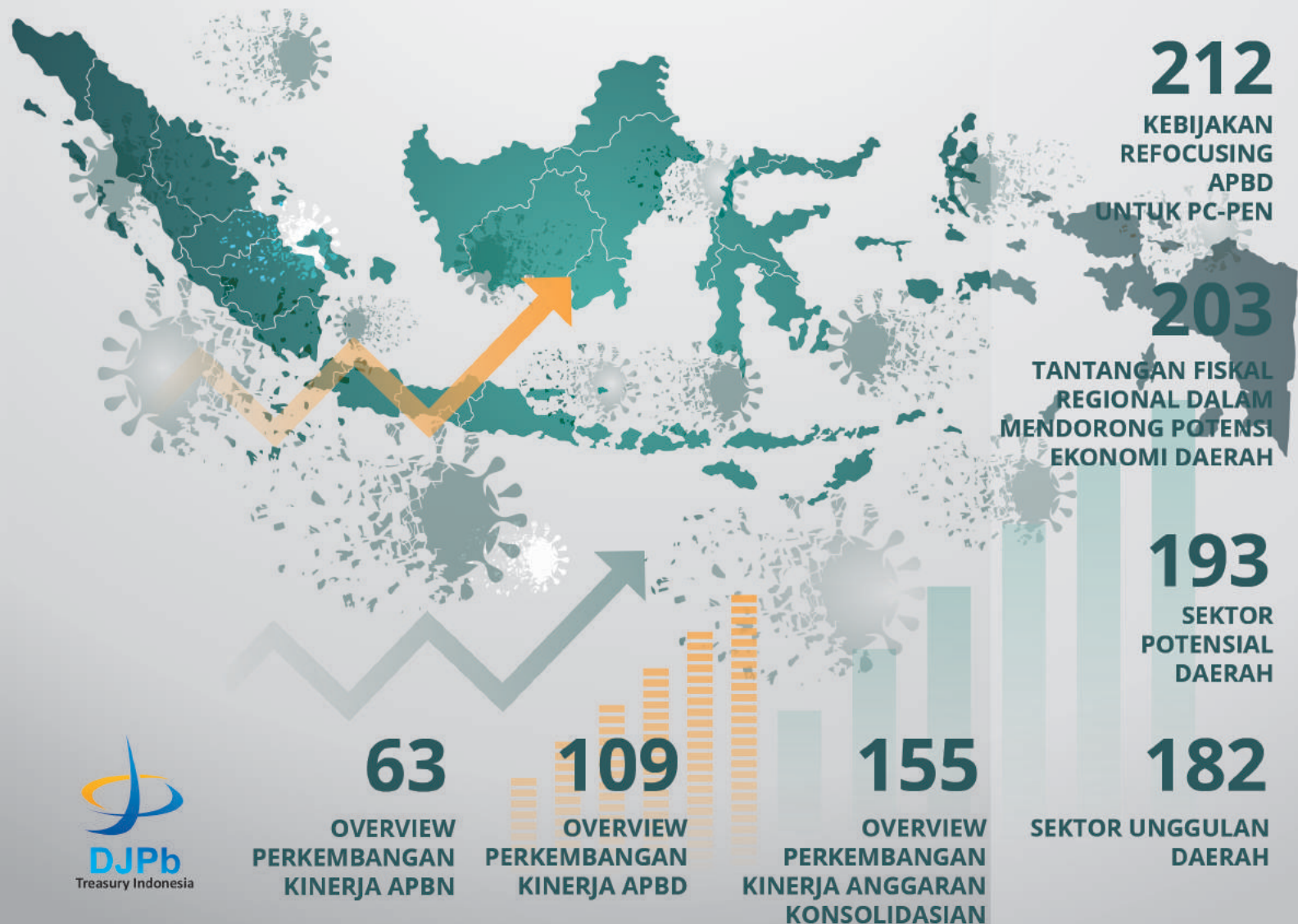


KAJIAN FISKAL REGIONAL GABUNGAN 2020

KhatulistiwaA

OPTIMALISASI PERAN FISKAL DI MASA PANDEMI MENUJU PEMULIHAN EKONOMI



Khatulistiwa

KFR gabungan 2020

Tema:

"Optimalisasi Peran Fiskal di Masa
Pandemi Menuju Pemulihan Ekonomi "



PENGARAH

Hadiyanto

Direktur Jenderal Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB

Sударso

Direktur Pelaksanaan Anggaran

EDITOR

Heny Muryantini, Mochamad Chomnur Susanto, Junaedi, Wibawa Pram Sihombing, Mohamad Irfan Surya Wardana, Agung Kurniawan Purbohadi

KONTRIBUTOR

Kurniawan Santoso, Tommi Helmiwan, Susanti Dewi, Catur Ery Prabowo, Trisna Eka Wijaya, Lely Diah Tri Sukmawati, Digar Rou Yahya M.

Febrian Yalisman, Dian Merini, Teguh Dwi Prasetyo, Rahmad Dian Afryansyah, Mashudi Adi Nugroho, Sabar Sautomo.

Adiatma, Eko Yudhyanto, Rani Gutomo, Risky Utama, Indra Sulistyو, Puguh Hermawan, I Nyoman Enri S.S., Wirasukma Legendani, Kharisma Muhammad, Novariantو Sibagariang, Nanang Broto Saputro, Enjun Fajar Sadida, Tangkas Nugroho, Taufan Maulana Harits, Dian Setyo Cahyono, Riski Prasetyo Putro, Pratig Ajirogo, Heru Cahyadi, Ferry Sutiono.

DESAIN DAN LAYOUT

Dhika Habibi Z

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, atas rahmat-Nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan memublikasikan Laporan Khatulistiwa Tahun 2020 sebagai konsolidasi dari KFR Tingkat Wilayah yang disusun oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan atas implementasi kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di tingkat nasional dan regional, yang disusun secara spasial berdasarkan 6 regional yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua, sebagai suatu kawasan yang memiliki karakteristik serupa ditinjau dari letak geografis, aspek ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam.

Khatulistiwa Tahun 2020 mengusung tema **"Optimalisasi Peran Fiskal di Masa Pandemi Menuju Pemulihan Ekonomi"** sebagai bentuk optimisme peran fiskal dalam penanganan pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk para stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Pembaca yang budiman...

Sebagai negara berdaulat (sovereign nation), Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan fiskal dan implementasinya senantiasa diarahkan untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian bagi segenap masyarakat Indonesia.

Kebijakan fiskal yang tertuang pada APBN dan APBD memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, dan

memastikan distribusi pembangunan di Indonesia yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama (ultimate goal) yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan fiskal tersebut.

Pembaca yang budiman...

Tahun 2020 merupakan kondisi extraordinary, dimana Pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di Tiongkok dengan cepat menyebar ke seluruh dunia hingga pada Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, dan Pemerintah menetapkan pandemi ini sebagai Bencana Nasional Non Alam. Pandemi ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat, menimbulkan ketidakpastian, dan mengakibatkan guncangan terhadap kegiatan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menghadapi potensi resesi, Pemerintah merespon dengan cepat melalui penerbitan sejumlah kebijakan, diantaranya penerbitan Perppu No. 1/2020 yang disahkan dengan UU No.2/2020, Pencanangan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta Penyesuaian APBN melalui Penerbitan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yang melebarkan defisit APBN Tahun 2020 menjadi 6,34 persen. Sedangkan di sisi fiskal daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, dalam penyusunan KFR Tahun 2020 ini telah dilakukan beberapa penguatan untuk konten KFR-nya yaitu melakukan asesmen terhadap daerah-daerah yang menjadi mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Pemda dalam rangka refocusing anggaran untuk mendukung program PC-PEN di daerah. Di samping itu, KFR ini juga dapat mengangkat kondisi terhadap program-program prioritas atau

sektor-sektor prioritas yang sifatnya potensial untuk dikembangkan untuk pada akhirnya bisa menjadi bahan diskusi, untuk mengidentifikasi permasalahan, agar dapat dirumuskan bentuk dukungan-dukungan fiskal apa, atau dukungan kebijakan-kebijakan apa yang dibutuhkan dalam rangka mendukung sektor-sektor potensial tersebut.

Pembaca yang budiman...

Hasil telaahan makro menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan berperan penting dalam menahan laju perlambatan ekonomi di tahun 2020, dan momentum ini harus terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Perekonomian nasional yang saat ini masih terkonsentrasi di regional Jawa dan Sumatera dengan 80,11 persen kontribusinya terhadap PDB Nasional di tahun 2020, perlu terus dilakukan upaya pemerataan pembangunan secara berkesinambungan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera.

Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan. Alokasi belanja pemerintah untuk Kawasan Indonesia Timur secara konsisten juga mengalami peningkatan, tentunya hal ini didukung dengan kebijakan TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi pencairan anggarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, kemandirian fiskal pemerintah perlu terus didorong dengan strategi dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai keunggulan masing-masing daerah.

Pembaca yang budiman...

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas dalam Laporan Khatulistiwa ini. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2020 ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fiskal dan perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 2021

HADIYANTO

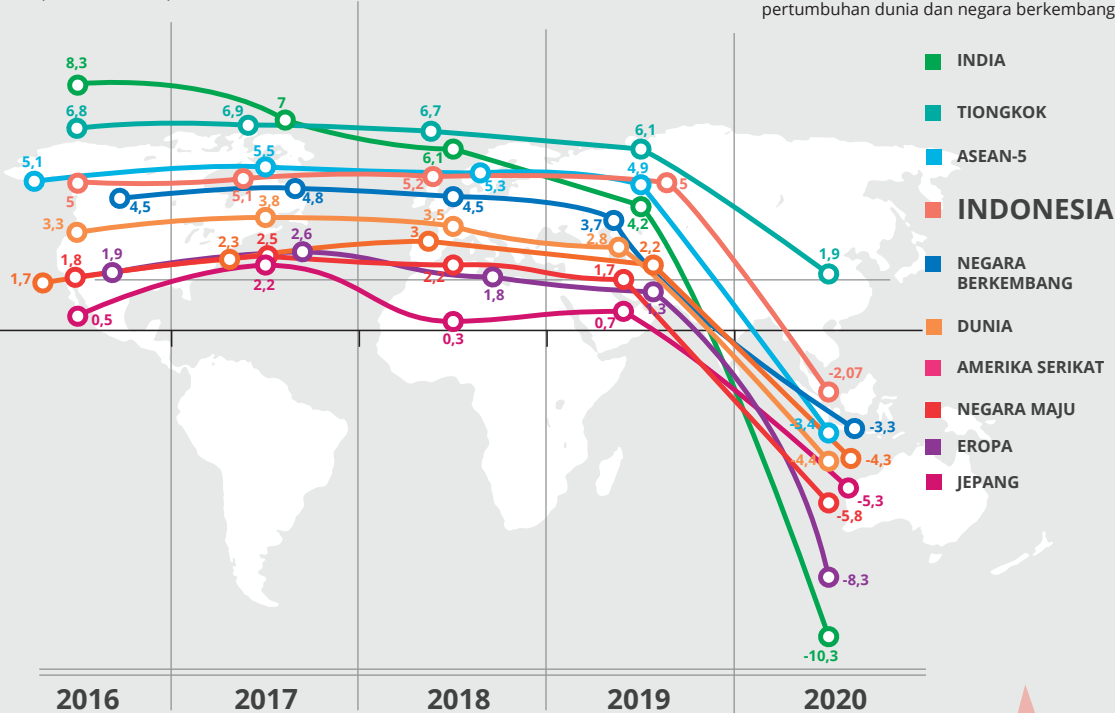
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Laporan Khatulistiwa merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional (KFR) yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2016-2020

(DALAM PERSEN)

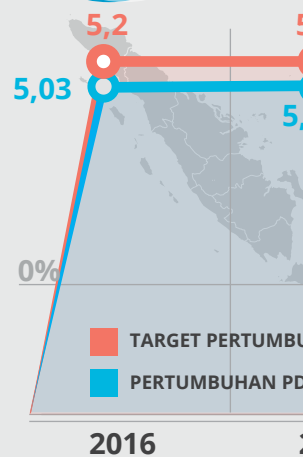
Secara global, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan dunia dan negara berkembang.



TREN PERTUMBUHAN INDONESIA TAHUN 2016-2020

(DALAM PERSEN)

GAP PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2020 SEBESAR 7,37

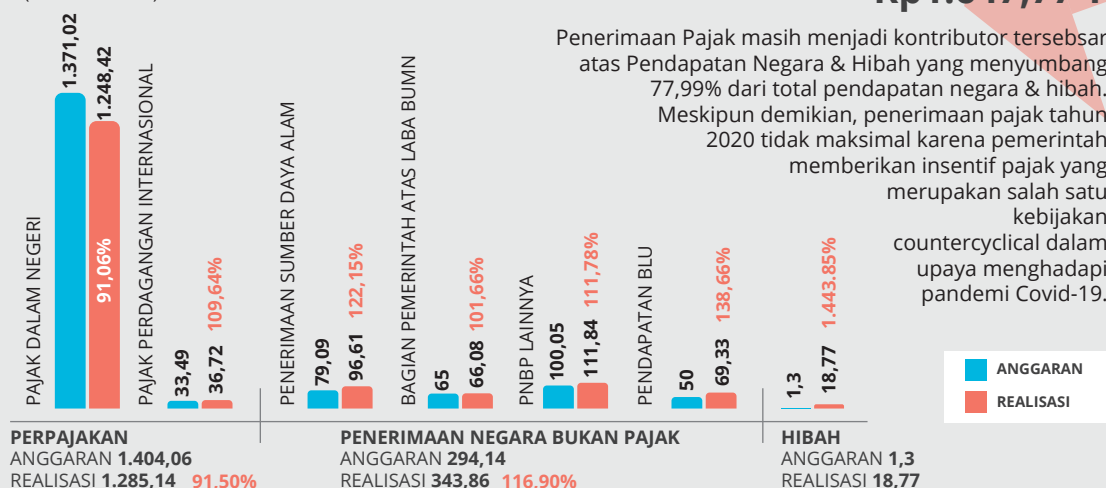


PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2020

(DALAM TRILIUN)

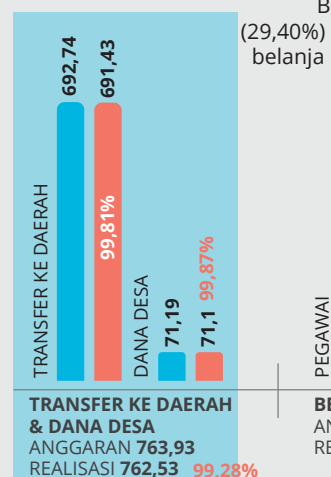
REALISASI PENDAPATAN NEGARA & HIBAH Rp1.647,77 T

Penerimaan Pajak masih menjadi kontributor terbesar atas Pendapatan Negara & Hibah yang menyumbang 77,99% dari total pendapatan negara & hibah. Meskipun demikian, penerimaan pajak tahun 2020 tidak maksimal karena pemerintah memberikan insentif pajak yang merupakan salah satu kebijakan countercyclical dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19.



BELANJA NEGARA TAHUN 2020

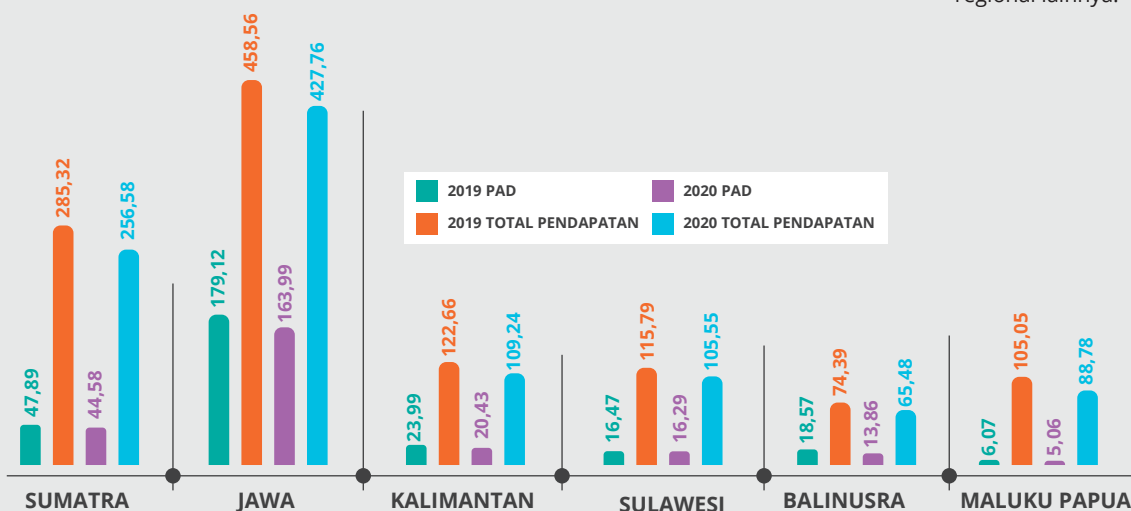
(DALAM TRILIUN)



PERBANDINGAN PAD & TOTAL PENDAPATAN REGIONAL TAHUN 2019-2020

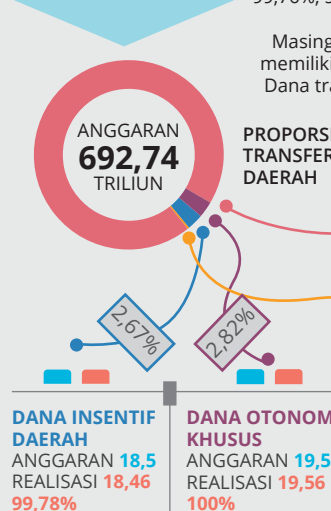
(DALAM TRILIUN)

Pada tahun 2020, seluruh regional mengalami penurunan pendapatan baik PAD, maupun pendapatan regional. Regional Jawa masih menjadi regional yang memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan regional lainnya.



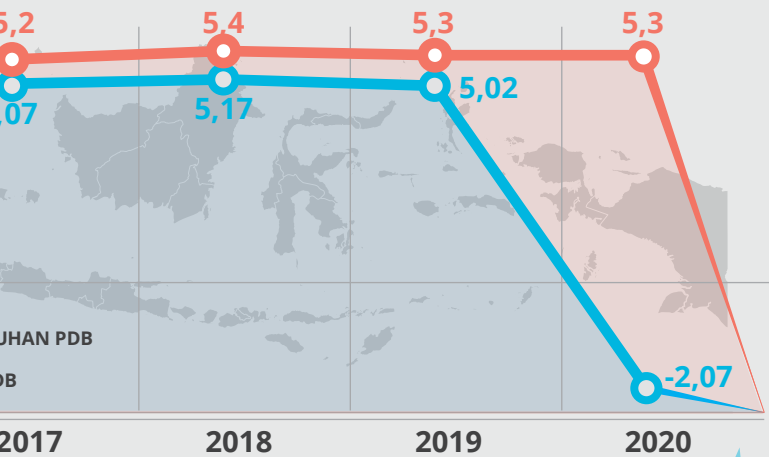
TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2020

(DALAM TRILIUN)



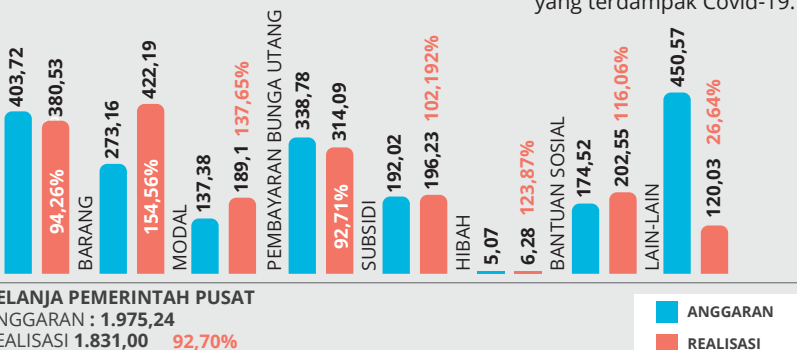
TREN PDB 2020

Tren positif pertumbuhan PDB Indonesia terhenti di tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07. Terhentinya mobilitas manusia, merosotnya perdagangan global, sektor keuangan global yang bergejolak, dan harga komoditas menurun tajam sebagai dampak Covid-19 mengakibatkan perekonomian menjadi lesu.

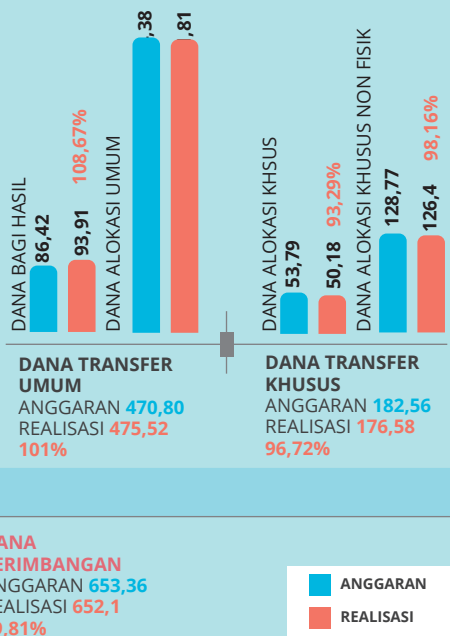
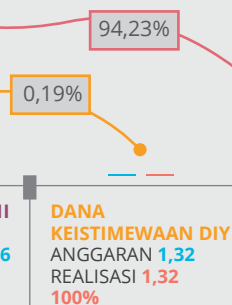


REALISASI BELANJA NEGARA Rp2.593,53 T

Belanja Negara tahun 2020 terbagi dalam pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Belanja Pemerintah Pusat (70,60%). Tahun 2020, pemerintah memfokuskan negara untuk kebijakan countercyclical sebagaimana amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai upaya memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Covid-19.



Realisasi penyerapan atas dana transfer ke tahun 2020 sangat tinggi yaitu Dana Insentif Daerah 99,81%, Dana Insentif Daerah Keistimewaan DIY sebesar 100%. Sedangkan masing-masing pos pada dana perimbangan tingkat penyerapan yang cukup tinggi. Transfer umum sebesar 101% dan dana transfer khusus sebesar 96,72%.



DASHBOARD FISKAL REGIONAL TAHUN 2020

OPTIMALISASI PERAN FISKAL DI MASA PANDEMI MENUJU PEMULIHAN EKONOMI

PELAKSANAAN APBN TAHUN 2020 (DALAM TRILIUN)

APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tengah tantangan perekonomian global dan domestik.

BELANJA NEGARA
2.593,53
TRILIUN

DEFISIT
(945,77)
TRILIUN

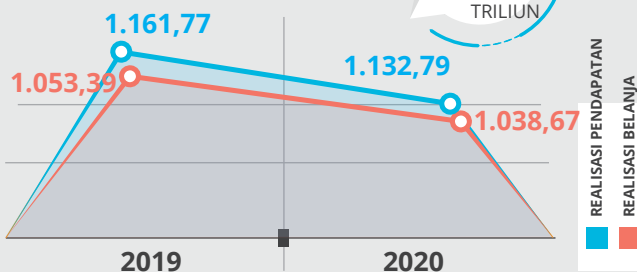
PENDAPATAN NEGARA & HIBAH
1.647,77
TRILIUN

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2020 (DALAM TRILIUN)

APBD 2020 mengalami penurunan baik dari segi pagu, maupun realisasinya jika dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan, APBD 2020 masih mengalami surplus sebesar 14,73 T.

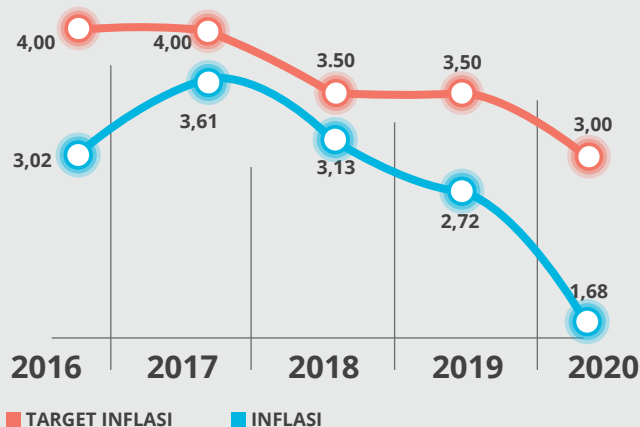
TAHUN 2019 SURPLUS
28,99
TRILIUN

TAHUN 2020 SURPLUS
14,73
TRILIUN



TREN INFLASI TAHUN 2016-2020 (DALAM PERSEN)

Inflasi Indonesia mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir sebagai akibat perlambatan ekonomi yang tengah berlangsung pada tahun 2020. Tingkat permintaan yang anjlok, khususnya konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan menekan laju inflasi di tahun 2020.



12• RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA FISKAL	12
2. KINERJA APBN	13
3. KINERJA APBD	15
4. KINERJA INDIKATOR KESEJAHTERAAN	16
5. RESPON FISKAL PEMERINTAH	18

22• BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH BERDASARKAN RPJMN TAHUN 2020-2024

1. PENDAHULUAN	23
2. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	25
2.I. Regional SUMATERA	25
2.II. Regional JAWA	26
2.III. Regional KALIMANTAN	27
2.IV. Regional SULAWESI	28
2.V. Regional BALI-NUSA TENGGARA	29
2.VI. Regional MALUKU-PAPUA	29
3. TANTANGAN DAERAH	30
3.I. Tantangan EKONOMI DAERAH	30
3.II. Tantangan SOSIAL KEPENDUDUKAN	32
3.III. Tantangan GEOGRAFIS WILAYAH	34
3.IV. Tantangan PANDEMI COVID-19	36

38• BAB II

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2018-2020

1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI	39
1.I. Perkembangan PRODUK DOMESTIK BRUTO	39
1.II. Perkembangan TINGKAT INFLASI	45
2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN	48
2.I. Perkembangan INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	48
2.II. Perkembangan TINGKAT KESENJANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI)	50
2.III. Perkembangan TINGKAT KEMISKINAN	51
2.IV. Perkembangan TINGKAT PENGANGGURAN	54
2.V. Perkembangan NILAI TUKAR PETANI (NTP)	57
2.VI. Perkembangan NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)	59

62• BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TAHUN 2018-2020

1. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA APBN	63
1.I. Perkembangan PENDAPATAN NEGARA	65
1.II. Perkembangan BELANJA NEGARA	67
1.III. Berdasarkan KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	70
1.IV. Belanja TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	72
1.V. Perkembangan SURPLUS/DEFISIT	76
1.VI. Perkembangan PEMBIAYAAN	76
1.VII. Pelaksanaan KEBIJAKAN INSENTIF PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DAN CUKAI	77

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBN REGIONAL 78

- 2.I. Regional *SUMATERA* 79
- 2.II. Regional *JAWA* 80
- 2.III. Regional *KALIMANTAN* 82
- 2.IV. Regional *SULAWESI* 84
- 2.V. Regional *BALI – NUSRA* 85
- 2.VI. Regional *MALUKU – PAPUA* 87

3. PELAKSANAAN ANGGARAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2020 88

- 3.I. Output *STRATEGIS SEKTOR PENDIDIKAN* 89
- 3.II. Sektor *KESEHATAN* 90
- 3.III. Sektor *PERLINDUNGAN SOSIAL* 91
- 3.IV. Sektor *INFRASTRUKTUR* 93

4. BELANJA DAK FISIK DAN DANA DESA 95

- 4.I. DAK *FISIK* 95
- 4.II. Dana *DESA* 96

5. PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT 98**6. MANAJEMEN INVESTASI PUSAT 101****108• BAB IV****PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018-2020****1. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA APBD 109**

- 1.I. Perkembangan *PENDAPATAN DAERAH* 110
- 1.II. Perkembangan *BELANJA DAERAH* 112
- 1.III. Perkembangan *SURPLUS/DEFISIT APBD* 114
- 1.IV. Perkembangan *PEMBIAYAAN DAERAH* 115

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD REGIONAL 115

- 2.I. Regional *SUMATERA* 115
- 2.II. Regional *JAWA* 121
- 2.III. Regional *KALIMANTAN* 126
- 2.IV. REGIONAL *SULAWESI* 132
- 2.V. Regional *BALI – NUSRA* 137
- 2.VI. Regional *MALUKU-PAPUA* 142

3. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 148**4. PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAERAH 150**

- 4.I. Sektor *PENDIDIKAN* 150
- 4.II. Sektor *KESEHATAN* 151
- 4.III. Sektor *INFRASTRUKTUR* 151

5. PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 151**154• BAB V****PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)****1. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA ANGGARAN KONSOLIDASIAN 155**

- 1.I. Perkembangan *PENDAPATAN KONSOLIDASIAN* 157
- 1.II. Perkembangan *BELANJA KONSOLIDASIAN* 158
- 1.III. Perkembangan *SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN* 160

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN 161

- 2.I. Regional *SUMATERA* 163

2.II. Regional JAWA	165
2.III. Regional BALI DAN NUSA TENGGARA	167
2.IV. Regional KALIMANTAN	169
2.V. Regional SULAWESI	171
2.VI. Regional PAPUA MALUKU	173
3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT	175

180• BAB VI

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

1. OVERVIEW KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL	181
2. SEKTOR UNGGULAN DAERAH	182
2.I. Regional SUMATERA	182
2.II. Regional JAWA	185
2.III. Regional KALIMANTAN	186
2.IV. Regional SULAWESI	189
2.V. Regional BALI-NUSA TENGGARA	189
2.VI. Regional MALUKU-PAPUA	191
3. SEKTOR POTENSIAL DAERAH	193
3.I. Regional SUMATERA	193
3.II. Regional JAWA	195
3.III. Regional KALIMANTAN	196
3.IV. Regional SULAWESI	198
3.V. Regional BALI-NUSA TENGGARA	199
3.VI. Regional MALUKU-PAPUA	201
4. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI DAERAH	203
4.I. Regional SUMATERA	203
4.II. Regional JAWA	204
4.III. Regional KALIMANTAN	205
4.IV. Regional SULAWESI	206
4.V. Regional BALI-NUSA TENGGARA	206
4.VI. Regional MALUKU-PAPUA	207

210• BAB VII

ANALISIS TEMATIK: REFOCUSING APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI

1. KEBIJAKAN REFOCUSING APBD UNTUK PC-PEN	212
2. BIDANG KESEHATAN	214
2.I. Regional SUMATERA	215
2.II. Regional JAWA	216
2.III. Regional KALIMANTAN	216
2.IV. Regional SULAWESI	216
2.V. Regional BALI-NUSA TENGGARA	217
2.VI. Regional MALUKU-PAPUA	218
2.VII. Kendala DAN PERMASALAHAN BELANJA KESEHATAN	218
2.VIII. Rekomendasi BIDANG KESEHATAN	219
3. BIDANG PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)	219
4. BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	223

4.I. Regional	<i>SUMATERA</i>	223
4.II. Regional	<i>JAWA</i>	223
4.III. Regional	<i>KALIMANTAN</i>	223
4.IV. Regional	<i>SULAWESI</i>	224
4.V. Regional	<i>BALI-NUSA TENGGARA</i>	224
4.VI. Regional	<i>MALUKU-PAPUA</i>	224
4.VII. Kendala	<i>DAN PERMASALAHAN BELANJA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI</i>	224
4.VIII. Rekomendasi	<i>BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI</i>	225

228• BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN	229
-------------	-----

2. REKOMENDASI	230
----------------	-----

234• LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui tiga fungsi utamanya, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi, kebijakan fiskal yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjadi stimulus investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan secara merata dan berkeadilan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui perumusan kebijakan fiskal oleh pemerintah, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan yang kredibel.

Tahun 2020 menjadi tahun yang luar biasa karena pelaksanaan APBN/D yang dilakukan di tengah kondisi yang sulit sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan guncangan yang sangat hebat terhadap perekonomian Indonesia, mobilitas manusia terhenti, sektor keuangan global bergejolak, perdagangan global merosot, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi di berbagai belahan dunia yang masuk kedalam jurang resesi. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk menunda pelaksanaan program-program

prioritas dan mengubah fokus pelaksanaan APBN/D menjadi kebijakan yang lebih bersifat countercyclical atas pelemahan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif, defisit anggaran diperlebar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memberikan berbagai stimulus ekonomi. Upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi diantaranya termanifestasi melalui pelaksanaan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

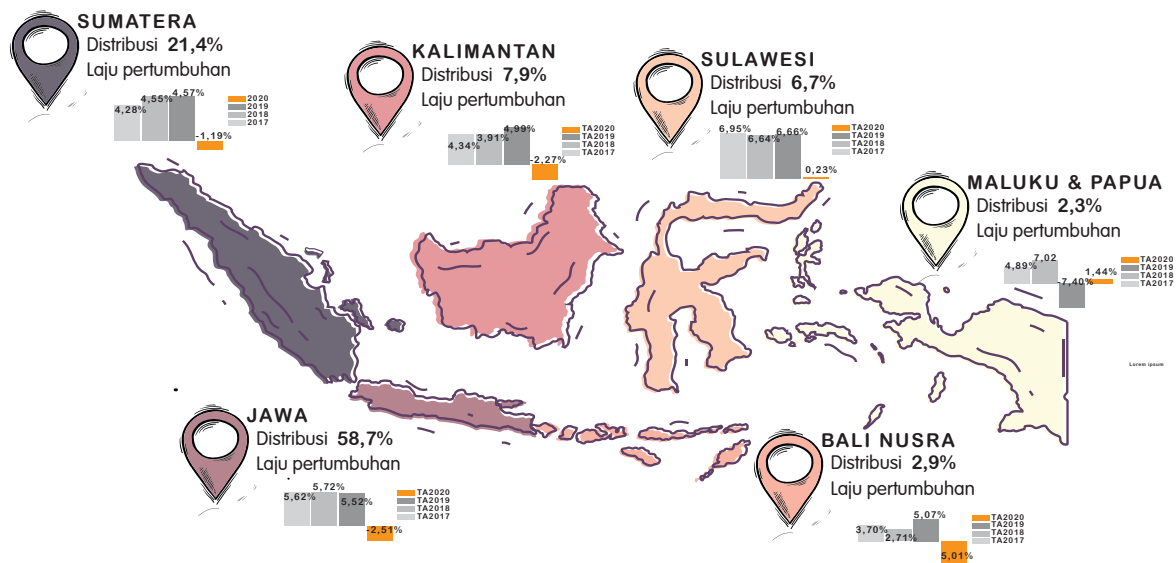
Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen, jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,02 persen di tahun 2019. Kontraksi perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan perekonomian di berbagai negara belahan dunia. Meskipun perekonomian Indonesia 2020 mengalami kontraksi, angka tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan G20 lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 16.079,25 triliun. PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$3.911,7 yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income country*). Status tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

GAMBAR 1. KINERJA FISKAL, PEREKONOMIAN, DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2020

APBN		Makro Ekonomi	
a. Realisasi Pendapatan	Rp1.647,77 T (96,93%)	a. Pertumbuhan Ekonomi	-2,07%
b. Realisasi Belanja	Rp2.593,53 T (94,68%)	b. Produk Domestik Bruto	Rp15.434,2 T
c. Defisit	Rp945,77 T (91,01%)	c. Inflasi	1,68%
d. Pembiayaan	Rp1.191,47 T (114,65%)	Kesejahteraan	
e. SiLPA	Rp245,70 T	a. Indeks Pembangunan Manusia	71,94
APBD (konsolidasi)		b. Rasio Gini	0,385
a. Realisasi Pendapatan	Rp1.053,39 T (93,93%)	c. Pengangguran	7,07%
b. Realisasi Belanja	Rp1.038,67 T (86,30%)	d. Kemiskinan	10,19%
c. Surplus	Rp14,73 T (-17,92%)		
d. Pembiayaan	Rp93,06 T (105,66%)		
e. SiLPA	Rp107,79 T (1.820,16%)		

sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 2. SEBARAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL



sumber: BPS, diolah

sebelumnya yang termasuk dalam bagian negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*).

Dilihat secara spasial, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perkembangan aktivitas ekonomi di regional Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 58,7 persen, diikuti oleh regional Sumatera sebesar 21,4 persen, dan regional Kalimantan 7,9 persen, sedangkan regional Sulawesi memiliki kontribusi sebesar 6,7 persen, Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen, serta regional Maluku-Papua sebesar 2,3 persen. Berdasarkan share PDB tersebut, variasi angka kontribusi PDB setiap regional menunjukkan bahwa distribusi PDB masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Namun demikian, pemerintah telah berupaya untuk mendorong peningkatan share PDB ini ke Kawasan Indonesia Timur (KTI) melalui sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur dan kesejahteraan baik yang didanai melalui APBN maupun APBD. Secara laju pertumbuhan, Regional Maluku-Papua menjadi satu-satunya regional yang mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi positif, sedangkan Regional Bali – Nusra menjadi regional dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi paling dalam yang mencapai angka -5,01%.

Sementara itu, pada capaian tingkat inflasi nasional di tahun 2020, tingkat inflasi Indonesia berada pada angka 1,68 persen atau lebih baik 1,04 persen dari

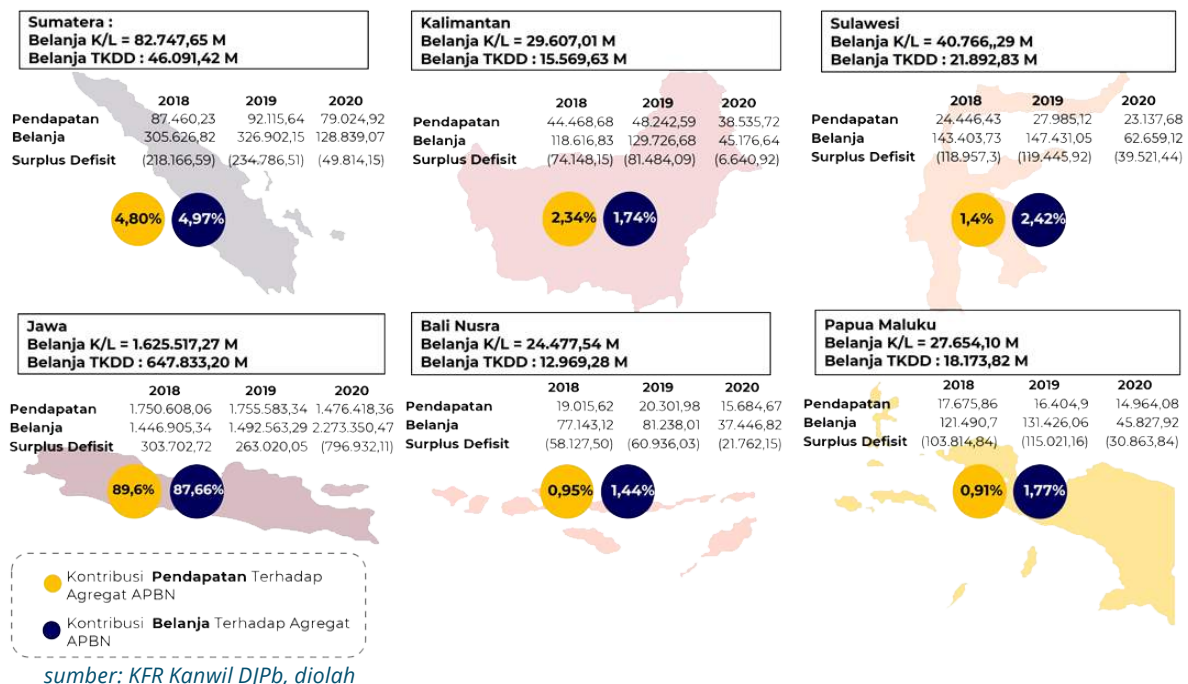
tahun sebelumnya. Capaian tingkat inflasi tahun 2020 yang berada dibawah 2 persen ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Namun, tingkat inflasi yang rendah ini diakibatkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang masif sebagai akibat dari Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2020 lebih mendeskripsikan keadaan perekonomian negara yang lesu.

2. KINERJA APBN

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2020 telah menjalankan peran sebagai instrumen countercyclical yang dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang dalam. APBN 2020 menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal ekspansif, memberikan berbagai stimulus ekonomi yang berfokus sebagai jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Pendapatan negara pada tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.647,77 triliun atau 96,93 persen dari APBN tahun anggaran 2020. Realisasi tersebut mengalami penurunan Rp312,83 triliun atau 15,96 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019. Kinerja pendapatan negara tahun 2020 turun cukup dalam hingga mencapai minus 15,96 persen sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang memberikan relaksasi dan insentif perpajakan guna menstimulus perekonomian

GAMBAR 3. PETA SPASIAL REALISASI APBN 2018 – 2020 (MILIAR)

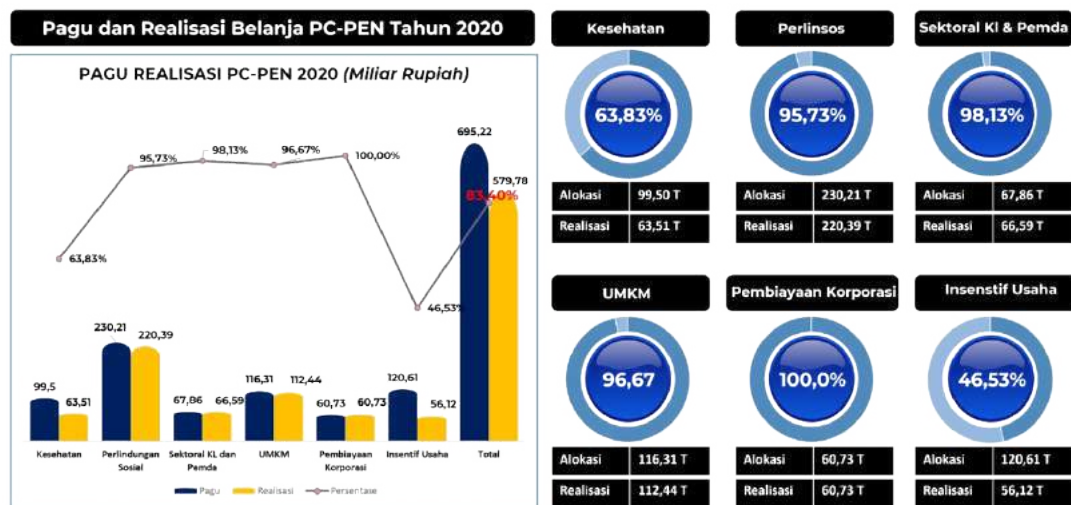


nasional sebagai salah satu program dalam instrumen *countercyclical* pemerintah. Sementara itu, realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.593,53 triliun atau 94,68% dari APBN tahun anggaran 2020. Capaian tersebut meningkat Rp284,23 triliun atau tumbuh sebesar 12,31 persen dari APBN tahun anggaran 2019. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.831 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp762,53 triliun. Pada bagian BPP, besaran realisasi belanja barang menjadi kebutuhan belanja utama yakni sebesar Rp422,19 triliun atau sekitar 16,28 persen dari total belanja negara, disusul kemudian oleh belanja pegawai sebesar Rp380,53 triliun (14,67 persen total belanja), belanja kewajiban bunga utang sebesar Rp314,09 triliun (12,11 persen total belanja), dan belanja bantuan sosial sebesar Rp202,55 triliun (7,81 persen total belanja). Belanja negara baik dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian, sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang ekspansif dan bersifat *countercyclical*.

Melihat kinerja APBN secara spasial, konsentrasi pendapatan dan belanja negara berada di Regional Jawa. Hal ini tidak terlepas dari basis pencairan belanja saat ini berdasarkan lokasi satker pengelola DIPA berada serta pencairan atas beberapa alokasi anggaran dengan nilai yang besar dilakukan

secara tersentralisasi oleh K/L pusat. Pada tahun anggaran 2020, Regional Jawa memiliki kontribusi sebesar 87,6% untuk pencairan anggaran belanja K/L dan TKDD, kemudian disusul Regional Sumatera sebesar 4,97%. Porsi terendah dari realisasi anggaran belanja berada di Regional Bali-Nusra dengan kontribusi sebesar 1,44%. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan belanja perkapita, masyarakat di Regional Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 151,59 juta jiwa menempati urutan pertama yang terlihat memperoleh alokasi belanja hampir Rp15 juta perkapita. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan 2019, yaitu 5,8 juta rupiah per kapita. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan signifikan pos belanja lain-lain dalam rangka merespon bencana pandemi COVID-19 yang banyak dilakukan secara terpusat. Namun demikian, urutan berikutnya ditempati oleh Regional Maluku-Papua yang memperoleh alokasi belanja sebesar Rp5,35 juta perkapita kemudian disusul Regional Kalimantan sebesar Rp3,15 juta perkapita. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun APBN berfokus pada penanganan bencana pandemi COVID-19, APBN terus ditujukan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah KTI. Selain itu, tahun 2020 seluruh regional mengalami defisit anggaran selaras dengan kebijakan fiskal ekspansif yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas dari hal tersebut, kemandirian fiskal masih menjadi isu yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah yang

GAMBAR 4. GRAFIK PELAKSANAAN ANGGARAN PC-PEN TAHUN ANGGARAN 2020



sumber: MEBE, diolah

dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja yang tepat khususnya dalam bentuk belanja yang bersifat investasi.

Pelaksanaan program PC-PEN pada tahun anggaran 2020 terbagi kedalam enam kluster yang terdiri dari kluster kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L & Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Realisasi anggaran dari program PC-PEN tahun anggaran 2020 mencapai Rp579,78 triliun atau sebesar 22,35 persen dari total belanja negara. Kluster perlindungan sosial menjadi kluster dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Rp220,39 triliun atau 95,73 persen dari alokasi anggaran, kemudian secara berurutan disusul kluster UMKM sebesar Rp112,44 triliun (96,67 persen dari alokasi anggaran), kluster sektoral K/L & Pemda sebesar Rp66,59 triliun (98,13 persen dari alokasi anggaran), kluster kesehatan Rp63,51 triliun (63,83 persen dari alokasi anggaran), kluster pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun (100 persen dari alokasi anggaran), dan kluster insentif usaha sebesar Rp56,12 triliun (46,53 persen dari alokasi anggaran). Meskipun pada beberapa kluster alokasi anggaran tidak terserap secara optimal, peran program PC-PEN sebagai salah satu instrumen countercyclical, mampu menjaga kontraksi pertumbuhan perekonomian dari potensi jatuh semakin dalam.

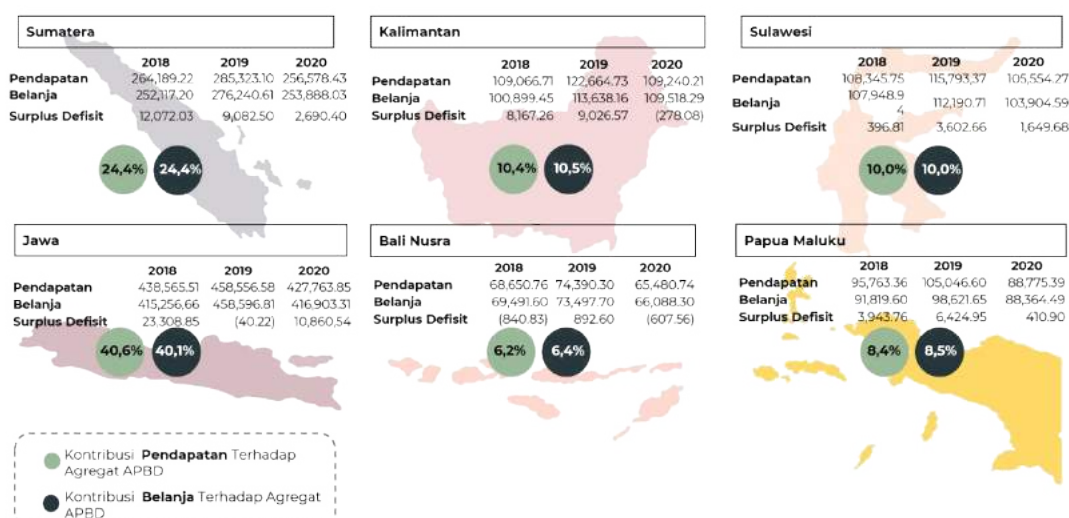
Kebijakan fiskal ekspansif yang ditetapkan pemerintah pada tahun anggaran 2020, menghasilkan tingkat defisit yang lebar dengan

angka mencapai Rp945,77 T atau berada pada kisaran 6,13 persen terhadap PDB. Namun, mengingat APBN merupakan instrumen yang penting, tingkat defisit tersebut masih terjaga di bawah target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar 6,34 persen terhadap PDB sehingga APBN tetap sustainable, sehat, dan kredibel. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp1.191,47 triliun atau sebesar 114,65 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan menghasilkan SiLPA sebesar Rp245,70 triliun.

3. KINERJA APBD

Dari sisi fiskal daerah, konsolidasi APBD secara nasional di tahun 2020 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami penurunan. Konsolidasi realisasi pendapatan APBD secara nasional (gabungan) adalah sebesar Rp1.053,39 triliun atau turun sebesar Rp110,49 triliun (terkontraksi sebesar 9,49 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer (TKDD) masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp27,9 triliun dan Rp64,85 triliun. Dana transfer merupakan kontributor utama dalam pendapatan daerah, yakni sebesar Rp748,12 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan dari sisi belanja daerah, terjadi penurunan belanja yakni dari Rp1.136,02 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1.038,67 triliun di tahun 2020 atau turun sebesar

GAMBAR 5. PETA SPASIAL REALISASI APBD 2018 - 2020



sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

8,57 persen. Belanja pegawai masih menjadi kebutuhan belanja utama yang menyerap alokasi anggaran sebesar Rp367,27 triliun atau sekitar 35,36 persen dari total belanja, disusul kemudian oleh realisasi belanja barang sebesar Rp264,72 triliun (25,49 persen dari total belanja), dan belanja modal sebesar Rp151,50 triliun atau sekitar 14,59 persen dari total belanja daerah. Secara ideal, proporsi alokasi dan serapan belanja modal yang bersumber dari APBD hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih besar atau cenderung mendekati kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang, sehingga belanja yang bersifat investasi dapat memberikan stimulus yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi untuk tahun 2020 seluruh pemerintah daerah seharusnya berfokus pada program jaringan pengaman sosial untuk mendorong gairah perekonomian di daerah yang lesu akibat pandemic COVID-19. Dengan pendapatan daerah yang lebih besar daripada realisasi belanjanya, maka secara konsolidasi APBD dihasilkan angka surplus anggaran sebesar Rp14,73 triliun, ditambah dengan pembiayaan neto yang telah direalisasikan sebesar Rp93,06 triliun, maka SiLPA Daerah di tahun 2020 mencapai Rp107,79 triliun.

Di lihat secara spasial, pada tahun 2020 belanja daerah dikontribusikan secara signifikan oleh pemerintah daerah di regional Jawa sekitar 40,1 persen dari total belanja APBD konsolidasi, disusul oleh regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 24,4 persen. Sedangkan dari sisi postur APBD secara umum, dapat diketahui bahwa posisi surplus

defisit APBD konsolidasi dalam 3 tahun terakhir sangat dinamis, misalnya untuk regional Bali – Nusra pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp0,61 triliun setelah sebelumnya mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp0,89 triliun di tahun 2019. Dari sisi kemandirian fiskal daerah, regional Jawa memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya dengan kontribusi PAD sebesar 38,34 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan dana transfer berkontribusi sebesar 58,32 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa regional Jawa memiliki kemampuan lebih besar dalam memperoleh PAD yang akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk untuk infrastruktur atau belanja signifikan lain yang lebih banyak sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi regionalnya. Sementara itu, meskipun selama tiga tahun berturut-turut Maluku – Papua mengalami surplus anggaran, tingkat kemandirian regional ini masih kurang dengan kontribusi PAD hanya sebesar 5,7 persen. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga kesejahteraan di regional tersebut dapat meningkat.

4. KINERJA INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama (*ultimate goal*) dari setiap perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Pemerintah terus

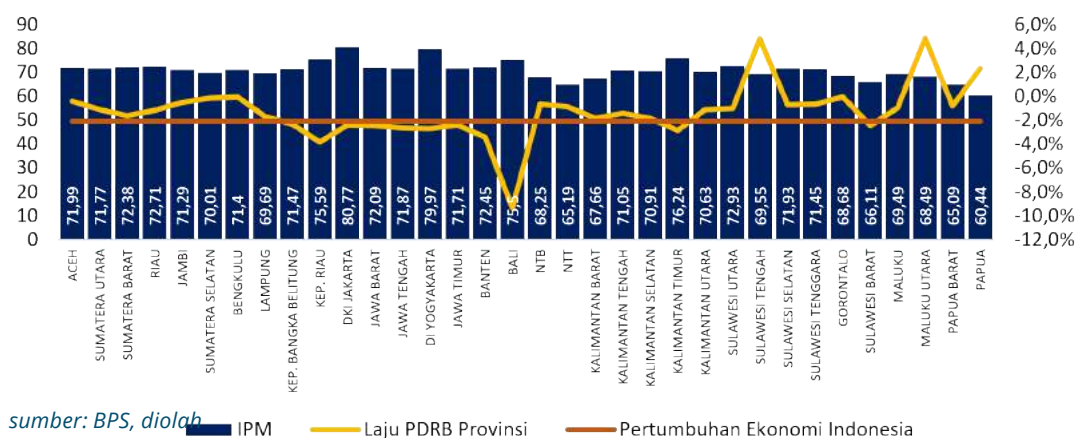
berupaya untuk membangun keselarasan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan perbaikan indikator kesejahteraan. Oleh sebab itu, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran yang menggambarkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin ke dalam 3 aspek, yaitu: akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak. Pada tahun 2020, tingkat IPM nasional telah mencapai angka 71,94 atau meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 71,92. Jakarta memiliki IPM tertinggi dan satu-satunya berkategori sangat tinggi mencapai 80,77, sedangkan provinsi Papua masih menjadi yang terendah dengan indeks sebesar 60,44 yang bahkan pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,40 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata IPM di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di KTI masih menjadi tantangan tersendiri.

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang secara bersama-sama merupakan target pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah idealnya dapat meningkat secara selaras atau dengan gap yang tidak terlalu besar. Berdasarkan hubungan kedua indikator yakni pertumbuhan ekonomi dan pencapaian IPM tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa nilai IPM yang tinggi dengan laju pertumbuhan perekonomian yang mengalami kontraksi tidak terlalu dalam diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (pertumbuhan -2,4 persen, IPM 80,77), DI Yogyakarta (pertumbuhan

-2,7 persen, IPM 79,97), dan Provinsi Kalimantan Timur (pertumbuhan -2,9 persen, IPM 76,24). Ketiga provinsi tersebut mengalami kontraksi laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memiliki nilai IPM tertinggi yang mengindikasikan bahwa meskipun sektor ekonomi mengalami kejenuhan dan membutuhkan investasi baru, namun pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional dan daerah yang bisa dipertahankan pada level dasar seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan. Provinsi Papua meskipun memiliki nilai IPM yang paling rendah dengan angka 60,44, tetapi mengalami peningkatan laju perekonomian sebesar 2,3 persen. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang mencapai 4,9 persen dengan nilai IPM masing-masing sebesar 69,55 dan 68,49.

Dari indikator kesejahteraan yang lain, tingkat kemiskinan nasional meningkat dari 9,22 persen di tahun 2019 menjadi 10,18 persen di tahun 2020. Jumlah penduduk miskin menjadi bertambah dari 24,78 juta orang (2019) menjadi sebanyak 27,55 juta orang di tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan terjadi sebagai akibat pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perekonomian Indonesia terguncang hebat, mobilitas manusia terhenti, banyak lapangan usaha yang harus gulung tikar, serta banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Provinsi Banten dan Jawa Barat menjadi provinsi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi dengan peningkatan masing-masing sebesar 1,69 dan 1,61 persen. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah menjadi

GAMBAR 6. KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM REGIONAL TAHUN 2020



provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,04 dan 0,12 persen. Terlepas dari peningkatan jumlah penduduk miskin secara nasional yang cukup tinggi, pemerintah senantiasa berupaya untuk melakukan pemulihan atas kondisi tersebut, meskipun saat ini masih diliputi ketidakpastian.

Pada tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan dengan nilai rasio gini dari 0,380 pada tahun 2019 menjadi 0,385 di tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan kondisi yang tidak diinginkan yaitu terdapat peningkatan atas tingkat ketimpangan pendapatan. Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan terendah dengan angka rasio gini mencapai 0,257 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,262, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dengan angka rasio gini sebesar 0,437 dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,428. Peningkatan indeks rasio gini secara nasional tersebut selaras dengan peningkatan tingkat kemiskinan yakni dari 9,22 persen (2019) menjadi 10,18 persen di tahun 2020. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 7,1 juta jiwa (2019) menjadi 9,77 juta jiwa pada tahun 2020. Peningkatan indikator-indikator perekonomian tersebut menunjukkan dampak yang sangat masif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Mencermati capaian indikator-indikator kesejahteraan yang memburuk, perbaikan kualitas masyarakat Indonesia menjadi sangat kompleks karena saat ini masih berada pada kondisi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, disamping banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu, diantaranya faktor geografis, kultur, sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk keinginan masyarakat untuk menerima perubahan agar menjadi lebih mandiri dan berdikari.

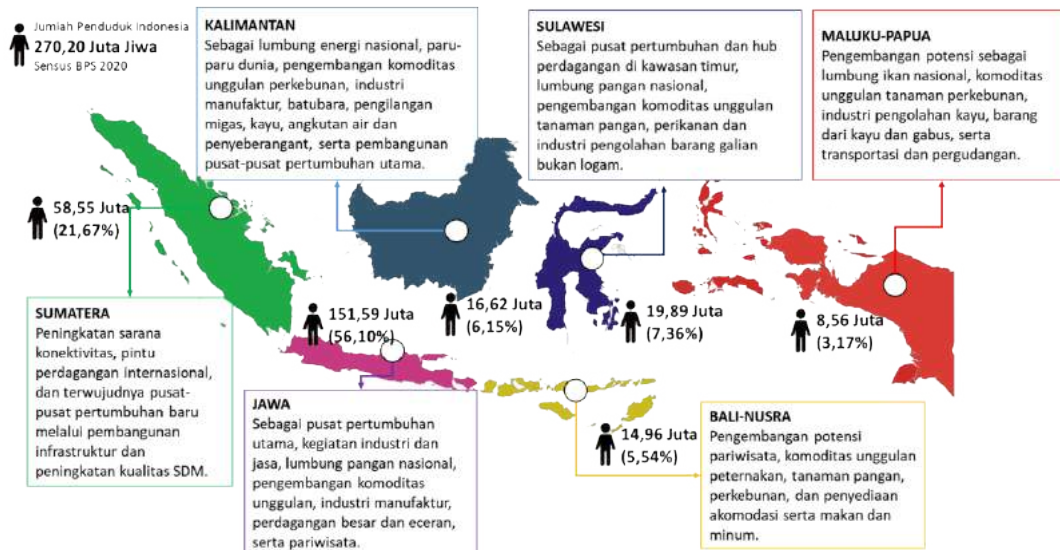
Pada indikator lainnya berupa indeks Nilai Tukar Petani (NTP), pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 101,65 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 100,9. Indeks tersebut menunjukkan bahwa para petani dapat menikmati surplus pendapatan atas hasil produksi yang dilakukan pada tahun 2020. Peningkatan angkut tersebut juga mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan petani. Provinsi Riau menjadi

provinsi dengan indeks NTP tertinggi pada tahun 2020 yang mencapai 118,79. Capaian tersebut merupakan pengulangan atas capaian pada tahun 2019, disisi lain terdapat empat belas provinsi dengan nilai NTP di bawah angka 100. Hal tersebut mengindikasikan masih banyak para petani yang belum sejahtera tersebar di empat belas provinsi tersebut karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi lebih tinggi dari pendapatan yang diterima. Selain itu pada indikator berupa indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN), pada tahun 2020 belum mengalami perubahan kearah yang lebih baik karena angka yang dicapai masih relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100,22. Meskipun terdapat surplus, nilainya masih sangat rendah, sehingga perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Provinsi Papua selama dua tahun berturut-turut menjadi provinsi dengan nilai NTN tertinggi dengan capaian tahun 2020 mencapai 110,52, akan tetapi di lain pihak terdapat sembilan belas provinsi dengan NTN di bawah angka 100. Berdasarkan data tersebut tingkat kesejahteraan nelayan masih lebih rendah daripada petani. Namun demikian, perlu menjadi perhatian bersama yang diwujudkan dalam suatu upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dua mata pencaharian yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia.

5. RESPON FISKAL PEMERINTAH

Kebijakan fiskal yang dituangkan dalam APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan yang langsung berdampak dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif harus memperhatikan kebutuhan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah, kultur masyarakat, dan potensi ekonomi pada masing-masing wilayah. Pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam RPJMN bertujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok wilayah melalui program-program berbasis infrastruktur dan ekonomi yang akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam mengalokasikan dana APBN dan APBD

GAMBAR 7. POTENSI EKONOMI DAERAH MENURUT REGIONAL



sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

tersebut. Kemandirian fiskal daerah harus semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya konstruktif, sehingga daerah semakin mampu dalam membiayai kebutuhan daerah.

Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi daerah, maka diperlukan sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan. Bertolak dari capaian kinerja perekonomian, fiskal, dan kesejahteraan di masing-masing regional, maka dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai berikut:

5.I. RESPON FISKAL PEMERINTAH MENURUT REGIONAL

5.I.A. SUMATERA

Dalam rangka mendukung sektor potensial Regional Sumatera yaitu sektor pariwisata dan perdagangan, pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai. Lokasi strategis Regional Sumatera yang memiliki kepadatan lalu lintas laut yang tinggi harus didukung dengan pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, dan pelabuhan. Pembangunan tersebut akan menghasilkan konektivitas yang baik di Regional Sumatera sehingga dapat mendukung distribusi hasil produksi pertanian, pertambangan, dan penggalian, serta memperluas aksesibilitas sektor perdagangan, sehingga seluruh wilayah

di Regional Sumatera akan merasakan dampak lokasi strategis Regional Sumatera secara lebih merata. Masih tingginya tingkat kemiskinan pada beberapa provinsi di regional ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang perlu segera dipecahkan. Upaya pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan program bantuan sosial yang lebih meluas dan tepat sasaran. Selain itu, momentum peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan KUR harus terus dijaga dan lebih memperluas target pemanfaatan KUR dengan memprioritaskan para petani dan nelayan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan para petani dan nelayan secara lebih luas. Selain itu, pemerintah juga dapat memperluas cakupan penerima bantuan benih dan bantuan peralatan bagi para nelayan.

5.I.B. JAWA

Meskipun mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, Regional Jawa masih menjadi pusat roda perekonomian Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka penyelarasan program-program yang mampu memberikan jalan yang mampu mengakselerasi perkembangan sektor potensial unggulan dan potensial Regional Jawa. Momentum bonus demografi yang sedang dialami oleh Regional Jawa harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga dapat semakin meningkatkan perkembangan perekonomian Regional Jawa. Keran aliran dana investasi perlu

dibuka semakin lebar guna mendukung momentum yang sedang dialami Regional Jawa, melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif seperti simplifikasi atau kemudahan perizinan investasi dan jaminan keamanan bagi para investor.

5.I.C. KALIMANTAN

Pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penggalan potensi Regional Kalimantan yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Meskipun sudah berada di bawah tingkat ketimpangan pendapatan nasional, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk terus mengurangi tingkat ketimpangan di Regional Kalimantan agar menjadi semakin lebih baik lagi. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah harus dilakukan sehingga tingkat kesenjangan dapat berkurang. Optimalisasi potensi hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit, pengembangan food estate dalam rangka mendukung ketahanan pangan, dan penggalan potensi kehutanan yang senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan membuka akses investasi bagi pihak swasta, khususnya kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Upaya tersebut dapat didukung oleh regulasi yang tegas, jelas, dan yang memudahkan pemberian izin usaha bagi para pelaku usaha agar menjalankan usaha dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan. Sebagai Regional yang besar, tingkat pemanfaatan program KUR masih sangat minim dan kalah dibandingkan regional lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi pemanfaatan KUR untuk mendorong pemanfaatan program oleh para pelaku usaha kecil dan menengah di regional ini. Selanjutnya, pemerataan pelayanan dasar juga harus terus dilakukan karena masih terdapat provinsi yang tertinggal dibandingkan provinsi lain di Regional Kalimantan.

5.I.D. SULAWESI

Lokasi strategis Regional Sulawesi sebagai gerbang masuk wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus didukung dan dimanfaatkan oleh pemerintah seoptimal mungkin. Dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu poin penting bagi perkembangan di wilayah ini.

Infrastruktur yang mendukung dapat menarik investasi dari berbagai pihak, khususnya dari pihak swasta mengingat Regional Sulawesi memiliki potensi yang tinggi pada sektor industri pengolahan. Selain itu, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi udara dapat mendukung kemajuan sektor pariwisata dengan kemudahan akses terhadap destinasi wisata di Regional Sulawesi. Dengan begitu, aktivitas perekonomian di Regional Sulawesi dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang tinggi pada mayoritas provinsi di Regional Sulawesi. Pemerintah juga dapat memanfaatkan berbagai program dalam implementasinya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM sebagai pelaku usaha, dan Dana Desa untuk mendorong pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.

5.I.E. BALI-NUSRA

Regional Bali-Nusra menjadi regional yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi paling dalam dibandingkan dengan regional lainnya sebagai akibat dari pembatasan mobilitas manusia selama masa pandemi COVID-19. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi Regional Bali-Nusra. Tingkat ketergantungan regional Bali-Nusra kepada sektor pariwisata cukup tinggi, sehingga pemerintah perlu menggali sektor potensial lain yang dapat mendorong perekonomian di regional ini. Namun demikian, bukan berarti sektor pariwisata harus ditinggalkan, pemerintah perlu tetap mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui pembagunan infrastruktur sehingga status Bali-Nusra sebagai destinasi utama bagi para wisatawan domestik dan mancanegara dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan intra wilayah. Selain itu, program dan kegiatan dalam APBN dan APBD harus diarahkan untuk mendukung geliat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di regional ini.

5.I.F. MALUKU-PAPUA

Pemerintah perlu untuk terus mendorong

peningkatan kemandirian Regional Maluku-Papua. Upaya pemerintah dapat dimulai dengan upaya untuk mengentaskan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi serta meningkatkan indeks IPM yang masih rendah melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar hidup lainnya seperti penyediaan sumber daya penunjang berupa pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar. Selain itu, respon fiskal pemerintah perlu diarahkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Pembangunan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap daerah-daerah yang selama ini sulit untuk dijangkau. Dengan begitu alur distribusi produk yang dihasilkan serta kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan lancar dan biaya yang dikeluarkan dapat ditekan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat mendukung aksesibilitas terhadap objek-objek wisata yang ada di regional ini, sehingga potensi setor pariwisata yang ada di regional Maluku-Papua dapat berkembang dengan lebih baik. Formulasi alokasi Dana Desa wilayah Maluku-Papua, khususnya Papua dan Papua Barat, perlu mendapat perhatian khusus terutama pada besaran persentase alokasi afirmasi, mengingat tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan masih tertinggalnya infrastruktur desa-desa di Papua. Program-program lainnya seperti PKH dan Bantuan Langsung baik Tunai, maupun non Tunai dapat diprioritaskan dalam seiring tingginya tingkat kemiskinan di Regional Maluku-Papua.



BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH BERDASARKAN RPJMN TAHUN 2020-2024

Upaya Pemerintah dalam mencapai arah pembangunan wilayah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 harus menghadapi tantangan yang besar pada tahun 2020 ini. Merebaknya pandemi COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020, telah mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai bidang, khususnya perekonomian Indonesia.

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 mulai mengalami perlambatan, sehingga Pemerintah memutuskan untuk membatasi alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan dan program prioritas nasional dalam rangka mencapai arah pembangunan wilayah dan mengalihkan fokus untuk memberikan dukungan finansial dan non finansial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 serta melakukan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi nasional melalui program PC-PEN.

Kebijakan tersebut berdampak positif yang direpresentasikan dengan mulai membaiknya perekonomian Indonesia yang terasa sejak triwulan III tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah bekerja keras untuk terus menjaga momentum perbaikan perekonomian Indonesia ini, sehingga akselerasi upaya-upaya dalam rangka mencapai arah pembangunan wilayah dapat segera dieksekusi dengan sepruden mungkin, mengingat kondisi saat ini yang masih diliputi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir.

1. PENDAHULUAN

Sasaran pembangunan kewilayahan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan RPJMN 2020-2024, arah pembangunan kewilayahan setidaknya memiliki empat sasaran sebagaimana terdapat pada gambar arah pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan arah pembangunan

kewilayahan melalui strategi pertumbuhan dan pemerataan, maka perlu diidentifikasi isu strategis kependudukan yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan, yakni Indonesia mengalami permasalahan komposisi demografi yang tidak merata (terkonsentrasi di Pulau Jawa), permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Oleh sebab itu, program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan agar pembangunan dan pemerataan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat menuju visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Secara demografi, konsentrasi penduduk Indonesia secara signifikan berada di Pulau Jawa yakni sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen

GAMBAR 8. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024



Sumber : RPJMN 2020-2024, diolah

TABEL 1. JUMLAH PENDUDUK, KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TAHUN 2020

No	Regional	Jumlah Penduduk		Kemiskinan		Pengangguran		Ketimpangan Pendapatan (rata-rata)
		Jumlah (Juta Jiwa)	%	Jumlah (Juta Jiwa)	%	Jumlah (Juta Jiwa)	%	
1	Sumatera	58,55	21,67	6,06	22,02	1,81	18,54	0,314
2	Jawa	151,59	56,10	14,75	53,55	6,38	65,36	0,387
3	Kalimantan	16,62	6,15	1,02	3,69	0,46	4,72	0,326
4	Sulawesi	19,89	7,36	2,06	7,48	0,53	5,42	0,370
5	Bali-Nusra	14,96	5,54	2,12	7,68	0,37	3,89	0,370
6	Maluku-Papua	8,56	3,17	1,54	5,58	0,20	2,07	0,347
	NASIONAL	270,20	100	27,55	100	9,76	100	0,385

Sumber : RBPS, diolah

penduduk Indonesia, pun demikian dengan jumlah penduduk miskin sebesar 14,75 juta jiwa (54,55 persen nasional), dan angka pengangguran sebesar 6,38 juta jiwa (65,36 persen). Oleh karena itu, sasaran pembangunan terus diarahkan untuk mengatasi ketimpangan wilayah, khususnya dengan kawasan di luar Jawa agar pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan dikembangkan dapat memberikan kesempatan untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehingga akan menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan semakin mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat.

Dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, regional Jawa tetap memegang peranan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusinya sebesar Rp 9.273,31 triliun atau 58,75 persen PDB Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi regional di tahun 2020 di semua wilayah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, namun Pemerintah

terus berupaya menggunakan segala instrumen kebijakan ada termasuk fiskal untuk membalikkan pertumbuhan ekonomi agar kembali tumbuh positif sesuai target di tahun 2024. Distribusi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan bagi kawasan di luar Pulau Jawa untuk mengembangkan sektor unggulan, potensi, dan kawasan strategis wilayah.

Dalam perspektif jangka menengah, pada RPJMN Tahun 2020-2024 pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu: (1) strategi pertumbuhan; dan (2) strategi pemerataan, sesuai dengan gambar 2.

1. Strategi pertumbuhan merupakan agenda transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan. Fokus pembangunan adalah pada koridor penting di setiap pulau dan kepulauan yang dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan dalam lima tahun mendatang. Identifikasi koridor pertumbuhan di setiap pulau dan kepulauan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi basis-basis perekonomian utamanya di luar Jawa.

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TAHUN 2020 DAN TARGET 2024

No	Regional	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per Kapita (juta rupiah)	Target Pertumbuhan di 2024
		Jumlah (Juta Jiwa)	%			
1	Sumatera	3.371,97	21,36	-1,19%	57,58	4,86-5,57%
2	Jawa	9.273,31	58,75	-2,51%	61,17	5,84-6,15%
3	Kalimantan	1.253,20	7,94	-2,27%	75,38	4,12-5,74%
4	Sulawesi	1.052,03	6,66	0,23%	52,87	6,98-7,35%
5	Bali-Nusra	464,24	2,94	-5,01%	31,03	3,74-4,74%
6	Maluku-Papua	370,90	2,35	1,44%	43,28	5,95-7,69%
	NASIONAL	15.785,67	100	-2,07%	58,42	

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 9. STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024



Sumber : RPJMN 2020-2024, diolah

Basis-basis perekonomian yang telah diidentifikasi adalah: (1) pusat pengolahan sumber daya alam; (2) kawasan strategis pariwisata; dan (3) pusat pelayanan jasa termasuk metropolitan dan kota-kota baru pendukung metropolitan. Fokus pengembangan kawasan strategis melalui Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di basis perekonomian utama tersebut, diperlukan penguatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi besar, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana transportasi, listrik dan komunikasi.

2. Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Fokus pembangunan adalah daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat diberikan input untuk mengejar pertumbuhan di koridor pertumbuhan terdekatnya melalui pengembangan kawasan strategis berupa Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pemerataan pembangunan antarwilayah kota-desi. Identifikasi koridor pemerataan difokuskan pada daerah administratif yang dapat didorong secara cepat pertumbuhannya, dengan penyediaan infrastruktur dasar. Basis-basis pemerataan yang telah diidentifikasi utamanya adalah daerah tertinggal, daerah transmigrasi, kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan perbatasan.

3. Strategi pertumbuhan dan pemerataan

membutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Selain itu, dibutuhkan pula keterkaitan antarwilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumber daya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Kedua strategi tersebut dikembangkan untuk mencapai sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia di kedua koridor tersebut, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, termasuk pemerintah desa sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan di kedua koridor tersebut.

2. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Sasaran pembangunan kewilayahan menggunakan pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan yang berbasis pada wilayah 6 wilayah kepulauan utama, yaitu: regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

2.1. REGIONAL SUMATERA

Regional Sumatera terdiri dari 10 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung,

Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan jumlah penduduk sebanyak 58,55 juta jiwa atau 21,67 persen penduduk nasional, wilayah Sumatera memiliki sumber dan potensi ekonomi



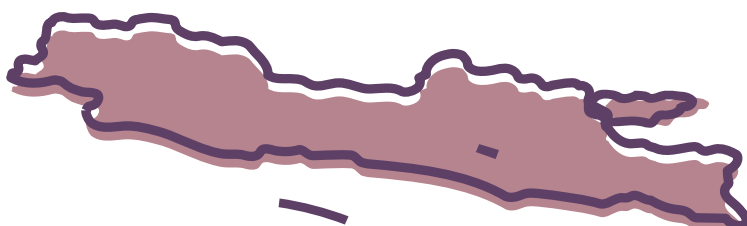
yang signifikan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan, serta diarahkan sebagai salah satu wilayah swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera di tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,19 persen dibandingkan dengan ekonomi di tahun 2019 yang tumbuh positif sebesar 4,57 persen, dan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah sebesar Rp3.371,97 triliun atau 21,36 persen. Indikator kesejahteraan mencatat capaian dimana rata-rata IPM tahun 2020 adalah sebesar 71,83 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 71,79, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 adalah sebesar 6,06 juta jiwa atau 22,02 persen dari total penduduk miskin nasional, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,314, dan jumlah pengangguran sebesar 1,81 juta jiwa atau 18,54 persen dari jumlah pengangguran nasional.

Fokus pemerintah untuk pembangunan di wilayah ini adalah peningkatan sarana konektivitas dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Posisi strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional dapat digunakan sebagai modal dalam mewujudkan pusat industri yang berdaya saing seperti industri kimia dasar, pangan, elektronika, dan kapal. Sektor jasa akan didorong melalui pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau

Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN) serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), diantaranya: KI/KEK Galang Batang, KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Seimangke, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Tanggamus, KI Way Pisang, KI Sadai, KEK Tanjung Api-api, DPP Danau Toba, DPP/KEK Tanjung Kelayang, Destinasi Potensial Sabang/KPBPB Sabang, Destinasi Potensial Padang-Bukittinggi, Destinasi Potensial Batam-Bintan, KPBPB Batam Bintan Karimun, Destinasi Potensial Palembang, TN/KSPN Gunung Leuseur, TN Batang Gadis, TN/KSPN Gunung Kerinci Seblat, TN/KSPN Siberut, optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) Medan dan WM Palembang termasuk rencana investasi dan rencana pembiayaan pembangunan; pengembangan PKSN Ranai dan Sabang termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

2.II. REGIONAL JAWA

Regional Jawa terdiri dari 6 provinsi, yaitu: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Dengan jumlah penduduk sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk nasional, wilayah Jawa merupakan penggerak ekonomi nasional dan pusat kegiatan industri nasional. Keunggulan wilayah ini adalah pertanian yang di dukung oleh kondisi tanah yang cocok untuk produksi pangan, ketersediaan



dan kualitas infrastruktur serta SDM yang lebih memadai, dan posisi strategis secara geografis maupun ekonomis sebagai hub dalam perdagangan domestik maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa di tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,52 persen dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang mengalami ekspansi sebesar 5,52 persen, dan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah sebesar Rp 9.273,31 triliun atau 58,75 persen. Indikator kesejahteraan mencatat rata-rata IPM tahun 2020 adalah sebesar

74,81 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,74, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 adalah sebesar 14,75 juta jiwa atau 53,55 persen dari jumlah penduduk nasional, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,387 atau meningkat dari capaian tahun lalu di angka 0,383, dan jumlah pengangguran sebesar 6,38 juta jiwa atau 65,36 persen dari jumlah pengangguran nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, pengembangan wilayah Pulau Jawa diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta mempertahankan peran lumbung pangan nasional, melalui pengembangan komoditas unggulan yaitu industri manufaktur antara lain industri pengolahan tembakau dan industri kulit, barang dari kulit, dan perdagangan besar dan eceran, pariwisata dan pangan; dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti: KI Madura, DPP/KEK Tanjung Lesung, DPP Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Potensial Bandung-Pangandaran, Destinasi Potensial Banyuwangi, TWA Kamojang, TWA Papandayan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN/KSPN Gunung Merapi, TN/KSPN Gunung Merbabu, TN/KPPN Alas Purwo, TN/KPPN Meru Betiri, TN/KSPN Baluran, TWA Kawah Ijen, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan. Selain itu juga mempertahankan pertumbuhan dan daya dukung lingkungan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar; dan pengembangan kawasan perdesaan.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi, menggalakkan proyek-proyek infrastruktur padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, juga pembangunan yang menyentuh potensi unggulan daerah setempat dari hulu ke hilir sehingga komoditas unggulan dapat terserap oleh pasar. Selain itu, pemberian stimulus fiskal berupa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun alokasi Dana Desa terus senantiasa dibangun dengan data yang valid sehingga penyaluran bantuan sosial maupun

dana desa menjadi tepat sasaran dan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

Regional Kalimantan terdiri dari 5 provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 16,62 juta jiwa atau 6,15 persen penduduk nasional, wilayah Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Mengingat Kalimantan di



dominasi kawasan hutan dan merupakan paru-paru Indonesia maka kelestariannya harus di jaga dengan konsep agroforestry. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan di tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,27 persen dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 4,99 persen, dan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah sebesar Rp 1.253,20 triliun atau 7,94 persen. Indikator kesejahteraan mencatat capaian dimana rata-rata IPM tahun 2020 adalah sebesar 71,30 atau mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 71,41, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 adalah sebesar 1,01 juta jiwa atau 3,69 persen dari total penduduk miskin nasional, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,326, dan jumlah pengangguran sebesar 460,69 ribu jiwa atau 4,72 persen dari jumlah pengangguran nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan

memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia, melalui pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan.; optimalisasi WM Banjarmasin; pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan; pengembangan PKSN Jagoi Babang, Nunukan, Entikong, Paloh-Aruk, dan Nanga Badau, Jasa, Long Midang, Long Nawang, Tou Lumbis termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas daerah perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Di wilayah Kalimantan, peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih dapat ditingkatkan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan indikator kesejahteraan di wilayah tersebut dan mewujudkan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu, guna mendukung pengembangan sektor tersebut diperlukan dukungan alokasi fiskal daerah maupun dari pemerintah pusat melalui DAK. Disamping itu juga dalam rangka mendukung program hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit dan pengembangan pariwisata dan mengingat luasnya geografis wilayah Kalimantan, pemerintah pusat dan daerah fokus membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi baik jalur air maupun darat, disamping udara. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

2.IV. REGIONAL SULAWESI

Regional Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 19,89

juta jiwa atau 7,36 persen penduduk nasional, wilayah Sulawesi merupakan penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan keunggulannya pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan



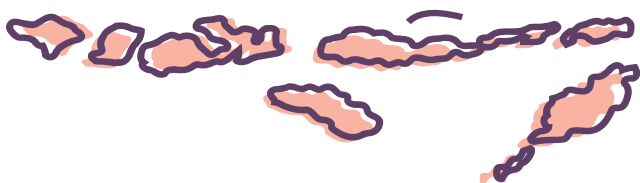
pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi di tahun 2020 tumbuh sebesar 0,23 persen, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 6,65 persen, dan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah sebesar Rp 1.052,03 triliun atau 6,66 persen. Indikator kesejahteraan mencatat rata-rata IPM tahun 2020 adalah sebesar 70,11 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 69,93, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 adalah sebesar 2,06 juta jiwa atau 7,48 persen dari jumlah penduduk nasional, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,370 atau membaik dari capaian tahun lalu di angka 0,378, dan jumlah pengangguran sebesar 529,84 ribu jiwa atau 5,42 persen dari jumlah pengangguran nasional. Meskipun perekonomian tumbuh positif di tengah pandemi, Sulawesi masih mengalami permasalahan terkait produktivitas SDM, inklusifitas, dan pemerataan kesejahteraan serta hasil pembangunan.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah yang relatif tinggi, memantapkan perannya sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di kawasan timur serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional, melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan antara lain industri barang galian bukan logam; dan pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti optimalisasi WM Makassar dan WM Manado; KI/KEK Palu, KI/KEK Bitung, DPP Wakatobi, Destinasi Potensial Makassar-SelayarToraja, Destinasi Potensial Manado-Bitung, TN/KPPN Bantimurung Bulusaraung, TN/KSPN Takabonerate, TN/KPPN Rawa Aopa Watumohai, TWA Tangkoko serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan; Pengembangan PKSN Tahuna termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; Pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, ditambah dengan pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat untuk membangun kemandirian ekonomi.

2.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Regional Bali-Nusa Tenggara meliputi 3 provinsi, yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan jumlah penduduk sebanyak 14,96 juta jiwa atau 5,54 persen penduduk nasional, wilayah Bali-Nusa Tenggara merupakan penggerak perekonomian nasional dengan sektor pariwisatanya, beberapa sektor di pertanian, perkebunan, dan peternakan.



Pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,01 persen, jauh menurun dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 5,07 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap PDB Nasional adalah sebesar Rp 464,24 triliun atau 2,94 persen. Indikator kesejahteraan mencatat

rata-rata IPM tahun 2020 adalah sebesar 69,65 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 69,58, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 adalah sebesar 2,11 juta jiwa atau 7,68 persen dari jumlah penduduk miskin nasional, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,370 atau meningkat dari capaian tahun lalu di angka 0,366, dan jumlah pengangguran sebesar 379,81 ribu jiwa atau 3,89 persen dari jumlah pengangguran nasional. Berdasarkan indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut dapat diindikasikan bahwa Bali-Nusa Tenggara mengalami permasalahan terkait produktivitas SDM dan pemerataan hasil pembangunan khususnya antara Pulau Bali dan pulau nusa tenggara lainnya.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, pengembangan wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan potensi wilayah di bidang pariwisata, peternakan, dan perkebunan serta mempercepat pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, dan penyediaan akomodasi dan makan dan minum; dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, seperti WM Denpasar, DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo, TN/KSPN Gunung Rinjani, TWA Gunung Tunak, TN/KSPN Komodo, TN/KSPN Gunung Tambora, TN/KSPN Kelimutu, taman wisata perairan dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan; pengembangan Kota Pelabuhan di Mataram dan Kupang; pengembangan PKSN Atambua dan Kefamenanu termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Regional Maluku-Papua meliputi 4 provinsi, yaitu: Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Wilayah Maluku-Papua dengan jumlah penduduk sebanyak 8,56 juta jiwa atau 3,17 persen penduduk merupakan wilayah yang berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pertanian dan kehutanan, hilirisasi industri pengolahan berbasis agro serta pertambangan dan penggalan minyak, gas bumi, emas, tembaga, dan nikel. Ekonomi Maluku-Papua di tahun 2020 mampu tumbuh positif sebesar 2,35



persen atau meningkat dari pertumbuhan di tahun 2019 sebesar minus 7,40 persen. Kontribusinya terhadap PDB Nasional tahun 2020 adalah sebesar Rp 370,90 triliun atau 2,35 persen. Indikator kesejahteraan mencatat rata-rata IPM tahun 2020 adalah sebesar 65,88 atau menurun dari tahun 2019 sebesar 65,92, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 adalah sebesar 1,53 juta jiwa atau 5,58 persen dari jumlah penduduk miskin nasional, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,347 atau membaik dari capaian tahun lalu di angka 0,351, dan jumlah pengangguran sebesar 202,64 ribu jiwa atau 2,07 persen dari jumlah pengangguran nasional. Maluku-Papua mengalami permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, produktivitas SDM dan pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan potensi wilayah serta memantapkan perannya sebagai lumbung ikan nasional, melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan, perikanan, industri pengolahan antara lain industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain, dan transportasi dan pergudangan; dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti: KI Teluk Weda, DPP/KEK Morotai, pengembangan Kota Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon; Pengembangan PKSN Saumlaki termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Sedangkan di Papua, pengembangan wilayah diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan,

dan mempercepat pembangunan manusia, melalui pengembangan komoditas unggulan perikanan, tanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijih logam dan angkutan laut; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti: KI Teluk Bintuni, KEK Sorong, KSPN/Destinas Potensial Raja Ampat, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan pengembangan kota pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke; Pengembangan PKSN Jayapura, Merauke, dan Tanah Merah termasuk ekonomi kawasan sekitarnya.

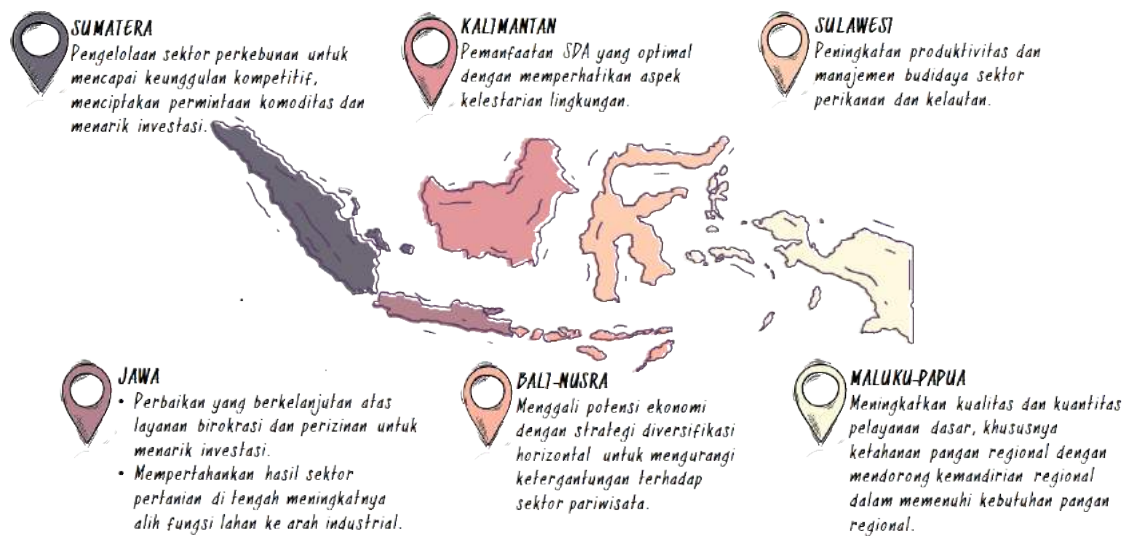
3. TANTANGAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai/mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, menghadapi berbagai tantangan yang menjadi isu strategis dan berdampak signifikan terhadap proses pencapaian sasaran strategis. Tantangan tersebut bisa muncul baik dari sisi potensi dan kesempatan daerah yang dapat mendorong pencapaian sasaran strategis, tetapi tidak berhasil dimanfaatkan secara optimal, maupun dari kendala dan ancaman lingkungan eksternal daerah yang masih belum mampu diatasi dengan baik oleh daerah bersangkutan. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah harus tetap memperhatikan tantangan yang muncul dari aspek perekonomian daerah, sosial kependudukan, dan geografi wilayah serta mengedepankan aspek pembangunan yang berkelanjutan.

3.1. TANTANGAN EKONOMI DAERAH

Secara umum, tantangan-tantangan yang muncul dari aspek ekonomi daerah dapat berupa pengelolaan potensi sumber daya alam, menciptakan iklim dan potensi investasi yang kondusif, birokrasi dan pelayanan perizinan, dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan termasuk angkatan kerja dan produktivitasnya. Tantangan-tantangan tersebut dihadapi oleh hampir seluruh regional sehingga telah menjadi tantangan nasional yang perlu dilewati bersama. Namun, masing-masing regional memiliki urgensi penyelesaian yang berbeda sesuai dengan potensi dan kendala yang muncul berdasarkan masing-masing karakteristik regional. Tantangan yang memiliki urgensi tinggi bagi masing-masing regional dapat dilihat pada

GAMBAR 10. PETA TANTANGAN ASPEK EKONOMI DAERAH



Sumber : KFR Provinsi Tahun 2020, diolah

gambar Peta Tantangan Aspek Ekonomi Daerah.

Regional Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya dari sektor perkebunan. Komoditas unggulan dari regional Sumatera antara lain kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, tebu, coklat, dan sebagainya. Komoditas perkebunan yang sebagian besar hasilnya diperdagangkan keluar daerah atau bahkan ke mancanegara, telah menjadi penyokong perekonomian regional Sumatera. Pemanfaatan atas potensi tersebut saat ini masih belum optimal karena kompetensi SDM untuk menggali potensi tersebut masih kurang, infrastruktur pendukung, khususnya pendukung konektivitas antar daerah, untuk distribusi produk masih kurang, serta rumitnya birokrasi dan pelayanan perizinan yang dapat menghambat masuknya investasi menjadi tantangan-tantangan yang perlu diatasi dengan baik.

Regional Jawa telah menjadi pusat industri di Indonesia, bahkan alih fungsi lahan menjadi industrial semakin gencar dilakukan. Peluang ini harus mampu dimanfaatkan dengan baik agar memberikan keuntungan perekonomian yang optimal. Regional Jawa perlu membenahi birokrasi dan pelayanan perizinan menjadi lebih sederhana sehingga dapat menarik lebih banyak investasi untuk masuk. Namun, peralihan fungsi lahan menjadi industrial perlu dikelola secara prudent. Hal ini dikarenakan regional Jawa merupakan salah satu penghasil produk sektor pertanian terbesar di Indonesia. Diharapkan alih fungsi ini dapat

berlangsung dengan tetap menjaga hasil produksi sektor pertanian.

Regional Kalimantan memiliki komoditas unggulan dari SDA, khususnya SDA migas dan sektor kehutanan. Namun pada pelaksanaannya, pemanfaatan SDA baik berupa migas, maupun yang berasal dari sektor kehutanan di regional ini sangat sensitif mengingat status regional Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sehingga perlu dikelola dengan baik dan prudent. Pengelolaan pemanfaatan SDA harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tidak dimanfaatkan semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan menjaga kualitas kehidupan manusia antar generasi.

Regional Sulawesi memiliki memiliki sektor perikanan yang menjadi komoditas unggulan. Hal ini didukung oleh budaya warga yang secara turun temurun memilih nelayan sebagai mata pencaharian utama. Namun, produktivitas hasil sektor perikanan regional Sulawesi di era sekarang ini masih dinilai kurang. Kompetensi nelayan dengan bekal budaya tradisional yang diwariskan secara turun temurun harus mulai dikolaborasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu mendorong produktivitas hasil perikanan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mendorong para nelayan mulai beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penangkapan ikan laut

dan budidayanya, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

Regional Bali - Nusra memiliki komoditas unggulan pada sektor pariwisata dengan beragam keindahan pantai yang menjadi keunggulan kompetitif regional Bali - Nusra di mata dunia. Momentum pergeseran preferensi konsumsi masyarakat pada era "*leisure economy*" ini perlu dimanfaatkan dengan baik. Regional Bali – Nusa Tenggara perlu memperbaiki pengelolaan dan meningkatkan intensitas promosi destinasi wisata, mengingat mulai bermunculannya destinasi wisata baru di berbagai belahan dunia yang dapat meningkatkan intensitas persaingan destinasi wisata. Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran bahwa tingkat ketergantungan regional Bali – Nusa Tenggara terhadap sektor pariwisata cukup tinggi. Perekonomian Bali – Nusa Tenggara sangat terguncang sebagai akibat pembatasan mobilitas masyarakat dan larangan operasional sektor pariwisata di masa awal pandemi. Bahkan, meskipun saat ini sudah terdapat kelonggaran untuk mobilitas masyarakat dan pembukaan destinasi wisata yang diiringi dengan pengelolaan pandemi yang sangat baik dari regional Bali – Nusra, perkembangan sektor pariwisata masih terasa lambat. Tercatat, regional Bali – Nusa Tenggara menjadi regional yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi paling dalam dibandingkan regional lain dan nasional yang mencapai -5,01%. Oleh karena itu, regional Bali – Nusa Tenggara perlu melakukan penggalian potensi ekonomi lain dengan strategi diversifikasi horizontal untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata yang dapat memitigas dampak kejadian luar biasa seperti saat ini di masa yang akan datang.

Regional Maluku – Papua memiliki kendala yang perlu segera dipecahkan sehingga perekonomian dapat berkembang lebih baik. Kendala tersebut berkaitan dengan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Regional – Maluku memiliki lahan yang luas dan potensial namun belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Saat ini tingkat kemandirian terkait ketahanan pangan regional ini masih rendah jika dibandingkan dengan regional lainnya. Oleh karena itu, perbaikan ekonomi dapat dimulai dengan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar

khususnya dengan meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong kemandirian regional untuk memenuhi kebutuhan pangan regional.

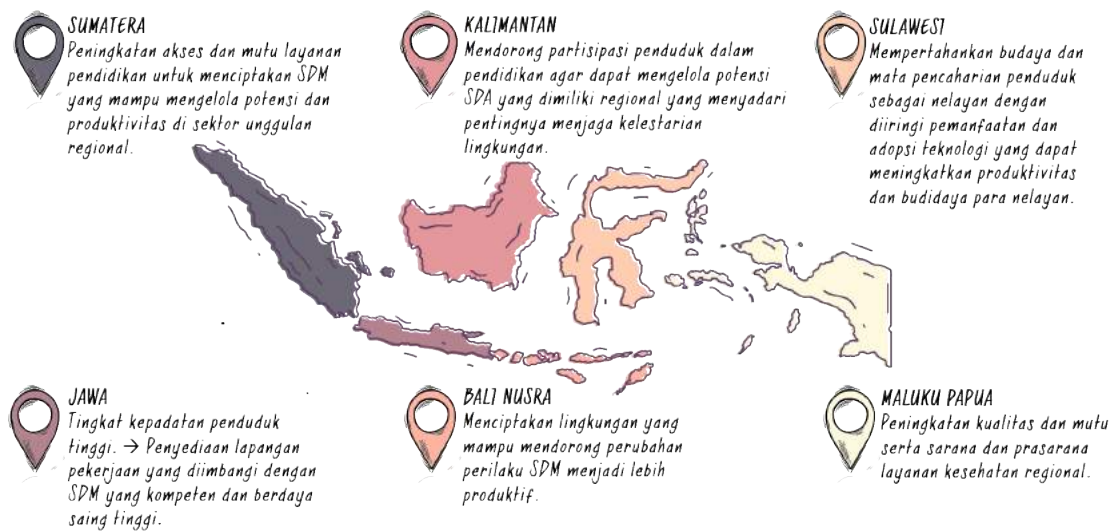
3.II. TANTANGAN SOSIAL KEPENDUDUKAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dari beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Keberagaman suku ini, menjadikan setiap regional memiliki ciri khas yang menjadi keunikan tersendiri bagi regional masing-masing. Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia sedang dihadapkan pada momentum berupa bonus demografi pada semua regional. Jumlah penduduk dengan usia produktif yang mencapai 70,72% lebih besar dibandingkan dengan penduduk dengan usia non-produktif (BPS, 2021). Bonus demografi ini akan berlangsung hingga beberapa tahun kedepan, sehingga momentum ini perlu dimanfaatkan dengan baik. Momentum ini dapat menjadi bumerang dan menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang dan berdampak masif, jika tidak dikelola dengan baik

Regional Sumatera memiliki potensi yang tinggi dari sektor perkebunan yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal apabila didongkrak oleh kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola perkebunan dengan baik. Kompetensi ini dapat terwujud dengan campur tangan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang terbuka secara luas, disertai dengan kualitas dan mutu layanan pendidikan, baik dari segi sarana dan prasarana, maupun tenaga pengajar, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pendidikan yang tinggi dari masyarakat regional Sumatera. Sumber daya manusia yang kompeten diharapkan mampu meningkatkan produktivitas regional Sumatera, khususnya untuk sektor perkebunan yang menjadi komoditas unggulan sektor ini.

Regional Jawa, sebagaimana data yang dihasilkan dari sensus penduduk tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BPS, ditinggali oleh 56,1% penduduk Indonesia. Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa saat ini penduduk masih terkonsentrasi di regional Jawa dan

GAMBAR 11. PETA TANTANGAN ASPEK EKONOMI DAERAH



Sumber : KFR Provinsi Tahun 2020, diolah

belum terdistribusi secara merata. Regional Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia sehingga memiliki daya tarik yang tinggi untuk ditinggali. Terkonsentrasinya penduduk Indonesia di regional Jawa menyebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk di regional ini, dimana hampir seluruh provinsi di regional Jawa (kecuali Jawa Timur) memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 1.000 orang per km². Meskipun secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk regional Jawa 2010 s.d. 2020 sebesar 0,945% lebih rendah dari laju pertumbuhan 2010 s.d. 2020 yaitu sebesar 1,25%, kepadatan yang tinggi ini harus dikelola agar tidak memberikan dampak negatif di kemudian hari. Urgensi penyediaan lapangan pekerjaan, menjadi hal yang penting dan menjadi prioritas karena jika penduduk dengan jumlah besar tidak terserap, akan menjadi permasalahan dalam perekonomian, khususnya di regional Jawa. Selain itu, pemerintah juga perlu mulai menyusun strategi untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi sehingga dapat mengundang aliran investasi masuk yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi.

Regional Kalimantan memiliki tingkat partisipasi sekolah yang cukup rendah, khususnya pada rentang umur 16 s.d. 18 dan 19 s.d.24 tahun yang masing-masing secara rata-rata sebesar 72,64% dan 25,29% (BPS, 2021). Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk masing-masing rentang umur tersebut masih berada di bawah APS Nasional yang masing-masing sebesar 72,72% dan 25,56%

(BPS, 2021). Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan regional ini. Potensi sumber daya alam yang begitu besar tidak akan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan regional, jika tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut. Pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Diharapkan dengan pendidikan yang cukup, masyarakat memiliki keahlian untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup karena tingkat kepedulian masyarakat asli yang berasal dari regional tersebut akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat yang berasal dari wilayah lain.

Regional Sulawesi memiliki masyarakat dengan budaya yang begitu kuat dan kental serta mengakar atas mata pencaharian sebagai nelayan yang perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik. Potensi yang begitu besar dari perikanan laut dan budidayanya sejalan dengan mata pencaharian yang merupakan budaya yang dimiliki, sehingga peluang ini harus mampu dimanfaatkan sebaik mungkin. Saat ini, proses penangkapan ikan laut dan budidayanya sebagian besar masih menggunakan cara tradisional dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sehingga dapat mengadopsi teknologi dalam menjalankan mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu,

pemerintah juga harus mendukung implementasi adopsi teknologi nelayan dengan sarana prasarana yang mendukung proses penangkapan ikan laut dan budidayanya, sehingga produktivitas nelayan dapat meningkat yang pada gilirannya dapat mengembangkan regional Sulawesi dengan baik.

Regional Bali – Nusra memiliki masyarakat dengan pola hidup yang konsumtif, tetapi kurang produktif. Hal ini sejalan dengan sektor unggulan, pariwisata, yang identik dengan pesta dan gaya hidup yang santai. Namun, pola hidup yang konsumtif ini, harus mulai dikurangi dan mengubahnya menjadi pola hidup yang produktif demi kebaikan perkembangan regional ini. Pemerintah dituntut mampu melakukan revolusi mental sehingga pola hidup masyarakat regional Bali – Nusa Tenggara dapat lebih produktif yang mampu menciptakan inovasi dan lebih giat mengelola sektor unggulan yang ada di regional Bali – Nusa Tenggara. Wisata alam yang menjadi primadona regional ini diharapkan dapat terawat dan terjaga dengan baik sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif regional Bali – Nusa Tenggara dalam destinasi wisata pantai yang indah.

Regional Maluku – Papua saat ini menjadi regional yang mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan regional lainnya. Untuk dapat mengejar ketertinggalan dari regional lainnya, dapat diawali dengan perbaikan kualitas dan mutu sarana prasarana kesehatan yang masih menjadi kendala yang pelik di regional ini. Perbaikan kualitas kesehatan ini dapat menjadi batu pijakan dengan menuntaskan berbagai permasalahan kesehatan yang dialami sumber daya manusia di regional ini yang salah satunya terkait dengan gizi buruk. Sumber daya manusia yang sehat, akan memiliki jiwa yang kuat dan diharapkan lebih mampu untuk melakukan berbagai pekerjaan, khususnya pekerjaan sehubungan dengan potensi yang dimiliki oleh regional ini. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur kesehatan yang lebih layak dan banyak, disertai dengan ketersediaan tenaga medis di regional ini. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menyediakan layanan dasar lainnya mengingat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti layanan sanitasi layak dan sumber air yang layak masih berada di bawah rata-rata nasional.

3.III. TANTANGAN GEOGRAFIS WILAYAH

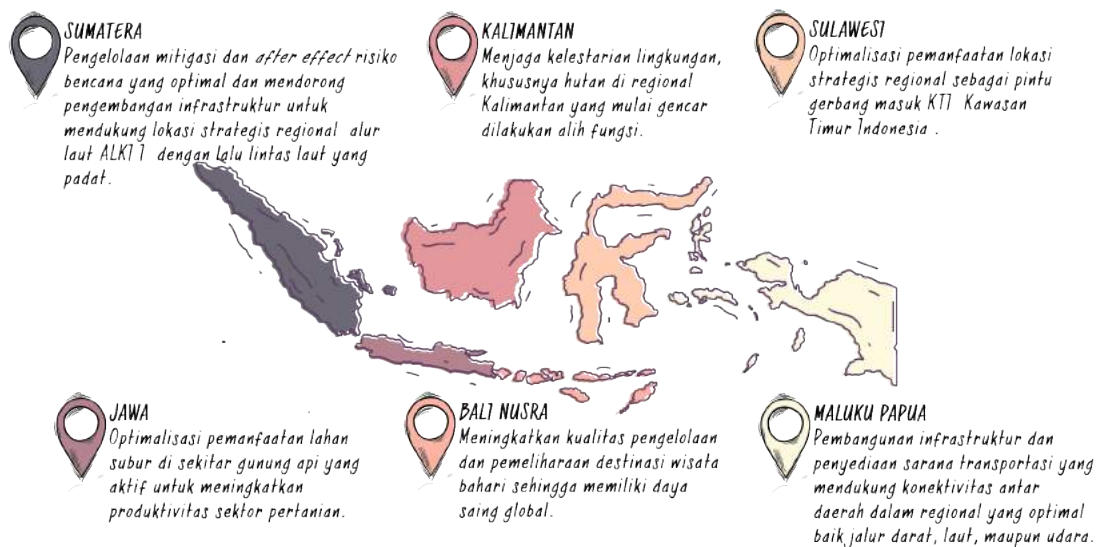
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.504 pulau dan dilintasi oleh garis khatulistiwa serta memiliki letak strategis karena berada di antara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Letak geografis Indonesia yang strategis ini memberikan keuntungan karena menjadi perlintasan lalu lintas baik laut, maupun udara. Namun, Indonesia juga memiliki tektonik yang kompleks karena terletak pada beberapa titik pertemuan lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia dan Australia, serta Lempeng Laut Filipina dan Lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung api aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memunculkan potensi risiko terjadinya bencana alam yang cukup tinggi, terutama dari gempa bumi dan letusan gunung api

Regional Sumatera berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang menyebabkan regional ini menjadi rawan bencana. Frekuensi gempa bumi di regional ini cukup tinggi, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan regional Sulawesi dan Maluku – Papua (BPS, 2021). Akan tetapi mengingat letak geografis yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang menyebabkan regional ini juga memiliki potensi risiko terjadinya tsunami, setiap kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi geografis tersebut. Pembangunan infrastruktur harus diarahkan ke arah infrastruktur yang mampu menyesuaikan diri dengan gempa bumi yang sering terjadi. Selain itu, pemerintah juga dapat mengalihkan risiko yang dimiliki ke pihak lain, sehingga jika bencana terjadi risiko tersebut sudah diampu oleh pihak lain (asuransi). Di sisi lain, letak geografis regional Sumatera berada pada lokasi

yang strategis karena berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut internasional terpadat. Kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dengan membangun infrastruktur yang mampu menopang perekonomian regional sesuai dengan letak geografis yang strategis ini.

Regional Jawa memiliki banyak gunung api aktif dengan jumlah yang melebihi regional lainnya

GAMBAR 12. PETA TANTANGAN DAERAH ASPEK GEOGRAFIS WILAYAH



Sumber : KFR Provinsi Tahun 2020, diolah

yang dapat memberikan risiko dan peluang bagi masyarakat sekitarnya. Banyaknya gunung api aktif ini dapat menimbulkan risiko bencana gunung meletus yang dapat mengganggu aktivitas dan merugikan masyarakat serta memerlukan upaya yang besar untuk proses pemulihan baik dari segi pembangunan, maupun psikologis masyarakat. Di sisi lain, terdapat dampak positif dari hasil bencana gunung meletus berupa lahan subur yang berada di sekitaran gunung tersebut. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang telah berkontribusi sebesar 56,20% terhadap hasil produksi beras nasional dan produk holtikultura lainnya (BPS, 2021). Hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengelola risiko yang ada dan menghasilkan manfaat dari hasil pengelolaan risiko yang baik.

Regional Kalimantan memiliki kekayaan alam yang melimpah baik dari sumber daya alam migas, maupun non migas. Selain itu, mayoritas wilayah regional Kalimantan terdiri dari hutan yang lebat dan menjadikannya sebagai paru-paru dunia. Namun, saat ini isu terkait eksploitasi hutan regional Kalimantan untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin gencar dan meresahkan seluruh dunia. Apabila hal ini terus terjadi tanpa ada upaya pencegahan dan upaya mengembalikan kondisi geografis ke kondisi semula akan mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menindaklanjuti isu ini agar kelestarian alam tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi

berikutnya.

Regional Sulawesi memiliki letak strategis sebagai pintu gerbang masuk wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini mengindikasikan padatnya arus lalu lintas laut di regional ini. Peluang ini harus dioptimalkan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dengan kualitas yang baik sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian penduduk regional Sulawesi. Dengan adanya pelabuhan dengan kualitas yang baik, diharapkan dapat menarik para pelaku perjalanan laut untuk singgah di regional ini. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan konektivitas antar daerah pada regional ini dengan penyediaan sarana prasarana transportasi baik darat, laut, dan udara, sehingga komoditas hasil produksi regional ini dapat terdistribusi dengan baik serta harga barang-barang yang menjadi kebutuhan penduduk dapat menjadi lebih murah.

Regional Bali – Nusra memiliki keindahan alam yang menjadikan regional ini memiliki keunggulan kompetitif yang sulit disaingi oleh wilayah lain di berbagai belahan dunia. Kemasyhuran keindahan alam regional Bali – Nusa Tenggara, terkadang melebihi Indonesia, orang asing lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Tanpa upaya yang besar regional Bali – Nusa Tenggara sudah memiliki magnet yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengunjungi Bali – Nusa Tenggara sebagai destinasi wisata. Namun demikian, kondisi tersebut bukan berarti tidak mengharuskan pemerintah melakukan berbagai

upaya untuk perbaikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengelola dan merawat objek yang menjadi destinasi wisata agar terjaga dengan baik dengan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga keunggulan kompetitif dari regional ini dapat tetap terjaga.

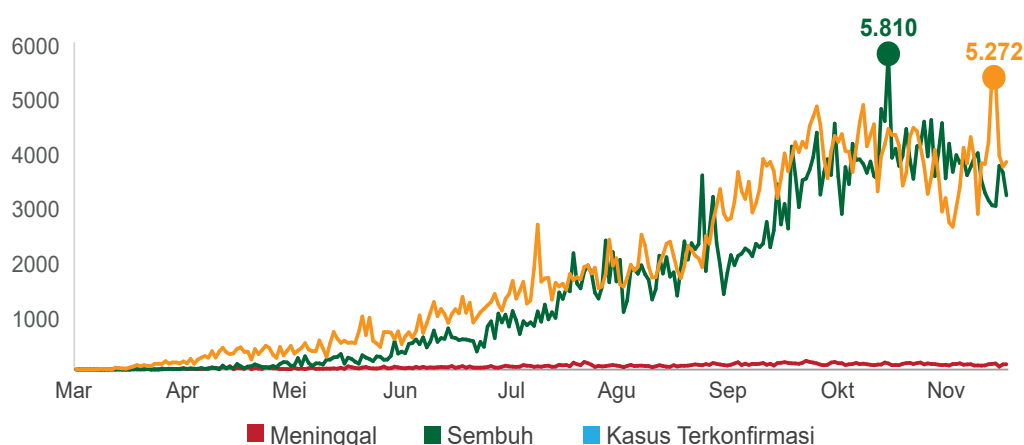
Regional Maluku – Papua merupakan regional paling timur di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah baik dari segi sumber daya alam, maupun keindahan alam yang mempesona. Namun, potensi tersebut selama ini belum terjamah karena infrastruktur di wilayah ini belum mendukung sehingga konektivitas antar daerah menjadi terhambat. Kekayaan alam yang dimiliki seperti gunung tertinggi dan kawasan laut terbaik yang saat ini mulai menjadi primadona destinasi wisata laut. Keterbatasan infrastruktur dan letak geografis yang jauh dari pusat perekonomian Indonesia menyebabkan biaya untuk mengakses regional ini menjadi mahal dan memerlukan upaya yang besar. Hal ini menjadi salah satu alasan masih minimnya perkembangan ekonomi di regional ini. Oleh karena itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pembangunan infrastruktur di regional ini harus menjadi prioritas dan menjadi tantangan pemerintah dalam mengawal dan mengelola pembangunan infrastruktur di regional ini. Setelah infrastruktur dan sarana prasarana memadai, bukan tidak mungkin perkembangan regional ini akan berkembang dengan pesat dan mengungguli perkembangan di regional lainnya.

3.IV. TANTANGAN PANDEMI COVID-19

Memasuki awal tahun 2020, Pemerintah dan masyarakat global harus menghadapi tantangan baru berupa pandemi COVID-19 yang meluas hingga ke tanah air dan seluruh pelosok daerah. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan luas menyebabkan sebagian besar daerah harus melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar/ Mikro (PSBB/M). Dampak pandemi COVID-19 tidak saja membahayakan kesehatan, tetapi juga berpotensi membahayakan kondisi sosial masyarakat, perekonomian nasional dan daerah, dan stabilitas sistem keuangan. Terjadinya pelemahan di berbagai sektor perekonomian sehubungan dengan penerapan kebijakan PSBB/M akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadikan hal ini sebagai kondisi yang luar biasa sehingga memerlukan penanganan dan langkah kebijakan yang memerlukan upaya yang ekstra dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

Sampai dengan 31 Desember 2020, penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Jumlah kasus baru pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai penambahan tertinggi di sepanjang tahun 2020 dengan 8.074 kasus, sehingga total kasus yang terkonfirmasi COVID-19 sepanjang tahun 2020 mencapai 743.198 kasus. Dari total 743.198 kasus tersebut, 611.097 kasus dilaporkan telah sembuh dan 22.138 kasus dilaporkan meninggal. Meskipun tingkat kesembuhan cukup tinggi mencapai 82,23%, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju penambahan kasus COVID-19 sehingga pandemi tersebut dapat terkendali dan dampak dari pandemi tersebut dapat diminimalisasi. Salah satu upaya pemerintah terwujud dari kebijakan pelaksanaan anggaran

GAMBAR 13. PENAMBAHAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2020



Sumber : BNPB, diolah

yang difokuskan untuk menangani pandemi COVID-19.

Pelaksanaan anggaran tahun 2020 baik yang bersumber dari APBN, maupun APBD, dilakukan dalam situasi yang sangat luar biasa sebagai akibat COVID-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat, mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi. Seluruh wilayah di Indonesia merasakan dampak dari pandemi ini tanpa terkecuali. Keuangan Negara menjadi instrumen utama dan sangat penting didalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, memberikan perlindungan sosial, dan melakukan pemulihan ekonomi.

Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk menetapkan kebijakan fiskal ekspansif. Defisit anggaran yang diperlebar, diharapkan mampu menjadi kekuatan countercyclical dari perlemahan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalisasi. Efektivitas APBN dalam meminimalisasi dampak negatif pandemi sangat bergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, waktu, dan kualitas. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dengan Lembaga serta Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan.

Terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2020 yang kemudian diubah dalam Perpres No. 72 Tahun 2020 mengamanatkan perubahan terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, merupakan amanat untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dimaksud menjadi instrumen pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta pemanfaatan Anggaran Dana Desa untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan

penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang lebih sering disebut dengan PC-PEN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp692,5 triliun. Pemerintah memfokuskan anggaran tersebut kedalam enam kluster yang terdiri dari kluster kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, insentif usaha, dukungan UMKM, dan pembiayaan korporasi. Melalui PC-PEN diharapkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dapat terlindungi dan dapat mempertahankan serta meningkatkan kemampuan perekonomiannya, sehingga dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian yang lesu yang tercermin dalam perlambatan laju perekonomian hampir di seluruh regional.

Seluruh regional mengalami kontraksi laju pertumbuhan ekonomi terkecuali regional Maluku – Papua yang tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,44% di tengah pandemi COVID-19. Secara berurutan dari yang terbesar hingga terkecil tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi yaitu regional Bali – Nusa -5,01%, Jawa -2,51%, Kalimantan -2,27%, Sumatera -1,19%, dan Sulawesi -0,23%. Lebih rinci lagi, tercatat 31 provinsi mengalami kontraksi sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka menekan laju perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, kontraksi tersebut dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan G20 lainnya. Hal ini mengindikasikan kinerja Keuangan Negara melalui program PC-PEN dengan kebijakan yang difokuskan meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 telah memberikan kontribusi yang positif.

Pada triwulan IV tahun 2020, perekonomian Indonesia dinilai semakin membaik. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar -2,1%, terdapat perbaikan/peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan II dan III. Namun meskipun perekonomian domestik dinilai terus membaik, seluruh regional harus terus waspada mengingat risiko ketidakpastian yang dihadapi masih tinggi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting didalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi yang akan berlanjut pada tahun 2021.



BAB II

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2018-2020

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen, jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,02 persen di tahun 2019. Kontraksi perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan perekonomian di berbagai negara belahan dunia. Meskipun perekonomian Indonesia 2020 mengalami kontraksi, angka tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan G20 lainnya.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 16.079,25 triliun. PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$3.911,7 yang menyebabkan Indonesia kembali termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income country*). Status tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang termasuk dalam bagian negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*). Tingkat inflasi tahun 2020 mencapai angka terendah sepanjang sejarah yang mencapai 1,68%. Namun demikian, rendahnya angka inflasi tersebut lebih menggambarkan perekonomian yang lesu sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Selaras dengan perekonomian Indonesia, beberapa indikator terkait kesejahteraan

masyarakat menunjukkan pelemahan. Tercatat hanya IPM, yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat atas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak, mengalami peningkatan. Akan tetapi, Indikator kesejahteraan lainnya menunjukkan sinyal pelemahan. Tingkat kemiskinan nasional meningkat dari 9,22 persen di tahun 2019 menjadi 10,18 persen di tahun 2020. Jumlah penduduk miskin menjadi bertambah dari 24,78 juta orang (2019) menjadi sebanyak 27,55 juta orang di tahun 2020. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan dengan nilai rasio gini dari 0,380 pada tahun 2019 menjadi 0,385 di tahun 2020 serta tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 7,1 juta jiwa (2019) menjadi 9,77 juta jiwa pada tahun 2020.

Pada indikator lainnya berupa indeks Nilai Tukar Petani (NTP), pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 101,65 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 100,9 serta indikator berupa indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN), pada tahun 2020 belum mengalami perubahan kearah yang lebih baik karena angka yang dicapai masih relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100,22.

1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

1.1. PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

Perekonomian pada awal tahun 2020 dibuka dengan optimisme. Perang dagang dan retaliasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah berlangsung sejak tahun 2018 sedikit mereda dengan ditandatanganinya kesepakatan

dagang fase I pada 15 Januari 2020. Dalam kesepakatan tahap pertama tersebut, Tiongkok berkomitmen untuk meningkatkan pembelian produk dari Amerika Serikat dan produk ekspor lainnya. Komitmen damai tersebut diprediksi dapat menurunkan tendensi ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, ekspektasi tinggi tersebut dibayangi dengan munculnya virus COVID-19.

Kasus infeksi virus pertama kali diduga terjadi di

TABEL 3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TAHUN 2020 DAN TARGET 2024

Negara/Kelompok Negara	2016	2017	2018	2019	2020
Dunia	3,3	3,8	3,5	2,8	-4,4
Negara Maju	1,8	2,5	2,2	1,7	-5,8
Amerika Serikat	1,7	2,3	3,0	2,2	-4,3
Eropa	1,9	2,6	1,8	1,3	-8,3
Jepang	0,5	2,2	0,3	0,7	-5,3
Negara Berkembang	4,5	4,8	4,5	3,7	-3,3
ASEAN-5	5,1	5,5	5,3	4,9	-3,4
Tiongkok	6,8	6,9	6,7	6,1	1,9
India	8,3	7,0	6,1	4,2	-10,3
Indonesia	5,0	5,1	5,2	5,0	-2,07*)

Sumber : World Economics Outlook; BPS*)

Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Infeksi virus tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara lainnya, hingga pada 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Dampak yang muncul dari pandemi tersebut berpengaruh besar pada aspek kesehatan dan kemanusiaan, serta berimbas besar pada perekonomian. Per 31 Desember 2021, total kasus tercatat mencapai 83,9 juta kasus, dengan 1,8 juta di antaranya mengakibatkan kematian (2,1% dari total kasus). Di periode yang sama, perekonomian dunia mengalami kontraksi yang sangat dalam dengan pertumbuhan ekonomi (y-o-y) menurut *World Economic Outlook* diperkirakan berada di tingkat -3,5%.

Hampir seluruh negara mengalami kontraksi ekonomi di tahun 2020 dikarenakan pembatasan aktivitas dan mobilitas intrawilayah juga antar negara untuk menghambat penyebaran COVID-19. Beberapa negara dengan jumlah kasus infeksi yang tinggi seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris bahkan telah beberapa kali mengambil kebijakan lockdown akibat gelombang kasus yang tidak kunjung mereda. Di sisi lain, kebijakan lockdown dengan membatasi mobilitas masyarakat tentu saja akan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi.

IMF (*World Economic Outlook* – October, 2020) mengungkapkan bahwa kebijakan lockdown berasosiasi dengan menurunnya aktivitas ekonomi. Negara dengan kebijakan *lockdown* yang lebih ketat berimbas pada penurunan yang lebih dalam pada tingkat konsumsi, investasi, produksi pada industri, dan penjualan eceran, dan *Purchasing*

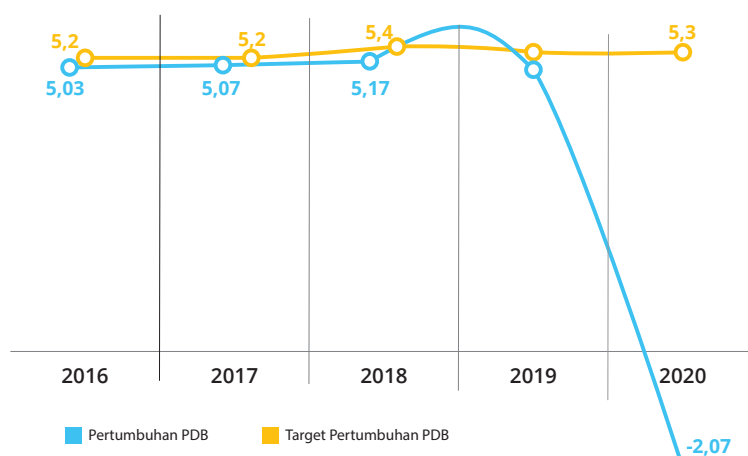
Manager's Index (PMI) untuk sektor manufaktur dan jasa. PMI untuk sektor manufaktur dan jasa pada negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, dan negara emerging markets di Asia seperti Tiongkok dan India mengalami penurunan yang signifikan.

Melihat tren penurunan perekonomian sebagai dampak dari berkurangnya mobilitas masyarakat, beberapa negara mulai melakukan relaksasi lockdown di pertengahan triwulan II tahun 2020. Dengan kembali dibukanya aktivitas dalam masyarakat, perekonomian global sedikit demi sedikit mulai menunjukkan arah pembalikan.

Pada masa tersebut, peran pemerintah dalam menghadang kontraksi perekonomian global menjadi sangat signifikan melalui penetapan regulasi fiskal ekspansif. Sebanyak 193 negara telah mengeluarkan stimulus sebesar USD 8 triliun atau 10 persen dari total PDB Global. Beberapa negara seperti Jepang, Kanada, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Turki, dan Brasil bahkan mengalokasikan dukungan fiskal lebih dari 10 persen dari GDP. Kebijakan stimulus yang diambil di setiap negara umumnya seragam yakni berupa program perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan serta program dukungan bagi dunia usaha. Selain itu, setiap negara juga terus berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan fasilitas kesehatan, menambah volume tracing kasus harian, maupun riset dan pengembangan obat-obatan dan vaksin.

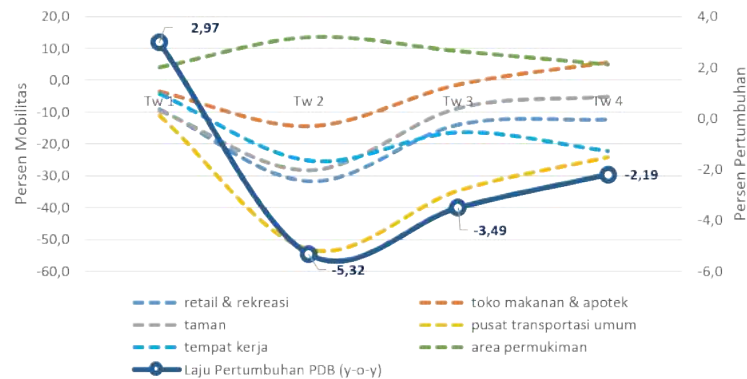
Sebagaimana pelemahan perekonomian global akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 juga mengalami kontraksi

GAMBAR 14. TREN PERTUMBUHAN PDB INDONESIA TAHUN 2016 S.D. 2020



Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 15. TREN PERTUMBUHAN PDB INDONESIA TAHUN 2016 S.D. 2020



Sumber: <https://www.google.com/covid19/mobility/>, diakses pada 21 Maret 2021 dan BPS, diolah

di level -2,07% (y-o-y). Kasus infeksi pertama di Indonesia sendiri diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020. Namun, dampak COVID-19 terhadap perlambatan ekonomi Indonesia mulai terlihat dan terkonfirmasi di triwulan I 2020 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen (y-o-y). Eskalasi pandemi semakin membesar dan mendorong pemerintah mengambil kebijakan extraordinary melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut pertama kali diterapkan pada 10 April 2020 di DKI Jakarta yang menjadi episenter penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian dampaknya semakin besar terjadi pada triwulan II di mana kebijakan PSBB mulai diterapkan pada beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

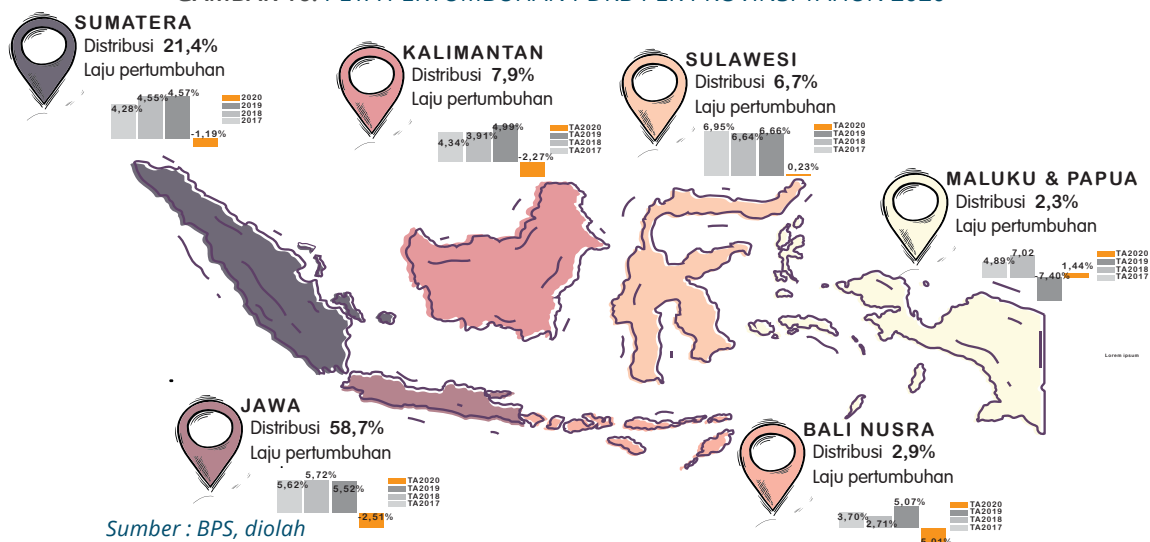
Sebagaimana pada grafik "Tren Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2016 s.d. 2020", terdapat penurunan aktivitas masyarakat yang sangat signifikan di triwulan II. Masyarakat memilih

untuk menghindari area-area publik, terutama pusat transportasi umum dan tempat rekreasi. Aktivitas pada area perkantoran (tempat kerja) juga berkurang karena kebijakan *work from home*. Keseluruhan penurunan aktivitas dan mobilitas tersebut pada akhirnya memperdalam kontraksi ekonomi pada tingkat -5,32 di triwulan II (y-o-y).

Di tengah kasus infeksi yang semakin tinggi, pembalikan arah perekonomian mulai muncul di triwulan III sejalan dengan berangsur pulihnya aktivitas dan mobilitas masyarakat pada hampir seluruh area. Tingkat hunian hotel mulai terisi, taman dan area rekreasi mulai dibuka dan didatangi masyarakat, aktivitas perkantoran telah dibuka, dengan tetap didorong untuk menjalankan protokol kesehatan. Hasilnya, kontraksi ekonomi triwulan III dan triwulan IV (y-o-y) masing-masing berada di tingkat -3,49 persen dan -2,19 persen.

Di tengah sinyal pembalikan kontraksi ekonomi

GAMBAR 16. PETA PERTUMBUHAN PDRB PER PROVINSI TAHUN 2020



Sumber: BPS, diolah

tersebut, Indonesia resmi masuk ke dalam resesi ekonomi. Namun demikian, apa yang terjadi di Indonesia dinilai masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Malaysia dan Filipina yang mengalami kontraksi lebih dalam. Ini tidak terlepas dari langkah cepat pemerintah untuk menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar, yang berakibat pada pelebaran defisit dan kenaikan pembiayaan APBN. Meski demikian, rasio utang publik pemerintah terhadap PDB di tahun 2020 sebesar 38,5 persen (IMF, 2020) masih lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia (67,6 persen), Filipina (48,9 persen), Thailand (50,4 persen), dan Vietnam (46,6 persen), maupun negara-negara anggota G20.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dalam rangka menangani pandemi COVID-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi belanja mencapai Rp692,5 triliun yang terdiri dari 6 klaster yakni klaster kesehatan, perlindungan sosial, sektora K/L dan Pemda, insentif usaha, dukungan UMKM, dan pembiayaan korporasi.

Secara spasial, perekonomian Indonesia masih dominan berada di pulau Jawa dengan porsi mencapai 58,7 persen dari perekonomian nasional tahun 2020. Sejak tahun 2017, distribusi perekonomian di pulau Jawa berada pada rentang 58 – 59 persen dari perekonomian nasional. Pemerintah terus berupaya untuk mencapai sasaran pemerataan wilayah, melalui pergeseran kontribusi perekonomian yang tersentralisasi di regional Jawa ke regional lainnya. Langkah-langkah strategis diambil melalui pembangunan infrastruktur fisik untuk mendorong konektivitas industri dan pariwisata, pengendalian distribusi dan harga komoditas. Demikian juga dengan

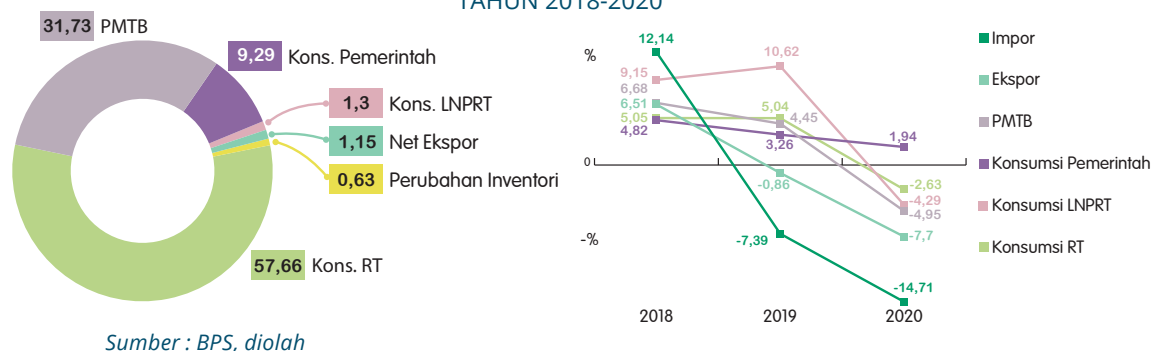
pembangunan infrastruktur digital yang diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat meningkatkan produktivitas, penyediaan layanan dan jasa yang lebih cepat dan efisien. Pemerintah juga menetapkan 15 wilayah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, dengan didukung pembangunan infrastruktur yang terfokus di wilayah timur.

Dengan porsi perekonomian yang masih tersentralisasi di pulau Jawa, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat signifikan dipengaruhi oleh laju perekonomian di wilayah Jawa. Dalam beberapa tahun ke belakang, pertumbuhan ekonomi di regional Jawa cenderung melambat hingga di tahun 2020 mencapai kontraksi sebesar -2,51 persen (y-o-y). Kontraksi ekonomi di tahun 2020 di wilayah Jawa disebabkan menurunnya konsumsi, investasi, dan aktivitas ekspor dari industri pengolahan yang menjadi basis perekonomian regional. Sementara itu, regional Bali – Nusra menjadi wilayah yang paling terdampak pandemi COVID-19 karena perekonomiannya ditopang oleh aktivitas pariwisata meliputi jasa, akomodasi, makanan, dan minuman. Regional Papua dan Maluku menjadi satu-satunya wilayah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, utamanya didorong oleh kinerja pertambangan bijih logam.

1.I.A. BERDASARKAN PENGELUARAN

Dilihat dari sisi pengeluaran, Konsumsi RT yang menjadi penyumbang terbesar PDB nasional mengalami kontraksi sebesar -2,63 persen. Komponen Konsumsi RT yang berkontraksi paling dalam adalah Transportasi dan Komunikasi (kontraksi -9,57 persen) dan komponen Restoran dan Hotel (-8,14 persen). Sementara itu, masih terdapat komponen Konsumsi RT yang tumbuh

GAMBAR 17. DISTRIBUSI PDB TAHUN 2020 DAN LAJU PERTUMBUHAN PDB INDONESIA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018-2020



TABEL 4. DISTRIBUSI PDRB TAHUN 2020 DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018-2020 PER REGIONAL

Regional	Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB 2020 (%)	Laju Pertumbuhan			
			2018	2019	2020	Tren
Sumatera	(1) Konsumsi RT	52,41%	4,78	4,15	-1,80	
	(4) PMTB	33,57%	5,28	4,80	-1,57	
	(3) Konsumsi Pemerintah	8,03%	4,05	3,95	-5,37	
Jawa	(1) Konsumsi RT	62,16%	5,20	5,08	-1,86	
	(4) PMTB	30,09%	5,85	3,57	-6,28	
	(3) Konsumsi Pemerintah	8,74%	8,54	1,55	4,88	
Bali & Nusra	(1) Konsumsi RT	59,59%	4,03	4,95	-2,90	
	(4) PMTB	35,40%	7,04	5,33	-9,46	
	(3) Konsumsi Pemerintah	16,45%	4,48	4,22	-2,79	
Kalimantan	(4) PMTB	31,46%	6,34	4,39	-1,81	
	(1) Konsumsi RT	31,08%	4,14	4,15	-0,20	
	(3) Net Ekspor	28,16%	-	-	-	
Sulawesi	(1) Konsumsi RT	50,18%	6,01	5,85	-1,42	
	(4) PMTB	36,84%	4,69	8,10	-2,04	
	(3) Konsumsi Pemerintah	11,94%	4,81	4,69	-3,45	
Maluku&Papua	(1) Konsumsi RT	48,64%	5,12	4,21	-3,41	
	(4) PMTB	34,11%	5,49	12,24	2,57	
	(3) Konsumsi Pemerintah	24,05%	1,76	3,70	-1,38	

**) Komponen Pengeluaran dengan distribusi PDRB terbesar di regional
Sumber : BPS, diolah*

positif di antaranya komponen (1) Makanan dan Minuman selain Hotel yang tumbuh 0,51 persen, dan (2) Kesehatan dan Pendidikan tumbuh 3,09 persen. Ekspor dan Impor mengalami kontraksi yang cukup dalam yang disumbang dari penurunan permintaan dan penawaran barang non-migas global. Konsumsi Pemerintah menjadi satu-satunya komponen pengeluaran yang tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 0,51 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar belanja pemerintah dapat berperan sebagai countercyclical di tengah perlambatan ekonomi.

Konsumsi RT, PMTB, dan Konsumsi Pemerintah umumnya menjadi komponen pengeluaran tertinggi pada masing-masing regional. Pada regional Sumatera, Konsumsi RT dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai penyumbang terbesar perekonomian mengalami perlambatan. Kecuali provinsi Kepulauan Riau dan Bengkulu, provinsi lainnya pada regional Sumatera mengalami kontraksi pada komponen Konsumsi RT, dengan kontraksi paling dalam pada provinsi Sumatera Barat sebesar -2,5 persen. Pada regional Jawa, kontraksi ekonomi pada komponen Konsumsi RT terjadi pada seluruh provinsi, dengan kontraksi terdalam pada provinsi Jawa Barat (-2,9 persen). Sementara itu Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 4,9 persen sebagai implikasi dari kebijakan fiskal ekspansif

oleh pemerintah pusat. Pada regional Bali – Nusra, Konsumsi RT tumbuh negatif di seluruh provinsi dengan kontraksi tertinggi pada provinsi Bali (-3,7 persen). Pada regional Kalimantan, PMTB menjadi komponen pengeluaran terbesar yang mengalami perlambatan ekonomi di seluruh provinsi. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar -3,1 persen pada komponen PMTB. Pada regional Sulawesi, Konsumsi RT pada Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat masih mengalami pertumbuhan positif masing-masing di angka 0,1 persen dan 0,5 persen. Sementara Konsumsi RT Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kontraksi tertinggi sebesar -4,0 persen. Pada regional Maluku dan Papua, kontraksi ekonomi tertinggi untuk komponen Konsumsi RT terjadi pada Provinsi Papua sebesar -5,6 persen. Sementara itu pada komponen PMTB, provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 26,9 persen.

1.I.B. BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha, sektor (a) Industri Pengolahan dan (b) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadi penyumbang PDB terbesar di tahun 2020. Porsi PDB pada kedua sektor tersebut

TABEL 5. LAJU PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDB INDONESIA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2018 – 2020

PDB Lapangan Usaha	Distribusi PDB ADHB (%)	Laju Pertumbuhan (%)			
		2018	2019	2020	Tren
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,7	3,9	3,6	1,8	
2. Pertambangan dan Penggalian	6,4	2,2	1,2	-2,0	
3. Industri Pengolahan	19,9	4,3	3,8	-2,9	
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,2	5,5	4,0	-2,3	
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	5,6	6,8	4,9	
6. Konstruksi	10,7	6,1	5,8	-3,3	
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,9	5,0	4,6	-3,7	
8. Transportasi dan Pergudangan	4,5	7,1	6,4	-15,0	
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,6	5,7	5,8	-10,2	
10. Informasi dan Komunikasi	4,5	7,0	9,4	10,6	
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	4,2	6,6	3,3	
12. Real Estate	2,9	3,5	5,8	2,3	
13. Jasa Perusahaan	1,9	8,6	10,3	-5,4	
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,8	7,0	4,7	-0,0	
15. Jasa Pendidikan	3,6	5,4	6,3	2,6	
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,3	7,2	8,7	11,6	
17. Jasa lainnya	2,0	9,0	10,6	-4,1	

*)Komponen Pengeluaran dengan distribusi PDRB terbesar di regional
Sumber : BPS, diolah

mencapai sepertiga dari PDB nasional. Sementara itu, hampir seluruh sektor mengalami perlambatan ekonomi di tahun 2020, kecuali untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang disebabkan meningkatnya aktivitas jasa laboratorium kesehatan dalam rangka tracing dan treatment kasus COVID-19. Sektor Informasi dan Komunikasi juga tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena peningkatan *traffic* layanan data telekomunikasi serta peningkatan jumlah pelanggan penyedia jasa internet.

Pada sektor Industri Pengolahan, masih ditopang oleh Industri Makanan dan Minuman yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,58 persen didukung peningkatan produksi padi dan kenaikan permintaan crude palm oil (CPO). Pertumbuhan positif lainnya terjadi pada Industri Logam Dasar sebesar 5,9 persen karena meningkatnya permintaan ekspor feronikel. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,4 persen akibat naiknya permintaan domestik untuk sabun, handsanitizer, disinfektan, serta peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen makanan. Namun demikian, secara agregasi, sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar -2,9 persen karena kontraksi yang dialami oleh

beberapa industri seperti pengolahan batubara, tembakau, tekstil, mesin dan perlengkapan, serta alat angkutan, yang diakibatkan oleh menurunnya ekspor dan permintaan domestik.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan di beberapa subsektor pertanian seperti (1) subsektor Tanaman Pangan yang tumbuh 3,5 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan produksi padi, jagung, dan ubi kayu, (2) subsektor Tanaman Hortikultura, yang tumbuh 4,2 persen didorong oleh kenaikan permintaan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan (3) subsektor Tanaman Perkebunan tumbuh 1,3 persen didorong oleh peningkatan produksi kelapa sawit.

Sementara itu, beberapa sektor yang mengalami kontraksi paling dalam adalah sektor (a) Transportasi dan Pergudangan dan (b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar -15,0 persen karena adanya kebijakan PSBB membatasi pergerakan dan mobilitas masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar -10,2 persen karena rendahnya tingkat kunjungan hotel dan restoran

seiring dengan menurunnya kunjungan wisatawan.

1.II. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI

1.II.A. PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL

Target inflasi tahun 2020 mengalami penyesuaian dari yang semula 3,1% menjadi 2% dengan deviasi 1%. Penyesuaian tersebut dilakukan guna menyelaraskan arah kebijakan fiskal Pemerintah dengan perkembangan situasi yang ada. Adapun tingkat inflasi di akhir 2020 (yoy) tercatat sebesar 1,68%. Jauh lebih rendah daripada angka inflasi di tahun 2019 yang mencapai 2,72%.

Pandemi COVID-19 memang memberikan tekanan yang begitu luar biasa terhadap perekonomian. Tingkat permintaan anjlok dan dunia usaha pun goyah. Dalam siaran persnya, LIPI menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian, mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kontraksi pendapatan rumah tangga baik berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan gaji, maupun penurunan keuntungan perusahaan (LIPI, 2020).

Bila diperhatikan, laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir memiliki kecenderungan pola yang sama. Laju inflasi cenderung mengalami peningkatan di kuartal ke-2 dan kuartal ke-4. Adapun di kuartal ke-3, laju inflasi cenderung melandai

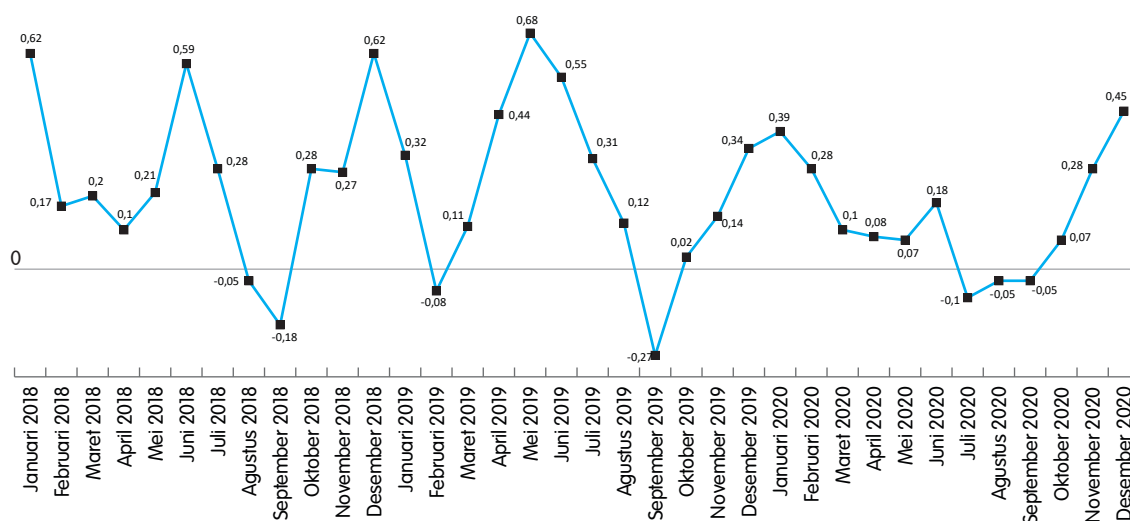
bahkan tak jarang hingga mengalami deflasi. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat permintaan cenderung menguat pada kuartal ke-2 dan ke-4, yang mana bertepatan dengan momentum hari raya keagamaan dan hari libur sekolah. Sementara itu, di kuartal ke-3 tampak masyarakat cenderung menekan tingkat konsumsinya.

Secara nasional, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya merupakan kelompok pengeluaran dengan angka inflasi tertinggi yaitu sebesar 5,80%. Di posisi selanjutnya adalah kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan inflasi sebesar 3,63%. Sebaliknya, kelompok pengeluaran Transportasi dan Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan masing-masing mencatat deflasi sebesar 0,85% dan 0,35%.

1.II.B. PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

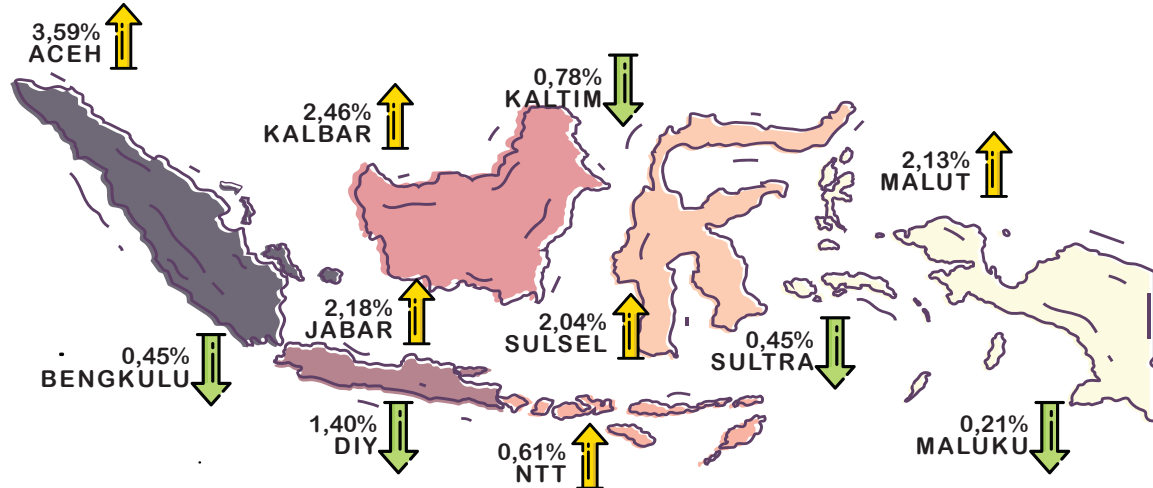
Tingkat inflasi tahunan seluruh provinsi di Indonesia cukup bervariasi. Aceh merupakan provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional, yaitu mencapai 3,59% (yoy). Capaian ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berada di angka 1,69%. Angka inflasi Aceh merupakan gabungan dari angka inflasi 3 kota, yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Di sepanjang tahun 2020, inflasi di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 3,46%. Sementara itu, Kota Lhokseumawe dan Meulaboh masing-masing mencatatkan inflasi sebesar 3,55% dan 4,24%. Kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Perawatan

GAMBAR 18. PERKEMBANGAN LAJU INFLASI NASIONAL



Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 19. PETA TINGKAT INFLASI TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL



Sumber : BPS, diolah

Pribadi dan Jasa Lainnya, yaitu sebesar 7,72%, diikuti oleh Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 7,22%.

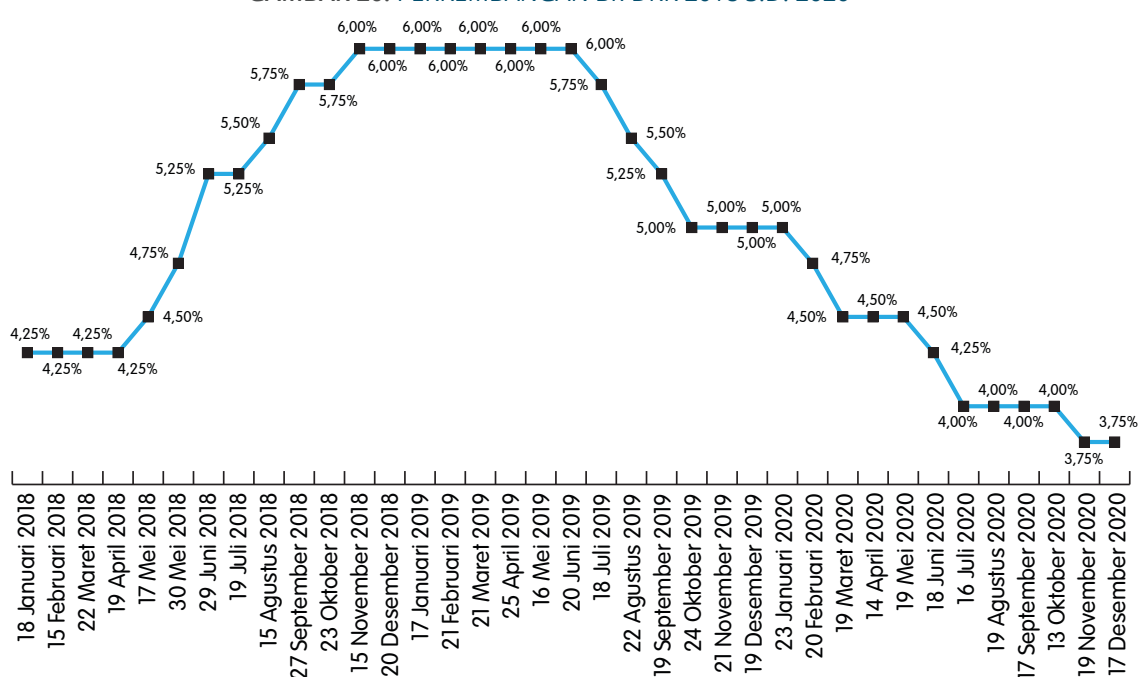
Provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara nasional adalah Maluku, yaitu sebesar 0,21% (yoy) yang merupakan gabungan dari angka inflasi 2 kota, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. Rendahnya tingkat inflasi di Provinsi Maluku tidak lepas dari tingkat inflasi yang sangat rendah di Kota Ambon, yaitu sebesar 0,09%. Adapun Kota Tual mencatatkan inflasi sebesar 2,06%. Kondisi inflasi yang begitu rendah tersebut disinyalir karena tingkat konsumsi masyarakat yang masih terbatas akibat pandemi COVID-19. Transportasi menjadi kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi

paling dalam selama tahun 2020, yaitu mencapai 8,93% (yoy). Adapun Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kelompok pengeluaran yang memberi kontribusi tertinggi terhadap inflasi Kota Ambon. dengan tingkat inflasi sebesar 4,60% (yoy).

1.II.C. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA

Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia telah mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menggantikan BI Rate. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguatkan kerangka operasi moneter nasional serta menerapkan prinsip best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter.

GAMBAR 20. PERKEMBANGAN BI7DRR 2018 S.D. 2020



Sumber : BPS, diolah

Sepanjang tahun 2020, BI7DRR berangsur-angsur mengalami penurunan. Berada pada taraf 5% di awal tahun, BI7DRR turun ke angka 4,50% di bulan Maret. BI7DRR kembali diturunkan ke angka 4,25% di bulan Juni dan di bulan September BI7DRR tercatat di angka 4,00%. Terakhir, di bulan November BI7DRR kembali diturunkan ke angka 3,75% dan bertahan hingga akhir tahun.

Tingkat bunga di akhir 2020 merupakan yang terendah selama periode 2018 s.d. 2020. BI7DRR sempat mencapai titik tertinggi pada bulan November 2018, yaitu 6% dan bertahan hingga bulan Juni 2019.

Kebijakan menurunkan tingkat suku bunga merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang diterapkan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan perekonomian nasional. Hal ini tentu saja tidak lepas dari perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menghadapi tekanan luar biasa akibat pandemi COVID-19.

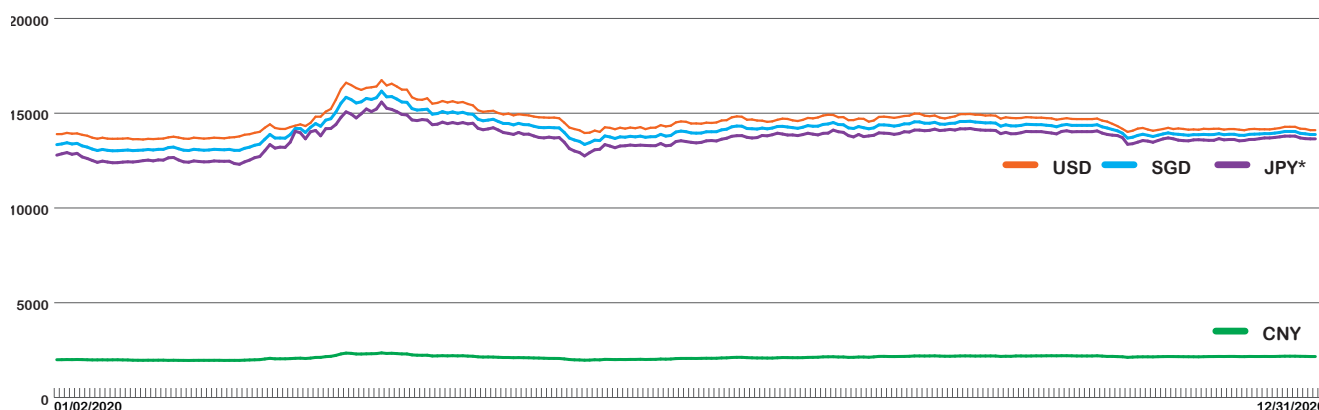
Memasuki tahun 2021, BI7DRR ditetapkan sebesar 3,75% pada bulan Januari dan kembali diturunkan ke angka 3,50% pada bulan Februari. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya mendorong momentum pemulihan ekonomi melalui akselerasi penyaluran kredit perbankan serta pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif. Di tahun 2021, perekonomian nasional diharapkan bergerak ke arah yang positif seiring dengan pemulihan perekonomian global dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah.

1.II.D. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (US\$) ditetapkan sebesar Rp14.400,- per US\$ dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) APBN 2020. Di awal tahun 2020, nilai tukar Rupiah dibuka di angka Rp13.895,- per US\$. Sempat menguat di akhir Januari (Rp13.612,- per US\$), nilai Rupiah berangsur-angsur melemah hingga menembus nilai Rp16.000,- per US\$ pada akhir Maret. Kurs US\$ mencatat rekor tertinggi yaitu sebesar Rp16.741 per US\$ pada awal April. Memasuki minggu ke-2 bulan April Rupiah kembali menguat di kisaran angka Rp15.000,- per US\$. Penguatan nilai tukar Rupiah terus berlanjut. Sejak minggu ke-2 bulan Mei hingga akhir tahun, nilai tukar Rupiah konsisten di kisaran angka Rp14.000,- per US\$. Pada akhir Desember, nilai tukar Rupiah ditutup di angka Rp14.105 per US\$. Adapun perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain relatif memiliki pola yang sama dengan nilai tukar Rupiah terhadap US\$.

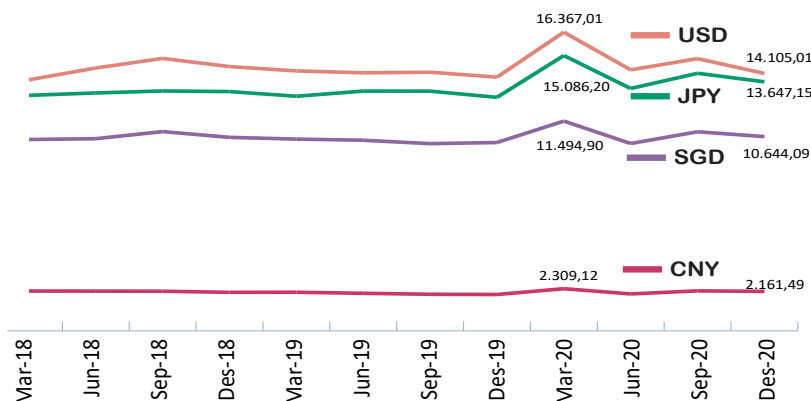
Setidaknya sejak tahun 2018, nilai tukar Rupiah cenderung menguat dan stabil di kisaran angka Rp14.000,- per US\$. Memasuki tahun 2020, terutama di bulan Maret hingga April, nilai tukar Rupiah terdepresiasi cukup dalam. Hal ini diperkirakan merupakan dampak lanjutan dari merebaknya COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya menghantam perekonomian nasional dan menggoyang keseimbangan permintaan dan penawaran, pandemi COVID-19 juga menyebabkan ketidakpastian perekonomian. Sebagai respon atas hal tersebut, para investor ragu untuk menempatkan modalnya di Indonesia atau bahkan menarik modal yang ditempatkan di Indonesia sebagai upaya untuk mengamankan dana/asetnya. Tingginya aliran dana keluar (*capital outflow*) menyebabkan tingkat permintaan mata uang asing melambung yang pada akhirnya menekan nilai tukar Rupiah.

GAMBAR 21. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP BEBERAPA MATA UANG ASING SELAMA 2020



Sumber : BI, diolah

GAMBAR 22. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP BEBERAPA MATA UANG ASING PERIODE 2018 S.D. 2020 (TRIWULANAN)



Sumber: BI, diolah

Tidak hanya terhadap US\$, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang utama lainnya juga mengalami hal serupa. Pada Maret 2020 tercatat nilai tukar Rupiah terhadap SGD menembus angka Rp11.495,- per SGD. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap CNY mencapai angka Rp2.309,12 per CNY. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap JPY tercatat di angka Rp15.086,20 per JPY100. Meski demikian, memasuki kuartal ke-3 nilai tukar Rupiah kembali menguat dan kembali stabil hingga akhir tahun. Hal ini tidak lepas dari berbagai kebijakan stimulus yang diambil Pemerintah guna menghadapi pandemi COVID-19. Serangkaian kebijakan Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mampu menciptakan sentimen positif dan optimisme akan pertumbuhan perekonomian dan pemulihan nasional.

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.1. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator pengukuran atas keberhasilan pembangunan manusia. Konsep dalam IPM menggunakan pendekatan tiga aspek dasar, yakni Dimensi Kesehatan (harapan hidup saat lahir), Dimensi Pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta Dimensi Pengeluaran (pengeluaran per kapita).

IPM Indonesia tahun 2020 berada di angka

71,94, naik 0,02 poin dibandingkan IPM tahun 2019 sebesar 71,92. Angka IPM ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam status IPM dengan kategori tinggi. Selain data IPM dari Badan Pusat Statistik, Human Development Report 2020 yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) juga menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi, dengan indeks 0,718 (UNDP 2020) atau menempatkan Indonesia pada peringkat 107 dari 189 negara yang diukur.

IPM hasil perhitungan BPS menggunakan capaian atas tiga dimensi/aspek yang menjadi dasar perhitungan. Hasil perhitungan tiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

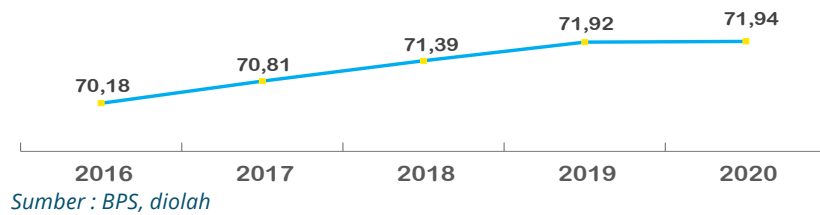
a. Dimensi Kesehatan: Angka Umur Harapan Hidup (AHH) 2020 bayi saat lahir adalah sebesar 71,47 tahun, atau naik 0,13 poin tahun dibandingkan AHH tahun 2019 sebesar 71,34 tahun.

b. Dimensi Pendidikan: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 2020 adalah sebesar 12,98 tahun, atau naik 0,03 tahun dibandingkan HLS tahun 2019 sebesar 12,95 tahun. Sedangkan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 2020 adalah sebesar 8,48 tahun, atau naik 0,14 tahun dibandingkan tahun 2019 sebesar 8,34 tahun.

c. Dimensi Pengeluaran: Angka pengeluaran per kapita 2020 adalah sebesar Rp11,13 juta/orang/tahun, turun Rp170,00 ribu dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp11,30 juta /orang/tahun.

Walaupun IPM 2020 mengalami peningkatan,

GAMBAR 23. PERKEMBANGAN IPM TAHUN 2016-2020



namun terlihat bahwa peningkatan IPM 2020 mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya meningkat sebesar 0,5 – 0,6 poin persentase. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS 2020a), perlambat pertumbuhan IPM 2020 ini sangat besar dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19, terutama yang berdampak pada turunnya rata-rata angka pengeluaran per kapita 2020.

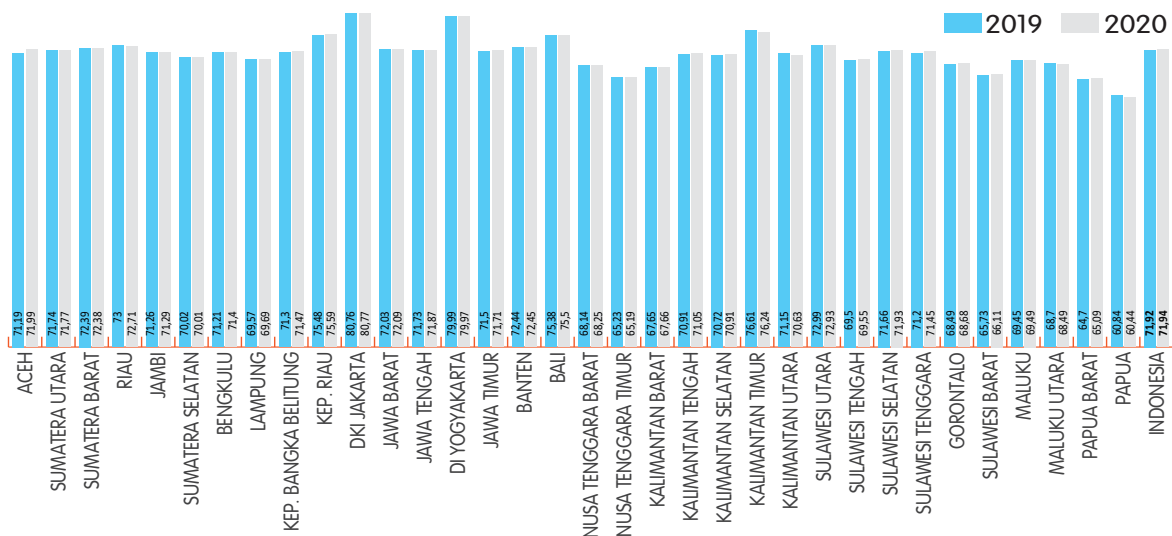
IPM Indonesia dapat dijabarkan berdasarkan persebarannya pada masing-masing wilayah/provinsi. Sejalan dengan IPM Indonesia, sebagian besar IPM pada provinsi-provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan. Sebanyak 25 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan IPM di tahun 2020. Angka IPM tertinggi tahun 2020 adalah Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 80,77. Tingginya IPM di Provinsi DKI Jakarta didukung oleh posisi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, serta didukung oleh alokasi APBN dan APBD yang tinggi juga berkontribusi terhadap tingginya angka IPM Provinsi DKI Jakarta.

Di sisi lain, angka IPM 2020 terendah masih berada di provinsi kawasan Indonesia bagian timur, yakni Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,44. Rendahnya IPM di Provinsi Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan tenaga pendidikan dan kesehatan. Adapun provinsi dengan tingkat pertumbuhan IPM tertinggi yakni Provinsi Papua Barat yang naik sebesar 0,39 poin, dari sebelumnya 64,70 di tahun 2019 menjadi 65,09 di tahun 2020.

Dimensi Kesehatan (AHH), dengan capaian AHH 2020 tertinggi berada di Provinsi D.I.Yogyakarta yakni sebesar 74,99 tahun, sementara angka AHH 2020 terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian sebesar 65,06 tahun. Adapun peningkatan angka AHH 2020 tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah yakni naik 0,46 tahun.

Dimensi Pendidikan (HLS dan RLS), dengan capaian HLS 2020 tertinggi berada di Provinsi D.I. Yogyakarta yakni sebesar 15,59 tahun, sementara angka HLS terendah berada di Provinsi Papua yakni sebesar 11,08 tahun. Adapun peningkatan angka HLS 2020 tertinggi berada di Provinsi Nusa

GAMBAR 24. IPM REGIONAL TAHUN 2019-2020



Sumber : BPS, diolah

Tenggara Barat yakni naik 0,22 tahun. Selanjutnya, capaian RLS 2020 tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 11,13 tahun, sementara RLS terendah berada di Provinsi Papua yakni sebesar 6,69 tahun. Adapun peningkatan angka RLS 2020 tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur yakni naik 0,19 tahun.

Dimensi Pengeluaran (angka pengeluaran per kapita), dengan capaian angka tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar Rp18,22 juta/orang/tahun, sementara angka terendah berada di Provinsi Papua yakni sebesar Rp6,95 juta/orang/tahun. Di tahun 2020, angka pengeluaran per kapita seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan 2019. Hal ini dikarenakan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan PSBB membatasi mobilitas sebagian besar masyarakat di Indonesia, yang mana hal ini berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun penurunan angka pengeluaran per kapita terbesar berada di provinsi Kalimantan Timur dengan penurunan sebesar Rp631,00 ribu/orang/tahun.

2.II. PERKEMBANGAN TINGKAT KESENJANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI)

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan masyarakat, semakin tinggi koefisien Rasio Gini (mendekati 1) menunjukkan ketimpangan yang semakin besar antar penduduk masyarakat. Rasio Gini per September 2020 berada di angka 0,385, atau naik 0,005 poin dibandingkan September 2019 sebesar 0,380. Peningkatan Rasio Gini

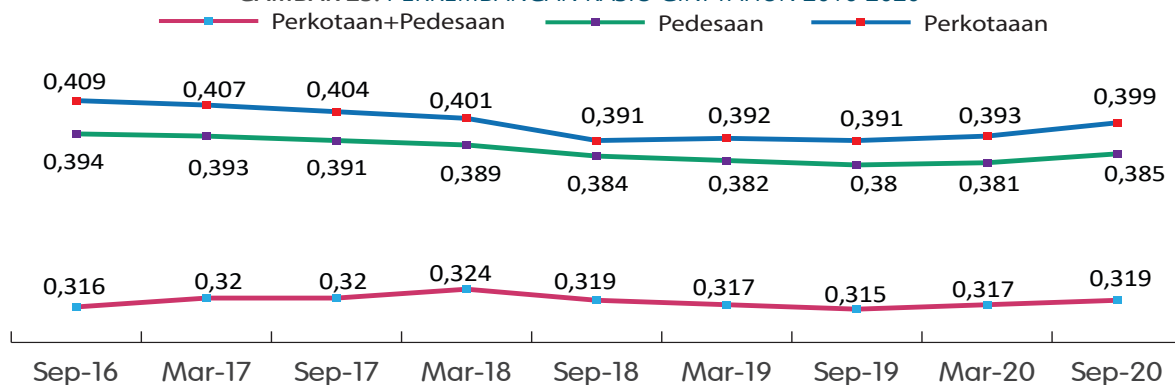
menandakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat semakin naik.

Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, Rasio Gini di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,399 atau naik 0,008 poin dibandingkan September 2019 sebesar 0,391. Adapun Rasio Gini di daerah pedesaan pada September 2020 adalah sebesar 0,319, atau naik 0,004 poin dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 0,315.

Selain Rasio Gini, ukuran ketimpangan juga dapat diukur dengan melihat persentase pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk 40 persen terbawah yang biasa digunakan oleh Bank Dunia. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,93 persen, atau naik 0,22 poin persentase dibandingkan September 2019 sebesar 17,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional telah terjadi peningkatan tingkat ketimpangan selama periode September 2019-September 2020. Namun demikian, angka ini masih menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

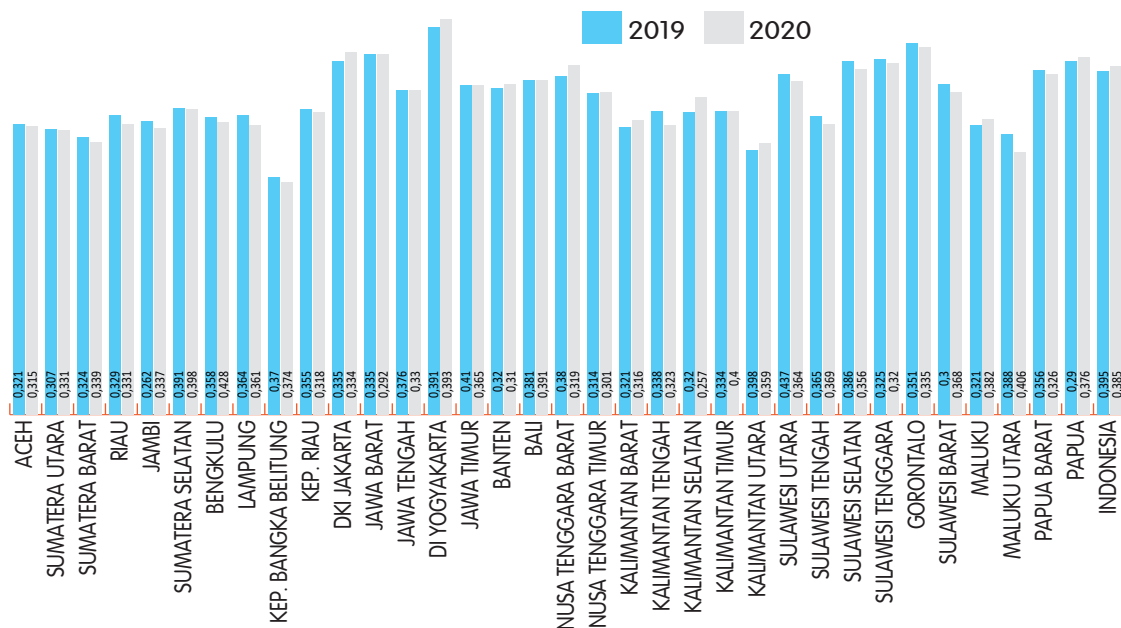
Rasio Gini Indonesia dapat dijabarkan berdasarkan persebarannya pada masing-masing wilayah/provinsi. Provinsi dengan angka Rasio Gini tertinggi pada September 2020 adalah Provinsi D.I. Yogyakarta yakni sebesar 0,437, diikuti Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta yakni masing-masing sebesar 0,406 dan 0,400. Adapun Provinsi dengan angka Rasio Gini terendah adalah Provinsi Bangka Belitung yakni sebesar 0,257, diikuti Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kalimantan Utara yakni masing-masing 0,290 dan 0,300. Jika dibandingkan dengan angka Rasio Gini per

GAMBAR 25. PERKEMBANGAN RASIO GINI TAHUN 2016-2020



Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 26. RASIO GINI REGIONAL TAHUN 2019-2020



Sumber : BPS, diolah

September 2019, pada September 2020 terdapat 11 provinsi yang mengalami peningkatan angka Rasio Gini, 3 provinsi tidak mengalami perubahan pada Rasio Gini, sedangkan sisanya sebanyak 20 provinsi mengalami penurunan. Adapun provinsi dengan peningkatan Rasio Gini tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni dengan peningkatan 0,017 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2019. Sementara itu Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan penurunan Rasio Gini tertinggi dengan turun sebesar 0.02 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2019.

Laporan Regional *Economic Outlook: Asia and Pacific 2020* yang diterbitkan *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Oktober 2020 memprediksi bahwa pandemi COVID-19 akan cenderung meningkatkan ketimpangan di jangka menengah dan jangka panjang (IMF 2020). Selanjutnya, studi dari Furceri et al. (2020) menunjukkan bahwa berdasarkan data historis atas lima pandemi (SARS, H1N1, MERS, Ebola, dan Zika) yang terjadi antara 2003 dan 2016, ditemukan bukti bahwa secara rata-rata tingkat ketimpangan pada negara-negara yang terkena pandemi ini mengalami peningkatan selama lima tahun setelah terjadinya pandemi, yang mana sebagian besar dipengaruhi tekanan aktivitas ekonomi selama masa pandemi. Kondisi angka Rasio Gini Indonesia per September 2020 mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan

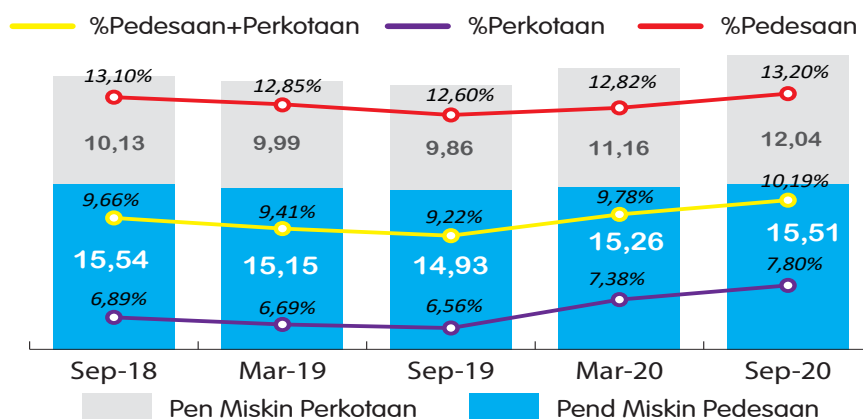
oleh IMF dan Furceri, et al. (2020), dimana terjadi peningkatan pada Rasio Gini Indonesia setelah pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada bulan maret 2020.

2.III. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Setelah mengalami tren penurunan sejak September 2016, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan kembali pada September 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 27,55 juta orang, atau naik 2,76 juta orang apabila dibandingkan dengan September 2019. Kategori penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan, yakni sebesar Rp458.947,00,- pada September 2020. Tingkat kemiskinan pada September 2020 sebesar 10,19 persen, atau naik 0,97 poin persentase dibandingkan September 2019 sebesar 9,22 persen.

Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin pada September 2020 di Perdesaan sejumlah 15,51 juta orang (56,30 persen), atau naik 580 ribu orang dibandingkan September 2019 sejumlah 14,93 juta orang. Adapun jumlah penduduk miskin di Perkotaan sebanyak 12,04 juta orang (43,70 persen), atau naik 2,18 juta orang dibandingkan September 2019 sejumlah 9,86 juta orang. Berdasarkan

GAMBAR 27. RASIO GINI REGIONAL TAHUN 2019-2020



Sumber : BPS, diolah

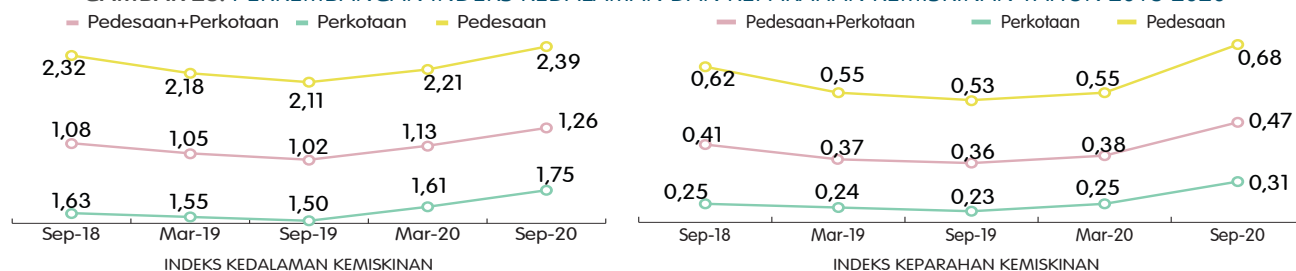
jumlah, penduduk miskin di Perdesaan lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Perkotaan. Namun, persentase peningkatan kemiskinan di Perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Perdesaan. Dibandingkan dengan periode sebelumnya September 2019 (6,56), pada September 2020 (7,88) tingkat kemiskinan Perkotaan meningkat 1,32 poin persentase lebih tinggi. Sementara, peningkatan kemiskinan di Perdesaan dari September 2019 (12,60) ke September 2020 (13,20) adalah sebesar 0,60 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan masyarakat miskin di Perkotaan lebih meningkat daripada Perdesaan.

Peningkatan kemiskinan di daerah perkotaan salah satunya dipicu dari peralihan penduduk hampir miskin menjadi penduduk miskin di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Rilis BPS (2020) mencatat bahwa pada Maret 2019, 55,30 persen penduduk hampir miskin berlokasi di kawasan Jawa-Bali, dimana kawasan ini banyak didominasi oleh daerah perkotaan. Sementara itu data BPS (ibid) juga memperlihatkan bahwa 61,03 persen penduduk hampir miskin bekerja di sektor informal. Studi dari *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa

pandemi COVID-19 akan lebih berdampak negatif pada pekerja pada sektor informal (ILO 2020). Selain disebabkan oleh karantina (PSBB) pada masa pandemi COVID-19, kelesuan bisnis pada sektor informal juga dipengaruhi oleh tingginya risiko terpapar COVID-19 pada pekerja sektor informal. Hal ini diperburuk dengan terbatasnya perlindungan atau jaminan kesehatan pada pekerja sektor informal. Selain itu keterbatasan bantalan finansial para pekerja di sektor informal untuk menghadapi krisis juga berkontribusi memperburuk kondisi keuangan para pekerja sektor informal. Akibatnya, banyak para pekerja pada sektor informal akan mengalami penurunan pendapatan, yang mana dapat berdampak memicu lonjakan kemiskinan pada pekerja sektor informal.

Selain tingkat kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan di September 2020. Indeks Kedalaman merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara Indeks Keparahan merupakan ukuran yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada September 2020, Indeks Kedalaman tercatat sebesar 1,75, atau meningkat 0,25

GAMBAR 28. PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TAHUN 2018-2020



Sumber : BPS, diolah

poin dibandingkan September 2019. Sejalan dengan Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan juga mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin dibandingkan dengan September 2019 menjadi sebesar 0,47.

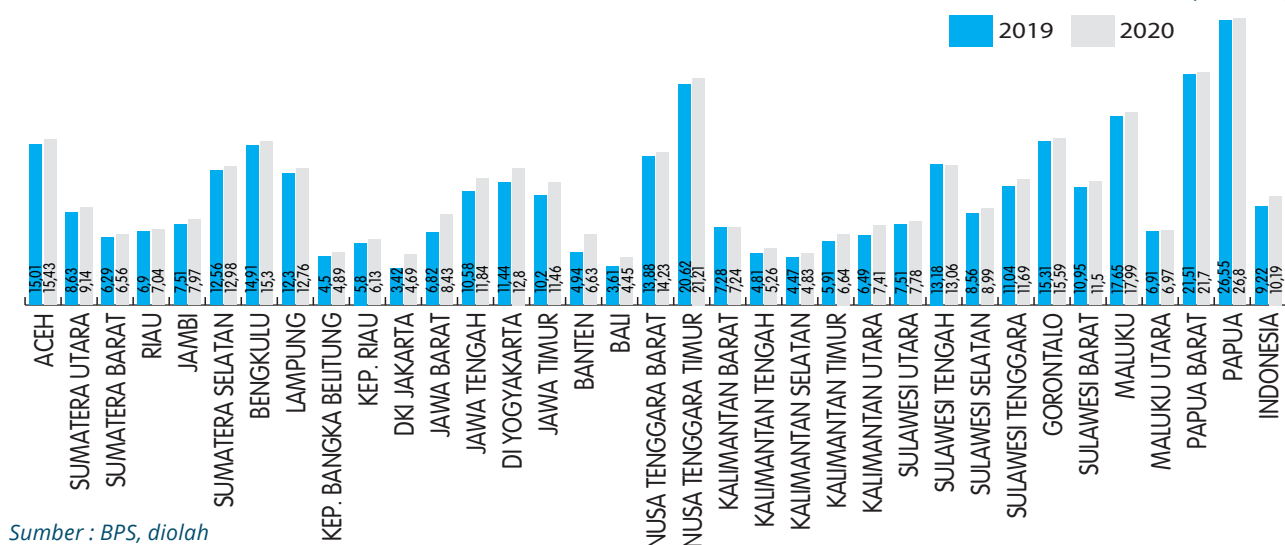
Berdasarkan persebarannya pada setiap wilayah/provinsi, tingkat kemiskinan terendah pada September 2020 berada di Provinsi Bali yakni 4,45 persen, sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua yakni sebesar 26,80 persen. Peningkatan tingkat kemiskinan nasional pada September 2020 juga berimbas pada peningkatan tingkat kemiskinan di sebagian besar provinsi di Indonesia. Gambar Tingkat Kemiskinan Perdesaan & Perkotaan September 2019 dan September 2020 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, hanya dua provinsi yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan di September 2020, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, 32 provinsi lainnya mengalami peningkatan kemiskinan. Adapun provinsi dengan peningkatan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Banten, yang mengalami kenaikan sebesar 1,69 poin yang semula 4,94 persen di September 2019 menjadi 6,63 persen di September 2020. Faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan pada September 2020 adalah adanya pandemi COVID-19 yang berkelanjutan (BPS 2021). Pandemi COVID-19 mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan melalui transmisi kontraksi pertumbuhan ekonomi, penurunan rata-rata pengeluaran rumah tangga dan peningkatan

angka pengangguran (Suryahadi et al. 2020; BPS 2021).

Selanjutnya, Gambar I-16 juga menunjukkan bahwa enam provinsi dengan peningkatan kemiskinan tertinggi seluruhnya berada di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh penurunan drastis aktivitas ekonomi dan pendapatan rumah tangga di Pulau Jawa yang dipicu oleh kebijakan PSBB selama masa pandemi COVID-19. Data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menunjukkan bahwa fase awal penyebaran COVID-19 di Indonesia di bulan Maret 2020 dimulai di Pulau Jawa, tepatnya pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan Banten (KPCPEN 2020). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dampak COVID-19 terhadap kemiskinan akan lebih dahulu terlihat pada daerah di Pulau Jawa dibanding dengan daerah lain di Indonesia.

Kondisi sosiodemografi Pulau Jawa yang berpenduduk padat juga menjadi salah satu penyebab tingginya peningkatan angka kemiskinan di Pulau Jawa. Penelitian Brown dan Ravallion (2020) mengatakan bahwa kepadatan penduduk merupakan prediktor yang signifikan terhadap tingkat infeksi virus COVID-19. Dengan kata lain, tingginya kepadatan di Pulau Jawa berakibat pada tingginya angka kasus COVID-19. Hal ini berdampak pada kebijakan pembatasan sosial yang lebih ketat di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah lain guna menurunkan angka penyebaran virus. Selanjutnya, kebijakan PSBB

GAMBAR 29. TINGKAT KEMISKINAN PERDESAAN & PERKOTAAN SEPTEMBER 2019 DAN SEPTEMBER 2020 (PERSEN)



Sumber : BPS, diolah

yang lebih panjang dan masif akan mengakibatkan kontraksi aktivitas ekonomi yang lebih dalam dan menggiring pada meningkatnya angka kemiskinan.

Peningkatan angka kemiskinan harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Program perlindungan dan jaminan sosial harus dikedepankan, terutama yang menysasar kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Hal ini sejalan dengan bukti bahwa masyarakat pada dua golongan ini lebih rentan terhadap krisis pandemi COVID-19.

2.IV. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN

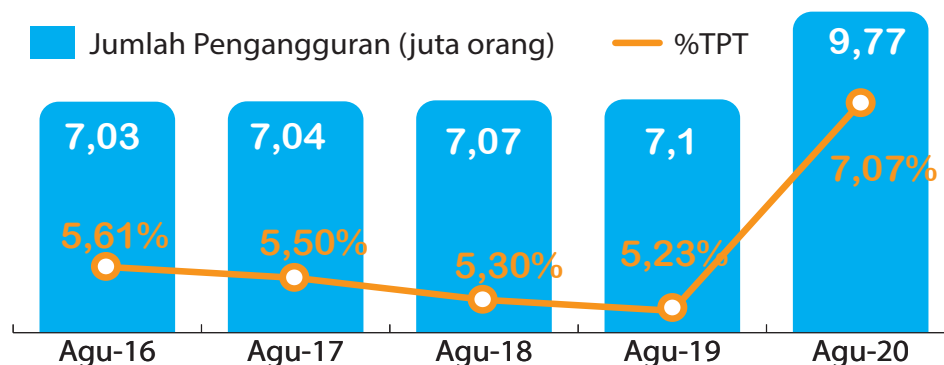
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas pada Agustus 2020 sebanyak 203,97 juta orang, naik 2,79 juta orang dibandingkan Agustus 2019 sebanyak 201,18 juta orang. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019 sebanyak 135,86 juta orang. Adapun tingkat partisipasi kerja pada Agustus 2020 tercatat sebesar 67,77 persen, naik 0,24 poin persentase dibandingkan Agustus 2019 sebesar 67,53 persen.

Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang, 128,45 juta orang, atau 93 persennya memiliki status bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 9,77 juta orang berstatus pengangguran. Berdasarkan data tersebut, jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2020 turun sebesar 301 ribu orang bila dibandingkan dengan jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2019. Sementara itu jumlah pengangguran pada Agustus 2020 bertambah 2,66 juta orang dibandingkan jumlah pengangguran pada Agustus 2019 yang sebesar

7,10 juta orang. Selanjutnya peningkatan jumlah pengangguran juga sejalan dengan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,84 poin persentase, yang semula 5,23 persen pada Agustus 2019 menjadi 7,07 persen pada Agustus 2020.

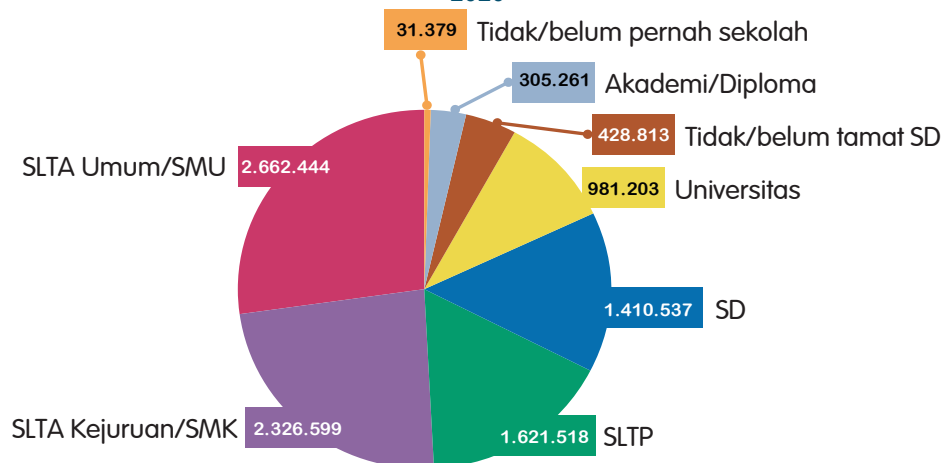
Berdasarkan kelompok usia, TPT pada kelompok usia muda (15-29 tahun) memiliki kontribusi paling tinggi pada jumlah pengangguran di Indonesia, yakni sebanyak 5,96 juta orang atau sebesar 61 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia. Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, jenjang pendidikan menengah atas (SMU dan SMK) berkontribusi paling besar atas jumlah pengangguran terbuka di Indonesia, yakni sebesar 4,99 juta atau 51,07 persen dari total jumlah pengangguran terbuka. Sementara itu jenjang pendidikan lanjutan (akademi/diploma dan universitas) berkontribusi terhadap 13,17 persen terhadap jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2020. Situasi ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Centre for Disaster Protection yang menyatakan bahwa tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan lebih rendah akan lebih rentan untuk kehilangan pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi (Hill, et al. 2020). Hal ini disebabkan oleh pilihan pekerjaan yang akan makin terbatas pada tenaga kerja pada kelompok pendidikan rendah. Sementara itu, perubahan struktur lapangan kerja dan dunia bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 secara relatif akan lebih menguntungkan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Kedepannya, lapangan usaha akan banyak berhubungan dengan teknologi dalam aktivitas bisnisnya, khususnya dalam hal interaksi bisnis (Rahman, et al. 2020). Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja berpendidikan dan memiliki kemampuan di bidang teknologi akan

GAMBAR 30. TINGKAT KEMISKINAN PERDESAAN & PERKOTAAN SEPTEMBER 2019 DAN SEPTEMBER 2020 (PERSEN)



Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 31. JUMLAH PENGANGGURAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN PER AGUSTUS 2020



Sumber : BPS, diolah

memiliki keunggulan komparatif dibanding tenaga kerja berpendidikan rendah.

Dilihat dari jenis lapangan pekerjaannya, sebanyak 38,22 juta orang mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai mata pencaharian utama, atau meningkat 2,77 juta orang apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja di sektor ini pada Agustus 2019. Tingginya jumlah tenaga kerja dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan bahwa sektor ini masih berkontribusi paling besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia dengan jumlah 29,76 persen dari total seluruh tenaga kerja Agustus 2020.

Sejalan dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja dan peningkatan jumlah pengangguran, sebagian besar lapangan pekerjaan mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Tercatat hanya lima sektor lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Jasa Lainnya, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor dengan jumlah peningkatan tenaga kerja terbesar berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peningkatan sebesar 2,77 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah salah satu sektor yang tahan terhadap krisis. Dua hal yang menyebabkan sektor pertanian tahan terhadap krisis adalah (*World Bank* 2020): (1) Permintaan terhadap produk-produk yang berasal dari sektor pertanian cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19, khususnya untuk produk-produk makanan pokok; (2) Sektor pertanian menjadi sektor alternatif tujuan bekerja bagi para pekerja yang terkena pemberhentian hubungan kerja (PHK) dari sektor lain.

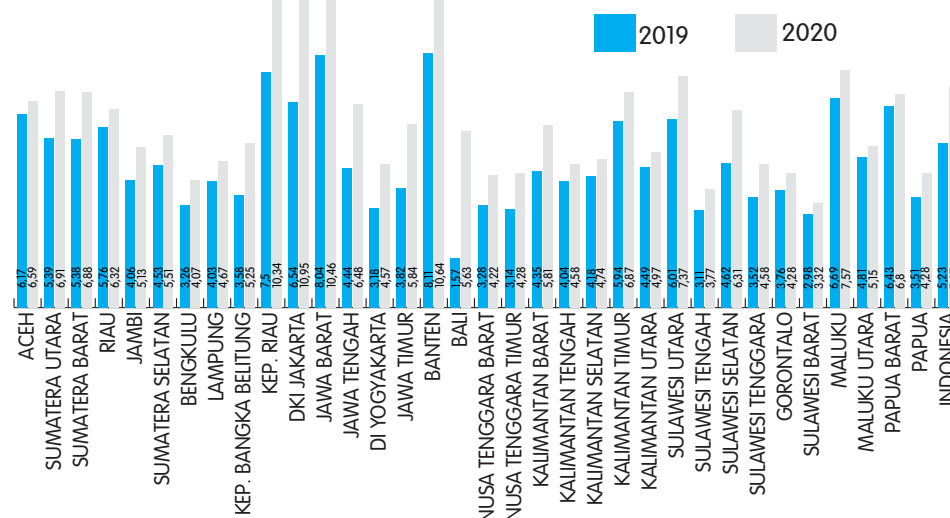
Sementara itu, Industri Pengolahan dan Konstruksi menjadi sektor dengan penurunan jumlah tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 1,71 juta orang dan 608 ribu orang dibandingkan dengan jumlah tenaga

TABEL 6. JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA TAHUN 2019-2020 (JUTA ORANG)

Lapangan Pekerjaan Utama	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,14	35,45	38,96	38,22
2. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	24,83	24,16	24,77	24,70
3. Industri Pengolahan	18,47	19,20	18,71	17,48
4. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8,89	8,56	9,06	8,54
5. Konstruksi	7,76	8,68	8,11	8,07
6. Sektor Lainnya	31,74	31,01	32,14	32,23
TOTAL	131,69	128,76	133,29	128,45

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 32. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN REGIONAL TAHUN 2019-2020 (PERSEN)



Sumber : BPS, diolah

kerja pada Agustus 2019. Salah satu mengapa alasan dua industri ini menjadi penyumbang terbesar penurunan jumlah tenaga kerja adalah karena industri pengolahan dan konstruksi cenderung sulit dilakukan secara remote. Penelitian Mongey et al. (2020) menunjukkan bahwa lapangan usaha yang mempunyai karakteristik pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah Work From Home (WFH) cenderung akan mengalami penurunan tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding dengan pekerjaan dengan kemungkinan WFH rendah.

Jika dilihat pada masing-masing wilayah/provinsi, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 10,95 persen. Sementara itu provinsi dengan tingkat pengangguran terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan 3,32 persen di Agustus 2020. Berdasarkan Gambar 1-19 juga terlihat bahwa seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan TPT pada Agustus 2020. Peningkatan TPT tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan sebesar 4,41 poin persentase dibandingkan dengan Agustus 2019, diikuti dengan Provinsi Bali dengan peningkatan sebesar 4,06 persen. Peningkatan TPT pada Provinsi DKI Jakarta dan Bali mayoritas disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sebagai provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi, Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan karantina yang lebih masif dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini menyebabkan tingkat kelesuan ekonomi yang lebih tinggi dan berakibat pada penutupan permanen dan/atau sementara lapangan usaha dan bisnis

yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pengangguran. Selanjutnya, peningkatan TPT pada Provinsi Bali didominasi oleh kelesuan sektor pariwisata, yang disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan pembatasan perlintasan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan data-data terkait pengangguran di atas, dapat terlihat bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi tenaga kerja di 2020. Menurunnya jumlah orang yang bekerja, meningkatnya jumlah pengangguran, dan naiknya angka TPT menunjukkan kinerja penurunan ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, di masa yang akan datang, pandemi COVID-19 akan mengubah struktur tenaga kerja di Indonesia. Setidaknya tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan perubahan struktur ketenagakerjaan ini. Pertama, dengan memberikan insentif pada sektor pertanian sehingga sektor ini dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja di masa datang. Kedua, dengan memberikan insentif untuk bisnis yang bergerak di sektor informal dan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa banyak tenaga kerja formal yang terkena PHK akan beralih ke sektor usaha informal (Rahman, et al. 2020). Ketiga adalah pelatihan tenaga kerja terkait bidang teknologi dan informasi. Hal ini menjadi penting mengingat permintaan tenaga kerja yang mengerti teknologi kedepannya akan semakin tinggi, mengingat pembatasan sosial yang akan masih sangat mungkin diterapkan dalam jangka waktu menengah sampai dengan pandemi

COVID-19 benar-benar pulih seutuhnya.

2.V. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP)

2.V.A. PERKEMBANGAN NTP NASIONAL

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah proxy yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). NTP menggambarkan kemampuan tukar produk yang dihasilkan petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan (BPS, 2021).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, NTP dihitung dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks harga jual atas hasil produksi petani. Adapun indeks harga yang dibayarkan petani adalah indeks harga barang kebutuhan petani, baik untuk keperluan rumah tangga maupun proses produksi. $NTP = 100$ menandakan bahwa seluruh penerimaan petani telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan

rumah tangga dan produksinya atau dengan kata lain impas. Sementara itu bila $NTP > 100$, maka dapat diartikan bahwa petani masih memiliki sisa (yang dapat disimpan) atas penghasilan yang ia terima setelah dikurangi dengan pembayaran seluruh kebutuhan rumah tangga dan produksinya. Adapun bila $NTP < 100$, maka berlaku sebaliknya.

Di tahun 2020, NTP nasional tercatat mencapai 101,65. Lebih tinggi daripada capaian di tahun 2019 yang berada di angka 100,9. Dilihat dari capaian bulanan, NTP tiap bulan secara umum telah berada di atas 100 atau dengan kata lain indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani. Hanya di bulan Mei dan Juni saja capaian NTP berada di bawah 100, yaitu di angka 99,47 dan 99,60. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum para petani dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2020. Capaian tersebut sekaligus memberikan sinyal positif akan proses perbaikan tingkat kesejahteraan para petani di negeri ini.

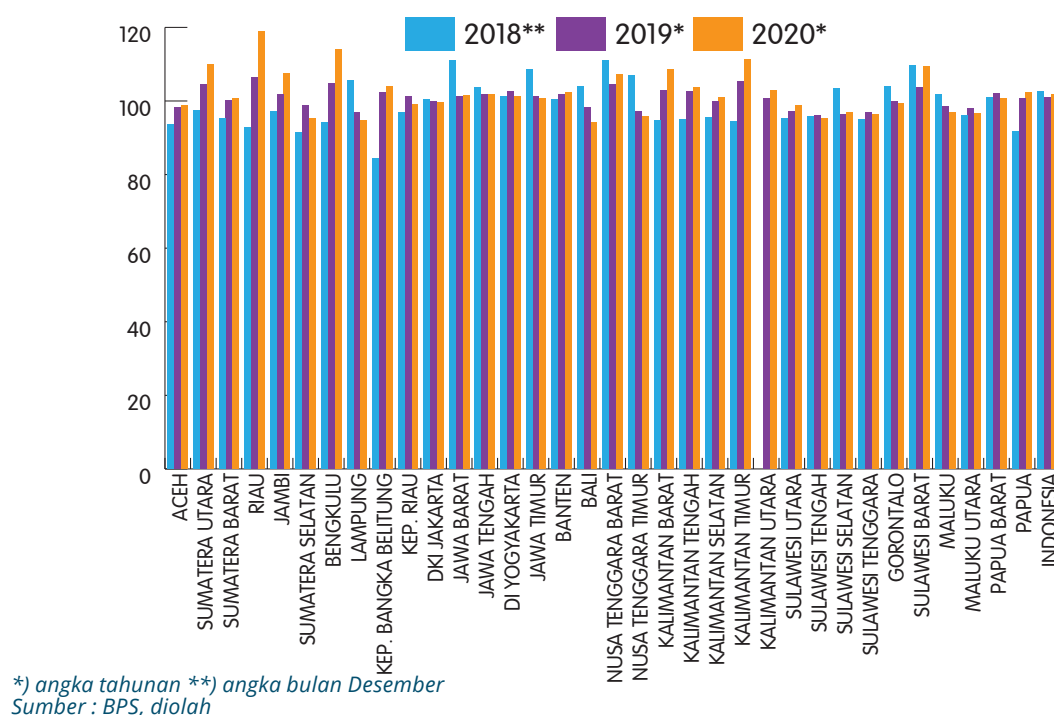
Kebutuhan atas Upah Buruh menjadi pengeluaran dengan indeks tertinggi (106,58) pada kelompok pengeluaran Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM). Sementara itu, di kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga, indeks tertinggi dicatatkan oleh pengeluaran atas Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (108,62). Di sisi lain, pengeluaran untuk keperluan Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan merupakan pengeluaran dengan

TABEL 7. KOMPONEN HARGA PENYUSUN NTP

Sektor NTP (2018=100)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	109,37	108,95	107,78	106,01	105,10	105,35	105,85	106,26	107,30	108,17	109,26	110,15
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	105,00	105,42	105,57	105,67	105,66	105,77	105,75	105,57	105,55	105,80	106,22	106,69
Indeks Konsumsi Rumah Tangga	105,13	105,63	105,83	105,95	105,88	105,96	105,83	105,53	105,45	105,71	106,24	106,86
Makanan, Minuman Dan Tembakau	105,54	106,32	106,57	106,66	106,40	106,49	106,14	105,54	105,35	105,75	106,65	107,64
Pakaian Dan Alas Kaki	106,88	107,04	107,22	107,36	108,11	108,17	108,38	108,45	108,49	108,55	108,59	108,73
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Lainnya	102,36	102,40	102,46	102,55	102,64	102,63	102,65	102,76	102,80	102,87	102,95	103,04
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,08	106,33	106,53	106,78	106,99	107,15	107,31	107,53	107,64	107,77	107,91	108,12
Kesehatan	106,58	106,75	107,06	107,19	107,31	107,46	107,63	107,76	107,87	108,03	108,12	108,30
Transportasi	103,86	103,89	103,90	103,96	104,04	104,12	104,24	104,25	104,30	104,33	104,36	104,41
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	103,35	103,42	103,49	103,64	103,67	103,65	103,70	103,73	103,73	103,73	103,74	103,82
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	106,68	106,79	106,91	106,96	107,06	107,23	107,58	107,69	107,72	107,81	107,86	107,96
Pendidikan	103,00	103,05	103,10	103,10	103,10	103,11	103,19	103,19	103,21	103,21	103,21	103,21
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	105,05	105,23	105,38	105,51	105,60	105,76	105,96	106,02	106,07	106,13	106,22	106,32
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	106,62	106,79	107,28	107,78	108,13	108,30	108,61	109,19	109,42	109,54	109,58	109,74
Indeks BPPBM	104,44	104,63	104,75	104,83	104,93	105,09	105,29	105,38	105,47	105,62	105,79	105,92
Bibit	103,41	103,54	103,60	103,65	103,75	103,86	104,13	104,24	104,26	104,56	104,78	104,93
Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan	103,21	103,35	103,47	103,54	103,57	103,64	103,80	103,84	104,01	104,24	104,39	104,56
Sewa dan Pengeluaran Lainnya	103,41	103,61	103,71	103,79	103,87	103,99	104,15	104,22	104,23	104,29	104,35	104,41
Transportasi Dan Komunikasi	104,02	104,07	104,13	104,20	104,31	104,41	104,50	104,57	104,62	104,66	104,70	104,74
Barang Modal	104,07	104,21	104,39	104,46	104,57	104,70	104,83	104,94	105,00	105,11	105,22	105,33
Upah Buruh	105,67	105,92	106,07	106,20	106,35	106,55	106,76	106,89	106,97	107,06	107,21	107,35
NILAI TUKAR PETANI	104,16	103,35	102,09	100,32	99,47	99,60	100,09	100,65	101,66	102,25	102,86	103,25
NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN	104,72	104,13	102,90	101,13	100,16	100,25	100,53	100,84	101,74	102,42	103,28	104,00

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 33. CAPAIAN NTP TIAP PROVINSI PERIODE 2018 S.D. 2020

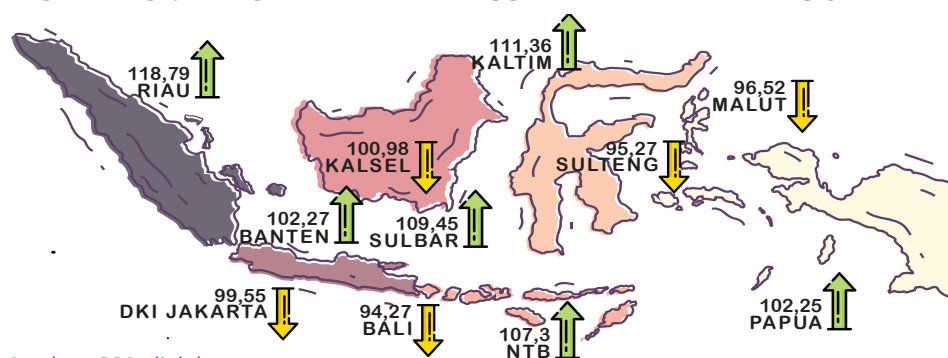


indeks terendah (103,80) pada kelompok BPPBM sedangkan pengeluaran atas Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya menjadi pengeluaran dengan indeks terendah (102,68) di kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga.

Provinsi Riau menjadi daerah dengan NTP tertinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 118,79. Capaian ini mengulang kesuksesan Riau di tahun 2019 yang juga menjadi provinsi dengan NTP tertinggi. Posisi kedua daerah dengan NTP tertinggi di tahun 2020 adalah Bengkulu dengan NTP mencapai 114,1. Di lain pihak, 14 provinsi masih mencatatkan NTP di bawah 100. Dua di antaranya adalah Bali dan Lampung, yang menjadi daerah dengan NTP terendah di tahun 2020 dengan capaian masing-masing sebesar 94,27 dan 94,73.

2.V.B. PERKEMBANGAN NTP REGIONAL

GAMBAR 34. PETA CAPAIAN NTP TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL



Sumatera menjadi regional dengan disparitas capaian NTP tertinggi. Disusul berturut-turut ada Sulawesi, Bali – Nusra, Kalimantan, Maluku – Papua, dan terakhir Jawa. Riau sebagai provinsi dengan NTP tertinggi di Regional Sumatera, dan juga nasional, terpaut 24,06 poin dari Lampung yang menjadi provinsi dengan capaian terendah di regional tersebut. Sementara di regional Sulawesi, Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan capaian NTP tertinggi, yaitu 109,45. Terpaut 14,18 poin, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan NTP terendah di Regional Sulawesi pada tahun 2020.

Di Regional Bali – Nusra, Nusa Tenggara Barat mencatatkan NTP tertinggi dengan capaian sebesar 107,3. Sementara Bali menjadi yang terendah di regional yang tersebut dengan capaian sebesar 94,27. Di Regional Kalimantan, Kalimantan Timur mencatat capaian NTP tertinggi, yaitu 111,36 sedangkan Kalimantan Selatan menjadi provinsi

dengan NTP terendah, yaitu 100,98. Di Regional Maluku – Papua, Papua mencatat capaian NTP tertinggi yaitu sebesar 102,25. Sedangkan Maluku Utara menjadi provinsi dengan capaian NTP terendah yaitu sebesar 96,52. Di Regional Jawa, Banten tampil sebagai provinsi dengan NTP tertinggi, yaitu sebesar 102,27. Terpaut 2,72 poin, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian terendah di Regional Jawa dengan NTP sebesar 99,55.

2.VI. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

2.VI.A. PERKEMBANGAN NTN NASIONAL

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah proxy yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan. NTN diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan (Ib). NTN menggambarkan kemampuan tukar produk yang dihasilkan nelayan dengan produk yang dibutuhkan nelayan dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTN menunjukkan tingkat daya saing produk perikanan tangkap dibandingkan dengan produk lain (BPS, 2021).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, NTN dihitung dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan (Ib). Indeks harga

yang diterima nelayan merupakan indeks harga jual atas hasil produksi nelayan (ikan tangkapan). Adapun indeks harga yang dibayarkan nelayan adalah indeks harga barang kebutuhan nelayan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun proses produksi. NTN = 100 menandakan bahwa seluruh penerimaan nelayan telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan produksinya atau dengan kata lain impas. Sementara itu bila NTN > 100, maka dapat diartikan bahwa nelayan masih memiliki sisa (yang dapat disimpan) atas penghasilan yang diterima setelah dikurangi dengan pembayaran seluruh kebutuhan rumah tangga dan produksinya. Adapun bila NTN < 100, maka berlaku sebaliknya.

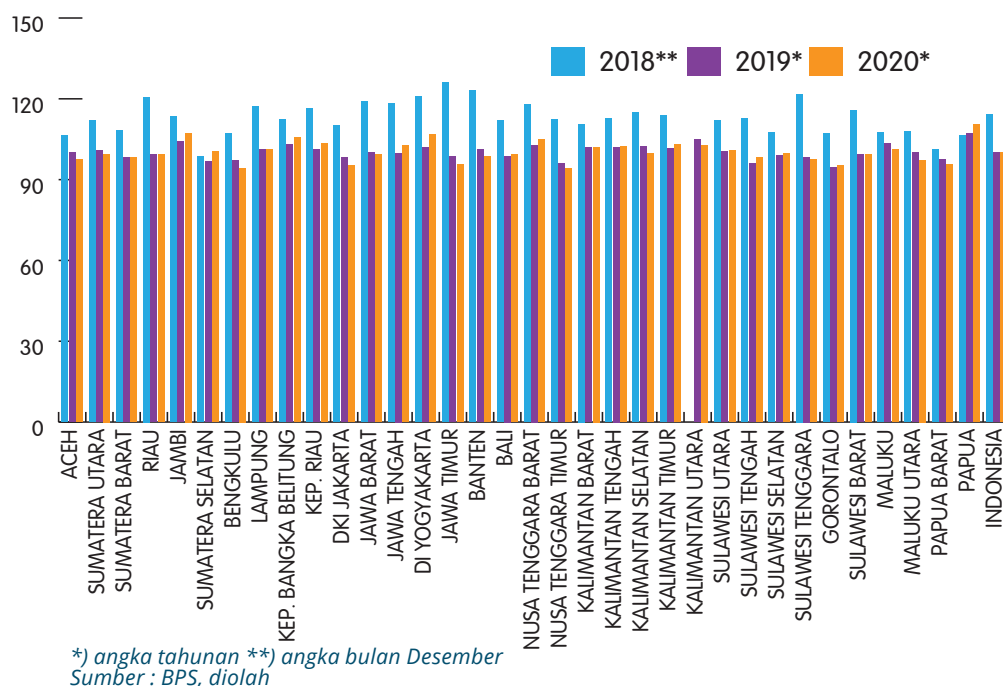
Di tahun 2020, NTN nasional tercatat mencapai 100,22. Sedikit lebih rendah daripada capaian di tahun 2019 yang berada di angka 100,23. Dilihat dari capaian bulanan, NTN tiap bulan secara umum telah berada di atas 100 atau dengan kata lain indeks harga yang diterima nelayan lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan nelayan. Hanya saja di kuartal ke-2, capaian NTN kompak berada di bawah 100, yaitu di angka 98,49, 98,69, dan 99,22. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum para nelayan dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2020. Meski demikian, surplus pendapatan yang diterima nelayan dapat dikatakan sangat kecil. Oleh karena itu, kiranya dapat menjadi perhatian bersama agar kelak kesejahteraan nelayan dapat lebih ditingkatkan.

TABEL 8. KOMPONEN HARGA PENYUSUN NTN

Sektor NTN (2018=100)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	105,41	104,92	104,73	103,31	103,54	104,22	105,01	105,34	105,68	105,80	106,29	107,65
Penangkapan Perairan Umum	106,26	106,10	106,15	105,98	106,42	105,94	106,17	106,26	106,20	106,26	106,41	106,90
Penangkapan Laut	105,12	104,58	104,40	102,90	103,15	103,90	104,79	105,17	105,53	105,63	106,07	107,52
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	104,25	104,59	104,68	104,90	104,92	105,04	105,01	104,94	104,93	105,03	105,27	105,54
Konsumsi Rumah Tangga	105,08	105,66	105,79	106,11	106,10	106,23	106,09	105,83	105,78	105,96	106,36	106,81
Makanan, Minuman Dan Tembakau	105,49	106,35	106,49	106,90	106,79	106,93	106,65	106,16	106,05	106,30	106,91	107,59
Pakaian Dan Alas Kaki	106,14	106,28	106,46	106,56	107,14	107,20	107,40	107,47	107,51	107,57	107,61	107,75
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,40	102,39	102,47	102,57	102,72	102,67	102,66	102,77	102,80	102,83	102,93	103,03
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,85	106,11	106,28	106,46	106,64	106,79	106,91	107,07	107,15	107,28	107,39	107,57
Kesehatan	106,06	106,23	106,46	106,57	106,72	106,87	107,01	107,09	107,15	107,29	107,41	107,55
Transportasi	104,10	104,11	104,13	104,18	104,27	104,33	104,39	104,42	104,44	104,48	104,51	104,56
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	102,64	102,65	102,72	102,80	102,78	102,78	102,82	102,84	102,85	102,85	102,86	102,89
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	105,88	106,02	106,14	106,20	106,34	106,53	106,84	106,92	106,96	106,97	107,03	107,08
Pendidikan	102,10	102,11	102,18	102,18	102,18	102,20	102,22	102,22	102,23	102,23	102,23	102,26
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	104,51	104,71	104,81	104,92	105,01	105,12	105,29	105,35	105,38	105,45	105,53	105,60
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	105,83	106,02	106,40	106,84	107,11	107,28	107,58	108,10	108,29	108,39	108,43	108,55
BPPBM	103,23	103,27	103,31	103,36	103,38	103,48	103,57	103,70	103,73	103,75	103,82	103,89
Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	104,12	104,19	104,23	104,25	104,34	104,54	104,66	104,77	104,81	104,84	104,97	104,98
Transportasi Dan Komunikasi	102,31	102,23	102,24	102,31	102,32	102,40	102,49	102,62	102,63	102,60	102,62	102,73
Barang Modal	103,89	104,08	104,21	104,27	104,29	104,38	104,48	104,62	104,70	104,76	104,82	104,91
Upah Buruh	103,67	103,72	103,73	103,74	103,75	103,79	103,87	103,91	103,95	104,03	104,11	104,16
NILAI TUKAR NELAYAN	101,11	100,31	100,05	98,49	98,69	99,22	100,01	100,38	100,72	100,73	100,97	102,00
NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN	102,11	101,60	101,37	99,96	100,15	100,72	101,40	101,58	101,88	101,97	102,38	103,62

Sumber : BPS, diolah

GAMBAR 35. CAPAIAN NTN TIAP PROVINSI PERIODE 2018 S.D. 2020



Kebutuhan atas Sewa dan Pengeluaran Lainnya menjadi pengeluaran dengan indeks tertinggi (104,56) pada kelompok pengeluaran Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM). Sementara itu, di kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga, indeks tertinggi dicatatkan oleh pengeluaran atas Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (107,40). Di sisi lain, pengeluaran untuk keperluan Transportasi dan Komunikasi merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (102,46) pada kelompok BPPBM sedangkan pengeluaran atas Pendidikan menjadi pengeluaran dengan indeks terendah (102,20) di kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga.

Provinsi Papua menjadi daerah dengan NTN tertinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 110,52. Capaian ini mengulang kesuksesan Papua di tahun 2019 yang juga menjadi provinsi dengan

NTN tertinggi. Posisi kedua daerah dengan NTN tertinggi di tahun 2020 adalah Jambi dengan NTN mencapai 107,31. Di lain pihak, 19 provinsi masih mencatatkan NTN di bawah 100. Dua di antaranya adalah Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu, yang menjadi daerah dengan NTN terendah di tahun 2020 dengan capaian masing-masing sebesar 94,20 dan 94,31.

2.VI.B. PERKEMBANGAN NTN REGIONAL

Maluku – Papua menjadi regional dengan disparitas capaian NTN tertinggi. Disusul berturut-turut ada Sumatera, Jawa, Bali – Nusra, Sulawesi, dan terakhir Kalimantan. Papua sebagai provinsi dengan NTN tertinggi di Regional Maluku – Papua, dan juga nasional, terpaut 14,96 poin dari Papua Barat yang menjadi provinsi dengan capaian

GAMBAR 36. PETA CAPAIAN NTN TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL



Sumber : BPS, diolah

terendah di regional tersebut. Sementara di regional Sumatera, Jambi menjadi provinsi dengan capaian NTN tertinggi, yaitu 107,31. Terpaut 13 poin, Bengkulu menjadi provinsi dengan NTN terendah di Regional Sumatera pada tahun 2020.

Di Regional Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan NTN tertinggi dengan capaian sebesar 106,66. Sementara DKI Jakarta menjadi yang terendah di regional yang tersebut dengan capaian sebesar 95,19. Di Regional Bali – Nusra, Nusa Tenggara Barat mencatat capaian NTN tertinggi, yaitu 104,89 sedangkan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan NTN terendah, yaitu 94,20. Di Regional Sulawesi, Sulawesi Utara mencatat capaian NTN tertinggi yaitu sebesar 100,83. Sedangkan Gorontalo menjadi provinsi dengan capaian NTN terendah yaitu sebesar 95,23. Di Regional Kalimantan, Kalimantan Timur tampil sebagai provinsi dengan NTN tertinggi, yaitu sebesar 103,17. Terpaut 3,34 poin, Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan capaian terendah di Regional Kalimantan dengan NTN sebesar 99,83.



BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TAHUN 2018-2020

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2020 telah menjalankan peran sebagai instrumen *countercyclical* yang dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang dalam. APBN 2020 menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal ekspansif, memberikan berbagai stimulus ekonomi yang berfokus sebagai jaringan pengaman sosial (*social safety net*). Kebijakan pemerintah yang memberikan relaksasi dan insentif perpajakan guna menstimulus perekonomian nasional, menyebabkan penurunan realisasi pendapatan sebesar 15,96 persen atau Rp312,83 triliun dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.593,53 triliun atau tumbuh sebesar 12,31 persen sejalan dengan kebijakan ekspansif dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.831 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp762,53 triliun sehingga telah berkontribusi cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian, sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang ekspansif dan bersifat *countercyclical*. Kenaikan signifikan terlihat pada

pos belanja tidak terduga yang merepresentasikan keseriusan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Namun demikian, defisit anggaran masih terjaga di bawah target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar 6,34 persen terhadap PDB, yaitu pada kisaran 6,13 persen. Hal tersebut menunjukkan kesadaran Pemerintah akan APBN yang merupakan instrumen penting sehingga harus tetap sustainable, sehat, dan kredibel. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan yang terealisasi sebesar Rp1.191,47 triliun atau sebesar 114,65 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan menghasilkan SiLPA sebesar Rp245,70 triliun.

Secara spasial, konsentrasi pendapatan dan belanja negara berada di Regional Jawa. Hal ini tidak terlepas dari basis pencairan belanja saat ini berdasarkan lokasi satker pengelola DIPA berada serta pencairan atas beberapa alokasi anggaran dengan nilai yang besar dilakukan secara tersentralisasi oleh K/L pusat. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan belanja perkapita, masyarakat di Regional Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 151,59 juta jiwa menempati urutan pertama yang terlihat memperoleh alokasi belanja hampir Rp15 juta per kapita, kemudian disusul oleh Regional Maluku-Papua yang memperoleh alokasi belanja sebesar Rp5,35 juta perkapita dan Regional Kalimantan sebesar Rp3,15 juta perkapita.

Pelaksanaan program PC-PEN pada tahun anggaran 2020 terbagi kedalam enam kluster yang terdiri dari kluster kesehatan, perlindungan sosial, sectoral K/L & Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Realisasi anggaran dari program PC-PEN tahun anggaran 2020 mencapai Rp579,78 triliun atau sebesar 22,35 persen dari total belanja negara. Kluster perlindungan sosial menjadi kluster dengan realisasi anggaran terbesar yaitu Rp220,39 triliun atau 95,73 persen dari alokasi anggaran, kemudian secara berurutan disusul kluster UMKM sebesar Rp112,44 triliun (96,67 persen dari alokasi anggaran), kluster sectoral K/L & Pemda sebesar Rp66,59 triliun (98,13 persen dari alokasi anggaran), kluster kesehatan Rp63,51 triliun (63,83 persen dari alokasi anggaran), kluster pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun (100 persen dari alokasi anggaran), dan kluster insentif usaha sebesar Rp56,12 triliun (46,53 persen dari alokasi anggaran).

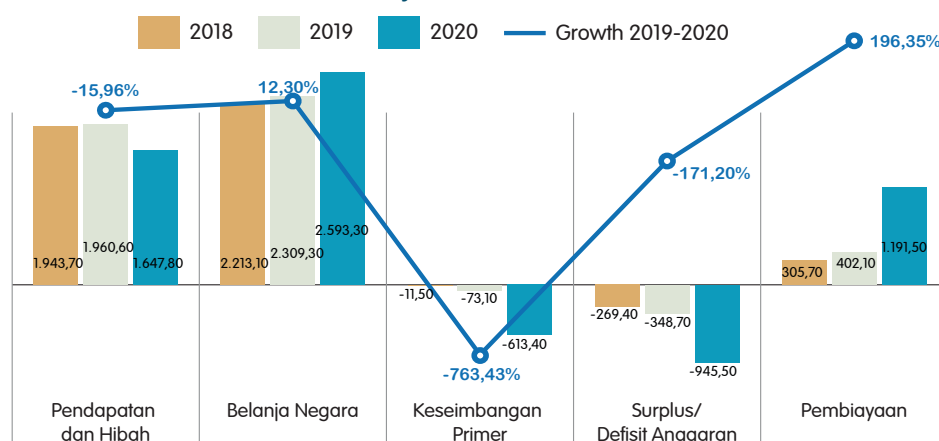
1. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA APBN

Tema besar APBN Tahun Anggaran 2020 adalah “Mendukung Indonesia Maju”. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,1% (%YoY), nilai tukar rupiah Rp14.400, suku

Bungan SPN 5,4%, harga minyak mentah US\$63/barrel, lifting minyak 755 ribu barrel/hari dan lifting gas 1.191 barrel/hari.

Namun, munculnya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya perubahan prioritas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dilakukannya perubahan postur APBN 2020 dengan diterbitkannya Perpres nomor 72 Tahun 2020. Postur APBN dirubah untuk memberikan stimulus bagi masyarakat terutama yang paling terdampak COVID-19. Berbagai keterpurukan ekonomi tidak menyurutkan usaha pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui pelaksanaan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN 2020 dan belanja daerah untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat,

GAMBAR 37. KINERJA APBN TAHUN 2018 – 2020



Sumber : OMSPAN, diolah

perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. Selain itu, komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga memberikan harapan perbaikan ekonomi.

APBN tahun 2020 secara efektif menjadi instrumen countercyclical dalam menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah pada tahun 2020 telah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan mengalokasikan stimulus ekonomi yang komprehensif, salah satunya berfokus pada jaringan pengaman sosial (*social safety net*). Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat miskin dan rentan meningkat, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Kebijakan ekspansif dilakukan secara terkendali tersebut menjadikan defisit anggaran hingga akhir tahun

2020 mencapai minus Rp945,53 T atau 6,13% terhadap PDB, tetap terjaga di bawah target yang ditetapkan pada Perpres nomor 72 Tahun 2020 sebesar 6,34% terhadap PDB.

Realisasi sementara Pendapatan dan hibah mencapai 1.647,77 T (96,93%), tumbuh negatif hingga 15,96% dari realisasi tahun 2019 YoY. Realisasi belanja negara mencapai 2.593,30 T (94,67%), tumbuh positif 12,30%. Keseimbangan primer bergeser ke angka -Rp631,45 T atau tumbuh negatif hingga 763,43%. Hal ini menunjukkan betapa APBN 2020 bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di mana Pendapatan dan hibah (terutama perpajakan) dan Belanja Negara menjadi instrumen utama kebijakan countercyclical APBN. Di sisi lain,

GAMBAR 38. KINERJA APBN TAHUN 2018 – 2020



Sumber : ...

realisasi sementara pembiayaan anggaran tahun 2020 mencapai Rp1.191,48 T, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp1.227,81 T. Pembiayaan utang utamanya dilakukan untuk mendukung penanganan dampak COVID-19 dan program PEN.

Berdasarkan kondisi defisit anggaran dan pembiayaan anggaran tahun 2020, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp245,94 T yang dapat dipergunakan sebagai fiscal buffer dalam APBN TA 2021, antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan program vaksinasi.

1.I. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA

Hingga tutup tahun 2020, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah tercatat telah mencapai Rp1.647,8 triliun atau 96,93 persen dari target pada APBN Perpres 72/2020. Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp312,87 triliun dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah masih menunjukkan kontraksi dengan tumbuh negatif 15,96 persen dari tahun 2019 (yoy).

Secara nominal, realisasi sementara komponen penerimaan dalam negeri mencapai Rp1.628,99 triliun atau 95,90 persen dari target APBN Perpres 72/2020. Angka ini masih lebih rendah Rp326,14 persen dari realisasi tahun lalu, atau terkontraksi dengan tumbuh negatif 16,68 persen. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan yang bersumber dari Perpajakan sebesar Rp1.285,14 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp343,86 triliun. Pertumbuhan realisasi

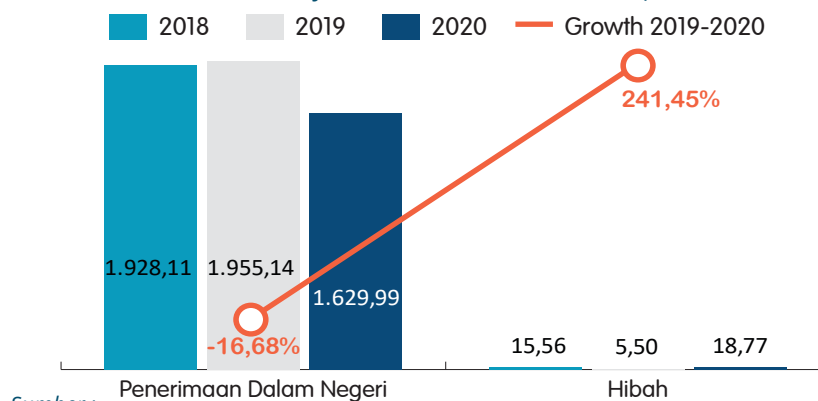
penerimaan Perpajakan dan PNBP berturut-turut sebesar negatif 16,88 persen (yoy) dan negatif 15,93 persen (yoy). Berdasarkan capaian realisasi sementara terhadap APBN Perpres 72/2020, penerimaan dari Perpajakan dan PNBP masing-masing mencapai 91,50 persen dan 116,90 persen. Sementara itu realisasi Hibah mencapai Rp18,77 triliun.

1.I.A. PENDAPATAN PERPAJAKAN

Sampai dengan akhir tahun 2020, penerimaan perpajakan yang tercatat masuk ke Kas Negara adalah sebesar Rp1.285,18 triliun. Dampak pandemi COVID-19 serta pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Bila dibandingkan penerimaan tahun lalu, penerimaan pajak terkontraksi sebesar 16,88 persen (yoy). Mengingat kondisi yang *extraordinary*, capaian ini dirasa cukup positif, dengan realisasi sebesar 91,50 persen dari target APBN Perpres 72/2020 sebesar Rp1.404,51 triliun. Bahkan, jika dilihat dari sisi persentase capaian realisasi, persentase penerimaan perpajakan tahun 2020 lebih tinggi dengan tahun 2019, yakni 86,55 persen dari target.

Untuk tahun 2020, pajak dalam negeri masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan yaitu mencapai 97,14 persen. Realisasi pajak dalam negeri tahun 2020 sebesar Rp1.248,42, terkontraksi 17,05 persen dari realisasi tahun 2019 (yoy), namun secara persentase realisasi terhadap target lebih tinggi dibanding tahun 2019, yaitu 91,06 persen berbanding 86,35 persen. Di tengah *shortfall* penerimaan perpajakan tahun 2020, dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 91,50 persen, terdapat komponen penerimaan pajak dalam negeri yang mampu melebihi target APBN

GAMBAR 39. KINERJA APBN TAHUN 2018 – 2020 (DALAM TRILIUN)



TABEL 9. PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018		2019		2020		Growth
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
Penerimaan Perpajakan	1.518,79	93,86	1.546,14	86,55	1.285,14	91,5	-16,88%
Pajak Dalam Negeri	1.472,91	93,26	1.505,09	86,35	1.248,42	91,06	-17,05%
Pajak Penghasilan	749,98	87,7	772,27	86,34	594,03	88,61	-23,08%
Migas	64,70	169,66	59,15	89,41	33,03	103,67	-44,16%
Non Migas	685,28	83,88	713,12	86,09	561,01	87,86	-21,33%
Pajak Pertambahan Nilai	537,27	99,16	531,58	81,11	450,33	88,73	-15,28%
Pajak Bumi dan Bangunan	19,44	111,95	21,15	110,69	20,95	155,88	-0,91%
Cukai	159,59	102,7	172,42	104,18	176,31	102,39	2,25%
Pajak Lainnya	6,63	68,4	7,68	89,18	6,79	90,72	-11,55%
Pajak Perdagangan Internasional	45,88	118,56	41,05	94,76	36,72	109,66	-10,55%
Bea Masuk	39,12	109,57	37,53	96,47	32,44	101,92	-13,55%
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	6,77	225,5	3,53	79,74	4,28	258,76	21,30%

Sumber : OMSPAN, diolah

Perpres 72/2020, yaitu PPh Migas, Pajak Bumi dan Bangunan dan Cukai dengan persentase realisasi terhadap target secara berurutan mencapai 103,67 persen, 155,88 persen dan 102,39 persen. Membaiknya kinerja PPh Migas tidak lepas dari kembali membaiknya harga minyak dunia pada Q3 dan Q4 2020, setelah sempat mengalami tekanan yang cukup dalam pada bulan April. Bahkan harga minyak *West Texas Intermediate crude* (WTI) sempat mencatatkan harga minyak negatif pertama kalinya dalam sejarah. Demikian pula Pajak Bumi dan Bangunan yang kinerjanya ditopang oleh jenis pajak PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai kontributor utama. Sementara penerimaan Cukai ditutup dengan pertumbuhan positif 2,25 persen jika dibandingkan penerimaan pada tahun 2019. Persentase capaian terhadap realisasi cukai tahun 2020 mencapai 102,39 persen, di atas target APBN Perpres 72/2020. Penerimaan cukai, dikontribusikan oleh cukai Hasil Tembakau (HT) yang tumbuh 3,26 persen sepanjang tahun 2020.

Pajak perdagangan internasional tahun 2020 menyumbang Rp36,72 triliun, atau 2,86% dari keseluruhan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Realisasi tahun 2020 ini berkontraksi dengan tumbuh negatif hingga 10,55 persen. Namun demikian, secara keseluruhan penerimaan perpajakan dari pajak perdagangan internasional melebihi target APBN Perpres 72/2020 dengan persentase capaian terhadap target mencapai 109,66 persen. Bea Keluar (BK)/Pungutan ekspor menunjukkan kinerja yang luar biasa pada tahun 2020 yang ditutup dengan realisasi mencapai 4,28 triliun, atau tumbuh positif hingga 21,30 persen

dari realisasi tahun 2019. Realisasi melebihi target APBN Perpres 72/2020 dengan persentase capaian terhadap target mencapai 258,76 persen. Hal ini dipengaruhi harga CPO dunia yang mulai naik akibat mulai pulihnya permintaan dunia. Kebijakan lockdown negara eksportir CPO lainnya (Malaysia), menjadi windfall bagi ekspor CPO Indonesia dan penerimaan BK.

1.I.B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2020 mencapai Rp343,86 triliun atau 116,90 persen terhadap target Perpres 72/2020 atau tumbuh negatif 15,93 persen (yoy) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Lebih tingginya realisasi PNBP 2020 dari target Perpres 72/2020, utamanya diakibatkan peningkatan harga komoditas (minyak dan batu bara) dari asumsi yang ditetapkan, adanya penerimaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta kenaikan pungutan ekspor pada BLU Sawit. Sementara itu, menurunnya realisasi sementara tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 terutama berasal dari penurunan realisasi sementara PNBP SDA sebesar 36,84 persen. Hal ini terjadi karena menurunnya harga komoditas dan lifting minyak bumi sebagai penopang utama penerimaan SDA akibat dari pandemi COVID-19. Selain itu, pertumbuhan negatif PNBP pada tahun 2020 juga terjadi pada PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya masing-masing negatif sebesar 18,14 persen dan 10,17

TABEL 10. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018		2019		2020		Growth
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,32	148,61	408,99	108,11	343,86	116,9	-15,93%
Penerimaan Sumber Daya Alam	180,59	174,19	154,90	81,2	96,61	122,15	37,63%
Migas	142,79	177,71	121,09	75,79	68,45	128,45	-43,47%
Minyak Bumi	101,49	170,33	83,62	70,50	44,24	109,55	-47,09%
Gas Alam	41,30	198,89	37,47	91,00	24,21	187,55	-35,38%
Non Migas	37,80	162,07	33,81	109,13	28,15	109,14	-16,73%
Bagian Laba BUMN	45,12	100,94	80,73	177,07	66,08	101,66	-18,14%
PNBP Lainnya	128,52	153,45	124,50	132,35	111,84	111,78	-10,17%
Pendapatan BLU	55,09	127,22	48,87	102,06	69,33	138,67	41,88%

Sumber : OMSPAN, diolah

persen. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya pendapatan surplus BI, dividen BUMN, pendapatan PHT dan DMO.

Selama tahun 2020 telah dilakukan juga beberapa kebijakan berupa relaksasi PNBP sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam rangka mendukung program PEN tersebut, PNBP melalui fungsi pengaturan (regulerend) berkontribusi memberikan relaksasi dalam bentuk pengaturan jenis dan tarif PNBP tertentu. Adapun bentuk relaksasi yang digulirkan tahun ini meliputi pengenaan tarif sampai dengan nol Rupiah, pemberian keringanan, dan pengaturan jatuh tempo.

Satu hal yang menjadi catatan penting adalah peningkatan pendapatan BLU tahun 2020 yang mencapai 69,33 triliun, tumbuh positif hingga 41,88 persen (yoy) dari tahun 2019. Kunci peningkatan pendapatan BLU yang sangat signifikan ini sinergi dan kerja keras dari BLU teknis bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menjalankan kebijakan pemerintah, yang antara lain melalui refocusing anggaran, transfer kas antar BLU serta simplifikasi 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi satu peraturan Menteri Keuangan yang dapat menjadi pedoman dan memudahkan pemahaman stakeholders.

1.I.C. PENDAPATAN HIBAH

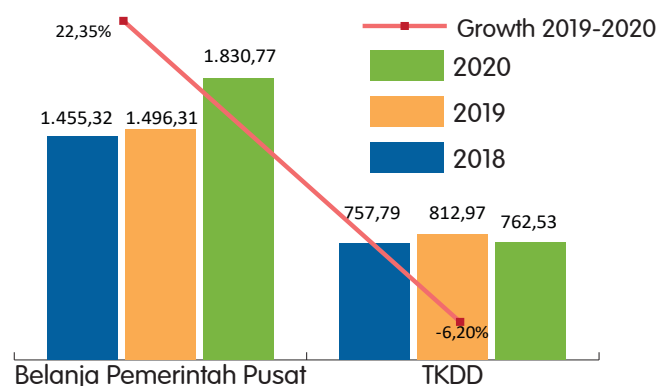
Pendapatan hibah merupakan pendapatan dengan kontribusi paling sedikit dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya (Perpajakan dan PNBP). Selama tiga tahun anggaran terakhir, realisasi

pendapatan hibah mengalami fluktuasi dengan realisasi tahun 2018, 2019 dan 2020 secara berurutan adalah Rp15,56 triliun, Rp5,50 triliun dan Rp18,77 triliun. Meski masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. realisasi pendapatan hibah tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 241,45% (YoY).

1.II. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA

Realisasi sementara Belanja Negara sampai akhir tahun 2020 mencapai Rp2.593,30 triliun (94,67 persen dari pagu Perpres APBN 72/2020), atau meningkat 12,30 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi sementara Belanja Negara tersebut meliputi realisasi sementara Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.830,77 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762,53 triliun. Secara nominal, realisasi sementara Belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 tumbuh sebesar 22,35 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi sementara bantuan sosial yang mencapai Rp202,55 triliun atau sekitar 116,06 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh signifikan hingga 80,08 persen (yoy) dari periode yang sama tahun 2019, terutama karena adanya perluasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.

GAMBAR 40. PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA NEGARA TAHUN 2018 S.D. 2020



Sumber : OMSPAN, diolah

Realisasi sementara belanja subsidi sampai dengan akhir Desember 2020 mencapai Rp196,23 triliun atau 102,19 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi sementara subsidi energi sampai dengan akhir Desember 2020 mencapai Rp108,84 triliun atau 113,84 persen melebihi pagu APBN Perpres 72/2020. Hal ini disebabkan oleh kebijakan penanganan COVID-19 dengan memberikan diskon listrik kepada masyarakat miskin dan penerapan PSBB yang mengakibatkan menurunnya konsumsi BBM dan meningkatnya konsumsi LPG rumah tangga. Realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp47,74 triliun, atau 116,11 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Sementara itu, realisasi belanja

subsidi listrik mencapai Rp61,10 triliun atau 112,13 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi ICP (rata-rata US\$40,45/ barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Perpres 72/2020 (US\$33/barel). Realisasi sementara subsidi nonenergi sampai dengan akhir Desember 2020 mencapai Rp87,39 triliun atau 90,64 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020.

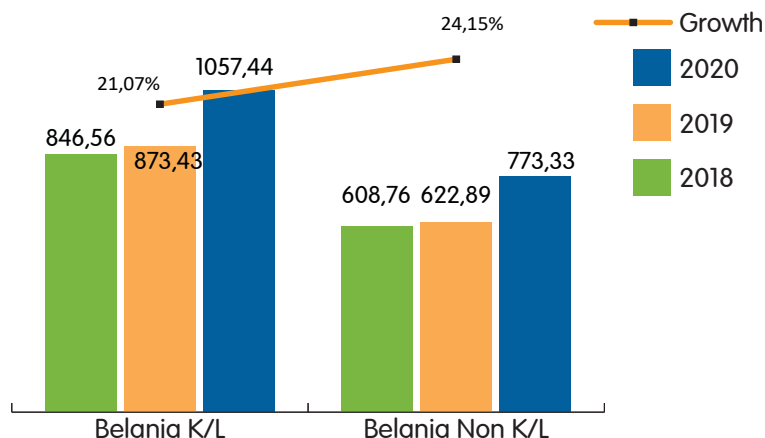
Realisasi sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Desember 2020 mencapai Rp762,53 triliun atau 99,82 persen

TABEL 11. RINCIAN REALISASI BELANJA NEGARA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018		2019		2020		Growth
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
B. Belanja Negara	2.213,10	99,66%	2.309,29	93,83%	2.593,30	94,67%	12,30%
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.455,30	100,06%	1.496,31	91,55%	1.830,77	92,69%	22,35%
1. Belanja Pegawai	346,90	94,86%	376,07	98,62%	380,53	94,26%	1,19%
2. Belanja Barang	347,50	102,16%	334,42	94,04%	421,96	154,47%	26,18%
3. Belanja Modal	184,10	90,31%	177,84	99,21%	189,10	137,64%	6,33%
4. Pembayaran Kewajiban utang	258,00	108,11%	275,52	99,87%	314,09	92,71%	14,00%
5. Subsidi	216,90	138,82%	201,80	89,96%	196,23	102,19%	-2,76%
Subsidi Energi	153,50	162,41%	136,88	85,56%	108,24	113,84%	-20,48%
BBM (Pertamina)	97,00	207,01%	84,21	83,67%	47,74	116,11%	43,31%
Listrik (PLN)	56,50	118,56%	52,67	88,78%	61,10	112,13%	16,02%
Subsidi Non Energi	63,40	102,69%	64,93	100,90%	87,39	90,64%	34,60%
6. Belanja Hubah	1,50	104,09%	6,48	333,71%	6,28	123,73%	-3,09%
7. Bantuan Sosial	84,30	103,76%	112,48	110,28%	202,55	116,06%	80,08%
8. Belanja Lainnya	16,20	24,04%	11,70	10,26%	120,04	26,64%	925,96%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	757,80	98,91%	812,97	98,33%	762,53	99,82%	-6,20%
A. Transfer ke Daerah	697,90	98,83%	743,16	98,20%	691,43	99,81%	-6,96%
1. Dana Perimbangan	668,60	98,82%	711,28	98,16%	652,10	99,81%	-8,32%
2. Dana Insentif Daerah	8,20	98,83%	9,69	96,94%	18,46	99,76%	90,37%
3. Dana Otsus dan Keistimewaan DIY	21,10	100,00%	22,18	100,00%	20,88	100,00%	-5,88%
B. Dana Desa	59,90	99,77%	69,81	97,73%	71,10	99,87%	1,84%

Sumber : OMSPAN, diolah

GAMBAR 41. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018 S.D. 2020



Sumber : OMSPAN, diolah

dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp691,43 triliun (99,81 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020) dan Dana Desa Rp71,10 triliun (99,87 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp652,10 triliun (99,81 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020), Dana Insentif Daerah Rp18,46 triliun (99,76 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp20,88 triliun (100,00 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020).

2020 mencapai Rp1.057,44 triliun (124,13 persen dari pagu Perpres APBN 72/2020), atau meningkat 21,07 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Sementara Realisasi sementara Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga sampai akhir tahun 2020 mencapai Rp773,33 triliun (68,84 persen dari pagu Perpres APBN 72/2020), meningkat 24,15 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi tahun 2019.

Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga setiap tahun terus mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2018 dan 2019 yang secara berurutan mencapai Rp846,56 triliun dan Rp873,43 triliun. Secara persentase, Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga paling tinggi dari selama tiga tahun terakhir di mana persentase realisasi terhadap target pada tahun 2019 mencapai 98,04 persen dan pada tahun 2018

1.II.A. BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Realisasi Belanja Kementerian Negara/ Lembaga dan Realisasi Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi sementara Belanja Kementerian Negara/Lembaga sampai akhir tahun

TABEL 12. RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018		2019		2020		Growth
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
Belanja Kementerian/Lembaga	846,56	96,90%	873,43	98,04%	1.057,44	124,13%	21,07%
Belanja Pegawai	230,96	92,76%	249,20	98,02%	244,97	91,35%	-1,70%
Belanja Barang	347,15	102,26%	333,91	93,95%	420,82	154,81%	26,03%
Belanja Modal	184,13	90,31%	177,84	99,21%	189,10	137,64%	6,33%
Belanja Bansos	84,32	103,76%	112,48	110,28%	202,55	116,06%	80,08%
Belanja Non Kementerian/Lembaga	608,76	104,80%	622,89	83,78%	773,33	68,84%	24,15%
Belanja Pegawai	115,93	99,33%	126,88	99,84%	135,56	100,00%	6,85%
Belanja Barang	0,32	48,52%	0,51	244,43%	1,14	85,44%	124,00%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	257,95	108,11%	275,52	99,87%	314,09	92,71%	14,00%
Belanja Subsidi	216,88	138,82%	201,80	89,96%	196,23	102,19%	-2,76%
Belanja Hibah	1,52	104,09%	6,48	333,71%	6,28	123,73%	-3,09%
Belanja Lain-lain	16,16	24,04%	11,70	10,26%	120,04	26,64%	925,96%
Total Belanja Pemerintah Pusat	1455,32	100,06%	1.496,31	91,55%	1830,77	92,69%	22,35%

Sumber : OMSPAN, diolah

mencapai 96,90 persen.

Realisasi sementara Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2020 meliputi realisasi sementara Belanja Pegawai sebesar Rp244,97 triliun, Belanja Barang sebesar Rp420,82 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 189,10 triliun dan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp202,28 triliun. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Kementerian/Lembaga antara lain dipengaruhi oleh realisasi sementara bantuan sosial yang mencapai Rp202,55 triliun atau sekitar 116,06 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh signifikan hingga 80,08 persen (yoy) dari periode yang sama tahun 2019, terutama karena adanya perluasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.

1.III. BERDASARKAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

Dari perspektif organisasi, peningkatan realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama di bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Selain K/L bidang perlindungan sosial, Kementerian Tenaga Kerja turut mendorong peningkatan realisasi Belanja K/L dengan menyalurkan bantuan gaji/upah

bagi pekerja buruh serta Kemen KUKM dengan memberikan bantuan permodalan bagi Koperasi dan UMKM sebagai bagian dari penanganan COVID-19 melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kinerja nyata Kementerian Tenaga kerja dan Kementerian KUKM di tahun 2020 terlihat jelas pada pertumbuhan realisasi belanja yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019. Belanja Kemnaker tercatat tumbuh positif hingga 547,58 persen, sementara Realisasi belanja Kementerian KUKM tumbuh jauh lebih tinggi hingga mencapai 3133,70 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, belanja bidang infrastruktur mengalami perlambatan yang tercermin dari lebih rendahnya nilai realisasi kontrak, terutama pada Kementerian PUPR dan Kemenhub, sebagai akibat pergeseran fokus belanja menjadi penanganan COVID-19. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak realokasi dan refocusing kegiatan akibat pandemi COVID-19.

1.III.A. BERDASARKAN JENIS BELANJA

Realisasi sementara Belanja K/L mencapai Rp1.057,44 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,07 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan belanja K/L ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada seluruh komponen belanja K/L, kecuali belanja pegawai. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp244,97 triliun, terkontraksi 1,70 persen dibanding tahun 2019. Penurunan belanja pegawai dibanding tahun

TABEL 13. REALISASI BELANJA NEGARA BERDASARKAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

URAIAN	2018	2019	2020	Growth 2019-2020
KEMENTERIAN PERTAHANAN	106,68	115,35	135,54	17,50%
KEMENTERIAN SOSIAL	41,23	57,73	130,31	125,73%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	102,48	100,56	100,79	0,23%
KEMENTERIAN KESEHATAN	57,35	67,28	102,19	51,89%
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98,12	98,19	99,88	1,72%
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	39,43	36,49	79,06	116,64%
KEMENTERIAN AGAMA	59,38	63,95	67,98	6,31%
KEMENTERIAN KEUANGAN	39,90	39,55	62,08	56,99%
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	45,08	39,70	34,72	-12,54%
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3,75	5,29	34,25	547,58%
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	0,86	0,90	29,26	3133,70%
KEMENTERIAN PERTANIAN	21,84	19,42	15,19	-21,81%
KOMISI PEMILIHAN UMUM	20,86	17,43	11,08	-36,44%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	12,64	13,77	12,40	-9,98%
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	7,10	8,08	11,76	45,52%

Sumber : OMSPAN, diolah

sebelumnya sejalan dengan upaya pengendalian belanja pegawai untuk mendukung penanganan COVID-19 dengan tetap menjaga daya beli aparatur pemerintah. Kebijakan yang diambil adalah pemberian THR dan Gaji ke-13 yang tidak termasuk komponen tunjangan kinerja.

Realisasi Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp202,56 triliun atau sekitar 116,06 persen dari pagu APBN Perpres 72 tahun 2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 80,08 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena didorong adanya perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Peningkatan realisasi bantuan sosial sampai dengan 31 Desember 2020 tersebut juga terlihat pada tumbuhnya serapan Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan bansos secara year-on-year pada periode yang sama, seperti Kementerian Sosial yang tumbuh 125,73 persen, Kementerian Kesehatan tumbuh 51,89 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tumbuh 116,64 persen dan Kementerian Agama yang tumbuh 6,31 persen. Tumbuhnya serapan bansos pada beberapa kementerian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program bansos yang mendukung PEN, seperti penyaluran bantuan PKH, bantuan program Kartu Sembako, penyaluran bantuan sosial sembako Jabodetabek, penyaluran bantuan sosial tunai di wilayah non-Jabodetabek, penyaluran bansos beras dan bantuan sosial tunai penerima Program Kartu Sembako non penerima PKH, serta program bansos reguler seperti pembayaran premi iuran JKN, penyaluran bantuan KIP Kuliah, penyaluran bantuan PIP bagi siswa kurang mampu.

Sementara itu, realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp420,82 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 26,03 persen (yoy) terhadap periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seperti pembayaran bantuan UMKM, pembayaran bantuan upah/ gaji, dan di sektor kesehatan (antara lain pembayaran insentif dan pembayaran santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan

alat/sarpras kesehatan). Selain itu, terdapat faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang, yaitu realisasi yang cukup signifikan pembayaran selisih harga bio-diesel BLU Kelapa Sawit. Apabila dilihat dari realisasi belanja barang menurut K/L dalam periode yang sama, nampak realisasi belanja barang yang relatif besar pada beberapa K/L, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama antara lain untuk (1) pembayaran bantuan pelaku usaha mikro, (2) pembayaran bantuan subsidi upah/gaji, (3) bantuan subsidi upah bagi PTK Non PNS, (4) pembayaran insentif tenaga kesehatan di Pusat dan di Daerah, (5) pembayaran santunan tenaga kesehatan, (6) pembayaran pasien COVID-19 yang dirawat, (7) pengadaan alat-alat dan/atau sarana dan prasarana kesehatan, (8) subsidi kuota internet untuk siswa, (9) program padat karya, (10) pembangunan/rehabilitasi sekolah dasar/ menengah, dan (11) rehabilitasi jaringan irigasi. Namun di sisi lain, dampak kebijakan refocusing/ realokasi anggaran belanja K/L, pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta penerapan mekanisme kerja melalui work from home/ flexible working space berhasil mengefisienkan belanja barang, sehingga sangat berpengaruh pada menurunnya realisasi belanja jasa dan belanja perjalanan dinas yang mengalami tumbuh negative (yoy) dari tahun 2019.

Selanjutnya, realisasi Belanja Modal tahun 2020 diperkirakan mencapai 189,10 triliun atau 137,64 persen terhadap pagu APBN Perpres 72 tahun 2020, naik 6,33 persen (yoy). Kenaikan realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kegiatan untuk mendukung penanganan COVID-19, Program PEN, serta pengadaan tanah atas proyek strategis nasional (PSN) oleh LMAN di akhir tahun. Apabila dilihat berdasarkan akun, belanja modal yang mengalami pertumbuhan positif adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Tanah. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan sarana prasarana kesehatan di rumah sakit Pemerintah (Kemenkes/TNI/POLRI) dalam rangka penanganan COVID-19, pengadaan alutsista/almatsus, serta pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN. Sementara itu, Belanja Modal yang terkontraksi adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal

Gedung dan Bangunan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal BLU. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya kebijakan refocusing dan restrukturisasi proyek serta pembatasan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Meskipun demikian, Kemen PUPR dan Kemenhub yang merupakan K/L dengan alokasi belanja modal tertinggi tetap dapat merealisasikan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.

1.III.B. BERDASARKAN FUNGSI

Berdasarkan Fungsinya, selama tiga tahun terakhir realisasi belanja K/L selalu didominasi oleh realisasi belanja pada fungsi ekonomi, pendidikan, ketertiban dan keamanan, serta fungsi pertahanan. Untuk tahun 2020, realisasi belanja K/L berdasarkan fungsi, fungsi ekonomi menjadi kontributor paling tinggi hingga mencapai Rp219,39 triliun yang merupakan 31,46 persen dari keseluruhan realisasi belanja KL tahun 2020. Fungsi pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan dan fungsi perlindungan sosial melengkapi lima besar belanja K/L menurut fungsi tahun 2020 dengan nominal dan porsi secara berurutan adalah Rp155,12 triliun (17,70 persen), Rp153,60 triliun (14,56 persen), Rp133,42 triliun (12,64 persen) dan Rp130,44 triliun (12,36 persen).

Namun jika dilihat tingkat pertumbuhan realisasi belanja per fungsi untuk tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (yoy), fungsi perlindungan sosial dan kesehatan mempunyai tingkat pertumbuhan yang paling tinggi yaitu mencapai 123,29 persen untuk tingkat pertumbuhan realisasi belanja fungsi perlindungan sosial, dan

47,74 persen untuk tingkat pertumbuhan realisasi belanja fungsi kesehatan. Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas belanja sebagai respon pemerintah atas munculnya pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat terasa pada tahun 2020. Ini juga sejalan dengan pelaksanaan program PC-PEN di tahun 2020 dengan perlindungan sosial dan kesehatan sebagai dua cluster yang menjadi prioritas.

1.IV. BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Hingga 31 Desember 2020, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar Rp762,53 triliun atau 99,82 persen dari pagu Perpres 72/2020. Meskipun secara nominal terlihat menurun sebesar 6,90 persen (yoy), namun secara persentase realisasi, terdapat peningkatan dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 98,33 persen menjadi 99,82 persen di tahun 2020. Realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, peningkatan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus, dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

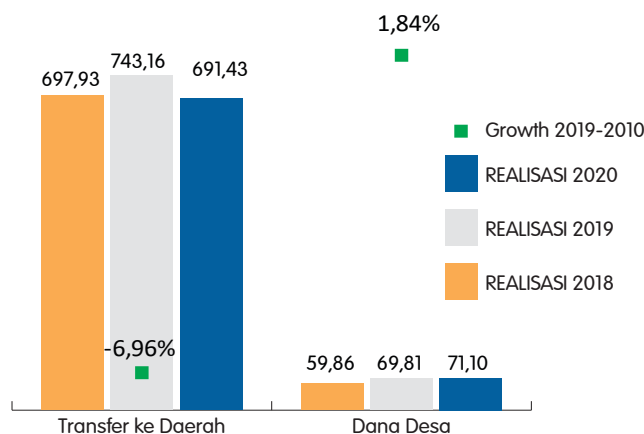
Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan TKDD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TKDD di daerah. Sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, maka dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya melalui penggunaan anggaran infrastruktur yang

TABEL 14. RINCIAN REALISASI BELANJA NEGARA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN FUNGSI	2018		2019		2020		
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Growth
PELAYANAN UMUM	121,17	104,87	113,91	101,57	120,90	110,42	8,71%
PERTAHANAN	112,71	106,83	123,82	111,57	142,98	133,42	19,58%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	147,35	143,30	150,72	147,11	161,94	153,60	4,41%
EKONOMI	202,50	176,56	190,67	166,89	228,86	219,39	31,46%
LINGKUNGAN HIDUP	15,47	13,64	17,74	16,08	14,63	12,87	-19,97%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	33,84	31,53	30,59	25,91	24,77	22,19	-14,37%
KESEHATAN	67,67	61,87	75,02	71,12	110,08	105,07	47,74%
PARIWISATA DAN BUDAYA	11,54	10,70	5,48	5,03	3,39	3,12	-37,89%
AGAMA	9,74	9,38	11,81	11,24	9,91	9,49	-15,63%
PENDIDIKAN	156,55	145,94	164,25	154,69	166,34	155,12	0,28%
PERLINDUNGAN SOSIAL	44,25	41,94	59,40	58,42	134,30	130,44	123,29%

Sumber : OMSPAN, diolah

GAMBAR 42. REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 S.D. 2020 (MILIAR RUPIAH)



Sumber : OMSPAN, diolah

diatur minimal 25 persen dari dana transfer umum (DTU) direlaksasi untuk dapat digunakan dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, relaksasi persyaratan dan tahapan penyaluran DAK Fisik dari semula bertahap menjadi disalurkan secara sekaligus sebesar nilai kontrak kegiatan, relaksasi persyaratan penyaluran DAU Formula bulan Februari sampai dengan Desember, serta penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada waktu yang bersamaan.

Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lebih lanjut, percepatan realisasi TKDD juga ditandai dengan penerbitan surat edaran bersama (SEB) Nomor SE-35/MK.07/2020 (Menkeu) dan Nomor 440/4918/SJ (Mendagri) tentang percepatan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan realisasi APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kementerian keuangan telah menetapkan PMK

Realisasi sementara Transfer ke Daerah dan Dana

TABEL 15. RINCIAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

URAIAN	2018		2019		2020		Growth
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	757,79	98,91	812,97	98,33	762,53	99,82	-6,20%
A. Transfer ke Daerah	697,93	98,83	743,16	98,20	691,43	99,81	-6,96%
a. Dana Perimbangan	668,64	98,82	711,28	98,16	652,10	99,81	-8,32%
i. Dana Transfer Umum	495,19	100,91	524,89	100,13	475,52	101,00	-9,41%
- Dana Bagi Hasil	93,70	105,02	103,98	97,77	93,91	108,66	-9,69%
- Dana Alokasi Umum	401,49	100,00	420,91	100,73	381,61	99,28	-9,34%
ii. Dana Transfer Khusus	173,45	93,31	186,39	93,03	176,58	96,72	-5,27%
- Dana Alokasi Khusus Fisik	58,15	93,13	64,17	92,56	50,18	93,29	-21,80%
- Dana Alokasi Khusus NonFisik	115,30	93,40	122,23	93,27	126,40	98,16	3,41%
b. Dana Insentif Daerah	8,23	96,83	9,69	96,94	18,46	99,76	90,37%
c. Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	21,06	100,00	22,18	100,00	20,88	100,00	-5,88%
i. Dana Otonomi Khusus	16,06	100,00	16,71	100,00	15,11	100,00	-9,60%
ii. Dana Tambahan Otonomi Khusus	4,00	100,00	4,27	100,00	4,45	100,00	4,25%
iii. Dana Keistimewaan DIY	1,00	100,00	1,20	100,00	1,32	100,00	10,00%
B. Dana Desa	59,86	99,77	69,81	99,73	71,10	99,87	1,84%

Sumber : OMSPAN, diolah

TABEL 16. RINCIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019	2020	Growth 2019-2020
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	757,79	812,97	762,53	-6,20%
Transfer ke Daerah	697,93	743,16	691,43	-6,96%
Dana Bagi Hasil	93,70	103,98	93,91	-9,69%
Dana Alokasi Umum	401,49	420,91	381,61	-9,34%
Dana Alokasi Khusus Fisik	58,15	64,17	50,18	-21,80%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	115,30	122,23	126,40	3,41%
Dana Insentif Daerah	8,23	9,69	18,46	90,37%
Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	21,06	22,18	20,88	-5,88%
Dana Desa	59,86	69,81	71,10	1,84%

Sumber : OMSPAN, diolah

Desa (TKDD) sampai dengan Desember 2020 mencapai Rp762,53 triliun atau 99,82 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp691,43 triliun (99,81 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020) dan Dana Desa Rp71,10 triliun (99,87 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020)

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp652,10 triliun (99,81 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020), Dana Insentif Daerah Rp18,46 triliun (99,76 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp20,88 triliun (100,00 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020).

Capaian realisasi sementara TKD sampai dengan Desember 2020 lebih rendah Rp51,73 triliun atau 6,96 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Realisasi TKD tersiri dari realisasi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY.

Secara lebih rinci, realisasi DBH lebih rendah Rp10,07 triliun atau 9,69 persen (yoy), realisasi DAU lebih rendah Rp39,30 triliun atau 9,34 persen (yoy), realisasi DAK Fisik lebih rendah Rp13,99 triliun atau 21,80 persen (yoy), realisasi DAK Nonfisik lebih tinggi Rp4,17 triliun atau 3,41 persen (yoy), realisasi DID lebih tinggi Rp8,76 triliun atau 90,37 persen (yoy), realisasi Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY lebih rendah Rp1,30 triliun atau 5,88 persen (yoy), serta Dana Desa lebih tinggi Rp1,29 triliun atau 1,84 persen (yoy). Secara umum, capaian realisasi sementara TKDD tahun 2020 cukup berkontraksi namun demikian

masih didukung dengan membaiknya kinerja pertumbuhan DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa.

Capaian kinerja TKDD selama tahun 2020 juga dipengaruhi oleh kejadian luar biasa dampak global pandemi COVID-19 yang menyebabkan melambatnya perekonomian nasional maupun regional. Pemerintah telah merespons melalui kebijakan extraordinary salah satunya dengan mendorong pemanfaatan TKDD oleh Pemda secara maksimal untuk penanganan pandemi COVID-19 dan implementasi PEN di daerah terutama melalui refocusing dan realokasi belanja TKDD. Dukungan pendanaan TKDD tersebut antara lain melalui DAK, DID, Dana Desa, Hibah ke Daerah, dan Pinjaman ke Daerah.

1.IV.A. DANA PERIMBANGAN

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi ini terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp54,34 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp39,56 triliun, mengalami penurunan sebesar 9,69 persen (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan turunnya pagu DBH akibat penyesuaian proyeksi pendapatan negara.

Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 31 Desember 2020 telah disalurkan sebesar Rp381,61 triliun atau 99,28 persen dari pagu Perpres 72/2020, yang terdiri atas DAU Formula sebesar Rp377,76 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp3,85 triliun. Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan sebesar 9,34 persen (yoy) yang disebabkan oleh perubahan alokasi DAU Formula TA 2020

dalam Perpres 72/2020 atau turun sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula TA 2019. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020 dan belum terserapnya DAU Tambahan dengan maksimal karena Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020.

Jumlah realisasi DAU Formula tersebut turut dipengaruhi oleh relaksasi penyaluran DAU bulan Desember terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sesuai dengan amanat PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2,77 triliun yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 370 daerah serta DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1,08 triliun yang telah disalurkan tahap I kepada 65 daerah dan tahap II kepada 59 daerah penerima alokasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50,18 triliun atau 93,29 persen dari pagu alokasi, naik secara persentase realisasi dibanding tahun 2019 yang sebesar 92,56 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK No. 101/PMK.07/2020. Beberapa output DAK Fisik tahun 2020 di antaranya 54 paket pembangunan puskesmas baru, 1,65 juta paket pengadaan bahan habis pakai/ obat, pengadaan 2.334 unit alat bantu bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta rehabilitasi 15.959 hektar jaringan irigasi.

Di sisi lain, penyaluran DAK Nonfisik hingga akhir Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp126,40 triliun atau 98,16 persen dari pagu Perpres 72/2020, mengalami kenaikan sebesar 5,02 persen (yoy). Kenaikan tersebut utamanya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah yang semakin baik dalam menyampaikan laporan sebagai syarat penyaluran melalui aplikasi

DAK Nonfisik. Beberapa output DAK Nonfisik di tahun 2020 di antaranya pemberian Bantuan Operasional Sekolah untuk 44,2 juta siswa pada 216,5 ribu sekolah, pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,15 juta guru, serta Bantuan Operasional Kesehatan bagi 9.298 puskesmas.

1.IV.B. DANA INSENTIF DAERAH

DID per 31 Desember 2020 telah disalurkan sebanyak Rp18,46 triliun atau 99,76 persen dari pagu Perpres 72/2020, mengalami pertumbuhan sebesar 90,37 persen (yoy). Pertumbuhan capaian ini salah satunya disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19. Selain itu, DID TA 2020 untuk kategori lainnya juga dilakukan relaksasi syarat salur dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan DID Tambahan sebesar Rp5 triliun kepada Pemerintah Daerah dalam 3 periode untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah.

1.IV.C. DANA OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN DIY

Sejalan dengan tahun sebelumnya, Dana Otsus telah disalurkan seluruhnya sebesar Rp19,56 triliun (Rp15,11 triliun dana otonomi khusus dan Rp4,45 triliun tambahan dana otonomi khusus) sampai dengan akhir Desember 2020. Percepatan penyaluran Dana Otsus di 2020 disebabkan adanya relaksasi penyaluran Dana Otsus Tahap II yang tanpa syarat dan dilakukan pada bulan Agustus 2020.

Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) juga telah disalurkan seluruhnya sebesar Rp1,32 triliun, mengalami kenaikan sebesar 10,00 persen

(yoy). Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar (setara 10,00 persen) dari tahun sebelumnya.

1.IV.D. DANA DESA

Penyaluran Dana Desa hingga akhir Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp71,10 triliun atau 99,87 persen dari pagu Perpres 72/2020. Jumlah tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah diterima Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 98,87 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini tumbuh 1,84 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp69,81 triliun.

Perbaikan tersebut tak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa. Pada tahun 2020, penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh KPPN melalui mekanisme pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) pada waktu yang bersamaan, sehingga Dana Desa lebih cepat diterima oleh desa dan nilainya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Selain itu, sebagai respons atas pandemi COVID-19 dilakukan juga penyesuaian terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Perpres 72/2020, PMK Nomor 101/PMK.07/2020, dan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, antara lain (i) penyesuaian pagu Dana Desa menjadi Rp71,9 triliun dari semula Rp72 triliun; (ii) refocusing penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dengan ketentuan BLT Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp600.000,00/bulan untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00/bulan untuk 6 bulan berikutnya; dan (iii) redesign penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan BLT Desa berupa simplifikasi prosedur penyaluran, relaksasi persyaratan penyaluran, dan relaksasi mekanisme penyaluran sehingga berdampak pada tersedianya Dana Desa untuk BLT Desa.

1.V. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT

Realisasi sementara defisit APBN hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp945,53 triliun (6,13 persen PDB), lebih rendah dari target defisit pada APBN Perpres 72/2020. Kinerja APBN sebagai alat countercyclical untuk merespon dampak pandemi sampai dengan akhir tahun terkendali. Realisasi defisit anggaran tahun 2020 masih lebih rendah dari target Perpres 72/2020 yang sebesar 6,34% dari PDB.

1.VI. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.191,48 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp1.177,15 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp50,66 triliun. Realisasi penerbitan SBN melalui lelang telah terpenuhi 100%, termasuk total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I sebesar Rp75,86 triliun (SBSN Rp33,78 triliun dan SUN Rp42,07 triliun) dan pembiayaan Public Goods sesuai SKB II juga terpenuhi 100% sebesar Rp397,56 triliun. Dukungan Bank Indonesia sesuai skema SKB I dan II tersebut akan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin, di tahun 2020 dan 2021. Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi yang diberikan kepada BUMN, BLU, dan lembaga, serta badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selama bulan Desember 2020, Pemerintah telah menandatangani dua pinjaman bilateral, lima perjanjian pinjaman multilateral, dan empat belas perjanjian pinjaman KSA/LPKE dengan rincian sebagai berikut:

1. Dua perjanjian pinjaman bilateral dari Unicredit Bank Austria untuk perbaikan RSAU Mohammad Sutomo Pontianak dan RSAL dr. Ramelan Surabaya, bertindak sebagai Executing Agency Kementerian Pertahanan

2. Lima perjanjian pinjaman multilateral terdiri dari (i) pinjaman “Promoting Innovative Financial Inclusion Program-Subprogram 1 (PIFIP)” dari ADB untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memperluas akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kelompok marjinal seperti perempuan dan kaum muda; (ii) pinjaman “Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) Project under the Multiphase Programmatic Approach-Phase 1” dari Green Climate Fund (GCF); dan (iii) tiga perjanjian “Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project” dari IsDB. Proyek GREM bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dan mitigasi risiko atas kegiatan eksplorasi panas bumi, baik yang akan dilakukan oleh pengembang sektor publik (BUMN) maupun sektor swasta (Badan Usaha). Dengan berkurangnya risiko di tahap ini, maka akan mendorong kegiatan eksplorasi semakin masif dan selanjutnya meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di sektor panas bumi. Sementara itu, tiga perjanjian dari IsDB dengan Executing Agency Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui penataran enam RS Rujukan Nasional dan Unit Teknis Vertikal yang tersebar di lima provinsi di Indonesia.

3. Sisanya, empat belas perjanjian KSA/LPKE diberikan kepada POLRI dan Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista dan alutsista. Posisi utang Pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp6.074,56 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60%. Berdasarkan kondisi defisit anggaran dan pembiayaan anggaran tahun 2020, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp245,94 T yang dapat

dipergunakan sebagai *fiscal buffer* dalam APBN TA 2021, antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan program vaksinasi.

1.VII. PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sangat mempengaruhi kebijakan insentif perpajakan di tahun tersebut. Pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan PMK nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Namun dampak pandemi COVID-19 yang semakin meluas ke hampir seluruh sector, PMK tersebut dicabut dan digantikan dengan PMK nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pada perkembangan selanjutnya, PMK inipun kemudian dicabut dan digantikan dengan PMK nomor 86/PMK/03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang kemudian diubah dengan PMK nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK nomor 86/PMK/03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 PPh final pasal 21 untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta rupiah ditanggung pemerintah.

Beberapa poin penting dalam kebijakan ini antara lain.

1. PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. PPh Pasal 21 DTP dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai.

2. PPh final UMKM ditanggung pemerintah dengan syarat memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak.

3. PPh final Ditanggung pemerintah pada sector padat karya tertentu. Penerima insentif adalah Wajib Pajak Penerima Program Percepatan

Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3-TGAI. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Pembebasan PPh pasal 22 impor dengan penerima adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria: 1) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sebagaimana Lampiran H PMK; telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat) dan mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Sementara itu, Bea Cukai juga menunjukkan kinerja yang baik dengan mencatatkan realisasi penerimaan yang mencapai Rp213,03 triliun atau lebih tinggi dari targetnya dalam Perpres 72 yang sebesar Rp205,68 triliun. Surplus tersebut didapat dari semua komponen penerimaan, seperti bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan cukai.

Beberapa kebijakan insentif kepabeanan dan cukai selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dalam upayanya mengumpulkan penerimaan BM, Bea Cukai juga tetap berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menyiapkan insentif berupa pembebasan maupun BM ditanggung pemerintah, untuk impor alat-alat dan kebutuhan kesehatan yang digunakan dalam penanganan pandemi (PMK-34/PMK.04/2020 jo PMK-83 & Jo PMK-149)

2. penyesuaian tarif cukai dan operasi pengawasan rokok ilegal (Operasi Gempur) yang efektif mengawal penerimaan cukai HT (harga Tembakau) hingga akhir tahun. Meskipun terdampak oleh pandemi COVID-19, kebijakan dan pengawasan tersebut berhasil membawa pencapaian optimal berupa pertumbuhan realisasi pendapatan cukai

HT hingga di atas 3% yoy.

3. Bea Cukai juga memberikan kontribusi pada program PEN pada komponen penerimaan cukai HT, berupa pemberian relaksasi pelunasan pita cukai menjadi tiga bulan yang seharusnya dibayar dalam tempo dua bulan (PMK-30/PMK.04/2020). Insentif ini efektif membantu industri rokok dalam mempertahankan usahanya di tengah pelemahan permintaan pasar.

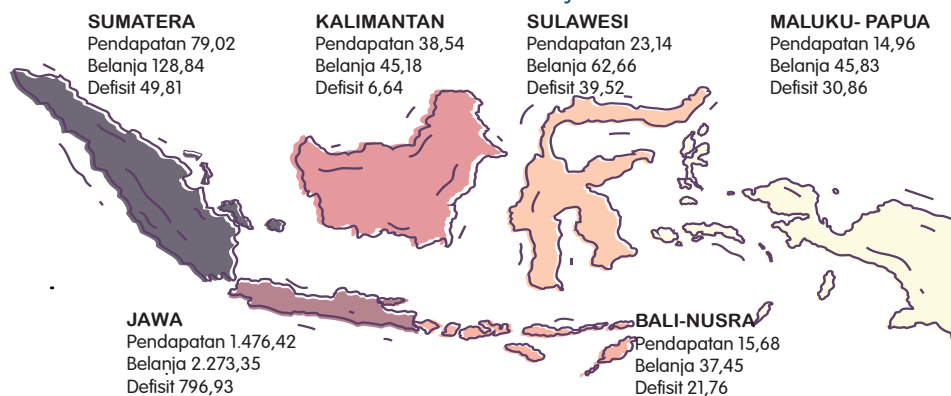
Selain itu Bea Cukai juga memberikan stimulus pada program PEN terkait penerimaan cukai EA (etil alcohol) adalah berupa pembebasan cukai EA (SE-04/BC/2020). Fasilitas tersebut bisa diajukan oleh pengusaha atau tempat penyimpanan EA berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang terkait dengan pencegahan penyebaran virus. Selain itu, pembebasan cukai EA merupakan bentuk upaya Bea Cukai untuk masyarakat dalam mendapat hand sanitizer murah.

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBN REGIONAL

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2020 masih memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang tetap terjaga. Pendapatan negara pada TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp2.593,3 triliun atau 94,67 persen dari APBN TA 2020. Realisasi tersebut meningkat Rp284,0 triliun atau 12,3 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Kinerja pendapatan negara tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 16,0 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh pandemi COVID-19.

Belanja negara baik dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang ekspansif dan bersifat countercyclical, maka peningkatan realisasi belanja tersebut dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama melalui

GAMBAR 43. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA APBN PER REGIONAL TAHUN 2020



Sumber : OMSPAN, diolah

program-program di bidang pendidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok nusantara.

APBN tingkat regional menggambarkan potret kondisi keuangan APBN tingkat regional yang dibagi menjadi enam regional besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penyumbang pendapatan terbesar adalah regional Jawa atau sebesar 89,6 persen dari total pendapatan nasional. Meskipun memberikan sumbangan besar dalam hal pendapatan regional Jawa juga penyumbang belanja terbesar sebesar 87,7 persen dari total belanja nasional. Hal ini terjadi karena basis pencairan belanja saat ini berdasarkan Satker pengelola DIPA itu berada dan beberapa alokasi anggaran yang besar dicairkan oleh K/L Pusat (tersentralisasi). Pada tahun 2020 terjadi realisasi defisit anggaran sebesar Rp945,5 triliun atau 6,1 persen dari PDB, yakni masih dalam batas yang aman meskipun mengalami pelebaran dari rencana semula sebesar 5,07 persen dari PDB, dan ini masih di bawah ambang batas yang diatur dalam undang-undang Keuangan Negara yaitu 6,34 persen terhadap PDB.

2.I. REGIONAL SUMATERA

2.I.A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara pada regional Sumatera didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan share 90% atau sebesar Rp79,02 triliun dan Pendapatan PNBPN sebesar Rp7,94 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara di Sumatera

mengalami kontraksi sebesar 2,9%. Masih lebih baik dibandingkan tahun lalu yang kontraksinya mencapai 5,2%. Artinya tren pendapatan dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan terus menerus. Hal ini juga dialami oleh PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 4% dan di tahun 2020 sebesar 21,8%. Di tahun 2020 pada regional Sumatera belum menerima pendapatan dari Hibah.

Sebagai kontributor terbesar pendapatan negara di regional Sumatera penerimaan perpajakan terkategori dalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mengalami kontraksi sebesar 1% di tahun 2020 yang berasal dari kontraksi pajak penghasilan sebesar 9,3%, untuk kategori pajak dalam negeri lainnya menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2020 khususnya pendapatan cukai yang tumbuh hingga 173,1% meskipun tidak memiliki share yang besar. Pada pendapatan BPHTP terjadi kontraksi 100% dari tahun lalu karena tidak memiliki realisasi di tahun 2020. Pajak Perdagangan Internasional hanya memiliki share sebesar 0,04% untuk penerimaan perpajakan namun menunjukkan pertumbuhan sebesar 22,9% yang berasal dari bea keluar/pungutan ekspor yang tumbuh signifikan di tahun ini hingga 229,4%. PNBPN regional Sumatera mengalami kontraksi sebesar 21,8%, PNBPN regional Sumatera hanya disokong oleh PNBPN lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum yang keduanya mengalami kontraksi di tahun 2020. Pendapatan regional Sumatera share terbesar dari Provinsi Sumatera Utara sebesar 26% atau Rp20,60 triliun. Penerimaan perpajakan juga terbesar disumbang oleh Provinsi Sumatera Utara. Untuk PNBPN penyumbang terbesar di regional

TABEL 17. RINCIAN REALISASI BELANJA NEGARA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2019		2020	
	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth
A. Pendapatan dan Hibah	81,36	-5,20%	79,02	-2,90%
I. Penerimaan Dalam Negeri	81,36	-5,20%	79,02	-2,90%
1. Penerimaan Perpajakan	71,2	-5,40%	71,08	-0,20%
a. Pajak Dalam Negeri	68,6	-4,20%	67,89	-1,00%
i. Pajak Penghasilan	42,19	-2,80%	38,27	-9,30%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	23,44	-7,00%	25,65	9,40%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	1,78	19,60%	2,12	19,00%
iv. Pendapatan BPHTB	0	-79,20%	0	-100,00%
v. Cukai	0,36	-42,30%	0,98	173,10%
vi. Pajak Lainnya	0,83	-2,00%	0,87	4,50%
b. Pajak Perdagangan Internasional	2,6	-29,70%	3,19	22,90%
i. Bea Masuk	2,28	-32,90%	2,15	-5,80%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	0,32	7,60%	1,04	229,40%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	10,15	-4,00%	7,94	-21,80%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	-	0	-100,00%
b. Bagian Laba BUMN	0	-	0	-
c. PNPB Lainnya	4,19	-10,20%	3,54	-15,60%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	5,96	1,00%	4,4	-26,10%
II. Hibah	0	-	0	-

Sumber : OMSPAN, diolah

Sulawesi adalah Kepulauan Riau dengan share sebesar 21% atau Rp1,67 triliun.

2.I.B. BELANJA NEGARA

Belanja Negara regional Sumatera di tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,2% dari tahun 2019. Belanja negara tahun 2020 di dominasi oleh belanja pemerintah pusat dengan share sebesar 64,2% atau Rp82,75 triliun. Meski secara agregat pertumbuhan belanja negara positif namun belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 8,2%. Kontraksi terbesar dialami oleh belanja barang sebesar 11,8% dari tahun 2019 yang memegang share 38,5% dari belanja pemerintah

2.II. REGIONAL JAWA

2.II.A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara pada regional Jawa didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan share 76,6 persen atau sebesar Rp1.131,12 triliun dan Pendapatan PNPB sebesar Rp326,53 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara di Jawa mengalami kontraksi sebesar 17,0 persen. Artinya pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang pendapatannya tumbuh hingga 1,4 persen dari tahun 2018. Hal ini juga dialami oleh PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,2 persen dan di tahun 2020 mengalami kontraksi

TABEL 18. PENDAPATAN NEGARA PER PROVINSI DI REGIONAL SUMATERA

uraian	Aceh	Sumut	Sumbang	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Babel	Kepri	Lampung	Total
A. Pendapatan dan Hibah	4,46	20,6	5,01	13,44	4,84	11,06	1,77	2,69	8,37	6,78	79,02
I. Penerimaan Dalam Negeri	4,46	20,6	5,01	13,44	4,84	11,06	1,77	2,69	8,37	6,78	79,02
1. Penerimaan Perpajakan	3,97	19,05	3,98	12,88	4,46	9,6	1,58	2,59	6,7	6,26	71,08
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,49	1,56	1,03	0,56	0,38	1,46	0,18	0,1	1,67	0,52	7,94
II. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : OMSPAN, diolah

TABEL 19. BELANJA NEGARA REGIONAL SUMATERA 2019 – 2020

URAIAN	2019		2020	
	Realisasi	Growth	Realisasi	Growth
B. Belanja Negara	123,68	-6,00%	128,84	4,20%
I. Belanja Pemerintah Pusat	90,13	-8,60%	82,75	-8,20%
1. Belanja Pegawai	36,72	3,90%	35,48	-3,40%
2. Belanja Barang	36,09	-8,90%	31,84	-11,80%
3. Belanja Modal	17	-27,00%	14,98	-11,90%
7. Bantuan Sosial	0,16	3,50%	0,19	17,10%
8. Belanja Lainnya	0,16	-37,30%	0,26	60,80%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	33,56	1,90%	46,09	37,30%
A. Transfer ke Daerah	14,61	-7,20%	26,24	79,60%
a. Dana Perimbangan	14,61	-7,20%	26,24	79,60%
i. Dana Transfer Umum	0	-	0	-
ii. Dana Transfer Khusus	14,61	-7,20%	26,24	79,60%
Dana Alokasi Khusus Fisik	14,61	-7,20%	13,57	-7,20%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	0	-	12,68	-
B. Dana Desa	18,94	10,20%	19,85	4,80%

Sumber : OMSPAN, diolah

sebesar 15,6 persen. Di tahun 2020 pada regional Jawa pendapatan dari Hibah mencapai Rp18,77 triliun yang kenaikannya sangat signifikan atau sebesar 241,5 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp5,50 triliun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 adanya kontraksi dari pendapatan Hibah sebesar 64,7% dari tahun sebelumnya.

Sebagai kontributor terbesar pendapatan negara di regional Jawa penerimaan perpajakan dikategorikan dalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mengalami kontraksi sebesar 18,4 persen di tahun 2020 yang sebagian besar dipengaruhi oleh kontraksi dari pajak penghasilan sebesar 24,6 persen dan pajak pertambahan nilai 17,4

TABEL 20. PENDAPATAN NEGARA REGIONAL JAWA 2018 – 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
A. Pendapatan dan Hibah	1.754,03	1.777,83	1,40%	1.476,42	-17,00%
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.738,47	1.772,34	1,90%	1.457,65	-17,80%
1. Penerimaan Perpajakan	1.352,46	1.385,55	2,40%	1.131,12	-18,40%
a. Pajak Dalam Negeri	1.318,52	1.351,27	2,50%	1.102,51	-18,40%
i. Pajak Penghasilan	658,6	678,66	3,00%	511,93	-24,60%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	481,59	479,87	-0,40%	396,23	-17,40%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	15,43	15,49	0,40%	14,85	-4,10%
iv. Pendapatan BPHTB	0	0	-351,60%	0	100,00%
v. Cukai	158,07	171,34	8,40%	174,52	1,90%
vi. Pajak Lainnya	4,83	5,92	22,50%	4,97	-16,00%
b. Pajak Perdagangan Internasional	33,94	34,27	1,00%	28,61	-16,50%
i. Bea Masuk	33,76	33,48	-0,80%	28,44	-15,00%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	0,19	0,8	324,90%	0,17	-79,00%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	386,01	386,79	0,20%	326,53	-15,60%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	180,59	154,9	-14,20%	96,61	-37,60%
b. Bagian Laba BUMN	45,12	80,73	78,90%	66,08	-18,10%
c. PNBP Lainnya	116,17	113,36	-2,40%	102,54	-9,50%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	44,13	37,81	-14,30%	61,3	62,10%
II. Hibah	15,56	5,5	-64,70%	18,77	241,50%

Sumber : OMSPAN, diolah

TABEL 21. BELANJA NEGARA REGIONAL JAWA 2018 – 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
Belanja Negara	1.870,85	1.997,53	6,80%	2.273,35	13,80%
- Belanja Pemerintah Pusat	1.201,67	1.271,93	5,80%	1.625,52	27,80%
1. Belanja Pegawai	264,39	290,34	9,80%	298,32	2,80%
2. Belanja Barang	245,67	245,92	0,10%	342,91	39,40%
3. Belanja Modal	115,52	128,34	11,10%	145,92	13,70%
7. Bantuan Sosial	1,52	112,07	7270,10%	202,09	80,30%
8. Belanja Lainnya	83,88	11,47	-86,30%	119,67	943,50%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	15,85	725,6	4478,30%	647,83	-10,70%
A. Transfer ke Daerah	669,18	700,16	4,60%	624,72	-10,80%
a. Dana Perimbangan	650,03	668,29	2,80%	585,38	-12,40%
i. Dana Transfer Umum	620,74	524,89	-15,40%	475,52	-9,40%
ii. Dana Transfer Khusus	125,55	143,4	14,20%	109,87	-23,40%
Dana Alokasi Khusus Fisik	10,25	21,17	106,50%	9,44	-55,40%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	115,3	122,23	6,00%	100,42	-17,80%
b. Dana Insentif Daerah	8,23	9,69	17,80%	18,46	90,40%
c. Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	21,06	22,18	5,30%	20,88	-5,90%
B. Dana Desa	19,14	25,43	32,80%	23,12	-9,10%

Sumber : OMSPAN, diolah

persen yang keduanya memegang share sebesar 82,4 persen dari pajak dalam negeri. Ketika pajak mengalami kontraksi yang cukup berat di tahun 2020, pendapatan cukai berhasil tumbuh tipis sebesar 1,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pertumbuhan menurun dibandingkan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,4 persen.

2.II.B. BELANJA NEGARA

Belanja Negara regional Jawa di tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 13,8 persen dari tahun 2019. Belanja negara tahun 2020 di dominasi oleh belanja pemerintah pusat dengan share sebesar 71,5 persen atau Rp1.625,52 triliun. Tiga tahun terakhir belanja negara selalu tumbuh dengan kenaikan yang lumayan tinggi di tahun 2020 sebesar 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh klasifikasi belanja lainnya yang tumbuh hingga 943,5 persen. Kontraksi terbesar dialami oleh belanja transfer ke daerah klasifikasi belanja DAK Fisik sebesar 55,4 persen dari tahun 2019. Seluruh belanja transfer ke daerah mengalami kontraksi kecuali Dana Insentif Daerah yang tumbuh 90,4 persen dari tahun lalu.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

2.III.A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara pada regional Kalimantan didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan share 92,3 persen atau sebesar Rp35,6 triliun dan Pendapatan PNB sebesarnya Rp2,97 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara di Kalimantan mengalami kontraksi sebesar 11,1 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya artinya terdapat penurunan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan pendapatan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang selama dua tahun terakhir mengalami kontraksi terus menerus. Pada tahun 2020 pendapatan PNB hanya menyumbang tidak lebih dari 8 persen dari pendapatan negara regional Kalimantan. Penurunan ini tidak lain dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi di regional Kalimantan. Dari tahun ke tahun regional Kalimantan tidak pernah mendapatkan pendapatan dari Hibah.

Sebagai kontributor terbesar pendapatan negara di regional Kalimantan penerimaan perpajakan dikategorikan dalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mengalami kontraksi sebesar 11,4 persen

TABEL 22. PENDAPATAN NEGARA REGIONAL KALIMANTAN 2018 – 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
A. Pendapatan dan Hibah	42,7	43,37	1,60%	38,54	-11,10%
I. Penerimaan Dalam Negeri	42,7	43,37	1,60%	38,54	-11,10%
1. Penerimaan Perpajakan	38,58	39,72	2,90%	35,57	-10,50%
a. Pajak Dalam Negeri	37,26	38,51	3,30%	34,11	-11,40%
i. Pajak Penghasilan	22,24	24,05	8,10%	18,3	-23,90%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	12,71	11,68	-8,10%	12,91	10,50%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	1,95	2,45	25,70%	2,56	4,70%
iv. Pendapatan BPHTB	0	0	-	0	-
v. Cukai	0,01	0,01	-23,70%	0,04	286,60%
vi. Pajak Lainnya	0,35	0,32	-9,50%	0,31	-1,20%
b. Pajak Perdagangan Internasional	1,32	1,22	-8,20%	1,46	19,80%
i. Bea Masuk	0,84	0,66	-20,60%	0,57	-14,60%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	0,49	0,55	13,30%	0,89	61,30%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,12	3,65	-11,40%	2,97	-18,70%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	-	0	-
b. Bagian Laba BUMN	0	0	-	0	-
c. PNBP Lainnya	3,31	3,01	-9,30%	2,62	-12,70%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	0,8	0,64	-20,00%	0,34	-46,60%
II. Hibah	0	0	-	0	-

Sumber : OMSPAN, diolah

di tahun 2020 yang sebagian besar dipengaruhi oleh kontraksi dari pajak penghasilan sebesar 23,9 persen. Namun begitu pajak pertambahan nilai mengalami pertumbuhan sebesar 10,5 persen dan pajak bumi tumbuh sebesar 4,7 persen. Begitu juga dengan pendapatan cukai yang tumbuh signifikan sebesar 286,6 persen dibanding tahun

sebelumnya.

2.III.B. BELANJA NEGARA

Selama dua tahun terakhir belanja negara di regional Kalimantan cenderung fluktuatif. Terdapat

TABEL 23. BELANJA NEGARA REGIONAL KALIMANTAN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
Belanja Negara	49,4	44,45	-10,00%	45,18	1,60%
- Belanja Pemerintah Pusat	37,46	32,55	-13,10%	29,61	-9,00%
1. Belanja Pegawai	11,82	12,4	4,90%	12	-3,20%
2. Belanja Barang	14,06	12,56	-10,70%	11,53	-8,20%
3. Belanja Modal	11,52	7,53	-34,60%	6,02	-20,10%
7. Bantuan Sosial	0,05	0,06	1,10%	0,05	-14,70%
8. Belanja Lainnya	0	0	-	0	-
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	11,94	11,9	-0,30%	15,57	30,90%
A. Transfer ke Daerah	6,67	6,04	-9,40%	9,27	53,50%
a. Dana Perimbangan	6,67	6,04	-9,40%	9,27	53,50%
i. Dana Transfer Umum	0	0	-	0	-
ii. Dana Transfer Khusus	6,67	6,04	-9,40%	9,27	53,50%
Dana Alokasi Khusus Fisik	6,67	6,04	-9,40%	5,67	-6,20%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	0	0	-	3,6	-
b. Dana Insentif Daerah	0	0	-	0	-
c. Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	0	0	-	0	-
B. Dana Desa	5,27	5,85	11,10%	6,3	7,60%

Sumber : OMSPAN, diolah

penurunan belanja di tahun 2019 sebesar 10 persen, namun naik di tahun 2020 sebesar 1,6 persen. Belanja negara dari tahun ke tahun di dominasi oleh belanja pemerintah pusat. Di tahun 2020 belanja pemerintah pusat memiliki share sebesar 65,5 persen dari total belanja negara. Meskipun selalu memiliki share terbesar tiap tahunnya namun pertumbuhannya belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi baik di tahun 2019 maupun 2020. Berbeda dengan belanja transfer ke daerah dan dana desa yang cenderung mengalami pertumbuhan. Terjadi kontraksi sebesar 0,3 persen di tahun 2019 namun tumbuh pesat di tahun 2020 sebesar 30,9 persen,

2.IV. REGIONAL SULAWESI

2.IV.A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara pada regional Sulawesi pada tahun 2020 didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan share 84,7 persen atau sebesar Rp23,14 triliun dan Pendapatan PNBPN sebesar Rp3,53 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara di Sulawesi mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar

0,5 persen dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pendapatan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang mengalami pertumbuhan di tahun 2019 namun terjadi kontraksi pada tahun 2020. Penurunan seluruh pendapatan ini tidak lain dikarenakan adanya pandemic COVID-19 yang menyerang seluruh aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi di regional Sulawesi. Dari tahun ke tahun regional Sulawesi tidak pernah mendapatkan pendapatan dari Hibah.

Sebagai kontributor terbesar pendapatan negara di regional Kalimantan penerimaan perpajakan terkategori dalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mengalami kontraksi sebesar 1,4 persen di tahun 2020 yang sebagian besar dipengaruhi oleh kontraksi dari pajak pertambahan nilai sebesar 8,2 persen. Meskipun begitu pajak penghasilan, pbb dan cukai mengalami pertumbuhan di tahun 2020 ini. Terdapat kontraksi pada pajak lainnya namun memiliki share yang tidak signifikan.

2.IV.B. BELANJA NEGARA

Selama dua tahun terakhir belanja negara di regional Sulawesi cenderung fluktuatif. Terdapat penurunan belanja di tahun 2019 sebesar 12,7

TABEL 24. PENDAPATAN NEGARA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
A. Pendapatan dan Hibah	24,71	24,83	0,50%	23,14	-6,80%
I. Penerimaan Dalam Negeri	24,71	24,83	0,50%	23,14	-6,80%
1. Penerimaan Perpajakan	20,28	20,29	0,00%	19,61	-3,40%
a. Pajak Dalam Negeri	19,24	19,01	-1,20%	18,74	-1,40%
i. Pajak Penghasilan	10,08	10,67	5,90%	11,02	3,30%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	8,63	7,78	-9,80%	7,14	-8,20%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	0,21	0,23	12,50%	0,27	16,10%
iv. Pendapatan BPHTB	0	0	-	0	-
v. Cukai	0,05	0,04	-17,40%	0,04	6,50%
vi. Pajak Lainnya	0,28	0,29	3,10%	0,27	-7,30%
b. Pajak Perdagangan Internasional	1,04	1,28	22,80%	0,86	-32,50%
i. Bea Masuk	0,64	0,58	-10,60%	0,81	41,10%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	0,4	0,7	76,70%	0,05	-92,60%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,42	4,54	2,60%	3,53	-22,30%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	-	0	-
b. Bagian Laba BUMN	0	0	-	0	-
c. PNBPN Lainnya	1,98	1,85	-6,60%	1,47	-20,30%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	2,45	2,69	10,10%	2,06	-23,60%
II. Hibah	0	0	-	0	-

Sumber : OMSPAN, diolah

TABEL 25. BELANJA NEGARA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
Belanja Negara	70,95	61,93	-12,70%	62,66	1,20%
- Belanja Pemerintah Pusat	53,01	45,19	-14,80%	40,77	-9,80%
1. Belanja Pegawai	16,53	17,1	3,50%	16,08	-6,00%
2. Belanja Barang	21,98	18,16	-17,40%	16,75	-7,80%
3. Belanja Modal	14,42	9,85	-31,70%	7,81	-20,70%
7. Bantuan Sosial	0,09	0,08	-5,20%	0,13	53,70%
8. Belanja Lainnya	0	0	-	0	-
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	17,95	16,74	-6,70%	21,89	30,80%
A. Transfer ke Daerah	11,11	9,14	-17,70%	13,93	52,40%
a. Dana Perimbangan	11,11	9,14	-17,70%	13,93	52,40%
i. Dana Transfer Umum	0	0	-	0	-
ii. Dana Transfer Khusus	11,11	9,14	-17,70%	13,93	52,40%
Dana Alokasi Khusus Fisik	11,11	9,14	-17,70%	9,46	3,50%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	0	0	-	4,47	-
b. Dana Insentif Daerah	0	0	-	0	-
c. Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	0	0	-	0	-
B. Dana Desa	6,84	7,6	11,10%	7,97	4,80%

Sumber : OMSPAN, diolah

persen, namun naik di tahun 2020 sebesar 1,2 persen. Belanja negara dari tahun ke tahun di dominasi oleh belanja pemerintah pusat. Di tahun 2020 belanja pemerintah pusat memiliki share sebesar 65,1 persen dari total belanja negara. Meskipun selalu memiliki share terbesar tiap tahun nya namun pertumbuhannya belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi baik di tahun 2019 maupun 2020. Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi kontraksi sebesar 14,8 persen dan di tahun 2020 sebesar 9,8 persen. Kontraksi dialami oleh seluruh jenis belanja pemerintah kecuali belanja bansos yang tumbuh 53,7 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran pada seluruh jenis belanja yang dialihkan ke belanja bansos sebagai upaya penanganan pandemic COVID-19 di tahun 2020. Sedangkan pada belanja transfer ke daerah terjadi kontraksi pada tahun 2019 sebesar 6,7 persen namun pada tahun 2020 berhasil menyerap Rp21,89 triliun atau tumbuh sebesar 30,8 persen. Seluruh belanja transfer menjadi penyumbang pertumbuhan khususnya belanja transfer khusus, fisik maupun non-fisik.

2.V. REGIONAL BALI – NUSRA

2.V.A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara pada regional Bali-Nusa

Tenggara pada tahun 2020 didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan share 88,5 persen atau sebesar Rp13,88 triliun dan Pendapatan PNBPN sebesar Rp1,80 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara di Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 16,4 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 6,9 persen dan kontraksi bertambah besar di tahun 2020 hingga 29,2 persen. Dari tahun ke tahun regional Bali-Nusa Tenggara tidak pernah mendapatkan pendapatan dari Hibah.

Sebagai kontributor terbesar pendapatan negara di regional Bali-Nusa Tenggara penerimaan perpajakan terkategori dalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mengalami kontraksi sebesar 14,4 persen di tahun 2020 yang sebagian besar dipengaruhi oleh kontraksi dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang memiliki share terbesar. Meskipun begitu pajak perdagangan internasional mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2020 ini mencapai 99,2 persen dikarenakan bea keluar yang tumbuh signifikan hingga 341,9 persen.

TABEL 26. PENDAPATAN REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
A. Pendapatan dan Hibah	18,87	18,77	-0,50%	15,68	-16,40%
I. Penerimaan Dalam Negeri	18,87	18,77	-0,50%	15,68	-16,40%
1. Penerimaan Perpajakan	16,13	16,22	0,60%	13,88	-14,40%
a. Pajak Dalam Negeri	15,46	15,89	2,80%	13,22	-16,80%
i. Pajak Penghasilan	9,69	10,33	6,60%	8,35	-19,10%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4,63	4,61	-0,50%	3,9	-15,40%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	0,08	0,05	-34,30%	0,04	-23,00%
iv. Pendapatan BPHTB	0	0	-100,00%	0	-
v. Cukai	0,84	0,68	-19,50%	0,73	8,60%
vi. Pajak Lainnya	0,22	0,23	5,70%	0,2	-13,70%
b. Pajak Perdagangan Internasional	0,68	0,33	-51,20%	0,66	99,20%
i. Bea Masuk	0,18	0,23	25,40%	0,22	-5,10%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	0,49	0,1	-79,80%	0,44	341,90%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,74	2,55	-6,90%	1,8	-29,20%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	-	0	-100,00%
b. Bagian Laba BUMN	0	0	-	0	-
c. PNBP Lainnya	1,18	1,02	-13,60%	0,78	-23,50%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	1,56	1,53	-1,80%	1,03	-32,90%
II. Hibah	0	0	-	0	-

Sumber : OMSPAN, diolah

2.V.B. BELANJA NEGARA

Selama dua tahun terakhir belanja negara di regional Bali-Nusa Tenggara cenderung fluktuatif. Terdapat penurunan belanja di tahun 2019 sebesar 5,4 persen, namun naik di tahun 2020 sebesar 4,2 persen. Belanja negara dari tahun ke tahun di

dominasi oleh belanja pemerintah pusat. Di tahun 2020 belanja pemerintah pusat memiliki share sebesar 65,4 persen dari total belanja negara. Meskipun selalu memiliki share terbesar tiap tahunnya namun pertumbuhannya belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi baik di tahun 2019 maupun 2020. Dari tabel dapat dilihat pada tahun

TABEL 27. BELANJA NEGARA REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
Belanja Negara	37,98	35,95	-5,40%	37,45	4,20%
- Belanja Pemerintah Pusat	28,6	26,31	-8,00%	24,48	-7,00%
1. Belanja Pegawai	9,7	10,04	3,60%	9,38	-6,60%
2. Belanja Barang	11,69	9,88	-15,50%	8,23	-16,70%
3. Belanja Modal	7,16	6,34	-11,40%	6,83	7,60%
7. Bantuan Sosial	0,05	0,05	-7,60%	0,04	-2,10%
8. Belanja Lainnya	0	0	-	0	-
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	9,38	9,63	2,70%	12,97	34,60%
A. Transfer ke Daerah	5,32	5,35	0,50%	8,04	50,30%
a. Dana Perimbangan	5,32	5,35	0,50%	8,04	50,30%
i. Dana Transfer Umum	0	0	-	0	-
ii. Dana Transfer Khusus	5,32	5,35	0,50%	8,04	50,30%
Dana Alokasi Khusus Fisik	5,32	5,35	0,50%	4,6	-13,90%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	0	0	-	3,44	-
b. Dana Insentif Daerah	0	0	-	0	-
c. Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	0	0	-	0	-
B. Dana Desa	4,06	4,29	5,60%	4,93	15,00%

Sumber : OMSPAN, diolah

2019 terjadi kontraksi sebesar 8,0 persen dan di tahun 2020 sebesar 7,0 persen. Kontraksi dialami oleh seluruh jenis belanja pemerintah kecuali belanja modal yang tumbuh 7,6 persen di tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan realiasi belanja modal di wilayah nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur. Sedangkan pada belanja transfer ke daerah mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dan berhasil menyerap Rp12,97 triliun pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 34,6 persen dari tahun sebelumnya.

2.VI. REGIONAL MALUKU – PAPUA

2.VI.A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara pada regional Maluku-Papua pada tahun 2020 didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dengan share 92,8 persen atau sebesar Rp13,88 triliun dan Pendapatan PNBPN sebesar Rp1,09 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara di Maluku-Papua pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2019 mengalami

kontraksi sebesar 10,2 persen dan kontraksi bertambah besar di tahun 2020 hingga 17,2 persen. Dari tahun ke tahun regional Bali-Nusa Tenggara tidak pernah mendapatkan pendapatan dari Hibah.

Sebagai kontributor terbesar pendapatan negara di regional Maluku-Papua penerimaan perpajakan terkategori dalam Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri mengalami pertumbuhan baik di tahun 2019 maupun 2020. Pada pajak perdagangan internasional yang tadinya mengalami kontraksi yang signifikan di tahun 2019 sebesar 73,9 persen, berhasil tumbuh di tahun 2020 hingga 43 persen..

2.VI.B. BELANJA NEGARA

Selama dua tahun terakhir pertumbuhan belanja negara di regional Maluku-Papua cenderung menurun. Terdapat penurunan belanja di tahun 2019 sebesar 12,6 persen, namun pertumbuhan di tahun 2020 hanya sebesar 0,2 persen. Belanja negara dari tahun ke tahun di dominasi oleh belanja pemerintah pusat. Di tahun 2020 belanja pemerintah pusat memiliki share sebesar 60,3 persen dari total belanja negara. Meski belanja negara mengalami pertumbuhan di tahun 2020, dari sisi belanja pemerintah pusat selalu mengalami

TABEL 28. PENDAPATAN REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
A. Pendapatan dan Hibah	17,51	14,47	-17,30%	14,96	3,40%
I. Penerimaan Dalam Negeri	17,51	14,47	-17,30%	14,96	3,40%
1. Penerimaan Perpajakan	16,04	13,16	-18,00%	13,88	5,50%
a. Pajak Dalam Negeri	10,84	11,8	8,80%	11,94	1,10%
i. Pajak Penghasilan	5,95	6,37	7,10%	6,16	-3,30%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4,51	4,2	-6,90%	4,5	7,20%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	0,29	1,14	293,60%	1,11	-3,10%
iv. Pendapatan BPHTB	0	0	-	0	-100,00%
v. Cukai	0	0	2,50%	0	-59,00%
vi. Pajak Lainnya	0,1	0,09	-9,70%	0,17	86,90%
b. Pajak Perdagangan Internasional	5,2	1,36	-73,90%	1,94	43,00%
i. Bea Masuk	0,29	0,3	1,80%	0,25	-15,70%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	4,91	1,06	-78,40%	1,69	59,50%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,46	1,31	-10,20%	1,09	-17,20%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	-	0	-
b. Bagian Laba BUMN	0	0	-	0	-
c. PNBPN Lainnya	1,21	1,08	-11,10%	0,88	-18,00%
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	0,25	0,24	-5,80%	0,2	-13,50%
II. Hibah	0	0	-	0	-

Sumber : OMSPAN, diolah

TABEL 29. BELANJA NEGARA REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2018 S.D. 2020

URAIAN	2018	2019		2020	
	Real	Real	Growth	Real	Growth
Belanja Negara	52,38	45,75	-12,60%	45,83	0,20%
I. Belanja Pemerintah Pusat	35,95	30,2	-16,00%	27,65	-8,40%
1. Belanja Pegawai	9,11	9,47	4,00%	9,27	-2,10%
2. Belanja Barang	14,46	11,81	-18,30%	10,7	-9,40%
3. Belanja Modal	12,24	8,78	-28,20%	7,54	-14,20%
7. Bantuan Sosial	0,08	0,06	-23,40%	0,04	-32,80%
8. Belanja Lainnya	0,06	0,07	21,00%	0,11	51,60%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	16,42	15,55	-5,30%	18,17	16,90%
A. Transfer ke Daerah	9,06	7,85	-13,40%	9,23	17,60%
a. Dana Perimbangan	9,06	7,85	-13,40%	9,23	17,60%
i. Dana Transfer Umum	0	0	-	0	-
ii. Dana Transfer Khusus	9,06	7,85	-13,40%	9,23	17,60%
Dana Alokasi Khusus Fisik	9,06	7,85	-13,40%	7,44	-5,30%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	0	0	-	1,79	-
b. Dana Insentif Daerah	0	0	-	0	-
c. Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY	0	0	-	0	-
B. Dana Desa	7,36	7,7	4,60%	8,94	16,10%

Sumber : OMSPAN, diolah

kontraksi baik di tahun 2019 maupun 2020. Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi kontraksi sebesar 16,0 persen dan di tahun 2020 sebesar 8,4 persen. Kontraksi dialami oleh seluruh jenis belanja pemerintah. Sedangkan pada belanja transfer ke daerah meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2019, di tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 16,9 persen dari tahun sebelumnya.

3. PELAKSANAAN ANGGARAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Data dan informasi capaian output yang valid dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi atas capaian output dilakukan dalam upaya mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dimana dapat dilihat kaitan antara ketercapaian output dengan eksekusi uang (jumlah uang tersalur).

Pada tahun 2019, DJPb mengimbau kepada

seluruh Satker untuk melakukan pengisian data capaian output melalui aplikasi SAS dan SAKTI baik untuk periode tahun anggaran 2019 dan 2020. Disamping itu juga diamanatkan untuk KPPN melakukan konfirmasi data capaian output. Substansi pada kedua surat tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kualitas data capaian output pada seluruh Satker, termasuk di dalamnya kualitas data output strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2020, beberapa langkah diambil untuk terus mendorong perbaikan kualitas pengisian data capaian output. Indikator Konfirmasi Capaian Output (KCO) dimasukkan sebagai salah satu objek penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, indikator KCO menilai tingkat validitas data capaian output, dilihat dari perbandingan antara jumlah data yang dinilai wajar (Terkonfirmasi) dengan seluruh data output yang dikelola. Kedua adalah dengan melakukan penyesuaian proses bisnis dan sistem aplikasi yang terkait dengan proses pengisian data capaian output serta aktivitas konfirmasinya. Penyesuaian dilakukan pada aplikasi SAS, SAKTI, SAIBA, e-Rekon&LK, hingga OM-SPAN untuk mendukung

proses pengisian dan konfirmasi data capaian output menjadi lebih kredibel. Dari sisi proses bisnis, penguatan peran KPPN melalui seksi Vera/ VeraKI dan seksi PDMS/MSKI dalam melakukan monitoring dan konfirmasi data capaian output.

Dalam rangka simplifikasi proses bisnis pelaporan dan konfirmasi data capaian output belanja K/L, maka dilakukan proses migrasi sistem dan transisi pelaporan data capaian output semula melalui Aplikasi e-Rekon&LK menjadi melalui Aplikasi OM-SPAN.

3.I. OUTPUT STRATEGIS SEKTOR PENDIDIKAN

Selama tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan capaian output pada beberapa belanja pendidikan. Salah satu kebijakan yang berubah adalah pengalihan tugas pembangunan/renovasi infrastruktur pendidikan dari Kemendikbud ke Kemnenterian PUPR. Sementara pada Kementerian Agama masih dilaksanakan secara mandiri. Pengalihan ini dilakukan untuk optimalisasi pembangunan/renovasi oleh Kementerian yang

memang menangani pembangunan infrastruktur publik sehingga diharapkan hasilnya lebih optimal.

Berikut data capaian output penting (sementara) sektor pendidikan selama tiga tahun terakhir berdasarkan data rilis Kemenkeu pada APBN Kita (posisi awal tahun).

Tahun 2020, secara umum target capaian output pada sektor pendidikan relatif tercapai, baik itu capaian PIP, TPG, BOS, dan rehabilitasi/ pembangunan sekolah. Berikut capaian capaian output strategis pada sektor pendidikan berdasarkan data hasil konfirmasi di level Satker (data konfirmasi capaian output)

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran belanja pendidikan seperti Adanya kebijakan PSBB yang berakibat pada perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang semula luring menjadi daring, termasuk Pembangunan fisik/konstruksi terhenti sementara karena harus melakukan phisical distancing karena pandemi COVID-19. Selain itu, pembayaran atas PIP siswa SD dan siswa SMP masih terkendala pada laporan proses verifikasi dan validasi yang belum selesai.

TABEL 30. CAPAIAN OUTPUT PENTING SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2018 S.D. 2020

Capaian Output 2018	Capaian Output TA 2019	Capaian Output TA 2020
· Penyaluran KIP Kemendikbud 18,7 juta siswa (dari target 17,9 juta)	· Program Indonesia Pintar Kemendikbud 18,4 juta (dari target 17,9 juta)	· Program Indonesia Pintar 16,18 juta siswa
· Penyaluran KIP Kemenag 1.635.244 siswa (dari target 1.635 siswa)	· Program Indonesia Pintar Kemenag 2,17 juta siswa (dari target 2,20 juta siswa)	· Bidikmisi/KIP Kuliah 845,36 ribu mahasiswa
· Penyaluran Bidikmisi Kemenag 17.810 mahasiswa (dari target 32 ribu mahasiswa).	· Beasiswa Bidikmisi Kemenag sebesar 32,4 ribu mahasiswa (dari target 32,6 ribu mahasiswa)	· Bangun/rehab madrasah dan sekolah keagamaan 338 sekolah
· Penyaluran Bidikmisi Kemenristekdikti 315.833 mahasiswa dari target 368.961 mahasiswa	· Beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah Kemenristekdikti 411,0 ribu mahasiswa (dari target 431,0 ribu mahasiswa)	· Pembangunan 80 asrama dan 25 ruang belajar pada pondok pesantren
· Penyaluran BOS Kemenag 8.666.933 siswa (dari target 8,7 juta siswa)	· Beasiswa ADIK 7.148 mahasiswa (dari target 5.931 mahasiswa)	· Bangun/ rehab ruang kelas/ madrasah dan sekolah keagamaan (PUPR) 99,86% dari target sekolah 373 sekolah.
· Rehab/bangun ruang kelas 28,5 ribu ruang (dari target 24,8 ribu ruang)	· Bantuan Operasional Sekolah 8,70 juta siswa (dari target 8,93 juta siswa)	· Bangun atau rehab 1076 sekolah dasar/menengah
	· Sertifikasi guru 40,4 ribu orang (dari target 40,0 ribu orang)	· BOS Kemenag 8,72 juta siswa
	· Pendidikan kecakapan kerja 80,0 ribu orang (dari target 80,0 ribu orang)	· BOP Pesantren 195 ribu lembaga dan 14,2 ribu pesantren
		· Subsidi Kuota Internet Kemendikbud 35,6 juta penerima dan Kemenag 6,7 juta penerima

Sumber : APBN Kita, diolah

TABEL 31. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2020

OS PENDIDIKAN 2020	Alokasi Belanja			Output			
	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	% Realisasi	Target	Capaian	Satuan	% Capaian
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) MADRASAH DAN PESANTREN	2.672,20	2.671,70	99,98%	5.052	4.118	Lembaga	81,51%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MA (MADRASAH ALIYAH)	2.244,60	2.195,00	97,79%	2.973.874	2.626.878	Siswa	88,33%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MTs (MADRASAH TSANAWIYAH)	3.696,90	3.599,00	97,35%	4.347.616	2.669.229	Siswa	61,40%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PESANTREN DINIYAH FORMAL/MUADALAH/ PPS TK WUSTHA atau TK ULYA atau TK ULA	126,4	115,5	91,34%	228.464	212.441	Santri	92,99%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDTK (SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN)	1,8	1,7	95,11%	2.273	2.032	Orang	89,40%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMPTK (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN)	3,1	3	97,25%	3.098	2.973	Orang	95,97%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMTK (SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN)	12,2	11,8	96,86%	8.761	8.478	Orang	96,77%
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TK ADI, MADYA, DAN UTAMA WIDYA PASRAMAN	0,4	0,4	95,19%	340	273	Orang	80,29%
BANTUAN SUBSIDI UPAH (GURU HONORER-KEMENAG)	1.147,30	1.121,00	97,70%	637.408	-	Orang	0,00%
BANTUAN SUBSIDI UPAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON-PNS	3.664,20	3.618,80	98,76%	2.034.732	2.009.668	Orang	98,77%
INSENTIF GURU NON-PNS	17,7	17,2	97,17%	5.863	5.258	Orang	89,68%
KIP KULIAH/BEASISWA	4.281,80	4.219,30	98,54%	892.049	917.161	Mahasiswa	102,82%
PENERIMA INSENTIF GURU	213,7	213,7	99,99%	67.320	67.325	Orang/ORG	100,01%
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU	411,4	388,2	94,36%	21.603	24.599	Orang	113,87%
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU NON-PNS	7.471,30	7.388,00	98,89%	241.056	242.939	Orang	100,78%
PERALATAN PENDIDIKAN SEKOLAH	765,2	762,1	99,58%	7.752	7.752	Paket	100,00%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (DIKBUD)	8.802,60	8.797,70	99,94%	15.062.311	15.227.195	Siswa	101,09%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) KULIAH - KEMENAG	133,2	132,9	99,76%	20.199	19.405	Orang	96,07%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MADRASAH ALIYAH (MA)	320,4	319,6	99,76%	320.372	320.372	Siswa	100,00%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	422,8	422,8	100,00%	939.607	939.607	Siswa	100,00%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)	558,8	558,8	100,00%	745.086	745.086	Siswa	100,00%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PESANTREN DINIYAH FORMAL/MUADALAH/PPS TK ULA	13,6	11,1	81,46%	30.176	22.261	Santri	73,77%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PESANTREN DINIYAH FORMAL/MUADALAH/PPS TK WUSTHA	132,4	122,5	92,57%	151.333	122.933	Santri	81,23%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SDTK	0,5	0,4	90,13%	1.032	930	Orang	90,12%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMPTK	2,1	2	94,35%	2.838	2.638	Orang	92,95%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMTK / SMAK	8,6	7,9	92,90%	8.553	7.524	Orang	87,97%
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) Tk ADI, MADYA, DAN UTAMA WIDYA PASRAMAN	0,2	0,2	94,78%	302	238	Orang	78,81%
REHABILITASI/RENOVASI MADRASAH DAN SEKOLAH KEAGAMAAN	340	337,8	99,35%	213	159	Sekolah	74,65%
REHABILITASI/RENOVASI SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH	1.317,40	1.286,10	97,62%	911	770	Sekolah	84,52%
SEKOLAH YANG DIRENOVASI/REVITALISASI	1.268,00	1.262,40	99,55%	498	498	Sekolah	100,00%
TUNJANGAN INSENTIF GURU NON-PNS	671,3	664,7	99,02%	223.918	211.865	Guru	94,62%
TUNJANGAN KHUSUS GURU NON-PNS	60,3	57	94,59%	5.101	4.308	Guru/Orang	84,45%
TUNJANGAN PROFESI GURU AGAMA NON-PNS	4,4	4,2	96,01%	187	145	ORG	77,54%
TUNJANGAN PROFESI GURU NON-PNS	5.011,70	4.966,50	99,10%	202.536	188.886	Guru/orang	93,26%
TUNJANGAN PROFESI GURU PA HINDU NON-PNS	4,3	4	93,45%	147	141	Orang	95,92%
TUNJANGAN PROFESI GURU PAI NON-PNS	430,3	416	96,68%	18.984	17.894	Guru	94,26%

Sumber : OMSPAN, diolah

3.II. SEKTOR KESEHATAN

Selama tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan

yang cukup signifikan pada capaian pembayaran iuran PBI JKN dari sejumlah 92,3 juta peserta di tahun 2018 menjadi 96,7 juta peserta di tahun 2020.

Khusus pada tahun 2020, kesehatan menjadi sector yang sangat penting di masa terjadinya pandemi COVID-19. Berbagai pembangunan rumah sakit dan alat kesehatan disalurkan pemerintah, termasuk pemberian insentif tenaga kesehatan COVID-19 dan santunan untuk tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19.

Berikut data capaian output penting (sementara) sektor pendidikan selama tiga tahun terakhir berdasarkan data rilis Kemenkeu pada APBN Kita (posisi awal tahun).

Tahun 2020, secara umum target capaian output pada sektor kesehatan relatif tercapai. Berikut detail capaian-capaian output strategis pada sektor kesehatan berdasarkan data hasil konfirmasi di level Satker (data konfirmasi capaian output)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran belanja kesehatan antara lain Hambatan keterbatasan pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah kerja satker selama 3 bulan yaitu sejak bulan Maret s.d Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) pada wilayah kerja satker selama 3 bulan, yaitu sejak bulan juni 2020 sampai dengan agustus 2020. Adanya kebijakan PSBB menyulitkan dalam distribusi peralatan

medis berdampak pada lamanya waktu kirim dan pembengkakan biaya operasional. Disamping itu, ditemui kendala belum lancarnya penyaluran pembayaran insentif nakes COVID-19 yang telah coba diatasi dengan beberapa perubahan kebijakan berkali-kali

3.III. SEKTOR PERLINDUNGAN SOSIAL

Selama tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada capaian pembayaran iuran PBI JKN dari sejumlah 92,3 juta peserta di tahun 2018 menjadi 96,7 juta. Khusus pada tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang cukup besar, Pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada utamanya pada kelompok ekonomi bawah dan masyarakat miskin untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok hidup mereka diluar program yang sudah eksisting (PKH dan Program Sembako) seperti bantuan tunai, bantuan upah, bantuan beras, dan beberapa bantuan lainnya.

Berikut data capaian output penting (sementara) sektor perlindungan sosial selama tiga tahun terakhir berdasarkan data rilis Kemenkeu pada APBN Kita (posisi awal tahun).

TABEL 32. CAPAIAN OUTPUT PENTING SEKTOR KESEHATAN TAHUN 2018 S.D. 2020

Capaian Output 2018	Capaian Output TA 2019	Capaian Output TA 2020
· Penyaluran JKN KIS 92,3 juta (dari target 92,4 juta)	· Peserta penerima PBI JKN sebesar 96,0 juta jiwa (dari target 96,8 juta jiwa)	· Peserta PBI JKN 96,7 juta jiwa
	· Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 16 paket (dari target 23 paket)	· Bantuan iuran JKN PBPU/BP 53,0 juta jiwa
	· Penugasan tenaga kesehatan 4.464 orang (dari target 4.450 orang)	· Alat kesehatan pada 53 RS Polri (APD, masker, inclinometer, peralatan lab/PCR)
		· Alat material Kesehatan pada 110 RS Kemhan/TNI (1,56 juta APD, 5,76 juta rapid test, 1 juta masker KN95, 2612 ventilator)
		· nsentif Nakes (akumulasi pembayaran) pusat 684,0 ribu
		· Pembayaran 183,9 ribu pasien covid dirawat
		· Santunan 153 nakes.

Sumber : APBN Kita, diolah

TABEL 33. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS SEKTOR KESEHATAN TAHUN 2020

OS KESEHATAN 2020	Alokasi Belanja			Output			
	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	% Realisasi	Target	Capaian	Satuan	% Capaian
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN/KIS	48.786,80	48.624,90	99,67%	97	96	98,97%	Juta Jiwa
RUMAH SAKIT DENGAN SARPRAS DAN ALKES SESUAI STANDAR	14.313,10	14.263,20	99,65%	1.068	411	38,48%	RS/ Rumah Sakit
PENYEDIAAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN MEDIS	7.646,20	7.105,20	92,92%	679	584	86,01%	Paket
PENGADAAN ALAT KESEHATAN	4.897,30	4.448,10	90,83%	15.429	11.636	75,42%	Unit
FASILITAS KESEHATAN RUMKIT TNI/KEMENHAN	4.859,40	4.371,00	89,95%	967	742	76,73%	Bulan/lapo- ran/ rumkit
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.790,40	2.526,80	90,56%	67.451	55.928	82,92%	Layanan
FASILITAS KESEHATAN RUMKIT POLRI	2.336,70	2.264,30	96,90%	1.302.071	923.047	70,89%	Orang
PENYEDIAAN VAKSIN IMUNISASI	1.369,20	1.299,60	94,92%	8	8	100,00%	Paket
PENDIDIKAN, PELATIHAN SDM KESEHATAN, DAN INTERNSHIP DOKTER	1.157,90	1.006,90	86,95%	297.919	285.520	95,84%	Orang
PEMENUHAN ALOKON DI FASILITAS KESEHATAN	235,6	229,2	97,29%	18.393	16.892	91,84%	Faskes
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA KURUS DAN SUPLEMENTASI GIZI	217,3	212,3	97,70%	972.000	972.000	100,00%	anak balita/ balita kurus
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS	185,6	183,9	99,08%	492.700	492.700	100,00%	Ibu Hamil KEK
LABORATORIUM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR	104,4	102,9	98,57%	33	32	96,97%	laboratorium
PENINGKATAN AKSES KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA	78,3	72,5	92,68%	31.791.612	31.217.921	98,20%	peserta KB
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN GIZI BAGI REMAJA PUTRI CALON IBU	59,1	57,1	96,59%	29.327	28.078	95,74%	Kelompok
PEMBINAAN PEMBANGUNAN KELUARGA	35	34,2	97,84%	508	479	94,29%	wilayah
KELUARGA MEMILIKI BADUTA TERPAPAR 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)	30,6	30,2	98,65%	4.122.784	3.723.157	90,31%	keluarga
PEMERIKSAAN SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	24,1	23,8	99,08%	43.648	44.273	101,43%	SAMPEL
PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH	23,3	21	89,95%	36	24	66,67%	Unit
PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN MAKANAN	22,2	21,8	98,22%	22.073	23.249	105,33%	Sarana
LAYANAN IMUNISASI	21,8	18,4	84,21%	515	371	72,04%	Layanan
DESA PANGAN AMAN	17,3	16,7	96,67%	158	152	96,20%	desa
PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	14,4	13,8	95,87%	198	205	103,54%	Pekara/ perkara
PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN	13,7	13,5	98,56%	18.387	18.727	101,85%	SAMPEL
PEMBINAAN GENRE PADA KELOMPOK REMAJA	11,8	11,7	99,11%	29.327	29.250	99,74%	Kelompok
KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	8,7	8,5	97,91%	506	499	98,62%	sekolah
PENDAMPINGAN DAN PERAWATAN LANSIA	5,1	5	98,23%	9.984	9.316	93,31%	Kelompok BKL
PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	4,3	4,1	96,68%	4.244	4.441	104,64%	Sarana
PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	4,2	4	95,74%	66	64	96,97%	pasar
EDUKASI TUMBUH KEMBANG ANAK	1,9	1,9	99,62%	5.832.363	5.670.800	97,23%	keluarga
KELUARGA YANG MEMILIKI LANSIA IKUT KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)	1,7	1,7	99,81%	1.711.881	1.711.408	99,97%	keluarga
PROMOSI DAN KONSELING PASANGAN USIA SUBUR (PUS)	1,6	1,6	99,01%	50.236.679	54.641.200	108,77%	PUS

Sumber : OMSPAN, diolah

Tahun 2020, secara umum target capaian output pada sektor perlindungan sosial relatif tercapai. Berikut detail capaian-capaian output strategis pada sektor perlindungan sosial berdasarkan data hasil konfirmasi di level Satker (data konfirmasi capaian output)

Realisasi belanja perlindungan sosial relatif bagus. Terdapat beberapa kendala yang ditemui pada penyaluran belanja bantuan sosial, terutama terkait dengan verifikasi data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima. Serangkaian perbaikan data telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dan akan dilanjutkan pada 2021.

TABEL 34. CAPAIAN OUTPUT PENTING SEKTOR PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2018 S.D. 2020

Capaian Output 2018	Capaian Output TA 2019	Capaian Output TA 2020
· Penyaluran PKH 10,0 juta KPM (dari target 10,0 juta KPM)	· Penyaluran pkh 9,8 juta KPM (dari target 10,0 juta KPM)	· Penyaluran 10 juta KPM PKH
· Bantuan Pangan 15,2 juta (dari target 15,6 juta)	· Bantuan Pangan Non Tunai 15,3 juta KPM (dari target 15,6 juta KPM)	· Bantuan Tunai peserta Sembako Non PKH 9 juta KPM
		· Bansos Tunai Non Jabodetabek 9,2 juta KPM
		· Bantuan Upah 12,4 juta karyawan
		· Bantuan Upah Guru Honorar 2,0 juta pada Kemendikbud dan 619,7 ribu pada kemenag
		· Perlindungan Sosial (bansos banper), Subsidi, Dukungan UMKM
		· Kartu Sembako 19,4 juta KPM
		· Bantuan Beras peserta PKH 10 juta KPM
		· Bantuan Sembako Jabodetabek 2,2 juta KPM
		· Kartu Pra Kerja 5,6 juta penerima.

Sumber : APBN Kita, diolah

TABEL 35. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS SEKTOR PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2020

OS PERLINSOS 2020	Alokasi Belanja			Output			
	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	% Realisasi	Target	Capaian	Satuan	% Capaian
BANTUAN SOSIAL PANGAN	80.326,90	78.881,20	98,20%	29.000.039	28.956.943	KPM	99,85%
PROGRAM KELUARGA HARAPAN	38.251,40	38.215,90	99,91%	10.000.000	9.999.000	KPM	99,99%
PEMENUHAN KEBUTUHAN KORBAN BENCANA SOSIAL	7.184,40	7.178,10	99,91%	167.304	119.904	Orang	71,67%
BANSOS BERAS DALAM RANGKA JPS DAMPAK COVID-19	5.260,80	5.258,30	99,95%	10.000.000	10.000.000	KPM	100,00%
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM	384	382,7	99,65%	612.805	163.500	Orang	26,68%
REHAB DAN LINSOS PENYANDANG DISABILITAS	158,3	152,7	96,48%	45.902	46.748	Orang	101,84%
REHAB DAN LINSOS KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	134,7	130,6	96,98%	21.714	1.149	Orang	5,29%
KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI BENCANA	134,1	131,5	98,08%	185.390	242.706	Orang	130,92%
BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF	133,2	122	91,61%	29.630	29.630	KK	100,00%
REHAB SOSIAL LANSIA	107	106,3	99,37%	32.430	31.898	Orang	98,36%
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL	77,4	77	99,53%	58.522	42.719	Orang	73,00%
REHAB DAN LINSOS ANAK BALITA/JALANAN/BERHADAPAN HUKUM	61,5	60,3	98,06%	32.145	8.290	Orang	25,79%
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	52,5	50,6	96,53%	2.373	2.023	KK	85,25%
PEMBERDAYAAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	49,9	49,1	98,56%	7.201	6.004	Orang	83,38%
PELATIHAN PENDAMPING PKH	21,7	21,3	98,14%	9.153	8.900	Orang	97,24%
BANTUAN REHABILITASI RUMAH	5,8	5,4	92,36%	341	341	KK	100,00%

Sumber : OMSPAN, diolah

3.IV. SEKTOR INFRASTRUKTUR

Selama tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada capaian infrastruktur, utamanya pada pembangunan jalan, jembatan, rek kereta api, irigasi, dan infrastruktur IT. Berikut data capaian output penting (sementara) sektor infrastruktur selama tiga tahun terakhir berdasarkan data rilis Kemenkeu pada APBNKita (posisi awal

tahun).

Tahun 2020, secara umum target capaian output pada sektor infrastruktur relatif tercapai. Berikut detail capaian-capaian output strategis pada sektor perlindungan sosial berdasarkan data hasil konfirmasi di level Satker (data konfirmasi capaian output)

TABEL 36. CAPAIAN OUTPUT PENTING SEKTOR INFRASTRUKTUR TAHUN 2018 S.D. 2020

Capaian Output 2018	Capaian Output TA 2019	Capaian Output TA 2020
· Pembangunan jalan baru 630,28 km (dari target 811,5)	· Pembangunan jalan baru 359,6 km (dari 480,1 km)	· Pembangunan jalan baru 280,18 km
· Pembangunan Jalan Tol 27,9 km (dari target 33,1 km)	· Pembangunan jalan tol 18,8 km (21,3 km)	· Rel KA 452,3 kms'p
· Pembangunan rel KA 3477,7 km'sp (dari target 366 km'sp)	· Rel Kereta Api 320,3 km'sp (dari target 501,5 km'sp)	· Pembangunan jembatan 7.669,6 m
· Pembangunan jembatan 7.673,2 m (15.373,0 m)	· Pembangunan jembatan 15.721,4 m (dari target 18.581 m)	· Pembangunan 5 pelabuhan yaitu pelabuhan sanur bali, pelabuhan labuhan Bajo NTT, Pelabuhan Lebiti Sulteng, Pelabuhan Manse Sultra, pelabuhan Tanjung Ular Babel
· Pembangunan bandara 4 (dari target 4)	· Pembangunan bandara 4 (dari target 5)	· 45 bendungan (rata rata fisik 53,61%)
		· Pembangunan jaringan irigasi 280,84 km (rata rata fisik 90,34%)
		· Rehabilitasi jaringan irigasi 1.497,4 km (rata-rata fisik 97,01%)
		· Rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 183.915 hektar
		· Jargas di 23 Kab/Kota 135.286 km
		· Penyediaan akses internet 10.725 lokasi
		· Padat Karya 2,2 juta naker

Sumber : APBN Kita, diolah

TABEL 37. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS SEKTOR PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2020

OS INFRASTRUKTUR 2020	Alokasi Belanja			Output			
	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	% Realisasi	Target	Capaian	Satuan	% Capaian
PEMBANGUNAN BENDUNGAN	8.626,40	8.319,30	96,44%	47	26	Bendungan	55,32%
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PENATAAN KAWASAN)	1.543,50	1.279,60	82,90%	969	560	Hektar	57,79%
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (INFRASTRUKTUR SOSIAL-EKONOMI)	1.825,20	1.652,00	90,51%	1.813	964	Hektar	53,17%
PEMBANGUNAN JALAN	3.022,00	2.942,90	97,38%	323	252	km	78,02%
PEMBANGUNAN JARINGAN GAS	1.428,50	1.410,80	98,76%	127.864	127.864	SR	100,00%
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI	4.002,90	3.595,30	89,82%	971	362	km	37,28%
PEMBANGUNAN JEMBATAN	2.125,60	2.019,00	94,98%	11.891	7.001	M	58,88%
PEMBANGUNAN PELABUHAN	3.092,90	2.876,60	93,01%	13	7	Paket	53,85%
PEMBANGUNAN REL KERETA API	8.826,40	8.166,10	92,52%	1.011	539	Km'sp	53,31%
PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS	458,6	426	92,89%	956	845	Unit	88,39%
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN	824,7	783,1	94,96%	951	368	Unit	38,70%
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	1.993,10	1.777,20	89,17%	655.621	510.873	SR	77,92%
PENERBANGAN PERINTIS	354,9	351	98,91%	194	131	RUTE	67,53%
PENINGKATAN KAPASITAS BANDAR UDARA (PN)	1.573,40	1.540,10	97,88%	45	34	LOKASI	75,56%
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA	4.785,30	4.616,30	96,47%	228.681	141.813	Unit	62,01%
REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI	419,6	412,6	98,32%	862	614	km	71,23%
TOL LAUT (FASILITASI/TRAYEK)	1.408,20	1.387,60	98,54%	128	114	Unit/Trayek	89,06%

Sumber : OMSPAN, diolah

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyaluran belanja infrastruktur adalah

tertundanya pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pembangunan sehubungan proses penyesuaian

anggaran/refocusing dan masa pandemi COVID-19. Disamping itu dihadapi keterbatasan akses pelaksanaan di lapangan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari masing-masing Pemerintah Daerah

Adanya perubahan pagu serta beberapa penambahan pagu anggaran pada triwulan akhir membuat kegiatan mempunyai keterbatasan waktu eksekusi.

4. BELANJA DAK FISIK DAN DANA DESA

4.1. DAK FISIK

Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh 173 KPPN di bawah 34 Kanwil DJPb. Penyaluran DAK Fisik dilakukan kepada 542 Pemda pada 34 provinsi, dan terbagi ke dalam 27 bidang.

Secara Nasional, sebagaimana telah disampaikan di atas, realisasi penyaluran mencapai Rp50,18 Triliun atau 93,58% dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp53,62 triliun. Realisasi penyaluran tersebut terdiri dari: (i) penyaluran DAK Fisik di luar DAK Fisik Bidang Kesehatan yang digunakan untuk penanganan Covid19 sebesar Rp42,13 Triliun atau 95,09% dari pagu sebesar Rp44,30 Triliun, (ii) penyaluran Cadangan DAK Fisik sebesar Rp7,29 Triliun atau 85,16%, dari pagu sebesar Rp8,56 Triliun, dan (iii) penyaluran DAK Fisik Kesehatan untuk Penanganan COVID-19 sebesar Rp768,95 Miliar atau 100% dari Pagu sebesar Rp768,95 Miliar. Total penyerapan/penggunaan DAK Fisik dari RKUD ke pihak ketiga (vendor) tahun 2020 adalah sebesar Rp43,21 Triliun atau 86,10% dari total penyaluran (RKUN ke RKUD).

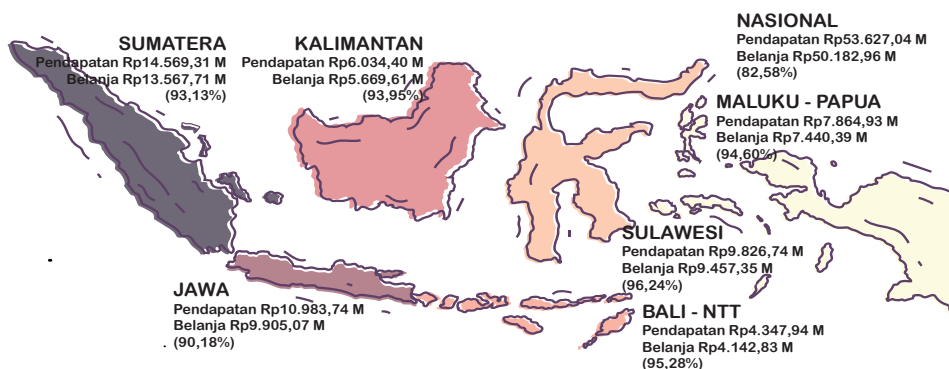
Regional Sumatera, penyaluran DAK Fisik untuk Regional Sumatera terealisasi sebesar Rp13,57 Triliun atau sebesar 93,13% dari total pagu sebesar Rp 14,57 Triliun. Penyaluran tersebut berada di bawah rata-rata penyaluran Nasional sebesar 93,58%. Untuk penyerapan, DAK Fisik pada regional Sumatera telah direalisasikan sebesar Rp. 12,35 Triliun atau 91,01% dari dana yang diterima dari RKUN, di atas penyerapan secara Nasional (86,10%).

Regional Jawa-Bali, penyaluran DAK Fisik untuk Regional Jawa-Bali terealisasi sebesar Rp 9,90 Triliun atau 90,18% dari total pagu sebesar Rp 10,98 Triliun. Penyaluran tersebut masih di bawah rata-rata penyaluran Nasional 93,58%. Untuk penyerapan DAK Fisik telah direalisasikan sebesar Rp 9,18 Triliun atau 92,66% dari dana yang diterima dari RKUN. Hal ini berada di atas penyerapan secara Nasional (86,10%).

Regional Kalimantan, penyaluran DAK Fisik untuk Regional Kalimantan terealisasi sebesar Rp 5,67 Triliun atau 93,95% dari total pagu sebesar Rp 6,03 Triliun. Penyaluran tersebut berada di atas rata-rata penyaluran Nasional 93,58%. Untuk penyerapan DAK Fisik pada regional Kalimantan telah direalisasikan sebesar Rp 5,10 Triliun atau 89,89% dari dana yang diterima dari RKUN. Hal ini berada di atas penyerapan secara Nasional (86,10%).

Regional Sulawesi, penyaluran DAK Fisik untuk Regional Sulawesi terealisasi sebesar Rp9,46 Triliun atau 96,24% dari total pagu sebesar Rp9,83 Triliun. Penyaluran tersebut berada di atas rata-rata penyaluran Nasional 93,58%. Untuk penyerapan DAK Fisik pada regional Sulawesi telah direalisasikan sebesar Rp8,11 Triliun atau 85,78% dari dana yang diterima dari RKUN. Hal ini berada

GAMBAR 44. PETA PAGU DAN REALISASI DAK FISIK PER REGIONAL



Sumber : OMSPAN, diolah

di bawah penyerapan secara Nasional (86,10%).

Regional Nusa Tenggara, penyaluran DAK Fisik untuk Regional Nusa Tenggara terealisasi sebesar Rp4,14 Triliun atau 95,28% dari total pagu sebesar Rp 4,35 Triliun. Penyaluran tersebut berada di atas rata-rata penyaluran Nasional 93,58%. Untuk penyerapan DAK Fisik pada regional Nusa Tenggara telah direalisasikan sebesar 3,47 Triliun atau 83,77%, dari dana yang diterima dari RKUN. Hal ini berada di bawah penyerapan secara Nasional (86,10%).

Regional Maluku-Papua, penyaluran DAK Fisik untuk Regional Maluku-Papua terealisasi sebesar Rp7,44 Triliun atau 94,60% dari total pagu sebesar Rp 7,86 Triliun. Penyaluran tersebut berada di atas rata-rata penyaluran Nasional 93,58%. Untuk penyerapan DAK Fisik pada regional Maluku-Papua telah direalisasikan sebesar Rp5,00 Triliun atau 67,24%, dari dana yang diterima dari RKUN. Hal ini berada di bawah penyerapan secara Nasional (86,10%).

Dalam proses penyaluran, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan DAK Fisik tidak dapat tersalurkan dengan maksimal. Hal tersebut tentu memerlukan solusi yang lebih lanjut, supaya kendala serupa dapat diminimalisasi pada proses penyaluran tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum, kendala penyaluran DAK Fisik tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan pemerintah;
2. Kendala terkait permasalahan sumber daya

manusia (SDM);

3. Kendala dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan;

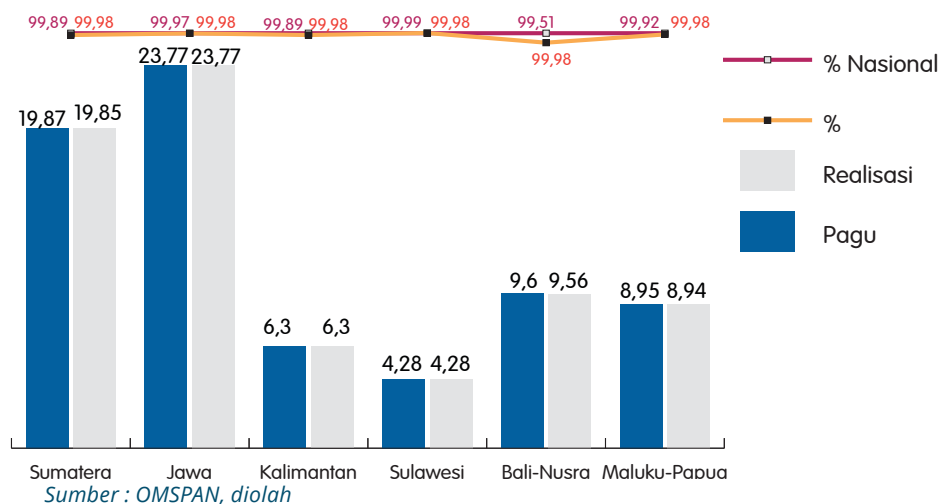
4. Kendala sarana dan prasarana seperti tidak stabilnya jaringan komunikasi yang menghambat proses pengiriman persyaratan penyaluran.

Pada tahun 2020, Dana Desa dialokasikan untuk 76.796 desa yang tersebar pada 33 provinsi dan 446 Pemda. Alokasi tersebut dilayani oleh 169 KPPN selaku penyalur DAK Fisik dan Dana Desa pada 33 Kantor Wilayah DJPb. Pada tahun 2020, alokasi Dana Desa tercatat sebesar Rp72,78 triliun, dan sebesar Rp72,69 triliun atau mencapai 99,88% telah disalurkan dari RKUN ke RKD. Penyaluran Dana Desa per regional, dapat dilihat pada Grafik "Pagu dan Realisasi Dana Desa per Rergional".

4.II. DANA DESA

Secara Nasional, penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun 2020 langsung ke RKD sebesar Rp72,69 Triliun atau sebesar 99,88% dari total alokasi pagu sebesar Rp 72,78 Triliun. Alokasi tertinggi berada pada Regional Jawa-Bali dengan alokasi sebesar Rp23,77 triliun, dan alokasi terendah berada pada Regional Nusa Tenggara dengan alokasi sebesar Rp4,28 triliun. Meskipun pagu yang dimiliki oleh Regional Nusa Tenggara merupakan yang terendah di antara 5 regional yang lain, namun persentase realisasi penyaluran Dana Desa pada regional ini menunjukkan nilai tertinggi, yaitu sebesar 99,9%. Adapun persentase realisasi terendah berada pada Regional Sulawesi, sebesar

GAMBAR 45. PAGU DAN REALISASI DANA DESA PER REGIONAL



99,51%.

Regional Sumatera, penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD pada Regional Sumatera sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.19,85 Triliun atau 99,89% dari alokasi Pagu sebesar Rp.19,87 Triliun (di atas penyaluran Nasional sebesar 99,88%), dengan BLT yang disalurkan mencapai Rp. 3,86 Triliun atau sebesar 19,45% dari total penyaluran ke RKD untuk KPM pada 23.045 Desa.

Regional Jawa-Bali, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada Regional Jawa-Bali sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.32,77 Triliun atau 99,97% dari alokasi Pagu sebesar Rp.23,77 Triliun (di atas penyaluran Nasional sebesar 99,88%), dengan BLT yang disalurkan mencapai Rp. 7,31 Triliun atau sebesar 30,75% dari total penyaluran ke RKD untuk KPM pada 23.111 Desa.

Regional Kalimantan, Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada Regional Kalimantan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.6,29 Triliun atau 99,89% dari alokasi Pagu sebesar Rp.6,30 Triliun (di atas penyaluran Nasional sebesar 99,88%), dengan BLT yang disalurkan mencapai Rp. 1,28 Triliun atau sebesar 20,33% dari total penyaluran ke RKD untuk KPM pada 6.554 Desa.

Regional Sulawesi, Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada Regional Sulawesi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.9,56 Triliun atau 99,51% dari alokasi Pagu sebesar Rp.9,60 Triliun (di bawah penyaluran Nasional sebesar 99,88%), dengan BLT yang disalurkan mencapai Rp. 1,82 Triliun atau sebesar 19,05% dari total penyaluran ke RKD untuk 6.992

Desa.

Regional Nusa Tenggara, Untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada Regional Nusa Tenggara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.4,28 Triliun atau 99,99% dari alokasi Pagu sebesar Rp.4,28 Triliun (di atas penyaluran Nasional sebesar 99,88%), dengan BLT yang disalurkan mencapai Rp. 1,18 Triliun atau sebesar 27,57% dari total penyaluran ke RKD untuk KPM pada 3.114 Desa.

Regional Maluku-Papua, Untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada Regional Maluku-Papua sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.8,94 Triliun atau 99,92% dari alokasi Pagu sebesar Rp.8,95 Triliun (di atas penyaluran Nasional sebesar 99,88%), dengan BLT yang disalurkan mencapai Rp. 1,59 Triliun atau sebesar 17,78% dari total penyaluran ke RKD untuk KPM pada 9413 Desa.

Atas realisasi penyaluran dana Dana Desa ke RKD sebesar Rp 72,69 triliun, dana tersebut telah diserap oleh desa sebesar Rp44,98 triliun atau sebesar 61,98% dari jumlah dana yang telah disalurkan. Dari jumlah tersebut, rata-rata capaian output yang telah direalisasikan sebesar 86,27%. Persentase penyerapan tertinggi Dana Desa berada pada Regional Jawa – Bali dengan penyerapan sebesar 77,12%, dan persentase penyerapan terendah adalah Regional Sulawesi dengan persentase penyerapan sebesar 45,86%. Rata-rata capaian output atas penyerapan Dana Desa yang telah dilakukan adalah sebesar 86,2%. Rata-rata capaian output tertinggi berada pada Regional Kalimantan dengan rata-rata capaian output sebesar 92,81%, dan yang terendah berada pada Regional Sulawesi dengan rata-rata capaian

TABEL 38. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS SEKTOR PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2020

No	Regional	Penyaluran RKUN ke RKUD	Penyerapan	% Penyerapan	Sisa RKD	Rata-rata & Cap. Output
1	Sumatera	19.847.679.349.904	12.455.776.618.297	62,76%	7.391.902.731.607	92,53%
2	Jawa - Bali	23.768.212.317.602	18.329.195.348.793	77,12%	5.439.016.968.809	95,18%
3	Kalimantan	6.296.763.153.518	3.557.309.314.552	56,49%	2.739.453.838.966	93,17%
4	Nusa Tenggara	4.279.729.412.265	1.986.152.050.925	46,41%	2.293.577.361.340	92,59%
5	Sulawesi	9.555.412.570.388	4.382.241.297.186	45,86%	5.173.171.273.202	92,67%
6	Papua - Maluku	8.942.216.569.297	4.275.447.297.943	47,81%	4.666.769.271.354	91,97%
	Jumlah	72.690.013.372.974	44.986.121.927.696	61,89%	27.702.482.450.895	93,21%

Sumber : OMSPAN, diolah

output sebesar 78,83%.

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD. Agar kejadian serupa dapat diminimalisir pada proses penyaluran tahun-tahun anggaran berikutnya, diperlukan suatu langkah strategis untuk dapat mengatasi kendala dimaksud. Adapun kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya pandemi COVID-19, secara keseluruhan menyebabkan terhambatnya seluruh aktivitas pemenuhan persyaratan penyaluran.
2. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan SDM di Desa untuk mengelola keuangan desa khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
3. Desa terlambat dalam memenuhi persyaratan salur sehingga menyebabkan terlambatnya/tidak tersalurkannya alokasi Dana Desa pada desa
4. Persebaran aparatur desa yang kompeten masih belum merata. Hal tersebut menyebabkan timpangnya kualitas penyerapan dana desa antar desa
5. Terdapat risiko data penerima ganda untuk BLT dana desa. Penerima yang sudah mendapat bantuan dari program PKH, program sembako atau program bantuan lain menuntut agar diberikan pula BLT Dana Desa
6. Masih ada kendala dalam penyetoran sisa dana desa ke RKUN yang disebabkan belum ada persetujuan dari Kepala Daerah untuk melakukan penyetoran dan masih ada beberapa desa yang belum menyetorkan sisa dana desa ke RKUD
7. Terjadinya beberapa kali perubahan/revisi PMK tentang Penyaluran Dana Desa yang menyebabkan Pemda juga harus melakukan revisi APBD dan APBDes.

Adanya kegiatan pada beberapa desa yang mengalami perubahan dari daftar kegiatan yang diajukan pada aplikasi KRISNA baik perbedaan dalam nama kegiatan, output, maupun karena adanya tambahan kegiatan yang belum tercakup pada aplikasi KRISNA.

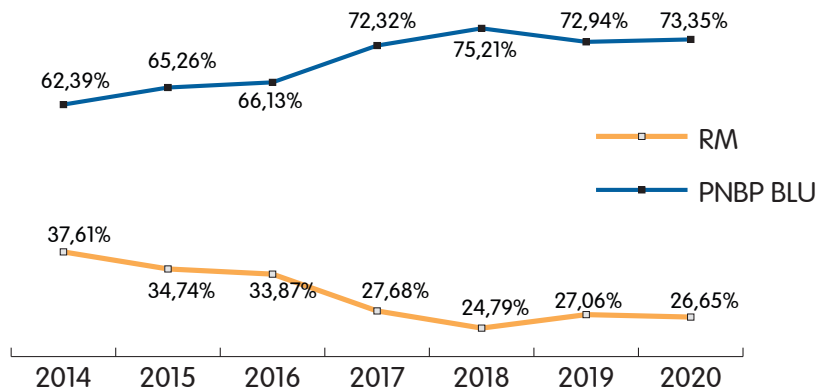
5. PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT

Badan Layanan Umum merupakan organisasi sektor publik yang dioperasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang fungsi utamanya ialah menjual barang dan/atau jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Satuan kerja Badan Layanan Umum merupakan instansi pemerintah dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih, memiliki tantangan untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien dan produktif tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Fleksibilitas satker BLU memberikan peluang bagi satker tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggarannya secara mandiri yang berasal dari PNBPN satker bersangkutan, sehingga kebutuhan alokasi anggaran dari rupiah murni dapat berkurang.

Pengelolaan keuangan BLU sebenarnya sudah memisahkan sumber dana belanja berdasarkan jenis biayanya. Sumber dana PNBPN digunakan untuk kegiatan operasional sedangkan RM yang berasal dari APBN digunakan untuk investasi/ekspansi. Namun, untuk belanja pegawai, barang, maupun modal dapat menggunakan sumber dana belanja RM maupun sumber dana dari PNBPN. Kondisi ketidakjelasan tersebut menyebabkan risiko duplikasi penggunaan antara belanja yang bersumber RM dan PNBPN sehingga sangat sulit untuk mengukur keakuratan kemandirian BLU. Kemandirian BLU ini diharapkan akan menambah ruang fiskal APBN di Indonesia.

Tingkat kemandirian satker BLU dalam membiayai kebutuhannya terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hal ini tercermin pada semakin rendahnya ketergantungan/porsi pendanaan satker BLU yang bersumber dari rupiah murni APBN. Meskipun di tahun 2019 terjadi sedikit penurunan dimana porsi sumber dana rupiah murni meningkat dari 24,79 persen di tahun 2018 menjadi 27,06 persen untuk tahun 2019, pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan kembali menjadi sebesar 26,65 persen. Porsi sumber dana RM dan PNBPN BLU tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan satker skema BLU dijalankan secara efisien dan optimal. Hal ini dapat menjadi solusi di masa mendatang dalam menyediakan layanan masyarakat dengan biaya lebih murah tanpa harus

GAMBAR 46. PETA PAGU DAN REALISASI DAK FISIK PER REGIONAL



Sumber : OMSPAN, diolah

membenani APBN.

Untuk BLU yang tingkat kemandirian masih rendah atau semakin menurun, diperlukan langkah terobosan antara lain dalam bentuk diversifikasi usaha tanpa merubah core bisnis seperti pemanfaatan aset-aset atau kerjasama operasional dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNPB dan mengurangi ketergantungan terhadap rupiah murni sehingga diharapkan tingkat kemandirian BLU semakin baik.

Salah satu persyaratan pembentukan BLU adalah satker tersebut memiliki kinerja keuangan yang sehat. Di antara indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah jumlah pendapatan PNPB fungsional selama setahun.

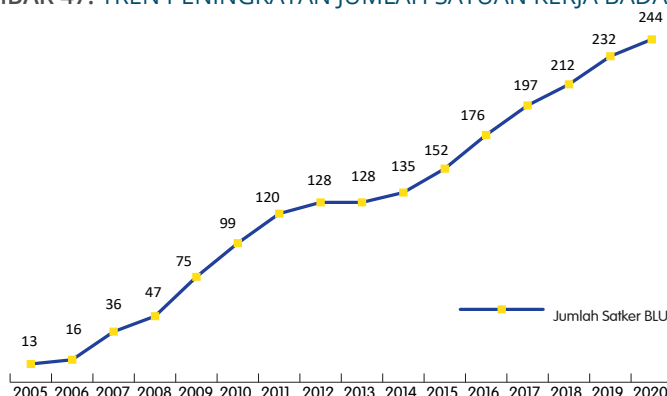
Meskipun tujuan pembentukan BLU adalah tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun diharapkan dengan pelayanan yang meningkat maka secara langsung juga pendapatannya meningkat. Lebih jauh lagi diharapkan persentase alokasi belanja Satker BLU yang bersumber dari Rupiah Murni semakin menurun digantikan dengan sumber belanja dari pendapatan BLU.

Di sisi lain, walaupun proporsi realisasi PNPB BLU mengalami tren peningkatan sejak tahun 2017 namun masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengelolaan BLU. Berdasarkan hasil pembinaan BLU pada masing-masing wilayah, permasalahan pada BLU diantaranya fungsi Satuan Pengawas Intern pada BLU yang belum optimal, adanya permasalahan dalam tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) BLU, dan kendala dalam optimalisasi aset tetap.

Pada tahun 2020 jumlah satker BLU bertambah sebanyak 12 satker atau meningkat 5,17 persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan tersebut berasal dari pembentukan 16 sakter BLU baru dan pencabutan status BLU pada 4 satker. Selain itu terdapat 1 satker yang bergabung dengan satker lain, dan 1 satker BLU yang berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Satker yang dicabut status BLU-nya adalah satker dari rumpun barang jasa lain yaitu Bandar Udara.

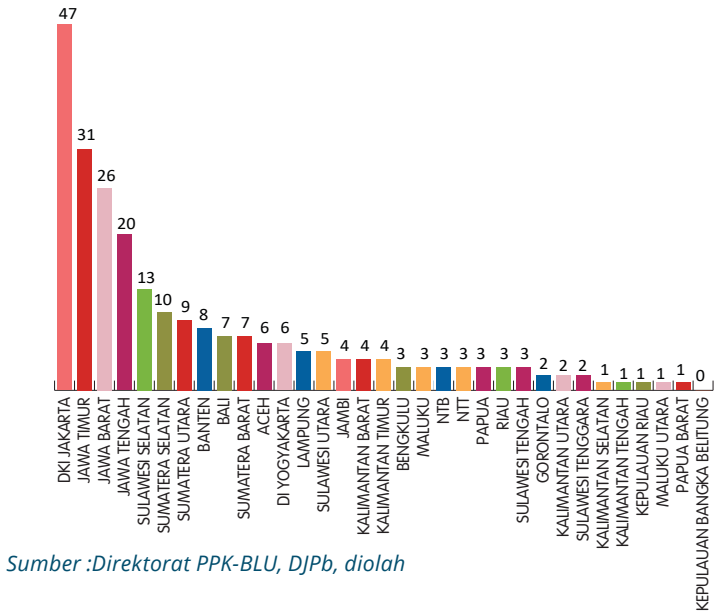
Penambahan jumlah satker BLU pada tahun 2019 terdapat pada 4 regional yakni 6 satker (50 persen) di regional Jawa, 3 satker (25 persen) di regional Sumatera, 1 Satker (8,33 persen) di kawasan

GAMBAR 47. TREK PENINGKATAN JUMLAH SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM



Sumber : Direktorat PPK-BLU, DJPb, diolah

GAMBAR 48. JUMLAH BLU PER KANWIL DJPB



Sumber :Direktorat PPK-BLU, DJPb, diolah

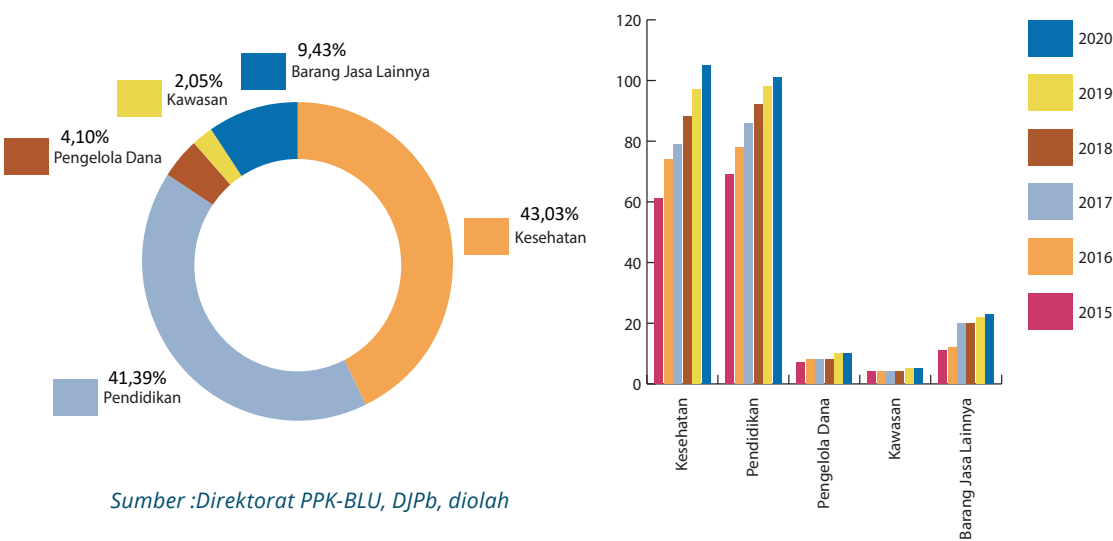
Kalimantan serta 2 satker (16,67 persen) di regional Maluku dan Papua. Penambahan jumlah satker BLU rumpun pendidikan terdapat pada regional Sumatera sebanyak 3 satker (50,00%), regional Jawa sebanyak 2 satker (33,33%), dan regional Maluku dan Papua 1 satker (16,67%). Jumlah Satker BLU terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta, sementara satu-satunya wilayah yang belum memiliki satker BLU adalah Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tahun sebelumnya, secara agregat jumlah satker BLU terbanyak masih berada di kawasan Jawa, bahkan penambahan satker BLU di tahun 2020 sebagian besar di regional Jawa. Namun demikian sebagian lain Satker BLU (43,44 persen) berada di luar kawasan Jawa yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan layanan dan penerimaan manfaat BLU

di seluruh Indonesia.

Sampai dengan tahun 2020, komposisi satker BLU jika dilihat dari rumpunnya masih terkonsentrasi di rumpun Pendidikan (41,39 persen) dan Kesehatan (43,03 persen). Untuk tahun 2020, peningkatan jumlah satker BLU rumpun kesehatan paling banyak dibandingkan dengan satker pada rumpun lainnya. Satker BLU rumpun kesehatan bertambah sebanyak 8 Satker atau 66,67 persen dari total penambahan jumlah satker BLU, diikuti satker pada BLU rumpun Pendidikan sebanyak 3 satker (25 persen).

Banyaknya Satker BLU pada Rumpun Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang terjangkau kepada masyarakat terutama untuk memperoleh manfaat

GAMBAR 49. REKAPITULASI SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENURUT RUMPUN



Sumber :Direktorat PPK-BLU, DJPb, diolah

di bidang pendidikan dan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.

6. MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

6.II.A. KREDIT PROGRAM

Pemerintah sejak masa awal orde baru telah meluncurkan kebijakan kredit program. Kebijakan tersebut yang diawali dengan kredit Bimas. Seiring berjalannya waktu kredit program mengalami berbagai perubahan, baik yang terkait dengan prosedur penyaluran.

Kredit Program merupakan kredit perbankan yang disubsidi oleh pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Saat ini, terdapat empat skema kredit program yang disalurkan di wilayah Aceh yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dua skema terakhir merupakan skema dengan tingkat penyaluran yang tinggi dan mengena pada masyarakat, terlebih pada masa pandemi COVID19.

6.II.B. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan paket kebijakan pemerintah berupa pembiayaan modal kerja/investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha/kelompok usaha yang produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

KUR digulirkan pemerintah dengan pendanaan yang bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur. KUR menyasar UMKM yang mempunyai surat izin usaha dan usahanya minimal sudah berjalan 6 (enam) bulan. Plafon pinjaman KUR untuk usaha mikro bisa sampai dengan Rp25 juta dan untuk usaha kecil bisa mencapai Rp500 juta. Saat ini terdapat 5 skema KUR yaitu, Super Mikro, Mikro, Kecil, Khusus, dan TKI.

Skema Super Mikro (Supermi) merupakan skema baru di tahun 2020 yang diperuntukkan bagi pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga produktif yang ingin memulai usaha mikro. Skema super mikro menggunakan tingkat suku bunga 6 persen p.a. dengan subsidi bunga sebesar 13 persen. Plafon skema Supermi sebesar Rp0 - Rp10 juta per Penerima KUR dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. Dalam skema ini agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai, serta tidak memerlukan agunan tambahan. Penerima KUR dengan skema ini dikhususkan bagi perorangan yang belum pernah menerima KUR sebelumnya.

Skema Mikro merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafon kredit mulai Rp10jt sampai dengan Rp50 juta, dengan tingkat biaya jasa tingkat suku bunga 6 persen p.a. dengan subsidi bunga sebesar 10,5 persen. Jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun. Dalam skema ini agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai, serta tidak diwajibkan adanya agunan tambahan dan tanpa perikatan.

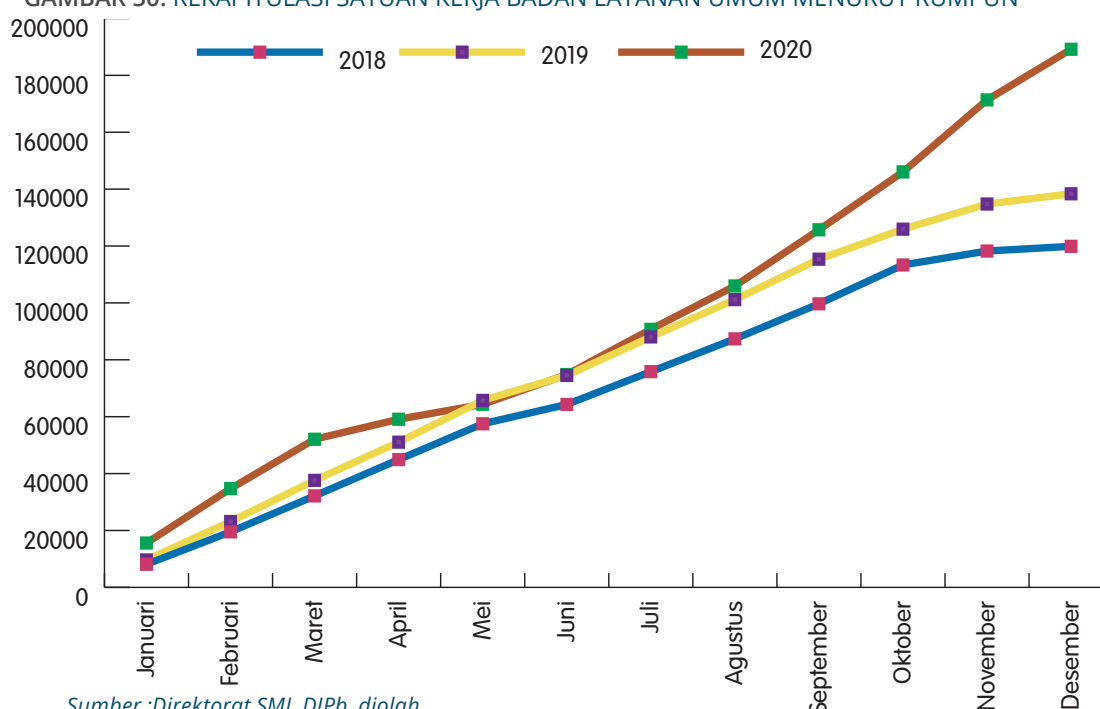
Pada tahun 2017 istilah KUR Ritel mengalami perubahan menjadi Skema KUR Kecil. KUR Kecil merupakan pinjaman plafon di atas Rp50 juta maksimal sebanyak Rp500 juta per penerima. Tingkat suku bunga 6 persen p.a. dengan subsidi bunga sebesar 5,5 persen. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 tahun. Dalam skema ini agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai, dengan ketentuan tambahan agunan sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

Skema Pembiayaan TKI merupakan bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal dalam sejarah perjalanannya

menuju negeri tujuan. Plafon kredit mulai Rp0 sampai dengan Rp25 juta, dengan tingkat biaya jasa tingkat suku bunga 6 persen p.a. dengan subsidi bunga sebesar 14 persen. Jangka waktu paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu 3 tahun. Dalam skema ini agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai, serta tidak diwajibkan adanya agunan tambahan dan tanpa perikatan.

Selama tahun 2020, pemerintah telah merealisasikan KUR sebesar Rp196,4 triliun atau

GAMBAR 50. REKAPITULASI SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENURUT RUMPUN



sebesar 103,3 persen dari plafon tahunan Rp190 triliun. Dana KUR tersebut diberikan kepada 6,05 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp230,1 triliun. Realisasi tersebut bertumbuh sebesar 36,7 persen dari tahun sebelumnya (YoY). Penyaluran tersebut terbagi ke dalam 4 jenis KUR yaitu KUR Super Mikro Rp8,4 triliun (4,17 persen), KUR Mikro Rp128,4 triliun (65,46 persen), KUR Kecil Rp59 triliun (30,18 persen), dan KUR TKI Rp372 miliar (0,19 persen). Kinerja positif KUR tidak terlepas dari diturunkannya suku bunga KUR dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020. Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas akses KUR, maka pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan total plafon KUR.

Dari total capaian realisasi KUR Tahun 2020, terdapat porsi KUR Syariah. Penyaluran KUR Syariah dilakukan dengan skema subsidi marjin melalui 4 penyalur, yaitu Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) BPD Riau Kepri, serta UUS BPD Jawa Tengah. Total realisasi penyaluran KUR Syariah dari Agustus 2015 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp7,39 triliun yang disalurkan kepada 194.089 debitur.

Pada Regional Maluku Papua capaian pertumbuhan debitur mencapai hingga di atas 30 persen. Sedangkan dari sisi nominal penyaluran Regional Sumatera dan Jawa masih mendominasi pertumbuhan hingga mencapai angka 39 persen.

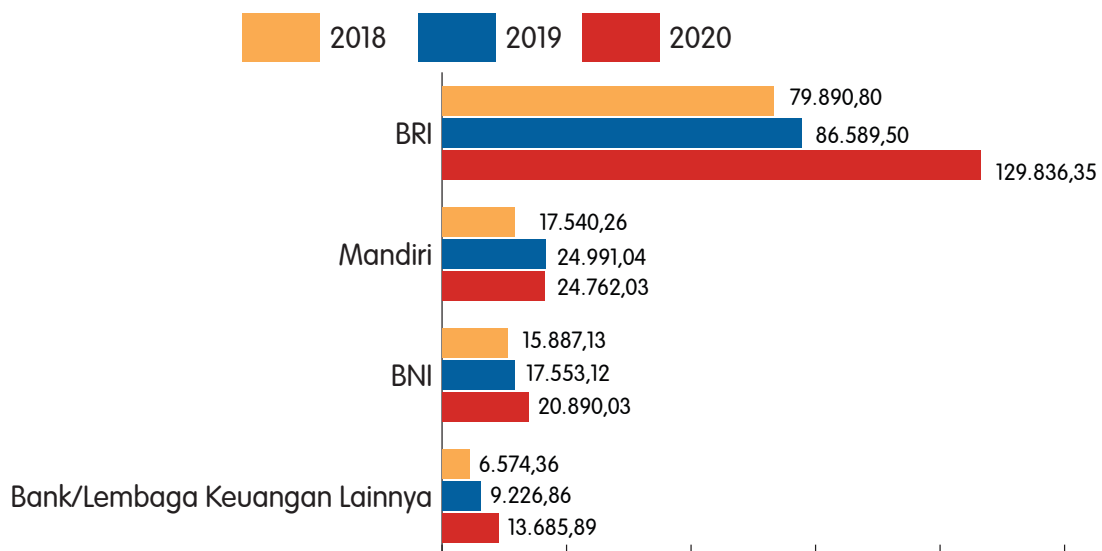
Pertumbuhan positif debitur tahun 2020 pada Regional Maluku Papua dipengaruhi oleh

TABEL 39. KINERJA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT PER REGIONAL TAHUN 2018 – 2020

Regional	2018		2019		2020	
	DEBITUR	PENYALURAN	DEBITUR	PENYALURAN	DEBITUR	PENYALURAN
SUMATERA	752.480	24.753,10	799.779	28.190,47	1.017.406	39.346,30
JAWA	2.703.855	65.673,07	2.881.327	76.271,85	3.641.930	106.725,26
BALINUSA	250.358	8.090,54	272.174	9.780,00	310.031	11.739,97
KALIMANTAN	219.330	7.281,07	221.350	8.125,18	274.615	10.457,01
SULAWESI	444.072	11.889,61	472.207	13.705,42	575.928	17.889,70
MALUKU PAPUA	67.446	2.191,49	64.747	2.278,83	84.256	3.005,32

Sumber : Direktorat SMI, DJPb, diolah

GAMBAR 51. KINERJA BANK PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT



Sumber : Direktorat SMI, DJPb, diolah

peningkatan debitur di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Debitur di Provinsi Maluku bertumbuh sebesar 53,4 persen atau meningkat 10,8 ribu dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan debitur pada Provinsi Papua sebesar 20 persen atau meningkat 5 ribu dibanding tahun 2019.

Pertumbuhan debitur di Provinsi Maluku dan Papua dipengaruhi oleh karena adanya penurunan tingkat bunga dan adanya program KUR pada tahun 2020. Selain itu sektor UMKM di wilayah kepulauan telah terjangkau oleh perbankan.

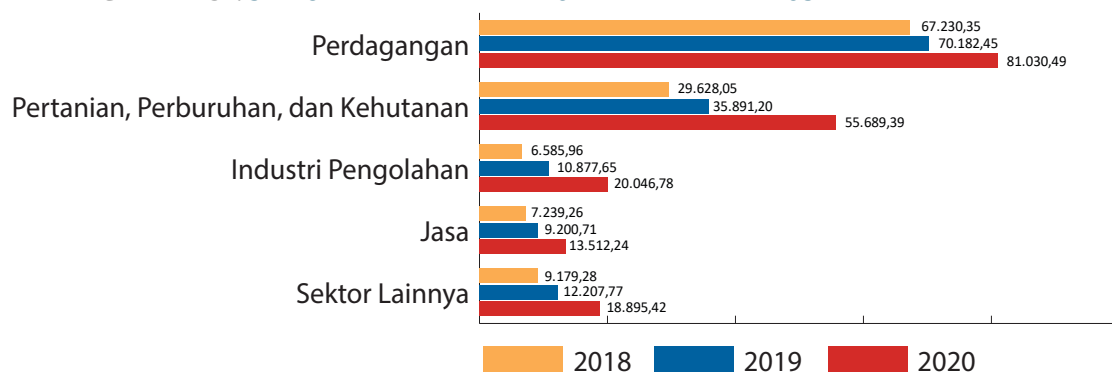
Pertumbuhan nominal penyaluran pada Regional Sumatera dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Lampung sebesar Rp2,5 triliun (43,6 persen), Rp1,7 persen (51,3 persen), dan Rp1,6 triliun

(42,5 persen). Sedangkan pertumbuhan nominal penyaluran pada Regional Jawa dipengaruhi oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa barat, dan Jawa Timur sebesar Rp10,3 triliun (42,9 persen), Rp8,8 triliun (48,3 persen), dan Rp8,7 triliun (35,3 persen).

Pertumbuhan nominal penyaluran di Sumatera dan Jawa dipengaruhi oleh seiring dengan pemberlakuan relaksasi dan kebutuhan akan permodalan yang murah dalam menghadapi masa pandemi, penyaluran KUR mulai meningkat mulai dari bulan Juni.

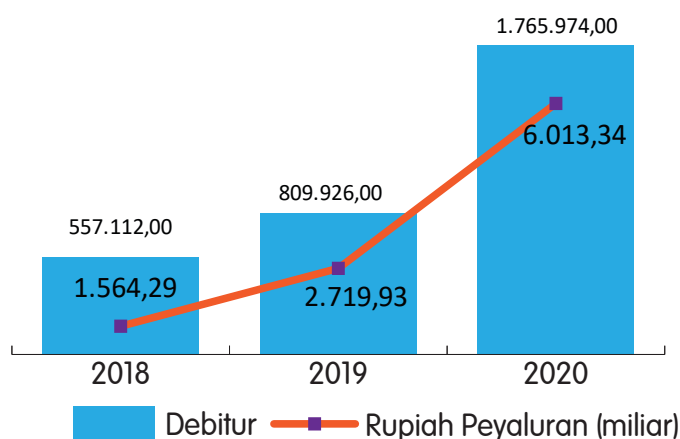
Pada tahun 2020 terdapat 42 Bank/Lembaga Keuangan yang menyalurkan KUR. Bank Rakyat Indonesia merupakan penyalur KUR dengan nominal terbesar mencapai lebih dari dua pertiga dari total plafon tahun 2020 atau sebesar Rp129,8 triliun. Capaian tersebut selaras dengan jumlah

GAMBAR 52. SEKTOR PENERIMA PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT



Sumber : Direktorat SMI, DJPb, diolah

GAMBAR 53. SEKTOR PENERIMA PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT



Sumber : Direktorat SMI, DJPb, diolah

debitur sebanyak 5,1 juta debitur atau mencapai 87,7 persen dari total debitur di tahun 2020.

Dalam tiga tahun terakhir Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mendominasi penyaluran KUR. Di tahun 2020, sektor tersebut memiliki porsi hampir mencapai 50 persen dari plafon tahunan dengan nilai sebesar Rp81 triliun.

6.II.C. KREDIT ULTRA MIKRO (UMI)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan tindak lanjut program bantuan sosial. Meningkatkan level kemandirian melalui usaha mikro masyarakat yang berada di lapisan terbawah merupakan tujuan utama program ini. Sasaran utamanya adalah masyarakat lapisan terbawah yang ingin memiliki usaha namun terkendala dalam fasilitas perbankan.

Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah yang tidak mempersyaratkan surat izin usaha, batas pinjaman dana mulai dari Rp500 ribu sampai dengan Rp10 juta, serta tanpa menggunakan agunan tambahan. Program ini dilaksanakan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah

(PIP) selaku koordinator yang melaksanakan penghimpunan sekaligus penyaluran dana melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dalam proses penyaluran UMi dilakukan pendampingan oleh penyalur. Hal ini merupakan salah satu mitigasi risiko terjadinya non-performing loan serta membantu debitur dalam pengembangan usahanya.

Penyaluran pembiayaan UMi terbagi dalam beberapa sektor antara lain: perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta jasa. Pembiayaan UMi juga merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mewujudkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sesuai dengan rilis PIP, dalam Kinerja Pembiayaan UMi dalam 3 tahun terakhir telah mampu mencapai beberapa target, antara lain:

a. Penyaluran tumbuh positif.

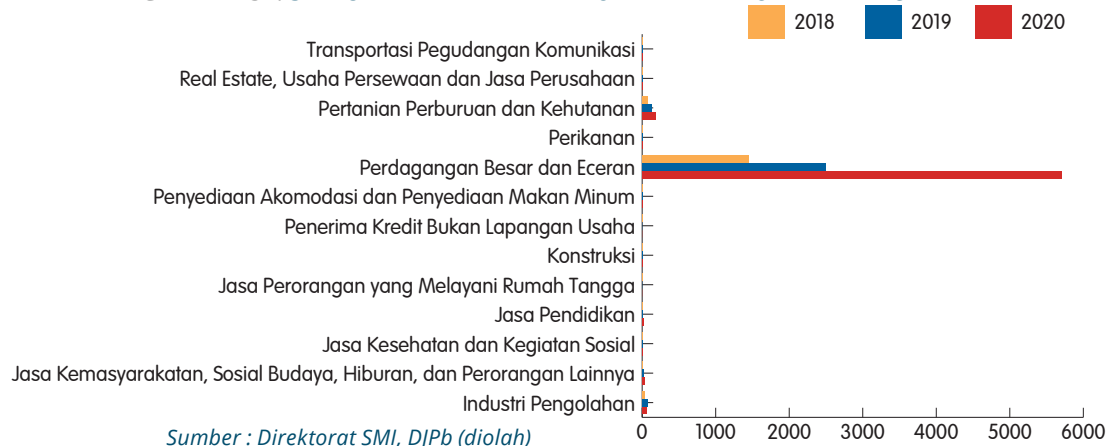
Dalam tiga tahun terakhir, penyaluran UMi mengalami kenaikan baik dari sisi debitur maupun

TABEL 40. KINERJA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT PER REGIONAL TAHUN 2018 – 2020

Regional	2018		2019		2020	
	DEBITUR	PENYALURAN	DEBITUR	PENYALURAN	DEBITUR	PENYALURAN
SUMATERA	55.701	163,77	90.327	352,16	81.577	358,94
JAWA	472.550	1.295,91	672.951	2.188,20	1.568.082	5.147,43
BALI NUSRA	10.858	38,01	18.894	71,45	33.202	149,06
KALIMANTAN	4.976	21,14	8.431	31,96	26.729	116,64
SULAWESI	12.158	41,96	16.972	66,34	50.249	211,55
MALUKU PAPUA	869	3,49	2.351	9,82	6.135	29,73
TOTAL	557.112	1.564,29	809.926	2.719,93	1.765.974	6.013,34

Sumber : Direktorat SMI, DJPb, diolah

GAMBAR 54. SEKTOR PENERIMA PENYALURAN KREDIT ULTRA MIKRO



Sumber : Direktorat SMI, DJPb (diolah)

dari sisi nominal penyaluran. Kenaikan debitur di 2020 mencapai 216,9 persen jika dibandingkan tahun 2018. Hal senada juga terjadi pada nominal penyaluran yang naik sebesar hampir 300 persen.

b. Jangkauan layanan meluas (regional dan sektoral).

Selama kurun waktu 3 tahun, penyaluran UMi semakin luas menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini terbukti dengan meningkatnya penyaluran di luar pulau Jawa. Bahkan di Tahun 2020, regional Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku – Papua mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat.

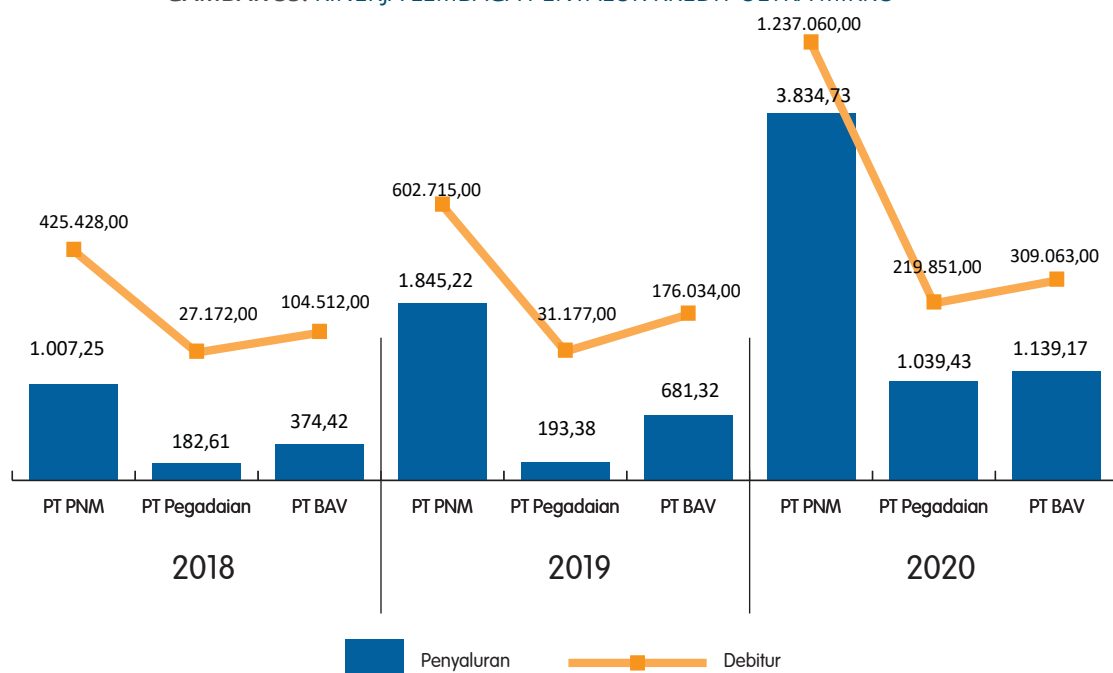
Selain itu serta sektor yang dilayani semakin

beragam mencapai 13 sektor meskipun sebagian besar didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 95 persen. Sektor-sektor tersebut yaitu: (1) Industri Pengolahan, (2) Jasa Kemasyarakatan, Sosial budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya, (3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (4) Jasa Pendidikan, (5) Jasa Perorangan yang Melayani RT, (6) Konstruksi, (7) Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha, (8) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, (9) Perdagangan Besar dan Eceran, (10) Perikanan, (11) Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, (12) Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan (13) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.

c. Perguliran dana berjalan optimal.

Optimalisasi penyaluran UMi dapat terlihat dari

GAMBAR 55. KINERJA LEMBAGA PENYALUR KREDIT ULTRA MIKRO



Sumber : Direktorat SMI, DJPb (diolah)

TABEL 41. KOMPOSISI POLA PENYALURAN KREDIT ULTRA MIKRO

AKAD	%
KONVENSIONAL	80%
SYARIAH	20%

Sumber : PIP, DJPb, diolah

optimalnya kinerja lembaga penyalur. Selama ini terdapat 3 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu: (1) Kreasi UMi (PT Pegadaian), (2) Mekaar (PT Permodalan Nasional Madani), dan (3) Koperasi (PT Bahana Artha Ventura). Di antara ketiga lembaga tersebut, PT PNM menjadi lembaga penyalur terbaik baik dari segi jumlah debitur maupun dari nominal penyaluran. Di Tahun 2020 PT PNM memiliki 1,2 juta debitur dengan nilai penyaluran Rp3,8 triliun.

d. Penyediaan alternatif pembiayaan syariah.

Pembiayaan mikro syariah menjadi perhatian pemerintah. Terlebih saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Sampai dengan tahun 2020, perbandingan pola penyaluran syariah mencapai 20% atau seperlima dari total akad penyalurannya.



BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018-2020

Kinerja konsolidasi APBD secara nasional di tahun 2020 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami penurunan. Konsolidasi realisasi pendapatan APBD secara nasional (gabungan) adalah sebesar Rp1.053,39 triliun atau turun sebesar Rp110,49 triliun (terkontraksi sebesar 9,49 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih rinci lagi, pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer (TKDD) masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp27,9 triliun dan Rp64,85 triliun. Sementara itu dari sisi belanja daerah, terjadi penurunan belanja yakni dari Rp1.136,02 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1.038,67 triliun di tahun 2020 atau turun sebesar 8,57 persen.

Selaras dengan APBN, APBD tahun 2020 difokuskan terhadap pelaksanaan program PC-PEN, tetapi secara khusus untuk PC-PEN Pemerintah Daerah. Program PC-PEN APBD tersebut direfleksikan oleh kenaikan tajam pada pos belanja tidak terduga pada konsolidasi APBD nasional. Namun demikian, secara keseluruhan postur APBD dirasa masih belum ideal. APBD tahun 2020 masih didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai proporsi 35,36 persen atau sekitar Rp367,27 triliun, sedangkan proporsi belanja barang dan modal masing-masing Rp264,72 triliun (25,49 persen) dan Rp151,50 triliun (14,59 persen). Idealnya proporsi alokasi dan serapan belanja modal yang bersumber dari APBD hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih besar atau cenderung mendekati kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang, sehingga belanja yang bersifat investasi dapat memberikan stimulus yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

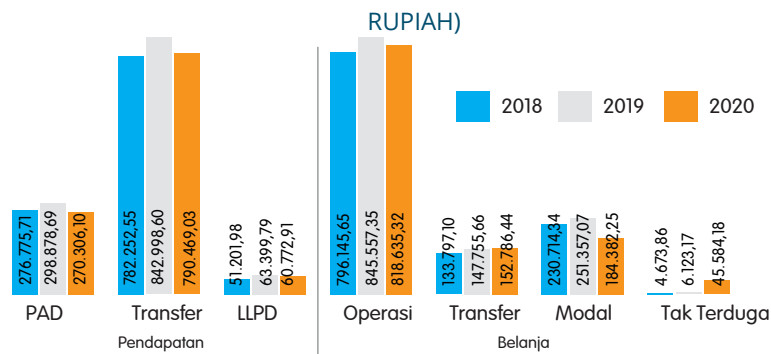
Secara keseluruhan, pendapatan daerah lebih besar daripada realisasi belanjanya, maka secara konsolidasi APBD dihasilkan angka surplus anggaran sebesar Rp14,73 triliun, ditambah dengan pembiayaan neto yang telah direalisasikan sebesar Rp93,06 triliun, maka SiLPA Daerah di tahun 2020 mencapai Rp107,79 triliun.

1. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA APBD

Integrasi kebijakan fiskal pusat dan daerah tidak dapat terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi dilakukan melalui pembagian kewenangan pendanaan dalam mencapai berbagai target pembangunan termasuk prioritas nasional. Kebijakan fiskal yang baik dapat mengintegrasikan instrumen fiskal pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih. Di dalam APBD terdapat komponen pendapatan transfer yang merupakan wujud nyata desentralisasi dan integrasi fiskal. Pendapatan transfer diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat (terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus), Transfer Pemda Lainnya, serta Transfer Bantuan Keuangan.

Di daerah, APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Disamping itu, APBD juga merupakan salah satu pendorong bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. APBD menjadi alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

GAMBAR 56. PERKEMBANGAN NILAI ALOKASI/PAGU APBD SECARA NASIONAL TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

Pada Tahun 2020 terdapat dua kondisi yang sangat mewarnai dan mempengaruhi pengelolaan fiskal daerah, yaitu (i) kejadian pandemi COVID-19 serta (ii) pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Pengaruh kedua kondisi tersebut terhadap pengelolaan fiskal tercermin dari sisi perubahan alokasi dan realisasi APBD di Tahun 2020.

Secara nasional, setelah mengalami kenaikan di Tahun 2019, dari target alokasi/pagu APBD terjadi penurunan pada tahun 2020. Pada sisi target pendapatan, terjadi penurunan agregat APBD sebesar Rp.83,729.05 Miliar atau sebesar 6.95 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pada sisi alokasi/pagu belanja, terjadi penurunan agregat APBD sebesar Rp.49,405.05 Miliar atau sebesar 3.95 persen dibanding tahun sebelumnya. Bila diuraikan secara detail, terlihat bahwa penurunan terjadi karena berkurangnya target untuk PAD dan Transfer pada sisi Pendapatan Daerah serta berkurangnya alokasi/pagu untuk belanja operasi dan modal yang belum mampu dikompensasi oleh kenaikan alokasi/pagu untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga pada sisi Belanja Daerah.

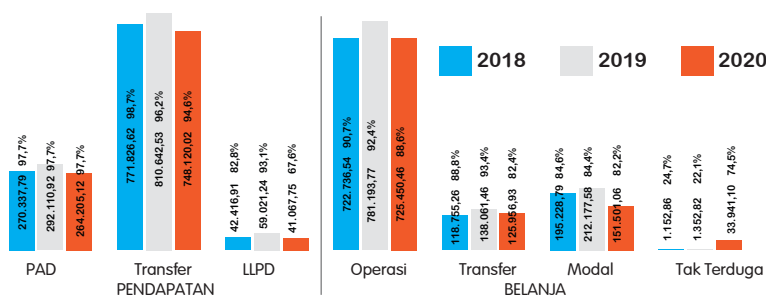
Dari sisi realisasinya, tren penurunan juga terjadi,

baik dari perkembangan nilai nominal maupun persentase pada komponen pendapatan dan komponen belanja. Pada sisi pendapatan, terjadi penurunan agregat realisasi APBD sebesar Rp.108,381.80 Miliar atau sebesar 9.33 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pada sisi belanja, terjadi penurunan agregat realisasi APBD sebesar Rp.95,936.08 Miliar atau sebesar 8.47 persen dibanding tahun sebelumnya. Bila diuraikan secara detail, terlihat bahwa penurunan terjadi karena berkurangnya realisasi pada seluruh komponen Pendapatan Daerah (PAD, Transfer, dan LLPD) serta berkurangnya realisasi untuk belanja operasi, transfer dan modal pada sisi Belanja Daerah. Penurunan realisasi APBD secara nasional yang menurun mengindikasikan efektivitas penyerapan APBD tahun sebelumnya lebih baik dibandingkan tahun anggaran berjalan.

1.I. PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

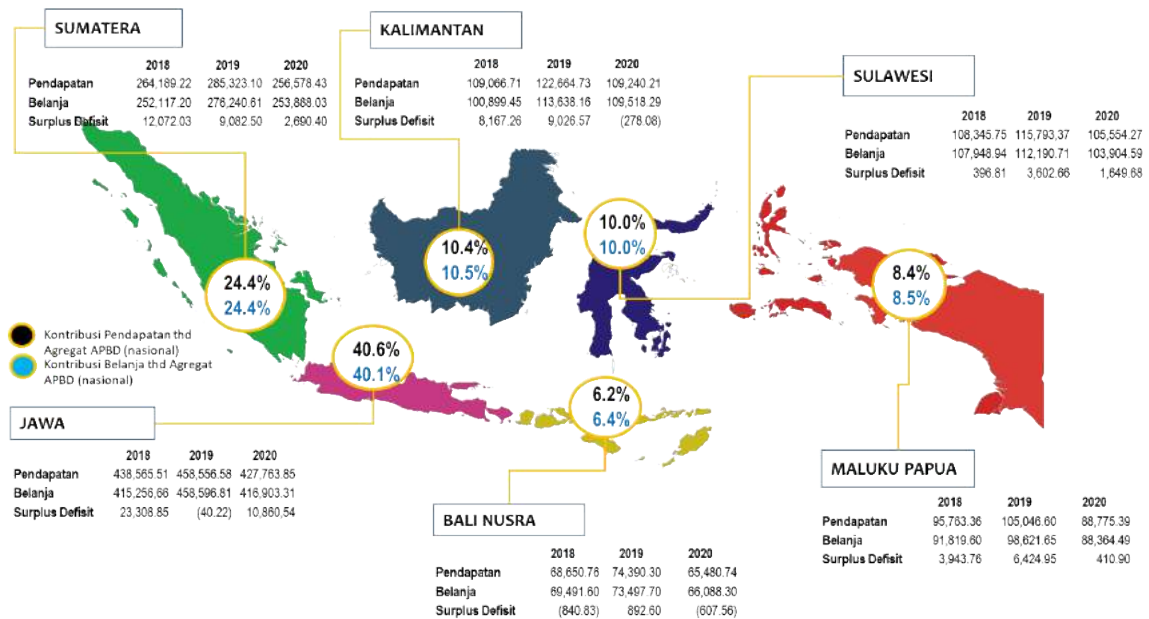
Pendapatan Daerah 2020 secara akumulatif nasional mencapai Rp1,053.39 triliun atau 93.9 persen dari target pendapatan daerahnya. Penerimaan terbesar diperoleh dari Pendapatan Transfer dengan kontribusi terhadap Pendapatan

GAMBAR 57. PERKEMBANGAN NILAI ALOKASI/PAGU APBD SECARA NASIONAL TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 58. PERKEMBANGAN NILAI ALOKASI/PAGU APBD SECARA NASIONAL TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)



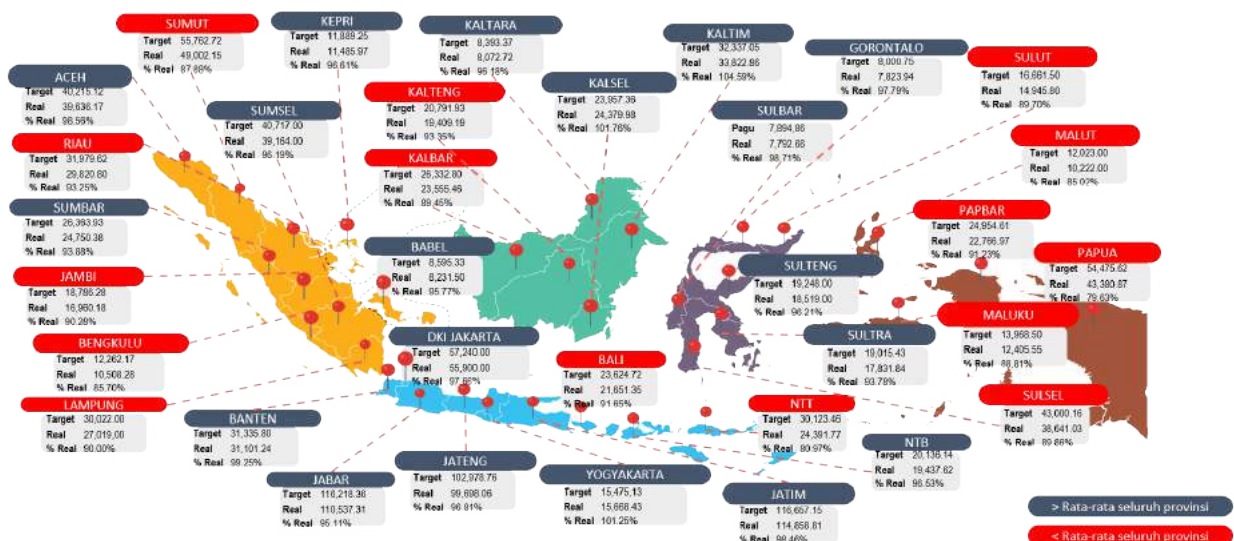
Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

Daerah mencapai 71.02 persen, sedangkan PAD berkontribusi sebesar 25.08 persen, sisanya 3.09 persen oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun tidak terdapat perubahan pada peringkat kontributor pendapatan daerah, namun pada tahun 2020 terjadi sedikit perubahan pada besaran komposisi kontribusi setiap jenis pendapatan. Pada tahun 2020, dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi PAD dan LLPD yang Sah mengalami sedikit penurunan, masing-masing sebesar 0.06 persen untuk PAD dan 0.67 persen

untuk LLPD yang Sah. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Transfer mengalami sedikit kenaikan sebesar 0.74 persen dibandingkan tahun 2019.

Bila dilihat dari pendekatan regional, distribusi pendapatan APBD antar kawasan/regional di tahun 2020 belum menunjukkan perubahan di bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Regional Jawa masih menjadi regional dengan nilai pendapatan APBD terbesar dengan kontribusi 40.6 persen terhadap nilai kumulatif pendapatan

GAMBAR 59. PERKEMBANGAN NILAI ALOKASI/PAGU APBD SECARA NASIONAL TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

APBD secara nasional, disusul oleh Sumatera (24.4 persen), Kalimantan (10.4 persen), Sulawesi (10.0 persen), Maluku – Papua (8.4 persen), dan Bali – Nusa (6.2 persen). Dominasi regional Jawa tersebut tidak terlepas dengan posisi strategis pula Jawa sebagai pusat perekonomian, perdagangan dan pemerintahan, serta titik konsentrasi populasi di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 56.10 persen dari seluruh penduduk tinggal di regional Jawa ini.

Dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 di Tahun 2020, realisasi pendapatan APBD menunjukkan penurunan. Pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan aktivitas perekonomian, serta perubahan kebijakan dan transfer memberi dampak dan pengaruh yang sama terhadap pendapatan APBD di seluruh regional. Secara rata-rata, seluruh regional mengalami penurunan sebesar 10.7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bila ditelaah, maka secara persentase, penurunan pendapatan APBD terbesar terjadi di regional Maluku – Papua dengan penurunan sebesar 15.5 persen, sementara penurunan APBD terkecil dialami oleh regional Jawa yang mengalami penurunan sebesar 6.7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun mengalami penurunan, namun apabila dilihat dari kinerja realisasi atau efektivitas pendapatannya, maka masih dapat dikatakan bahwa kinerja pendapatan APBD tahun 2020 cukup efektif. Apabila secara akumulatif di tingkat nasional, realisasi pendapatan APBD mampu mencapai level 93.93 persen, maka secara lebih detail diperoleh rata-rata persentase realisasi pendapatan APBD pada seluruh provinsi yang kurang lebih sama, yaitu sebesar 93.58%. Berdasarkan hasil analisis terhadap data pendapatan APBD Tahun 2020, ditemukan beberapa hal menarik, yaitu: (i) Terdapat 3 Provinsi yang mampu memperoleh realisasi pendapatan APBD melebihi target yang ditetapkan, yaitu: DIY, Kalsel dan Kaltim; (ii) Terdapat 15 provinsi yang persentase realisasi pendapatan APBD-nya berada di bawah rata-rata persentase realisasi APBD Tahun 2020, (iii) seluruh provinsi di regional Jawa memiliki persentase realisasi di atas rata-rata provinsi, sementara itu seluruh provinsi di regional Maluku-Papua justru mengalami hal yang sebaliknya.

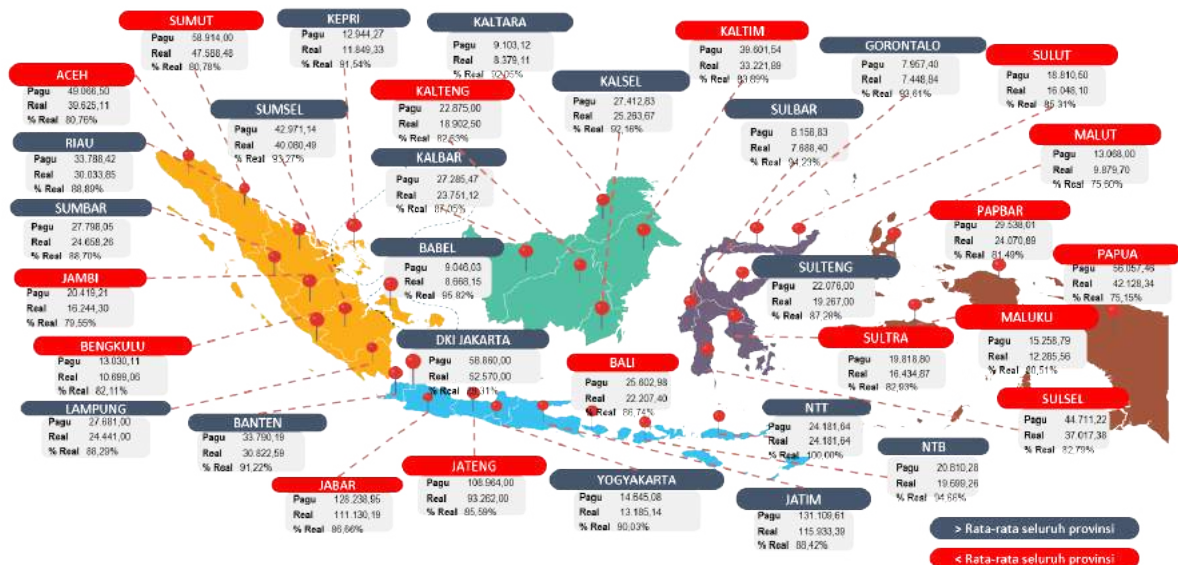
1.II. PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah 2020 secara akumulatif nasional mencapai Rp1,038.67 triliun atau 86.30 persen dari target belanja daerahnya. Dari sisi komposisinya, 75.43 persen belanja digunakan untuk tiga belanja utama yaitu belanja pegawai (35.36 persen), belanja barang (25.49 persen), dan belanja modal (14.59 persen). Selebihnya, sebesar 24.57 persen digunakan untuk belanja lainnya, seperti belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja transfer, serta belanja tidak terduga.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh jenis belanja pada APBD di Tahun 2020 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif, baik dari sisi nominal maupun persentase realisasinya sebagai dampak pandemi COVID-19. Pengecualian terjadi pada jenis belanja tidak terduga yang justru naik signifikan dari sisi nominal, yaitu mencapai Rp.32,588.28 Miliar atau tumbuh hampir 25 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya karena digunakan untuk keperluan penanganan dan penanggulangan COVID-19. Secara akumulatif di tingkat nasional, penurunan nominal terbesar pada tahun 2020 dialami oleh kelompok belanja utama dengan rincian: belanja modal turun Rp.60,676.52 Miliar atau 28.60 persen dibanding tahun sebelumnya, belanja barang turun Rp.37,486.06 Miliar atau 12.40 persen dibanding tahun sebelumnya, serta belanja pegawai turun Rp.17,100.33 Miliar atau 4.45 persen dibanding tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari pendekatan regional, distribusi belanja APBD antar kawasan/regional di tahun 2020 belum menunjukkan perubahan di bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Regional Jawa masih menjadi regional dengan nilai belanja APBD terbesar dengan kontribusi 40.1 persen terhadap nilai kumulatif belanja APBD secara nasional, disusul oleh Sumatera (24.4 persen), Kalimantan (10.5 persen), Sulawesi (10.0 persen), Maluku- –Papua (8.5 persen), dan Bali–Nusa (6.4 persen). Sama halnya seperti di sisi pendapatan, dominasi regional Jawa tersebut tidak terlepas dengan posisi strategis pula Jawa sebagai pusat perekonomian, perdagangan dan pemerintahan, serta titik konsentrasi populasi di Indonesia.

GAMBAR 60. PETA DISTRIBUSI BELANJA APBD PER PROVINSI TAHUN 2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

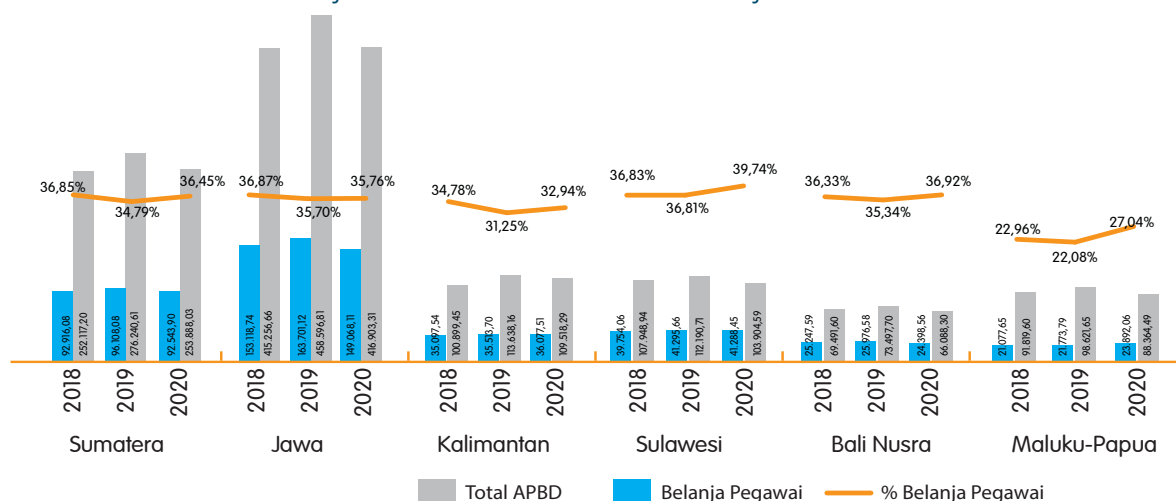
Dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 di Tahun 2020, realisasi belanja APBD menunjukkan penurunan. Secara rata-rata, seluruh regional mengalami penurunan sebesar 8,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bila ditelaah, maka secara persentase, penurunan belanja APBD terbesar terjadi di regional Maluku – Papua dengan penurunan sebesar 10,4 persen, sementara penurunan APBD terkecil dialami oleh regional Kalimantan yang mengalami penurunan sebesar 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan atau akumulatif di tingkat nasional, kinerja realisasi belanja APBD yang hanya mencapai 86,30% dan dinilai tidak cukup optimal/efektif. Demikian pula bila dirinci ke level provinsi, secara rata-rata diperoleh persentase realisasi pendapatan APBD pada seluruh provinsi sebesar 87,03%. Berdasarkan hasil analisis terhadap data belanja APBD Tahun 2020, ditemukan dua hal menarik, yaitu: (i) secara regional, realisasi belanja APBD tertinggi dicapai oleh regional Bali-Nusra dengan capaian sebesar 93,62 persen, sementara realisasi belanja APBD terendah dicapai oleh regional Maluku – Papua dengan capaian sebesar 75,50 persen; (ii) secara provinsi, terdapat 18 provinsi yang persentase realisasi belanja APBD-nya berada di atas rata-rata persentase realisasi APBD Tahun 2020, sisanya, 16 Provinsi berada di bawah rata-rata; (iii) seluruh provinsi di regional Maluku – Papua memiliki persentase realisasi belanja di bawah rata-rata provinsi.

Dari sisi efisiensi belanja, dinilai bahwa secara umum APBD belum mampu dibelanjakan oleh pemerintah daerah secara efisien. Efisiensi Belanja pada APBD tidak dilihat dari besarnya level penyerapan APBD, melainkan dilihat dari sejauh mana Pemda mampu menentukan prioritas. Salah satu indikator Pemda mampu menyusun prioritas belanja adalah rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja APBD. Menuju kondisi ideal, maka proporsi Belanja Pegawai pada APBD diharapkan semakin menurun seiring dengan peningkatan Belanja secara keseluruhan.

Pada tahun 2020, Rasio Belanja Pegawai masih berkisar pada angka 35,36 persen. Hal ini menunjukkan belum ada perbaikan bahkan cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, karena Pemda hanya mengalokasikan sebagian kecil APBD-nya untuk program-program prioritas yang bersinergi dengan Program Prioritas Nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Meskipun didominasi belanja pegawai, namun tidak ada kawasan yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 50 persen. Kawasan Maluku-Papua merupakan kawasan dengan rasio belanja pegawai terkecil dan satu-satunya di bawah rasio 30 persen, hanya 27,04 persen atau naik di tahun 2019. Namun demikian, di sisi lain, regional Maluku – Papua justru menjadi wilayah dengan tingkat kenaikan rasio terbesar di tahun 2020, yaitu sebesar 4,96% poin persentase

GAMBAR 61. KONTRIBUSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PER REGIONAL TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

atau 2 kali lipat di bandingkan rata-rata kenaikan di provinsi lainnya. Kondisi ini secara implisit memberi sinyal bahaya dan perlu menjadi perhatian serius. Idealnya, anggaran belanja pegawai yang lebih/semakin kecil dalam APBD, akan lebih memberikan ruang fiskal dan fleksibilitas untuk penggunaan anggaran dalam membiayai banyak program dan kegiatan non-belanja pegawai yang lebih produktif dan efektif mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama belanja modal.

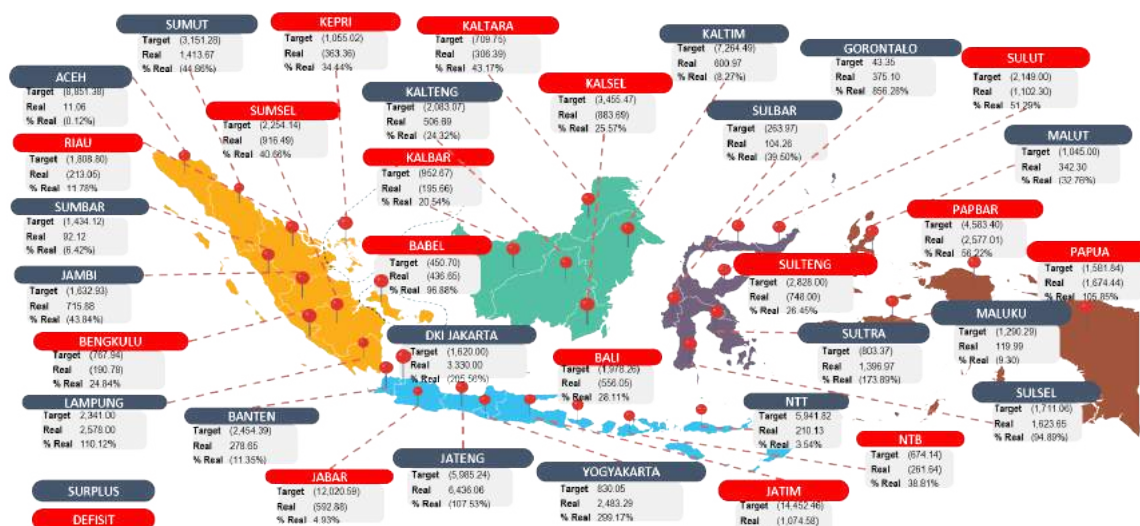
1.III. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT APBD

Pada tahun 2020, secara kumulatif terjadi surplus APBD hingga mencapai Rp14,725.88 Miliar, turun 49.20 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena penurunan realisasi pendapatan dan belanja daerah secara bersamaan, namun dengan tingkat penurunan yang lebih tajam

pada sisi pendapatannya. Dalam alokasi APBD secara kumulatif, sebenarnya diperkirakan terjadi defisit yang mengindikasikan bahwa Pemda melakukan kebijakan fiskal ekspansi untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Namun demikian, dalam realisasi APBD terjadi surplus yang diakibatkan oleh penyerapan belanja yang masih belum optimal dan masih di bawah realisasi pendapatan meskipun belum mencapai target pendapatannya.

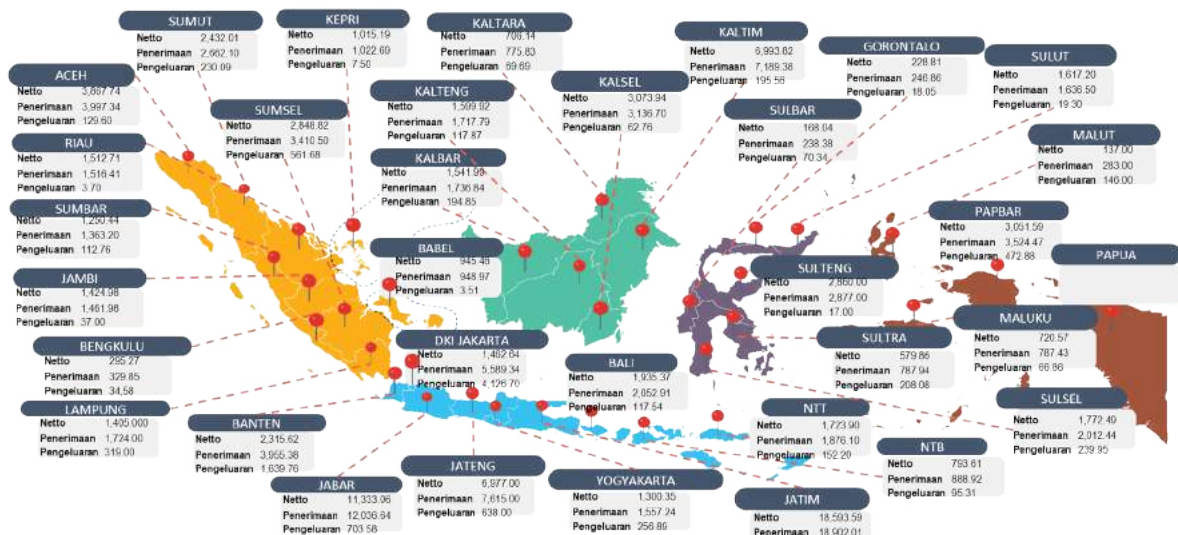
Tidak seperti kondisi kumulatif di tingkat nasional yang menunjukkan surplus APBD, pada beberapa wilayah secara regional maupun provinsi justru ditemukan kondisi yang sebaliknya. Dari pendekatan regional, terdapat dua regional yang mengalami defisit APBD, yaitu regional Kalimantan dan regional Bali-Nusra. Sementara itu, dari pendekatan provinsi, terdapat 16 provinsi yang mengalami Defisit APBD. Nominal Defisit APBD yang besar ditemui pada Provinsi Papua Barat,

GAMBAR 62. KONTRIBUSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PER REGIONAL TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2020, diolah

GAMBAR 63. KONTRIBUSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PER REGIONAL TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2020, diolah

Papua, Sulut, dan Jatim. Nilai defisit dari wilayah-wilayah tersebut tidak banyak mempengaruhi kondisi kumulatif di tingkat nasional karena bisa dikompensasi oleh kondisi surplus pada 18 provinsi lainnya, terutama karena kontribusi dari beberapa provinsi yang memiliki nilai Nominal Surplus APBD yang sangat besar seperti: Provinsi Jateng, DKI, Lampung, DIY, Sulsel, dan Sumut.

1.IV. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dari sisi pembiayaan daerah, pada tahun 2020 terjadi peningkatan pembiayaan netto sebesar Rp11,686.98 milyar atau 0.14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena terdapat kenaikan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.5,930.26 Milyar, sementara sisi pengeluaran pembiayaan justru mengalami penurunan sebesar Rp.5,756.72 Milyar. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah kapasitas fiskal daerah. Dengan kondisi Surplus sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka peningkatan pembiayaan netto mengakibatkan bertambahnya jumlah SILPA menjadi sebesar Rp107,789.33 Milyar. Terhadap nilai SILPA yang sangat tinggi tersebut, pemerintah daerah perlu memahami bahwa SiLPA tersebut tidak sepenuhnya merupakan dana idle. Pemda dapat memanfaatkan SILPA untuk menutup defisit APBD dan/atau untuk pengeluaran pembiayaan (investasi dan dana cadangan).

Dari pendekatan regional, terlihat bahwa seluruh regional memiliki pola pembiayaan yang sama,

yaitu dengan ketimpangan yang sangat tinggi antara nilai penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Sebagian besar penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari kontribusi SILPA tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian, bila dilihat secara lebih detail per provinsi, terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat rasio antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang cukup berimbang, diantara pada provinsi Riau, Jambi, dan DKI Jakarta.

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD REGIONAL

2.1. REGIONAL SUMATERA

Pada regional Sumatera, setelah secara agregat nilai target pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2019, nilai target pendapatan mengalami penurunan sebesar 7,26 persen pada tahun 2020 yaitu dari Rp298.233,09 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp276.593,42 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer. Penurunan target pendapatan berdampak pada penurunan total alokasi belanja APBD pemerintah daerah pada regional Sumatera yaitu sebesar 3,78 persen dari Rp307.259,06 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp295.658,73 miliar pada tahun 2020. Penurunan pagu belanja tersebut terjadi secara signifikan pada alokasi belanja pegawai dan belanja barang

TABEL 42. PENDAPATAN NEGARA REGIONAL KALIMANTAN 2018 – 2020

URAIAN	2018			2019			2020		
	Realisasi	Growth	%	Realisasi	Growth	%	Realisasi	Growth	%
Pendapatan	73.215,50	264.189,22	96,70%	298.233,09	285.323,10	95,67%	276.593,42	256.578,43	92,76%
PAD	50.959,50	45.405,02	89,10%	52.877,40	47.890,94	90,57%	50.384,94	44.576,28	88,47%
Pendapatan Transfer	211.759,10	207.268,48	97,88%	230.447,27	221.848,20	96,27%	209.833,26	200.125,87	95,37%
LLPD yang sah	10.496,90	11.515,72	109,71%	14.908,42	15.583,96	104,53%	16.375,22	11.876,28	72,53%
Belanja	278.932,47	252.117,20	90,39%	307.259,06	276.240,61	89,90%	295.658,73	253.888,03	85,87%
Belanja Pegawai	100.395,16	92.916,08	92,55%	107.111,94	96.108,08	89,73%	103.094,45	92.543,90	89,77%
Belanja Barang	73.567,90	64.505,22	87,68%	81.007,84	73.350,44	90,55%	73.124,01	61.521,36	84,13%
Belanja Bunga	168,67	61,93	36,72%	174,90	126,74	72,46%	137,90	106,23	77,03%
Belanja Subsidi	90,05	105,08	116,70%	204,49	132,48	64,79%	145,08	143,47	98,89%
Belanja Hibah	14.873,64	15.204,40	102,22%	14.017,65	14.727,50	105,06%	17.249,81	16.864,77	97,77%
Belanja Bantuan Sosial	1.683,07	1.513,57	89,93%	1.430,59	1.124,24	78,59%	758,94	1.066,31	140,50%
Belanja Bagi Hasil	8.656,00	6.778,51	78,31%	13.352,36	13.259,79	99,31%	17.335,69	16.524,98	95,32%
Belanja Bantuan Keuangan	21.812,28	22.113,68	101,38%	24.336,57	21.470,50	88,22%	26.604,38	18.779,09	70,59%
Belanja Modal	56.996,29	48.695,28	85,44%	64.804,21	55.691,76	85,94%	49.062,21	40.216,67	81,97%
Belanja Tidak Terduga	689,42	223,44	32,41%	818,51	249,08	30,43%	8.146,26	6.121,25	75,14%
Surplus/Defisit	(5.716,97)	12.072,03	-211,16%	(9.025,96)	9.082,50	-100,63%	(19.065,31)	2.690,40	-14,11%
Pembiayaan	14.847,29	12.575,39	84,70%	17.149,79	15.907,06	92,75%	16.026,55	16.997,62	106,06%
Penerimaan	17.124,64	14.142,77	82,59%	19.122,92	17.356,08	90,76%	17.789,72	18.437,04	103,64%
Pengeluaran	2.277,35	1.567,38	68,82%	1.973,13	1.449,02	73,44%	1.763,17	1.439,42	81,64%
Pembiayaan Netto	14.847,29	12.575,39	84,70%	17.149,79	15.907,06	92,75%	16.026,55	16.997,62	106,06%
SILPA	9.130,31	24.647,42	269,95%	8.123,83	24.989,56	307,61%	(3.038,76)	19.688,02	-647,90%

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

sebagai dampak kebijakan refocussing belanja negara untuk menangani Pandemi COVID-19. Di tengah wabah ini tentu saja belanja APBD yang berkualitas diharapkan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

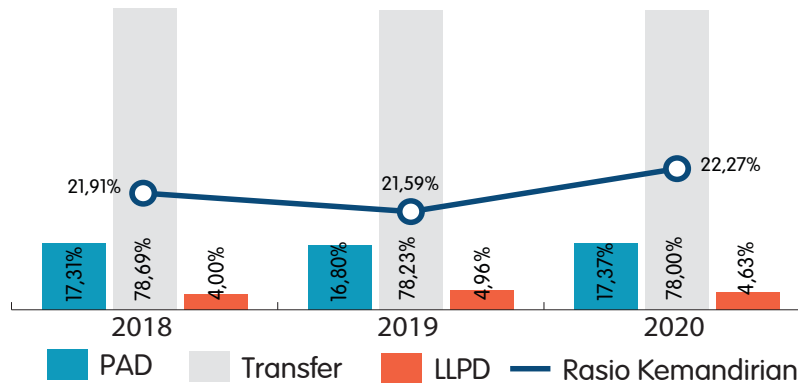
2.I.0.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL SUMATERA

Realisasi pendapatan APBD regional Sumatera pada tahun 2020 sebesar Rp256.578,43 miliar atau turun 10,07 persen dari tahun 2019. Penurunan terjadi pada PAD sebesar 6,92 persen atau menjadi sebesar Rp44.576,28 miliar di tahun 2020. Secara kumulatif semua komponen pendapatan dalam APBD regional mengalami penurunan. Selain PAD, komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turut mengalami penurunan berturut-turut sebesar 9,79 persen dan 23,79 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada besaran persentase realisasi pendapatan. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan turun 2,91 persen. Penurunan ini terjadi pada seluruh komponen pendapatan.

Berdasarkan tingkat kontribusi pada sisi pendapatan, realisasi pendapatan pada tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 77,99 persen dari total pendapatan, sedangkan realisasi PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 17,37 persen (Rp44.576,28 miliar) disusul oleh pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,63 persen (Rp11.876,28 miliar). Dengan masih tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mengindikasikan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di regional Sumatera terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Dari sisi kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer tidak menunjukkan perubahan atau bahkan perbaikan, karena nilainya yang cenderung dalam kisaran yang sama sepanjang tahun 2018-2020. Rasio kemandirian keuangan daerah regional Sumatera pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 22,27 persen setelah sempat turun pada tahun sebelumnya (21,59 persen).

Pada regional Sumatera, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan menjadi provinsi yang

GAMBAR 64. PROPORSI PENDAPATAN DAERAH DAN RASIO KEMANDIRIAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

dominan dengan besarnya pendapatan daerah. Pada Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat pendapatan tertinggi yaitu Rp49.002,15 miliar atau 19,10 persen dari total pendapatan pada regional Sumatera. Besarnya pendapatan tersebut sebagian besar (>70 persen) berupa pendapatan transfer. Besarnya pendapatan transfer tidak hanya pada Provinsi Sumatera Utara tetapi juga seluruh provinsi pada regional Sumatera, yang memiliki kecenderungan persentase komponen pendapatan daerah yang relatif sama.

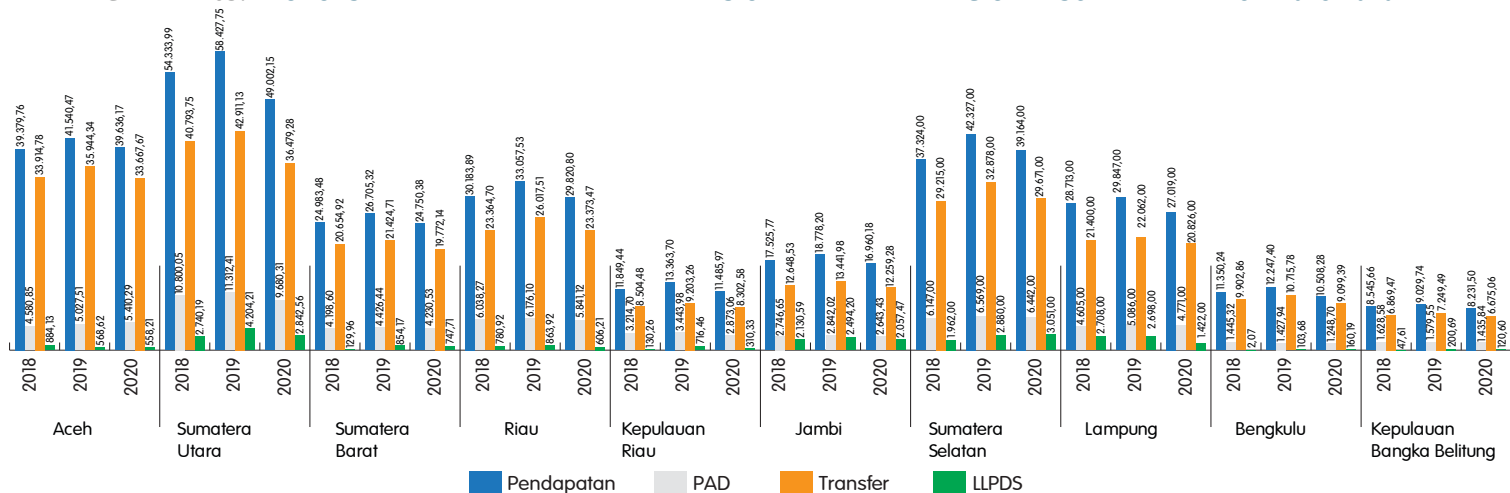
Secara umum, pada tahun 2020, seluruh komponen pendapatan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Hal itu juga terjadi pada rasio efektivitas pendapatan daerahnya. Pada regional Sumatera terjadi tren penurunan tingkat efektivitas pendapatannya dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Hanya Provinsi Sumatera Barat dan Aceh yang mempunyai tren peningkatan tingkat

efektivitas pendapatannya.

2.I.A. 2.I.A. PERKEMBANGAN BELANJA REGIONAL SUMATERA

Pemerintah daerah pada regional Sumatera tahun 2020 dapat merealisasikan belanja sejumlah Rp253.888,03 miliar atau mengalami penurunan 8,09 persen dari tahun sebelumnya. Komponen belanja yang mengalami penurunan yang Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil. Penurunan nilai terbesar dialami oleh belanja barang dengan realisasi sebesar Rp61.521,36 miliar dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp73.350,44 miliar. Demikian juga terjadi penurunan persentase realisasinya, dari 90,55 persen pada tahun 2019 menjadi 84,13 persen pada tahun 2020. Sementara komponen Belanja yang mengalami kenaikan signifikan adalah realisasi Belanja Tidak Terduga

GAMBAR 65. PROPORSI PENDAPATAN DAERAH DAN RASIO KEMANDIRIAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

TABEL 43. REALISASI DAN RASIO PERJENIS BELANJA BELANJA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018		2019		2020	
	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
1. Belanja Pegawai	92.916,08	36,85%	96.108,08	34,79%	92.543,90	36,45%
2. Belanja Barang	64.505,22	25,59%	73.350,44	26,55%	61.521,36	24,23%
3. Belanja Bunga	61,93	0,02%	126,74	0,05%	106,23	0,04%
4. Belanja Subsidi	105,08	0,04%	132,48	0,05%	143,47	0,06%
5. Belanja Hibah	15.204,40	6,03%	14.727,50	5,33%	16.864,77	6,64%
6. Belanja Bantuan Sosial	1.513,57	0,60%	1.124,24	0,41%	1.066,31	0,42%
7. Belanja Bagi Hasil	6.778,51	2,69%	13.259,79	4,80%	16.524,98	6,51%
8. Belanja Bantuan Keuangan	22.113,68	8,77%	21.470,50	7,77%	18.779,09	7,40%
9. Belanja Modal	48.695,28	19,31%	55.691,76	20,16%	40.216,67	15,84%
10. Belanja Tidak Terduga	223,44	0,09%	249,08	0,09%	8.146,26	3,21%
Total Belanja	252.117,20		276.240,61		253.888,03	

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

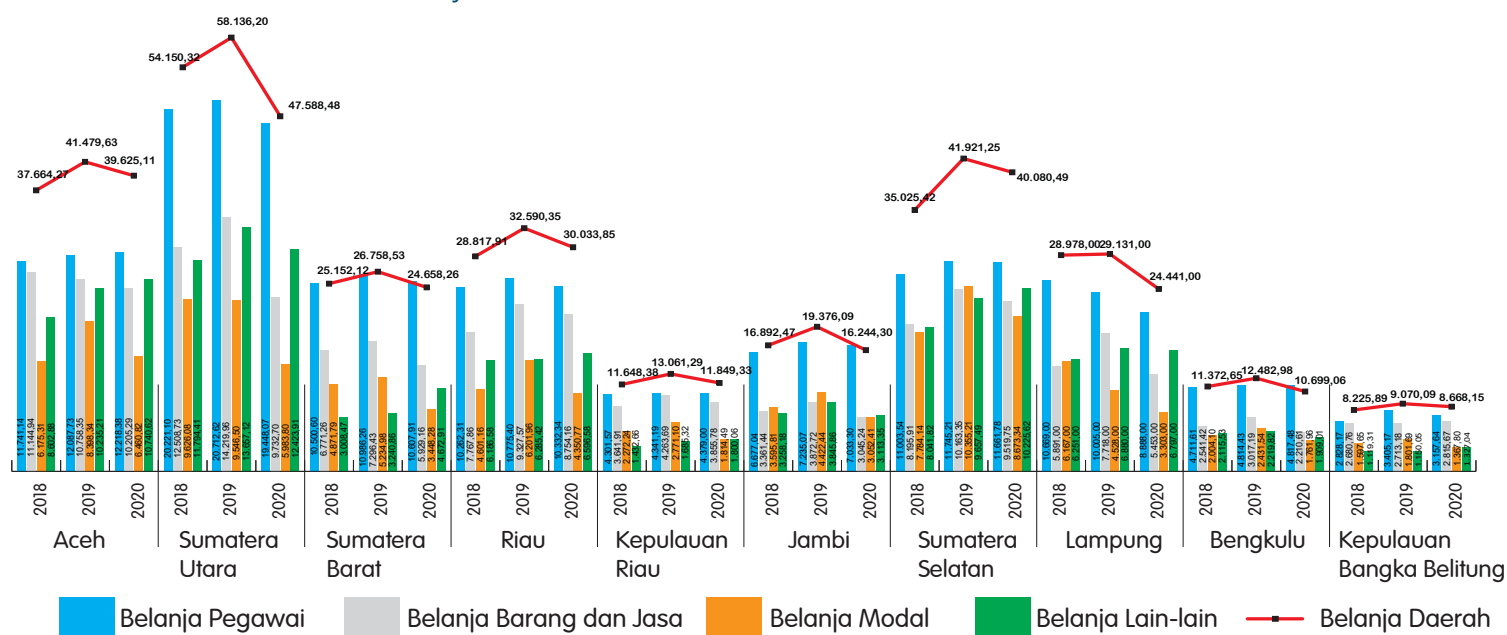
dari Rp249,08 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp6,121 triliun pada tahun 2020. Dengan telah ditetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19 sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka meningkat juga penggunaan mata anggaran Belanja Tak terduga yang terdapat dalam APBD untuk menanggulangi dan menangani wabah pandemi COVID-19.

Rasio realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak banyak berubah dan relatif merata, yaitu sekitar 34 persen-36 persen untuk belanja pegawai; 24 persen-26 persen untuk belanja barang dan jasa.

Sedangkan rasio untuk belanja modal mempunyai rentang yang lebih besar yaitu 15 persen-20 persen dan 18 persen-24 persen untuk belanja lainnya yang didalamnya terdapat belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Khusus belanja tidak terduga mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari 0,09 persen menjadi 3,21 persen. Hal ini selaras dengan penggunaan dana tersebut dalam rangka penanganan COVID-19.

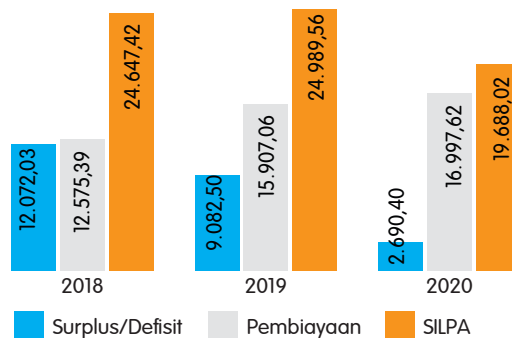
Pada regional Sumatera, setiap provinsi cenderung memiliki tingkat kontribusi dari masing-masing jenis belanja dengan nilai yang berbeda. Namun, tingkat kontribusi terbesar seluruhnya pada belanja

GAMBAR 66. BELANJA DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 67. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

pegawai dengan kontribusi paling tinggi yaitu pada Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan tingkat kontribusi mencapai 40-45 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya fokus pelaksanaan belanja daerah yang lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.

Sedangkan berdasarkan klasifikasi urusan, pada tahun 2020, pemerintah daerah regional Sumatera sangat concern pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pemusatan anggaran pada pelayanan kesehatan sangat wajar mengingat wabah pandemi terjadi hampir di sepanjang tahun 2020.

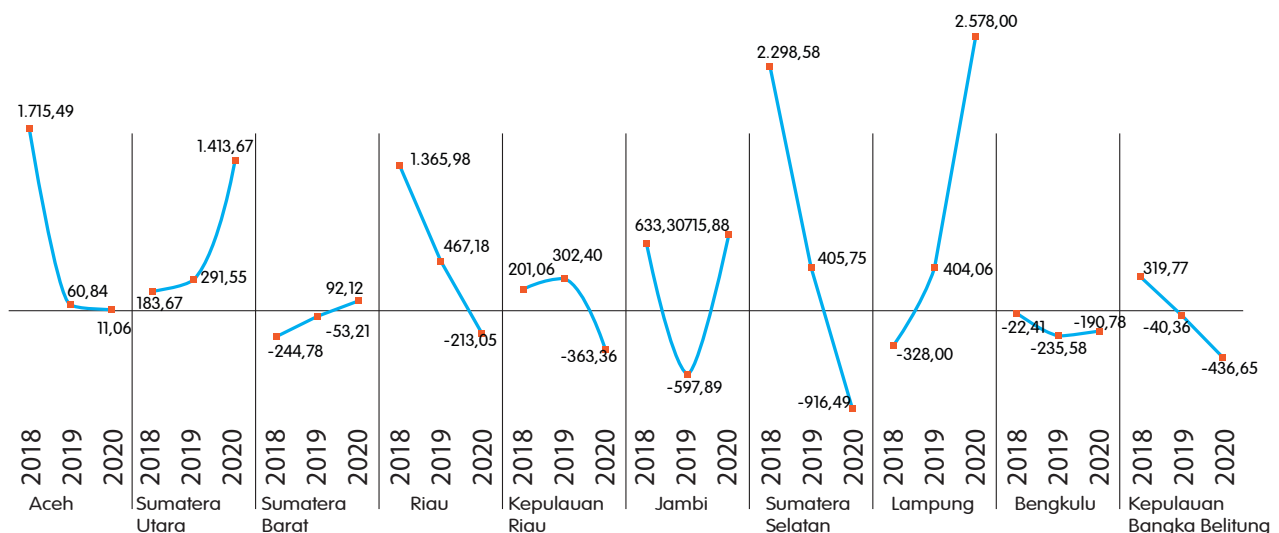
juga dapat berarti negatif karena realisasi belanja yang rendah. Jika dilihat dari sisi belanja, kondisi surplus ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana sehingga membuat tingkat realisasi terhadap pagu yang rendah (85,87 persen). Hal ini cukup disayangkan, karena APBD tahun 2020 diharapkan dapat memaksimalkan belanja daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut. Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab rendahnya belanja tersebut antara lain: pelaksanaan rapat/sosialisasi secara daring meningkatkan efisiensi belanja barang konsumsi dan perjalanan dinas dan penundaan realisasi belanja modal.

2.I.B. 2.I.B. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT REGIONAL SUMATERA

Realisasi APBD regional Sumatera tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp2.690,40 miliar. Angka surplus ini lebih besar dari target dan dapat berarti positif jika dilihat dari persentase terhadap pagu serta perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja, karena target yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp19.065,31 miliar. Namun demikian, kondisi surplus yang besar

Angka surplus APBD pada regional Sumatera sebagian besar dikontribusikan oleh Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara memiliki surplus APBD sebesar Rp1.413,67 miliar. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp291,55 miliar. Namun di sisi lain, pada tahun 2020, provinsi yang mengalami defisit anggaran meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Provinsi Sumatera Selatan mengalami

GAMBAR 68. SURPLUS/DEFISIT APBD PER PROVINSI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

defisit tertinggi pada regional Sumatera sebesar Rp916,49 miliar. Hal ini dikarenakan belum optimalnya realisasi pendapatan terutama pendapatan asli daerah pada provinsi tersebut yang masih dibawah 90% dari target yang ditetapkan.

2.I.C. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL SUMATERA

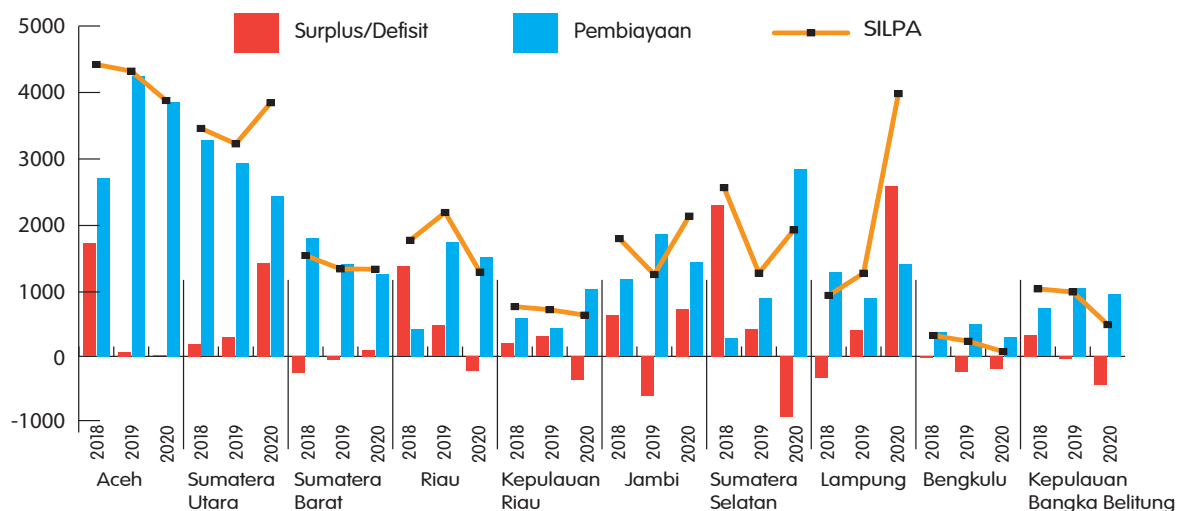
Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan regional Sumatera mencapai Rp16.997,62 miliar terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp18.437,04 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.439,42 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp1.090,56 miliar atau 6,86 persen. Komposisi ini menghasilkan nilai SILPA pada tahun 2020 sebesar Rp19.688,02 miliar. Sebagian besar penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya dan sisanya merupakan pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman daerah. Di sisi pengeluaran, realisasi pembiayaan pada regional Sumatera didominasi oleh pembayaran pokok utang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Nilai pembiayaan netto terbesar pada regional Sumatera dicapai oleh provinsi Aceh sebesar Rp3.867,74 miliar, sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp3.878,80 miliar

atau turun dari tahun sebelumnya.

Nilai SILPA selama tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan, tetapi masih dalam jumlah yang besar. Adanya SILPA yang besar dapat diindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak efektif sehingga APBD kurang berdaya guna bagi masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menelaah kembali pos-pos yang memang benar-benar diperlukan sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Keseimbangan primer mencerminkan indikasi likuiditas tanpa dipengaruhi belanja terkait hutang, semakin besar surplus keseimbangan primer semakin baik kemampuan daerah untuk menutup bunga utang atau melakukan ekspansi fiskal. Selama tiga tahun terakhir, wilayah Sumatera selalu mengalami surplus keseimbangan primer meskipun dengan nilai yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp9.209,23 menjadi Rp2.796,63 pada tahun 2020. Surplus keseimbangan primer dapat menjadi solusi alternatif dalam mendorong perekonomian dimana pemda dapat mengambil kebijakan fiskal ekspansif pada tahun-tahun mendatang.

GAMBAR 69. SURPLUS/DEFISIT APBD PER PROVINSI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

TABEL 44. KESEIMBANGAN PRIMER PADA REGIONAL SUMATERA

Keseimbangan Primer	2018	2019	2020
Pendapatan-Belanja+Belanja Bunga	12.133,95	9.209,23	2.796,63

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

2.II. REGIONAL JAWA

Target pendapatan APBD tahun 2020 seluruh pemerintah daerah di regional Jawa mengalami penurunan 8,82 persen dari Rp482.440,73 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp439.905,20 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh turunnya target Pendapatan Asli Daerah, terutama pada provinsi DKI Jakarta yang mengalami penurunan target PAD sebesar 25,09 persen dari tahun 2019. Demikian pula total alokasi belanja APBD pemerintah daerah pada regional Jawa juga mengalami penurunan 4,83 persen dari Rp499.765,01 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp475.607,83 miliar di tahun 2020. Penurunan pagu belanja tersebut diantara berasal dari penurunan pagu belanja pegawai pada Provinsi DKI Jakarta akibat kebijakan Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Tahun 2020.

Apabila dilihat realisasinya, sampai dengan akhir tahun 2020, total pendapatan APBD regional Jawa mencapai Rp427.763,85 miliar atau turun 6,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp458.556,58 miliar. Secara nominal,

komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi penyumbang terbesar penurunan pendapatan, dengan kemerosotan realisasi sebesar 8,45 persen dari Rp179.118,00 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp163.987,79 miliar pada tahun 2020. Hal serupa juga terjadi pada realisasi belanja, terdapat penurunan realisasi sebesar 9,09 persen yaitu dari Rp458.596,81 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp416.903,31 miliar pada tahun 2020. Munculnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 berdampak besar terhadap penurunan aktivitas perekonomian masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

2.II.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL JAWA

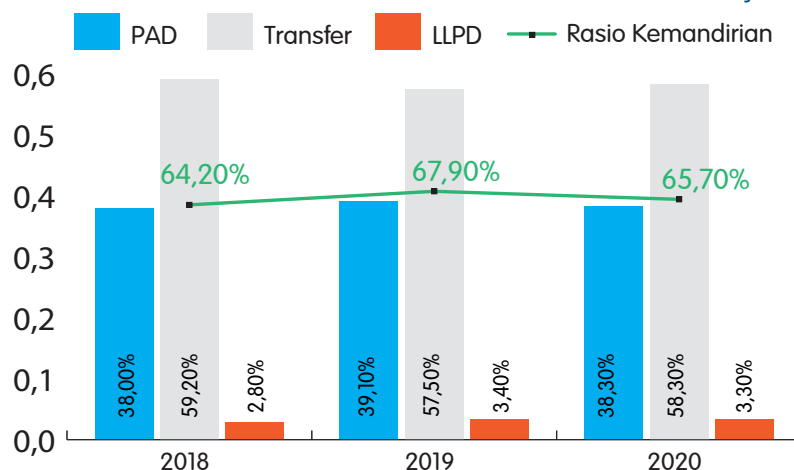
Realisasi pendapatan APBD Regional Jawa pada tahun 2020 sebesar Rp427.763,85 miliar, atau terdepresiasi 6,72 persen dari tahun 2019. Secara agregat, pendapatan APBD telah mencapai 97,24 persen dari target yang ditetapkan, namun lebih rendah dari nominal capaian tahun sebelumnya sebesar Rp458.556,58 miliar. Secara kumulatif, semua komponen pendapatan dalam APBD regional mengalami penurunan. Dari sisi

TABEL 45. REALISASI APBD REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	444.199,23	438.565,51	98,73%	482.440,73	458.556,58	95,05%	439.905,20	427.763,85	97,24%
PAD	162.065,41	166.670,10	102,84%	180.914,21	179.118,00	99,01%	158.950,89	163.987,79	103,17%
Pendapatan Transfer	267.713,13	259.531,95	96,94%	281.788,45	263.847,91	93,63%	261.073,86	249.472,75	95,56%
LLPD yang sah	14.420,70	12.363,45	85,73%	19.738,07	15.590,68	78,99%	19.880,45	14.303,31	71,95%
Belanja	470.688,06	415.256,66	88,22%	499.765,01	458.596,81	91,76%	475.607,83	416.903,31	87,66%
Belanja Pegawai	168.191,35	153.118,74	91,04%	175.298,32	163.701,12	93,38%	164.506,82	149.068,11	90,62%
Belanja Barang	120.313,22	109.055,49	90,64%	135.277,45	125.636,55	92,87%	124.890,98	111.868,02	89,57%
Belanja Bunga	154,88	93,47	60,35%	171,85	102,52	59,65%	155,27	133,98	86,29%
Belanja Subsidi	6.324,78	2.956,28	46,74%	5.209,32	3.044,26	58,44%	4.789,45	3.893,61	81,30%
Belanja Hibah	37.574,68	34.177,65	90,96%	37.218,86	42.522,03	114,25%	42.817,43	34.914,94	81,54%
Belanja Bantuan Sosial	7.321,18	7.245,57	98,97%	7.926,25	7.234,74	91,28%	8.093,67	7.403,68	91,47%
Belanja Bagi Hasil	24.064,38	28.896,67	120,08%	28.280,73	30.838,69	109,04%	21.443,17	20.275,16	94,55%
Belanja Bantuan Keuangan	17.982,35	6.210,10	34,53%	12.948,51	7.439,66	57,46%	25.351,28	22.611,98	89,19%
Belanja Modal	86.882,24	73.301,19	84,37%	93.392,78	77.808,34	83,31%	55.350,99	46.513,82	84,03%
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	28.208,77	20.220,01	71,68%
Surplus/Defisit	-26.488,83	23.308,85	-88,00%	-17.324,28	-40,22	0,23%	-35.702,63	10.860,54	-30,42%
Pembiayaan	39.263,25	44.810,64	114,13%	44.402,07	42.150,53	94,93%	37.642,56	41.982,26	111,53%
Penerimaan	48.639,73	55.227,54	113,54%	56.032,51	52.784,48	94,20%	49.509,40	49.655,61	100,30%
Pengeluaran	9.376,48	10.416,91	111,10%	11.630,44	10.633,95	91,43%	11.866,84	7.673,35	64,66%
SILPA	12.774,43	68.119,48	533,25%	27.077,79	42.110,30	155,52%	1.939,93	52.842,80	2723,95%

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 70. PROPORSI PENDAPATAN DAERAH DAN RASIO KEMANDIRIAN REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

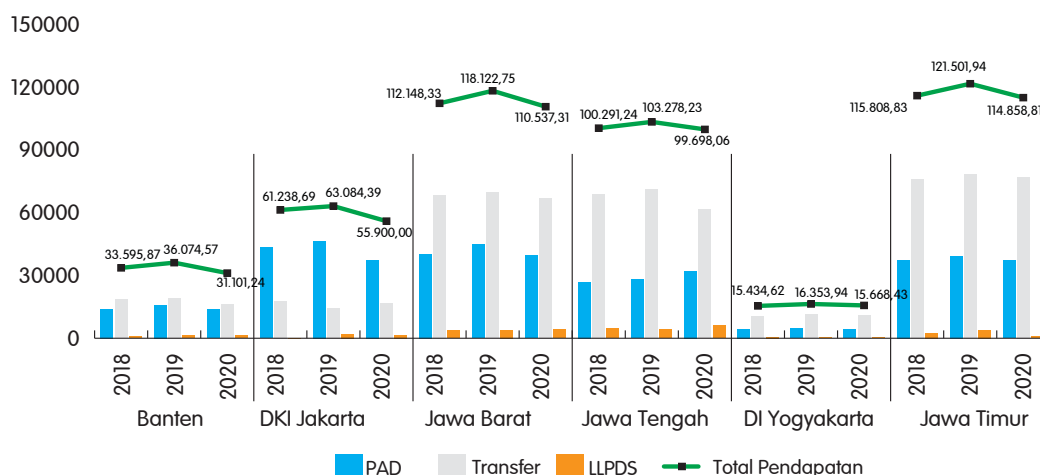
nominal, berikut ini urutan jenis pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar penurunan realisasi di Tahun 2020, yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp15.130,21 Miliar atau 8,45 persen di banding tahun sebelumnya. Selanjutnya, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp14.375,16 Miliar atau 5,45 persen di banding tahun sebelumnya. Terakhir, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp1.287,37 Miliar atau 8,26 persen di banding tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 diantaranya dipengaruhi oleh kebijakan sejumlah Pemerintah Daerah yang memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak kendaraan bermotor dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan sejenis lainnya yang berakibat membatasi kegiatan perekonomian

masyarakat.

Berdasarkan tingkat kontribusi/komposisi pada sisi pendapatan, secara agregat di tingkat regional, realisasi pendapatan pada tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 58,32 persen dari total pendapatan, sedangkan realisasi PAD memberikan kontribusi sebesar 38,34 persen serta kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,34 persen. Cukup tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mengindikasikan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di regional Jawa terhadap Pemerintah Pusat cukup besar. Hal tersebut selaras dengan perkembangan rasio kemandirian daerah yang nilainya cenderung pada rentang sama sepanjang tahun 2018-2020 yaitu kisaran 64,2 persen sampai 65,7 persen.

Pada regional Jawa, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai pendapatan daerah terbesar dengan proporsi mencapai 24,06 persen dari

GAMBAR 71. PENDAPATAN DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2020 (RP, MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

total pendapatan di regional Jawa, disusul oleh Provinsi DKI Jakarta (22,82 persen), Jawa Timur (22,60 persen), Jawa Tengah (19,64 persen) dan DI Yogyakarta (2,56 persen). Dari sisi kombinasi struktur pendapatan, maka terdapat pola yang sama untuk semua provinsi di regional Jawa, dengan menempatkan pendapatan transfer sebagai kontributor utama, disusul Pendapatan Asli Daerah di posisi kedua, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah di posisi terakhir. Hampir seluruh sektor sumber penerimaan pendapatan daerah terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial sangat berpengaruh pada sektor unggulan beberapa daerah di regional Jawa seperti sektor pariwisata. Namun demikian masih terdapat sebagian kecil daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya tetap tumbuh positif dikarenakan sektor utamanya di bidang pertanian serta bidang lain yang tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19.

2.II.B. PERKEMBANGAN BELANJA REGIONAL JAWA

Belanja pemerintah daerah regional Jawa tahun 2020 terealisasi sebesar Rp416.903,31 miliar atau turun 9,09 persen dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan kinerja belanja dari sisi nominal sejalan dengan kinerja realisasi belanja daerah dari sisi persentase yang menunjukkan penurunan juga. Kinerja realisasi belanja daerah (APBD) regional Jawa tahun 2020 tercatat sebesar 87,66 persen dari total pagu Rp475.607,83 miliar atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 91,76 persen. Penurunan kinerja realisasi belanja

daerah di regional Jawa dipicu oleh penurunan kinerja realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bagi hasil, dan belanja modal. Sementara itu, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja bantuan sosial, dan belanja mengalami kenaikan, namun secara agregat nominal kenaikannya masih di bawah agregat nilai penurunan realisasi pada jenis belanja lainnya.

Berdasarkan nominalnya, tiga jenis belanja dengan penurunan realisasi yang paling signifikan dapat diurutkan sebagai berikut: (i) Belanja Modal, dengan penurunan sebesar Rp31.294,52 Milyar atau turun 40,22 persen dibanding tahun sebelumnya; (ii) Belanja Pegawai, dengan penurunan Rp14.633,01 Milyar atau turun 8,94 persen dibanding tahun sebelumnya; dan (iii) Belanja Barang, dengan penurunan Rp13.768,53 Milyar atau turun 10,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan prioritas pemerintah daerah pada tahun 2020 adalah penanganan COVID-19.

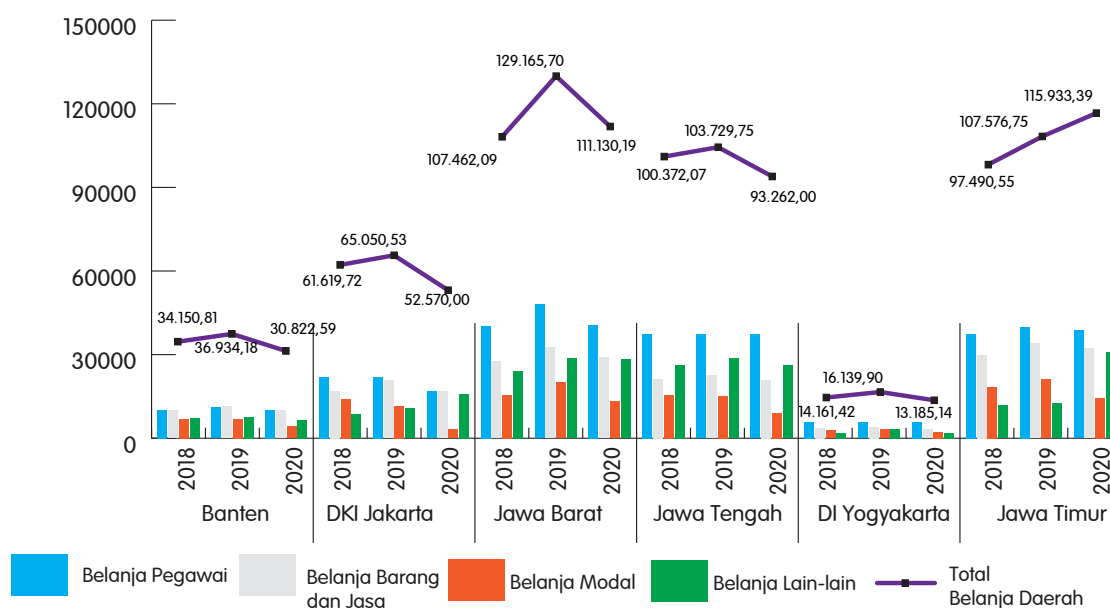
Dilihat dari rasio antar jenis belanja, realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2020 mengalami sedikit perubahan. Proporsi Belanja modal mengalami perubahan yaitu dari 16,98 persen menjadi 11,16 persen. Perbedaan lainnya juga tampak dari adanya realisasi yang cukup signifikan dari belanja tidak terduga terhadap total belanja dengan rasio sebesar 4,85 persen pada tahun 2020 yang dipergunakan pemda untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

TABEL 46. REALISASI DAN RASIO PER JENIS BELANJA REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018		2019		2020	
	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
1. Belanja Pegawai	153.118,74	36,89%	163.701,12	35,72%	149.068,11	35,76%
2. Belanja Barang	109.055,49	26,27%	125.636,55	27,41%	111.868,02	26,83%
3. Belanja Bunga	93,47	0,02%	102,52	0,02%	133,98	0,03%
4. Belanja Subsidi	2.956,28	0,71%	3.044,26	0,66%	3.893,61	0,93%
5. Belanja Hibah	34.177,65	8,23%	42.522,03	9,28%	34.914,94	8,37%
6. Belanja Bantuan Sosial	7.245,57	1,75%	7.234,74	1,58%	7.403,68	1,78%
7. Belanja Bagi Hasil	28.896,67	6,96%	30.838,69	6,73%	20.275,16	4,86%
8. Belanja Bantuan Keuangan	6.210,10	1,50%	7.439,66	1,62%	22.611,98	5,42%
9. Belanja Modal	73.301,19	17,66%	77.808,34	16,98%	46.513,82	11,16%
10. Belanja Tidak Terduga					20.220,01	4,85%
Total Belanja	415.055,16		458.327,91		416.903,31	

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 72. BELANJA DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

Serupa dengan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020, belanja pegawai tetap menjadi jenis belanja dengan kontribusi/proporsi terbesar dalam realisasi belanja daerah, kemudian diikuti belanja barang di posisi kedua. Selama tahun 2018-2020, proporsi belanja pegawai tetap di kisaran 35,72 persen sampai 36,89 persen, sedangkan proporsi belanja barang berada di kisaran 26,27 persen hingga 27,41 persen. Pemerintah daerah perlu mencari solusi dan strategi efisiensi agar belanja pegawai ke depannya tidak menjadi beban utama. Langkah yang dapat dilakukan diantaranya dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemberdayaan SDM yang tersedia sehingga penambahan pegawai hanya dapat dilakukan bilamana telah dikaji secara prudent serta mempertimbangkan analisis beban kerja masing-masing unit/instansi pemerintah daerah.

Secara umum, kinerja realisasi belanja tahun 2020 di hampir seluruh provinsi mengalami penurunan, kecuali Provinsi Jawa Timur yang justru mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, serta belanja tidak terduga dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

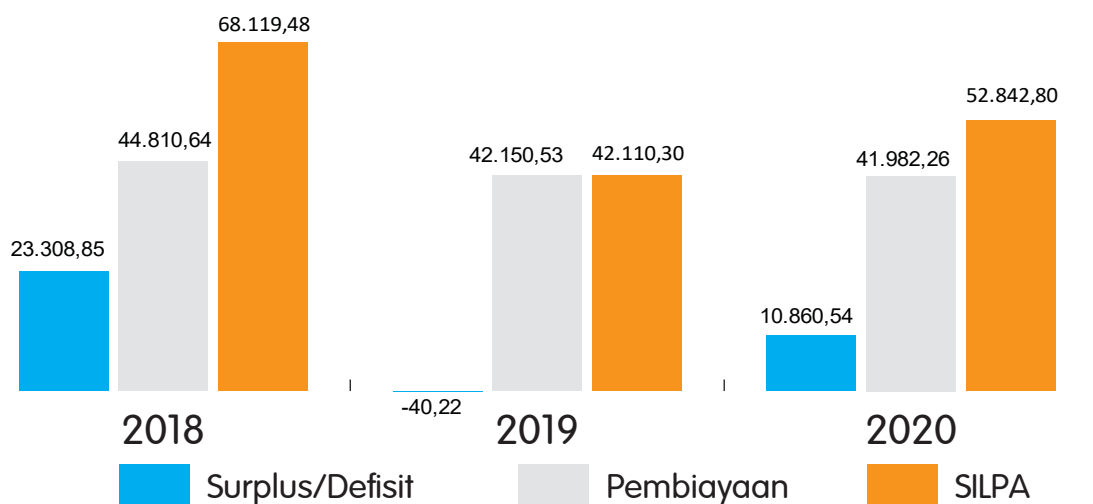
Dilihat dari perkembangan per jenis belanja pada masing-masing provinsi, terdapat beberapa jenis belanja yang mengalami pola trend/pertumbuhan nominal yang hampir sama untuk seluruh Provinsi

di lingkup regional Jawa. Belanja pegawai mengalami tren penurunan pada hampir seluruh provinsi regional Jawa kecuali pada Provinsi DI Yogyakarta yang mengalami kenaikan sebesar 3,29 persen. Sedangkan untuk belanja barang seluruh provinsi di regional Jawa mengalami tren penurunan dengan variasi penurunan antara 5,56 persen hingga 22,86 persen. Demikian pula dengan realisasi belanja modal seluruh provinsi di regional Jawa juga mengalami tren penurunan dengan variasi penurunan antara 25,33 persen hingga 72,38 persen. Belanja modal yang mempunyai efek jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sebaiknya selalu dijaga proporsi yang tepat terhadap Belanja Daerah setiap tahunnya.

2.II.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT REGIONAL JAWA

Realisasi APBD regional Jawa tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp10.860,54 miliar. Angka surplus ini lebih besar dari target dan dapat berarti positif jika dilihat dari presentase terhadap pagu serta perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja, karena target yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp35.702,63 miliar. Namun demikian, kondisi surplus tersebut juga dapat berarti negatif mengingat realisasi belanja yang rendah yaitu hanya sebesar 87,66 persen. Dari sisi pendapatan, kondisi surplus terjadi

GAMBAR 73. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD REGIONAL JAWA 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

karena capaian realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,24 persen. Sementara itu, jika dilihat dari sisi belanja, kondisi surplus ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana sehingga membuat tingkat realisasi terhadap pagu yang rendah (87,66 persen).

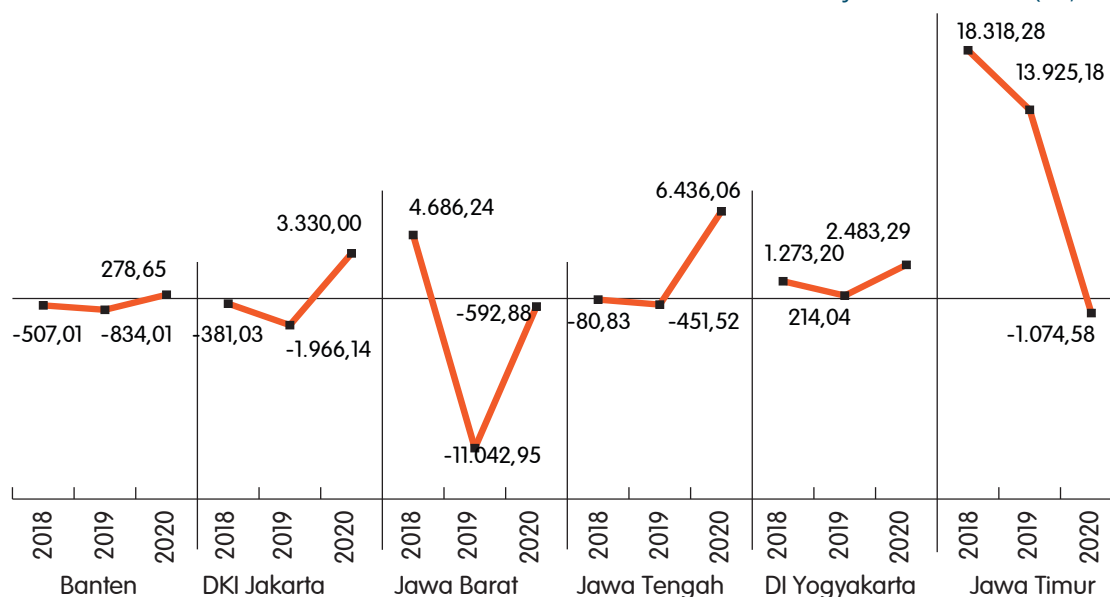
Angka surplus pada APBD regional Jawa sebagian besar dikontribusikan oleh surplus pada provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, provinsi Jawa Tengah memiliki surplus APBD sebesar Rp6.436,06

miliar. Pada tahun 2020, terdapat dua provinsi yang mengalami defisit, yaitu: provinsi Jawa Barat karena tidak optimalnya kinerja pendapatan dari pajak daerah; serta provinsi Jawa Timur karena tidak optimalnya kinerja pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.II.D. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL JAWA

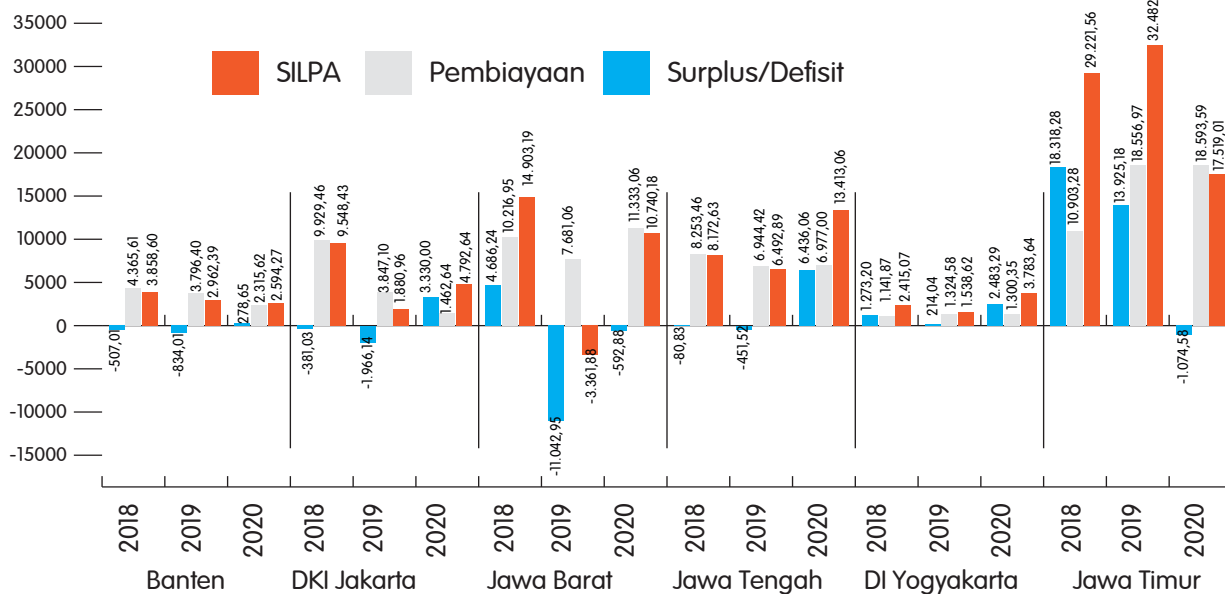
Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan regional Jawa mencapai Rp41.982,26 miliar terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp49.655,61 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar

GAMBAR 74. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD REGIONAL JAWA 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 75. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD PER PROVINSI SELAMA 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

Rp7.673,35 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp168,27 miliar atau 0,40 persen. Pada tahun 2020, kenaikan/penurunan pembiayaan netto bervariasi pada tiap-tiap provinsi, dengan nilai kenaikan pembiayaan netto terbesar dicapai oleh provinsi Jawa Barat yang memperoleh kenaikan pembiayaan netto sebesar Rp3.652,00 miliar, atau lebih besar 47,55 persen dari tahun 2019. Kenaikan nilai pembiayaan netto tersebut turut berkontribusi pada perolehan SILPA yang cukup besar di provinsi tersebut, yaitu sebesar Rp10.740,18 miliar. Adanya SILPA yang cukup besar pada regional Jawa yaitu Rp52.842,80 miliar, perlu menjadi perhatian khusus mengingat hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang mengakibatkan pengeluaran pemerintah kurang optimal memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Setelah mengalami peningkatan target pendapatan yang cukup signifikan pada tahun 2019, pada tahun 2020 seiring merebaknya pandemi COVID-19, target pendapatan pada beberapa provinsi di Kalimantan mengalami koreksi dibandingkan tahun sebelumnya.

Target pendapatan APBD tahun 2020 pada pemerintah daerah di regional Kalimantan mengalami penurunan 4,93 persen dari Rp117.611,6 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp111.812,5 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya alokasi Pendapatan Transfer. Meski target pendapatan pada APBD tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, untuk alokasi belanja pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,07 persen dari Rp 126.189,74 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 126.277,96 miliar di tahun 2020. Penurunan target pendapatan tersebut berasal dari penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang terjadi pada 3 (tiga) provinsi yakni: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sementara itu pada alokasi belanja, kenaikan alokasi anggaran disumbangkan terutama dari alokasi belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Dilihat dari realisasinya, sampai dengan akhir tahun 2020, total pendapatan APBD regional Kalimantan mencapai Rp109.240,21 miliar atau turun 10,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp122.664,73 miliar. Penurunan pada total pendapatan ini seiring dengan turunnya beberapa komponen pendapatan dalam APBD. Pendapatan Transfer yang memiliki porsi 78,17 persen dalam pendapatan mengalami penurunan sebesar 11,04 persen dari Rp 96.001,40 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 85.398,00 pada

TABEL 47. REALISASI APBD REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	108.870,26	109.066,71	100,18	117.611,63	122.664,73	104,30	111.812,51	109.240,21	97,70
PAD	20.195,78	21.091,40	104,43	21.838,72	23.986,77	109,84	20.712,31	20.434,76	98,66
Pendapatan Transfer	84.866,26	85.884,35	101,20	92.365,88	96.001,40	103,94	87.202,29	85.398,00	97,93
LLPD yang sah	3.808,22	2.090,95	54,91	3.407,04	2.676,56	78,56	3.897,91	3.407,45	87,42
Belanja	112.923,87	100.899,45	89,35	126.189,74	106.479,11	84,38	126.277,96	109.518,29	86,73
Belanja Pegawai	39.056,12	35.097,54	89,86	40.823,34	35.513,70	86,99	41.139,66	36.077,51	87,70
Belanja Barang	27.548,82	24.204,51	87,86	33.139,71	22.959,28	69,28	30.963,26	27.606,15	89,16
Belanja Bunga	24,56	7,71	31,39	42,54	8,28	19,45	32,27	23,78	73,69
Belanja Subsidi	72,24	51,53	71,32	49,67	43,00	86,57	49,69	42,66	85,84
Belanja Hibah	5.972,92	5.745,01	96,18	5.759,82	5.599,54	97,22	6.824,02	6.372,79	93,39
Belanja Bantuan Sosial	353,93	308,25	87,09	500,00	444,45	88,89	565,31	418,50	74,03
Belanja Bagi Hasil	4.460,69	4.581,73	102,71	7.964,40	7.855,77	98,64	5.030,47	4.934,17	98,09
Belanja Bant. Keuangan	7.877,55	7.846,93	99,61	7.877,35	7.577,90	96,20	12.669,45	10.228,70	80,74
Belanja Modal	27.406,20	23.018,99	83,99	29.809,97	26.436,28	88,68	24.670,50	20.669,23	83,78
Belanja Tidak Terduga	150,84	37,26	24,70	222,95	40,91	18,35	4.333,33	3.144,80	72,57
Surplus/Defisit	-4.053,61	8.167,26	-201,48	-8.578,11	16.185,62	-188,69	-14.465,45	-278,08	1,92
Pembiayaan	6.091,20	5.428,57	89,12	7.760,99	11.264,28	145,14	11.148,01	13.902,34	124,71
Penerimaan	6.701,37	6.094,93	90,95	8.436,13	12.347,68	146,37	11.891,21	14.543,07	122,30
Pengeluaran	610,18	666,36	109,21	675,14	1.083,41	160,47	743,20	640,73	86,21
SILPA	2.037,58	13.595,83	667,25	-817,12	27.449,90	-3.359,35	-3.317,43	13.624,26	-410,69

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

tahun 2020. Begitu pula dengan realisasi belanja, terdapat penurunan realisasi sebesar 3,63 persen dari Rp106.479,11 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp109.518,29 miliar pada tahun 2020. Mulai merebaknya Pandemi COVID-19 pada Maret 2020 turut mempengaruhi alokasi anggaran dan realisasinya baik pada pendapatan maupun belanja daerah. Terbatasnya mobilitas warga membuat aktifitas ekonomi merosot dan akhirnya menurunkan realisasi pendapatan serta belanja.

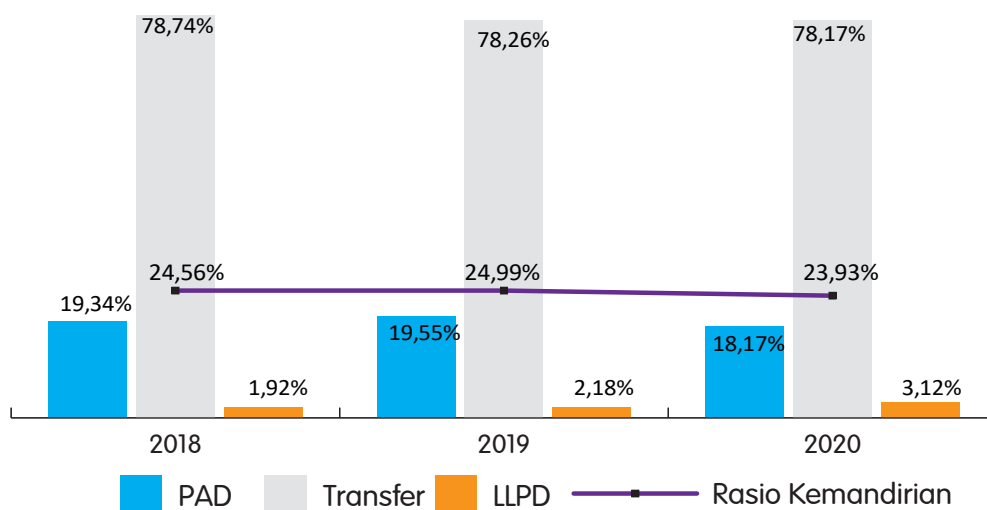
2.III.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL KALIMANTAN

Realisasi pendapatan APBD Regional Kalimantan pada tahun 2020 sebesar Rp109.240,21 miliar, atau turun 10,94 persen dari tahun 2019. Penurunan ini seiring dengan turunnya PAD sebesar 14,81 persen atau menjadi sebesar Rp20.434,76 miliar dan komponen pendapatan transfer dengan penurunan sebesar 11,04 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 85.398,00 Miliar. Sedangkan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah justru mengalami peningkatan sebesar 27,31 persen menjadi Rp3.407,45 Miliar. Selain terjadi penurunan realisasi secara nominal, secara

besaran persentase realisasi pendapatan pun mengalami penurunan terhadap target. Jika pada tahun 2019 realisasi pendapatan mampu mencapai 104,30 persen dari target, pada tahun 2020 hanya mencapai 97,70 persen. Penurunan persentase ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat capaian komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 87,42 persen. Selain karena lesunya perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kebijakan pemotongan pagu TKDD dari pusat serta perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa langsung ke rekening kas desa turut mempengaruhi penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020.

Berdasarkan tingkat kontribusi pada sisi pendapatan, realisasi pendapatan pada tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 78,17 persen (Rp85.398,00 miliar) dari total pendapatan, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi PAD yang memberikan kontribusi sebesar 18,17 persen (Rp20.434,76 miliar) dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,12 persen (Rp3.407,45 miliar). Tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mengindikasikan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di regional

GAMBAR 76. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD PER PROVINSI SELAMA 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

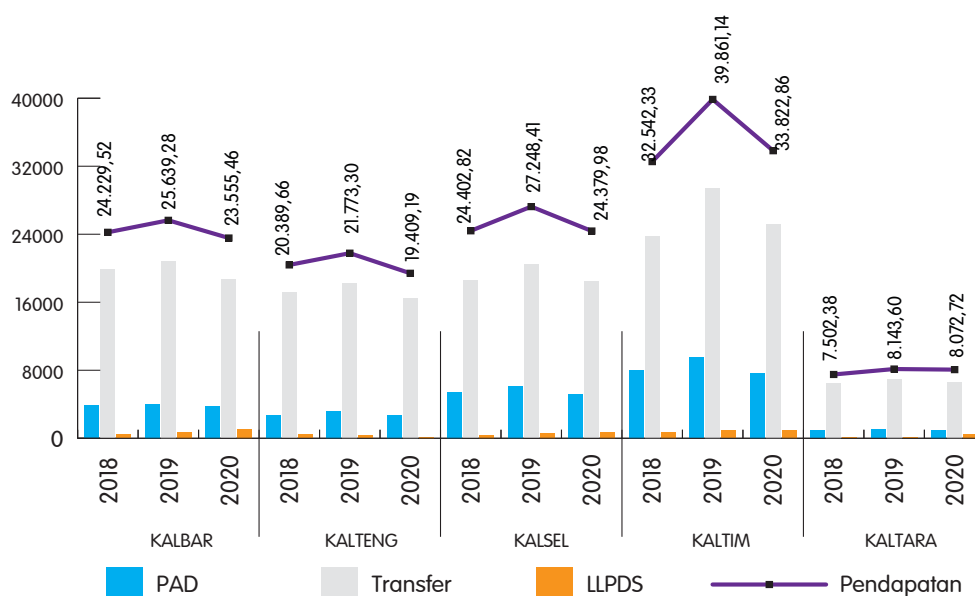
Kalimantan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Dari sisi kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer tidak menunjukkan perubahan atau bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilainya yang cenderung dalam kisaran yang sama sepanjang tahun 2018-2020. Rasio kemandirian keuangan daerah regional Kalimantan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 23,93 persen setelah sempat naik pada tahun sebelumnya (24,99 persen).

(74,50 persen) berupa pendapatan transfer. Besarnya pendapatan transfer pada Kalimantan Timur disumbangkan oleh besarnya Dana Bagi Hasil yang diterima dari Pusat seiring membaiknya pengelolaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Besarnya porsi pendapatan transfer pada APBD tidak hanya pada Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga pada seluruh provinsi di regional Kalimantan. Pada setiap provinsi di regional Kalimantan, memiliki kecenderungan persentase komponen pendapatan daerah yang sama.

Pada regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang dominan dengan besarnya pendapatan daerah yang dimiliki. Besarnya pendapatan tersebut sebagian besar

2.III.B. PERKEMBANGAN BELANJA REGIONAL KALIMANTAN

GAMBAR 77. PENDAPATAN DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (RP, MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

Belanja pemerintah daerah regional Kalimantan tahun 2020 terealisasi sejumlah Rp109.518,29 miliar atau turun 3,63 persen dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan kinerja belanja dari sisi nominal seiring dengan kinerja realisasi belanja daerah dari sisi persentase yang juga menunjukkan penurunan. Kinerja realisasi belanja daerah (APBD) regional Kalimantan tahun 2020 tercatat sebesar 86,73 persen dari total pagu Rp126.277,96 miliar atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 90,05 persen. Penurunan kinerja realisasi belanja daerah di regional Kalimantan dipicu oleh penurunan kinerja realisasi beberapa jenis belanja, antara lain: belanja barang, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja modal, baik dari sisi nominal maupun persentase.

Penurunan nilai terbesar dialami oleh belanja modal dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp20.669,3 miliar yang secara nominal lebih kecil dari tahun sebelumnya Rp26.436,28 miliar dan secara persentase menurun menjadi 83,78 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 88,68 persen. Hal yang sama terjadi pada belanja barang dengan tingkat realisasi sebesar Rp27.606,15 miliar (89,16 persen) lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan realisasi Rp30.118,33 miliar (90,88 persen). Sementara itu, belanja pegawai justru mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase, Pada Tahun 2020 nilai realisasi Rp 36.007,51 miliar (87,70 persen) dibandingkan tahun sebelumnya Rp35.513,70 miliar (86,99 persen).

Rasio realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2019 dan 2020 tidak banyak berubah yaitu sekitar 31 persen-32 persen untuk belanja pegawai; 25 persen-26 persen untuk belanja barang dan jasa; 18 persen-23 persen untuk belanja modal; serta 19 persen-22 persen untuk belanja lainnya yang didalamnya terdapat belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

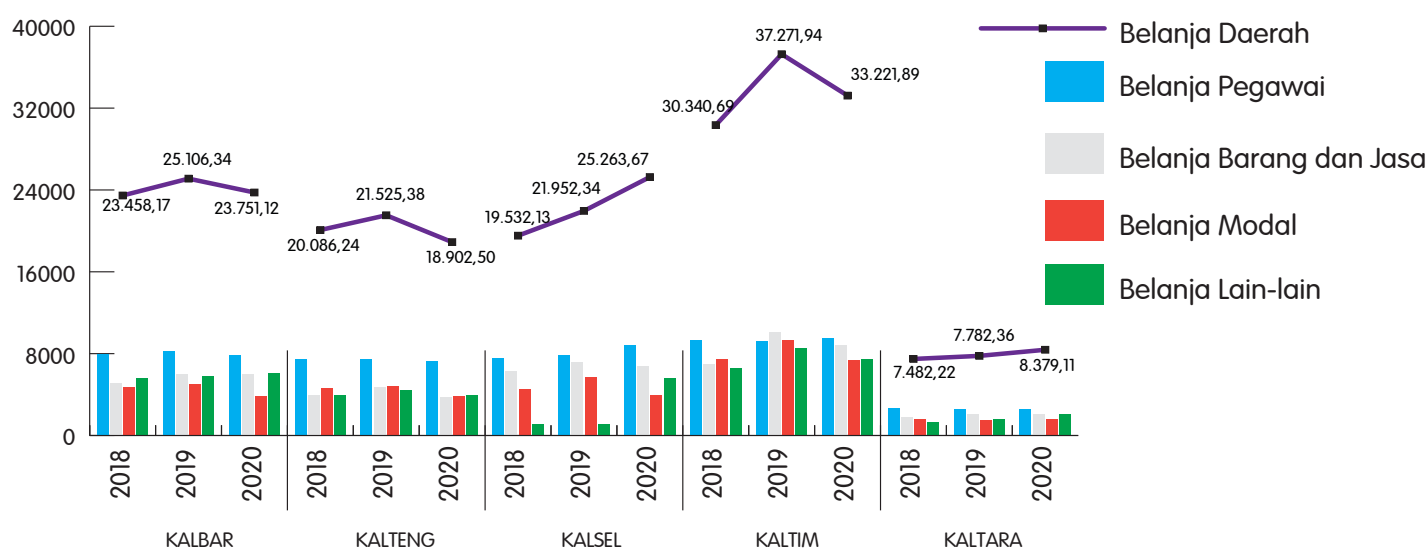
Pada tingkat provinsi di regional Kalimantan, setiap provinsi cenderung memiliki tingkat kontribusi dari masing-masing jenis belanja dengan porsi yang tidak terlalu berbeda. Secara umum dari tahun ke tahun belanja pegawai menjadi jenis belanja yang paling besar porsinya pada regional kalimantan, hal ini seiring dengan gencarnya penerimaan PNS pada regional Kalimantan yang pada akhirnya membutuhkan alokasi belanja untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN. Proporsi ASN tentunya perlu dikelola secara tepat agar penambahan pegawai tidak banyak menyita porsi dalam belanja APBD. Selanjutnya untuk belanja modal hampir seluruh provinsi di regional Kalimantan terkena imbas dari pandemi COVID-19 sehingga mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya, hanya provinsi Kalimantan Utara yang realisasi belanja modalnya masih sedikit tumbuh bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepan porsi belanja modal di regional Kalimantan perlu ditingkatkan karena memiliki multiplier effect yang lebih besar dibandingkan belanja pegawai, terutama manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berguna untuk

TABEL 48. REALISASI DAN RASIO PER JENIS BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018		2019		2020	
	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
1. Belanja Pegawai	35.097,54	34,78%	35.513,70	31,25%	36.077,51	32,94%
2. Belanja Barang	24.204,51	23,99%	30.118,33	26,50%	27.606,15	25,21%
3. Belanja Bunga	7,71	0,01%	8,28	0,01%	23,78	0,02%
4. Belanja Subsidi	51,53	0,05%	43,00	0,04%	42,66	0,04%
5. Belanja Hibah	5.745,01	5,69%	5.599,54	4,93%	6.372,79	5,82%
6. Belanja Bantuan Sosial	308,25	0,31%	444,45	0,39%	418,50	0,38%
7. Belanja Bagi Hasil	4.581,73	4,54%	7.855,77	6,91%	4.934,17	4,51%
8. Belanja Bantuan Keuangan	7.846,93	7,78%	7.577,90	6,67%	10.228,70	9,34%
9. Belanja Modal	23.018,99	22,81%	26.436,28	23,26%	20.669,23	18,87%
10. Belanja Tidak Terduga	37,26	0,04%	40,91	0,04%	3.144,80	2,87%
Total Belanja	100.899,45		113.638,16		109.518,29	

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 78. PENDAPATAN DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (RP, MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

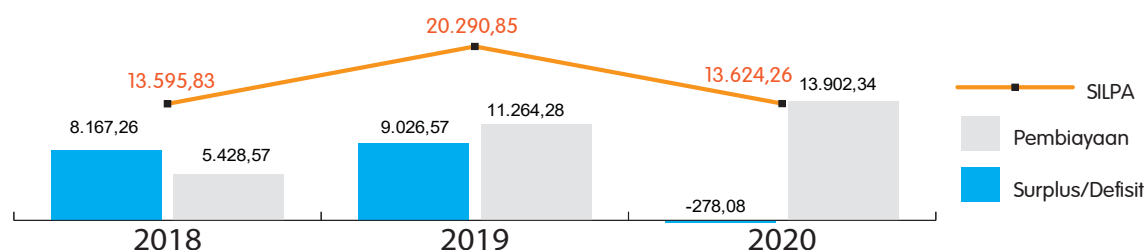
mendukung upaya pembangunan infrastruktur serta konektivitas wilayah yang mampu mendorong pesat perekonomian di daerah tersebut.

Sementara itu apabila dilihat berdasarkan fungsinya, masih terdapat 2 provinsi dengan alokasi pada sektor pendidikannya masih dibawah 20 persen sebagaimana amanat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yakni provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masing-masing sebesar 18,34 persen dan 17,23 persen dari total belanja. Sedangkan di sektor kesehatan, seluruh provinsi pada regional kalimantan telah mengalokasikan belanja kesehatan sesuai ketentuan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dimana provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10 persen dari APBD diluar gaji.

2.III.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT REGIONAL KALIMANTAN

Berbeda dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya

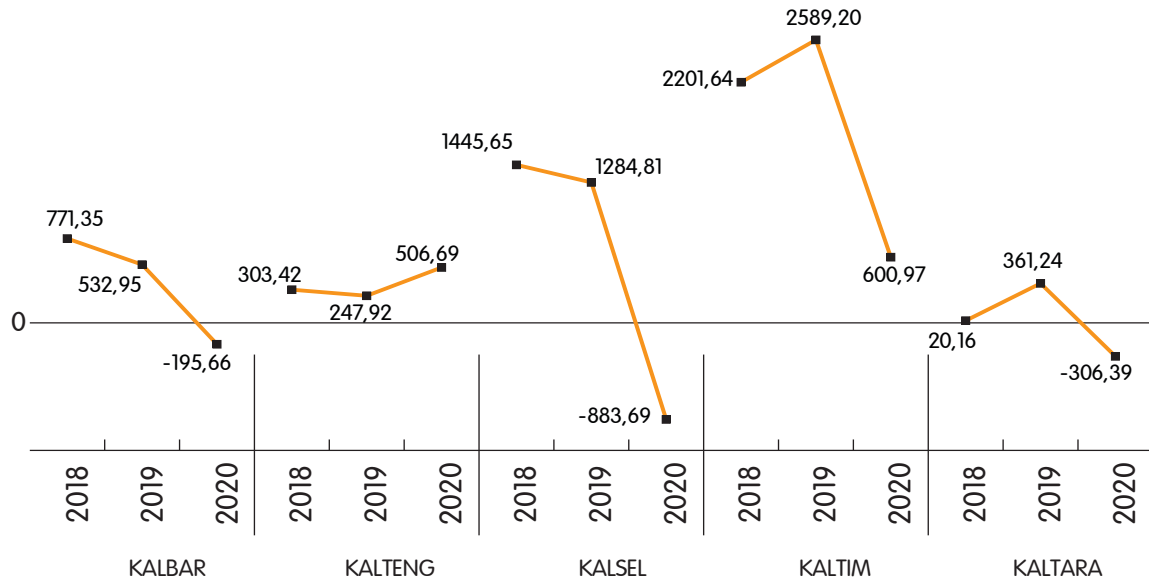
GAMBAR 79. PENDAPATAN DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (RP, MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

yang selalu surplus, realisasi APBD regional Kalimantan pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp278,08 miliar. Angka defisit ini jauh lebih sedikit dari target defisit APBD yang ditetapkan sebesar Rp14.465,45 miliar. Secara umum APBD regional Kalimantan Tahun 2020 diproyeksikan untuk defisit, dengan maksud agar belanja pemerintah Regional Kalimantan terserap optimal dan mampu menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Dari sisi pendapatan capaian realisasi berada pada angka 97,70 persen dari target pendapatan. Kurang optimalnya realisasi pendapatan ini turut dipengaruhi lesunya ekonomi di masa pandemi yang pada akhirnya berimbas pada menurunnya capaian pajak daerah dan penurunan anggaran transfer daerah terutama dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sementara jika dilihat dari sisi belanja, tingkat realisasi belanja hanya sebesar 86,73 persen dari pagu, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak dapat terlaksana. Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab terhambatnya belanja tersebut

GAMBAR 80. PENDAPATAN DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (RP, MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

antara lain: proses pelelangan dan pengadaan barang dan jasa (belanja modal) serta penyaluran dana transfer yang tidak optimal pada beberapa daerah.

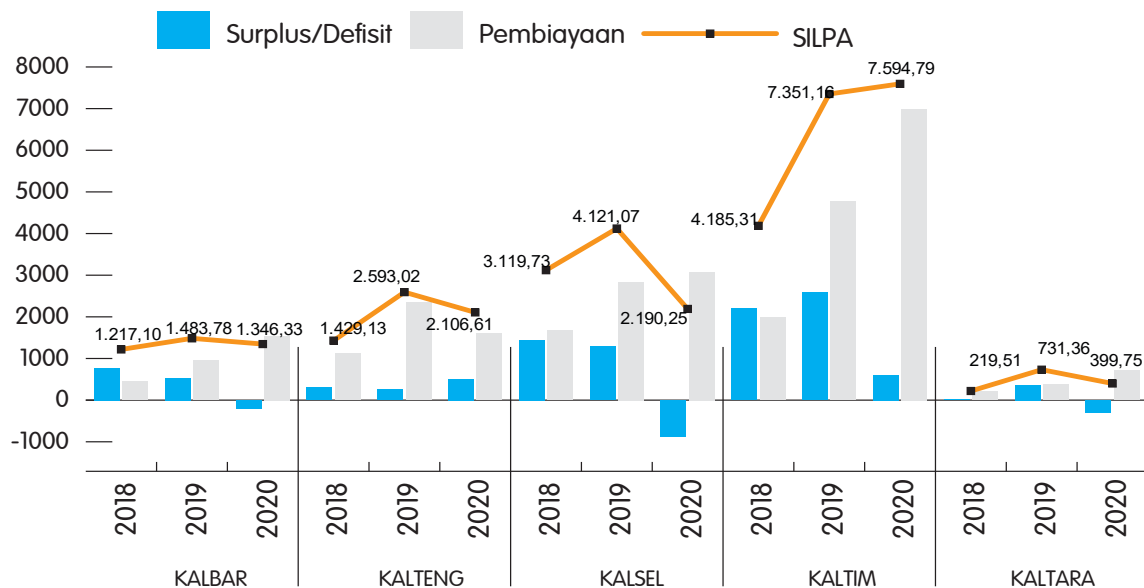
Defisit sebesar Rp278,08 miliar pada APBD regional Kalimantan tidak terlepas dari defisitnya 3 (tiga) provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi dengan defisit terbesar yakni senilai Rp883,69 miliar, disusul Kalimantan utara dan Kalimantan barat masing-masing senilai Rp 306,39 miliar dan Rp 195,66 miliar. Kondisi defisit ini merupakan imbas dari menurunnya hampir seluruh komponen pendapatan daerah, serta

disisi lain realisasi belanja dipacu sebagai upaya percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan stimulus pemulihan ekonomi daerah.

2.III.D. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL KALIMANTAN

Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan regional Kalimantan mencapai Rp13.902,34 miliar terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp14.543,07 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp640,73 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp2.638,06 miliar atau 23,42 persen. Komposisi ini menghasilkan nilai SILPA pada tahun

GAMBAR 81. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SIPA APBD PER PROVINSI TAHUN 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

2020 sebesar Rp13.624,26 miliar.

Pada tahun 2020, kecuali Kalimantan Tengah, hampir seluruh provinsi di regional Kalimantan mengalami kenaikan nilai pembiayaan netto, dengan nilai kenaikan netto terbesar dicapai oleh provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh pembiayaan netto sebesar Rp6.993,82 miliar, atau meningkat 46,87 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu adanya defisit anggaran pada regional kalimantan di Tahun 2020 turut berkontribusi pada perolehan SILPA sebesar Rp13.624,26 miliar, lebih rendah dibandingkan SILPA Tahun 2019 yang sebesar Rp20.290,85 miliar. Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan SILPA terbesar pada regional Kalimantan dengan nilai SILPA sebesar Rp7.594,79 miliar atau 56 persen dari total SILPA di tingkat regional. Adanya SILPA yang cukup besar pada regional Kalimantan khususnya pada Kalimantan Timur patut diwaspadai karena dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengeloaan keuangan daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas yang rendah pada belanja daerah sehingga APBD kurang berdaya guna bagi masyarakat daerah tersebut.

2.IV. REGIONAL SULAWESI

Secara keseluruhan di regional Sulawesi, realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mencapai 92,74 persen, menurun di banding sebelumnya. Realisasi belanja daerah pada APBD seluruh pemerintah daerah di regional Sulawesi menunjukkan penurunan dari sisi nominal, dan persentasenya dibanding sebelumnya.

2.IV.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL SULAWESI

Realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi secara agregat pada tahun 2020 sebesar Rp105,79 triliun atau 92,74 persen dari target. Capaian tersebut terakonstraksi sebesar Rp10,23 triliun atau turun 8,84 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (L2PDYS) dan PAD berkontribusi paling besar dengan andil masing-masing sebesar 75,15 persen dan 12,74 persen terhadap penurunan tersebut.

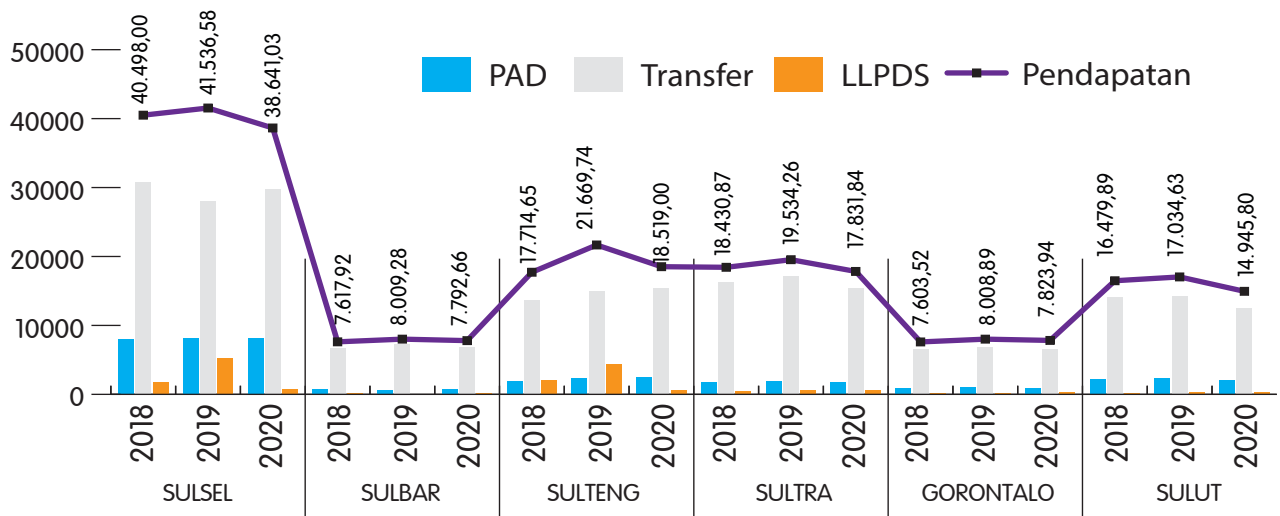
Dengan kontribusi PAD yang semakin meningkat diharapkan Pemda semakin berdikari dalam

TABEL 49. REALISASI APBD REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018 - 2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	113.404,41	108.345,75	95,54	118.903,82	115.793,37	97,38	113.820,70	105.554,27	92,74
PAD	17.287,27	15.532,66	89,85	17.235,40	16.474,79	95,59	17.340,16	16.287,00	93,93
Pendapatan Transfer	86.909,83	88.108,22	101,38	91.294,23	88.574,70	97,02	87.388,13	86.386,97	98,85
LLPD yang sah	9.207,30	4.704,87	51,1	10.374,42	10.743,88	103,56	9.092,41	2.880,30	31,68
Belanja	117.383,74	107.948,94	91,96	124.489,64	112.190,71	90,12	121.532,75	103.904,59	85,5
Belanja Pegawai	42.724,09	39.754,06	93,05	45.195,84	41.295,66	91,37	44.074,68	41.288,45	93,68
Belanja Barang	28.339,76	25.705,91	90,71	30.008,67	27.481,31	91,58	28.510,68	24.569,99	86,18
Belanja Bunga	20.549,85	18.066,14	87,91	22.492,78	19.077,11	84,81	23.406,75	18.558,28	79,29
Belanja Subsidi	25.770,04	24.422,82	94,77	26.792,35	24.336,63	90,83	2.664,84	2.431,87	91,26
Belanja Hibah	110,93	72,38	65,25	456,82	377,32	82,6	138,73	66,25	47,75
Belanja Bantuan Sosial	28,44	20,26	71,24	709,09	93,63	13,2	234	2,97	1,27
Belanja Bagi Hasil	6.263,12	6.199,60	98,99	4.642,78	4.246,85	91,47	7.473,37	5.615,59	75,14
Belanja Bant. Keuangan	343	403,8	117,73	471,61	426,25	90,38	2.286,26	2.619,53	114,58
Belanja Modal	4.648,97	5.228,39	112,46	5.358,66	5.244,33	97,87	4.573,91	2.128,07	46,53
Belanja Tidak Terduga	12.756,86	12.032,15	94,32	14.490,88	13.445,99	92,79	8.169,53	6.623,59	81,08
Surplus/Defisit	-3.979,33	396,81	-9,97	-5.585,60	3.602,66	-64,5	-7.712,05	1.649,68	-21,39
Pembiayaan	4.244,31	3.873,10	91,25	4.454,22	3.639,51	81,71	9.263,46	7.226,40	78,01
Penerimaan	5.201,12	4.666,38	89,72	5.712,93	4.867,42	85,2	10.810,63	7.799,12	72,14
Pengeluaran	956,82	793,28	82,91	1.259,71	1.227,91	97,48	721,86	572,72	79,34
SILPA	265,68	4.268,98	1606,83	-763,2	7.312,97	-958,2	1.508,06	8.876,08	588,58

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 82. PENDAPATAN PER PROVINSI PADA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



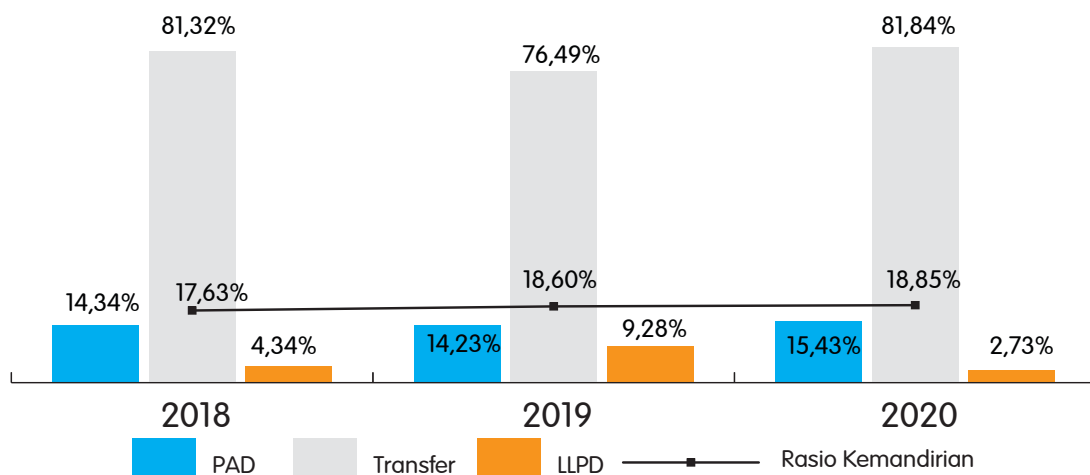
Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

membiayai kebutuhan anggaran belanja daerah. Pada tahun 2020, PAD di kawasan Sulawesi mencapai Rp16,28 triliun atau turun 1,14 persen dibandingkan tahun 2019. Namun Capaian tersebut mampu memberikan andil sebesar 15,43 persen dari total realisasi pendapatan daerah dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 14,34 persen dan capaian tahun 2019 sebesar 14,23 persen. Secara Ratio Kemandirian Kondisi juga menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dimana di tahun 2018 hanya sebesar 17,63%, tahun 2019 sebesar 18,60% dan tahun 2020 sebesar 18,85%. Dilihat per daerah, realisasi PAD di Sulawesi Selatan nampak mendominasi dengan kontribusi sebesar 50,02 persen selaras dengan kapasitas ekonominya yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi. Sumber PAD utama Sulawesi Selatan berasal dari Pajak

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Sementara itu, realisasi PAD Sulawesi Utara pada tahun 2020 turun sebesar 12,52 persen dibandingkan tahun 2019. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah perlu didorong agar realisasi PAD kembali menguat pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2020, realisasi Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat di regional Sulawesi tercatat sebesar Rp87,38 triliun atau setara 81,84 persen dari keseluruhan pendapatan APBD tahun 2019. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah di kawasan Sulawesi masih sangat tinggi meski tujuan TKDD salah satunya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Berdasarkan data, tingkat ketergantungan di wilayah Sulawesi masih lebih besar dibandingkan rasio pada tahun

GAMBAR 83. PENDAPATAN PER PROVINSI PADA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

2018 sebesar 81,32 persen dan tahun 2019 sebesar 76,49 persen. Sebagai gambaran, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah berhasil menekan tingkat ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer/Perimbangan dari 79,65 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,23 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, pemerintah daerah di Sulawesi Barat masih harus menggali potensi PAD mengingat rasio ketergantungan terhadap TKDD masih cukup besar meskipun terjadi penurunan dari 88,43 persen pada tahun 2019 menjadi 87,02 persen pada tahun 2020. Alokasi anggaran TKDD dari pemerintah pusat yang cenderung meningkat setiap tahunnya seiring kenaikan alokasi dasar Dana Desa harus diikuti dengan kenaikan realisasi PAD yang lebih progresif agar rasio ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer dapat diminimalkan.

Kelompok Pendapatan Lain-lain memberikan andil terkecil terhadap total realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi tahun 2020 yakni sebesar 7,99 persen. Total realisasi Pendapatan Lain-lain di wilayah Sulawesi tahun 2020 mencapai Rp2,88 triliun, menurun tajam dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10,74 triliun. Kondisi tersebut tidak terlepas dari realisasi Pendapatan Lain-lain di wilayah Sulawesi Tengah yang turun drastis pada tahun 2020 yang penurunannya realisasinya mencapai 86,74% dibandingkan periode sebelumnya.

2.IV.B. PERKEMBANGAN BELANJA REGIONAL SULAWESI

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang

menjadi kewenangan Pemerintah. Realisasi Belanja APBD lingkup Sulawesi pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai Rp103,90 triliun, menurun 4,84 persen dibandingkan dengan nilai realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp112,11 triliun. Penurunan nilai realisasi belanja APBD terjadi pada hampir semua jenis kecuali Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lainnya yang terkoreksi sebesar 0,35 persen. Porsi realisasi belanja daerah terbesar berada pada jenis Belanja Pegawai sebesar 39,74 persen, sedangkan belanja terkecil terdapat pada Belanja Modal dengan kontribusi sebesar 17,86 persen dari total realisasi belanja APBD regional Sulawesi tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa realisasi pendapatan APBD di daerah Sulawesi sebagian besar masih digunakan untuk belanja operasi dengan masa manfaat jangka pendek.

Selanjutnya apabila dilihat dari penyerapan pagu Belanja APBD, terjadi penurunan kinerja dari 90,33 persen pada tahun 2019 menjadi 85,50 persen pada tahun 2020. Sebagai contoh, pagu Belanja Modal tahun 2020 yang bertambah 4,06 persen dibandingkan pagu tahun sebelumnya tidak diiringi dengan peningkatan kinerja penyerapan yang justru mengalami penurunan dari 84,81 persen menjadi hanya sebesar 79,29 persen pada tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan total pagu belum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian kawasan Sulawesi dari sisi konsumsi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pemerintah.

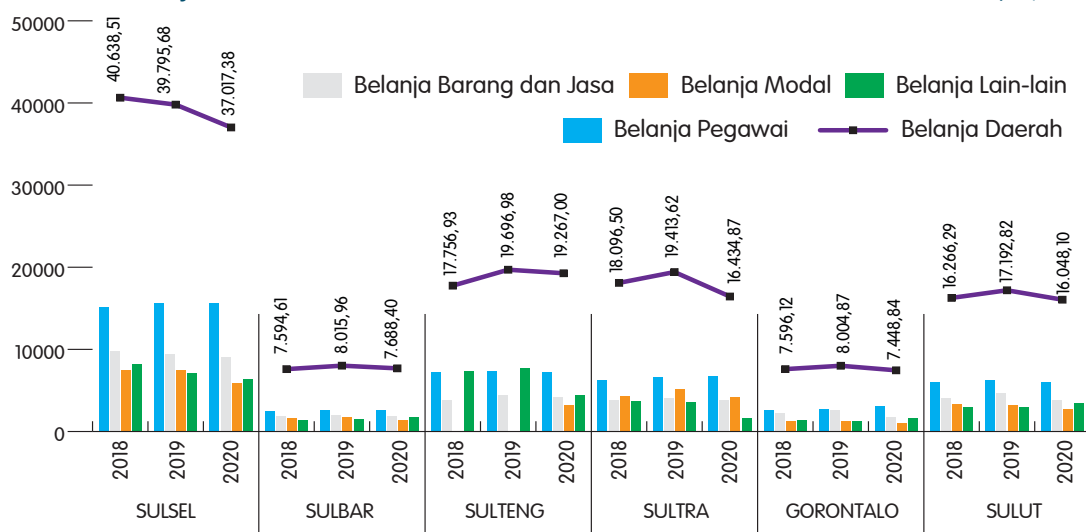
Ditinjau per daerah, nampak bahwa konsentrasi belanja daerah Sulawesi selaras dengan kapasitas fiskal masing-masing provinsi. Sulawesi Selatan

TABEL 50. REALISASI DAN RASIO PER JENIS BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018		2019		2020	
	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
1. Belanja Pegawai	39.754,06	30,14%	41.295,66	30,36%	41.288,45	39,74%
2. Belanja Barang	25.705,91	19,49%	27.481,31	20,20%	24.569,99	23,65%
3. Belanja Modal	18.066,14	13,70%	19.077,11	14,02%	18.558,28	17,86%
4. Belanja Tak terduga	24.422,82	18,52%	24.336,63	17,89%	2.431,87	2,34%
5. Belanja Bunga	72,38	0,05%	377,32	0,28%	66,25	0,06%
6. Belanja Subsidi	20,26	0,02%	93,63	0,07%	2,97	0,00%
7. Belanja Hibah	6.199,60	4,70%	4.246,85	3,12%	5.615,59	5,40%
8. Belanja Bantuan Sosial	403,80	0,31%	426,25	0,31%	2.619,53	2,52%
9. Belanja Bagi Hasil	5.228,39	3,96%	5.244,33	3,86%	2.128,07	2,05%
10. Belanja Bantuan Keuangan	12.032,15	9,12%	13.445,99	9,88%	6.623,59	6,37%
Total Belanja	31.905,52		136.025,07		103.904,59	

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 84. BELANJA DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



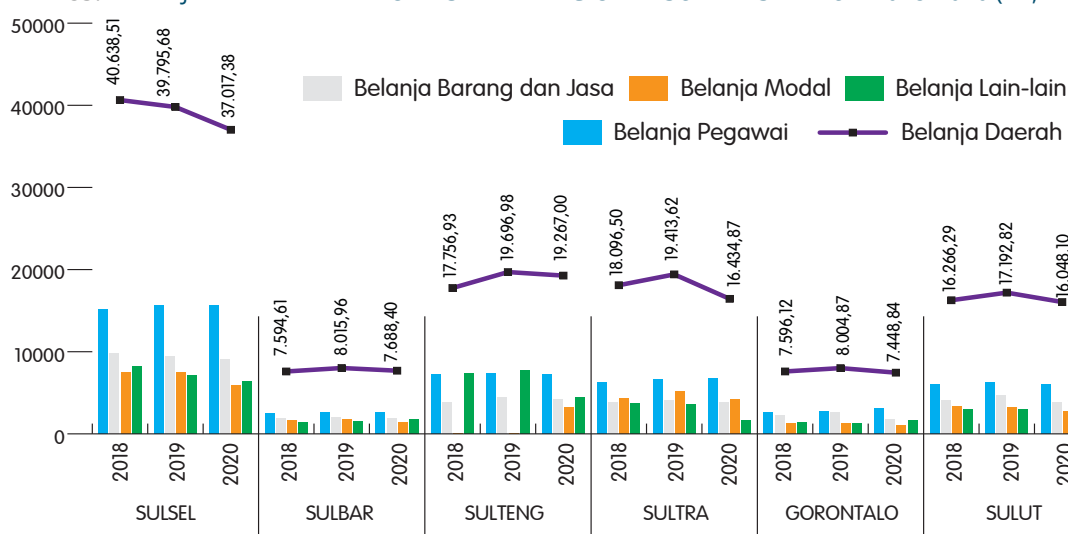
Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

dan Sulawesi Tengah dua kontributor terbesar dengan sumbangan sebesar 35,63 persen dan 18,54 persen dari total realisasi belanja APBD tahun 2020. Sebaliknya, realisasi belanja terkecil terdapat di daerah yang masih berkembang yakni Gorontalo dan Sulawesi Barat dengan andil sebesar 17,17 persen dan 7,40%. Meskipun berpotensi meningkatkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, alokasi Transfer Daerah/Perimbangan masih sangat diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan realisasi belanja terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan stimulus fiskal yang mendorong kemajuan pembangunan ekonomi daerah-daerah tersebut.

2.IV.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/ DEFISIT REGIONAL SULAWESI

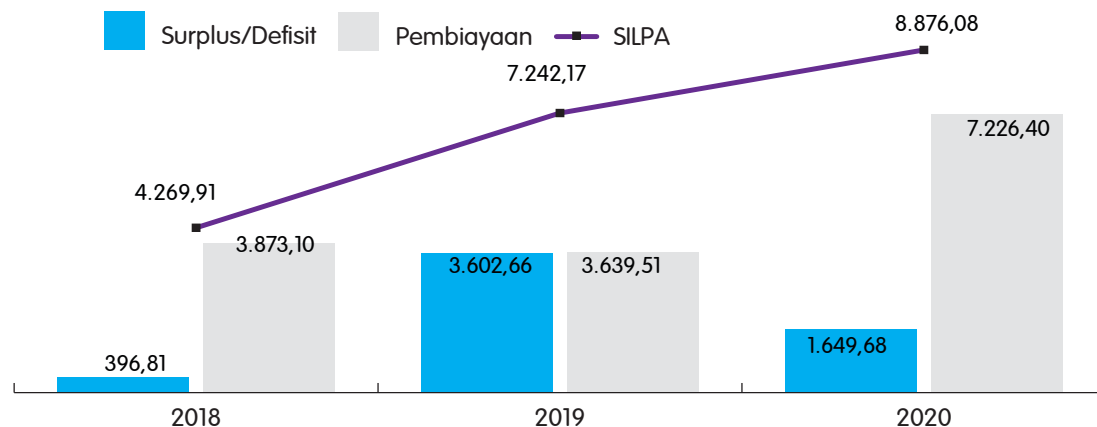
Surplus APBD regional Sulawesi tahun 2020 sebesar Rp1,64 triliun menunjukkan penurunan dibandingkan surplus pada tahun 2019 sebesar Rp3,60 triliun. Peningkatan surplus signifikan terjadi di Sulawesi Tenggara yang mengalami perubahan dari surplus sebesar Rp49,85 miliar menjadi surplus sebesar Rp1,39 triliun. Hal tersebut mengindikasikan adanya sumber daya keuangan daerah yang belum dioptimalkan untuk menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian dari komponen belanja pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya SILPA regional Sulawesi pada akhir tahun 2020 sebesar Rp8,87 triliun, meningkat dari SILPA tahun

GAMBAR 85. BELANJA DAERAH PER PROVINSI PADA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 86. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

sebelumnya sebesar Rp7,31 triliun.

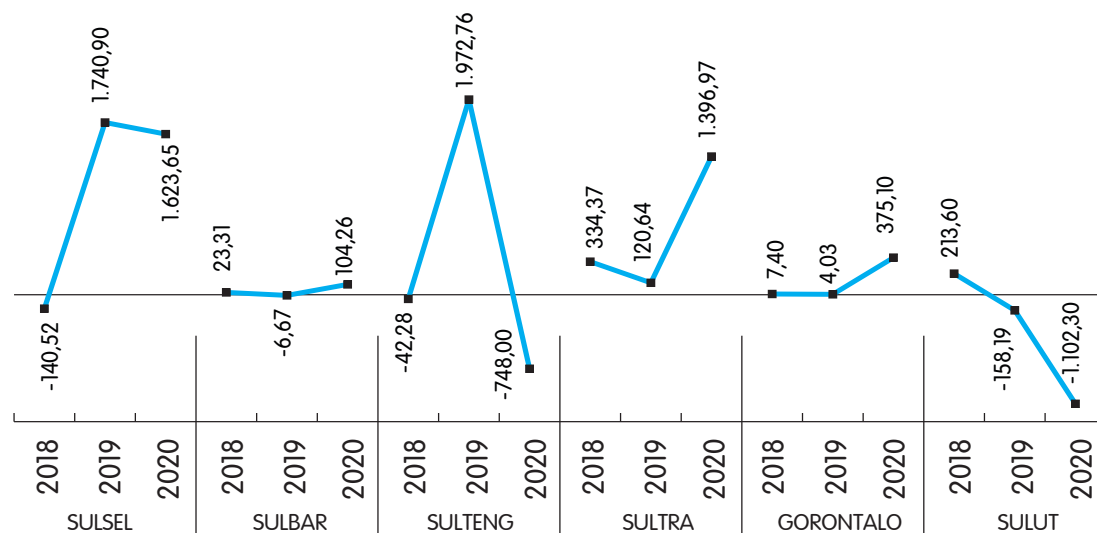
Realisasi APBD regional Sulawesi tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp1.649,68 miliar. Angka surplus ini lebih besar dari target dan dapat berarti positif jika dilihat dari presentase terhadap pagu serta perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja, karena target yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp7.712,05 miliar. Namun demikian, kondisi surplus tersebut juga dapat berarti negatif karena realisasi belanja yang rendah. Dari sisi pendapatan, kondisi surplus terjadi karena capaian realisasi pendapatan dibawah target yang ditetapkan, atau hanya mencapai angka 92,74 persen. Sementara itu, jika dilihat dari sisi belanja, kondisi surplus ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana sehingga membuat tingkat realisasi terhadap pagu yang rendah (77,57 persen), terutama karena situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020. Namun Secara umum kebijakan surplus APBD

di regional Sulawesi pada tahun 2020 sejalan dengan laju PDRB regional Sulawesi yang secara agregat mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2019. Namun demikian, kebijakan fiskal yang ditempuh di beberapa daerah belum selaras dengan kondisi perekonomian setempat. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pelaksanaan APBD tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan pemerintah semata namun juga memiliki misi untuk mengakselerasi laju perekonomian regional.

2.IV.D. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL SULAWESI

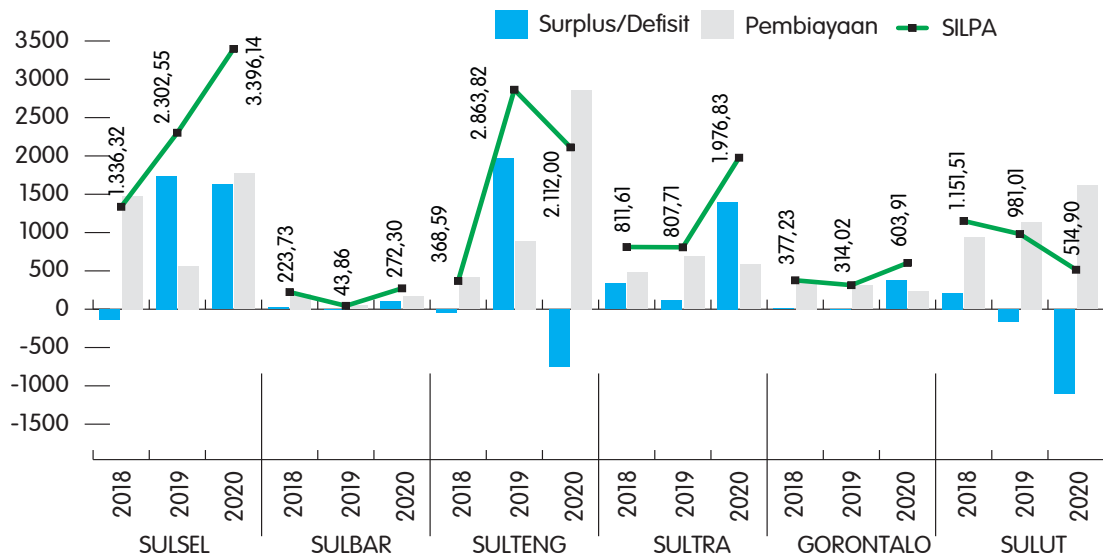
Pada tahun 2020, Pembiayaan Daerah regional Sulawesi secara total terealisasi sebesar Rp7,22 triliun atau meingkat 98,55 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,64 triliun. Pembiayaan terbesar pada tahun 2020 terdapat pada provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp2,86 triliun. Hal tersebut berhubungan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan yang turun

GAMBAR 87. SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAN SILPA APBD REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020 (RP; MILIAR)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 88. SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN REGIONAL SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

41,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih kecil dari laju realisasi Penerimaan Pembiayaan yang tumbuh sebesar 60,23 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa secara umum pemerintah daerah di lingkup Sulawesi telah memiliki kemampuan fiskal yang baik untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

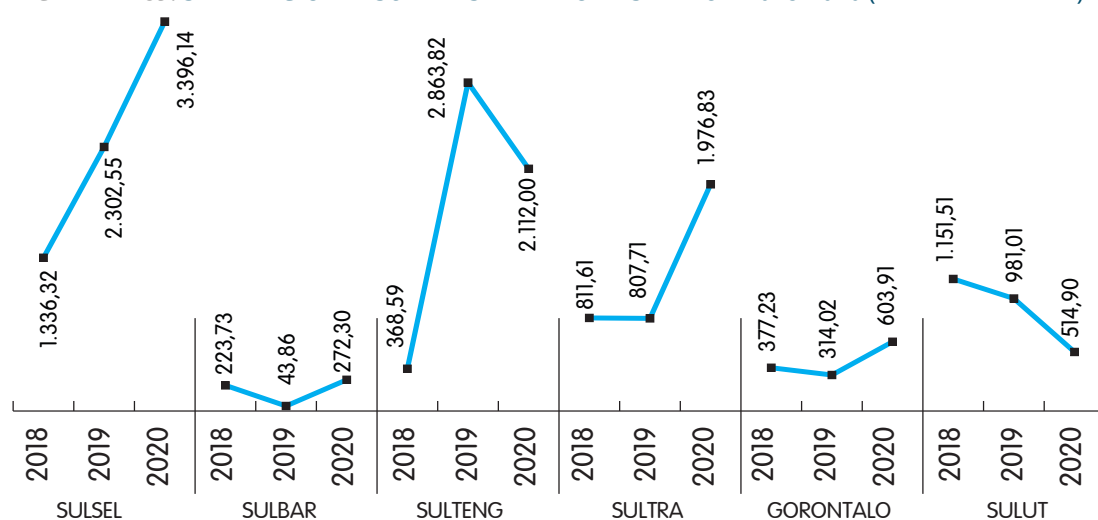
Struktur Penerimaan Pembiayaan regional Sulawesi tahun 2020 sebagian besar bersumber dari penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya sedangkan sisanya berasal dari penerimaan pinjaman daerah, dan pembiayaan lainnya. Di sisi lain, realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah mayoritas masih digunakan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pembiayaan kreatif perlu digalakkan di masa mendatang. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat diarahkan untuk menggerakkan perekonomian

di wilayahnya antara lain melalui partisipasi dalam pembiayaan UMi. Selain mendapatkan timbal balik penerimaan di masa mendatang, langkah tersebut akan mendorong kemajuan UMKM dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.V. REGIONAL BALI – NUSRA

Selama periode 2018 s.d. 2020, target pendapatan daerah pada Regional Bali Nusa Tenggara mengalami fluktuasi. Dalam menetapkan target pendapatan untuk Tahun 2019, pemerintah daerah pada Regional Bali Nusra optimistik dengan menetapkan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 3,2 persen, dari semula Rp74,2 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 76,6 Triliun. Namun, dampak pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah daerah menurunkan target pendapatan untuk menyesuaikan dengan keadaan perekonomian,

GAMBAR 89. SILPA REGIONAL SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

TABEL 51. REALISASI APBD REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)

URAIAN	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	74.279,47	68.650,76	92,42	76.668,65	74.390,30	97,03	73.884,32	65.480,74	88,63
PAD	19.614,54	16.938,63	86,36	19.347,97	18.573,50	96,00	16.202,33	13.862,59	85,56
Pendapatan Transfer	49.178,42	47.217,70	96,01	52.072,30	50.761,13	97,48	49.961,09	44.156,73	88,38
LLPD yang sah	5.486,51	4.494,43	81,92	5.248,38	5.055,67	96,33	7.720,90	7.461,42	96,64
Belanja	79.313,64	69.491,60	87,62	81.208,20	73.497,70	90,51	70.594,90	66.088,30	93,62
Belanja Pegawai	26.954,16	25.247,59	93,67	27.852,60	25.976,58	93,26	25.269,28	24.398,56	96,55
Belanja Barang	18.683,40	14.996,95	80,27	18.893,03	17.077,15	90,39	17.661,21	16.795,64	95,10
Belanja Bunga	14,44	13,44	93,11	13,01	11,62	89,32	20,65	20,49	99,23
Belanja Subsidi	19,53	15,34	78,54	22,94	16,57	72,23	13,15	12,03	91,48
Belanja Hibah	6.777,29	6.796,46	100,28	6.502,68	5.894,71	90,65	5.170,59	4.672,08	90,36
Belanja Bantuan Sosial	819,14	973,02	118,79	784,14	1.125,81	143,57	576,96	385,16	66,76
Belanja Bagi Hasil	3.390,44	2.686,50	79,24	4.196,93	2.994,69	71,35	4.170,70	3.811,44	91,39
Belanja Bant. Keuangan	8.108,24	7.044,75	86,88	8.384,67	8.093,64	96,53	5.894,56	5.482,83	93,02
Belanja Modal	14.408,57	11.662,39	80,94	14.430,73	12.262,15	84,97	9.402,68	8.697,61	92,50
Belanja Tidak Terduga	138,44	55,15	39,84	127,47	44,79	35,13	2.415,12	1.812,46	75,05
Surplus/Defisit	(5.034,17)	(840,83)	16,70	(4.539,55)	892,60	(19,66)	3.289,42	(607,56)	(18,47)
Pembiayaan	5.777,13	5.415,30	93,74	4.079,22	3.891,06	95,39	4.615,48	4.452,88	96,48
Penerimaan	6.087,06	5.714,59	93,88	4.457,44	4.311,99	96,74	4.982,70	4.817,93	96,69
Pengeluaran	309,93	299,29	96,57	378,21	420,93	111,29	367,22	365,05	99,41
SILPA	742,96	4.574,47	615,71	(460,33)	4.783,66	(1.039,19)	7.904,90	3.845,32	48,64

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

sehingga target pendapatan pada Tahun 2020 menurun sebesar 3,2 persen menjadi Rp73,8 triliun.

Dari sisi belanja, alokasi Belanja dalam APBD pada Regional Bali Nusa Tenggara juga mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat alokasi belanja mencapai Rp79,3 triliun dan meningkat sebesar 2 persen menjadi Rp81,2 triliun pada tahun 2019. Namun, seiring dengan penurunan pada target pendapatan di Tahun 2020, belanja daerah dialokasikan menurun sebesar 13 persen menjadi sebesar Rp70,5 triliun, sebagai bentuk upaya penghematan oleh pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan total alokasi belanja APBD secara nasional yang mencapai Rp1.203,59 triliun di Tahun 2020, maka porsi alokasi belanja daerah pada regional Nusa Tenggara Timur mencapai 5,5 persen dari total alokasi belanja APBD secara nasional.

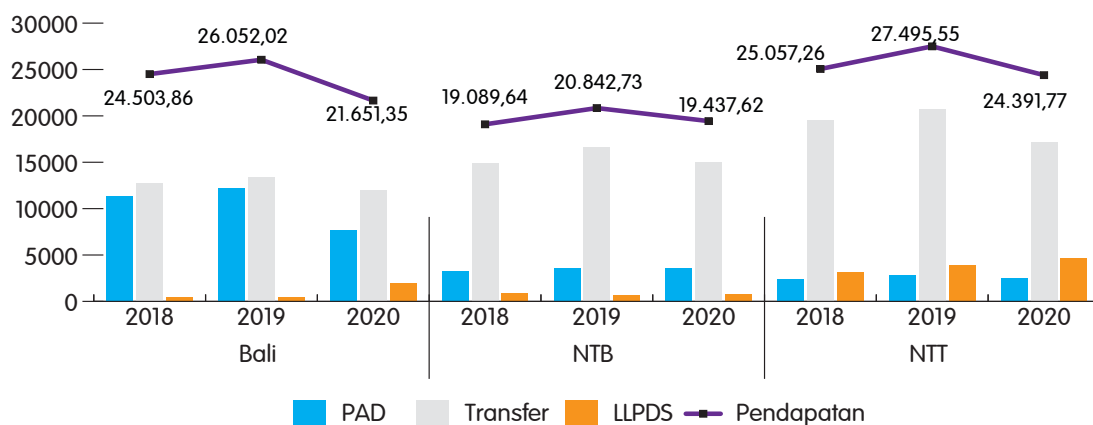
2.V.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL BALI NUSRA

Selama periode 2018 s.d 2020, realisasi pendapatan daerah pada regional Bali Nusa Tenggara Tahun

2019 tercatat mengalami kenaikan sebesar 4,6 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 8,4 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, atau mencapai Rp65,4 triliun. Hal ini disebabkan oleh turunnya dua komponen utama dalam pendapatan daerah yaitu PAD dan Pendapatan Transfer, meskipun instrumen Lain-Lain PD yang Sah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi pendapatan APBD pada regional Bali Nusa Tenggara pada periode selama 3 tahun terakhir secara rata-rata terealisasi sebesar 93 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 96 persen. Rata-rata realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada Provinsi NTB yaitu sebesar 96%, diikuti dengan Provinsi Bali sebesar 93 persen, dan terendah pada Provinsi NTT dengan realisasi sebesar 91 persen.

Pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari 3 instrumen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Instrumen Pendapatan Transfer masih menjadi yang terbesar dalam pelaksanaan APBD pada Regional Bali Nusra dengan rata-rata proporsi Pendapatan Transfer per

GAMBAR 90. SILPA REGIONAL SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

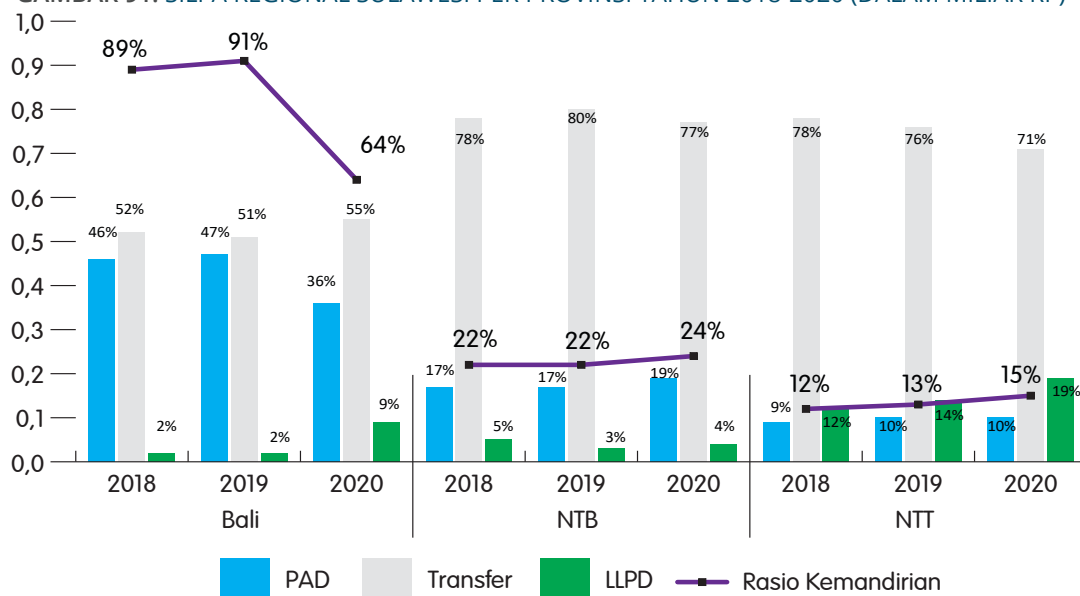
total Pendapatan Daerah selama periode 2018 s.d. 2020 mencapai 68 persen, sedangkan instrumen PAD dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah masing-masing sebesar 24 persen dan 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah di regional Bali Nusa masih cukup tinggi karena masih bertumpu pada sumber dana dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2020, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada regional Bali Nusa Tenggara mencapai Rp13,86 triliun atau 85,5 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut turun sebesar Rp4,71 triliun dibandingkan tahun 2019. Realisasi PAD tertinggi pada tahun 2020 dimiliki Provinsi Bali dengan Rp7,70 triliun kemudian diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3,63 triliun dan Prov. Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,52 triliun.

Untuk Pendapatan transfer, rata-rata persentase realisasinya tercatat sebesar 93,9 persen selama periode 2018 s.d 2020. Realisasi Pendapatan Transfer tertinggi pada tahun 2020 diperoleh Provinsi NTT dengan Rp17,2 triliun kemudian diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp15 triliun dan Prov. Bali sebesar Rp11,9 triliun.

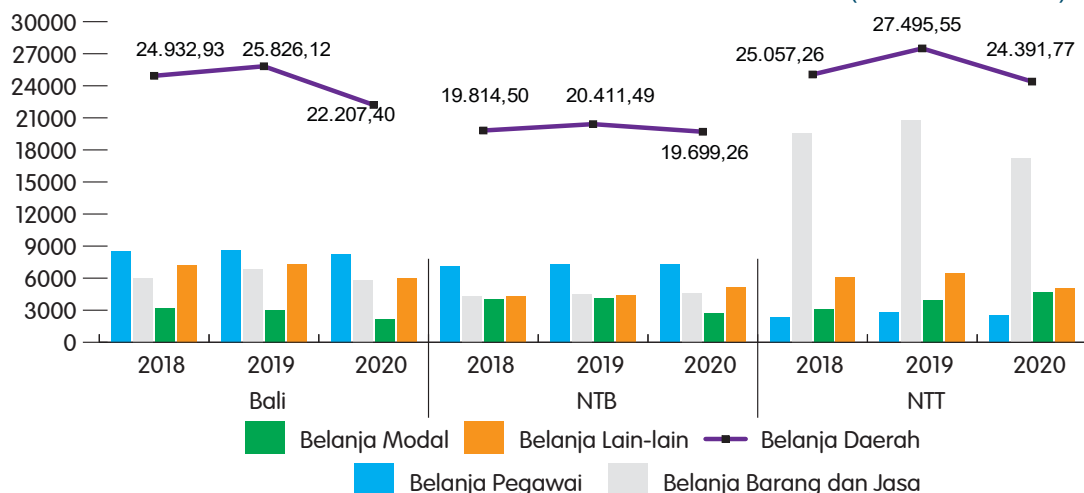
Sementara itu, untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada periode tahun 2018 s.d 2020, tercatat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Setelah hanya terealisasi sebesar Rp4,49 triliun pada tahun 2018 secara total di Regional Bali Nusa, nilai ini meningkat sebesar Rp5,05 triliun di 2019, dan mencapai Rp7,46 triliun pada tahun 2020.

GAMBAR 91. SILPA REGIONAL SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 92. SILPA REGIONAL SULAWESI PER PROVINSI TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

2.V.B. PERKEMBANGAN BELANJA REGIONAL BALI NUSRA

Selama periode 2018 s.d. 2020, komponen belanja pegawai masih memiliki porsi paling besar terhadap total belanja dengan rata-rata porsi sebesar 36 persen, diikuti dengan belanja barang dan jasa sebesar 23 persen, dan belanja modal sebesar 16 persen. Sedangkan, belanja lain-lain dengan porsi alokasi sebesar 25 persen dari total belanja daerah, terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pada tahapan realisasinya, pada periode 2018 s.d 2020, secara rata-rata tingkat realisasi belanja daerah pada regional Bali Nusa Tenggara mampu mencapai 91 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 86 persen. Rata-rata realisasi belanja APBD tertinggi terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 93 persen

yang kemudian diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 92 persen dan terendah terjadi pada Provinsi Bali yakni sebesar 87 persen.

2.V.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/ DEFISIT REGIONAL BALI NUSRA

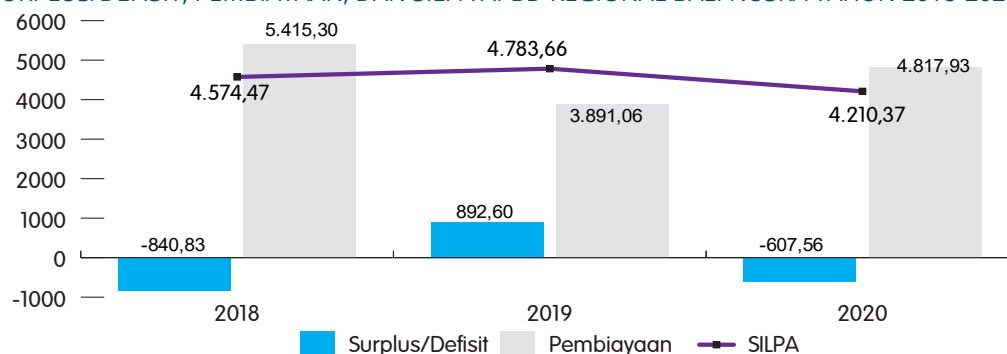
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, setelah mengalami defisit pada tahun 2018, regional Bali Nusa Tenggara tercatat mengalami surplus pada tahun 2019 dengan nilai Rp892,6 miliar. Namun, adanya pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 berimbas pada menurunnya pendapatan daerah sehingga pendapatan daerah tidak mampu mengimbangi besarnya belanja daerah dan mengakibatkan defisit APBD dengan besaran defisit mencapai Rp607,56. Namun, adanya pembiayaan netto yang positif selama periode 2018 s.d. 2020, menghasilkan SILPA dengan nilai rata-rata sebesar Rp4.401 miliar per tahun.

TABEL 52. REALISASI DAN RASIO PER JENIS BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018		2019		2020	
	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
1. Belanja Pegawai	25.247,59	36,3%	25.976,58	35,3%	24.398,56	36,9%
2. Belanja Barang dan Jasa	14.996,95	21,6%	17.077,15	23,2%	16.795,64	25,4%
3. Belanja Bunga	13,44	0,0%	11,62	0,0%	20,49	0,0%
4. Belanja Subsidi	15,34	0,0%	16,57	0,0%	12,03	0,0%
5. Belanja Hibah	6.796,46	9,8%	5.894,71	8,0%	4.672,08	7,1%
6. Belanja Bantuan Sosial	973,02	1,4%	1.125,81	1,5%	385,16	0,6%
7. Belanja Bagi Hasil	2.686,50	3,9%	2.994,69	4,1%	3.811,44	5,8%
8. Belanja Bantuan Keuangan	7.044,75	10,1%	8.093,64	11,0%	5.482,83	8,3%
9. Belanja Modal	11.662,39	16,8%	12.262,15	16,7%	8.697,61	13,2%
10. Belanja Tidak Terduga	55,15	0,1%	44,79	0,1%	1.812,46	2,7%
Total Belanja	69.491,60		73.497,70		66.088,30	

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 93. SURPLUS/DEFISIT, PEMBIAYAAN, DAN SILPA APBD REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

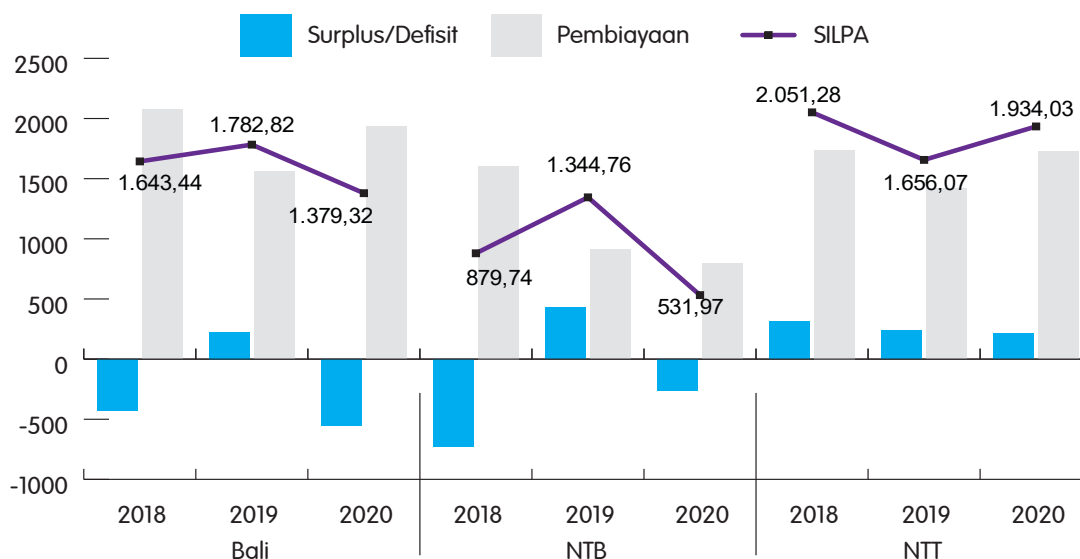
2.V.D. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL BALI NUSRA

Jika diamati berdasarkan provinsi pada Regional Bali Nusra, surplus APBD Regional Bali Nusra pada Tahun 2019 dikarenakan seluruh provinsi memperoleh surplus, yaitu Provinsi Bali dengan nilai sebesar Rp226 miliar dan Provinsi NTT sebesar 431 miliar serta Provinsi NTB sebesar Rp235 miliar. Namun, pada Tahun 2020, Provinsi Bali dan NTT mengalami defisit APBD yang cukup signifikan sehingga berimbas kepada besarnya

defisit APBD secara regional.

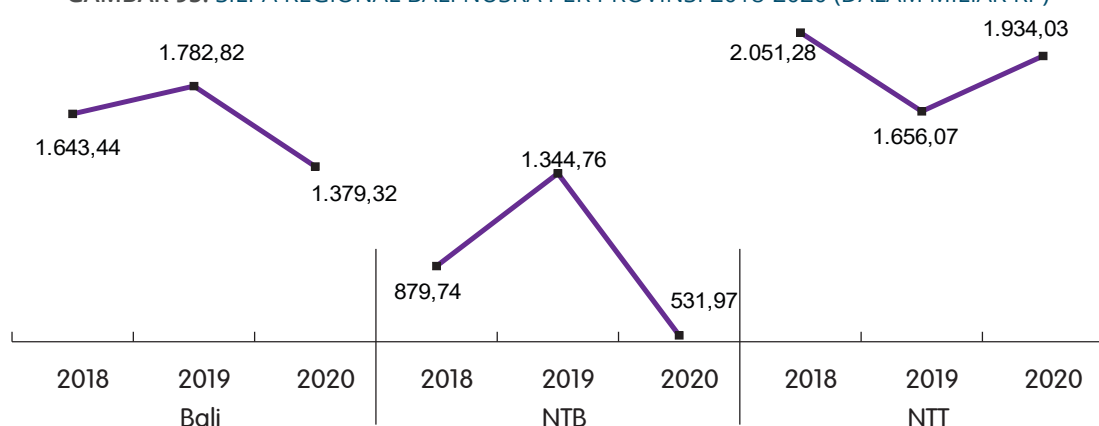
Lebih lanjut, rata-rata realisasi pembiayaan netto Regional Bali Nusra selama tiga tahun terakhir mencapai 95 persen dari alokasi yang ditetapkan. Pada tahun 2020 pembiayaan netto terbesar berada pada Provinsi Bali sebesar Rp1.935 miliar, diikuti dengan Provinsi NTT sebesar Rp1.724 miliar dan NTB sebesar Rp794 miliar. Pembiayaan netto yang cukup besar dan positif mampu menghasilkan SILPA yang positif bagi APBD setiap provinsi di Regional Bali Nusra per tahunnya, meskipun pada

GAMBAR 94. SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN REGIONAL BALI NUSRA PER PROVINSI TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 95. SILPA REGIONAL BALI NUSRA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

TABEL 53. REALISASI APBD REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	96,261.37	95,763.36	99.48	111,418.94	105,046.60	94.28	105,421.73	88,775.39	84.21%
PAD	6,653.21	4,699.99	70.64	6,665.00	6,066.92	91.03	6,715.47	5,056.70	75.30%
Pendapatan Transfer	81,825.81	83,815.90	102.43	100,895.92	95,518.01	94.67	94,900.24	82,579.70	87.02%
LLPD yang sah	7,782.35	7,247.47	93.13	3,858.02	3,461.67	89.73	3,806.02	1,138.99	29.93%
Belanja	106,089.16	91,819.60	86.55	111,881.58	98,621.65	88.15	113,922.26	88,364.49	77.57%
Belanja Pegawai	26,031.01	21,077.65	80.97	28,542.66	21,773.79	76.29	29,566.20	23,892.06	80.81%
Belanja Barang	27,175.60	26,391.42	97.11	29,791.85	28,542.59	95.81	27,208.28	22,359.15	82.18%
Belanja Bunga	91.56	44.96	49.10	118.73	62.09	52.30	556.57	136.23	24.48%
Belanja Subsidi	146.62	158.87	108.36	134.64	109.52	81.34	138.22	113.61	82.20%
Belanja Hibah	6,352.19	6,539.71	102.95	4,731.15	5,151.78	108.89	9,049.68	6,991.31	77.25%
Belanja Bantuan Sosial	1,584.21	1,597.09	100.81	1,320.57	1,992.56	150.89	1,348.79	1,441.60	106.88%
Belanja Bagi Hasil	1,529.41	672.09	43.94	2,859.92	3,147.10	110.04	4,028.40	3,822.89	94.90%
Belanja Bant. Keuangan	18,509.92	14,683.75	73.99	17,704.68	16,693.41	94.29	17,306.01	10,734.02	62.02%
Belanja Modal	24,471.20	20,484.79	83.71	26,426.59	20,901.93	79.09	22,489.12	16,845.45	74.90%
Belanja Tidak Terduga	197.45	169.28	85.73	250.78	246.88	98.45	2,230.98	2,023.17	90.69%
Surplus/Defisit	-9,827.79	3,943.76	-40.13	-462.64	6,424.95	-1,388.75	-8,500.53	410.90	-4.83%
Pembiayaan	5,768.90	4,339.34	75.22	3,683.96	4,524.03	122.80	8,189.92	8,136.90	99.35%
Penerimaan	7,453.11	5,736.04	76.96	5,317.93	6,927.00	130.26	10,065.71	9,272.15	92.12%
Pengeluaran	1,684.21	1,396.70	82.93	1,633.97	2,402.97	147.06	1,875.79	1,135.25	60.52%
SILPA	-4,058.89	8,283.10	-204.07	3,221.32	10,948.98	339.89	-310.61	8,547.80	-2751.94%

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

tahun tertentu APBD mengalami defisit. Namun, hal ini juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah di Regional Bali Nusra masih membutuhkan pembiayaan untuk mengimbangi belanja yang kerap melebihi pendapatan yang dihasilkan.

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Target pendapatan APBD tahun 2020 seluruh pemerintah daerah di regional Maluku-Papua mengalami penurunan 5.38 persen dari Rp111,418.94 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp105,421.7 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh turunnya target pendapatan transfer, terutama pada provinsi Papua Barat. Sebaliknya, total alokasi belanja APBD pemerintah daerah pada regional Maluku-Papua justru mengalami kenaikan 1.82 persen dari Rp111,881.58 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp113,922.3 miliar di tahun 2020. Peningkatan pagu belanja tersebut berasal dari lonjakan yang sangat signifikan pada besaran pagu belanja tidak terduga untuk menyediakan anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020.

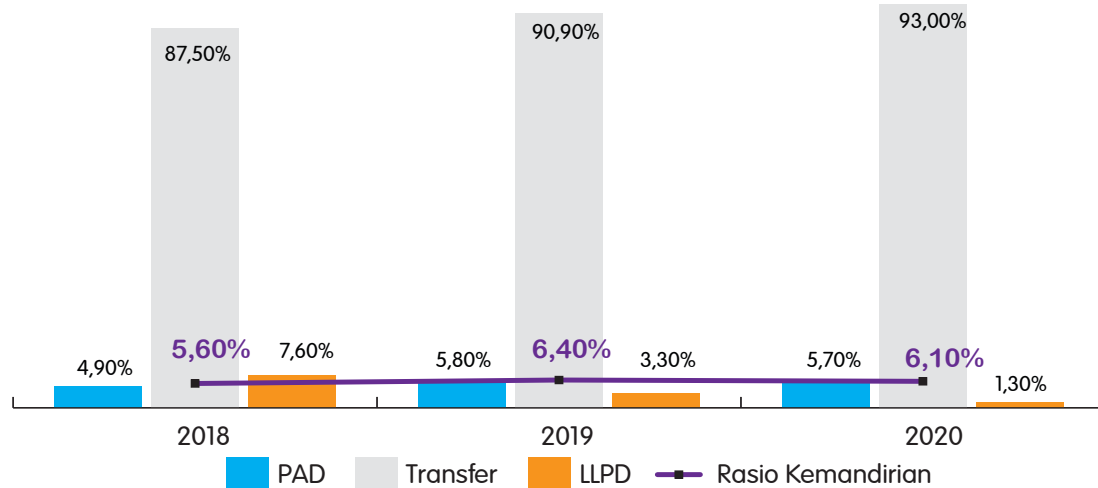
Apabila dilihat realisasinya, sampai dengan akhir

tahun 2020, total pendapatan APBD regional Maluku-Papua mencapai Rp88,775.39 miliar atau turun 15.49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp105,046.60 miliar. Penurunan pada total pendapatan ini merupakan konsekuensi dari turunnya setiap komponen pendapatan dalam APBD. Secara nominal, komponen Pendapatan Transfer menjadi pendorong terbesar penurunan pendapatan, dengan kemerosotan realisasi sebesar 13.55 persen dari Rp95,518.01 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp82,579.70 miliar pada tahun 2020. Hal serupa terjadi pada aspek belanja, terdapat penurunan realisasi sebesar 10.40 persen yaitu dari Rp98,621.65 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp88,364.49 miliar pada tahun 2020. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi pendapatan dan belanja tersebut, diantaranya adalah situasi pandemik COVID-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan penurunan aktivitas pemerintah daerah.

2.VI.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL MALUKU-PAPUA

Realisasi pendapatan APBD Regional

GAMBAR 96. SILPA REGIONAL MALUKU PAPUA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

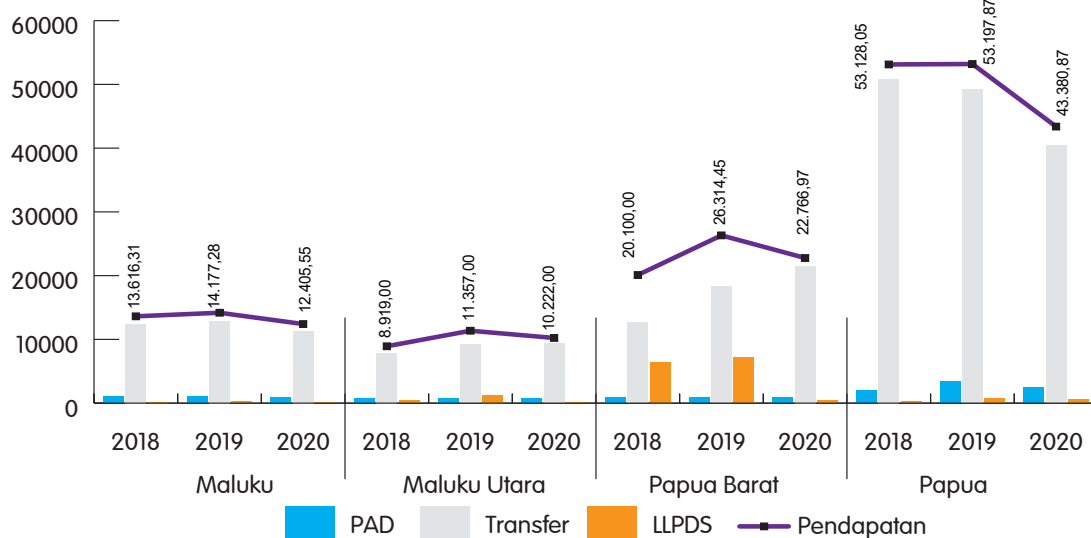
Maluku-Papua pada tahun 2020 sebesar Rp88.775,39 miliar, atau terdepresiasi 15.49 persen dari tahun 2019. Secara agregat, pendapatan APBD hanya dapat tercapai 84,21 persen dibanding target yang ditetapkan, atau lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya di angka 94.28 persen terhadap target dalam APBD. Secara kumulatif, semua komponen pendapatan dalam APBD regional mengalami penurunan. Dari sisi nominal, berikut ini urutan jenis pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar penurunan realisasi di Tahun 2020, yaitu: (1) Pendapatan Transfer, (2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan (3) Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp.12,938.31 Miliar atau 13.55 persen di banding tahun sebelumnya. Selanjutnya, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.2,322.68 Miliar atau 67.10 persen di banding tahun sebelumnya. Terakhir, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.1,010.22 Miliar atau 16.65 persen di banding tahun sebelumnya. Secara umum, penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan aktivitas perekonomian masyarakat akibat pandemik COVID-19 dan kebijakan pemotongan pagu TKDD dari pemerintah pusat, serta perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa langsung ke rekening kas desa yang membuat realisasi dana desa tidak dicatat oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tingkat kontribusi/komposisi pada sisi pendapatan, secara agregat di tingkat regional, realisasi pendapatan pada tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang

mencapai 93.02 persen dari total pendapatan, sedangkan realisasi PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 5.70 persen (Rp5,056.70 miliar) namun masih lebih besar dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1.28 persen (Rp1,138.99 miliar). Tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mengindikasikan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di regional Maluku-Papua terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Melihat perkembangan rasio kemandirian daerah (yaitu, perbandingan nilai PAD dengan Pendapatan Transfer), maka terlihat bahwa tidak terdapat perubahan atau bahkan perbaikan kemandirian keuangan daerah selama 3 tahun terakhir, karena nilainya yang cenderung dalam kisaran yang sama sepanjang tahun 2018-2020. Rasio kemandirian keuangan daerah regional Maluku-Papua pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 6.1 persen setelah sempat naik pada tahun sebelumnya (6.4 persen).

Pada regional Maluku-Papua, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan nilai pendapatan daerah terbesar dengan proporsi mencapai 48.9 persen dari total pendapatan di regional Maluku-Papua, disusul oleh Provinsi Papua Barat (25.6 persen), Maluku (14.0 persen), dan Maluku Utara (11.5 persen). Bila diuraikan, besarnya pendapatan pada Provinsi Papua tersebut sebagian besar (>90 persen) berupa pendapatan transfer. Terdapat sesuatu yang menarik terkait dengan porsi pendapatan transfer di regional Maluku dan Papua ini dibandingkan dengan regional lainnya. Nilai/porsi pendapatan transfer pada provinsi yang berada

GAMBAR 97. SILPA REGIONAL MALUKU PAPUA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

di Pulau Papua (yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat) jauh lebih besar dibandingkan provinsi yang berada di Kepulauan Maluku (yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara). Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan dana otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat, tetapi tidak dimiliki Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dari sisi kombinasi struktur pendapatan, maka terdapat pola yang sama untuk semua provinsi di regional Maluku-Papua, dengan menempatkan pendapatan transfer sebagai kontributor utama, disusul Pendapatan Asli Daerah di posisi kedua, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah di posisi terakhir.

Pada tahun 2020, setiap provinsi di regional Maluku-Papua cenderung memiliki perbandingan persentase komponen pendapatan daerah yang relatif sama. Hal tersebut semakin terlihat setelah terdapat perubahan trend pada komponen Lain Lain Pendapatan yang Sah di Provinsi Papua Barat di Tahun 2020 yang tercatat mengalami penurunan dan berbeda dengan kondisi 2 tahun terakhir yang bernilai signifikan dan mengalami kenaikan karena adanya peningkatan sumber pendanaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018-2019.

Secara umum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2020, seluruh komponen pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian, bila ditelaah lebih dalam ke komponen pendapatan di setiap provinsi, ternyata masih ditemukan

komponen pendapatan yang mengalami kenaikan atau pertumbuhan positif, yaitu pada komponen pendapatan transfer di Provinsi Maluku Utara, serta komponen Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Barat. Kenaikan pendapatan transfer di Provinsi Maluku Utara dipicu oleh kenaikan signifikan dari pendapatan Dana Bagi Hasil sebagai efek dari kenaikan pendapatan perpajakan dari aktivitas pertambangan di wilayah Maluku Utara terkait dengan telah beroperasinya beberapa smelter yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kenaikan pendapatan asli daerah pada provinsi Papua Barat dianggap normal, karena merupakan re-bound atas penurunan yang terjadi di Tahun 2019 lalu dan dikontribusikan oleh adanya sedikit kenaikan pada aspek pajak dan retribusi daerah.

2.VI.B. PERKEMBANGAN BELANJA REGIONAL MALUKU-PAPUA

Belanja pemerintah daerah regional Maluku-Papua tahun 2020 terealisasi sejumlah Rp88,364.49 miliar atau turun 10.40 persen dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan kinerja belanja dari sisi nominal sejalan dengan kinerja realisasi belanja daerah dari sisi persentase yang menunjukkan penurunan juga. Kinerja realisasi belanja daerah (APBD) regional Maluku-Papua tahun 2020 tercatat sebesar 77.57 persen dari total pagu Rp113,922.26 miliar atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 88.15 persen. Penurunan kinerja realisasi belanja daerah di regional Maluku-Papua dipicu oleh penurunan kinerja realisasi belanja barang, belanja bantuan sosial, belanja bantuan

TABEL 54. REALISASI DAN RASIO PER JENIS BELANJA REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2018-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN		2018		2019		2020	
		Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio	Realisasi	Rasio
1.	Belanja Pegawai	21,077.65	23.0%	21,773.79	22.1%	23,892.06	27.0%
2.	Belanja Barang	26,391.42	28.7%	28,542.59	28.9%	22,359.15	25.3%
3.	Belanja Bunga	44.96	0.0%	62.09	0.1%	136.23	0.2%
4.	Belanja Subsidi	158.87	0.2%	109.52	0.1%	113.61	0.1%
5.	Belanja Hibah	6,539.71	7.1%	5,151.78	5.2%	6,991.31	7.9%
6.	Belanja Bantuan Sosial	1,597.09	1.7%	1,992.56	2.0%	1,441.60	1.6%
7.	Belanja Bagi Hasil	672.09	0.7%	3,147.10	3.2%	3,822.89	4.3%
8.	Belanja Bantuan Keuangan	14,683.75	16.0%	16,693.41	16.9%	10,734.02	12.1%
9.	Belanja Modal	20,484.79	22.3%	20,901.93	21.2%	16,850.45	19.1%
10.	Belanja Tidak Terduga	169.28	0.2%	246.88	0.3%	2,023.17	2.3%
Total Belanja		91,819.60		98,621.65		88,364.49	

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

keuangan dan belanja modal baik dari sisi nominal maupun persentase. Sementara itu, belanja pegawai dan belanja subsidi mengalami kenaikan, namun secara agregat nilainya tidak cukup mampu mengkompensasi penurunan kinerja pada jenis belanja lainnya.

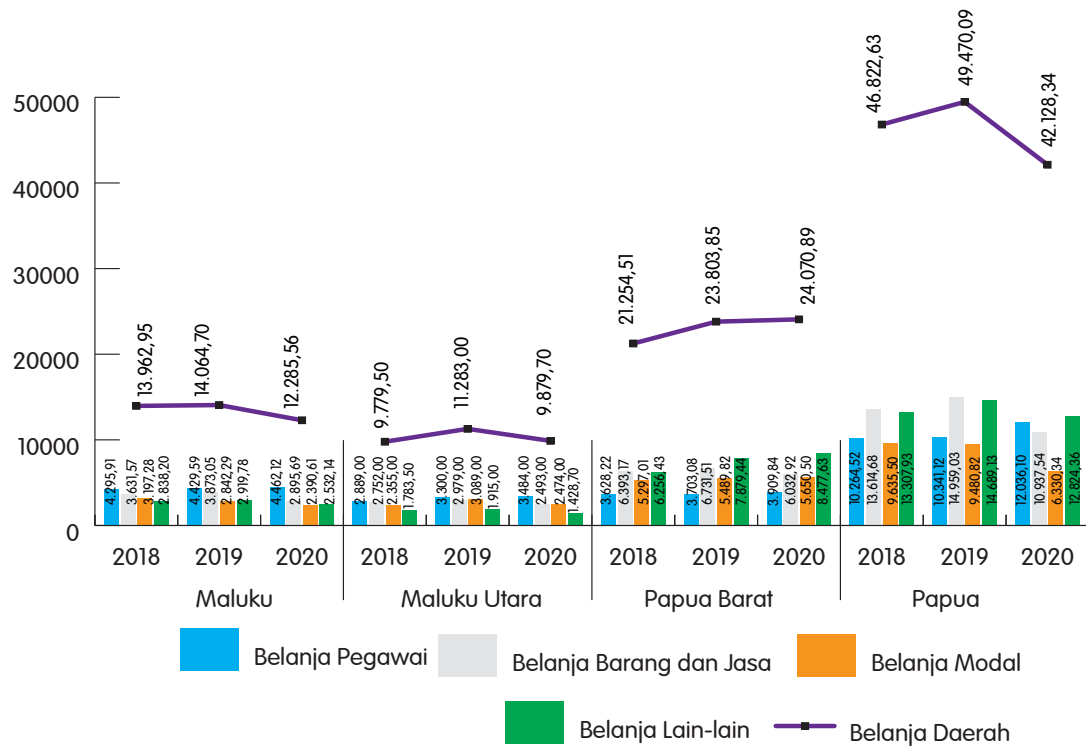
Secara agregat, nilai penurunan realisasi dan kinerja pada beberapa jenis belanja daerah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya dan berdampak besar terhadap rendahnya kinerja belanja daerah secara keseluruhan. Berdasarkan nominalnya, jenis belanja dengan penurunan realisasi signifikan dapat diurutkan sebagai berikut: (i) Belanja Barang, dengan penurunan sebesar Rp.6,183.44 Milyar atau turun 21.66% dibanding tahun sebelumnya; (ii) Belanja Bantuan Keuangan, dengan penurunan Rp.5,959.39 Milyar atau turun 35.70% dibanding tahun sebelumnya; dan (iii) Belanja Modal, dengan penurunan Rp.4,056.48 Milyar atau turun 19.41% dibanding tahun sebelumnya.

Secara rasio, realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2020 mengalami sedikit perubahan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, belanja barang bukan lagi menjadi jenis belanja dengan kontribusi/proporsi terbesar dalam realisasi belanja daerah. Posisinya digantikan oleh belanja pegawai sebagai dampak dari penurunan aktivitas/kegiatan pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19. Perbedaan yang nyata juga tampak dari kenaikan yang cukup signifikan dari rasio belanja tidak terduga terhadap total belanja yang mengalami kenaikan dari 0.3

persen menjadi 2.3 persen yang dipergunakan pemda untuk penanganan COVID-19 dan PEN di daerah. Secara berurutan, komposisi belanja dari yang terbesar ke yang terkecil kontribusinya terhadap total belanja APBD di regional Maluku-Papua pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal; (iv) belanja bantuan keuangan; dan (v) belanja lainnya yang meliputi belanja hibah, bagi hasil, tidak terduga, bansos, bunga, serta subsidi.

Pada tingkat provinsi di regional Maluku-Papua, setiap provinsi cenderung memiliki tingkat kontribusi dari masing-masing jenis belanja dengan nilai yang berbeda. Jika pada provinsi Maluku dan Maluku Utara belanja pegawai merupakan belanja dengan tingkat kontribusi yang tertinggi (rata-rata di atas 30 persen), maka pada provinsi Papua dan Papua Barat justru belanja barang yang menjadi jenis belanja dengan tingkat kontribusi yang tertinggi (rata-rata antara 27-28 persen) sepanjang tahun 2018-2019. Kondisi ini menunjukkan adanya fokus pelaksanaan belanja daerah yang berbeda. Jika pada provinsi Maluku dan Maluku Utara, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN, maka pada provinsi Papua dan Papua Barat fokus belanja pada pengeluaran yang mendorong perekonomian serta belanja yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari nilai dan proporsi jenis belanja modal dan belanja lain-lain (terutama belanja bantuan keuangan dan hibah) pada belanja daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang cukup materiil dibandingkan daerah lainnya. Dengan

GAMBAR 98. SILPA REGIONAL MALUKU PAPUA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



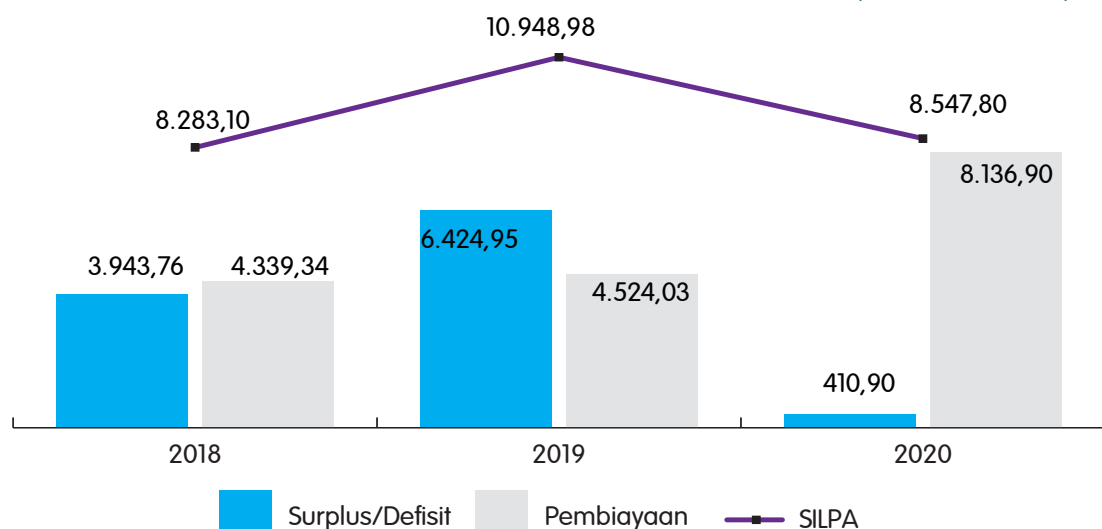
Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

kondisi ini, maka rasio belanja modal di Provinsi Maluku dan Maluku Utara perlu ditingkatkan, agar dapat memberi multiplier effect yang besar terhadap perekonomian, terutama difokuskan guna mendukung upaya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang menjadi tantangan di wilayah tersebut.

Secara umum, kinerja realisasi belanja tahun 2020 di hampir seluruh provinsi mengalami

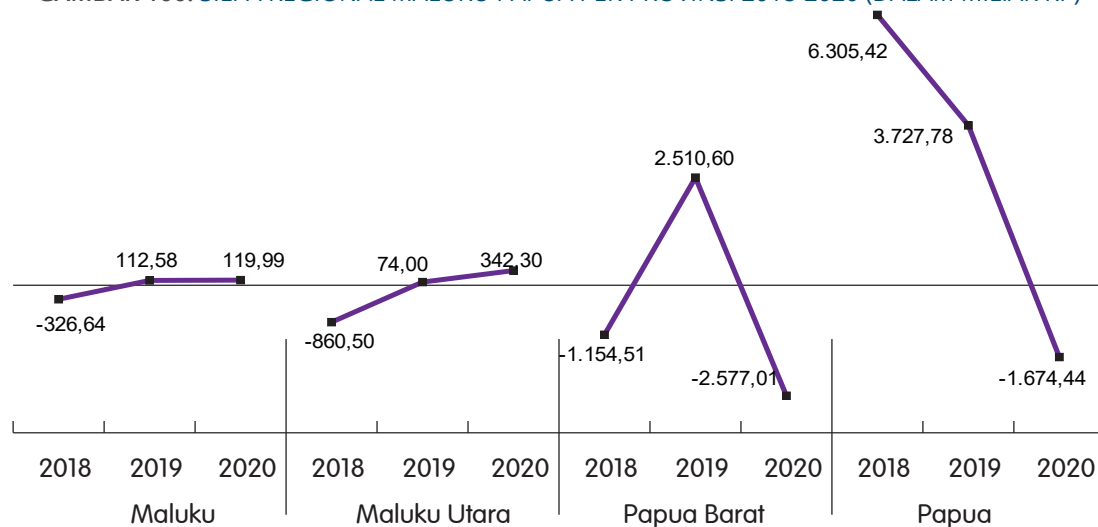
penurunan, kecuali Provinsi Papua Barat yang justru mengalami kenaikan karena dipicu oleh peningkatan signifikan dari belanja bagi hasil. Terdapat beberapa jenis belanja yang mengalami pola trend/pertumbuhan nominal yang sama untuk seluruh Provinsi di lingkup regional Maluku-Papua, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja tidak terduga. Untuk belanja pegawai, terjadi kenaikan nilai realisasi pada seluruh provinsi di regional Maluku-Papua yang disebabkan oleh

GAMBAR 99. SILPA REGIONALMALUKU PAPUA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 100. SILPA REGIONAL MALUKU PAPUA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

pertumbuhan alokasi belanja di tahun 2020 dengan accres yang cukup bervariasi, yaitu sebesar 1.61 persen di Provinsi Maluku, 6.45 persen di Provinsi Maluku Utara, 2.18 persen di Provinsi Papua Barat, dan 4.07 di Provinsi Papua. Selanjutnya, untuk belanja barang, terjadi penurunan nilai realisasi pada seluruh provinsi di regional Maluku-Papua yang disebabkan oleh penerapan kebijakan Work From Home oleh Sebagian besar instansi pemda dan penurunan aktivitas pemerintah daerah seperti perjalanan dinas serta penyelenggaraan rapat / FGD/Diklat sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Terakhir, untuk belanja tidak terduga, terjadi kenaikan nilai realisasi pada seluruh provinsi di regional Maluku-Papua yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Sebenarnya, terdapat juga jenis belanja lain yang dinilai memiliki pola yang sama untuk seluruh provinsi, yaitu mengalami penurunan, (kecuali Provinsi Papua Barat) yang disebabkan oleh pengaruh pemotongan alokasi DAK Fisik dan beberapa proyek yang tidak dapat dikontrakkan karena dampak pandemi COVID-19.

2.VI.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/ DEFISIT REGIONAL MALUKU-PAPUA

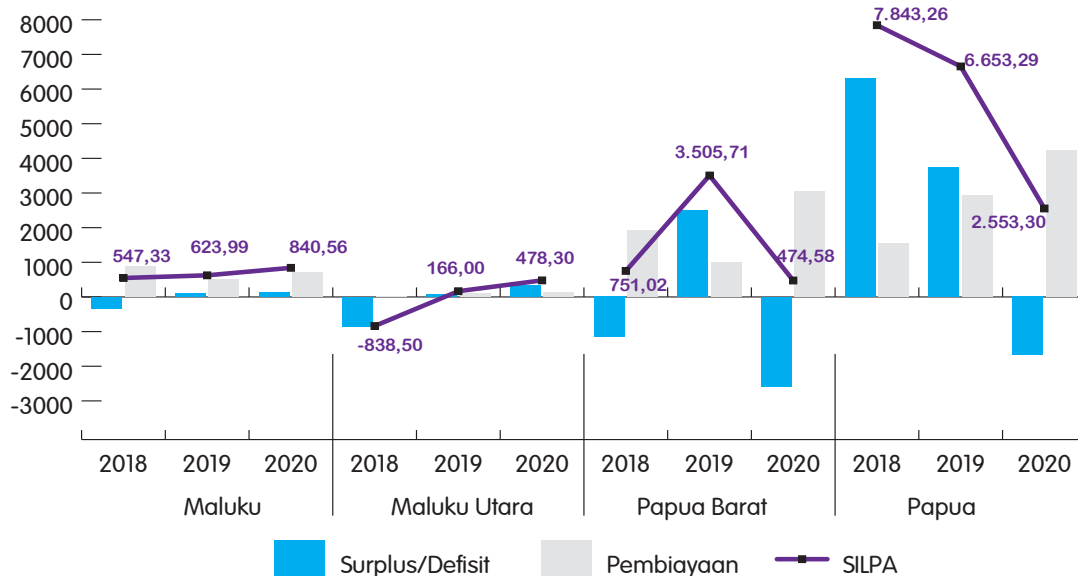
Realisasi APBD regional Maluku-Papua tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp410.90 miliar. Angka surplus ini lebih besar dari target dan dapat berarti positif jika dilihat dari presentase terhadap pagu serta perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja, karena target yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp8,500.53 miliar. Namun demikian,

kondisi surplus tersebut juga dapat berarti negatif karena realisasi belanja yang rendah. Dari sisi pendapatan, kondisi surplus terjadi karena capaian realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan, atau hanya mencapai angka 84.21 persen. Sementara itu, jika dilihat dari sisi belanja, kondisi surplus ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana sehingga membuat tingkat realisasi terhadap pagu yang rendah (77.57 persen), terutama karena situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020.

2.VI.D. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL MALUKU-PAPUA

Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan regional Maluku-Papua mencapai Rp8,136.90 miliar terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,272.15 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,135.25 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp3,612.87 miliar atau 79.86 persen. Pada tahun 2020, seluruh provinsi di regional Maluku-Papua mengalami kenaikan nilai pembiayaan netto, dengan nilai kenaikan pembiayaan netto terbesar dicapai oleh provinsi Papua yang memperoleh pembiayaan netto sebesar Rp4,227.74 miliar, atau lebih besar 30.08 persen dari tahun 2019. Kenaikan nilai pembiayaan netto pada seluruh provinsi di regional Maluku-Papua turut berkontribusi pada perolehan SILPA yang

GAMBAR 101. SILPA REGIONAL MALUKU PAPUA PER PROVINSI 2018-2020 (DALAM MILIAR RP)



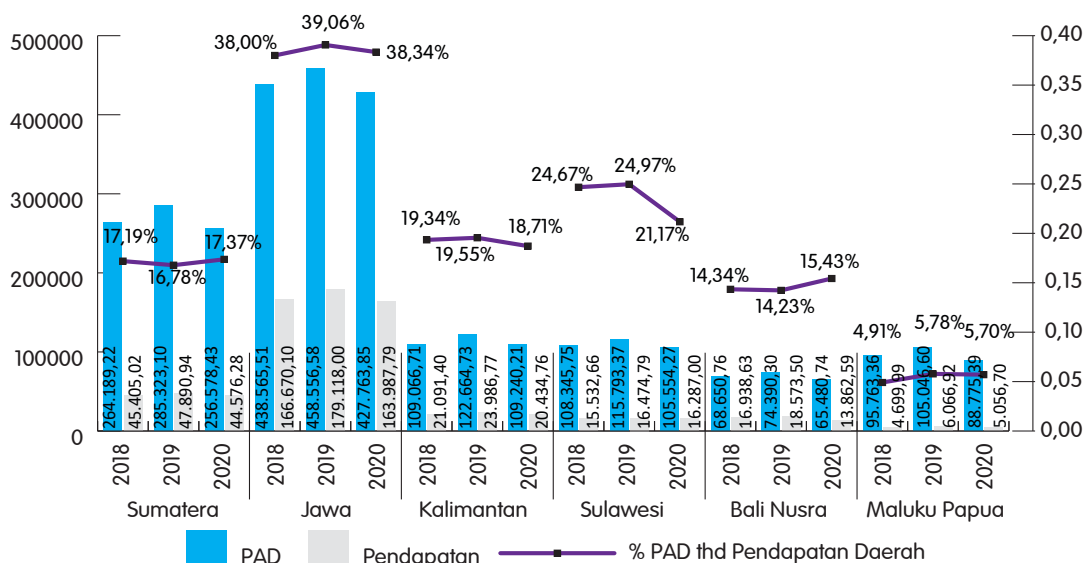
Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

cukup besar di regional tersebut, yaitu sebesar Rp8.547.80 miliar, dengan Sebagian besarnya dikontribusikan juga oleh provinsi Papua yang memiliki nilai SILPA sebesar Rp.5.480.27 atau 64.12 persen dari total SILPA di tingkat regional. Adanya SILPA yang besar pada regional Maluku-Papua patut diwaspadai karena dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas yang rendah pada belanja daerah sehingga APBD kurang berdaya guna bagi masyarakat daerah tersebut.

3. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meskipun dalam APBD terdapat komponen desentralisasi dan integrasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Namun perlu dipahami bahwa Pemda juga harus mandiri dari sisi pendanaan. Semakin besar tingkat kemandirian Pemda dalam pendanaan, maka semakin leluasa dalam mengalokasikan APBD untuk program-program sesuai misi yang telah ditetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota.

GAMBAR 102. PERKEMBANGAN RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN PER REGIONAL PERIODE 2018-2020



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan. Di tahun 2020, secara agregat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada angka 25.08 persen atau mengalami penurunan sebesar 0.06 persen dari tahun sebelumnya. Di sisi yang lainnya rasio dana transfer terhadap total pendapatan daerah di tahun 2020 justru menunjukkan peningkatan sebesar 0.74 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketergantungan daerah dengan bantuan dana transfer/perimbangan untuk membiayai program-programnya semakin meningkat. Dengan kata lain, dapat juga disimpulkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pembiayaan program di daerah semakin kecil, sumber pendapatan utama APBD justru ditopang oleh penerimaan dana transfer/perimbangan.

Jika dibandingkan per regional, sama seperti tahun sebelumnya, Jawa masih menjadi kawasan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di tahun 2020. Dalam tiga tahun terakhir, nilai rata-rata rasio kemandirian daerah regional Jawa berada di angka 38.47 persen, jauh di atas nilai regional lainnya, yang hanya sebesar 23.6 persen untuk Bali-Nusra, 19.20 persen untuk Kalimantan, 17.11 persen untuk Sumatera, 14.66 persen untuk Sulawesi, dan 5.46 persen untuk Maluku-Papua. Pada tahun 2020, tidak semua regional menunjukkan trend penurunan nilai tingkat kemandirian keuangan seperti yang terjadi di tingkat nasional. Terdapat dua regional yang justru mengalami peningkatan nilai rasio kemandirian daerah, yaitu: regional Sumatera (dari 16.78 persen menjadi 17.37 persen) serta regional Sulawesi (dari 14.23 persen menjadi 15.43 persen).

Berdasarkan data rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Per Regional, regional Maluku dan Papua tetap menjadi regional dengan tingkat kemandirian yang terendah, yaitu 5.70 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya proporsi

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai 93.02 persen dari Total Pendapatan atau naik 2.09 persen dari Tahun sebelumnya. Hal ini dinilai masih wajar mengingat Daerah Timur Indonesia khususnya Regional Maluku dan Papua memerlukan dukungan pembiayaan dari transfer untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari regional lainnya.

Selain menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan (rasio kemandirian daerah), kinerja dan kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah tersebut ditunjukkan dalam peta kapasitas fiskal daerah. Sesuai ketentuan, Peta Kapasitas Fiskal Daerah ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan dan diperhitungkan dengan menggunakan data APBD dan Perpres tentang Rincian APBN. Untuk dua tahun terakhir, ditetapkan melalui PMK nomor 126/PMK.07/2019 dan PMK nomor 120/PMK.07/2020.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk (1) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, (2) penentuan besaran dana pendamping oleh pemda, jika dipersyaratkan; dan (3) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat lima kategori kapasitas fiskal provinsi. Sesuai PMK nomor 120/PMK.07/2020, pembagian kategori tersebut telah diatur sebagaimana dalam tabel Rentang dan Kategori IKFD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2020.

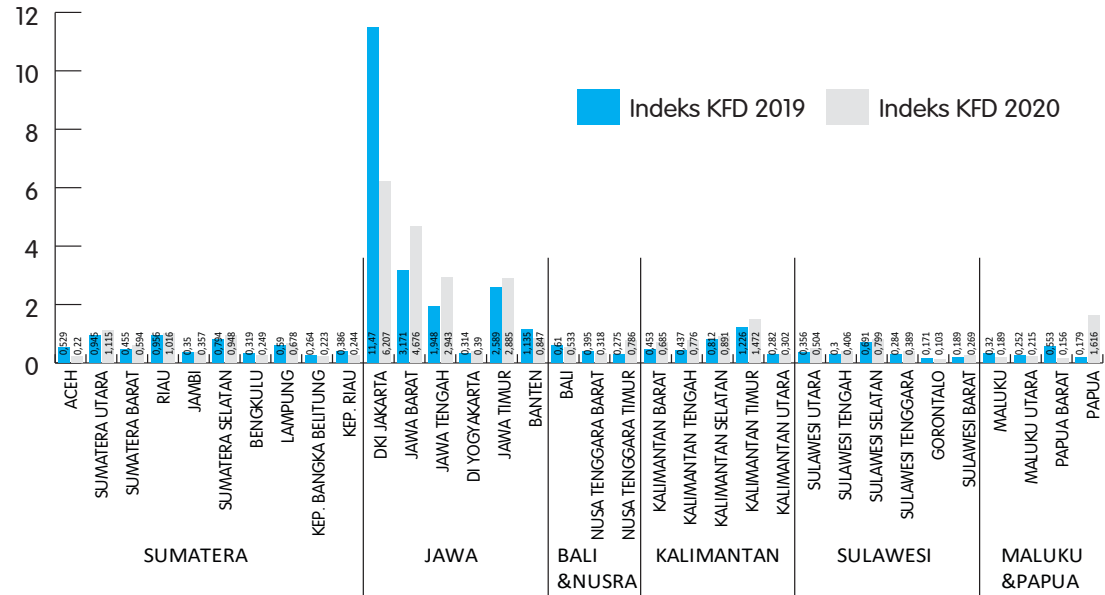
Merujuk pada gambaran Peta Kapasitas Fiskal Daerah tersebut, Kapasitas fiskal daerah di dominasi oleh provinsi dengan kapasitas sangat rendah (26,47 persen). Kategori sangat rendah

TABEL 55. RENTANG DAN KATEGORI IKFD PROVINSI DAN KAB/KOTA TAHUN 2020

TINGKAT PROVINSI		TINGKAT KAB. / KOTA	
Rentang IKFD	Kategori KFD	Rentang IKFD	Kategori KFD
IKFD < 0.277	Sangat rendah	IKFD < 0.517	Sangat rendah
0.277 ≤ IKFD < 0.564	Rendah	0.517 ≤ IKFD < 0.747	Rendah
0.564 ≤ IKFD < 0.934	Sedang	0.747 ≤ IKFD < 1.168	Sedang
0.934 ≤ IKFD < 1.920	Tinggi	1.168 ≤ IKFD < 2.145	Tinggi
IKFD ≥ 1.920	Sangat tinggi	IKFD ≥ 2.145	Sangat tinggi

Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

GAMBAR 103. KAPASITAS FISKAL PER REGIONAL/PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020 (SESUAI PMK 126/PMK.07/2019 & PMK 120/PMK.07/2020)



Sumber : Konsolidasi KFR Kanwil Tahun 2018, 2019, dan 2020, diolah

didominasi oleh provinsi muda, seperti Bangka Belitung, Gorontalo, Kepri, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulbar. Sedangkan kategori rendah dan sedang sejumlah masing-masing 23,53 persen, kategori tinggi 14,71 persen, dan kategori sangat tinggi 11,76 persen yang terdiri dari empat provinsi besar di pulau jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Bila dilihat dari aspek regional, maka Pulau Jawa masih menjadi regional dengan nilai rata-rata indeks kapasitas fiskal provinsi tertinggi dengan rata-rata IKFD 2020 sebesar 2.991 disusul Kalimantan dengan rata-rata IKFD 2020 sebesar 0.825, Sumatera dengan dengan rata-rata IKFD 2020 sebesar 0.564, Bali-Nusra dengan rata-rata IKFD 2020 sebesar 0.546, Maluku-Papua dengan rata-rata IKFD 2020 sebesar 0.544, dan Sulawesi dengan rata-rata IKFD 2020 sebesar 0.412. Namun demikian, di sisi yang lainnya, bila dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya, maka regional Jawa justru menjadi satu-satunya regional yang mengalami penurunan nilai rata-rata indeks kapasitas fiskal provinsi. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan yang sangat signifikan pada indeks kapasitas fiskal Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang menjadi titik epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan masing-masing sebesar 5.266 untuk DKI Jakarta dan 0.288 untuk Banten, sehingga mengalami dampak paling besar terhadap

pendapatan dan belanja APBD-nya.

4. PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAERAH

Mandatory spending adalah alokasi belanja wajib yang diatur dalam undang-undang. Tujuan mandatory spending tersebut adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial, ekonomi dan pembangunan di daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi alokasi pendidikan, alokasi kesehatan, penggunaan dana transfer umum untuk infrastruktur dan alokasi bantuan desa.

4.1. SEKTOR PENDIDIKAN

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total alokasi belanja. Hal tersebut diatur untuk menjamin agar ketersediaan anggaran yang cukup besar untuk bidang pendidikan menjadi lebih dapat dipastikan. Pendanaan bidang tersebut bersumber antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer (TKDD). Meskipun besarnya alokasi bukan menjadi jaminan akan memberikan hasil

nyata berupa penyediaan dan perbaikan layanan, serta berkurangnya ketimpangan, namun alokasi dapat memberikan indikasi mengenai komitmen perhatian, dan keseriusan awal pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan mewujudkan tujuan tersebut.

Pada tahun 2020, belum seluruh pemerintah daerah telah mampu memenuhi ketentuan pemenuhan minimal alokasi untuk mandatory spending di sektor Pendidikan. Secara agregat, hanya sebagian regional yang seluruh provinsinya mampu memenuhi ketentuan alokasi minimal 20 persen APBD untuk belanja di sektor Pendidikan, yaitu: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, dan Sulawesi. Bila ditelusuri secara lebih mendalam, pada regional-regional tersebut, terdapat provinsi yang seluruh pemerintah daerahnya, baik di pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota di lingkup wilayahnya mampu memenuhi ketentuan alokasi minimal mandatory spending di sektor Pendidikan sebesar 20 persen, antara lain: Provinsi Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Gorontalo.

4.II. SEKTOR KESEHATAN

Sesuai amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD di luar belanja untuk keperluan pembayaran gaji. Secara agregat, seluruh regional dan provinsi telah mampu memenuhi ketentuan tersebut pada tahun 2020 ini. Hal tersebut terjadi karena pengaruh situasi pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh daerah untuk melakukan perubahan prioritas dan menyiapkan alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk menangani dan mengatasi pandemi COVID-19, terutama pada belanja sektor Kesehatan.

Meskipun demikian, bila dilihat secara lebih jauh per pemerintah daerah, maka ditemukan bahwa belum seluruh pemerintah daerah (provinsi/kab/kota) mengalokasikan sebagian APBD *mandatory spending* di sektor Kesehatan sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 10 dari APBD. Berdasarkan analisis, hanya ditemukan beberapa provinsi yang seluruh pemerintah daerahnya, baik di pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota di lingkup wilayahnya mampu memenuhi ketentuan alokasi

minimal *mandatory spending* di sektor Kesehatan sebesar 10 persen dari APBD, antara lain: Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulsel, dan Provinsi Maluku.

4.III. SEKTOR INFRASTRUKTUR

Sesuai ketentuan, Belanja infrastruktur daerah dialokasikan paling sedikit 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Alokasi tersebut akan digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Pada tahun 2020, belum ditemukan satu pun regional yang seluruh provinsinya mampu memenuhi ketentuan pengalokasian belanja infrastruktur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan. Hanya sebagian kecil dari provinsi yang seluruh pemerintah daerahnya, baik secara agregat maupun per pemerintah daerahnya mampu memenuhi ketentuan pengalokasian anggaran untuk sektor infrastruktur sesuai ketentuan. Salah satu diantara yang mampu memenuhi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, di sisi lain juga terdapat beberapa wilayah yang Sebagian besar pemerintah daerah di lingkup wilayahnya belum mampu memenuhi ketentuan alokasi mandatory spending di sektor infrastruktur sebesar 25 persen dari Dana Transfer umum, diantaranya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo.

5. PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Per tahun 2020, jumlah BLUD yang ada di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 1.703 BLUD. BLUD tersebut tersebar di seluruh regional dan provinsi. Dari pendekatan regional, maka Jawa menjadi regional dengan jumlah BLUD terbanyak yaitu mencapai 955 BLUD atau ± 56.08 persen dari total BLUD. Sementara itu, Maluku-Papua menjadi regional dengan jumlah BLUD terkecil yaitu hanya sekitar 23 BLUD atau ± 1.35 persen saja dari total BLUD. Dari pendekatan provinsi, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah BLUD terbanyak, yaitu mencapai 404 BLUD. Sebaliknya, Maluku menjadi provinsi dengan jumlah BLUD terbanyak, yaitu hanya 2 BLUD saja.

Lebih dari 95 persen BLUD yang didirikan/dibentuk berada dalam rumpun Kesehatan, baik berupa rumah sakit, puskesmas, maupun unit pelayanan bidang Kesehatan lainnya laboratorium. Selebihnya,

Sebanyak 5 persen sisanya merupakan BLU yang berada dalam rumpun lainnya, seperti:

- rumpun Pendidikan (umumnya berupa perguruan tinggi, balai diklat, taman pintar, dan sejenisnya) sebanyak 40 BLUD,
- rumpun Kawasan (umumnya berupa unit/badan yang bertugas mengelola pengembangan wilayah/Kawasan) sebanyak 10 BLUD,
- rumpun pengelola dana (umumnya berupa unit/badan pengelola kredit/modal usaha, dana bergulir, dan sejenisnya) sebanyak 12 BLUD, dan

d. rumpun lainnya (tidak termasuk rumpun Kesehatan, Pendidikan, Kawasan, dan Pengelola Dana) sebanyak 16 BLUD.

Beberapa BLUD yang berada dalam rumpun lainnya tersebut antara lain sebagaimana dijelaskan dalam tabel Data BLUD kategori rumpun lainnya.

Bila kita perhatikan data BLUD di atas, maka dapat kita lihat bahwa jumlah BLUD yang dikelola pemerintah daerah di seluruh Indonesia sangat banyak, bahkan mencapai hampir tujuh kali lipat dibandingkan jumlah BLU yang dikelola oleh pemerintah pusat. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi beberapa hal yang mendorong pemerintah daerah untuk membentuk BLUD. Namun demikian, sangat disayangkan, bahwa meskipun sudah dibentuk atau ditetapkan menjadi BLUD sejak lama, masih terdapat unit layanan yang masih belum menerapkan pola pengelolaan BLU dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut terjadi pada RSUD Supiori di Provinsi Papua yang sudah ditetapkan sebagai BLUD sejak 2015, namun hingga saat ini belum menerapkan pola pengelolaan BLU karena Direktur dan Pengelola Keuangan belum siap/ragu untuk menggunakan langsung penerimaan yang diterimanya. Untuk mendorong kesiapan dan keyakinan unit kerja/layanan dalam menerapkan pola pengelolaan BLU, maka pemerintah daerah dapat menggandeng Kanwil DJPb untuk melakukan pembinaan/edukasi di daerah.

Dari kajian yang ada, ditemukan bahwa kemandirian BLUD dalam aspek pendanaan pada tahun 2020

TABEL 56. DATA BLUD KATEGORI RUMPUN LAINNYA

No.	Lokasi Provinsi	BLUD
1.	Sumatera Barat	BLUD Fasilitas Pembiayaan
2.	Kepulauan Riau	UPTD SPAM Dinas PUPR, UPTD Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam, UPTD Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
3.	Sumatera Selatan	BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, BLUD SPAM Kabupaten Musi Rawas
4.	Bengkulu	Kampung Delima
5.	Jawa Timur	BLUD LDM (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura), UPT Pengembangan Benih Padi, UPT Pengembangan Benih Palawija, UPT Pengembangan Benih Hortikultura, UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura
6.	Kaltara	Kantor UPBU Juwata
7.	Nusa Tenggara Barat	BLUD Persampahan
8.	Nusa Tenggara Timur	BLUD SPAM Provinsi NTT
9.	Sulawesi Tenggara	BLUD Angkutan Umum Translulo

Sumber : Data BLUD Kanwil DJPb

ACEH
16 BLUD
• 15 kesehatan
• 1 kawasan

SUMUT
25 BLUD
• 24 kesehatan
• 1 Pengel. dana

KPRI
14 BLUD
• 10 kesehatan
• 1 Pengel. Dana
• 3 Lainnya

KALTA
6 BLUD
• 5 kesehatan
• 1 Lainnya

KALTIM
19 BLUD
• 18 kesehatan
• 1 Pengel. dana

GORONTALO
6 BLUD
• 6 kesehatan

SULUT
3 BLUD
• 3 kesehatan

MALUT
5 BLUD
• 5 kesehatan

PAPBAR
7 BLUD
• 5 kesehatan
• 1 Pendidikan
• 1 Kawasan

PAPUA
9 BLUD
• 9 kesehatan

MALUKU
2 BLUD
• 1 kesehatan
• 1 Pengel. dana

SULSEL
22 BLUD
• 22 kesehatan

NTB
46 BLUD
• 44 kesehatan
• 1 Pendidikan
• 1 Lainnya

JATIM
404 BLUD
• 373 kesehatan
• 22 Pendidikan
• 3 Kawasan
• 1 Pengel. Dana
• 5 Lainnya

YOGYAKARTA
18 BLUD
• 13 kesehatan
• 4 Pendidikan
• 1 Kawasan

JATENG
375 BLUD
• 375 kesehatan

JABAR
49 BLUD
• 49 kesehatan

BANTEN
12 BLUD
• 10 kesehatan
• 2 Pengel. dana

LAMPUNG
213 BLUD
• 211 kesehatan
• 1 Kawasan
• 1 Pengel. dana

BENGKULU
43 BLUD
• 41 kesehatan
• 1 Pengel. Dana
• 1 Lainnya

JAMBI
47 BLUD
• 47 kesehatan

SUMBAR
21 BLUD
• 19 kesehatan
• 1 Pengel. Dana
• 1 Lainnya

RIAU
96 BLUD
• 96 kesehatan

SUMSEL
29 BLUD
• 24 kesehatan
• 3 Pendidikan
• 2 Lainnya

KALSEL
15 BLUD
• 15 kesehatan

KALBAR
15 BLUD
• 15 kesehatan

BABEL
9 BLUD
• 9 kesehatan

DKI JAKARTA
97 BLUD
• 79 kesehatan
• 9 Pendidikan
• 2 Kawasan
• 1 Pengel. dana

BALI
24 BLUD
• 24 kesehatan

SULTENG
12 BLUD
• 12 kesehatan

SULTRA
14 BLUD
• 11 kesehatan
• 1 Kawasan
• 1 Pengel. Dana
• 1 Lainnya

NTT
16 BLUD
• 15 kesehatan
• 1 Lainnya

TABEL 57. SEBARAN BLUD DI SELURUH REGIONAL

Regional	Jumlah Total BLUD	Rumpun BLUD				
		Kesehatan	Pendidikan	Kawasan	Pengelola Dana	Lainnya
Sumatera	513	496	3	2	5	7
Jawa	955	898	35	6	4	5
Kalimantan	67	65	0	0	1	1
Bali-Nusra	86	83	1	0	0	2
Sulawesi	59	56	0	1	1	1
Maluku-Papua	23	20	1	1	1	0
Grand Total	1703	1618	40	10	12	16

semakin baik, sebagian besar BLUD memiliki proporsi pagu dari PNBP (BLUD) yang lebih besar dari pagu APBD murni. Hal tersebut menandakan bahwa kemandirian BLUD dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Fleksibilitas pengelolaan anggaran yang diberikan kepada BLUD terbukti dapat merangsang BLUD menjadi lebih mandiri. BLUD dalam aspek pendanaan pada tahun 2020 semakin baik, sebagian besar BLUD memiliki proporsi pagu dari PNBP (BLUD) yang lebih besar dari pagu APBD murni. Hal tersebut menandakan bahwa kemandirian BLUD dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Fleksibilitas pengelolaan anggaran yang diberikan kepada BLUD terbukti dapat merangsang BLUD menjadi lebih mandiri.

meskipun tidak terjadi pada seluruh BLUD, namun terdapat beberapa BLUD yang memperoleh kenaikan pendapatan, mengalami surplus dan kenaikan asset keuangan. Hal tersebut terutama terjadi pada BLUD yang bergerak di rumpun kesehatan yang mendapatkan kompensasi dan pembiayaan yang cukup besar guna mendukung penanganan COVID-19 di daerah.

Pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020,



BAB V

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

Pada tahun 2020, Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian terealisasi sebesar Rp2.122,42 triliun yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp1.639,77 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp452,94 triliun, dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp29.71 triliun. Sementara itu, Belanja Negara Konsolidasian Tahun 2020 sebesar Rp3.222,24 triliun yang didominasi oleh Belanja Pemerintah dengan kontribusi sebesar 95,72 persen sedangkan sisanya 4,28 persen merupakan belanja Dana Desa. Defisit Anggaran Konsolidasian diperkirakan sebesar Rp1.099,2 triliun. Defisit tersebut mengalami

peningkatan signifikan sebesar Rp762,34 triliun atau naik 225,89 persen jika dibandingkan dengan Konsolidasian tahun 2019. Defisit tersebut ditutup oleh Pembiayaan Konsolidasian sebesar Rp1.100,22 triliun, sehingga diperkirakan SiLPA Konsolidasian tahun 2020 sebesar Rp0,40 triliun.

Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi satu-satunya pembentuk PDRB yang mampu tumbuh positif 6,24 persen (yoy) pada triwulan III-2020 dan 0,62 persen (yoy) pada triwulan IV-2020. Sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 0,9 persen. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Hal ini menjelaskan kontribusi terbesar pendongkrak perekonomian dari sisi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berasal dari Belanja Pemerintah Pusat.

1. OVERVIEW PERKEMBANGAN KINERJA ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam periode waktu tertentu. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.).

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Konsolidasian yaitu:

- a. Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian dengan Belanja Transfer (Dana Perimbangan, serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian) pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.
- b. Akun pembiayaan berupa Penerusan Pinjaman (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dengan Pinjaman Dalam Negeri/Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian.
- c. Akun pembiayaan berupa Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dengan Pembayaran Pokok Utang pada Laporan Realisasi

TABEL 58. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN, APBD DAN TRANSFER KE DAERAH)

URAIAN	2018 Konsolidasi (Miliar)	2019 Konsolidasi (Miliar)	2020	
			Konsolidasi (Miliar)	Growth (%)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.214.097,08	2.259.030,01	2.122.418,13	(6,05)
Penerimaan Perpajakan	1.713.007,34	1.755.109,66	1.639.774,84	(6,57)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	497.128,60	500.464,96	452.935,10	(9,50)
Penerimaan Hibah	3.961,14	3.455,38	29.708,19	759,77
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Negara	2.466.401,44	2.596.507,57	3.222.238,72	24,10
Belanja Pemerintah	2.377.166,70	2.486.249,88	3.084.419,66	24,06
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	89.234,74	110.257,69	137.819,06	25,00
Surplus/Defisit Anggaran	(252.304,36)	(337.477,56)	(1.099.820,59)	225,89
Pembiayaan	388.091,40	496.366,27	1.100.223,20	121,66
Pembiayaan Dalam Negeri	381.296,03	507.265,85	1.059.491,64	108,86
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	6.795,36	(10.899,58)	40.731,57	(473,70)
SiLPA/SiKPA	135.787,04	158.888,70	402,62	(99,75)

**) Data yang digunakan tahun 2020 adalah data alokasi karena LRA Konsolidasi belum tersedia
Sumber: GFS, diolah*

Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian.

d. Akun penerimaan hibah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dengan Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan eliminasi terhadap akun resiprokal sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 11 maka Pendapatan Transfer dalam LRA Konsolidasian dieliminasi sebesar Belanja Transfer selain Dana Desa sehingga pada pos Pendapatan Transfer nilainya nol dan Belanja Transfer hanya sebesar Dana Desa.

Pada tahun 2020, Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian dialokasikan sebesar Rp2.122.418,13 Miliar, yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp1.639.774,84 miliar, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp452.935,10 miliar, dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp29.708,19 miliar, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah dieliminasi dengan Belanja Transfer

Pemerintah Pusat. Alokasi Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut didominasi oleh Pendapatan Perpajakan yang mengalami penurunan sebesar Rp115.334,83 miliar atau berkontraksi 6,57 persen dari Pendapatan Perpajakan Tahun 2019. Pada periode yang sama, Pendapatan Bukan Pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp47.539,86 miliar atau berkontraksi 9,50 persen, sedangkan Pendapatan Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp26.252,81 miliar atau 759,77 persen dari tahun 2019.

Belanja Negara Konsolidasian Tahun 2020 sebesar Rp3.222.238,72 miliar yang didominasi oleh Belanja Pemerintah dengan kontribusi sebesar 95,72 persen sedangkan sisanya 4,28 persen merupakan belanja Dana Desa (Belanja TKDD pada Pemerintah Pusat selain Dana Desa dieliminasi dengan pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah – akun resiprokal). Alokasi Belanja Konsolidasian tahun 2020 meningkat sebesar Rp625.731,14 miliar atau sebesar 24,10 persen dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada Tahun 2020 Defisit Anggaran Konsolidasian diperkirakan sebesar Rp1.099.820,59 miliar. Defisit tersebut mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp762.343,02 miliar atau naik 225,89 persen jika dibandingkan dengan Konsolidasian tahun 2019 yang mencatatkan Defisit sebesar Rp337.477,56 miliar. Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit diperkirakan berasal dari Pembiayaan

Konsolidasian sebesar Rp1.100.223,20 miliar yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp1.059.491,64 miliar dan Pembiayaan Luar Negeri Konsolidasian sebesar Rp40.731,57 miliar. Sehingga diperkirakan SiLPA Konsolidasian tahun 2020 sebesar Rp402,62 miliar.

1.I. PERKEMBANGAN PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Dalam LKPK menggunakan istilah Pendapatan untuk setiap jenis Pendapatan dan Hibah dalam lembar muka laporan keuangan (Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pendapatan Hibah) dalam rangka konsistensi penggunaan istilah dan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berbeda dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang menggunakan istilah Penerimaan untuk setiap jenis Pendapatan dan Hibah dalam lembar muka laporan keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah). Namun demikian, hal tersebut hanya merupakan perbedaan istilah dan tidak mempengaruhi pengakuan dan pengukuran dari Pendapatan yang digunakan LKPK maupun Penerimaan yang digunakan dalam LKPP.

Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi sekitar 75 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi rata-rata sekitar 20 persen. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tiga tahun terakhir ini sekitar 10,9 persen. Rasio pajak tahun 2020 sebesar 10,95 persen merupakan

rasio pajak tertinggi selama tiga tahun ini. Rasio pajak mengalami peningkatan disebabkan oleh turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu penerimaan perpajakan juga mengalami penurunan drastis dikarenakan banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19.

1.I.A. ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2020 Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian dialokasikan mencapai Rp2.122.418,13 miliar. Di antara empat komponen Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian pada tahun 2020, realisasi Penerimaan Perpajakan menjadi kontributor tertinggi penyumbang pendapatan yakni sebesar 75,7 persen atau setara dengan Rp1.639.774,84 miliar. Penyumbang pendapatan terbesar kedua adalah Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang menyumbang 21,3 persen atau sebesar Rp452.935,10 miliar. Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat (kecuali Dana Desa) dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah karena dikategorikan belanja pemerintah pusat sebagai Transfer ke Daerah.

Secara umum, proporsi Penerimaan Negara dan Hibah selama kurun waktu 3 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan, Penerimaan Perpajakan mendominasi dengan porsi rata-rata 77,5 persen sedangkan PNBP rata-rata 22 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019 dan 2018, kedua

TABEL 59. PROPORSI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020

URAIAN	2018		2019		2020	
	Realisasi	Proporsi (%)	Realisasi	Proporsi (%)	Alokasi	Proporsi (%)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.214.097,1	100,0	2.259.030,0	100,0	2.122.418,1	100,0
Penerimaan Perpajakan	1.713.007,3	77,4	1.755.109,7	77,7	1.639.774,8	77,3
Pajak Dalam Negeri	1.667.125,5	75,3	1.714.056,0	75,9	1.606.287,9	75,7
Pajak Perdagangan Internasional	45.881,8	2,1	41.053,7	1,8	33.486,9	1,6
Penerimaan Negara Bukan Pajak	497.128,6	22,5	500.465,0	22,2	452.935,1	21,3
Penerimaan Sumber Daya Alam	180.592,6	8,2	154.895,3	6,9	80.623,7	3,8
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D	52.899,2	2,4	89.604,6	4,0	74.920,9	3,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	208.572,4	9,4	207.250,6	9,2	240.586,3	11,3
Pendapatan BLU	55.064,3	2,5	48.714,5	2,2	56.804,2	2,7
Penerimaan Hibah	3.961,1	0,2	3.455,4	0,2	29.708,2	1,4

*) dalam miliar rupiah
Sumber: GFS, diolah

TABEL 60. PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020

Komponen Pendapatan	2018	2019		2020	
	Realisasi	Realisasi	Proporsi (%)	Alokasi	Proporsi (%)
Penerimaan Perpajakan	1.713.007,3	1.755.109,7	12,4	1.639.774,8	(6,6)
PNBP	497.128,6	500.465,0	23,3	452.935,1	(9,5)
Penerimaan Hibah	3.961,1	3.455,4	1.181,8	29.708,2	759,8
Total	2.214.097,1	2.259.030,0	14,9	2.122.418,1	(6,0)

*) dalam miliar rupiah

Sumber: GFS, diolah

komponen Pendapatan Negara tersebut sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai akibat melonjaknya Pendapatan Hibah (759,8 persen) yang menyebabkan kenaikan proporsi sebesar 1,2 persen.

1.I.B. ANALISIS PERUBAHAN PENDAPATAN DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Tahun 2020, Pendapatan Negara dan Hibah pada dialokasikan sebesar Rp2.122.418,13 miliar atau mengalami penurunan 6,0 persen (yoy) dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.259.030,01 miliar. Penerimaan Perpajakan baik pusat maupun daerah mengalami penurunan sebesar Rp115.334,83 miliar atau 6,6 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019 akibat dari kebijakan kontrasiklikal yang dilakukan pemerintah, salah satunya berupa insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Hal yang sama juga terjadi pada PNBP yang mengalami kontraksi sebesar 9,5 persen yang disebabkan menurunnya aktivitas ekonomi dan PSBB yang dilakukan selama pandemi COVID-19.

Pada tahun yang sama, pemerintah telah melakukan revisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi tidak akan mencapai target akibat pandemi COVID-19 sebanyak dua kali. Pertama kali target penerimaan pajak dan PNBP direvisi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Pemerintah menyesuaikan postur APBN TA 2020 dan menetapkan kondisi kahar. Target penerimaan kembali dilakukan penyesuaian terhadap postur APBN TA 2020 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

1.I.C. RASIO PAJAK KONSOLIDASIAN

Rasio Pajak Konsolidasian terhadap Produk Domestik Regional Bruto – Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, dimulai tahun 2018 sebesar 11,43 persen, turun 0,49 persen pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan 0,55 persen hingga rasio Pajak Konsolidasian tahun 2020 menjadi 10,39 persen. Sedangkan nilai pajak per kapita yang dihitung berdasarkan rasio Penerimaan Pajak Konsolidasian terhadap jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan 7,5 persen dari sebelumnya Rp6,58 juta pada tahun 2019 menjadi Rp6,08 juta pada tahun 2020.

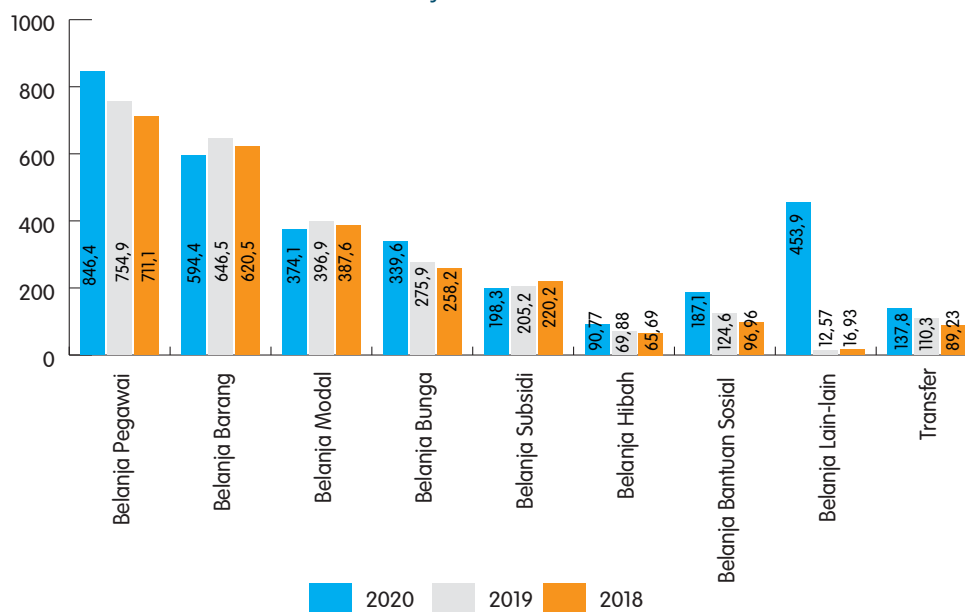
1.II. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada Pemerintah Pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja TKDD pada Pemerintah Pusat dengan Pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah merupakan akun resiprokal sehingga perlu dilakukan eliminasi sehingga Belanja Transfer pada LKPK hanya berupa Dana Desa.

1.II.A. ANALISIS PROPORSI BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2020 mencapai Rp3.222.238,72 miliar, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar

GAMBAR 105. KOMPOSISI BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020



*) dalam miliar rupiah
Sumber: GFS, diolah

Rp3.084.419,66 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp137.819,06 miliar.

Secara keseluruhan, Belanja Negara Konsolidasian pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 maupun tahun 2018. Dalam kurun 3 tahun terakhir, Belanja Pegawai masih menjadi belanja yang memiliki porsi terbesar yakni rata-rata 28,1 persen. Proporsi Belanja Pegawai tahun 2020 sebesar 26,3 persen dari total belanja negara, diikuti dengan belanja barang sebesar 18,4 persen. Jika diperhatikan secara spesifik, proporsi Belanja Negara Konsolidasian pada tahun 2020 memiliki tren yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung tidak mengalami perubahan. Porsi Belanja Pegawai, Barang dan Modal mengalami penurunan masing-masing 2,8 persen, 6,9 persen dan 3,3 persen. Disisi lain porsi Belanja Bantuan

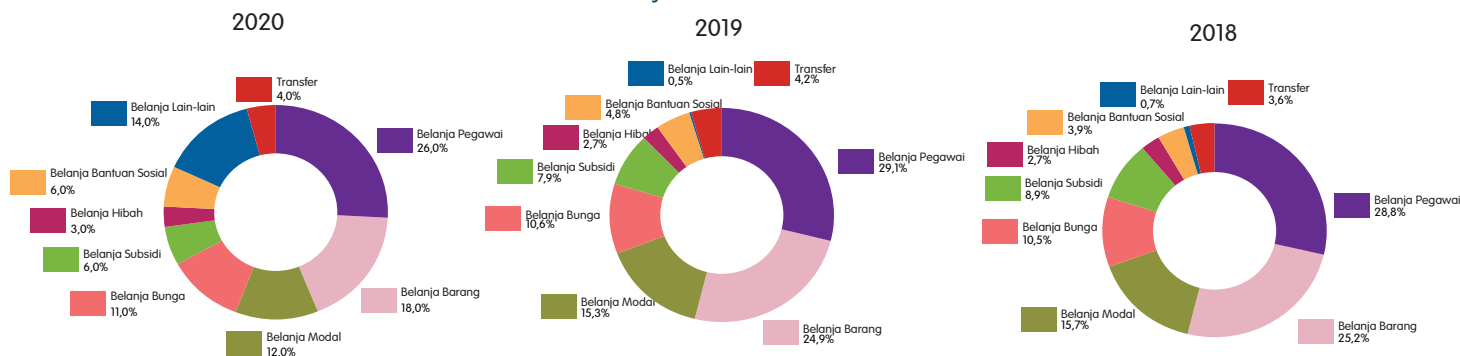
Sosial dan Belanja Lain-lain mengalami kenaikan masing-masing 1,2 persen dan 13,5 persen.

Proporsi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya rata-rata mencapai 4,3 persen, sedangkan pada belanja transfer mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 14,1 persen dibandingkan tahun 2019. Meski proporsi mengalami penurunan, namun dilihat dari sisi nominal Belanja Pegawai tetap mengalami pertumbuhan positif.

1.II.B. ANALISIS PERUBAHAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Secara keseluruhan, Belanja Negara Konsolidasian

GAMBAR 106. PROPORSI BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020



*) dalam miliar rupiah
Sumber: GFS, diolah

TABEL 61. PERTUMBUHAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020

Belanja Negara Konsolidasian	2018	2019		2020	
	Realisasi	Realisasi	Growth (%)	Alokasi	Growth (%)
Belanja Pemerintah Pusat	2.377.166,7	2.486.249,9	4,6	3.084.419,7	24,1
Belanja Pegawai	711.093,0	754.853,8	6,2	846.413,0	12,1
Belanja Barang	620.482,8	646.456,5	4,2	594.414,6	(8,1)
Belanja Modal	387.637,8	396.857,9	2,4	374.052,3	(5,7)
Belanja Bunga	258.205,2	275.845,6	6,8	339.568,9	23,1
Belanja Subsidi	220.161,8	205.156,9	(6,8)	198.257,2	(3,4)
Belanja Hibah	65.694,5	69.878,3	6,4	90.773,6	29,9
Bantuan Sosial	96.963,4	124.634,1	28,5	187.057,7	50,1
Belanja Lain-Lain	16.928,4	12.566,9	(25,8)	453.882,3	3511,7
Transfer	89.234,7	110.257,7	23,6	137.819,1	25,0
Total Belanja Negara Konsolidasian	2.466.401,4	2.596.507,6	5,3	3.222.238,7	24,1

*) dalam miliar rupiah
Sumber: GFS, diolah

tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 24,1 persen, walaupun tidak semua jenis belanja negara mengalami pertumbuhan. Belanja Pegawai pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 12,1 persen dari tahun 2019, sedangkan untuk Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,1 persen dan 5,7 persen. Pertumbuhan belanja paling signifikan tahun 2020 terdapat pada Belanja Transfer (Dana Desa) sebesar 25,0 persen dibandingkan tahun 2019.

1.II.C. RASIO BELANJA KONSOLIDASIAN

Rasio Belanja konsolidasian merupakan perbandingan antara jumlah total belanja konsolidasian terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja konsolidasian perkapita merupakan perbandingan antara jumlah belanja konsolidasian dengan jumlah penduduk.

Rasio total belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk tahun 2020 adalah Rp11,45 juta per kapita. Hal ini berarti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya, selama tahun 2020 pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp14,66 juta untuk setiap jiwa penduduknya. Rasio tersebut

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019 yang masing-masing sebesar Rp9,01 juta per jiwa dan Rp9,32 juta per jiwa.

1.III. PERKEMBANGAN SURPLUS/ DEFISIT KONSOLIDASIAN

Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja pemerintah. Peningkatan belanja tersebut tidak mampu diimbangi oleh peningkatan pendapatan negara. Sehingga menyebabkan anggaran selalu defisit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara rasio defisit anggaran tidak dapat melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena defisit anggaran akan meningkatkan potensi untuk berhutang di kemudian hari. Maka perlu dibatasi sehingga keuangan negara dapat dikelola dengan baik.

Akan tetapi pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah harus menyesuaikan kejadian luar biasa tersebut dengan tindakan yang luar biasa pula. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020

TABEL 62. RASIO BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Belanja Pemerintah Konsolidasian (miliar Rp)	2.379.184,7	2.488.268,9	3.086.439,7
PDRB-AHDB (miliar Rp)	14.981.189,7	16.043.581,8	15.785.678,5
Rasio Belanja – PDRB (persen)	15,9	15,5	19,6
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	264.161,6	266.911,9	269.603,4
Rasio Belanja - Populasi (Rp)	9.006.550,2	9.322.435,2	11.448.073,9

Sumber: GFS, diolah

TABEL 63. RASIO DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian (miliar Rp)	2.214.097,1	2.259.030,0	2.122.418,1
Belanja Pemerintah Konsolidasian (miliar Rp)	2.466.401,4	2.596.507,6	3.222.238,7
Defisit (miliar Rp)	(252.304,4)	(337.477,6)	(1.099.820,6)
PDRB-AHDB (miliar Rp)	14.981.189,7	16.043.581,8	15.785.678,5
Rasio Defisit Anggaran Konsolidasian terhadap Total PDRB (persen)	1,68	2,10	6,97

Sumber: GFS, diolah

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perpu tersebut disebutkan bahwa rasio defisit dapat melebihi 3 persen sampai dengan tahun 2022.

Pemerintah berusaha sangat ketat menjaga rasio defisit anggaran APBN terhadap PDB selalu di bawah 3 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menguncang perekonomian hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menjaga agar Indonesia tidak mengalami resesi yang dalam, Pemerintah mengambil kebijakan ekspansif menurunkan pajak dan menaikkan belanja untuk melebarkan ruang fiskal. Kebijakan tersebut berimplikasi pada kenaikan defisit anggaran yang ditargetkan sebesar 6,34 persen. Pada tahun 2020, rasio defisit anggaran Pemerintah Pusat sebesar 6,01 persen sedangkan rasio defisit anggaran konsolidasian pada tahun 2020 sebesar 10,26 persen.

Tahun 2020, Indonesia mengalami Defisit Anggaran Konsolidasian sebesar Rp1.099.821 miliar atau meningkat secara signifikan sebesar 225,89 persen dari tahun 2019. Pelebaran deficit tersebut dikarenakan peningkatan belanja negara sebesar 24,1 persen dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Hal tersebut diperlukan karena pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar agar wabah COVID-19 dapat diminimalisir penyebarannya. Diberlakukannya kebijakan tersebut membuat masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi maupun sosial seperti biasanya. Oleh karena itu, pemerintah hadir dengan pemberian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada masyarakat.

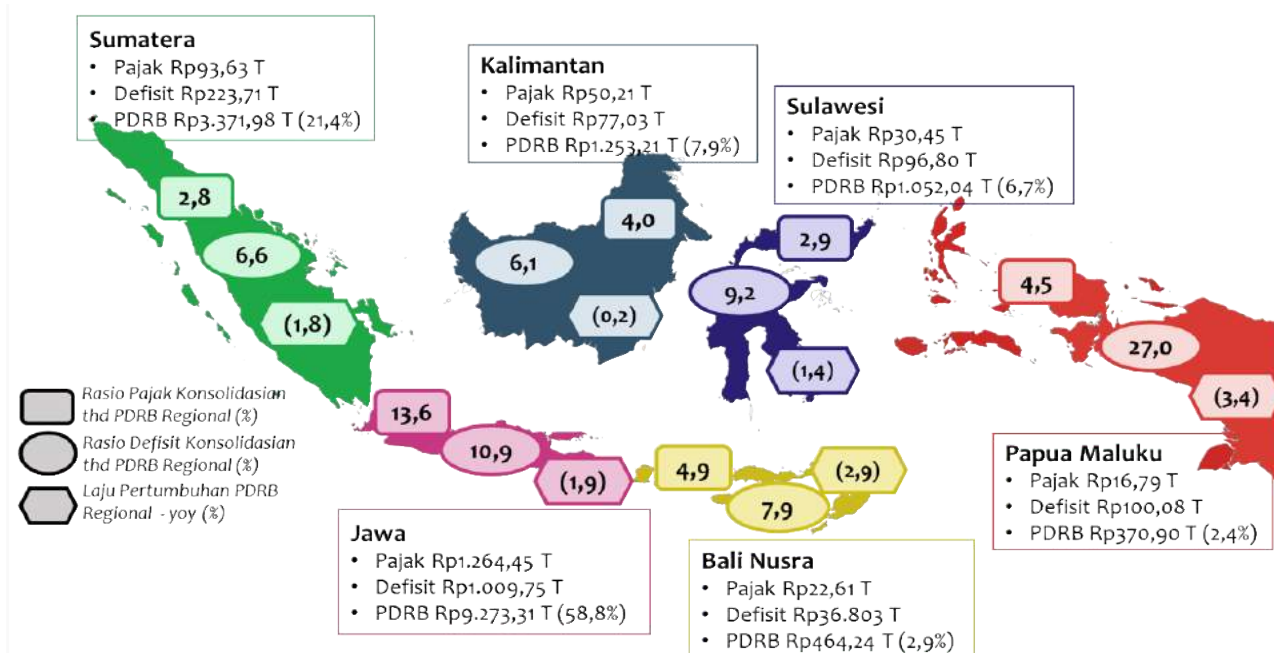
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai jawaban atas dibatasinya kegiatan masyarakat yang berdampak pada perekonomian, khususnya sektor informal atau UMKM.

Akan tetapi dari sisi pendapatan negara juga terdampak pandemi COVID-19. Tahun 2020 pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 6,05 persen. Hampir semua komponen pendapatan negara mengalami penurunan kecuali penerimaan hibah yang tumbuh pesat sebesar 759,77 persen. Akan tetapi penerimaan hibah tersebut hanya memiliki porsi sebesar 1,4 persen terhadap Pendapatan negara secara keseluruhan sehingga tidak memiliki dampak yang signifikan. Pendapatan perpajakan yang memiliki proporsi paling besar dalam pendapatan negara (77,3 persen) mengalami penurunan sebesar 6,57 persen. Dengan melambatnya aktivitas ekonomi, penerimaan perpajakan pun ikut mengalami perlambatan. Selain itu, pemerintah pada tahun 2020 juga memberikan insentif pajak yaitu PPh Pasal 21 DTP, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan potongan tarif PPh badan. Dengan meningkatnya belanja pemerintah dan berkurangnya pendapatan negara, deficit semakin melebar. Diharapkan dengan program vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021, keadaan dapat Kembali normal sehingga beban anggaran negara tidak terlalu besar.

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak Maret 2020 memaksa pemerintah mengambil langkah *extraordinary*

GAMBAR 107. PETA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2020 PER REGIONAL



Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan belanja dan menurunkan penerimaan pajak. Kebijakan yang mengubah postur APBN dan APBD tahun 2020 tersebut diambil pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi akibat melambatnya aktivitas ekonomi. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan pemerintah menjadikan Belanja Konsolidasian tahun 2020 naik 24,10 persen dari tahun 2019 dan disatu sisi target Penerimaan Pajak Konsolidasian turun 6,57 persen dibandingkan tahun 2019 sehingga menghasilkan Defisit Konsolidasian sebesar 1.099.820,59 miliar atau sebesar 6,97 persen dari total PDRB seluruh provinsi.

Secara spasial, dapat dilihat bahwa rasio Defisit Anggaran Konsolidasian terhadap PDRB masing-masing regional sangat bervariasi, terendah 6,15 persen di Kalimantan dan tertinggi 26,98 persen di Papua Maluku. Nilai kontribusi Defisit Anggaran Konsolidasian di Kalimantan sebesar

4,99 persen, kedua terendah setelah Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan kontribusi PDRB Kalimantan adalah sebesar 7,94 persen, ketiga tertinggi dibandingkan regional lainnya. Angka-angka tersebut menunjukkan kemampuan ekonomi Kalimantan dalam menghadapi tantangan COVID-19 lebih baik dibandingkan kawasan lainnya yang ditunjukkan dengan laju PDRB yang hanya mengalami kontraksi 0,20 persen, paling rendah di seluruh regional. Selain itu, kemampuan ekonomi Kalimantan juga dapat dilihat dari PDRB per Kapita tahun 2020 yang mencapai Rp76,3 juta per jiwa, tertinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Sedangkan regional Papua Maluku, meskipun defisit konsolidasian mengalami penurunan 5,86 persen dibandingkan tahun 2019, namun memiliki rasio defisit konsolidasian tertinggi 26,98 persen. Hal ini disebabkan nilai PDRB yang rendah, paling rendah dibandingkan regional lainnya yang terlihat dari nilai kontribusi yang hanya 2,35 persen dan tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi sebesar 3,41 persen, paling tinggi dari seluruh kawasan.

Rasio pajak konsolidasian terhadap PDRB juga variatif dengan rasio terendah berada di regional Sumatera sebesar 2,78 persen dan rasio tertinggi regional Jawa sebesar 13,64 persen. Meski Sumatera memiliki rasio pajak konsolidasian paling rendah, namun kontribusi pajak konsolidasian

TABEL 64. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	Growth (%)	2020	Growth (%)
	Konsolidasi	Konsolidasi		Konsolidasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	211.153,53	183.964,46	(12,9)	160.561,83	(12,7)
Penerimaan Perpajakan	106.294,22	109.234,78	2,8	93.629,15	(14,3)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28.146,23	29.089,74	3,4	27.755,54	(4,6)
Penerimaan Hibah	3.071,00	5.608,49	82,6	4.612,69	(17,8)
Pendapatan Transfer	73.642,08	40.031,46	(45,6)	34.564,45	(13,7)
Belanja Negara	396.207,58	418.645,17	5,7	384.288,01	(8,2)
Belanja Pemerintah	320.937,03	351.787,65	9,6	321.021,71	(8,7)
TKDD	75.270,55	66.857,52	(11,2)	63.266,30	(5,4)
Surplus/Defisit Anggaran	(185.054,05)	(234.680,71)	26,8	(223.726,18)	(4,7)
Pembiayaan	12.272,31	17.180,55	40,0	17.838,69	3,8
Penerimaan Pembiayaan	14.179,92	18.980,30	33,9	19.284,52	1,6
Pengeluaran Pembiayaan	1.907,61	1.799,75	(5,7)	1.445,83	(19,7)
SiLPA (SiKPA)	(172.781,74)	(217.500,16)	25,9	(205.887,49)	(5,3)

*) dalam miliar rupiah
Sumber: GFS, diolah

kawasan ini mencapai 6,63 persen, kedua tertinggi setelah regional Jawa. Artinya meski penerimaan pajak konsolidasian mengalami kontraksi cukup tinggi 14,30 persen (yoy), regional Sumatera mampu menekan kontraksi laju PDRB menjadi minus 1,80 (yoy). Sedangkan rasio pajak yang tinggi Jawa, disebabkan sebagian besar penerimaan pajak konsolidasian terpusat di Pulau Jawa khususnya Jakarta dengan nilai kontribusi mencapai 84,54 persen.

2.I. REGIONAL SUMATERA

Hasil konsolidasi antara laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi di regional Sumatera menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir anggaran mengalami defisit. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu menutup defisit anggaran

sebesar rata-rata 7 persen dan menghasilkan SiKPA Rp205.887,49 miliar atau turun 5,3 persen dari tahun sebelumnya.

Tahun 2020, semua komponen baik Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian maupun Belanja Negara Konsolidasian mengalami penurunan, termasuk Defisit Anggaran Konsolidasian. Meski mengalami penurunan, jumlah defisit 39 persen lebih tinggi dari jumlah Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian. Pembiayaan yang tumbuh 3,8 persen hanya mampu menutup defisit sebesar 8 persen.

2.I.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

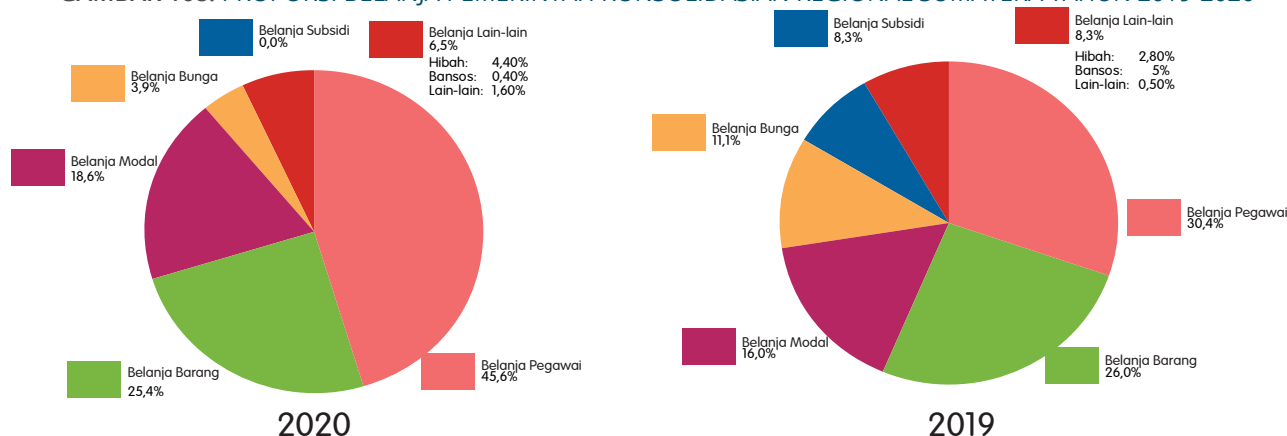
Hingga akhir tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian regional Sumatera

TABEL 65. INDIKATOR FISKAL REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (miliar Rp)	106.294,22	109.234,78	93.629,15
Surplus/defisit Konsolidasian (miliar Rp)	(185.054,05)	(234.680,71)	(223.726,18)
Belanja Konsolidasian (miliar Rp)	396.207,58	418.645,17	384.288,01
PDRB (miliar Rp)	3.227.944,12	3.413.326,85	3.371.977,60
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	57.700,60	58.455,80	59.196,80
Rasio Pajak terhadap PDRB (persen)	3,3	3,2	2,8
Rasio Pajak Per Kapita (juta Rp)	1,84	1,87	1,58
Rasio Defisit terhadap PDRB (persen)	5,7	6,9	6,6
Rasio Belanja Per Kapita (juta Rp)	6,87	7,16	6,49

Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

GAMBAR 108. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2020



Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPD, diolah

sebesar Rp160.561,83 miliar atau mengalami penurunan 12,7 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya target Penerimaan Perpajakan pemerintah pusat sebagai hasil dari perubahan APBN yang dilakukan melalui realokasi dan refocussing dalam rangka stabilitas ekonomi dan menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Total pendapatan tersebut didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Transfer dengan proporsi masing-masing 50 persen dan 35 persen.

Secara spasial, hampir semua provinsi mengalami penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian kecuali Jambi yang tumbuh 10,8 persen. Provinsi yang mengalami penurunan Pendapatan Negara dan Hibah paling tajam adalah Kepulauan Riau (58,1 persen) yang disebabkan oleh merosotnya Penerimaan Perpajakan yang mencapai 72,0 persen akibat pandemi COVID-19.

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB regional Sumatera pada tahun 2020 mencapai 2,78 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah baik dibanding dengan rasio Pajak Konsolidasian terhadap total PDRB yang mencapai 10,39 persen maupun rasio pajak nasional terhadap PDB yang mencapai 8,33 persen. Rasio pajak di Sumatera mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen di tahun 2019 dan 3,3 persen pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen. Hal ini tentu berpengaruh terhadap rasio pajak per kapita yang mengalami penurunan sebesar 15,4 persen sebagai akibat turunnya penerimaan perpajakan sebesar 14,3 persen

dan disisi lain laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan 1,3 persen.

2.I.B. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Tahun 2020, secara agregat belanja konsolidasian di Sumatera mengalami kontraksi sebesar 8,2 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya Belanja Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan 8,1 persen. Dari total belanja Rp384.288,01 miliar, sebesar 66,9 persen bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Sumatera lebih besar daripada Pemerintah Pusat. Secara spasial tiga provinsi yang memiliki kontribusi Belanja Pemerintah paling besar adalah Sumatera Utara (19,5 persen), Aceh (16,3 persen) dan Sumatera Selatan (14,5 persen).

Jika dibandingkan komposisi Belanja Pemerintah antara 2020 dengan tahun 2019, terlihat adanya perubahan proporsi yang cukup signifikan yakni Belanja Pegawai naik 15,2 persen dan Subsidi mengalami penurunan signifikan dari 8,3 persen menjadi 0,04 persen. Proporsi Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Subsidi, Bunga dan Belanja Bantuan Sosial juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 83,5 persen menjadi 79,8 persen. Disisi lain proporsi Belanja Modal mengalami pertumbuhan dari 16,0 persen menjadi 18,6 persen. Artinya, belanja pemerintah konsolidasian mulai difokuskan pada belanja produktif (infrastruktur).

Ditahun yang sama, rasio Belanja Negara Konsolidasian terhadap jumlah penduduk sebesar Rp6,49 juta. Artinya, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp6,49 juta per satu orang penduduk, dalam rangka mensejahterakan dan melayani rakyatnya di regional Sumatera. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

2.I.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2020, Defisit Pemerintah konsolidasian di Sumatera mencapai minus Rp223.726,18 miliar dengan tingkat rasio terhadap PDRB 6,6 persen atau turun 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan turunnya jumlah Defisit Anggaran Konsolidasian. Rasio tersebut sedikit lebih besar dibanding defisit APBN terhadap PDB yang hanya 6,1 persen. Defisit di tingkat regional

menandakan penerimaan belum optimal sehingga perlu usaha ekstra pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan yang ada khususnya sektor unggulan.

2.II. REGIONAL JAWA

Hasil konsolidasi antara laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerinah Daerah Konsolidasi di regional Jawa menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir anggaran mengalami defisit. Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah hanya mampu menutup defisit anggaran sebesar rata-rata 20 persen.

Tahun 2020, Hampir semua komponen Pendapatan Negara dan Hibah mengalami penurunan kecuali Penerimaan Hibah yang tumbuh 18,0 persen, sedangkan Belanja Negara baik Belanja

TABEL 66. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN REGIONAL JAWA 2018-2020

Uraian	2018	2019		2020	
	Konsolidasi	Konsolidasi	Growth (%)	Konsolidasi	Growth (%)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.069.053,94	1.875.548,48	(9,35)	1.601.854,93	(14,59)
Penerimaan Perpajakan	1.729.941,89	1.515.101,76	(12,42)	1.264.449,30	(16,54)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	277.097,75	303.201,01	9,42	293.903,61	(3,07)
Penerimaan Hibah	31.922,09	22.295,57	(30,16)	26.308,25	18,00
Pendapatan Transfer	30.092,21	34.950,14	16,14	17.193,77	(50,8)
Belanja Negara	2.273.970,09	2.381.091,79	4,71	2.611.605,67	9,68
Belanja Pemerintah	1.584.882,53	1.648.853,15	4,04	1.990.479,03	20,72
TKDD	689.087,56	732.238,64	6,26	621.126,64	(15,17)
Surplus/Defisit Anggaran	(204.916,15)	(505.543,31)	146,71	(1.009.750,74)	99,74
Pembiayaan	350.549,91	440.902,93	25,77	1.232.788,54	179,61
Penerimaan Pembiayaan	428.255,78	487.217,14	13,77	1.277.123,61	162,13
Pengeluaran Pembiayaan	77.705,87	46.314,21	(40,4)	44.335,07	(4,27)
SILPA (SiKPA)	145.633,76	(64.640,38)	(144,39)	223.037,80	(445,04)

*) dalam miliar rupiah

Sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

TABEL 67. INDIKATOR FISKAL REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2020

Indikator Fiskal	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (miliar Rp)	1.729.941,89	1.515.101,76	1.264.449,30
Surplus/defisit Konsolidasian (miliar Rp)	(204.916,15)	(505.543,31)	(1.009.750,74)
Belanja Konsolidasian (miliar Rp)	2.273.970,09	2.381.091,79	2.611.605,67
PDRB (miliar Rp)	8.753.884,51	9.450.881,45	9.273.311,32
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	149.133,00	150.407,50	151.650,20
Rasio Pajak terhadap PDRB (persen)	19,76	16,03	13,64
Rasio Pajak Per Kapita (juta Rp)	11,60	10,07	8,34
Rasio Defisit terhadap PDRB (persen)	2,34	5,35	10,89
Rasio Belanja Per Kapita (juta Rp)	15,25	15,83	17,22

Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

Pemerintah maupun TKDD mengalami kenaikan. Penurunan pendapatan dan kenaikan belanja pada akhirnya memperlebar Defisit Anggaran Konsolidasian yang mengalami kenaikan mencapai 50,1 persen dari tahun sebelumnya atau tumbuh 99,7 persen. Pembiayaan tumbuh 179,6 persen sehingga mampu menutup defisit sebesar dan menghasilkan SiLPA Rp223.037,80 miliar.

2.II.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah konsolidasian regional Jawa sebesar Rp1.601.854,93 miliar atau mengalami penurunan 14,6 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya target Penerimaan Perpajakan pemerintah pusat sebagai hasil dari perubahan APBN yang dilakukan melalui realokasi dan refocusing dalam rangka stabilitas ekonomi dan menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Total pendapatan tersebut didominasi oleh Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan proporsi masing-masing 79 persen dan 18 persen. Secara spasial, hampir semua provinsi mengalami penurunan pendapatan kecuali Jawa Tengah yang tumbuh 4,1 persen. Provinsi yang mengalami penurunan pendapatan paling tajam adalah DKI Jakarta (17,5 persen) yang disebabkan oleh merosotnya Penerimaan Perpajakan yang mencapai 22,2 persen akibat pandemi COVID-19.

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB regional Jawa pada tahun 2020 mencapai 13,6 persen, Angka tersebut lebih tinggi baik dibanding dengan rasio Pajak Konsolidasian terhadap total PDRB yang mencapai 10,39 persen maupun rasio

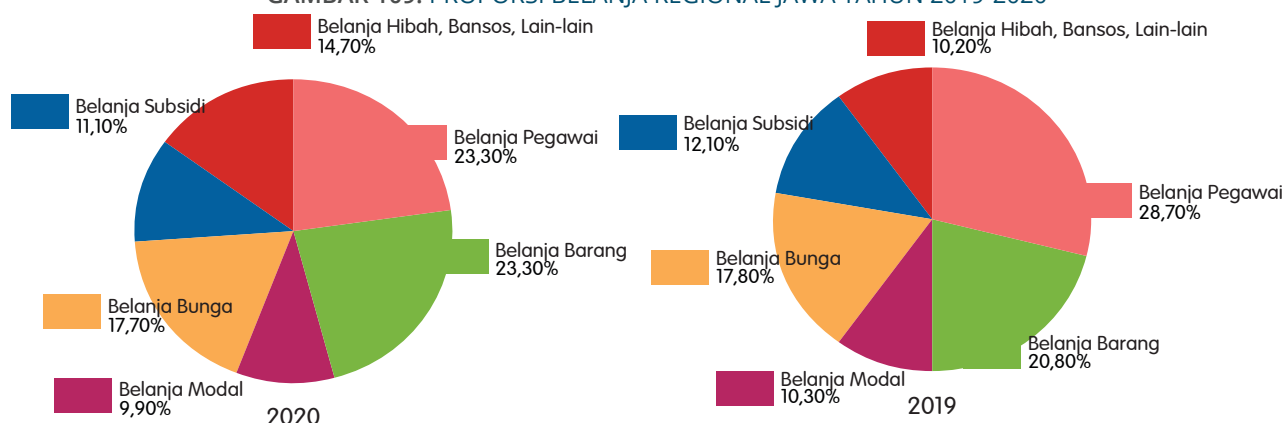
pajak nasional terhadap PDB yang mencapai 8,33 persen. Rasio pajak terhadap PDRB di Jawa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,0 persen di tahun 2019 dan 19,8 persen pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Hal ini tentu berpengaruh terhadap rasio pajak per kapita yang mengalami penurunan sebesar 17,2 persen sebagai akibat turunnya penerimaan perpajakan sebesar 16,5 persen dan disisi lain laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan 0,8 persen.

2.II.B. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Tahun 2020, secara agregat Belanja Konsolidasian di Jawa mengalami kontraksi sebesar 9,7 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya Belanja Pemerintah. Dari total belanja Rp2.611.605,67 miliar sebesar 76,0 persen bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan banyak anggaran seperti Bantuan Sosial di Kementerian Sosial dan Belanja Bantuan Pemerintah yang anggarannya terpusat pada K/L yang berkedudukan di Jakarta termasuk gaji beberapa Satker daerah yang sudah terpusat di K/L Pusat. Secara spasial tiga provinsi yang memiliki kontribusi Belanja Pemerintah paling besar adalah DKI Jakarta (75,6 persen), Jawa Barat (8,0 persen) dan Jawa Timur (7,5 persen).

Jika dibandingkan komposisi Belanja Pemerintah antara 2020 dengan tahun 2019, terlihat adanya perubahan proporsi yang cukup signifikan yakni pada Belanja Bantuan Sosial naik 3,4 persen

GAMBAR 109. PROPORSI BELANJA REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2020



Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPD, diolah

dan Belanja Pegawai turun 5,4 persen. Proporsi Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Subsidi, Bunga dan Belanja Bantuan Sosial juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 89,5 persen menjadi 88,7 persen. Disisi lain proporsi Belanja Modal juga mengalami penurunan dari 10,3 persen menjadi 9,9 persen.

Ditahun yang sama, rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk sebesar Rp17,22 juta. Artinya, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp17,22 juta per satu orang penduduk, dalam rangka mensejahterakan dan melayani rakyatnya di regional Jawa. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

2.II.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2020, defisit pemerintah konsolidasian di Jawa mencapai minus Rp1.009.750,74 miliar dengan tingkat rasio terhadap PDRB 10,9% atau naik 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan naiknya jumlah defisit anggaran konsolidasian. Rasio tersebut lebih besar dibanding defisit APBN terhadap PDB yang hanya 6,1 persen. Defisit di tingkat regional menandakan penerimaan belum optimal sehingga perlu usaha ekstra pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan yang ada khususnya sektor unggulan.

2.III. REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA

Hasil konsolidasi antara laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerinah Daerah Konsolidasi di regional Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa selama kurun

TABEL 68. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	
	Konsolidasi	Konsolidasi	Growth (%)	Konsolidasi
Pendapatan Negara dan Hibah	58.108,98	65.204,37	12,2	57.439,79
Penerimaan Perpajakan	28.001,18	30.776,93	9,9	22.611,91
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.701,96	8.827,05	14,6	9.511,32
Penerimaan Hibah	713,92	1.236,11	73,1	3.044,45
Pendapatan Transfer	21.691,92	24.364,28	12,3	22.272,1
Belanja Negara	93.741,43	98.544,45	5,1	94.242,81
Belanja Pemerintah	87.465,29	91.498,57	4,6	85.076,78
Belanja Transfer	6.276,14	7.045,88	12,3	9.166,03
Surplus/Defisit Anggaran	(35.632,45)	(33.340,08)	(6,4)	(36.803,02)
Pembiayaan	5.161,32	2.524,91	(51,1)	4.447,50
Penerimaan Pembiayaan	5.431,89	4.228,29	(22,16)	4.815,02
Pengeluaran Pembiayaan	270,57	1.703,38	529,6	367,52
SiLPA/(SiKPA)	(30.471,13)	(30.815,17)	1,1	(32.355,52)

*) dalam miliar rupiah

Sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

TABEL 69. INDIKATOR FISKAL REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2018-2020

Indikator Fiskal	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan Konsolidasi (miliar Rp)	28.001,18	30.776,93	22.611,92
Surplus defisit Konsolidasi (miliar Rp)	(35.632,45)	(33.340,08)	(36.803,02)
Belanja Konsolidasi (miliar Rp)	93.741,43	98.544,45	94.242,81
PDRB (miliar Rp)	464.242,00	491.289,31	456.434,97
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	14.747,20	14.951,60	15.153,70
Rasio Pajak terhadap PDRB (persen)	6,03	6,26	4,95
Rasio Pajak Per Kapita (juta Rp)	3,94	4,36	3,86
Rasio Defisit terhadap PDRB (persen)	7,67	6,79	7,84
Rasio Belanja Per Kapita (juta Rp)	6,35	6,59	6,22

Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPD, diolah

waktu tiga tahun terakhir anggaran mengalami defisit.

Tahun 2020, Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian pada regional Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan yang disumbang oleh penurunan Penerimaan Perpajakan sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah justru mengalami kenaikan. Dari sisi Belanja Negara Konsolidasian juga mengalami penurunan yang disumbang oleh penurunan Belanja Pemerintah sedangkan di sisi lain Belanja TKDD mengalami kenaikan. Penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian yang lebih besar dari penurunan Belanja Negara Konsolidasian menyebabkan kenaikan defisit anggaran sebesar 10,4 persen. Pembiayaan tumbuh 76,1 persen hanya mampu menutup Defisit Anggaran Konsolidasian sebesar 12,1 persen dan menghasilkan SiKPA Rp32.355,52 miliar.

2.III.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASI

Tahun 2020, dampak COVID-19 berpengaruh sangat signifikan pada Penerimaan Perpajakan di regional Bali dan Nusa Tenggara yang turun sampai dengan 26,5 persen dari Tahun 2019. Penurunan terbesar khususnya terjadi pada Provinsi Bali yang turun 35,1 persen. Ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak di regional Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan signifikan setelah dihantam dengan pandemi COVID-19, khususnya Provinsi Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan terbesar. Jika penerimaan pajak mengalami *shortfall*, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah mampu

tumbuh positif masing-masing 7,7 persen dan 146,3 persen. Provinsi Bali menjadi penyumbang terbesar atas kenaikan Penerimaan Hibah dengan kontribusi 59,4 persen dan mengalami kenaikan 757,4 persen dari tahun sebelumnya.

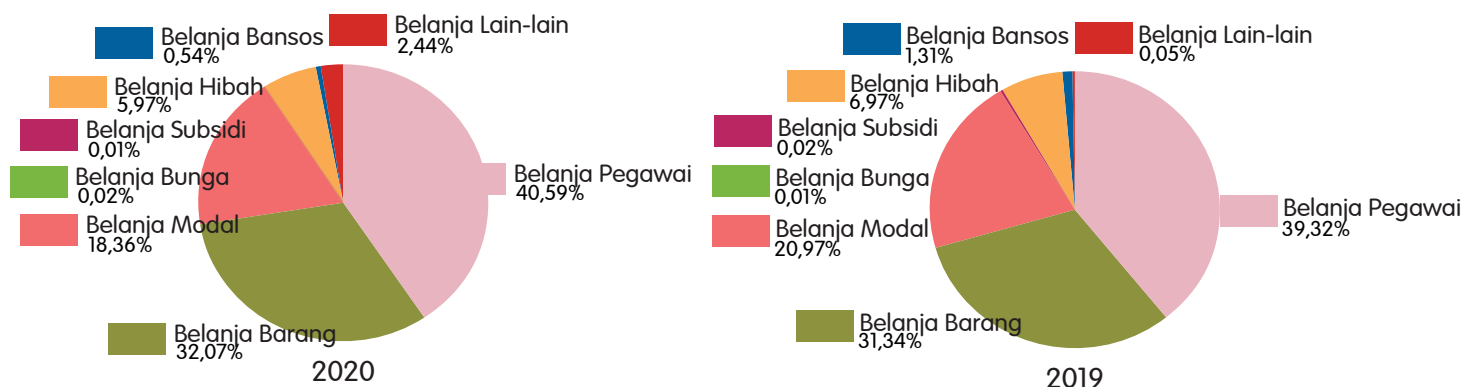
Tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB regional Bali dan Nusa Tenggara adalah 4,95 persen, mengalami penurunan seiring dengan turunnya Penerimaan Pajak. Rasio pajak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dicatatkan yaitu sebesar 6,26 persen pada tahun 2019 dan 6,03 persen pada tahun 2018. Jika dilihat dan dibandingkan dengan dengan rasio Pajak Konsolidasian terhadap total PDRB yang mencapai 10,39 persen maupun rasio pajak nasional terhadap PDB yang mencapai 8,33 persen, rasio pajak regional Bali dan Nusa Tenggara masih di bawah rata-rata.

2.III.B. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASI

Pada tahun 2020, secara keseluruhan belanja pada regional Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Realisasi Belanja Pemerintah turun 7 persen yang merupakan kontribusi terbesar dalam persentase penurunan total belanja konsolidasi. Meskipun Belanja Transfer mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 30,1 persen, angka tersebut tidak cukup mendongkrak peningkatan total belanja konsolidasi.

Dilihat lebih detail, Belanja Pemerintah Konsolidasi sebesar Rp85.076,78 miliar merupakan kontribusi dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp28.285,61

GAMBAR 110. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH PADA REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA 2019-2020



Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPKD, diolah

miliar dan belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp56.791,17 miliar. Besarnya belanja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa kontribusi Pemerintah Daerah dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Bali dan Nusa Tenggara cukup besar.

Perbandingan antara Belanja Pemerintah tahun 2020 dengan tahun 2019, masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang secara agregat pada tahun 2020 naik 1,27 persen serta Belanja Barang yang naik 0,73 persen. Sedangkan untuk Belanja Modal secara agregat turun sebesar 2,61 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih meningkatkan konsumsi pemerintah dan menurunkan kontribusi investasi pemerintah mengingat kondisi perekonomian pada wilayah regional Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Rasio belanja per kapita terhadap PDRB tahun 2020 mengalami penurunan dan menjadi rasio belanja terkecil selama tiga tahun terakhir. Angka sebesar Rp6,18 juta per kapita menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah konsolidasi yang digunakan untuk menyejahterakan penduduk di wilayah regional Bali dan Nusa Tenggara. Rasio belanja per kapita tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan rasio belanja per kapita nasional sebesar Rp11,44 juta per kapita. Selain dari faktor menurunnya jumlah belanja konsolidasi, jumlah penduduk di wilayah regional Bali dan Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan.

2.III.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASI

Secara Agregat, Defisit Anggaran Konsolidasian tahun 2020 mengalami kenaikan Rp3.462,94 miliar atau naik 10,39 persen dari sebelumnya Rp33.340,08 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp36.803,02 miliar. Kenaikan Defisit Anggaran Konsolidasian tersebut disebabkan karena penurunan Penerimaan Pajak Konsolidasian karena dari sisi Belanja Negara secara agregat juga mengalami penurunan.

Dilihat dari rasio Defisit Anggaran Konsolidasian atas PDRB selama tiga tahun terakhir, tahun 2020 memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar 8,06 persen. Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari sisi Belanja Pemerintah lebih besar dari Investasi

Pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Pemerintah memiliki efek yang jangka waktunya lebih pendek dalam perekonomian dibandingkan dengan investasi terutama terkait dengan pengadaan aset tetap. Dalam kondisi perekonomian yang melambat, kontribusi pemerintah dari Belanja Pemerintah lebih dibutuhkan untuk dapat segera memperbaiki kondisi perekonomian. Namun, dalam kondisi perekonomian yang relatif baik, kontribusi pemerintah dari investasi dirasa lebih baik untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

2.IV. REGIONAL KALIMANTAN

Hasil konsolidasi antara laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi di regional Kalimantan menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami defisit anggaran. Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah hanya mampu menutup defisit anggaran sebesar rata-rata 14 persen.

Tahun 2020, hampir semua komponen Pendapatan Negara dan Hibah kecuali Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan. Berbeda dengan tren yang terjadi di beberapa regional yang mengalami kenaikan Belanja Negara, regional Kalimantan justru mengalami penurunan jumlah Belanja Negara. Sehingga meski Defisit Anggaran Konsolidasian tetap mengalami kenaikan 2,05 persen, namun angka tersebut terhitung lebih kecil dibandingkan Defisit Anggaran Konsolidasian di regional lain. Pembiayaan yang tumbuh sebesar 21,96 persen hanya mampu menutup defisit sebesar 18,07 persen.

2.IV.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian regional Kalimantan sebesar Rp62.778,87 miliar atau mengalami penurunan 14,01 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya target pendapatan perpajakan pemerintah pusat sebagai hasil dari perubahan APBN yang dilakukan melalui realokasi dan refocusing dalam rangka stabilitas ekonomi dan menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Total pendapatan tersebut didominasi

TABEL 70. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019		2020	
	Konsolidasi	Konsolidasi	Growth (%)	Konsolidasi	Growth (%)
Pendapatan Negara dan Hibah	66.267,64	73.008,52	10,17	62.778,87	(14,01)
Penerimaan Perpajakan	54.894,40	60.275,62	9,80	50.212,91	(16,69)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.539,30	10.459,65	9,65	10.630,22	1,63
Penerimaan Hibah	658,13	1.491,54	126,63	1.194,93	(19,89)
Pendapatan Transfer	1175,81	781,71	(33,52)	740,81	(5,23)
Belanja Negara	134.154,83	148.491,65	10,69	139.810,59	(5,85)
Belanja Pemerintah	124.184,14	135.426,79	9,05	128.284,94	(5,27)
Belanja Transfer	9.970,69	13.064,86	31,03	11.525,65	(11,78)
Surplus/Defisit Anggaran	(67.887,19)	(75.483,13)	11,19	(77.031,72)	2,05
Pembiayaan	5.428,54	11.409,90	110,18	13.915,81	21,96
Penerimaan Pembiayaan	6.094,91	12.503,43	105,15	14.556,54	16,42
Pengeluaran Pembiayaan	666,37	1093,53	64,10	640,73	(41,41)
SiLPA/(SiKPA)	(62.458,65)	(64.073,23)	2,59	(63.115,91)	(1,49)

*) dalam miliar rupiah

Sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

oleh Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan proporsi masing-masing 80,0 persen dan 16,9 persen.

Secara spasial, hampir semua provinsi mengalami penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian. Provinsi yang mengalami penurunan paling dalam adalah Kalimantan Tengah (19,7 persen) yang disebabkan oleh penurunan Penerimaan Perpajakan yang mencapai 10,5 persen akibat pandemi COVID-19 sedangkan Penerimaan Perpajakan adalah sumber penerimaan utama pada wilayah tersebut (80 persen dari total Pendapatan Negara dan Hibah).

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB regional Kalimantan pada tahun 2020 mencapai 6,99 persen. Angka tersebut lebih rendah baik dibanding dengan rasio Pajak Konsolidasian terhadap total PDRB yang mencapai 10,39 persen maupun rasio pajak nasional terhadap PDB yang mencapai 8,33 persen. Rasio pajak di Kalimantan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai 7,94 persen di tahun 2019 dan 7,57 persen pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 2,27 persen. Hal ini berpengaruh terhadap rasio pajak per kapita yang mengalami penurunan sebesar 3,82 persen sebagai akibat turunnya penerimaan perpajakan sebesar 16 persen.

2.IV.B. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN

Pandemic COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan, akan tetapi juga terhadap belanja negara. Pada tahun 2020 realisasi belanja pemerintah yaitu sebesar Rp139.810,59 miliar, turun sebesar 5,85 persen. Realisasi belanja turun dikarenakan terdapat pengalihan focus belanja untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya.

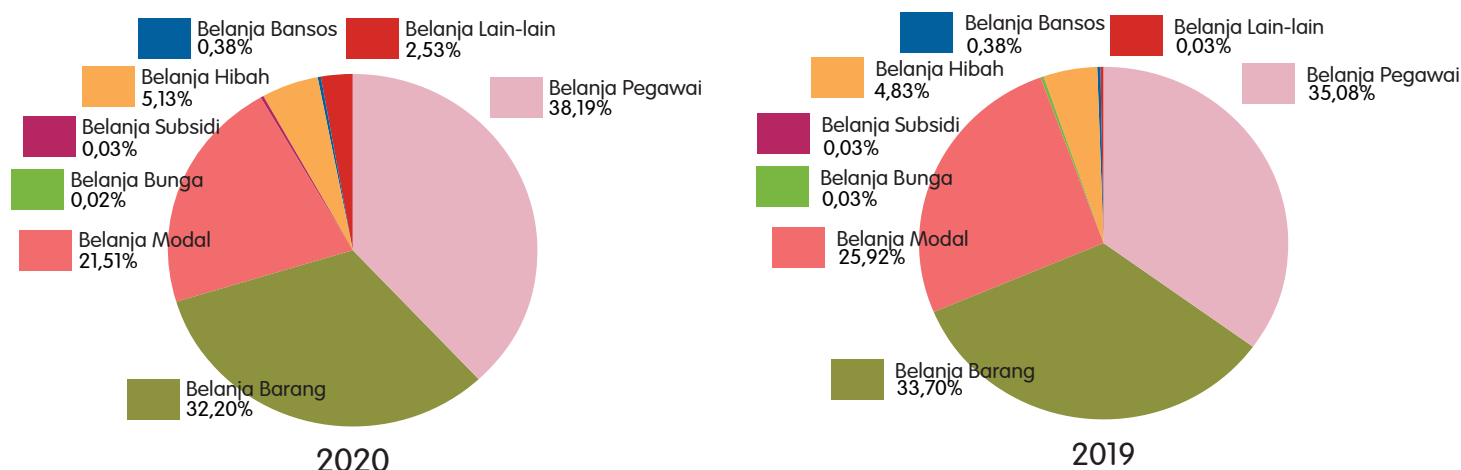
Sedangkan untuk realisasi Belanja perkapita yaitu sebesar Rp8,51 juta per penduduk, turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp9,15

TABEL 71. INDIKATOR FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018-2020

Indikator Fiskal	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (miliar Rp)	66.267,64	73.008,52	62.778,87
Surplus/defisit Konsolidasian (miliar Rp)	(67.887,19)	(75.483,13)	(77.031,72)
Belanja Konsolidasian (miliar Rp)	134.154,83	148.491,65	139.810,59
PDRB (miliar Rp)	875.368,88	919.007,08	898.173,78
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	16.017	16.227	16.433
Rasio Pajak terhadap PDRB (persen)	7,57	7,94	6,99
Rasio Pajak Per Kapita (juta Rp)	4,14	4,50	3,82
Rasio Defisit terhadap PDRB (persen)	7,75	8,21	8,58
Rasio Belanja Per Kapita (juta Rp)	8,38	9,15	8,51

Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

GAMBAR 111. PROPORSI BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2019-2020



Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPPDK, diolah

juta per penduduk. Belanja perkapita digunakan untuk melihat seberapa besar pemerintah mengeluarkan uang untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan menurunnya belanja perkapita, maka kesejahteraan masyarakat pun ikut menurun.

2.IV.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2020, defisit pemerintah konsolidasian di Kalimantan mencapai Rp77.031,72 miliar naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan tingkat rasio defisit terhadap PDRB sebesar 6,15%. Rasio tersebut sedikit lebih besar dibanding defisit APBN terhadap PDB yang hanya 6,1 persen. Defisit di tingkat regional menandakan penerimaan belum optimal sehingga perlu usaha ekstra pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menggali

potensi-potensi sumber penerimaan yang ada khususnya sektor unggulan.

2.V. REGIONAL SULAWESI

Hasil konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi di regional Sulawesi menunjukkan anggaran selama tiga tahun terakhir selalu mengalami defisit. Tahun 2019, Defisit Anggaran Konsolidasian tersebut sempat mengalami penurunan 4,06 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 Defisit Anggaran Konsolidasian tumbuh 15,88 persen seiring dengan terjadinya penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian.

Tahun 2019 adalah tahun di mana seluruh

TABEL 72. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	Growth (%)	2020	Growth (%)
	Konsolidasi	Konsolidasi		Konsolidasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	102.753,70	111.894,15	8,90	85.497,17	(23,59)
Penerimaan Perpajakan	29.998,73	33.771,33	12,58	30.455,23	(9,82)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.587,89	11.436,06	8,01	10.463,99	(8,50)
Penerimaan Hibah	1.515,62	4.553,46	200,44	1.695,01	(62,78)
Pendapatan Transfer	60.651,46	62.133,30	2,44	42.882,94	(30,98)
Belanja Negara	189.821,52	195.423,16	2,95	182.292,89	(6,72)
Belanja Pemerintah	147.220,99	151.085,43	2,62	142.321,66	(5,80)
Belanja Transfer	42.600,53	44.337,73	4,08	39.971,23	(9,85)
Surplus/Defisit Anggaran	(87.067,82)	(83.529,01)	4,06	(96.795,72)	(15,88)
Pembiayaan	4.178,49	4.231,34	1,26	7.275,10	71,93
Penerimaan Pembiayaan	4.964,75	5.289,66	6,54	7.848,96	48,38
Pengeluaran Pembiayaan	786,26	1.058,32	34,60	573,86	(45,78)
SILPA/(SiKPA)	(82.889,33)	(79.297,67)	(4,33)	(89.520,62)	(12,89)

*) dalam miliar rupiah

Sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

TABEL 73. INDIKATOR FISKAL REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2020

Indikator Fiskal	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan Konsolidasi (miliar Rp)	29.998,73	33.771,33	30.455,23
Surplus defisit Konsolidasi (miliar Rp)	(87.067,82)	(83.529,01)	(96.795,72)
Belanja Konsolidasi (miliar Rp)	189.821,52	195.423,16	182.292,89
PDRB (miliar Rp)	947.679,01	1.036.971,65	1.052.037,50
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	19.354,20	19.555,00	19.751,30
Rasio Pajak terhadap PDRB (persen)	3,17	3,26	2,89
Rasio Pajak Per Kapita (juta Rp)	1,55	1,73	1,54
Rasio Defisit terhadap PDRB (persen)	9,19	8,06	9,20
Rasio Belanja Per Kapita (juta Rp)	9,81	9,99	9,23

Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

komponen konsolidasian baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian tercatat tumbuh 8,9 persen, Belanja Negara Konsolidasian naik 2,95 persen dan Defisit Anggaran Konsolidasian berkontraksi 4,06 persen. Berbanding terbalik dengan tahun 2020, yang hampir seluruh komponen mengalami kontraksi kecuali pembiayaan. Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian turun sebesar 23,59 persen dan Belanja Negara turun 6,72 persen.

2.V.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2020, secara agregat realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian regional Sulawesi mengalami penurunan Rp26.396,98 miliar atau sebesar 23,59 persen dari tahun sebelumnya. Komponen Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Penerimaan Hibah yang turun mencapai 62,78 persen dan Pendapatan Transfer yang turun 30,98 persen. Jika di sebagian besar kawasan, komponen yang memiliki kontribusi terbesar adalah Penerimaan Pajak, namun di regional Sulawesi Pendapatan Transfer yang memiliki kontribusi paling besar yakni mencapai 50,16 persen. Proporsi Pendapatan Transfer tersebut lebih tinggi 14,54 persen dari Penerimaan Perpajakan.

Secara spasial, hampir semua provinsi mengalami penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian kecuali Sulawesi Barat yang tumbuh 14,52 persen. Provinsi yang mengalami penurunan Pendapatan Negara dan Hibah paling tajam adalah Sulawesi tengah dengan nilai kontraksi 75,77 persen yang disebabkan oleh merosotnya

Penerimaan Hibah dan Penerimaan Transfer.

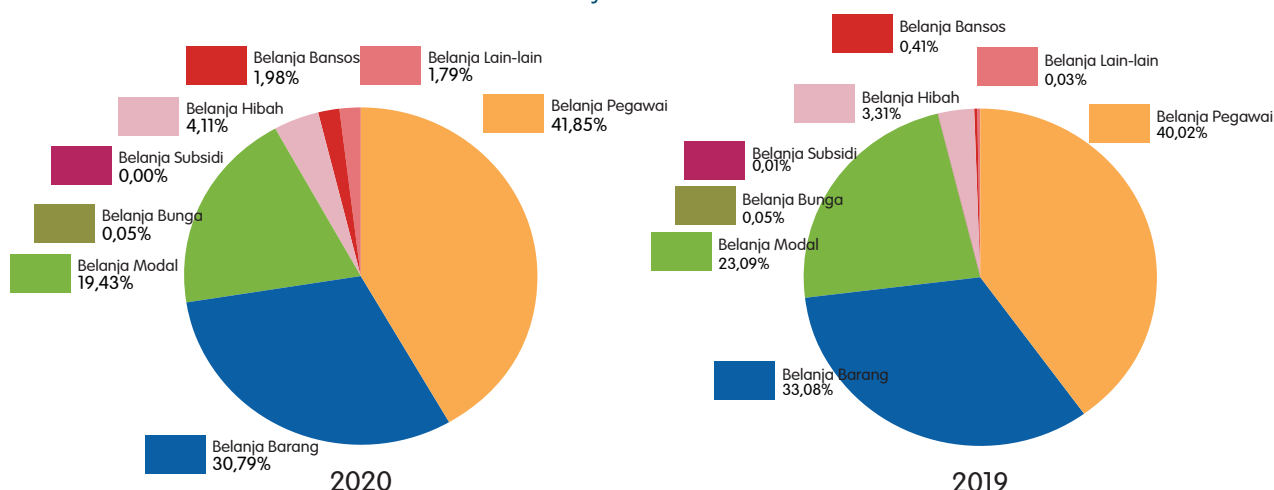
Tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB regional Sulawesi Tahun 2020 merupakan rasio pajak terkecil selama tiga tahun terakhir yakni sebesar 2,89 persen. Angka tersebut lebih rendah baik dibanding dengan rasio Pajak Konsolidasian terhadap total PDRB yang mencapai 10,39 persen maupun rasio pajak nasional terhadap PDB yang mencapai 8,33 persen. Rasio pajak di Sulawesi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,26 persen di tahun 2019 dan 3,17 persen pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang turun 6,2 persen dari sebelumnya tahun 2019 mencapai 7,0 persen menjadi 0,2 persen. Pajak per kapita juga mengalami penurunan dari Rp1,73 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1,54 juta sebagai akibat turunnya penerimaan perpajakan sebesar 9,82 persen dan disisi lain laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan 1,0 persen.

2.V.B. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASI

Pada tahun 2020, secara agregat Belanja Negara Konsolidasian pada regional Sulawesi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Realisasi belanja konsolidasi turun 6,72 persen. Belanja transfer ke daerah turun sebesar Rp4.366,50 miliar, dan belanja pemerintah turun sebesar Rp8.763,77 miliar.

Belanja Pemerintah Konsolidasi sebesar Rp142.321,66 miliar memiliki komponen Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp47.158,38 miliar dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp95.163,28 miliar. Dari segi komposisinya, realisasi belanja konsolidasi masih didominasi oleh belanja pegawai

GAMBAR 112. PROPORSI BELANJA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2020



Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPD, diolah

dan belanja barang. Belanja modal pada regional Sulawesi pada tahun 2020 masih berada di bawah 20 persen. Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya, komposisi belanja modal bisa semakin meningkat, karena pengembangan infrastruktur pada regional Sulawesi masih sangat dibutuhkan.

Rasio belanja per kapita terhadap PDRB tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,23 juta per kapita, mengalami penurunan dan menjadi rasio belanja terkecil selama tiga tahun terakhir. Penurunan rasio belanja berkisar di bawah 8 persen dari rasio belanja per kapita terhadap PDRB tahun yang lalu. Penurunan rasio ini terjadi baik dari nominal belanja, serta peningkatan PDRB wilayah regional Sulawesi.

2.V.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASI

Posisi perhitungan keseimbangan umum konsolidasi untuk wilayah regional Sulawesi mengalami defisit sebesar Rp96.795,72 miliar. Seluruh komponen pada bagian penerimaan yang mengalami penurunan sebesar 23,59 persen tidak diimbangi dengan penurunan belanja yang hanya turun sebesar 6,72 persen. Dilihat dari rasio defisit atas PDRB selama tiga tahun terakhir, rasio defisit 2020 merupakan rasio defisit tertinggi yaitu sebesar 9,20 persen. Dengan belanja pemerintah yang besar diharapkan mampu menggerakkan perekonomian regional wilayah Sulawesi dalam masa pandemi COVID-19.

2.VI. REGIONAL PAPUA MALUKU

Hasil konsolidasi antara laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi di regional Papua Maluku menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami defisit anggaran. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu menutup defisit anggaran sebesar rata-rata 6 persen.

Secara umum, Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian serta Belanja Negara Konsolidasian tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan aktivitas perekonomian terhambat sehingga pendapatan perpajakan mengalami shortfall. Demikian juga dengan belanja, akibat adanya pengurangan dan refocussing anggaran, belanja difokuskan untuk membiayai penanggulangan COVID-19 dan dampaknya. Sehingga belanja pada sektor produktif dikurangi anggarannya. Meski sama-sama mengalami penurunan, secara nominal penurunan Belanja Negara Konsolidasian lebih besar dibandingkan penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian sehingga Defisit Anggaran Konsolidasian yang dihasilkan mengalami penurunan sebesar 5,86 persen. Pembiayaan yang tumbuh sebesar 42,89 persen hanya mampu menutup defisit sebesar 8,0 persen.

2.VI.A. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

TABEL 74. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN REGIONAL PAPUA MALUKU TAHUN 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	
	Konsolidasi	Konsolidasi	Growth (%)	Konsolidasi
Pendapatan Negara dan Hibah	27.219,94	27.079,63	(0,52)	20.873,79
Penerimaan Perpajakan	18.759,58	18.334,28	(2,27)	16.794,93
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.187,99	6.253,47	1,06	4.026,02
Penerimaan Hibah	562,38	563,46	0,19	49,44
Pendapatan Transfer	1709,99	1928,42	12,77	3,4
Belanja Negara	128.191,51	133.388,67	4,05	120.952,95
Belanja Pemerintah	113.480,44	117.611,21	3,64	104.955,12
Belanja Transfer	14.711,07	15.777,46	7,25	15.997,83
Surplus/Defisit Anggaran	(100.971,57)	(106.309,04)	5,29	(100.079,16)
Pembiayaan	5.812,56	5.609,16	(3,50)	8.014,85
Penerimaan Pembiayaan	7.051,51	8.061,04	14,32	9.270,69
Pengeluaran Pembiayaan	1238,95	2.451,88	97,90	1.255,84
SILPA/(SiKPA)	(95.159,01)	(100.699,88)	5,82	(92.064,31)

*) dalam miliar rupiah

Sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

Hingga akhir tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian regional Papua Maluku sebesar Rp20.873,79 miliar atau mengalami penurunan 22,92 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya target pendapatan perpajakan pemerintah pusat sebagai hasil dari perubahan APBN yang dilakukan melalui realokasi dan refocussing dalam rangka stabilitas ekonomi dan menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Total pendapatan tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak dengan proporsi masing-masing 80,46 persen dan 19,29 persen.

Secara spasial, semua provinsi mengalami penurunan Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian. Provinsi yang mengalami penurunan pendapatan paling dalam adalah Papua Barat (50,9 persen) yang disebabkan oleh penurunan Penerimaan Perpajakan dan PNPB akibat pandemi COVID-19 sedangkan kedua komponen pendapatan tersebut adalah sumber penerimaan

utama pada wilayah tersebut (99 persen dari total Pendapatan Negara dan Hibah)

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB regional Papua Maluku pada tahun 2020 mencapai 5,01 persen, jauh lebih rendah dibanding rasio pajak nasional sebesar 11,6 persen. Rasio pajak di Papua Maluku mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7,21 persen di tahun 2019 dan 6,83 persen pada tahun 2018. Meski perekonomian Papua Maluku tahun 2020 perekonomian Papua Maluku tumbuh positif 1,8 persen, namun bukan berarti regional ini tidak mengalami guncangan perekonomian akibat COVID-19. Pertumbuhan yang positif tersebut lebih disebabkan karena pada tahun sebelumnya ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni 9,0 persen.

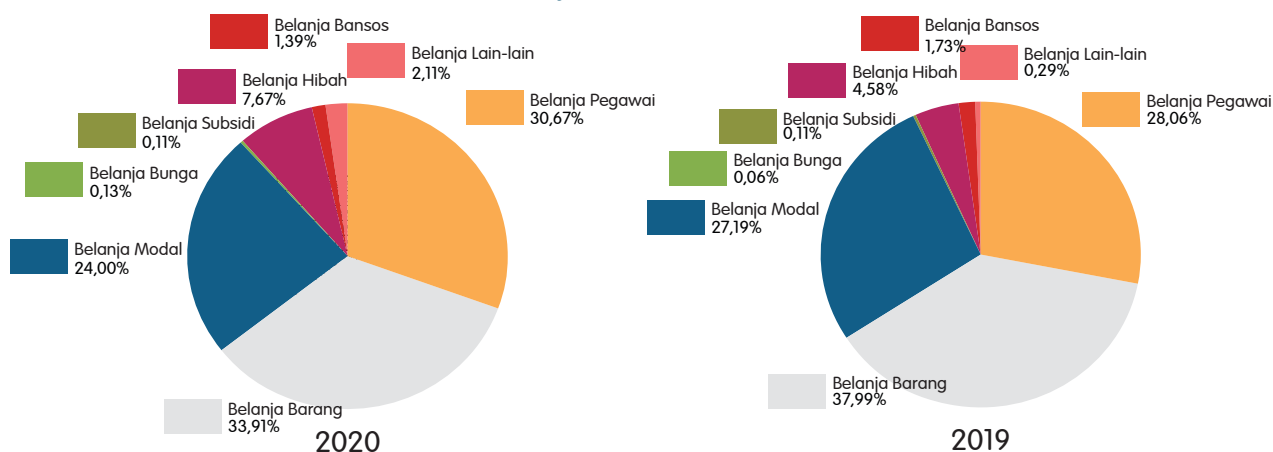
2.VI.B. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

TABEL 75. INDIKATOR FISKAL REGIONAL PAPUA MALUKU TAHUN 2018 - 2020

Indikator Fiskal	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (miliar Rp)	18.759,58	18.334,28	16.794,93
Surplus/defisit Konsolidasian (miliar Rp)	(100.971,57)	(106.309,04)	(100.079,16)
Belanja Konsolidasian (miliar Rp)	128.191,51	133.388,67	120.952,95
PDRB (miliar Rp)	274.668,59	254.245,73	257.903,46
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	7.209,9	7.314,9	7.418,5
Rasio Pajak terhadap PDRB (persen)	6,83	7,21	6,51
Rasio Pajak Per Kapita (juta Rp)	2,60	2,51	2,26
Rasio Defisit terhadap PDRB (persen)	36,76	41,81	38,80
Rasio Belanja Per Kapita (juta Rp)	17,78	18,24	16,30

Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

GAMBAR 113. PROPORSI BELANJA REGIONAL PAPUA MALUKU TAHUN 2019-2020



Sumber: KFR Kanwil DJPb, LKPP, LKPD, diolah

Tahun 2020, secara agregat belanja konsolidasian di Papua Maluku mengalami kontraksi sebesar 21,32 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan turunnya Belanja Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan 7,26 persen. Dari total Belanja Negara Rp120.952,95 miliar, sebesar 66,5 persen bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Sumatera lebih besar daripada Pemerintah Pusat. Secara spasial provinsi yang memiliki kontribusi Belanja Pemerintah paling besar adalah Papua (47,26 persen) diikuti oleh Papua Barat (23,80 persen).

Jika dibandingkan komposisi Belanja Pemerintah antara 2020 dengan tahun 2019, terlihat beberapa belanja mengalami kenaikan proporsi yakni Belanja Pegawai naik 2,61 persen, Belanja Hibah naik 3,19 persen dan Belanja Lain-lain naik menjadi 2,11 persen dari sebelumnya 0,29 persen. Sedangkan di sisi lain Belanja Barang dan Belanja Modal justru mengalami penurunan masing-masing 4,04 persen dan 3,19 persen. Proporsi Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Subsidi, Bunga dan Belanja Bantuan Sosial juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 72,52 persen menjadi 74,61 persen. Disisi lain proporsi Belanja Modal mengalami penurunan dari 27,18 persen menjadi 24,00 persen. Artinya, belanja pemerintah konsolidasian tahun 2020 difokuskan pada belanja dalam rangka penanganan COVID-19.

Ditahun yang sama, rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020

sebesar Rp16,3 juta, turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp18,24 juta. Hal ini berarti pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerintah telah mengeluarkan sebesar Rp16,3 juta untuk setiap penduduk wilayah Papua Maluku.

2.VI.C. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2020, defisit pemerintah konsolidasian di Papua Maluku mencapai Rp100.079,16 miliar turun 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan tingkat rasio defisit terhadap PDRB sebesar 38,8 persen. Rasio tersebut jauh lebih besar dibanding defisit APBN terhadap PDB yang hanya 6,1 persen. Untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan potensial (sektor unggulan) pada wilayah Papua Maluku agar dapat meningkatkan pendapatannya.

3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT

Secara garis besar, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan belanja negara untuk mencapai tujuan pemerintah seperti penurunan ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan. Umumnya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) dan kebijakan fiskal kontraksi (*contractionary fiscal policy*). Perbedaan keduanya terletak pada

pendirian pemerintah mengenai penerimaan dan belanjanya.

Kebijakan fiskal yang ekspansif terjadi ketika pemerintah meningkatkan belanjanya serta menurunkan penerimaan pajak. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi ekspansif adalah mendorong perekonomian. Sebaliknya, suatu kebijakan fiskal dapat dikategorikan kontraksioner ketika pemerintah menurunkan pengeluarannya dan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan fiskal kontraksioner bertujuan untuk meredam tekanan inflasi yang terjadi ketika perekonomian mengalami overheating.

Selanjutnya, berdasarkan polanya terhadap siklus bisnis (*business cycle*) kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi prosiklikal (*pro-cyclical fiscal policy*) dan kontrasiklikal (*counter-cyclical fiscal policy*). Kebijakan fiskal prosiklikal bersifat mengikuti pola siklus bisnis, apabila perekonomian sedang berada dalam resesi maka pengeluaran pemerintah juga ikut rendah. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontrasiklikal bersifat bertentangan dengan siklus bisnis, sehingga ketika perekonomian sedang dalam kondisi resesi maka pengeluaran pemerintah justru meningkat.

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat merebaknya pandemi COVID-19. Terganggunya aktivitas ekonomi akibat COVID-19 direspon cepat oleh pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan keuangan negara yang diambil pemerintah berimplikasi kepada perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020, baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Dari sisi belanja negara, salah satu langkah extraordinary yang dilakukan pemerintah adalah mengucurkan anggaran sebesar Rp695,22 miliar untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Kebijakan countercyclical yang dilakukan pemerintah tersebut, berimbas pada

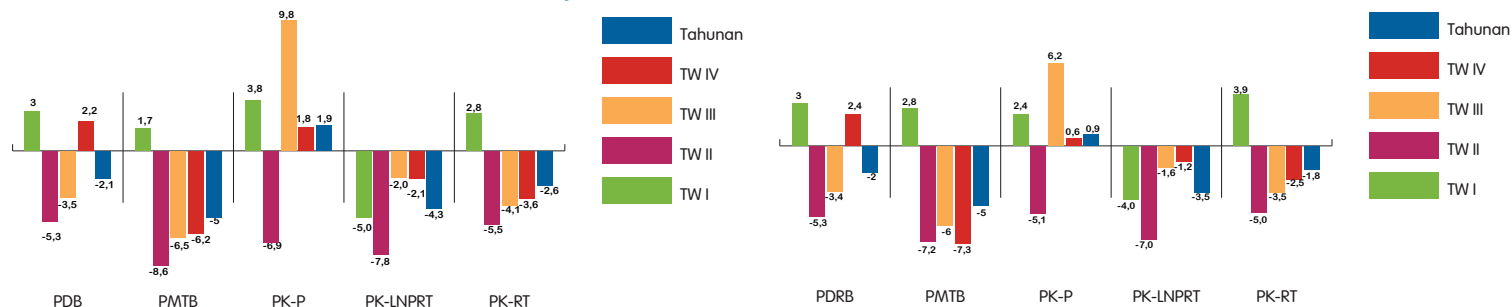
kenaikan belanja negara yang mencapai Rp2.593,3 miliar atau tumbuh positif 12,3 persen.

Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga khususnya pada saat resesi. Hal tersebut terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian meski ekonomi aktivitas ekonomi mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS, pada triwulan II-2020 ekonomi yang dilihat dari nilai PDB mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen seiring dengan mulai merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan kebijakan *extraordinary* yang dilakukan pemerintah, ekonomi membaik pada triwulan III-2020 yakni tumbuh 5,05 persen (qtoq) atau kontraksi menurun menjadi 3,49 persen (yoy) dan pada triwulan-IV menjadi minus 2,14 persen (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07 persen pada tahun 2020.

Dari sisi output nasional, laju PDB tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebagai salah satu pembentuk PDB tumbuh positif sebesar 1,94 persen (yoy) dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan proksi dari investasi mengalami kontraksi paling tajam yakni sebesar 4,95 persen (yoy) dibandingkan komponen lainnya. Meskipun demikian, jika melihat tren q to q perlahan(lahan PMTB juga menunjukkan tren yang membaik dari (8,6 persen pada triwulan II-2020 kemudian menjadi -6,48 persen (yoy) 15 persen (yoy) triwulan III-2020 dan 6,15 persen (yoy) pada triwulan IV-2020.

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami perbaikan pada triwulan IV-2020, yakni tumbuh -3,61 persen (yoy) dari -4,05 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan kembali menggeliatnya aktivitas ekonomi pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat dilakukan di beberapa daerah zona merah COVID-19. Secara

GAMBAR 114. LAJU PERTUMBUHAN PDB DAN PDRB TAHUN 2020



*) PDB: Produk Domestik Bruto; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; PMTB: Pembentukan Modal Tetap Bruto; PK(P: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; PK(LNPRT: Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga; PKRT: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.
Sumber: BPS, diolah

keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar 2.63 persen.

Dari sisi output regional, laju pertumbuhan PDRB seluruh provinsi tahun 2020 juga mengalami kontraksi 2,02 persen (yoy). Pada triwulan II-2020, PDRB sempat mengalami kontraksi 5,25 persen (yoy) dan perlahan membaik pada triwulan III-2020 dengan tumbuh negatif 3,42 persen (yoy) hingga kemudian mencapai minus 2,42 persen pada triwulan IV(2020).

3.VI.A. KONTRIBUSI KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP PDRB

Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market production). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dicerminkan/diproksi dari nilai yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa.

Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga menjadi satu-satunya pembentuk PDRB yang mampu tumbuh positif 6,24 persen (yoy) pada triwulan III-2020 dan 0,62 persen (yoy) pada triwulan IV-2020. Sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 0,9 persen. Meski sama-sama tumbuh positif,

namun laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya, kontribusi terbesar pendongkrak perekonomian dari sisi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berasal dari Belanja Pemerintah Pusat. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah telah memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata 9,15 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi tertinggi sebesar 9,35 persen pada tahun 2020.

3.VI.B. KONTRIBUSI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Berdasarkan sistem informasi rujukan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu.

Tahun 2020, sedikit berbeda dengan PMTB pada PDB yang menunjukkan tren perbaikan dengan semakin menurunnya nilai kontraksi dari triwulan II sampai triwulan IV, PMTB pada PDRB justru

TABEL 76. KOMPOSISI DAN KONTRIBUSI PMTB PEMERINTAH TERHADAP PDRB

TAHUN	PMTB Pemerintah			PMTB	Kontribusi PMTB Pemerintah Thd PMTB (%)
	PMTB Pempus	PMTB Pemda	TOTAL		
2015	1.179,78	962,50	2.142,28	3.728,15	57,46
2016	1.286,51	963,19	2.249,70	4.028,14	55,85
2017	1.395,37	1.168,80	2.564,17	4.395,14	58,34
2018	1.584,84	1.238,11	2.822,95	4.841,44	58,31
2019	1.747,54	1.122,28	2.869,82	5.189,18	55,30

Sumber: GFS, BPS, diolah

mengalami kontraksi paling dalam pada triwulan IV sebesar 7,26 persen (yoy) meskipun secara tahunan nilai kontraksinya lebih kecil dibandingkan PMTB pada PDB.

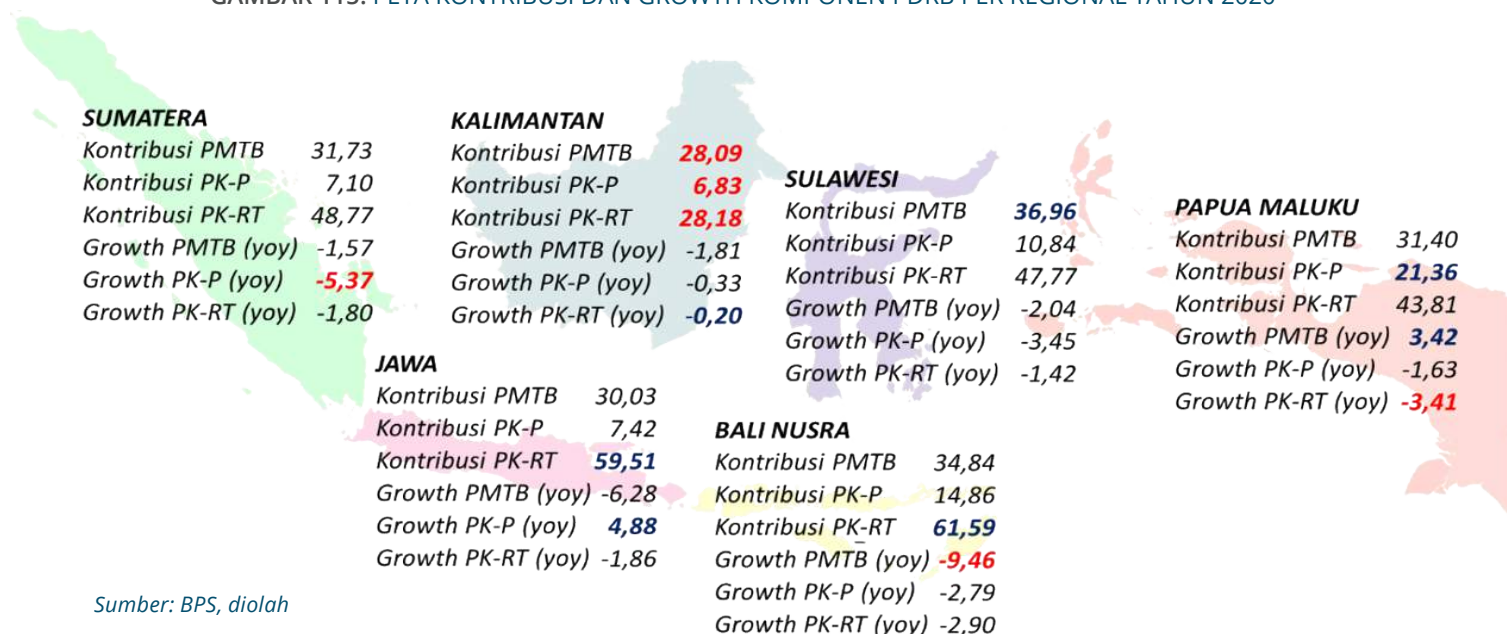
PMTB dalam hal ini termasuk seluruh penambahan modal yang dilakukan oleh sektor pemerintah maupun nonpemerintah (rumah tangga yang punya usaha, LNPRT, dan korporasi). PMTB Sektor Pemerintah sendiri merupakan hasil konsolidasi penambahan modal yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun (2015 – 2019) masing-masing 57 persen dan 43 persen. Hal ini menunjukkan investasi dari pemerintah masih didominasi oleh anggaran APBN. Kontribusi PMTB Sektor Pemerintah terhadap PDRB lebih besar dibandingkan kontribusi PMTB Nonpemerintah yakni rata-rata 57,05 persen.

Kontribusi PMTB terhadap PDRB tahun 2020 di tiap regional berkisar antara 28,09 – 36,96 persen. Dengan gap 8,87 persen, Sulawesi menjadi kawasan yang memiliki kontribusi PMTB

terbesar dan regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah. Berbeda dengan kontribusi PMTB yang memiliki gap dibawah 10 persen, nilai kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Rumah Tangga lebih variatif dengan gap yang cukup besar antar regional. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB Kawasan memiliki gap 14,53 persen dengan kontribusi tertinggi di regional Papua Maluku sebesar 21,36 persen dan kontribusi terendah di regional Kalimantan sebesar 6,83 persen. Sedangkan kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Kawasan memiliki gap terbesar yakni 33,47 persen dengan kontribusi tertinggi di regional Jawa sebesar 59,51 persen dan kontribusi terendah di regional Kalimantan sebesar 28,18 persen.

Diantara enam regional, Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah baik di komponen PMTB, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah maupun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Rendahnya kontribusi ketiga komponen pembentuk PDRB tersebut disebabkan karena

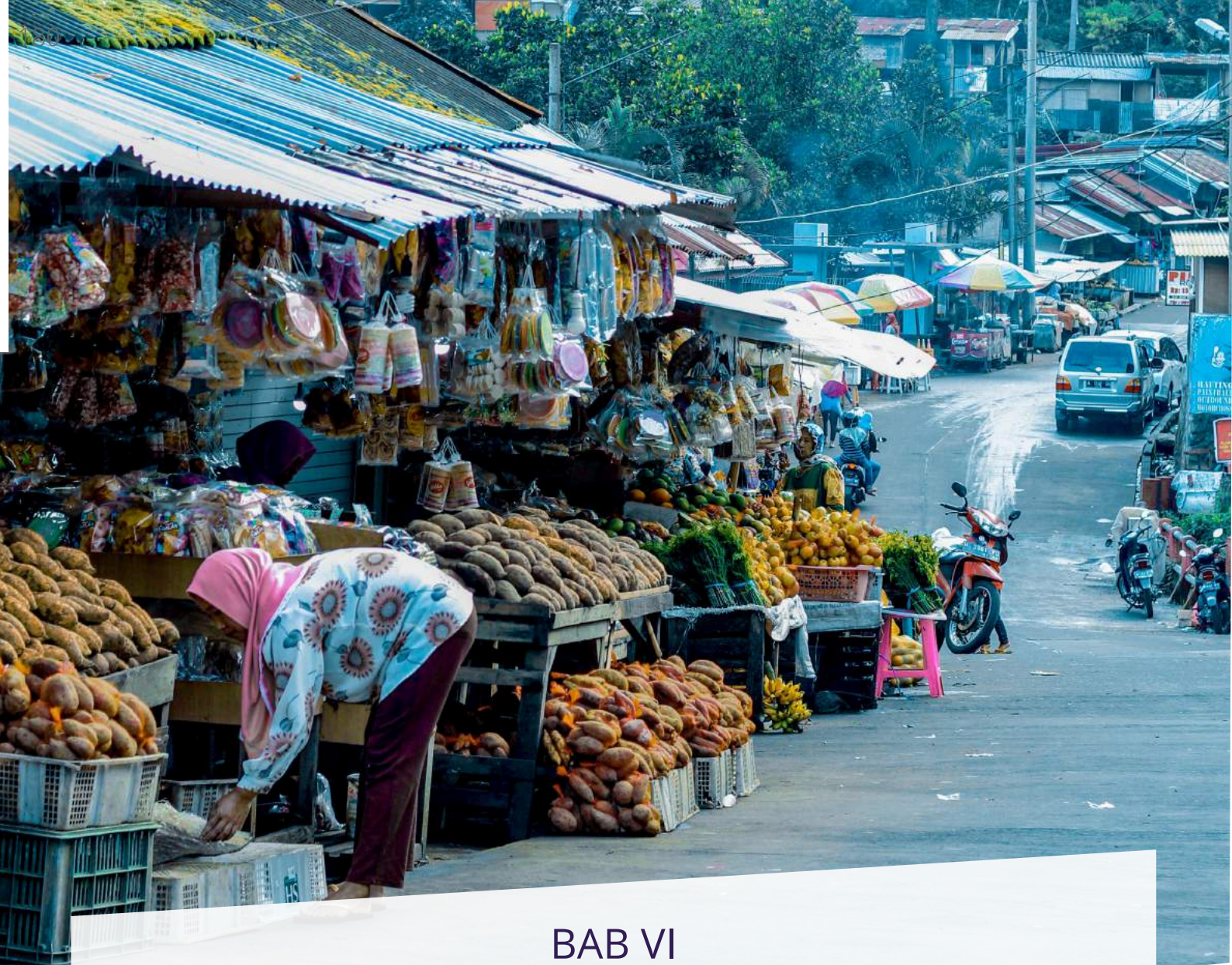
GAMBAR 115. PETA KONTRIBUSI DAN GROWTH KOMPONEN PDRB PER REGIONAL TAHUN 2020



Sumber: BPS, diolah

tingginya kontribusi Ekspor Neto yang mencapai 36,63 persen terhadap PDRB Kalimantan. Nilai Ekspor Neto Kalimantan mencapai Rp329.014,14 miliar atau sebesar 49,97 persen dari total Ekspor Neto seluruh kawasan. Meski kontribusi tiga komponen pembentuk PDRB berada di urutan terendah dan laju pertumbuhan ketiganya mengalami kontraksi, namun secara keseluruhan regional Kalimantan termasuk kawasan yang paling rendah tingkat kontraksinya.

Jika melihat laju pertumbuhan ketiga komponen pembentuk PDRB di masing-masing kawasan, Papua Maluku menjadi satu-satunya kawasan yang memiliki pertumbuhan PMTB positif 3,42 persen dan regional Bali Nusa Tenggara menjadi kawasan dengan tingkat kontraksi paling dalam yakni sebesar 9,46 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, regional Jawa menjadi satu-satunya yang memiliki pertumbuhan positif sebesar 4,88 persen. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah utamanya APBN banyak terpusat di Jakarta, sebagai pusat pemerintahan. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di kawasan ini mencapai 49,97 persen dari total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, secara keseluruhan mengalami kontraksi dengan tingkat kontraksi terbesar 3,41 persen di regional Papua Maluku dan kontraksi terendah di regional Kalimantan sebesar 0,2 persen.



BAB VI

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

Setiap regional memiliki sektor potensial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik daerah dan geografis serta kultur masyarakat dari masing-masing regional. Pengembangan wilayah yang diformulasikan dalam RPJMN oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah sepatutnya senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berjalan dengan baik karena sangat penting dan menentukan untuk mengoptimalkan sumber potensial tersebut dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.

Adapun sektor potensial dari masing masing regional yang dilihat berdasarkan

laju pertumbuhan sektor dalam beberapa tahun terakhir yaitu 1) Sektor pariwisata, perdagangan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, pertanian, kehutanan, dan perkebunan, serta jasa keuangan dan asuransi di Regional Sumatera; 2) Sektor informasi dan komunikasi, real estate, dan jasa kesehatan di Regional Jawa; 3) Sektor industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan perdagangan besar & eceran : reparasi mobil dan sepeda motor di Regional Kalimantan; 4) Sektor industri pengolahan dan pariwisata di Regional Sulawesi; 5) Sektor informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan; 6) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta perkebunan di Regional Maluku-Papua.

Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas sektor tersebut sangat dibutuhkan dan harus diimplementasikan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran sehingga akselerasi pembangunan daerah dapat terwujud agar pada gilirannya dapat menciptakan tingkat kemandirian fiskal daerah yang baik dan mengurangi tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat.

1. OVERVIEW KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

Bab ini membahas keunggulan, potensi ekonomi, dan tantangan fiskal pada setiap regional di Indonesia. Keunggulan suatu regional akan dilihat dari besaran kontribusi suatu sektor perekonomian terhadap PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan unggulan utama penggerak perekonomian pada Regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang menyumbang PDRB terbesar setiap tahunnya dengan nilai lebih dari 20 persen terhadap PDRB.

Adapun untuk regional Jawa, Sektor Perdagangan Besar & Eceran dan Sektor Industri Pengolahan menjadi tumpuan utama penggerak perekonomian masyarakat dengan sumbangan terhadap PDRB yang mencapai diatas 15 persen. Sedangkan untuk regional Bali – Nusa Tenggara, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Perdagangan yang mendominasi kegiatan ekonomi

masyarakat.

Untuk potensi ekonomi, diukur dari laju pertumbuhan suatu sektor pada setiap regional. Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, Sektor Informasi, Komunikasi, dan Jasa Kesehatan menjadi sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dan komunikasi serta layanan kesehatan. Sektor lain yang juga bertumbuh ialah Sektor Pariwisata di Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua serta Sektor Konstruksi pada Regional Kalimantan.

Tantangan utama untuk sektor-sektor potensi ini adalah infrastruktur, kapasitas SDM yang memadai, dan kemudahan akses dan transportasi. Tumbuhnya Sektor Informasi dan Komunikasi membutuhkan dukungan infrastruktur seperti jaringan BTS yang memadai untuk penguatan sinyal. Demikian juga dengan Sektor Jasa

TABEL 77. SEKTOR UNGGULAN, POTENSI EKONOMI, DAN TANTANGAN MASING-MASING REGIONAL

Regional	Sektor Unggulan	Potensi Ekonomi	Tantangan
Sumatera	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan;	Informasi & Komunikasi;	Infrastruktur
	Pertambangan & Penggalian	Jasa Kesehatan	
Kalimantan	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan;	Industri Pengolahan;	Kapasitas SDM;
	Pertambangan & Penggalian	Konstruksi;	Keberpihakan terhadap pengusaha kecil;
Sulawesi	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan;	Informasi dan Komunikasi	Infrastruktur
	Pertambangan & Penggalian	Industri Pengolahan;	Kapasitas SDM, kemudahan akses dan transportasi
Maluku – Papua	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan;	Pariwisata	Kapasitas SDM, kemudahan akses dan transportasi
	Pertambangan & Penggalian	Industri Pengolahan;	
Jawa	Perdagangan Besar & Eceran;	Pariwisata	Infrastruktur, SDM
	Industri Pengolahan	Informasi & Komunikasi;	
Bali - Nusa Tenggara	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan;	Jasa Kesehatan	Infrastruktur
	Perdagangan	Informasi & Komunikasi;	
		Jasa Kesehatan	

Sumber: KFR Kanwil DJPb, BPS, diolah

Kesehatan yang membutuhkan pembangunan fasilitas kesehatan yang baru seperti rumah sakit dan puskesmas. Terakhir, tumbuhnya sektor pariwisata dan industri pengolahan membutuhkan kapasitas sumber daya manusia dan kemudahan akses transportasi sebagai penunjang.

2. SEKTOR UNGGULAN DAERAH

2.1. REGIONAL SUMATERA

Untuk Regional Sumatera, jika dilihat berdasarkan persentase terhadap total PDRB berdasarkan data yang dirilis BPS, terdapat 5 (lima) sektor unggulan yang mempunyai kontribusi besar terhadap total PDRB di regional Sumatera, sebagaimana terdapat pada tabel sektor unggulan regional sumatera

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan dan sektor industri pengolahan masih menjadi unggulan utama penggerak perekonomian yang berturut-turut menyumbang 23,86 persen dan 23,74 persen

secara rata-rata di seluruh provinsi di Regional Sumatera. Adapun sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di regional Sumatera yaitu Konstruksi, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, dan Transpostasi dan Pergudangan.

Pembahasan lebih lanjut terkait sektor-sektor unggulan utama pada regional Sumatera dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada Provinsi Sumatera Utara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, memberikan kontribusi terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonominya, yaitu sebesar 21,33 persen dan menjadi penopang PDRB Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020. Hasil pertanian yang terkenal adalah kopi, padi, salak, karet, kakao, kelapa, kayu manis, kemiri, cabe, bawang merah, bawang daun, dan sayur. Sektor pertanian di Sumatera Utara telah menjadi leading sector dalam perekonomiannya, hal ini terlihat dari

TABEL 78. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA

Sektor Unggulan	% Produksi thd PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,86%
Industri Pengolahan	23,74%
Konstruksi	15,04%
Pertambangan dan Penggalian	13,96%
Transportasi dan Pergudangan	10,44%

Sumber: BPS, diolah

penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari sektor ini yaitu mencapai 35,43 persen dari total penduduk bekerja sebesar 6,842 juta orang.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama sepuluh tahun terakhir juga selalu menjadi sektor yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini mengalami peningkatan menjadi 22,38 persen dari tahun 2019 yang mencapai 22,17 persen. Dari beberapa jenis tanaman pangan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, padi merupakan komoditas utama yang menjadi unggulan. Secara umum terdapat lima langkah mendasar, untuk meningkatkan produktivitas padi di Provinsi Sumatera Barat yaitu (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; dan (5) penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani. Langkah mendasar tersebut penting untuk dapat dilakukan agar dukungan yang diberikan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu, setiap pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan hasil pertanian melalui pengalokasian APBD untuk bidang pertanian secara proposional.

Provinsi lain yang menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor unggulan adalah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap struktur PDRB Provinsi Bengkulu mencapai Rp20.795,06 miliar atau 28,36 persen dari total PDRB di Provinsi Bengkulu dan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja hingga 46,88 persen dari total tenaga kerja di Provinsi Bengkulu. Hal ini didukung dengan posisi geografis Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah serta kondisi lahan yang cukup baik untuk mendukung komoditas tanaman perkebunan. Salah satu komoditas unggulan di Provinsi Bengkulu adalah tanaman kopi dengan keseluruhan luas areal 88.692 ha dan produksi sebesar 55.385 ton pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kopi Bengkulu

berhasil memperoleh penghargaan di 3 kategori awards pada kejuaraan kopi internasional AVPA (Agency for the Valorization of the Agricultural Products) di Perancis. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas kopi Bengkulu mampu bersaing dengan komoditas kopi di negara lain, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga merupakan sektor basis dan unggulan di Provinsi Lampung, di mana 33 persen pekerjaan penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Produksi pada sektor tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2020 diantaranya, produksi, padi, ubi kayu, nanas, pisang, jagung, dan pepaya di mana produksi tanaman tersebut menduduki peringkat 1 di regional Sumatera. Pada subsektor peternakan, Provinsi Lampung pernah meraih pengakuan dan penghargaan tingkat nasional berupa Penghargaan Budhipura atau Inovasi di bidang peternakan untuk ayam probiotik (herbal) yang dikembangkan di Kota Metro dan pengembangan pembibitan dan budidaya kambing Saburai di Kabupaten Tanggamus. Pada Subsektor perkebunan, Provinsi Lampung setidaknya memiliki tujuh komoditas perkebunan unggulan yaitu kopi, lada, tebu, kakao, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Khusus untuk kopi, tiga sentra kopi di Lampung telah masuk dalam kategori specialty grade coffee dan berdasarkan hasil uji cita rasa di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Kopi robusta merupakan komoditas unggulan teratas Provinsi Lampung karena memiliki keunggulan yang kompetitif.

2. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan pada kategori ini disebabkan naiknya Nilai Tambah Bruto pada subsektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Dengan adanya kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai Free Trade Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nantinya dapat dicanangkan untuk pusat industri IT guna menciptakan skala ekonomi yang besar, mobilisasi tenaga kerja yang efisien, dan kompetisi yang sehat, sehingga industri IT dapat berkembang pesat. Prioritas fokus untuk industri di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,

Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang diarahkan untuk peningkatan kapasitas industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain: (1) KPBB Batam, antara lain untuk manufaktur dan industri berbasis teknologi tinggi, industri kreatif dan digital, petrokimia oli dan gas, industri logistik HUB, serta perawatan medis dan kesehatan, (2) KPBPB Bintan dan Tanjung Pinang, antara lain industri maritim dan pengolahan logam mulia dan alumina, industri dirgantara, dan perawatan medis dan kesehatan, (3) KPBPB Karimun, antara lain industri galangan, industri berat, serta industri pertanian dan industri air.

3. Sektor Konstruksi

Di Provinsi Jambi, sektor ini telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadi sektor unggulan jika dibandingkan dengan sektor yang lain. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan pagu belanja modal (di atas satu triliun rupiah) dengan tren grafik meningkat dari tahun 2017 s.d. 2019 untuk kegiatan pembangunan proyek fisik di Provinsi Jambi. Meskipun pagu belanja modal TA 2020 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, namun dengan capaian realisasi di atas 90 persen cukup memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan capaian kinerja realisasi Dana Desa dan DAK Fisik yang cukup baik.

Sektor konstruksi juga merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi pada tahun 2020 mencapai 12,45 persen. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah pembangunan ruas tol Palembang-Betung yang berada di Kabupaten Banyuasin. Tol Palembang-Betung ini merupakan bagian dari proyek Tol Kayu Agung Palembang-Betung dengan total panjang mencapai 111,69 kilometer. Ruas tol Kayu gung-Palembang sendiri dengan panjang 34 kilometer telah selesai dan mulai beroperasi pada bulan April 2020.

4. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan di provinsi Sumatera Selatan

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Pada tahun 2020, sektor pertambangan memberikan sumbangan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan mencapai 18,49 persen. Meskipun 92 persen produksi nasional batu bara berasal dari Kalimantan dengan lokasi tambang batu bara terbesar di Indonesia yang berlokasi di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Namun cadangan batu bara yang melimpah justru berada di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 45 persen dari total nasional. Sektor pertambangan dan penggalian berasal dari beberapa bahan tambang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Bahan tambang utama yang dihasilkan dari perut bumi di wilayah Sumatera Selatan berupa minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.

Sektor pertambangan masih menjadi sektor unggulan Bangka Belitung dengan komoditas andalan berupa timah. Timah yang dihasilkan Bangka Belitung bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia namun juga dunia, mengingat Bangka Belitung merupakan produsen timah terbesar kedua dunia.

5. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Di Provinsi Sumatera Barat, Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 10,44 persen terhadap perekonomian Sumatera Barat. Sektor transportasi ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga di Sumatera Barat. Sektor transportasi dan pergudangan ini terdiri dari enam subsektor, di mana subsektor angkutan darat memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa faktor penunjang pertumbuhan sektor angkutan darat di Sumatera Barat antara lain: (a) Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh dua jalur lintas Sumatera yaitu jalur lintas barat dan jalur lintas tengah. Kedua jalur tersebut menghubungkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, dan Riau, (b) Moda transportasi darat seperti bus antarkota-antarprovinsi yang kembali menjadi pilihan masyarakat seiring peningkatan harga tiket angkutan udara, (c) Frekuensi perjalanan antardaerah di dalam wilayah Sumatera Barat seperti rute Padang – Bandara Internasional Minangkabau (BIM)-Bukittinggi dan sebaliknya yang cukup tinggi, (d) Mulai

beroperasinya operator-operator ojek online sejak tahun 2017 di Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Payakumbuh, dan (e) Pembangunan tol trans Sumatera koridor Padang-Pekanbaru.

2.II. REGIONAL JAWA

Jawa sebagai kawasan regional tumpuan ekonomi nasional memiliki keunggulan dan potensi ekonomi yang prominen diantara kawasan regional lainnya. Selain karena pusat administrasi pemerintahan nasional, regional Jawa menyumbang penduduk terbesar di Indonesia. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan potensi pangsa pasar yang besar di Indonesia bahkan bagi perekonomian global.

Di regional Jawa, lapangan usaha yang menyumbang PDRB tahun 2020 terbesar antara lain perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dan industri pengolahan.

1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Perdagangan adalah sektor strategis yang menyumbang pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dalam lima tahun terakhir selalu di atas 10 persen pada Pertumbuhan Domestik Bruto. Sektor perdagangan menempati posisi ketiga dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, setelah sektor industri dan sektor pertanian. Berbicara mengenai perdagangan, tidak terlepas dari peran serta pelaku usaha perdagangan yakni produsen, pedagang besar, pedagang eceran, dan konsumen akhir. Pedagang eceran/retail memegang peran cukup penting dalam rantai distribusi barang sampai ke

konsumen akhir. Melalui pedagang eceran barang yang diperjualbelikan dapat dinikmati oleh rumah tangga, industri pengolahan, hotel, restoran, maupun konsumen lainnya.

Selama masa pandemi COVID-19, sektor ini sempat terpuruk pada triwulan I-III namun pada triwulan IV sektor perdagangan eceran tetap memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memajukan usaha perdagangan eceran terus dilakukan. Selain berperan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan juga menjadi sarana pemasaran untuk produk buatan dalam negeri, terutama yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga perdagangan eceran memiliki peran ganda dalam perekonomian nasional.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbal jasa yang mengiringi penjualan barang tersebut. Baik penjualan secara grosir maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang menjadi unggulan di setiap provinsi di regional Jawa. Secara nasional lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kontraksi sebesar 3,2 persen namun lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor menjadi pengerek dan penopang PDRB di wilayah regional Jawa.

Dari data BPS menunjukkan bahwa jumlah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor paling banyak pada provinsi

TABEL 79. KONTRIBUSI LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TERHADAP PDRB SETIAP PROVINSI TAHUN 2019 S.D. 2020

Provinsi	% thd PDRB	
	2019	2020
DKI Jakarta	17,28%	16,62%
Jawa Barat	15,24%	14,55%
Banten	13,64%	13,72%
Jawa Tengah	13,74%	14,42%
DI Yogyakarta	8,48%	8,41%
Jawa Timur	18,49%	17,92%

Sumber: BPS, diolah

TABEL 80. KONTRIBUSI LU INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB SETIAP PROVINSI TAHUN 2018 S.D. 2020 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Provinsi	% thd PDRB		
	2018	2019	2020
DKI Jakarta	13,18%	12,32%	11,37%
Jawa Barat	42,19%	41,62%	41,19%
Banten	31,26%	30,74%	31,21%
Jawa Tengah	34,41%	34,44%	34,52%
DI Yogyakarta	13,00%	12,82%	12,83%
Jawa Timur	29,75%	30,32%	30,69%

Sumber: BPS, diolah

Jawa Timur. Berikut ini adalah kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pendapatan domestik bruto setiap provinsi di regional Jawa.

Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi di kawasan regional Jawa cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, namun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran rata-rata mengalami kontraksi sebesar 4,29 persen. Provinsi DKI mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen, Jawa Timur terkontraksi sebesar 5,00 persen. Dari beberapa provinsi di regional Jawa yang mengalami kontraksi tidak terlalu dalam adalah Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2,86 persen dan 2,67 persen, kemudian yang paling terasa dampak akibat pandemi covid 19 adalah Provinsi Jawa Barat yang terkontraksi paling dalam sebesar 6,11 persen. Meskipun lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami kontraksi namun lapangan usaha ini menjadi penopang unggulan bagi PDRB di wilayah Jawa dalam menghadapi pandemi COVID-19.

2. Sektor Industri Pengolahan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/maklon dan pekerjaan perakitan (assembling).

Industri pengolahan termasuk ke dalam lapangan usaha yang menopang pertumbuhan PDRB di wilayah regional Jawa sehingga tetap tumbuh positif rentang triwulan III dan triwulan IV tahun 2020. Data terkait kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB terdapat pada tabel Kontribusi LU Industri Pengolahan Terhadap PDRB Setiap Provinsi Tahun 2018 s.d. 2020.

Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan paling besar terhadap PDRB 2020 adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 41,19 persen dan 34,52 persen. Di beberapa provinsi selain Jawa Barat dan Jawa Tengah memang lapangan usaha tersebut bukan yang berkontribusi terbesar dalam PDRB namun lapangan usaha industri pengolahan teratas dalam kontribusi terhadap PDRB.

Dari tahun 2016 s.d. 2019 terdapat tren pertumbuhan positif lapangan usaha industri pengolahan, namun pada 2019 s.d. 2020 terdapat tren penurunan lapangan usaha industri pengolahan karena akibat pandemi covid sehingga mempengaruhi perlambatan ekonomi masyarakat. Namun di proyeksikan pada tahun 2021 lapangan usaha industri akan rebound dengan seiringnya program vaksin nasional dan pengurangan angka positif covid 19 sehingga melonggarkan aktifitas ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa faktor penyebab lapangan industri pengolahan dapat tumbuh subur di kawasan regional Jawa antara lain faktor kemudahan akses infrastruktur yang mendukung, SDM yang memiliki skill, dan interkoneksi diseluruh provinsi.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

Untuk regional Kalimantan, jika dilihat berdasarkan

TABEL 81. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN

Sektor Unggulan	% Produksi thd PDRB
Pertambangan dan Penggalian	20,10%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,47%
Industri Pengolahan	14,75%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,11%
Konstruksi	10,61%
Jawa Timur	29,75%

Sumber: BPS, diolah

persentase terhadap total PDRB berdasarkan data yang dirilis BPS rincian 5 (lima) besar sektor unggulan di regional Kalimantan adalah sebagaimana terdapat pada tabel Sektor Unggulan Regional Kalimantan.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi unggulan utama penggerak perekonomian yang berturut-turut menyumbang 20,10 persen dan 16,47 persen secara rata-rata di seluruh provinsi Regional Kalimantan. Adapun sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di regional Kalimantan yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi.

Pembahasan lebih lanjut terkait 2 (dua) sektor unggulan utama pada regional Kalimantan yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di sebagian besar regional Kalimantan, yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Salah satu komoditas utama dari sektor pertambangan dan penggalian di regional

Kalimantan adalah batu bara.

Selama sepuluh tahun berturut-turut, kontribusi sektor pertambangan batu bara telah menjadi faktor utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Data sebaran cadangan mineral Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sekitar 16,5 miliar ton cadangan batu bara di Kalimantan Selatan. Sedangkan jumlah cadangan batu bara di Kalimantan Timur mencapai 48 miliar ton. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan dari total 147,6 miliar ton cadangan sumber daya batu bara Indonesia yang tercatat pada awal Tahun 2020. Sektor pertambangan berturut-turut menyumbang 18,71 persen dan 18,40 persen dari struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di tahun 2020. Sektor ini juga merupakan penopang utama perekonomian di Kalimantan Utara dengan menyumbang Rp25.584,9 miliar atau berkontribusi sebesar 25,45 persen terhadap PDRB (ADHB) Kalimantan Utara. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, namun sektor ini tetap menjadi penyumbang utama terhadap besaran PDRB.

Adapun data rinci cadangan batu bara dan kontribusi produksi batu bara terhadap PDRB pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel Cadangan Batu Bara dan Kontribusi Batu Bara Terhadap PDRB Per Provinsi

TABEL 82. CADANGAN BATU BARA DAN KONTRIBUSI BATU BARA TERHADAP PDRB PER PROVINSI

Provinsi	Cadangan Batu Bara	% Produksi thd PDRB
Kalimantan Selatan	16.500 Juta Ton	18,71%
Kalimantan Timur	48.000 Juta Ton	18,40%
Kalimantan Utara	491 Juta Ton	25,45%

Sumber: BPS, diolah

Komoditas batu bara menyumbang lebih kurang 80 persen dari total ekspor Provinsi Kalimantan Selatan atau senilai US\$ 6.490 di tahun 2020. Berdasarkan tujuannya, sejak tahun 2019 pasar utama batubara regional Kalimantan mulai beralih untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan sampai dengan Juli 2020 tercatat porsi untuk pemenuhan kebutuhan batubara di pasar domestik telah mencapai 62 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pada tahun 2020 produksi batu bara Indonesia mencapai 557,5 juta ton atau 1,37 persen melampaui rencana target. Akan tetapi, jumlah produksi tersebut lebih rendah 8,6 persen dibanding periode yang sama di tahun 2019 yang mencapai 610,2 juta ton. Hal ini disebabkan antara lain kondisi pandemi COVID-19 dan banjir yang melanda regional Kalimantan.

Dari jumlah tersebut, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur memang merupakan provinsi utama yang menyumbang produksi batu bara nasional. Adapun produksi batu bara dari Kalimantan Selatan mencapai 64,83 juta ton pada tahun 2020. Angka itu setara dengan 11,63 persen dari produksi nasional pada 2020. Sedangkan Kalimantan Timur dengan mencatat produksi batu bara sebanyak 82,2 juta ton atau sebesar 14,74 persen dari produksi nasional pada 2020.

2. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor lain yang merupakan unggulan di regional Kalimantan ialah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kekuatan utama pada perekonomian dengan sumbangan berturut-turut sebesar 20,92 persen dan 21,80 persen dari PDRB. Sub sektor perkebunan adalah sub sektor yang mendominasi dan memegang peranan paling besar dengan

kontribusi tertinggi terhadap total PDRB dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2017-2020, perkebunan berkontribusi rata-rata 52,80 persen terhadap PDRB sektor pertanian kehutanan dan perikanan.

Adapun unggulan sub sektor perkebunan pada Provinsi Kalimantan Barat adalah komoditas karet dan kelapa sawit. Adapun datanya secara umum dapat dilihat pada tabel Data Komoditas Unggulan Perkebunan Kalimantan Barat.

Perkebunan Kelapa Sawit pada Provinsi Kalimantan Barat menggunakan lahan seluas 1,9 juta ha dengan hasil produksi 4,10 juta ton pada tahun 2020. Adapun areal perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Kabupaten Ketapang (637.144 ha) dengan produksi 1.356.929 ton kemudian disusul Kabupaten Sanggau (315.929 ha) dengan produksi 497.936 ton di tahun 2020.

Sedangkan perkebunan Karet di Kalimantan Barat menggunakan lahan seluas 606.354 (ha). Areal terluas pada Kabupaten Sanggau 107.123 (ha) dengan produksi karet 62.593 ton pada tahun 2020. Kemudian diikuti Kabupaten Sintang dengan luas lahan 99.627 ha, total produksi karet 39.254 ton pada tahun 2020.

Komoditas karet dan kelapa sawit juga mendominasi unggulan sub sektor perkebunan di Kalimantan Tengah. Adapun datanya secara umum dapat dilihat pada tabel Data Komoditas Unggulan Perkebunan Kalimantan Tengah.

Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah menggunakan lahan seluas 1,8 juta ha dengan hasil produksi 5,18 juta ton pada tahun 2020. Areal perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur (471.810 ha) dengan produksi 2.051.210 ton pada tahun 2020. Kemudian disusul Kabupaten Seruyan (364.383 ha) dengan produksi 955.773 ton di tahun 2020.

TABEL 83. DATA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN KALIMANTAN BARAT

Jenis Komoditas	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	Penghasil Utama
Kelapa Sawit	1.904.904	4.105.650	Kab. Ketapang, Kab. Sanggau
Karet	606.354	266.351	Kab. Sanggau, Kab. Sintang

Sumber: BPS, diolah

TABEL 84. DATA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN KALIMANTAN TENGAH

Jenis Komoditas	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	Penghasil Utama
Kelapa Sawit	1.807.547	5.182.919	Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Barat
Karet	444.709	168.039	Kab. Barito Utara, Kab. Kotawaringin Timur

Sumber: BPS, diolah

Sedangkan Perkebunan Karet di Kalimantan Tengah menggunakan lahan seluas 444.709 (ha). Areal terluas pada Kabupaten Gunung Mas (68.381 ha) dan Kabupaten Barito Timur (54.803 ha). Akan tetapi, penghasil karet terbesar di Kalimantan Tengah ialah Kabupaten Barito Utara (37.273 ton) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (22.497 ton) pada tahun 2020.

2.IV. REGIONAL SULAWESI

Jika dilihat berdasarkan data yang dirilis BPS atas persentase kontribusi regional Sulawesi terhadap total PDRB, terdapat 2 (dua) besar sektor unggulan di regional Sulawesi yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB sebagaimana Tabel Kontribusi Sektor Unggulan Regional Sulawesi Terhadap PDRB.

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Berdasarkan letak geografis dan topologi Pulau Sulawesi, dapat terlihat bahwa sumber daya alam merupakan komoditas utama yang menjadi unggulan di berbagai daerah di pulau ini. Lima dari enam provinsi yang ada di pulau Sulawesi memiliki sektor unggulan yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada provinsi di pulau Sulawesi sebesar 28,41 persen.

Kondisi morfologi geografi pulau Sulawesi yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan cukup memberikan variasi komoditas yang dapat dihasilkan baik dari pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Beberapa gunung berapi aktif yang terdapat di pulau Sulawesi juga turut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan komoditas pertanian. Komoditas perhutanan juga cukup banyak dan beragam, terutama untuk produksi kayu

dengan berbagai macam variasi dan kelas kayu. Selanjutnya untuk sektor perikanan, Pulau Sulawesi yang dikelilingi oleh Laut Maluku dan Samudra Pasifik memiliki kekayaan alam laut yang melimpah dan menjadikan daerah Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah dengan hasil penangkapan ikan terbesar di Indonesia. Hal tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya produk yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini menjadi sektor unggulan utama pada lima provinsi di pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan paling kuat, kemampuan daya saing, dan nilai potensi yang tinggi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,84 persen. Beberapa komoditas yang menjadi andalan utama dalam menyokong pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian di regional Sulawesi adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, serta bijih, kerak, abu logam, aspal, nikel, emas, kromit, tembaga, mangan, pasir besi, dan biji besi. Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah merupakan dua provinsi pada regional Sulawesi yang menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi penting dalam menarik minat investasi sehingga tingkat perekonomian pada regional Sulawesi dapat bertumbuh lebih baik. Selain itu, kedua sektor unggulan tersebut dapat menjadi penyerap utama tenaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

2.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi

TABEL 85. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI TERHADAP PDRB

Sektor Unggulan	% Produksi thd PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,41%
Pertambangan dan Penggalian	7,84%

Sumber: BPS, diolah

sebesar 6,46 persen yoy sebagaimana diketahui adanya dampak pandemik dan pembatasan sosial masyarakat mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak berjalan norma seperti pada tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi global juga turut mempengaruhi kinerja ekonomi di regional Bali dan Nusa Tenggara. Namun beberapa lapangan usaha di Bali dan Nusa Tenggara masih menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2020 dan menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi meskipun pertumbuhan PDRB wilayah Bali dan Nusa Tenggara terkontraksi.

Secara umum lapangan usaha unggulan pada kawasan Bali dan Nusa Tenggara adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan agrikultur. Namun dari ketiga provinsi di regional Bali dan Nusa Tenggara memiliki ciri khas lapangan usaha unggulan seperti pada Provinsi Bali lebih dominan pada lapangan usaha penyedia jasa akomodasi, makanan, dan minuman. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat lapangan usaha yang unggulan setelah pertanian adalah pertambangan, sedangkan Nusa Tenggara Timur lapangan usaha yang unggul setelah pertanian adalah jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan. Penilaian lapangan usaha unggulan didasarkan pada kontribusi terhadap PDRB pada kurun waktu 2018 s.d. 2020 dan pertumbuhan yang positif pada kurun waktu 2019 s.d. 2020.

1. Sektor Lapangan Usaha Pertanian Kehutanan Agrikultur dan Perikanan

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Peberdayaan Petani, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu kegiatan bercocok tanam, sedangkan pertanian dalam arti luas yaitu mencakup bidang pertanaman, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, agrikultur, dan perikanan terdiri atas lapangan usaha pertanian, termasuk di dalamnya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan serta jasa pertanian. Setiap provinsi

di regional Bali dan Nusa Tenggara memiliki ciri khas tersendiri seperti misalnya di Nusa Tenggara Timur, produktivitas sub sektor peternakan menjadi yang paling dominan. Subsektor peternakan dan perikanan merupakan yang terbesar dari segi produktifitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari keunggulan geografis NTT yang memiliki potensi padang rumput dan tegalan yang mencapai lebih dari 1 juta hektar dan mendominasi luas lahan pertanian. Potensi wilayah dengan padang rumput terluas berada pada wilayah selatan Nusa Tenggara Timur yaitu Pulau Sumba dan Pulau Timor. Sedangkan kabupaten dengan padang rumput terluas berada di Kabupaten Sumba Timur, kemudian kategori sedang terdapat di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Tengah, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Alor. Tidak heran jika populasi Babi, Kuda, Kerbau, Sapi Potong di Nusa Tenggara Timur pernah menduduki peringkat lima besar secara Nasional.

Pada tahun 2020 lapangan usaha pertanian menyumbang PDRB terbesar bagi provinsi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 28,51 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 23,37 persen, dan Bali sebesar 15,09 persen. Subsektor lapangan usaha peternakan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kontribusi pada total sektor lapangan usaha pertanian sebesar 34,18 persen kemudian disusul pertanian sebesar 26,92 persen, dan perikanan sebesar 19,29 persen.

Jika dilihat pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara dari tahun 2018 s.d. 2020, pertumbuhan di lapangan usaha pertanian cenderung naik pada periode 2018 s.d. 2019 dan melandai pada rentang tahun 2019 s.d. 2020. Pada Provinsi Bali pertumbuhan lapangan usaha pertanian pada tahun 2020 terkontraksi namun tidak signifikan hanya sebesar 0,21 persen. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat lapangan usaha pertanian dapat tumbuh positif di tengah masa pandemi sebesar 0,57 persen dan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu tumbuh 1,89 persen. Secara agregat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara lapangan usaha pertanian mampu survive dan menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 0.72 persen di tengah perlambatan ekonomi nasional maupun global.

TABEL 86. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TERHADAP PDRB PER PROVINSI

No	Provinsi	% PDRB
1	Bali	9,07%
2	Nusa Tenggara Barat	14,01%
3	Nusa Tenggara Timur	11,16%

Sumber: BPS, diolah

2. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Motor secara nasional memiliki kontribusi sebesar 13,42 persen bagi Produk Domestik Bruto. Kontribusi secara nasional inline dengan kontribusi pada di setiap regional. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor. Pada regional Bali dan Nusa Tenggara kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran cukup signifikan terhadap PDRB 2020.

Meskipun pada Provinsi Bali hanya menyumbang 9,07 persen dari PDRB namun secara kuantitatif jumlah Rp 20.589 miliar rata rata dari tahun 2018 s.d. 2020 dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata sejumlah Rp 13.143 miliar dan Rp 11.272 miliar. Meskipun lapangan usaha tersebut mengalami kontraksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada PDRB. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran yoy pada Provinsi Bali terkontraksi sebesar 5,98 persen, pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,74 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkontraksi sebesar 3,08 persen. Pada tahun 2020 lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami kontraksi namun dari tahun 2018 hingga 2020 lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan dan sedikit terkontraksi pada tahun 2020.

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya dengan adanya integrasi ekonomi yang menyeluruh dan berkesinambungan di antara semua sektor produksi. Dalam sistem ekonomi pasar (*market economy system*), integrasi ekonomi terlihat ketika pelaku ekonomi melakukan jual beli input produksi. Namun, suatu sektor ekonomi tidak bisa berkembang mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa dukungan dari sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan satu atau beberapa sektor yang dijadikan leading sector di suatu daerah yang didasarkan dari potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Secara geografis, regional Maluku merupakan gugusan kepulauan yang subur dan regional Papua merupakan wilayah yang terletak pada sebuah pulau luas yang didominasi oleh kekayaan alam melimpah sehingga tentunya banyak sektor yang dapat dikedepankan untuk menumbuhkan perekonomian di kawasan Maluku dan Papua. Sebagai daerah di kawasan timur Indonesia yang dilimpahi oleh sumber daya alam yang beragam, regional Maluku dan Papua memiliki sektor unggulan berupa komoditas yang merupakan hasil dari kebaikan bumi. Tabel menunjukkan kontribusi sektor unggulan di regional Maluku dan Papua terhadap PDRB.

1. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan

Regional Maluku terdiri atas dua provinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara. Dua Provinsi ini menjadikan sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan sebagai leading sector dalam membangun perekonomian. Pada sub sektor pertanian, tanaman pangan menjadi komoditas utama yang ditanam oleh para pelaku sektor ini.

TABEL 87. PERSENTASE SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU-PAPUA TERHADAP PDRB

Sektor Unggulan	% Produksi thd PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,06%
Pertambangan dan Penggalian	14,73%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,88%
Industri Pengolahan	11,08%

Sumber: BPS, diolah

Tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu menjadi pilihan teratas untuk terus ditanam dan dikembangkan produktivitasnya. Selanjutnya, pada subsektor perkebunan di regional Maluku produksi dan produktivitas tanaman pala, kelapa, kakao, dan cengkeh menjadi komoditas yang tidak hanya menumbuhkan tingkat perekonomian di regional ini tetapi juga mempunyai kontribusi yang cukup signifikan di level nasional. Subsektor peternakan yang dikembangkan pada regional Maluku, yaitu jenis peternakan yang terdiri dari ternak besar yaitu sapi, kerbau, kuda, dan ternak kecil yaitu kambing, domba, babi, dan jenis unggas yaitu ayam buras, ayam petelur, dan itik. Pada subsektor perikanan, produksinya didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap, sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi. Pengembangan perikanan budidaya didukung dengan beragamnya lahan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya seperti di perairan laut, di tambak air payau, di kolam/air tawar, di sawah, dan di perairan umum. Komoditi unggulannya lobster, udang, ikan kerapu, ikan nila, ikan mas, dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan di regional Maluku.

2. Pertambangan dan Penggalan

Sektor pertambangan dan penggalan merupakan leading sector provinsi Maluku Utara dikarenakan sektor ini turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Rata-rata kontribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB Maluku Utara tahun 2018-2020 sebesar 8,60 persen. Pertambangan dan penggalan dalam struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2020 (c-to-c) menempati urutan keempat sebagai pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 11,43 persen. Sementara apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, pertambangan dan penggalan memiliki sumber pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa sektor pertambangan dan penggalan memiliki prospek yang cerah. Dominasi sektor pertambangan dan penggalan terlihat dari besarnya kontribusi produk pertambangan dan penggalan pada pertumbuhan

ekspor Maluku Utara. Besi dan baja serta bijih, kerak dan abu logam menjadi andalan ekspor Maluku Utara dengan negara tujuan Tiongkok dan India.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada regional Papua sektor pertambangan dan penggalan juga menjadi sektor unggulan yang menjadi penyangga utama perkembangan perekonomiannya. Sektor pertambangan dan penggalan menjadi sektor unggulan di Papua karena konsentrasi mineral logam pertambangan diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, dengan potensi terbesar pada pertambangan emas. Selain itu, bagian barat Papua memiliki kandungan minyak, gas, mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, cobalt, corum dan besi), serta mineral industri dan golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, asbes, dan gypsum) yang berlimpah dan menjadi objek utama dalam investasi sektor pertambangan.

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Tumbuhnya sektor perdagangan besar, eceran, serta reparasi kendaraan roda dua dan empat menjadi sektor unggulan di provinsi Maluku turut difasilitasi oleh pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan oleh pemerintah pusat. Keunggulan di sektor perdagangan besar, eceran, serta reparasi kendaraan roda dua dan empat yaitu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kontribusi yang besar dalam perekonomian provinsi Maluku. Sektor ini juga merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi total wilayah, atau disebut sebagai sektor basis ekonomi wilayah. Subsektor perdagangan mobil dan motor serta reparasinya menjadi penyumbang yang cukup besar dalam sektor ini. Selain itu, sektor perdagangan besar, eceran, serta reparasi kendaraan roda dua dan empat di provinsi Maluku juga bersifat kompetitif dan mampu bersaing dengan wilayah lainnya di Indonesia.

4. Industri Pengolahan

Selain sektor pertambangan dan penggalan yang

menjadi sektor unggulan, di regional Papua juga terdapat industri pengolahan (nonmigas) di Papua Barat. Selain potensi alam berupa kandungan minyak dan gas, mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, cobalt, corum dan besi), serta mineral industri dan golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, asbes, dan gypsum) yang berlimpah dan menjadi objek utama investasi sektor pertambangan, provinsi Papua Barat tercatat juga memiliki potensi investasi lainnya. Salah satunya adalah industri pengolahan (non migas) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. KEK Sorong dikelola oleh PT. Malamoi Olom Wobok (MOW) KEK Sorong dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sorong. Di dalam KEK Sorong telah tersedia listrik yang berasal dari PLTMG dengan kapasitas 100 MW dengan sumber jaringan pipa gas serta didukung 2 unit gardu listrik dan 5 BTS Telepon. Selain itu, pada areal KEK Sorong juga tersedia fasilitas Jetty untuk angkutan kapal curah kering serta sebuah dermaga Kapal Ro-ro. Fasilitas pendukung lainnya adalah Pelabuhan Arar seluas 4 Ha dan memiliki dermaga beton sepanjang 100 meter yang berlokasi di kawasan KEK Sorong atau berjarak <50 kilometer dari pelabuhan utama Sorong. Industri yang dimungkinkan untuk dibangun dan beroperasi di dalam KEK Sorong misalnya, industri pengalengan ikan tuna dan cakalang. Sedangkan di provinsi Papua sektor konstruksi juga menjadi salah satu sektor basis/unggulan di Papua. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pembangunan sarana-sarana di Papua untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Percepatan dalam pembangunan konstruksi di Papua diharapkan akan mendukung

dalam peningkatan investasi di Provinsi Papua.

3. SEKTOR POTENSIAL DAERAH

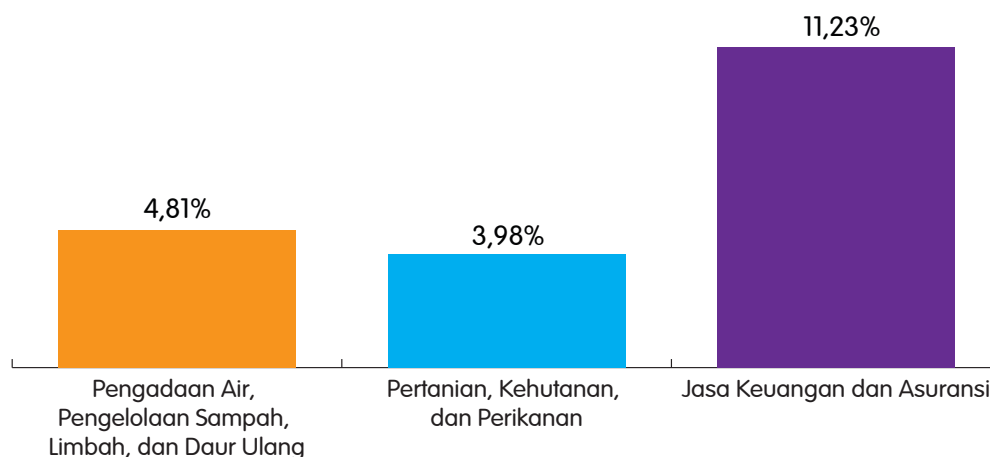
3.1. REGIONAL SUMATERA

Terdapat beberapa sektor di Regional Sumatera yang memiliki potensi cukup baik dan memberikan kontribusi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Sektor tersebut antara lain yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Adapun data pertumbuhan rata-rata dari sektor potensi ekonomi di regional Sumatera tahun 2016 s.d. 2020 terdapat pada gambar Pertumbuhan Rata-Rata dari Sektor Potensi Ekonomi di Regional Sumatera Tahun 2016 s.d. 2020.

1. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor ini merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan cukup signifikan di wilayah provinsi Sumatera Barat. Terdapat 3 jenis sektor jasa yang dapat dikategorikan sebagai sektor potensial bagi Provinsi Sumatera Barat, yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat, sektor jasa keuangan memiliki kontribusi terbesar yaitu 3,04 persen pada tahun 2020, sedangkan sektor jasa perusahaan berkontribusi paling rendah sebesar 0,44 persen. Sementara itu, jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB, sektor jasa keuangan, terdapat

GAMBAR 116. PERTUMBUHAN RATA-RATA DARI SEKTOR POTENSI EKONOMI DI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2016 S.D. 2020



Sumber: BPS, diolah

dua sub sektor yang potensial yaitu jasa perantara keuangan dan jasa keuangan lainnya. Sementara jasa asuransi dan pensiun, dan jasa penunjang keuangan masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dengan luas lahan sawah di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 790.395 hektar dimana 71 persen merupakan sawah di lahan rawa merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Salah satu komoditi terpenting tanaman pangan yang potensial di Provinsi Sumatera Selatan yaitu tanaman padi. Sumatera Selatan juga berperan sebagai salah satu lumbung padi nasional, di mana daerah penghasil padi terbesar berada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sementara itu, di Provinsi Riau kelapa sawit merupakan produk unggulan yang paling potensial. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mempunyai areal luas lahan dan hasil produksi dalam tiga tahun terakhir yang cukup besar. Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 2,85 juta Ha atau yang terluas (22,21 persen) dari luas perkebunan sawit yang ada di Indonesia dan merupakan perkebunan sawit rakyat terbesar dunia dengan hasil produksinya mencapai Rp9,78 juta ton.

3. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air, pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Di Sumatera Selatan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan sektor yang prospektif dengan menyumbang 0,13 persen atau Rp610 miliar atas dasar harga berlaku di tahun 2020. Kontribusi ini mengalami kenaikan 0,1 persen dari tahun 2019

dengan nominal Rp560 miliar. Data tersebut menunjukkan gambaran bahwa kegiatan pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki nilai ekonomi yang besar dan mampu tumbuh positif walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.

4. Sektor Pariwisata

Daerah regional Sumatera memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Potensi tersebut antara lain alam yang indah dan udara yang sejuk, dikelilingi bukit-bukit dan gunung yang ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon. Aneka ragam budaya di regional Sumatera juga terlihat unik dan menarik, demikian juga adat istiadat masyarakatnya. Dengan potensi demikian, banyak daerah di wilayah ini yang dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, di antaranya adalah Provinsi Bangka Belitung, yaitu dengan ditetapkannya Tanjung Kelayang sebagai KEK Pariwisata dan termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Peningkatan bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, sebagai bandara internasional merupakan salah satu dukungan pemerintah terhadap pengembangan KEK Tanjung Kelayang. Selain itu, berbagai pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk mendukung pengembangan KEK tersebut.

Provinsi Lampung juga tak kalah dengan potensi wisatanya. Objek wisata di Lampung dapat dikelompokkan menjadi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, yaitu: (1) Obyek wisata alam, yang menarik untuk dikunjungi seperti Batu Lapis di Kalianda, pantai Labuhan Jukung, pantai Pegadung, Way Panas Bumi di Natar, pantai Terbaya, Muara Tembulih, danau Tirta Gangga, jelajah Suoh Lampung Barat, pulau Pisang Pesisir Barat, Bawang Bakung Geredai, air terjun Way Lalaan, Way Belerang Kalianda, Laguna Helau, pantai Pasir Putih, B'Say Rafting, pantai Duta Wisata, pantai Tanjung Setia, pulau Pahawang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, Teluk Kiluan, danau Ranau Lampung Barat, wisata bahari Krui Pesisir Barat, Tanjung Setia, pantai Mutun dan pulau Tangkil, (2) Obyek wisata budaya meliputi Situs Megalitik Kebon Tebu, Desa Tradisional Wana, Desa wisata Hujung, Desa Tradisional Kenali, Makam Raden Inten II, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Rumah

Tradisional, Museum Lampung Ruwai Jurai, Krakatau Monumen dan Menara Siger, (3) Obyek wisata buatan meliputi Wana Wisata Tanjung Harapan Kabupaten Tanggamus, Puncak Mas, Taman Wisata Lembah Hijau, Bendungan Batutegi, Tabek Indah, Bandar Lampung, dan Resort Bumi Kedaton.

3.II. REGIONAL JAWA

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional tahun 2020 per kanwil di provinsi lingkup regional Jawa, terdapat beberapa lapangan usaha yang menjadi potensial di regional Jawa, antara lain informasi dan komunikasi, real estate, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Pemilihan sektor potensial di regional Jawa pada kajian fiskal regional tersebut didasarkan pada metode analisis Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Shift Share, dan tipologi Klassen.

1. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Secara nasional lapangan usaha informasi dan komunikasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2020. Lapangan usaha informasi dan komunikasi pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif secara nasional setelah lapangan usaha kesehatan. Lapangan usaha informasi dan komunikasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 11,1 persen. Pertumbuhan tersebut cukup signifikan mengingat dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Di regional pulau Jawa pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi sama seperti pada pertumbuhan pada level nasional, yaitu tumbuh positif secara signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan social distancing dan memberlakukan fleksible working space sehingga penggunaan teknologi informasi meningkat serta menaikkan pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Lapangan usaha informasi dan komunikasi berkembang pesat pada provinsi DKI Jakarta

dan memberikan kontribusi kepada PDRB 2020 9,41 persen, kontribusi terbesar dibandingkan provinsi lainnya di regional Jawa. Pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi meningkat secara signifikan pada Provinsi Jawa Barat dengan kenaikan sebesar 34,7 persen dan Provinsi Banten mengalami pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi yang paling rendah. Sektor informasi dan komunikasi menjadi lapangan usaha yang potensial bagi setiap daerah untuk dikembangkan mengingat pada saat ini masa pandemi masih terjadi. Selain itu, tingkat ketergantungan masyarakat di berbagai lapangan usaha terhadap teknologi informasi tidak dapat dipisahkan sehingga potensi lapangan usaha ini untuk berkembang sangat potensial untuk dikembangkan.

2. Sektor Jasa Kesehatan

Sektor Jasa Kesehatan mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Sektor Jasa Kesehatan mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 paling signifikan pada Provinsi DI Yogyakarta dengan pertumbuhan 24,94 persen yoy kemudian disusul Provinsi DKI Jakarta dengan pertumbuhan 22,12 persen yoy. Pertumbuhan jasa kesehatan pada tahun 2020 meningkat karena berkorelasi dengan meningkatnya aktifitas jasa kesehatan pada masa pandemi dan sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 dengan menambah kapasitas rumah sakit, insentif tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung pencegahan pandemi COVID-19.

Pertambahan laju pertumbuhan di sektor jasa kesehatan dapat diketahui salah satunya dengan pertumbuhan ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap provinsi. Dari tabel tersebut rata-rata pertambahan yoy% adalah sebesar 0,3 persen. Jasa kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada masa pandemi COVID-19.

TABEL 88. LAYANAN KESEHATAN PER PROVINSI

No	Provinsi	RSU		RSK		Klinik		Puskesmas	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	DKI Jakarta	143	143	47	47	1537	1361	315	332
2	Jawa Barat	297	310	67	67	3203	3487	1087	1091
3	Banten	81	83	32	32	1240	1242	242	245
4	Jawa Tengah	264	274	43	43	696	711	1395	1392
5	DI Yogyakarta	55	58	37	35	na	224	121	121
6	Jawa Timur	319	332	107	81	1109	1174	992	1004

Sumber: BPS, diolah

3.III. REGIONAL KALIMANTAN

Terdapat beberapa sektor di Regional Kalimantan yang memiliki potensi cukup baik sebagai penggerak ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Sektor tersebut antara lain industri pengolahan, konstruksi, dan informasi dan komunikasi. Walaupun hampir semua sektor potensi ekonomi di Regional Kalimantan mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan kondisi pandemi COVID-19, namun pemerintah daerah di regional Kalimantan percaya bahwa beberapa sektor potensial ini akan kembali mengalami pertumbuhan jika kondisi pandemi telah berakhir di Indonesia. Adapun data pertumbuhan rata-rata dari sektor potensi ekonomi di regional Kalimantan tahun 2016 s.d. 2020 terdapat pada gambar pertumbuhan rata-rata dari sektor potensi ekonomi di regional Kalimantan tahun 2016 s.d. 2020.

1. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan, terutama industri yang mengolah turunan hasil tambang dan perkebunan masih menjadi potensi ekonomi regional Kalimantan beberapa periode ke depan. Pada tahun 2020, sektor yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ini menghasilkan nilai tambah

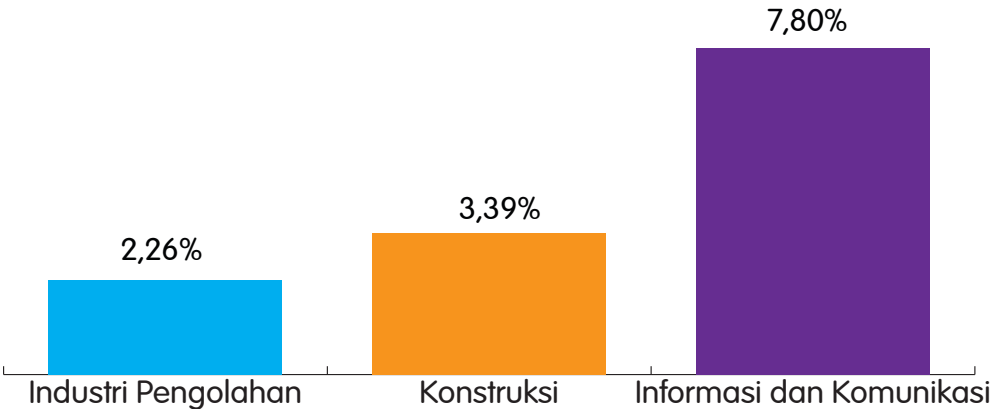
bruto senilai Rp114,77 triliun dan menjadi salah satu pembentuk PDRB Kalimantan Timur dengan kontribusi 18,9 persen.

Dalam sektor ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menargetkan pengembangan 2 (dua) kawasan industri pengolahan yaitu Kawasan industri Batulicin dan Kawasan industri Jorong. Pembangunan dan pengembangan Kawasan industri tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa suatu usaha industri harus berada dalam Kawasan industri.

2. Sektor Konstruksi

Dengan ditetapkannya Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2019-2024 mengenai pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan akan menggeliatkan perekonomian Kalimantan Timur terutama sektor konstruksi, yang akan menyebabkan pembangunan besar-besaran

GAMBAR 117. PERTUMBUHAN RATA-RATA DARI SEKTOR POTENSI EKONOMI DI REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2016 S.D. 2020



Sumber: BPS,2021 , diolah

terjadi di wilayah Kalimantan Timur sehingga sektor konstruksi menjadi sektor yang potensial untuk dijadikan penopang perekonomian Kalimantan Timur di masa mendatang.

Sampai dengan saat ini, terdapat sebanyak 6.000 kontraktor dan 12.000 tenaga konstruksi siap untuk bekerja membangun ibukota baru. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar terhadap sektor konstruksi dalam beberapa tahun mendatang.

3. Sektor Informasi dan Komunikasi

Dari tahun ke tahun sektor Informasi dan komunikasi di Kalimantan mengalami tren peningkatan dan pertumbuhan. Meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami kontraksi di berbagai sektor seiring dengan pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, namun sektor informasi dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dikarenakan hampir seluruh elemen masyarakat membutuhkan akses informasi dan komunikasi secara online.

Berdasarkan data BPS, terdapat laju pertumbuhan yang cukup baik pada sektor informasi dan

komunikasi setiap tahunnya. Datanya dapat dilihat pada tabel Data Laju Pertumbuhan Sektor Informasi Dan Komunikasi Per Provinsi Di Regional Kalimantan Tahun 2016 s.d. 2020.

Berdasarkan tabel dimaksud, dapat disimpulkan bahwa sektor jasa telekomunikasi seperti internet memiliki pasar yang cukup baik di Kalimantan. Akses terhadap internet telah menjadi suatu kebutuhan yang penting di tengah masyarakat. Penggunaan media sosial, pembelajaran secara daring, rapat daring, dan lain sebagainya telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap internet. Hal ini tentunya menjadi suatu potensi yang sangat besar di masa mendatang.

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi kondisi akses jaringan informasi dan komunikasi di regional Kalimantan, masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan pada regional Kalimantan. Data terkait akses masyarakat terhadap jaringan informasi dan komunikasi dapat digambarkan pada gambar Kondisi akses jaringan informasi dan komunikasi di regional Kalimantan.

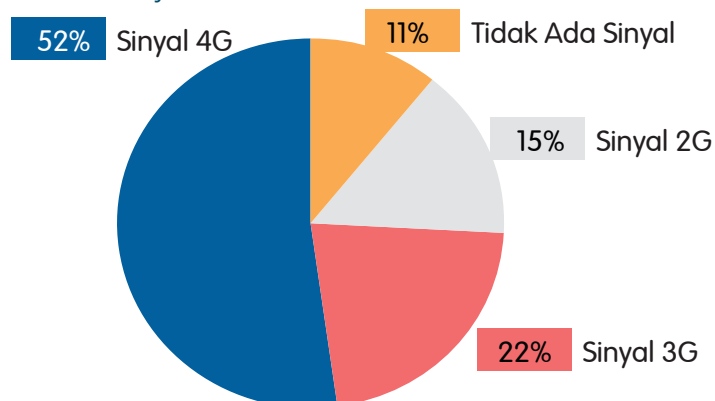
Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa sebagian masyarakat di regional Kalimantan belum memiliki akses terhadap jaringan informasi dan komunikasi secara memadai. Padahal,

TABEL 89. DATA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI DI REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2016 S.D. 2020

	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	15,98	6,65	6,49	8,37
Kalimantan Selatan	7,94	6,89	7,33	7,36
Kalimantan Tengah	6,47	8,25	5,14	10,19
Kalimantan Timur	7,79	4,38	6,86	6,96
Kalimantan Utara	9,58	8,52	8,20	6,60

Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 118. KONDISI AKSES JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI REGIONAL KALIMANTAN



Sumber: BPS, diolah

di jaman yang semakin maju saat ini, akses terhadap jaringan informasi dan komunikasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah untuk mendorong perusahaan operator untuk mengembangkan jaringan seluler dan internet. Mengingat dibutuhkan biaya besar untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan ditambah dengan kondisi geografis yang menantang di Kalimantan, maka perlu didukung dengan kebijakan pemerintah sehingga sektor ini mencapai potensi yang maksimal.

4. Sektor-sektor potensial lainnya

Adapun sektor potensial di Kalimantan Barat yang perlu dikembangkan yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor konstruksi. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang rata-rata 14,77 persen pada PDRB total Kalimantan Barat periode tahun 2014-2020. Sektor ini yang merupakan pengelompokan Lapangan Pekerjaan Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi menyerap tenaga kerja di Kalimantan Barat sebesar 22 persen.

Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan juga merupakan sektor potensial. Distribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan menunjukkan tren yang stabil dengan pola musiman paling tinggi terjadi di kuartal ke-3 setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan share yang diberikan sektor ini terhadap pembentukan tingkat PDRB Provinsi Kalimantan Selatan bahkan mencapai 17 persen, melampaui share yang disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang terus turun hingga 16 persen.

Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Selatan yang selama ini perekonomiannya sangat bertumpu pada pertambangan batu bara, sejak tahun 2016 telah memasukkan sektor pariwisata sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD periode tahun 2016 – 2021, dengan maksud akan menjadikan

Kalimantan Selatan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan yang ditetapkan dalam skala Nasional. Dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa pembangunan ekonomi akan dipacu lebih tinggi, inklusif, serta berdaya saing salah satunya dengan akselerasi peningkatan nilai tambah pariwisata.

Di sektor kepariwisataan ini, terdapat 3 (tiga) Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPPN) meliputi KSPPN Loksado, KSPPN Banjarmasin, dan KSPPN Martapura. Bagi daerah yang ekonominya didominasi oleh eksploitasi sumber daya alam, pilihan kegiatan usaha kepariwisataan menjadi hal yang paling masuk akal.

Untuk Kalimantan Tengah, pada tahun anggaran 2020, Kementerian Pertahanan mendapat tugas dari Presiden untuk membangun lumbung pangan berskala luas (food estate). Hal ini merupakan potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Diharapkan, nantinya proyek food estate ini akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat.

3.IV. REGIONAL SULAWESI

Pada regional Sulawesi terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi sektor potensial yang dapat dikembangkan dalam rangka mendorong tingkat perekonomian di regional ini. Beberapa sektor yang mempunyai harapan ke depan dan dapat dijadikan sebagai penunjang perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan sektor pariwisata. Munculnya kedua sektor ini sebagai sektor potensial tak terlepas lagi melimpahnya sumber daya alam dan industri turunan yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri.

1. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan dipredikasi dapat menjadi engine growth atau mesin pertumbuhan ekonomi yang dapat berkembang di Sulawesi.

TABEL 90. LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SULAWESI

POTENSIP	% Laju yoy
Sektor industri pengolahan	4,98%
Sektor Pariwisata	6,27%

Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan industri pengolahan didorong seiring meningkatnya produksi industri pertambangan di daerah regional Sulawesi. Selain itu, pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten juga mendorong berkembangnya industri pengolahan pangan lokal yang diharapkan dapat menjadi penggerak dalam pengembangan diversifikasi pangan. Adanya nilai tambah pada barang/jasa yang dihasilkan akan dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi seiring melimpahnya sumber daya alam yang dapat diolah. Hal ini nantinya akan memberikan dampak positif baik dari lapangan kerja, menambahkan devisa negara, dan memperkuat neraca transaksi berjalan. Namun, perkembangan industri pengolahan ini juga perlu dukungan dengan adanya investasi yang masuk ke dalam regional Sulawesi, terutama investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan, dimana investasi di bidang ini akan menambah kapasitas sumber daya manusia yang akan menjadi backbone dari berbagai industri yang ada.

Berdasarkan data BPS, terdapat laju pertumbuhan yang cukup baik pada industri pengolahan setiap tahunnya. Data laju pertumbuhan sebagaimana disajikan pada tabel Data Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Per Provinsi Di Regional Sulawesi Tahun 2016 s.d. 2020

2. Sektor Potensial Lainnya

Selain sektor industri pengolahan, sektor pariwisata juga menjadi sektor yang potensial dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di regional Sulawesi. Sulawesi memiliki potensi wisata yang berlimpah untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata seperti wisata bahari, wisata alam, dan wisata budaya. Selain potensi alam, pariwisata juga dapat dikembangkan atas dasar

nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sulawesi kita kenal mempunyai banyak obyek alam yang menarik, seperti pantai di banyak daerah di Sulawesi, Taman Nasional, dan Taman Nasional Laut. Selain itu, Sulawesi juga memiliki potensi wisata berbasis kebudayaan, bahkan tiga dari wisata budaya yang ada di Sulawesi masuk dalam *Calender of Event (CoE) Wonderful of Indonesia (Wol)*. CoE Wol merupakan program dari Kementerian Pariwisata yang memilih kalender 100 pariwisata unggulan di seluruh Indonesia yang kemudian dijadikan event tahunan.

Selain pengembangan dari kawasan wisata itu sendiri, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana turut pula berperan mendorong potensi wisata yang telah ada agar lebih berkembang dan muncul sebagai potensi unggulan di seuruh daerah di regional Sulawesi.

3.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Setiap provinsi di kawasan regional Bali dan Nusa Tenggara memiliki ciri geografis sehingga mempengaruhi potensi di setiap provinsi, seperti pada Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki lapangan usaha pertambangan yang berkontribusi kepada PDRB 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 17,29 persen namun lapangan usaha pertambangan tidak secara umum terdapat dalam provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Secara umum lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki kontribusi PDRB yang cukup besar terhadap PDRB 2020 dan pertumbuhan yang positif pada tahun 2020.

TABEL 91. DATA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PER PROVINSI DI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2016 S.D. 2020

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Gorontalo	6,58	3,46	6,77	11,56	1,12
Sulawesi Utara	1,08	8	4,39	0,25	4,41
Sulawesi Selatan	8,23	5,03	0,94	9,92	-4,42
Sulawesi Tenggara	8,9	6,38	6,81	10,84	7,09
Sulawesi Barat	-2,46	7,96	7,51	5,13	-3,52
Sulawesi Tengah	34,96	11,2	106,29	17,3	23,68

Sumber: BPS, diolah

1. Sektor Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

Secara nasional lapangan usaha informasi dan komunikasi secara nasional mampu tumbuh 11,1 persen di saat ekonomi nasional dan global mengalami perlambatan. Pertumbuhan 11,1 persen secara nasional juga berimbas bagi pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi di kawasan regional Bali dan Nusa Tenggara. Pemilihan sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi berdasarkan dari kontribusi terhadap PDRB 2020 dan pertumbuhan positif di tahun 2020.

Kontribusi terhadap PDRB pada setiap provinsi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara tidak mencapai dua digit namun secara umum lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mampu tumbuh di tahun 2020.

Pertumbuhan yang signifikan pada rentang waktu 2019 s.d. 2020 dapat disebabkan karena adanya kebijakan sosial distancing di perkantoran dan sekolah. Pertumbuhan positif lapangan usaha informasi dan komunikasi dapat diukur dari parameter pertumbuhan coverage desa/kelurahan

yang terjangkau sinyal provider telekomunikasi.

Pertumbuhan jumlah coverage desa/kelurahan yang meningkat pada tahun 2020 menunjukkan permintaan kebutuhan dari masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi meningkat. Indikator pertambahan coverage wilayah desa/kelurahan yang terjangkau sinyal telekomunikasi salah satu parameter yang berkorelasi dengan pertumbuhan sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi.

2. Lapangan Usaha Jasa Pendidikan

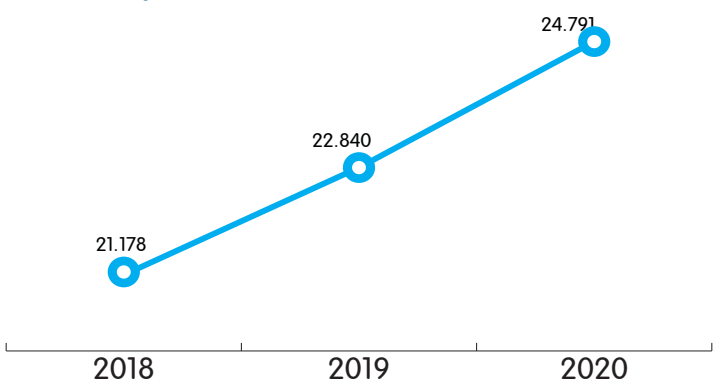
Jasa pendidikan mampu tumbuh dan survive pada tahun 2020 dengan menunjukkan pertumbuhan sebesar di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Kontribusi lapangan usaha jasa pendidikan paling tinggi terhadap PDRB 2020 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 10,08 persen. Meningkatnya kontribusi jasa pendidikan pada PDRB menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan baik, upaya mengoptimalkan belanja pemerintah sebagai lokomotif perekonomian (counter-cyclical) khususnya pada masa pandemi telah dapat

TABEL 92. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PDRB PER PROVINSI

Provinsi		% PDRB
1	Bali	6,37%
2	Nusa Tenggara Barat	2,78%
3	Nusa Tenggara Timur	7,44%

Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 119. KONDISI AKSES JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI REGIONAL KALIMANTAN



Sumber: BPS, diolah

TABEL 93. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP PDRB PER PROVINSI

No	Provinsi	2019		2020	
		4G/LTE	3G/H+/H	4G/LTE	3G/H+/H
1	Bali	575	138	643	70
2	Nusa Tenggara Barat	871	215	1011	114
3	Nusa Tenggara Timur	na	na	1602	903

Sumber: BPS, diolah

terrealisasi dengan baik. Walaupun di tengah tantangan dan keterbatasan di masa pandemi, realisasi belanja negara di Nusa Tenggara Timur terbukti cukup mampu memberikan kontribusi dan porsi yang lebih kepada PDRB.

3.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Berdasarkan data BPS, terdapat laju pertumbuhan yang cukup baik pada sektor pariwisata dan pengolahan setiap tahunnya. Datanya dapat dilihat pada tabel Kontribusi Sektor Potensial di Regional Maluku-Papua terhadap PDRB.

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada sub sektor perikanan di wilayah provinsi Papua, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) terbagi menjadi dua, yaitu perairan utara dan perairan selatan. Potensi pada perikanan tangkap dapat dilihat dari luasnya hamparan perairan Laut Cendrawasih dan Samudra Pasifik seluas 11.000 km² yang terletak di perairan utara Papua yang merupakan kawasan kaya akan sumber daya perikanan Pelagis Besar (tuna, paruh panjang, cakalang, dan tenggiri). Sedangkan perairan Laut Arafura seluas 14.300 km di bagian selatan Papua merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal (udang, kakap, bawal, pari, cucut dan ikan lainnya). Namun mengingat masih terbatasnya pemanfaatan potensi ini di Papua, sumber daya alam yang melimpah tersebut belum dapat dioptimalkan dalam mendukung perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi provinsi Papua. Selanjutnya, besarnya potensi pada perikanan budidaya dapat dilihat

dari Kawasan Bentang Laut Papua yang memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan dengan prioritas penanganan meliputi:

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten dan Kota Jayapura.
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Sarmi dan Waropen.
- Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Jayawijaya, Kabupaten dan Kota Jayapura.

Optimalisasi pemanfaatan atas sektor perikanan ini antara lain dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jalur perdagangan, mendorong sertifikasi ekspor, serta memanfaatkan cold storage atas hasil tangkapan ikan. Di samping itu, dukungan pengadaan armada kapal yang modern dapat dibiayai dengan APBD maupun pemanfaatan DAK Fisik.

Berdasarkan data BPS, terdapat laju pertumbuhan yang cukup baik pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan setiap tahunnya. Data laju pertumbuhan sebagaimana disajikan pada tabel Data Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Per Provinsi di Regional Maluku-Papua Tahun 2016 s.d. 2020.

Lalu potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM

TABEL 94. KONTRIBUTSI SEKTOR POTENSIAL DI REGIONAL MALUKU-PAPUA TERHADAP PDRB

	Potensi	% thd PDRB
1	Industri Pengolahan	15,91
2	Pertambangan dan Penggalian	5,63
3	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,05

Sumber: BPS, diolah

TABEL 95. DATA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI DI REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2016 S.D. 2020

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Maluku	4,73	5,99	4,57	5,42	1,7
Maluku Utara	4,25	3,16	4,03	4	1,36
Papua		3,94	3,31	0,03	-0,67
Papua Barat	2,12	5,85	2,23	3,34	-2,21

Sumber: BPS, diolah

secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari dapat menjadikan provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur. Sedangkan untuk kehutanan, Papua adalah provinsi yang memiliki hutan terluas di Indonesia dengan hutan seluas 25,03 ha. Tiga kabupaten dengan wilayah hutan terluas adalah Mamberamo (2,70 ha), Asmat (2,29 ha), dan Boven Digoel (1,98 ha). Tanah Papua merupakan penyumbang 50 persen keanekaragaman hayati di Indonesia, sehingga menjaga keberadaan hutan Papua berarti menjaga keanekaragaman hayati dan populasi seluruh Orang Asli Papua (OAP) yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan jasa ekosistem hutan. Hutan tersebut di kelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu hutan lindung, suaka alam, dan hutan produksi. Hutan lindung dan suaka alam berfungsi untuk menjaga kelestarian alam seperti pengaturan tata air dan tempat berlindung bagi flora fauna. Hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk memproduksi kayu, rotan, gatah, dan hasil hutan lainnya. Luas hutan produksi adalah 30 persen dari keseluruhan hutan di Papua. Namun pemanfaatan hutan ini juga belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya porsi sektor Kehutanan pada PDRB provinsi Papua.

2. Pertambangan dan Penggalian

Dilihat dari kontribusi lapangan usaha, perekonomian pada regional Papua masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kinerja sektor non tambang, pemulihan ekonomi diharapkan dapat menyasar kepada sektor non tambang yang memiliki pangsa tenaga kerja terbesar yakni sektor perikanan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

3. Sektor Potensial Lainnya

Maluku merupakan salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Kondisi alam yang ada di Maluku sangat mempesona nan alami. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi keindahan alam yang dimiliki tetapi juga berbagai keindahan dari aspek historis yang dimiliki, keunikan lokal baik tradisi, kekayaan budaya adat istiadat yang sangat beragam, serta masyarakatnya menjadi daya tarik tersendiri pada sektor pariwisata di Maluku. Seluruh keberagaman yang ada hingga saat ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Pengelolaan keragaman multi dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah provinsi Maluku ke depannya, yang diarahkan pada pengembangan berbasis kearifal lokal dan konservasi kultural (yang tidak hanya bersifat seremonial).

Sektor pariwisata ini menjadi sektor potensial untuk dikembangkan. Pengembangan sektor ini sendiri terus dilakukan seiring dengan makin terbukanya akses transportasi yang semakin pesat ke Maluku. Pembangunan kepariwisataan di wilayah ini diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang berkaitan erat. Pemerintah selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa, juga sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Meskipun wisatawan nusantara tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kemampuannya menggerakkan perekonomian daerah. Wisatawan nusantara mampu menghidupkan sektor transportasi, perhotelan, industri kreatif dan lain sebagainya.

Potensi obyek dan daya tarik provinsi Maluku yang menjadi andalan sampai saat ini serta dikenal luas adalah obyek dan daya tarik alam dan budaya serta

TABEL 96. DATA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI DI REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2016 S.D. 2020

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Maluku	3,91	0,21	-7,36	-4,5	-0,78
Maluku Utara	-1,57	11,22	11,97	6,93	6,9
Papua		3,9	10,35	-43,27	16,62
Papua Barat	0,79	-1,36	4,17	-0,34	-0,21

Sumber: BPS, diolah

peninggalan sejarah. Obyek tersebut berupa pulau-pulau kecil dan pantai eksotik yang indah serta bangunan peninggalan kebudayaan di masa lalu. Obyek dan daya tarik wisata budaya tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Kondisi daya tarik wisata budaya dan sejarah sampai saat ini sudah beberapa yang dikembangkan.

Sementara itu, potensi wisata pada provinsi Maluku Utara meliputi empat zona wisata yang terdiri dari wisata alam/pantai pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, serta wisata olahraga air. Dengan ditetapkan Pulau Morotai sebagai 10 destinasi wisata unggulan Indonesia oleh Kementerian Pariwisata, semakin menegaskan potensi pengembangan pariwisata Maluku Utara. Tidak hanya itu, dengan ditetapkan Kota Tidore Kepulauan sebagai tuan rumah pada “Sail Tidore 2021” semakin mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata Maluku Utara.

Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Provinsi Papua ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan dilaksanakan tahun 2021. Hal ini akan menjadi peluang banyaknya pengunjung dari luar daerah yang akan datang ke Papua yang biasanya diikuti pula dengan meningkatnya kegiatan perekonomian (hotel, transportasi, akomodasi, souvenir, dan lain-lain).

Potensi besar sektor pariwisata di provinsi Papua Barat yang telah dikenal masyarakat adalah Kepulauan Raja Ampat, sebagai rumah bagi 75 persen spesies koral yang ada di dunia dan 1.500 spesies ikan termasuk beragam jenis hiu, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Realitas wilayah tersebut memberikan konsekuensi pada besarnya potensi sebagai aset pengembangan, khususnya pariwisata kepulauan dan bahari berbasis ekosistem (*ecotourism*). Peluang investasi

yang bisa diwujudkan di Kepulauan Raja Ampat terletak pada luasnya area yang dapat dibangun menjadi berbagai fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel (9 ha), vila (42,2 ha), kompleks olahraga (3 ha) dan area komersial (1,8 ha). Berdasarkan proyeksi BKPM, nilai NPV akan positif, sedangkan IRR dapat mencapai ± 50 persen atau lebih tinggi dari discount rate, sehingga investasi menjadi layak untuk dijalankan. Selain pembangunan fasilitas, potensi investasi lain adalah produk jasa pariwisata, misalnya Live on Board (LoB) yang dilakukan di atas kapal pinisi tradisional atau kapal safari modern. LoB adalah bentuk produk yang menawarkan kesempatan kepada wisatawan untuk tinggal di kapal dan memberikan berbagai pengalaman dan petualangan dalam paket lengkap. Hampir seluruh komponen pariwisata yaitu *Attractions*, *Activities*, *Accommodations*, *Amenities*, dan *Accessibilities* (5A) dapat terpenuhi oleh paket wisata perjalanan sesuai dengan jarak jelajah kapal.

4. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI DAERAH

4.1. REGIONAL SUMATERA

Terjadinya krisis pandemi COVID-19 di tahun 2020 menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan secara struktural harus menyelesaikan beberapa permasalahan dan kendala, yaitu daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas serta pasar keuangan yang masih dangkal. Selanjutnya industri jasa keuangan perlu memenuhi adanya kebutuhan untuk mempercepat transformasi digital. Selain itu juga, berkembang pesatnya *financial technology* (*fintech*) merupakan tantangan yang mesti dijawab dengan kebijakan strategis yang cepat dan tepat. Tantangan berikutnya, adanya harapan besar pada sektor jasa keuangan yang diharapkan menjadi solusi bagi upaya penurunan tingkat ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas.

Adapun pada sektor pertanian, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi ancaman utama

bagi para petani sawit. Tantangan berikutnya yang dihadapi yaitu usia tanaman sawit yang sudah memasuki masa peremajaan (replanting) dan kualitas bibit sawit yang rendah. Akibat umur tanaman yang sudah tua maka produksi sawit pun sangat sedikit sehingga terkadang tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani seperti biaya untuk upah tenaga kerja dan pupuk. Peremajaan ini menjadi masalah tersendiri bagi petani, karena saat peremajaan dilakukan, petani harus mengeluarkan dana yang cukup besar yang tentu saja hal tersebut mengganggu proses perputaran dan pertumbuhan perekonomian.

Tantangan pada sektor pariwisata di regional Sumatera yaitu terbatasnya kualitas SDM dan kelembagaan yang bergerak di dalamnya, serta ekonomi kreatif untuk menopang pariwisata. Diperlukan sinergi antar seluruh stakeholder dalam pengembangan pariwisata daerah. Selain itu, belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana, serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata juga menjadi tantangan sektor pariwisata di regional Sumatera. Promosi destinasi pariwisata harus terus digencarkan, baik dengan target wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, terlebih sejak pandemi COVID-19, sektor pariwisata dihadapkan pada tantangan mobilitas masyarakat yang terbatas karena adanya penerapan social distancing. Kendala dan tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam mengembangkan potensi pariwisata adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pengembangan pariwisata sehingga menyebabkan banyak rencana pengembangan yang gagal karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat, kurangnya modal dan rendahnya sumber daya manusia, terutama tenaga terampil dan profesional di bidang pariwisata yang merupakan komponen utama dan penentu dalam memberikan pelayanan langsung kepada wisatawan, belum berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

4.II. REGIONAL JAWA

1. Dependensi daerah atas dana transfer dari Pemerintah Pusat masih tinggi

Dalam struktur APBD terdapat komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Di antara enam provinsi di regional Jawa, hanya satu provinsi yang sudah memiliki kemandirian fiskal, lima daerah lainnya masih membutuhkan asupan dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan cerminan atau representasi dari suatu daerah dalam menggali potensi dari setiap lapangan usaha di daerah masing-masing. Dengan dependensi pemerintah daerah kepada dana transfer pemerintah pusat dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam memanfaatkan keunggulan dan potensi daerah.

2. Perilaku dan pola belanja yang kurang berkualitas

Pemanfaatan belanja masih banyak digunakan untuk yang sifatnya kurang produktif. Misalnya, terlihat bahwa kondisi fiskal belanja daerah di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai sehingga mengakibatkan keterbatasan fiskal bagi pemerintah untuk mengembangkan potensi di setiap daerah. Di sisi lain, pola penyerapan belanja atas alokasi APBD pada pemerintah daerah belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pola penyerapan belanja pemerintah masih menunjukkan penyerapan lambat di awal tahun dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Penumpukan realisasi penyerapan belanja mengakibatkan adanya SILPA yang cukup tinggi pada akhir tahun anggaran.

3. Pembangunan Daerah yang Tidak Merata

Masih terdapat tingkat perbedaan yang cukup tinggi tingkat laju pelaksanaan pembangunan dan capaian atas pelaksanaan pembangunan tersebut di antara masing-masing daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain perbedaan tingkat distribusi PDRB, perbedaan tingkat Indeks Pembangunan Manusia antar daerah, dan perbedaan persentase penduduk miskin antar daerah yang cukup tinggi.

4. Aksesibilitas dan Interkoneksi antar Daerah Yang Masih Belum Merata

Aksesibilitas dan interkoneksi antar daerah yang

cukup memadai sangat menentukan tingkat pemerataan capaian pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Belum maksimalnya ketersediaan sarana/prasarana penunjang konektivitas antar wilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya mobilitas penduduk dan pemasaran hasil-hasil produksi antar daerah. Sebagai contoh di wilayah Provinsi Jawa Barat, selama ini pembangunan jalan tol trans Jawa masih terpusat di Jawa Barat bagian utara, terutama dari Jakarta sampai dengan Cirebon. Hal ini berakibat pembangunan kawasan industri juga relatif terpusat di Jawa Barat bagian utara, seperti daerah sekitar Bekasi, Karawang, dan Subang dan saat ini sudah mulai bergeser ke Indramayu dan Cirebon. Pada sektor transportasi laut, sampai dengan saat ini Provinsi Jawa Barat belum mempunyai pelabuhan laut yang representatif dan hampir semua hasil produksi Jawa Barat didistribusikan melalui pelabuhan Tanjung Priok sehingga kurang maksimal memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

5. Kapasitas Pendidikan SDM yang Masih Relatif Rendah

Sumber daya manusia menjadi ujung tombak penggerak utama pembangunan ekonomi di suatu daerah. SDM yang unggul akan mampu berkeaktifitas, bersaing mengikuti perkembangan zaman terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang secara masif untuk mendukung perkembangan dunia usaha. Tingkat kapasitas SDM yang belum merata dari sisi formal maupun non formal merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Terkait peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, terdapat permasalahan terkait sinkronisasi untuk pengembangan pendidikan kejuruan vokasi (SMA/SMK), karena kewenangan pemerintah provinsi namun lokasi SMA/SMK tersebar di kabupaten/kota. Hal tersebut terjadi khususnya di Provinsi Jawa Tengah dimana lokasi sekolah tersebar di 35 Kabupaten/Kota.

6. Kondisi pandemi dan pembatasan sosial

Kondisi pandemi memberikan tantangan kepada pemerintah untuk tetap menstimulus perekonomian masyarakat di tengah perlambatan ekonomi.

Banyak lapangan usaha pada tahun 2020 berkontraksi dan perlu adanya pemulihan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh positif kembali. Dengan mengimplementasikan kegiatan vaksin dan menciptakan herd immunity di tengah masyarakat, diharapkan dapat mendorong pemulihan kegiatan ekonomi nasional. Tahun 2020 juga memaksa pemerintah untuk mengalihkan alokasi pagu anggaran untuk pencegahan COVID-19 merupakan langkah strategis untuk mencegah perekonomian berkontraksi semakin dalam.

4.III. REGIONAL KALIMANTAN

Pada Sektor industri pengolahan, terdapat tantangan terkait dengan ketersediaan SDM yang kompeten. Percepatan pertumbuhan industri pengolahan baik untuk bahan tambang seperti batu bara maupun kelapa sawit dan karet sebagai sub sektor utama di regional Kalimantan membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat memberikan dukungan dan kebijakan yang tepat.

Adapun pada sektor konstruksi, tantangan bagi pemerintah daerah ialah bagaimana menjaga dan melindungi pengusaha konstruksi kecil agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar dalam proyek-proyek konstruksi utama seperti pembangunan ibukota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Untuk sektor informasi dan komunikasi, peran pemerintah untuk mendorong perusahaan operator untuk mengembangkan jaringan seluler dan internet merupakan hal yang sangat penting mengingat dibutuhkan biaya besar untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan ditambah dengan kondisi geografis yang menantang di Kalimantan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah sehingga sektor ini mencapai potensi yang maksimal.

Adapun untuk sektor potensial lainnya seperti *food estate*, perkebunan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan pariwisata, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Pada Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan *food estate* mendapat penolakan dari masyarakat

khususnya petani yang menganggap bahwa proyek ini nantinya akan mengambil alih peran mereka. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meyakinkan masyarakat bahwa proyek food estate justru merupakan sesuatu yang baik bagi petani.

2. Pada Provinsi Kalimantan Barat, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menyediakan pendanaan bagi petani kecil atau kelompok-kelompok petani agar tidak 'mati' tertekan oleh perkebunan dengan modal yang besar. Sebagian besar lahan perkebunan adalah milik perusahaan, pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan yang mengharuskan perusahaan besar membantu petani kecil dalam mengolah kebunnya. Peraturan tentang hal tersebut memang sudah ada dalam Perkebunan Inti Rakyat, namun dalam eksekusinya tanpa diawasi dengan ketat oleh Pemerintah hal tersebut tidak berjalan dengan baik.

3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih terkendala pada kapasitas SDM.

4. Sektor pariwisata, terkendala dalam hal infrastruktur dan transportasi.

4.IV. REGIONAL SULAWESI

Tantangan fiskal terbesar pada tahun 2020 adalah pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 sungguh luar biasa, dirasakan oleh seluruh sendi kehidupan dunia. Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, berbagai negara di dunia telah melakukan langkah luar biasa (extraordinary), yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar baik melalui instrumen fiskal maupun moneter. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan COVID-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan. Umumnya, stimulus fiskal yang dialokasikan oleh negara-negara memberikan fokus pada peningkatan anggaran kesehatan dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19.

Selain itu, bantuan pada masyarakat dan rumah tangga juga umumnya diberikan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk seperti bantuan tunai dan jaminan sosial. Untuk sektor usaha yang terkena dampak dari COVID-19, diberikan skema bantuan

berupa penundaan pembayaran pajak hingga jaminan pinjaman. Di samping itu, berbagai program dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi di tengah pandemi COVID-19 dilakukan termasuk pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik. Indonesia juga merasakan dampak dari wabah tersebut, daerah-daerah di regional Sulawesi juga mengalami hal serupa. Efek COVID-19 seperti buah simalakama, di satu sisi adalah kesehatan, pembatasan aktivitas manusia mutlak dilakukan untuk mereduksi penularan virus yang sangat membahayakan. Di sisi lain, dengan pembatasan aktivitas manusia, sektor perekonomian akan terpukul.

Selain adanya pandemi COVID-19, upaya pengembangan ekonomi masyarakat dalam mendorong perekonomian regional melalui sektor unggulan dan potensial memiliki beberapa hambatan pada lingkup regional, diantaranya yang utama adalah:

- a. Ruang fiskal yang terbatas untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam menopang belanja produktif dan prioritas;
- b. Realisasi belanja yang kurang berkualitas untuk menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan;
- c. Efektivitas bantuan sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
- d. Kemudahan regulasi dalam perizinan sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal dan menjadi fondasi kebijakan ekonomi.

4.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

1. Momentum Pasca Vaksinasi

Beberapa lapangan usaha yang memiliki share terbesar terhadap PDRB namun berkontraksi pada tahun 2020 di kawasan Bali dan Nusa Tenggara misalnya adalah Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman, ini menyumbang PDRB rata-rata setiap tahunnya Provinsi Bali sejumlah 21,76 persen,

namun berkontraksi hingga dua digit. Kemudian lapangan usaha Konstruksi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki kontribusi 10,91 persen PDRB Provinsi Bali, 9,19 persen pada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 9,82 persen pada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur serta masih banyak lapangan usaha lainnya yang berkontraksi pada tahun 2020 diproyeksikan akan rebound pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2021. Hal tersebut dapat diprediksi dengan adanya implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional & daerah diperkirakan akan mendorong momentum perbaikan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara di tahun 2021. Pada triwulan II 2021 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh LU utama. Untuk keseluruhan tahun 2021 ekonomi Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2020.

Dengan memanfaatkan momentum tersebut, Pemerintah Daerah harus responsif memanfaatkan tumbuhnya kegiatan perekonomian dengan mempermudah akses dan fasilitas untuk meningkatkan pertumbuhan setiap lapangan usaha di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi, salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat

2. Peningkatan Nilai Tambah di sektor Lapangan Usaha Pertanian

Pemerintah daerah di kawasan Bali dan Nusa Tenggara perlu menjadi triger dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian di Lapangan Usaha Pertanian mengingat lapangan usaha ini menyumbang PDRB di kawasan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 19 persen. Jika dielaborasi lagi, pada sektor lapangan usaha pertanian di kawasan Bali Nusa Tenggara, subsektor yang paling dominan adalah pertanian, peternakan dan

perikanan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi geografis di kawasan Bali dan Nusa Tenggara yang didominasi padang rumput, dan wilayah perairan dan kepulauan.

Dengan besarnya kontribusi di sektor lapangan usaha pertanian di Kawasan Bali dan Nusa Tenggara seharusnya pemerintah daerah dapat menstimulus agar hasil pertanian memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan menyerap lapangan pekerjaan.

4.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Perkembangan ekonomi kawasan regional menjadi pelaku utama dalam perkembangan ekonomi nasional. Artinya, ketika mendiskusikan kondisi perekonomian Indonesia, maka yang dimaksud adalah perekonomian di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan juga kota-kota lain di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keadaan geografis, sumber daya alam (natural resources), dan SDM (human resources) yang berbeda antar daerah. Sebagian daerah memiliki sumber daya alam melimpah namun sumber daya manusia kurang berkualitas, sementara sebagian daerah lainnya sebaliknya. Kondisi ini diantaranya yang menjadi sebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengejar ketertinggalan tersebut diantaranya: kepemilikan sumber daya alam (natural resources) melimpah namun diekspor dalam bentuk raw material, kapasitas SDM relatif rendah, kondisi sosial politik belum stabil, potensi pengembangan pariwisata belum memiliki layanan pendukung memadai, kendala pembangunan dan pengembangan UMKM belum memanfaatkan teknologi baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Diperparah dengan penanganan pandemi yang terkendala berbagai keterbatasan, utamanya kapasitas layanan kesehatan sehingga menjadikannya tantangan baru yang berpengaruh besar terhadap pembangunan sebagaimana telah terbukti di beberapa negara selama tahun 2020.

1. Kutukan Kepemilikan Sumber Daya Alam (Natural Resource Curse)

Kepemilikan sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan. Fenomena

tersebut dikenal sebagai *Natural Resource Curse* (Kutukan Sumber Daya Alam). Kutukan tersebut merupakan paradoks antara kepemilikan natural resources yang melimpah terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini umumnya terjadi pada daerah-daerah berkembang yang mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama pendapatan. Sumber daya alam dieksploitasi secara intensif namun tidak diberikan nilai tambah (*value added*) dimana hanya diekspor sebagai bahan baku (*raw materials*). Kegiatan eksploitasi secara berlebihan akan mengancam keberlanjutan dari pembangunan ekonomi karena cepat atau lambat sumber daya alam itu dapat habis sama sekali (*depletable resources*).

Fenomena natural resource curse terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti yang terjadi di provinsi Papua Barat. Provinsi ini memiliki sumber daya alam melimpah namun dari segi tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam.

2. Pengembangan Kapasitas SDM

Pembangunan fisik akan menjadi lebih produktif jika memiliki sumber daya (modal) manusia yang berkualitas. Adanya program pembangunan seperti jalan raya, jembatan, bendungan, irigasi, rumah sakit, pabrik, sekolah dan program pembangunan lainnya membutuhkan SDM yang ahli di bidangnya. Jika SDM yang berkualitas jumlahnya tidak memadai, maka pembangunan fisik akan berjalan menjadi kurang efisien dan efektif dimana mesin-mesin produksi yang ada menjadi cepat rusak, bahan-bahan banyak yang terbuang dan kualitas dari produksi yang dihasilkan sangat rendah. Para ekonom berpendapat bahwa kekurangan investasi modal manusia merupakan penyebab lambatnya pembangunan. Dengan tidak mengembangkan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan maka produktivitas dari modal fisik akan merosot.

3. Pengembangan Potensi Pariwisata (Tourism)

Pada umumnya, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan tourism di regional Maluku dan Papua belum memiliki layanan pendukung yang baik, seperti air bersih, pengolahan limbah, jaringan

komunikasi dan layanan keuangan. Padahal pada kedua regional ini memiliki potensi pariwisata menakjubkan dengan keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan keanekaragaman hayati.

Di antara strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada beberapa aspek yang berhubungan dengan ketersediaan alat transportasi terjadwal, jaringan telekomunikasi, ketersediaan pengolahan limbah, peningkatan atau sertifikasi SDM pariwisata, asuransi perjalanan, ketersediaan layanan yang berhubungan dengan perbankan, dan keselamatan perjalanan.

4. Kondisi Geografis dan Sarana Infrastruktur

Kondisi topografi pada kedua regional ini sangat bervariasi yang membentang mulai dari pantai, dataran rendah, rawa sampai dataran tinggi, dengan tipe tutupan lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Kondisi ini merupakan salah satu elemen yang menjadi barrier transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat, serta dasar bagi kebijakan pemanfaatan lahan sehingga membuat pembangunan infrastruktur terutama di regional Papua terkendala.

5. Stabilitas Sosial Politik

Sebagaimana dikatakan Drazen (2000), kondisi sosial politik mempengaruhi kinerja dari pembangunan dimana instabilitas politik memiliki dampak negatif terhadap proses pembangunan itu sendiri. Barro (1991) berpendapat bahwa kondisi politik yang tidak stabil diukur melalui revolusi, kudeta dan tingkat kriminalitas. Aisen dan Veiga (2011) menambahkan indikator stabilitas politik berupa tingkat kebebasan ekonomi, tingkat homogenitas etnis, dan perubahan kabinet.

6. Pengembangan UMKM (Small and Medium Enterprises)

Selain permasalahan pembiayaan, pelaku UMKM dihadapkan pada masalah ketidakmampuan untuk bersaing dari pelaku industri yang lebih mapan. UMKM hanya mengandalkan teknologi sederhana

untuk memproduksi barang sehingga menjadi kurang efisien. Dari sisi pemasaran, UMKM hanya mengandalkan pemasaran tradisional yang belum memanfaatkan teknologi internet sehingga penjualan hasil produksi menjadi tidak maksimal. Padahal di masa pandemi, ketika aktivitas manusia dibatasi untuk mencegah meluasnya pandemi, pemanfaatan teknologi menjadi unsur utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

7. Penanganan Pandemi

Pandemi yang dialami oleh semua wilayah di Indonesia selama tahun 2020, menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Pemberlakuan pembatasan aktivitas untuk mengurangi penyebaran COVID-19 telah memukul berbagai sektor ekonomi, di tengah upaya semua pihak untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, sudah seharusnya pandemi dapat ditangani dan diminimalisasi dampaknya agar tidak semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi. Akan tetapi, perbedaan kapasitas kesehatan dan faktor sosial masyarakat yang ada memberikan tingkat keberhasilan berbeda pada masing-masing daerah. Keterbatasan kapasitas kesehatan dan angka indikator kesejahteraan yang rendah menjadi sebuah tantangan yang kompleks dalam mengatasi pandemi sembari tetap mewujudkan pembangunan berkelanjutan.



BAB VII

ANALISIS TEMATIK: REFOCUSING APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI

Refocussing APBD dalam rangka program PC-PEN terdiri dari kluster utama untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Secara total alokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dari hasil realokasi APBD tahun 2020 sebesar Rp70.832,8 miliar. Bidang Kesehatan mendapat alokasi terbesar yaitu Rp34.174,0 miliar (48 persen). Pagu Bidang Jaring Pengaman Sosial mencapai Rp9.663,9 miliar (14 persen) dan Bidang Penanganan Dampak Ekonomi mencapai Rp26.995,0 miliar (38 persen). Besarnya alokasi anggaran kesehatan menunjukkan Pemerintah memprioritaskan pulihnya kesehatan masyarakat sebagai modal untuk percepatan pelaksanaan pembangunan ke depannya. Realisasi pada kluster bidang kesehatan di Regional Sumatera sebesar 64 persen, Jawa sebesar 59 persen, Kalimantan sebesar 62 persen, Sulawesi sebesar 78 persen, Bali-Nusra sebesar 74 persen, dan Maluku-Papua sebesar 58 persen dari alokasi pagu. Realisasi pada kluster bidang penyediaan jaring pengaman

sosial di Regional Sumatera sebesar 46 persen, Jawa sebesar 54 persen, Kalimantan sebesar 52 persen, Sulawesi sebesar 63 persen, Bali-Nusra sebesar 67 persen, dan Maluku-Papua sebesar 44 persen dari alokasi pagu. Realisasi pada kluster bidang penanganan dampak ekonomi di Regional Sumatera sebesar 53 persen, Jawa sebesar 77 persen, Kalimantan sebesar 51 persen, Sulawesi sebesar 64 persen, Bali-Nusra sebesar 80 persen, dan Maluku-Papua sebesar 45 persen dari alokasi pagu.

Serapan seluruh kluster di masing-masing regional masih cukup rendah. Hal ini mengindikasikan alokasi anggaran yang masih belum tersalurkan dengan baik atau kualitas perencanaan yang masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, dalam pelaksanaan realokasi dan refocussing APBD masih terdapat kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi implementasi kegiatan yang berpotensi tumpang tindih dengan Pemerintah Pusat dan permasalahan lainnya di masing-masing kluster. Namun demikian, baik Pemerintah Pusat dan Daerah terus meningkatkan koordinasi yang intens melalui berbagai saluran komunikasi sehingga pelaksanaan penanganan COVID-19 dapat berjalan secara maksimal.

Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mulai 11 Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global karena sebarannya terjadi di berbagai belahan negara dunia. COVID-19 juga menyebar secara cepat hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Selain itu, Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan sinergi kebijakan anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19 dan memulihkan perekonomian.

Dari sisi pemerintah pusat, respon atas penyebaran pandemi COVID-19 diwujudkan melalui kebijakan APBN yang antara lain meliputi:

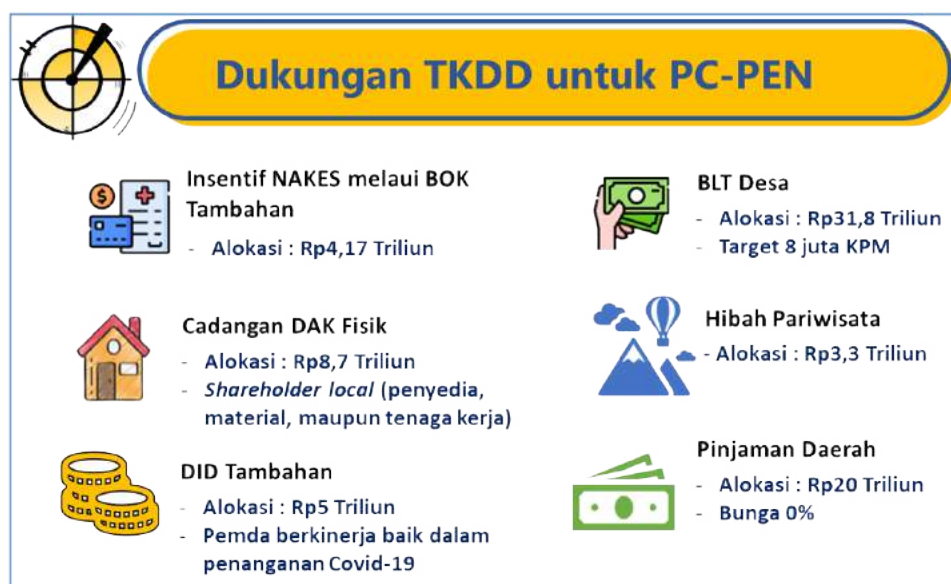
1. Relaksasi fiscal rule defisit anggaran dengan memperbolehkan defisit APBN melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan pandemi COVID-19 melalui penetapan Perpu No.1 tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No 2 tahun 2020.

2. Melakukan perubahan postur APBN TA 2020 agar lebih responsif dalam menangani dampak COVID-19 melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2020 yang diubah dengan Perpres No 72 tahun 2020.

3. Menerapkan kebijakan *countercyclical* melalui pemberian stimulus fiskal dengan mengalokasikan Anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,2 Triliun yang terbagi ke dalam enam cluster: kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.

Selain kebijakan pada level nasional tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bagi daerah yang diwujudkan melalui kebijakan refocussing dan penyesuaian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi

GAMBAR 120. PERTUMBUHAN RATA-RATA DARI SEKTOR POTENSI EKONOMI DI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2016 S.D. 2020



Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Sementara itu, dari sisi Pemerintah Daerah, dukungan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi diwujudkan melalui kebijakan refocussing dan realokasi APBD untuk program PC-PEN di daerah. Kebijakan refocussing dan realokasi APBD ini juga mengakomodasi kebijakan realokasi TKDD untuk dukungan penanganan COVID-19 seperti diuraikan sebelumnya, mengingat dana TKDD merupakan komponen pendapatan dalam APBD. Kebijakan refocussing dan realokasi APBN untuk PC-PEN daerah tersebut diatur melalui:

1. Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.119/2813/SJ dan Menteri Keuangan No.117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

1. KEBIJAKAN REFOCUSING APBD UNTUK PC-PEN

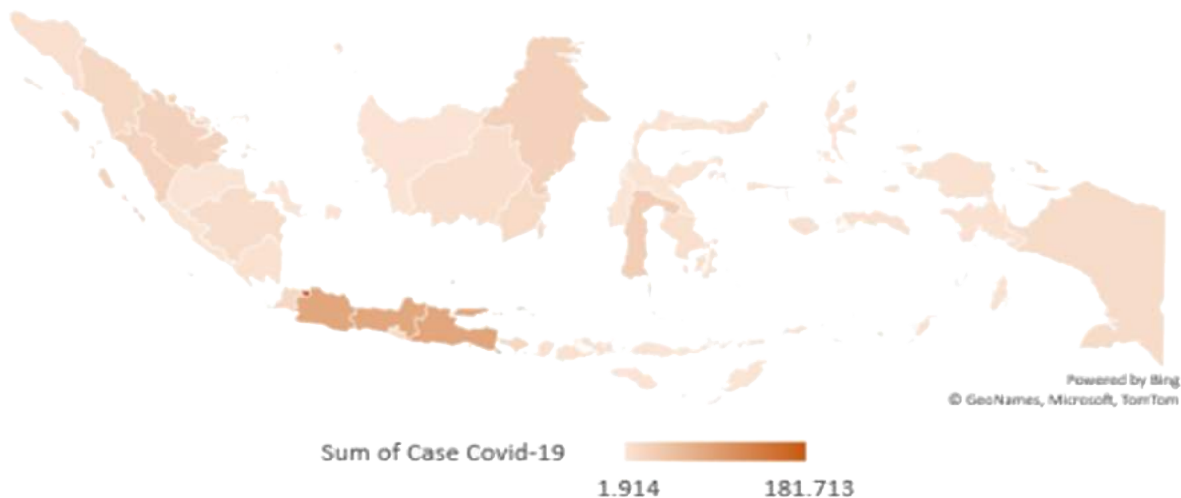
Sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden dan Menteri Kesehatan pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus

menunjukkan peningkatan secara cepat. Kasus positif COVID-19 tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah mencapai 735.124 kasus per 30 Desember 2020. Provinsi DKI Jakarta sebagai episentrum COVID-19 di Indonesia memiliki jumlah kasus tertinggi di antara provinsi lainnya yang telah mencapai 181.713 kasus. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah kasus terendah yang mencapai 1.914 kasus.

Dengan penyebaran kasus COVID-19 yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia tersebut, peran Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi sangat krusial. Untuk itu kebijakan refocussing dan realokasi APBD untuk PC-PEN daerah juga memegang peran penting untuk mendukung kebijakan PC-PEN nasional.

Berbeda dengan kebijakan PC-PEN nasional yang terbagi ke dalam enam cluster, kebijakan PC-PEN daerah hanya terbagi dalam tiga cluster, yaitu penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi. Secara total alokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dari hasil realokasi APBD tahun 2020 sebesar Rp70.832,8 miliar. Bidang Kesehatan mendapat alokasi terbesar yaitu Rp34.174,0 miliar (48%). Pagu Bidang Jaring Pengaman Sosial mencapai Rp9.663,9 miliar (14%) dan Bidang Penanganan Dampak Ekonomi mencapai

GAMBAR 121. PETA PERSEBARAN KASUS COVID-19 PER 30 DESEMBER 2020



Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah-

Rp26.995,0 miliar (38%).

Alokasi belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada seluruh provinsi di Indonesia Rp Rp34.174,0 miliar atau 48% dari total pagu penanganan COVID-19 dari realokasi dan refocussing APBD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan menunjukkan Pemerintah memprioritaskan pulihnya kesehatan masyarakat sebagai modal untuk percepatan pelaksanaan

pembangunan ke depannya. Alokasi terbesar di regional Jawa sebesar Rp15.018,5 miliar. Alokasi yang besar tersebut seiring dengan besarnya jumlah kasus COVID-19 di Pulau Jawa. Alokasi terendah di regional Maluku-Papua yang mencapai Rp2.333,8 miliar. Namun demikian secara total realisasi belanja kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia tercapai sebesar Rp22.683,3 miliar (66%).

GAMBAR 122. ALUR REGULASI KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD UNTUK PC-PEN DAERAH



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah-

GAMBAR 123. PROGRAM PC-PEN NASIONAL DAN DAERAH



Sumber: DJPb, DJPK, diolah

Alokasi belanja penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) di seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp9.663,9 miliar atau 14% dari total pagu penanganan COVID-19 dari realokasi dan refocussing APBD. Realisasi jaring pengaman sosial sebesar Rp5.151,4 miliar (53%). Alokasi terbesar di regional Jawa yang mencapai Rp3.961,8 miliar. Hal ini disebabkan tingginya jumlah kasus COVID-19 di Pulau Jawa sekaligus besarnya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Alokasi terendah di regional Maluku-Papua yang mencapai Rp725,1 miliar.

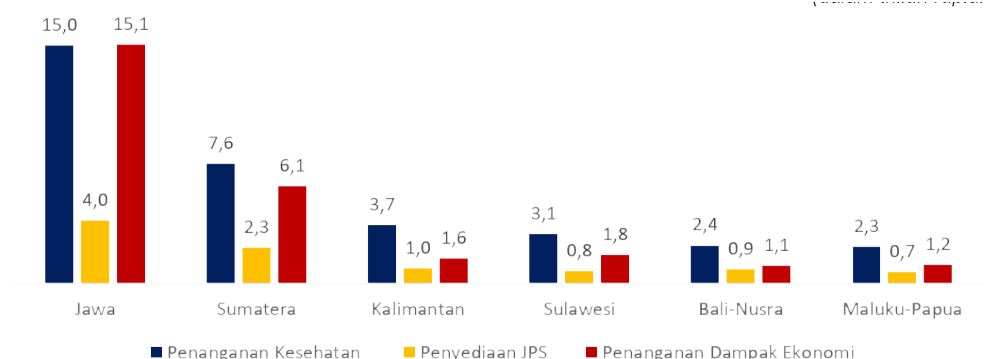
Hasil realokasi dan refocussing APBD untuk penanganan COVID-19 untuk alokasi belanja penanganan dampak ekonomi sebesar Rp26.995 miliar atau 38% dari total pagu penanganan COVID-19. Realisasi belanja penanganan dampak ekonomi sebesar Rp18.241,8 miliar (68%). Alokasi terbesar di regional Jawa yang mencapai Rp15.078,1 miliar. Besarnya alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah secara serius berusaha agar sektor ekonomi dapat pulih dan berjalan dengan normal.

Dalam pelaksanaan realokasi dan refocussing APBD masih terdapat kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi implementasi kegiatan yang berpotensi tumpang tindih dengan Pemerintah Pusat. Selain itu juga terdapat permasalahan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial serta penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan COVID-19. Namun demikian, baik Pemerintah Pusat dan Daerah terus meningkatkan koordinasi yang intens melalui berbagai saluran komunikasi sehingga pelaksanaan penanganan COVID-19 dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, keterlibatan aktif dan disiplin yang tinggi dari masyarakat untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan sangat diperlukan dalam rangka mengurangi persebaran COVID-19 berupa 3 M, Memakai Masker-Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.

2. BIDANG KESEHATAN

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, di antaranya mengatur bahwa

GAMBAR 124. ALOKASI PAGU PC-PEN APBD 2020 (TRILIUN)



Sumber: DJPK, diolah

alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di daerah dari hasil optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam APBD. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Dalam Instruksi Mendagri No.1 tahun 2020 di atas, hasil optimalisasi APBD dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19 digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dan penanganan dampak ekonomi. Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan COVID-19 untuk belanja kesehatan digunakan antara lain:

1. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis.
2. Penyediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator dan alat uji deteksi COVID-19 dan penyediaan sarana faskes lainnya.

3. Perekrutan tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan COVID-19

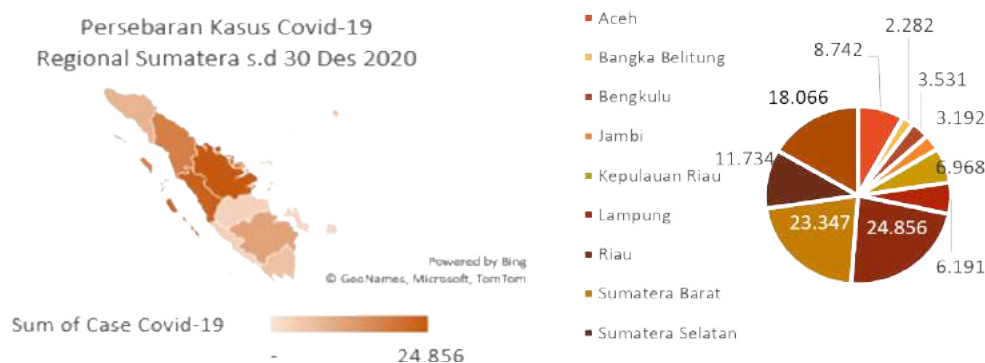
4. Pemberian Insentif tenaga kesehatan, tenaga penyidik korban terpapar COVID-19 dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan COVID-19; penyemprotan disinfektan, sewa rumah untuk isolasi pasien COVID-19, pemeriksaan laboratorium; pengadaan alat/bahan evakuasi korban positif COVID-19; penanganan jenazah; dan penanganan kesehatan lainnya.

2.1. REGIONAL SUMATERA

Hasil realokasi dan refocussing belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada regional Sumatera mencapai Rp7.552,9 miliar dan realisasi sebesar Rp4.714,9 miliar (62%). Alokasi tertinggi di Provinsi Aceh mencapai Rp1.368,4 miliar dan realisasi sebesar Rp874,6 miliar (64%). Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 secara kumulatif di Provinsi Aceh per 30 Desember 2020 mencapai 8.742 kasus atau urutan kelima di antara provinsi lainnya di regional Sumatera.

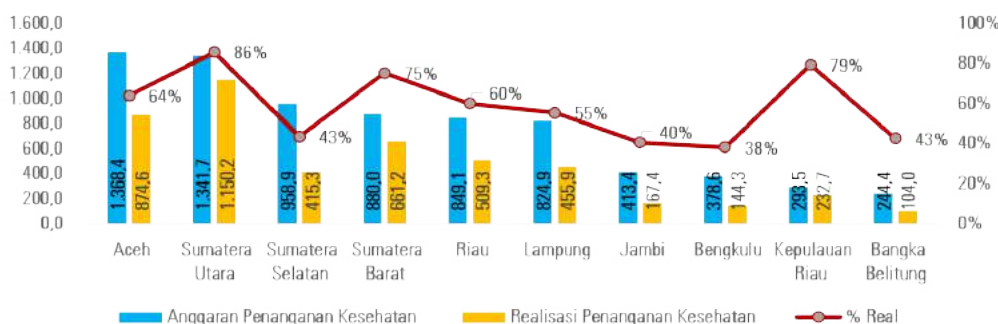
Alokasi terendah untuk belanja kesehatan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

GAMBAR 125. SEBARAN KASUS COVID-19 REGIONAL SUMATERA S.D. 30 DESEMBER 2020



Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah

GAMBAR 126. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG KESEHATAN REGIONAL SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

mencapai Rp244,4 miliar. Hal ini seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah di regional Sumatera. Realisasi anggaran belanja kesehatan hanya mencapai Rp104 miliar (43%).

2.II. REGIONAL JAWA

Hasil realokasi dan refocussing belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada regional Jawa mencapai Rp15.018,5 miliar dan realisasi sebesar Rp10.205,7 miliar (68%). Alokasi tertinggi di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp4.879,5 miliar dan realisasi sebesar Rp2.889,6 miliar (59%). Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 secara kumulatif di Provinsi Jawa Timur per 30 Desember 2020 mencapai 83.217 kasus atau urutan kedua di antara provinsi lainnya di regional Jawa.

Alokasi terendah untuk belanja kesehatan pada Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai Rp472,2 miliar. Hal ini seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah di regional Jawa sebesar 11.898 kasus. Realisasi anggaran belanja kesehatan hanya mencapai Rp371,3 miliar (79%).

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

Hasil realokasi dan refocussing belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada regional

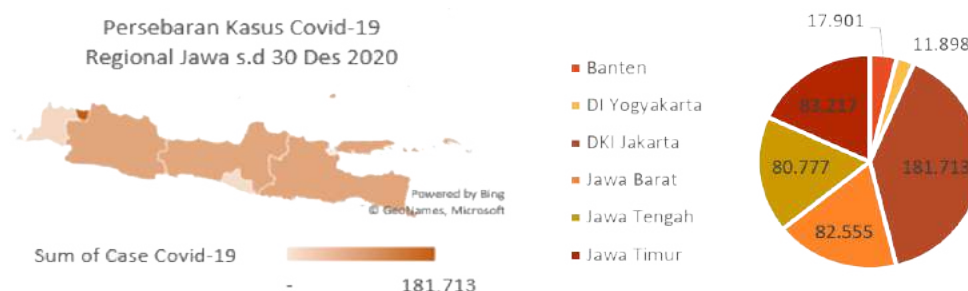
Kalimantan mencapai Rp3.703 miliar dan realisasi sebesar Rp2.289,7 miliar (62%). Alokasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp1.214,7 miliar dan realisasi sebesar Rp964,5 miliar (79%). Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 secara kumulatif di Provinsi Kalimantan Selatan per 30 Desember 2020 mencapai 15.237 kasus atau urutan kedua di antara provinsi lainnya di regional Kalimantan.

Alokasi terendah untuk belanja kesehatan pada Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai Rp310,9 miliar. Hal ini seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah kedua di regional Kalimantan sebesar 3.740 kasus. Realisasi anggaran belanja kesehatan hanya mencapai Rp176,1 miliar (57%).

2.IV. REGIONAL SULAWESI

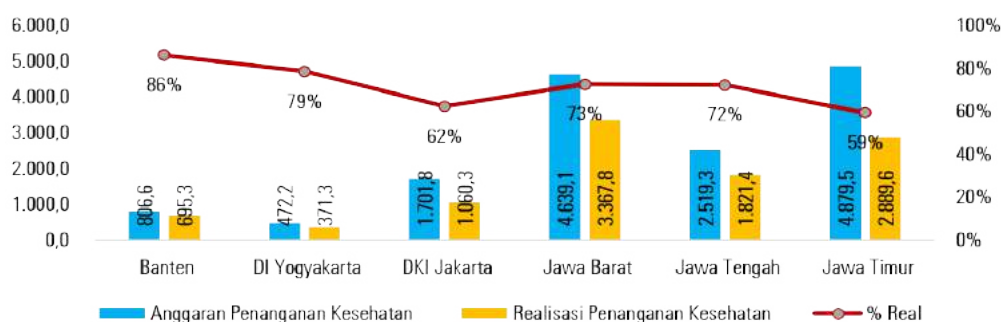
Hasil realokasi dan refocussing belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada regional Sulawesi mencapai Rp3.146,3 miliar dan realisasi sebesar Rp2.314,5 miliar (74%). Alokasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp843,8 miliar dan realisasi sebesar Rp659,3 miliar (78%). Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 secara kumulatif di Provinsi Sulawesi Selatan per 30 Desember 2020 mencapai 30.568 kasus atau tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Sulawesi.

GAMBAR 127. SEBARAN KASUS COVID-19 REGIONAL JAWA S.D. 30 DESEMBER 2020



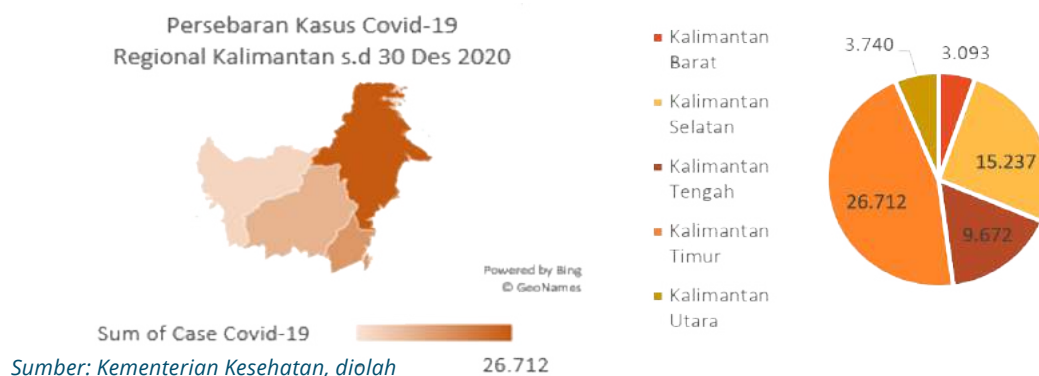
Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah

GAMBAR 128. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN REGIONAL JAWA BIDANG KESEHATAN (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 129. SEBARAN KASUS COVID-19 REGIONAL KALIMANTAN S.D. 30 DESEMBER 2020



GAMBAR 130. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG KESEHATAN REGIONAL KALIMANTAN TA 2020 (MILIAR)



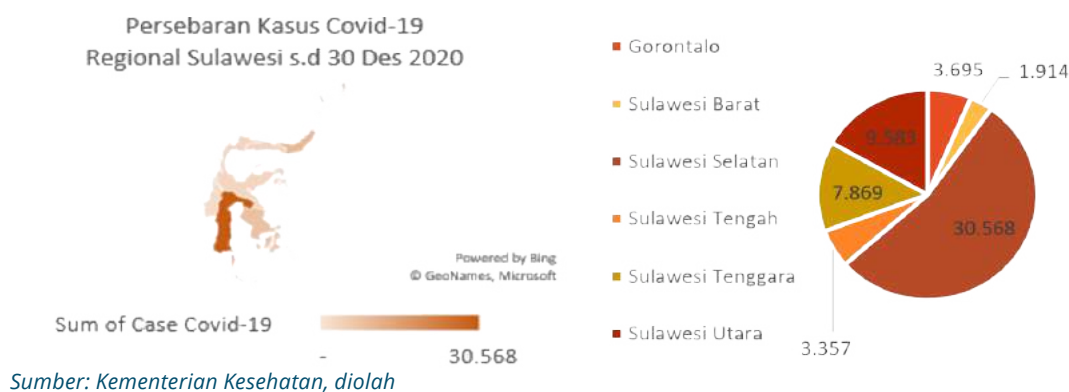
Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

Alokasi terendah untuk belanja kesehatan pada Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp208,9 miliar. Hal ini seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah di regional Sulawesi sebesar 1.914 kasus. Realisasi anggaran belanja kesehatan

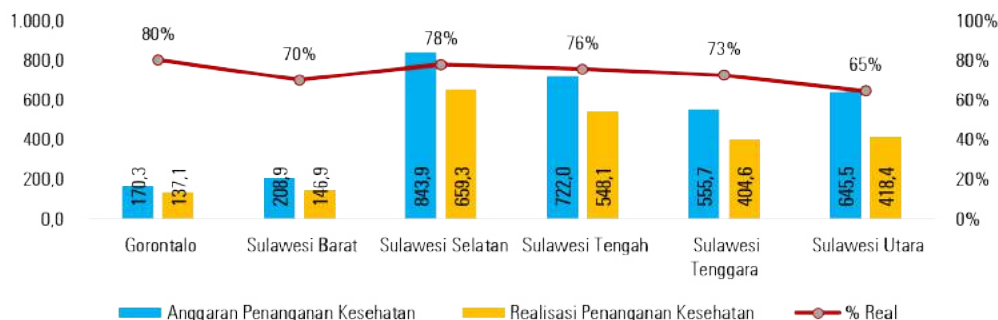
mencapai Rp146,9 miliar (70%).

2.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

GAMBAR 131. SEBARAN KASUS COVID-19 REGIONAL KALIMANTAN S.D. 30 DESEMBER 2020



GAMBAR 132. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG KESEHATAN REGIONAL SULAWESI TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

Hasil realokasi dan refocussing belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada regional Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp2.419,6 miliar dan realisasi sebesar Rp1.798,6 miliar (74%). Alokasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp1.015,1 miliar dan realisasi sebesar Rp837,8 miliar (83%). Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 secara kumulatif di Provinsi NTB per 30 Desember 2020 mencapai 5.599 kasus atau tertinggi kedua di antara provinsi lainnya di regional Bali-Nusa Tenggara.

Alokasi terendah untuk belanja kesehatan pada Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp208,9 miliar. Hal ini seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah di regional Sulawesi sebesar 1.914 kasus. Realisasi anggaran belanja kesehatan mencapai Rp146,9 miliar (70%).

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Hasil realokasi dan refocussing belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada regional Maluku-Papua mencapai Rp2.333,8 miliar dan realisasi sebesar Rp1.360 miliar (58%). Alokasi tertinggi di Provinsi Papua mencapai Rp1.073,2 miliar dan realisasi sebesar Rp592,6 miliar (55%). Di sisi lain, jumlah kasus COVID-19 secara

kumulatif di Provinsi Papua per 30 Desember 2020 mencapai 13.161 kasus atau tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Maluku-Papua.

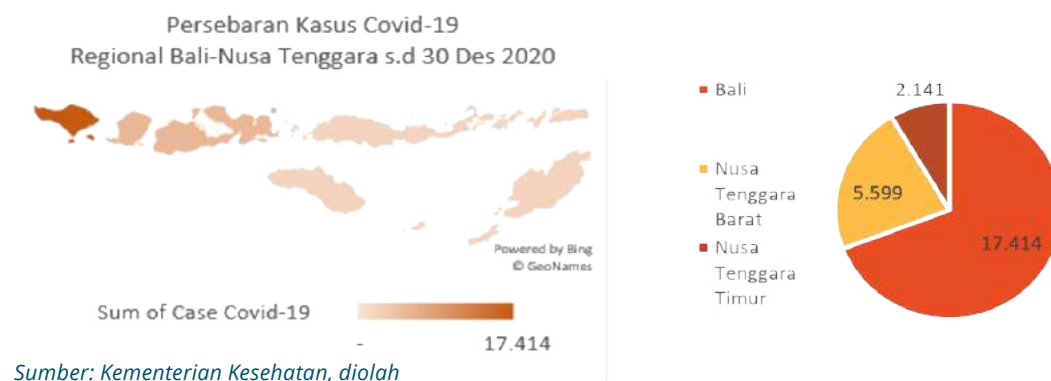
Alokasi terendah untuk belanja kesehatan pada Provinsi Maluku Utara yang mencapai Rp359,4 miliar. Hal ini seiring dengan jumlah kasus COVID-19 yang terendah di regional Maluku-Papua sebesar 2.760 kasus. Realisasi anggaran belanja kesehatan mencapai Rp270,8 miliar (75%).

2.VII. KENDALA DAN PERMASALAHAN BELANJA KESEHATAN

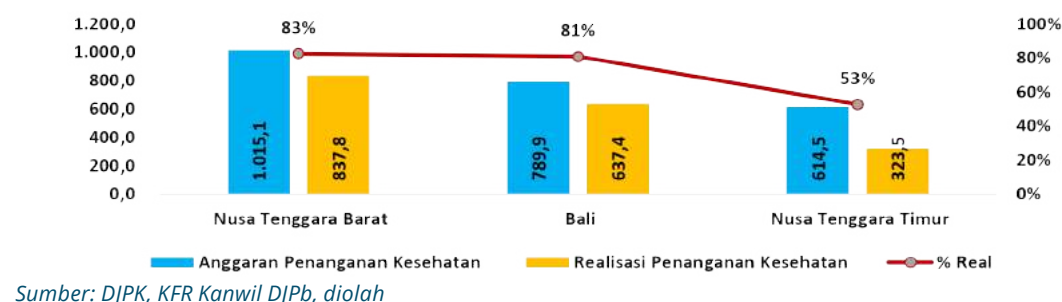
Dalam pemanfaatan hasil realokasi dan refocussing pada APBD khususnya program PC-PEN belanja kesehatan masih ditemukan beberapa permasalahan maupun kendala di antaranya:

1. Kendala administratif dalam pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang membutuhkan verifikasi berjenjang dan ketidaklengkapan dokumen pencairan menyebabkan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan.
2. Keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan untuk menangani COVID-19 dan keterbatasan jumlah

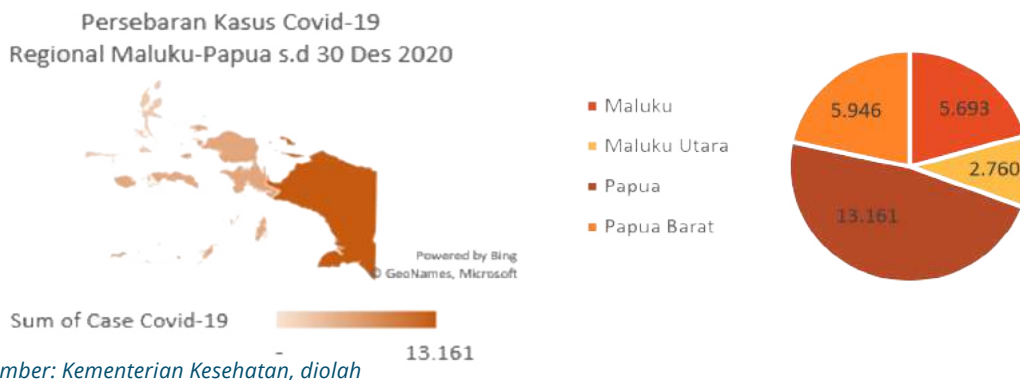
GAMBAR 133. SEBARAN KASUS COVID-19 REGIONAL BALI – NUSA TENGGARA S.D. 30 DESEMBER 2020



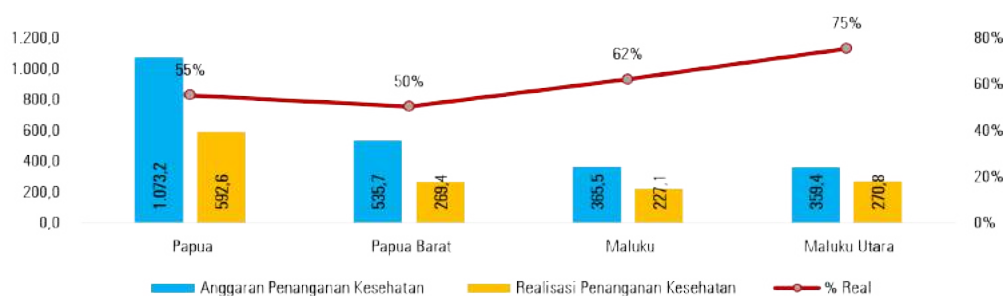
GAMBAR 134. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG KESEHATAN REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA TA 2020 (MILIAR)



GAMBAR 135. SEBARAN COVID-19 REGIONAL MALUKU-PAPUA S.D. 30 DESEMBER 2020



GAMBAR 136. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG KESEHATAN REGIONAL MALUKU-PAPUA TA 2020 (MILIAR)



persediaan alat kesehatan karena demand alat kesehatan maupun obat-obatan lebih besar dibandingkan supply.

3. Jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan penambahan jumlah pasien COVID-19.
4. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk mendukung protocol kesehatan.
5. Kondisi geografis yang kepulauan, tersebar dan luas area menyebabkan sulitnya pendistribusian alat pendukung dalam menangani pandemi COVID-19.

2.VIII. REKOMENDASI BIDANG KESEHATAN

1. Pemerintah dhi, Kemenkes dan Kemenkeu agar berkoordinasi dengan menetapkan peraturan simplifikasi pencairan anggaran tenaga kesehatan dengan tetap mematuhi tata kelola yang efisien, efektif dan akuntabel.
2. Penguatan faskes tingkat I yaitu puskesmas di tingkat Kecamatan sehingga pasien tidak harus dirujuk ke rumah sakit. Selain itu, pelaksanaan

Work from Home bagi pegawai pemerintah dan swasta sehingga dapat meminimalisir persebaran COVID-19.

3. Memanfaatkan potensi mahasiswa bidang kedokteran untuk ikut aktif dalam penanganan COVID-19 serta menyediakan faskes/peralatan kesehatan untuk daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.
4. Sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi agar masyarakat dapat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, selain itu penegakan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan tersebut.
5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait untuk penyaluran alat-alat kesehatan di daerah yang sulit dijangkau.

3. BIDANG PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, alokasi refocussing di bidang

penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) antara lain pemberian hibah/bansos berupa uang dan/barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada:

1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19.
2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan COVID-19.
3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

3.VIII.A. REGIONAL SUMATERA

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan COVID-19 pada regional Sumatera mencapai Rp2.267,1 miliar dan realisasi sebesar Rp1.049 miliar (46%). Terdapat 23 daerah yang tidak mengalokasikan JPS di regional Sumatera terdiri dari 3 di Aceh, 9 di Sumut, 4 di Sumbar, 2 di Riau, 1 di Jambi, 3 di Sumsel dan 1 di Kepulauan Riau.

Alokasi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan

mencapai Rp474,7 miliar dan realisasi sebesar Rp163,5 miliar (34%). Alokasi terendah untuk belanja Jaring Pengaman Sosial pada Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai Rp89,5 miliar dan realisasi Rp61,5 miliar (69%).

3.VIII.B. REGIONAL JAWA

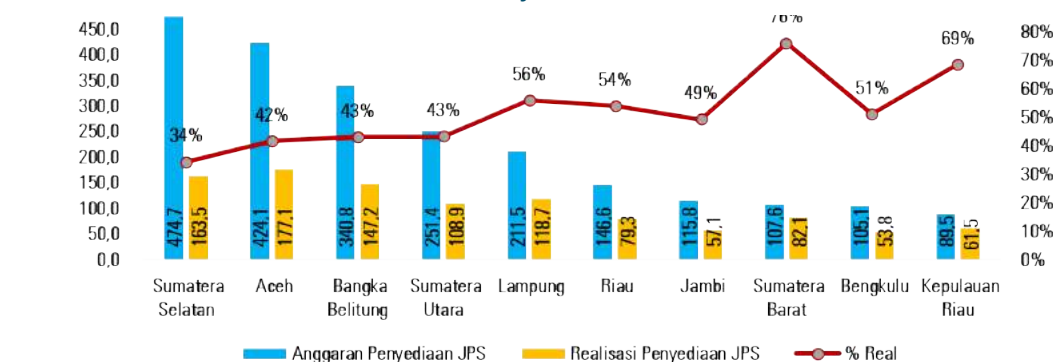
Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan COVID-19 pada regional Jawa mencapai Rp3.961,8 miliar dan realisasi sebesar Rp2.150 miliar (54%). Terdapat 12 daerah yang tidak mengalokasikan JPS di regional Jawa yang terdiri 1 kabupaten di Jabar, 3 di Jateng dan 8 di Jatim.

Alokasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp1.339,4 miliar dan realisasi sebesar Rp929,4 miliar (69%). Alokasi terendah untuk belanja Jaring Pengaman Sosial pada Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai Rp286,8 miliar dan realisasi Rp248,4 miliar (87%).

3.VIII.C. REGIONAL KALIMANTAN

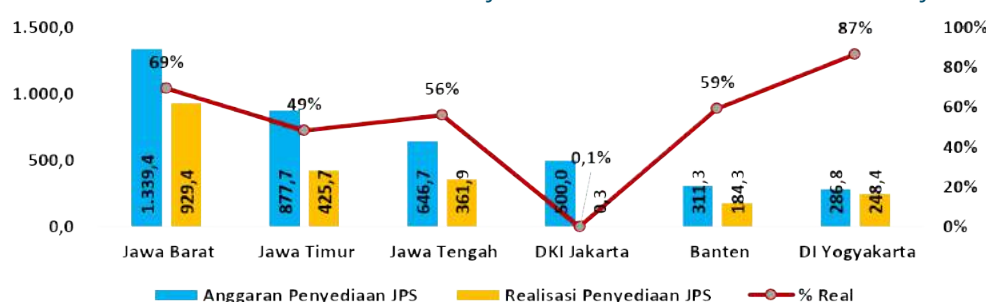
Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan COVID-19 pada regional Kalimantan mencapai Rp984,7 miliar dan realisasi sebesar Rp157,8 miliar

GAMBAR 137. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL REGIONAL SUMATERA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 138. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL REGIONAL JAWA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

(52%). Terdapat 6 daerah tidak mengalokasikan anggaran JPS yang terdiri atas 2 di Kalteng, 2 di Kalsel dan 2 di Kaltim.

Alokasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp286,2 miliar dan realisasi sebesar Rp157,8 miliar (55%). Alokasi terendah untuk belanja Jaring Pengaman Sosial pada Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai Rp101,3 miliar dan realisasi Rp74,8 miliar (74%).

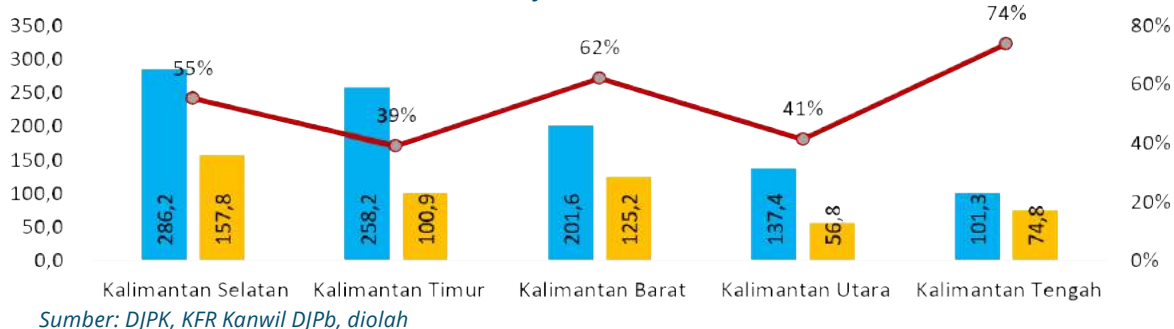
3.VIII.D. REGIONAL SULAWESI

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan COVID-19 pada regional Sulawesi mencapai Rp841,8 miliar dan realisasi sebesar Rp510,3 miliar (63%). Terdapat 4 daerah tidak mengalokasikan anggaran JPS yang terdiri atas 1 di Sult, di Sulsel, 1 di Sulteng dan 1 di Gorontalo.

Alokasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp222,1 miliar dan realisasi sebesar Rp150,9 miliar (68%). Alokasi terendah untuk belanja Jaring Pengaman Sosial pada Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp46,6 miliar dan realisasi Rp44,2 miliar (95%).

3.VIII.E. REGIONAL BALI-NUSA TENGGERA

GAMBAR 139. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL REGIONAL KALIMANTAN TA 2020 (MILIAR)



Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan COVID-19 pada regional Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp910,4 miliar dan realisasi sebesar Rp609,8 miliar (67%). Terdapat 8 daerah tidak mengalokasikan anggaran JPS yang terdiri atas 2 di Bali, 3 di NTB dan 3 di NTT.

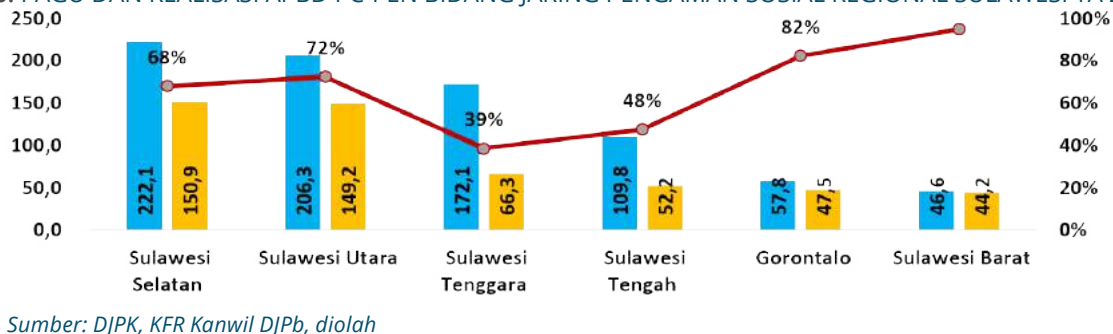
Alokasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp461,5 miliar dan realisasi sebesar Rp372 miliar (81%). Alokasi terendah untuk belanja Jaring Pengaman Sosial pada Provinsi Bali yang mencapai Rp182,8 miliar dan realisasi Rp137,6 miliar (75%).

3.VIII.F. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk penanganan COVID-19 pada regional Maluku-Papua mencapai Rp725,1 miliar dan realisasi sebesar Rp316,7 miliar (44%). Terdapat 14 daerah tidak mengalokasikan anggaran JPS yang terdiri atas 1 di Maluku, 8 di Papua, 2 di Maluku Utara, dan 3 di Papua Barat.

Alokasi tertinggi di Provinsi Papua Barat mencapai Rp282,9 miliar dan realisasi sebesar Rp123 miliar (43%). Alokasi terendah untuk belanja Jaring Pengaman Sosial pada Provinsi Maluku yang mencapai Rp78 miliar dan realisasi Rp35 miliar (45%).

GAMBAR 140. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL REGIONAL SULAWESI TA 2020 (MILIAR)

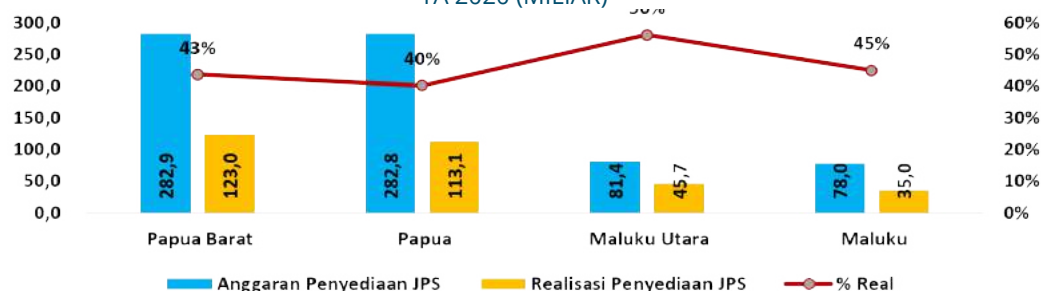


GAMBAR 141. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 142. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL REGIONAL MALUKU-PAPUA TENGGARA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

3.VIII.G. KENDALADAN PERMASALAHAN BELANJA JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)

Dalam pemanfaatan hasil realokasi dan refocussing pada APBD khususnya program PC-PEN belanja jaring pengaman sosial masih ditemukan beberapa permasalahan maupun kendala di antaranya:

1. Keterbatasan anggaran menyebabkan bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan secara terus menerus selama Pandemi COVID-19.
2. Permasalahan dalam pendataan masyarakat terdampak COVID-19 yang berhak mendapatkan bantuan menyebabkan adanya masyarakat terdampak yang tidak mendapatkan bantuan.
3. Jenis kegiatan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak dijabarkan secara rinci pada laporan progress PC-PEN yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima manfaat bantuan sosial yang masih belum update.
5. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan

informasi dalam penyaluran Bantuan Sosial.

3.VIII.H. REKOMENDASI BIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL

1. Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan APBD untuk kegiatan yang strategis dan berdampak langsung ke masyarakat selain itu dilakukan penghematan pada kegiatan yang kurang prioritas sehingga hasil optimalisasi maupun penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk alokasi bantuan sosial.
2. Peningkatan verifikasi dan validasi penerima bansos dilakukan secara optimal dan berkala dengan melibatkan aparat sampai level terkecil (RT/RW). Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar optimalkan DTKS sebagai input data dalam penyaluran bansos sehingga tidak terjadi duplikasi penyaluran.
3. Pemda agar melakukan perincian target maupun capaian output penanganan COVID-19 dalam rangka akuntabilitas.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk verifikasi dan validasi serta penyaluran bantuan sosial dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten..

4. BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, alokasi refocussing di bidang penanganan dampak ekonomi digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan menekan dampak panic buying.
2. Pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan serta perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.
4. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

4.I. REGIONAL SUMATERA

Hasil realokasi dan refocussing belanja

Alokasi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp1.142,2 miliar dan realisasi sebesar Rp715,1 miliar (63%). Alokasi terendah untuk belanja bidang penanganan dampak ekonomi pada Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp281,7 miliar dan realisasi Rp146,2 miliar (52%).

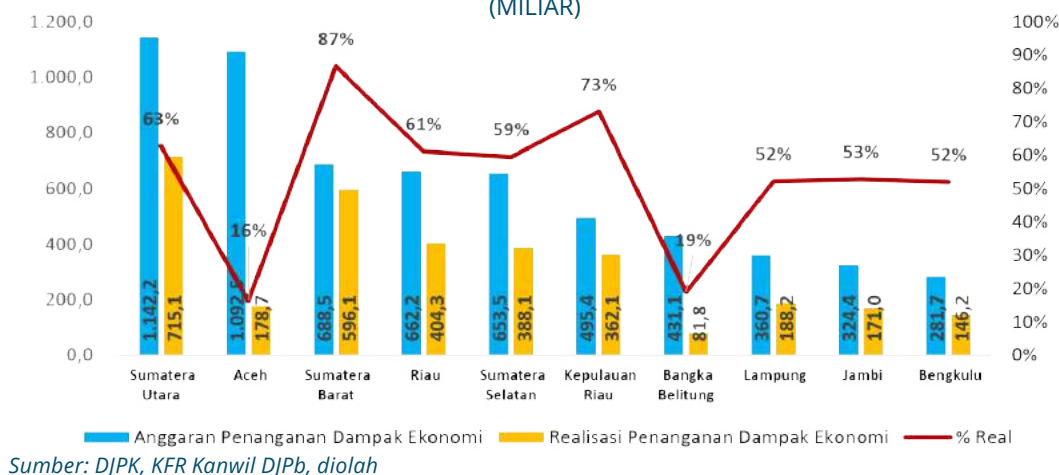
4.II. REGIONAL JAWA

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang penanganan dampak ekonomi untuk penanganan COVID-19 pada regional Jawa mencapai Rp15.078,1 miliar dan realisasi sebesar Rp11.562,7 miliar (77%). Terdapat 2 daerah tidak mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi yang terdiri atas 1 di DI Yogyakarta dan 1 di Jawa Timur. Alokasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp5.498,4 miliar dan realisasi sebesar Rp3.692,5 miliar (67%). Alokasi terendah untuk belanja bidang penanganan dampak ekonomi pada Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai Rp137 miliar dan realisasi Rp111,9 miliar (82%).

4.III. REGIONAL KALIMANTAN

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang penanganan dampak ekonomi untuk penanganan

GAMBAR 143. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI REGIONAL SUMATERA TA 2020 (MILIAR)

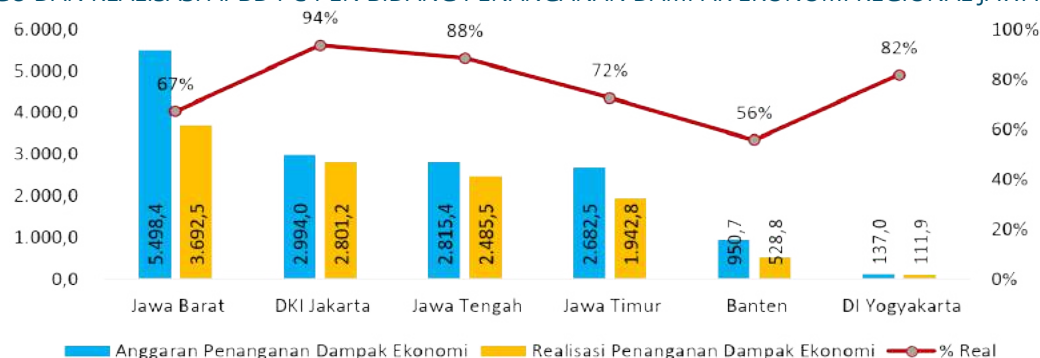


bidang penanganan dampak ekonomi untuk penanganan COVID-19 pada regional Sumatera mencapai Rp6.132,2 miliar dan realisasi sebesar Rp3.231,6 miliar (53%). Terdapat 3 daerah tidak mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi yang terdiri atas 1 di Aceh, 1 di Sumbar, dan 1 di Sumsel.

COVID-19 pada regional Kalimantan mencapai Rp1.598,3 miliar dan realisasi sebesar Rp823 miliar (51%). Seluruh daerah di Kalimantan mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi di APBD.

Alokasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp709,7 miliar dan realisasi sebesar

GAMBAR 144. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI REGIONAL JAWA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

Rp302,4 miliar (43%). Alokasi terendah untuk belanja bidang penanganan dampak ekonomi pada Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai Rp101,6 miliar dan realisasi Rp32,3 miliar (32%).

4.IV. REGIONAL SULAWESI

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang penanganan dampak ekonomi untuk penanganan COVID-19 pada regional Sulawesi mencapai Rp1.831,4 miliar dan realisasi sebesar Rp1.164 miliar (64%). Terdapat 4 daerah yang tidak mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi di APBD yang terdiri atas 2 di Sulawesi Utara, 1 di Sulawesi Selatan dan 1 di Sulawesi Tenggara.

Alokasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara mencapai Rp636,1 miliar dan realisasi sebesar Rp354 miliar (56%). Alokasi terendah untuk belanja bidang penanganan dampak ekonomi pada Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp79,9 miliar dan realisasi Rp77,2 miliar (97%).

4.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang penanganan dampak ekonomi untuk penanganan COVID-19 pada regional Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp1.134,7 miliar dan realisasi sebesar Rp906,1 miliar (80%). Di regional Bali-Nusa Tenggara terdapat 3 daerah tidak mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi yang tersebar di Bali, NTT dan NTB.

Alokasi tertinggi di Provinsi Bali mencapai Rp447,7 miliar dan realisasi sebesar Rp349,6 miliar (78%). Alokasi terendah untuk belanja bidang penanganan dampak ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang mencapai Rp340,8 miliar dan realisasi Rp332,3 miliar (97%).

4.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Hasil realokasi dan refocussing belanja bidang penanganan dampak ekonomi untuk penanganan COVID-19 pada regional Maluku-Papua mencapai Rp1.220,3 miliar dan realisasi sebesar Rp554,3 miliar (45%). Terdapat 4 daerah yang tidak mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi yang terdiri atas 3 di Papua dan 1 Maluku Utara.

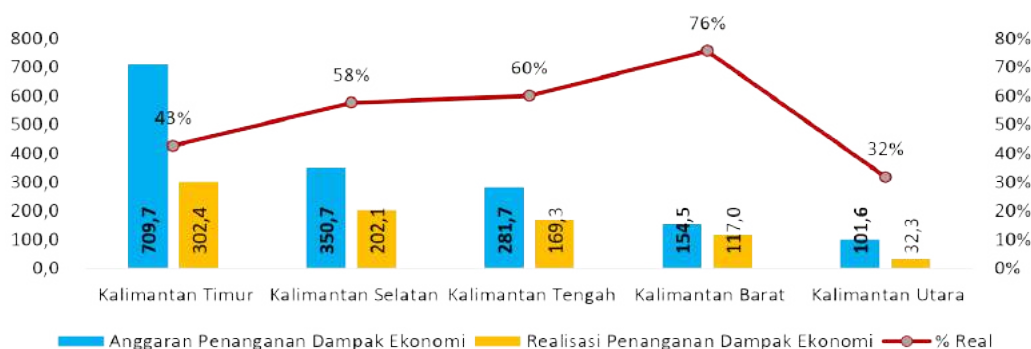
Alokasi tertinggi di Provinsi Papua mencapai Rp575,5 miliar dan realisasi sebesar Rp237,8 miliar (41%). Alokasi terendah untuk belanja bidang penanganan dampak ekonomi pada Provinsi Maluku Utara yang mencapai Rp159,7 miliar dan realisasi Rp62,5 miliar (45%).

4.VII. KENDALA DAN PERMASALAHAN BELANJA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Dalam pemanfaatan hasil realokasi dan refocussing pada APBD khususnya program PC-PEN belanja penanganan dampak ekonomi masih ditemukan beberapa permasalahan maupun kendala di antaranya:

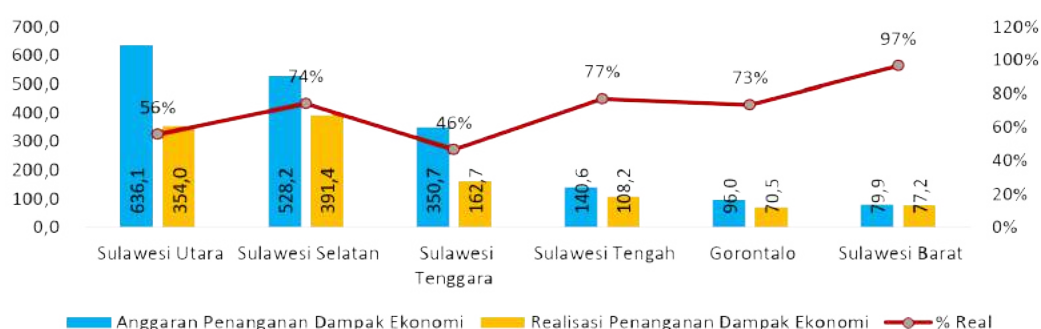
1. Kendala dengan ketersediaan data yang update terkait data detail *by name by address* (BNBA) pelaku usaha UMKM.
2. Keengganan untuk mengajukan permohonan mendapatkan program insentif bagi dunia usaha. Keengganan ini salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran para pelaku usaha terkait verifikasi terhadap data usahanya.

GAMBAR 145. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI REGIONAL KALIMANTAN TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 146. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI REGIONAL SULAWESI TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

3. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada sulitnya UMKM mendapatkan bahan baku dan terhambatnya distribusi logistik. Selain itu, PSBB juga berdampak pada penurunan pendapatan pelaku UMKM karena anjaknya permintaan dari konsumen.

4. Pelaku usaha belum secara penuh memanfaatkan teknologi untuk mendukung usahanya dan lokasi pelaku usaha yang tersebar di kabupaten/kota menuntut kesiapan SDM dan ketersediaan dukungan anggaran dari Pemerintah agar para pelaku usaha tetap dapat survive di masa pandemi COVID-19.

5. Pemda tidak merinci target dan realisasi output menjadi data yang dapat diukur. Program PC PEN menjadi sulit terukur dampaknya terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah.

4.VIII. REKOMENDASI BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

1. Updating data detail pelaku usaha UMKM oleh Dinas terkait. Updating data tersebut

dapat memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini sehingga pendataan tersebut lebih efektif dan efisien.

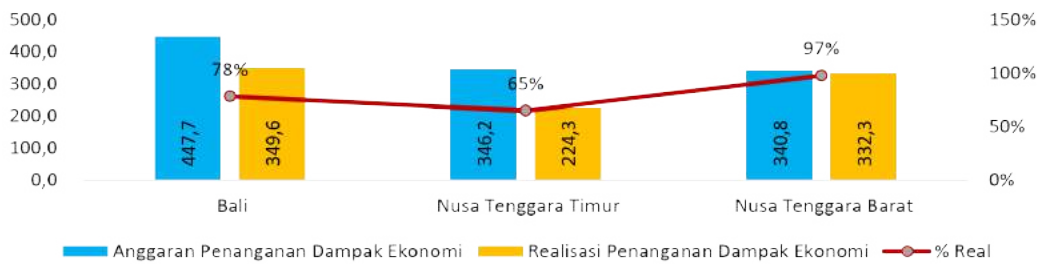
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi sehingga masyarakat lebih memahami bantuan terkait insentif usaha di masa pandemi.

3. Pendampingan dan pemberian modal ataupun pembebasan/pengurangan pajak daerah di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Instruksi Mendagri No.1 tahun 2020.

4. Sosialisasi kepada pelaku usaha dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi sehingga UMKM dapat tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19.

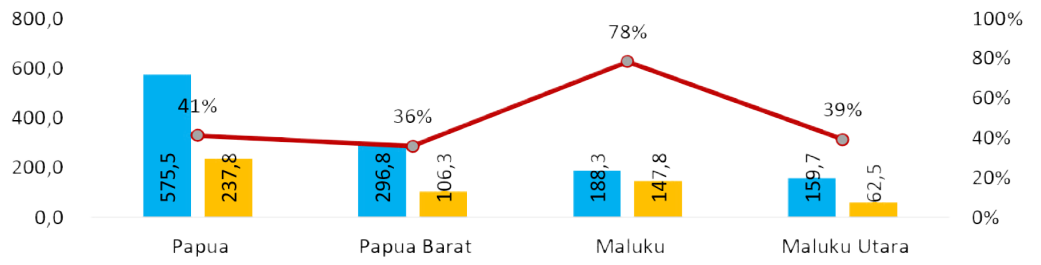
5. Pemerintah Daerah agar melakukan perincian target maupun realisasi capaian output PC-PEN hasil realokasi dan refocussing APBD sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi.

GAMBAR 147. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 148. PAGU DAN REALISASI APBD PC-PEN BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI REGIONAL MALUKU-PAPUA TA 2020 (MILIAR)



Sumber: DJPK, KFR Kanwil DJPb, diolah

HALAMAN INI SENGAJA
DIKOSONGKAN



BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan umum dan analisis yang telah diulas pada Bab sebelumnya, kondisi fiskal regional 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahun 2020 menjadi tahun yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Upaya pemerintah baik pusat, maupun daerah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD harus tertunda. Hal ini terjadi karena Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengalihkan fokus perhatian untuk menangani berbagai bentuk dampak dari pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan besar pada tahun 2020.

2. Pandemi COVID-19 telah memberikan guncangan yang hebat dan dampak yang masif terhadap perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan Indonesia mengalami perlambatan perekonomian. Perlambatan perekonomian dirasakan hampir di seluruh regional, terkecuali regional Maluku-Papua yang mengalami pertumbuhan positif. Regional Bali-Nusra menjadi regional yang mengalami kontraksi ekonomi paling dalam sebagai akibat terbatasnya mobilitas manusia sehingga jumlah wisatawan turun drastis dan melumpuhkan aktivitas sektor pariwisata di Regional Bali-Nusra. Terlepas dari hal tersebut, perekonomian Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi di Regional Jawa yang mengindikasikan upaya untuk pemerataan perekonomian nasional perlu untuk dilakukan secara lebih intensif. Selain itu, perlambatan perekonomian juga mengakibatkan penurunan PDB sehingga Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income country*).

3. Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Nasional. Namun demikian, pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat pandemi COVID-19. Di lain pihak, sektor konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya yang mengalami pertumbuhan positif sejalan optimalisasi peran dalam rangka memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional. Selain itu tingkat inflasi mencapai nilai terendahnya sepanjang sejarah. Rendahnya inflasi saat ini lebih mencerminkan kondisi perekonomian nasional

yang masih lesu di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.

4. Pelemahan berbagai indikator perekonomian juga diikuti oleh pelemahan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. Tercatat hanya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang tercermin dalam IPM, mengalami peningkatan yang sangat minim. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka dan kemiskinan bertambah secara signifikan seiring dengan aktivitas usaha yang terpaksa harus melakukan efisiensi bahkan mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena sektor perdagangan yang merosot, aktivitas usaha terpuruk, dan merosotnya harga komoditas ditambah dengan bergejolaknya sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan yang mencerminkan kondisi kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.

5. APBN tahun 2020 berperan menjadi instrumen dalam pelaksanaan kebijakan fiskal ekspansif yang bersifat countercyclical dan ditujukan sebagai jaringan pengaman sosial (*social safety net*) dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. Peran tersebut diimplementasikan melalui optimalisasi realisasi belanja APBN pada pos belanja barang, sosial, dan lain-lain sehingga secara keseluruhan menyebabkan defisit anggaran yang semakin lebar, tetapi masih dalam batas toleransi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Peningkatan realisasi belanja APBN 2020 merupakan manifestasi dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional serta pelaksanaan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, dan menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha.

6. APBD tahun 2020 menjadi cerminan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka mendukung program PC-PEN Pemerintah Pusat, telah ditetapkan PC-PEN untuk pelaksanaan APBD dengan berfokus pada program bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan penanganan COVID-19. Upaya

tersebut terlihat dari kenaikan tajam pos belanja tidak terduga pada APBD konsolidasian. Namun demikian, secara keseluruhan proporsi dan kinerja APBD tahun 2020 masih belum ideal. Proporsi APBD masih didominasi oleh belanja pegawai yang kurang memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Idealnya, proporsi belanja pegawai tersebut dikurangi dan dialihkan ke belanja modal yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian daerah di masa yang akan datang.

7. Dalam rangka menjalankan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah menetapkan penanganan pandemi COVID-19 sebagai prioritas utama dalam APBD. Upaya tersebut tercermin dari kenaikan tajam pos belanja tidak terduga pada APBD konsolidasian. Akan tetapi terlepas dari hal tersebut, proporsi realisasi APBD tahun 2020 masih belum ideal. Belanja pegawai masih menjadi pos yang memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan pos belanja yang lain. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus segera menyusun formulasi kebijakan yang mampu mewujudkan kolaborasi kebijakan Pemerintah Pusat. Selain itu, formulasi kebijakan juga harus mampu mengakselerasi pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah di masa yang akan datang.

8. Setiap regional memiliki sektor potensial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik daerah dan geografis serta kultur masyarakat dari masing-masing regional. Adapun sektor potensial dari masing-masing regional yaitu 1) Sektor pariwisata, perdagangan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, pertanian, kehutanan, dan perkebunan, serta jasa keuangan dan asuransi di Regional Sumatera; 2) Sektor informasi dan komunikasi, real estate, dan jasa kesehatan di Regional Jawa; 3) Sektor industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan perdagangan besar & eceran : reparasi mobil dan sepeda motor di Regional Kalimantan; 4) Sektor industri pengolahan dan pariwisata di Regional Sulawesi; 5) Sektor informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan; 6) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta perkebunan di Regional Maluku-Papua.

2. REKOMENDASI

APBN dan APBD merupakan instrumen yang sangat penting sehingga perlu dijaga agar tetap sustainable, sehat, dan kredibel. Kebijakan fiskal ekspansif yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat menentukan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat waktu, sasaran, dan kualitas. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting dan menentukan.

Geliat perekonomian Indonesia mulai terasa sejak triwulan III 2020 yang terlihat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menjaga momentum ini dengan penuh kehati-hatian mengingat kondisi saat ini masih diliputi ketidakpastian. Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perumusan kebijakan harus ditingkatkan dan dieksekusi dengan baik. Pemerintah Pusat dan Daerah juga harus senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait tata kelola keuangan negara dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan fiskal juga harus mampu mendukung potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing regional. Mengingat potensi yang dimiliki oleh masing-masing regional berbeda sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing regional, sehingga formulasi dan implementasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah sangat menentukan. Melihat potensi ekonomi daerah dan juga capaian kinerja perekonomian, kesejahteraan, dan fiskal tahun 2020 di masing-masing regional sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai berikut :

a. Regional Sumatera

Dalam rangka mendukung sektor potensial Regional Sumatera yaitu sektor pariwisata dan perdagangan, pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai. Lokasi strategis Regional Sumatera yang memiliki kepadatan lalu lintas laut yang tinggi harus

didukung dengan pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, dan pelabuhan. Pembangunan tersebut akan menghasilkan konektivitas yang baik di Regional Sumatera sehingga dapat mendukung distribusi hasil produksi pertanian, pertambangan, dan penggalian, serta memperluas aksesibilitas sektor perdagangan, sehingga seluruh wilayah di Regional Sumatera akan merasakan dampak lokasi strategis Regional Sumatera secara lebih merata. Masih tingginya tingkat kemiskinan pada beberapa provinsi di regional ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang perlu segera dipecahkan. Upaya pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan program bantuan sosial yang lebih meluas dan tepat sasaran. Selain itu, momentum peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan KUR harus terus dijaga dan lebih memperluas target pemanfaatan KUR dengan memprioritaskan para petani dan nelayan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan para petani dan nelayan secara lebih luas. Selain itu, pemerintah juga dapat memperluas cakupan penerima bantuan benih dan bantuan peralatan bagi para nelayan.

b. Regional Jawa

Meskipun mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, Regional Jawa masih menjadi pusat roda perekonomian Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka penyelarasan program-program yang mampu memberikan jalan yang mampu mengakselerasi perkembangan sektor potensial unggulan dan potensial Regional Jawa. Momentum bonus demografi yang sedang dialami oleh Regional Jawa harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga dapat semakin meningkatkan perkembangan perekonomian Regional Jawa. Keran aliran dana investasi perlu dibuka semakin lebar guna mendukung momentum yang sedang dialami Regional Jawa, melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif seperti simplifikasi atau kemudahan perizinan investasi dan jaminan keamanan bagi para investor.

c. Regional Kalimantan

Pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penggalian potensi Regional Kalimantan yang mengedepankan

kelestarian lingkungan. Meskipun sudah berada di bawah tingkat ketimpangan pendapatan nasional, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk terus mengurangi tingkat ketimpangan di Regional Kalimantan agar menjadi semakin lebih baik lagi. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah harus dilakukan sehingga tingkat kesenjangan dapat berkurang. Optimalisasi potensi hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit, pengembangan food estate dalam rangka mendukung ketahanan pangan, dan penggalian potensi kehutanan yang senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan membuka akses investasi bagi pihak swasta, khususnya kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Upaya tersebut dapat didukung oleh regulasi yang tegas, jelas, dan yang memudahkan pemberian izin usaha bagi para pelaku usaha agar menjalankan usaha dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan. Sebagai Regional yang besar, tingkat pemanfaatan program KUR masih sangat minim dan kalah dibandingkan regional lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi pemanfaatan KUR untuk mendorong pemanfaatan program oleh para pelaku usaha kecil dan menengah di regional ini. Selanjutnya, pemerataan pelayanan dasar juga harus terus dilakukan karena masih terdapat provinsi yang tertinggal dibandingkan provinsi lain di Regional Kalimantan.

d. Regional Sulawesi

Lokasi strategis Regional Sulawesi sebagai gerbang masuk wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus didukung dan dimanfaatkan oleh pemerintah seoptimal mungkin. Dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu poin penting bagi perkembangan di wilayah ini. Infrastruktur yang mendukung dapat menarik investasi dari berbagai pihak, khususnya dari pihak swasta mengingat Regional Sulawesi memiliki potensi yang tinggi pada sektor industri pengolahan. Selain itu, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi udara dapat mendukung kemajuan sektor pariwisata dengan kemudahan akses terhadap destinasi wisata di Regional Sulawesi. Dengan begitu, aktivitas perekonomian di Regional Sulawesi dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang tinggi pada mayoritas provinsi di Regional Sulawesi. Pemerintah juga

dapat memanfaatkan berbagai program dalam implementasinya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM sebagai pelaku usaha, dan Dana Desa untuk mendorong pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.

e. Regional Bali-Nusa Tenggara

Regional Bali-Nusra menjadi regional yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi paling dalam dibandingkan dengan regional lainnya sebagai akibat dari pembatasan mobilitas manusia selama masa pandemi COVID-19. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi Regional Bali-Nusra. Tingkat ketergantungan regional Bali-Nusra kepada sektor pariwisata cukup tinggi, sehingga pemerintah perlu menggali sektor potensial lain yang dapat mendorong perekonomian di regional ini. Namun demikian, bukan berarti sektor pariwisata harus ditinggalkan, pemerintah perlu tetap mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur sehingga status Bali-Nusra sebagai destinasi utama bagi para wisatawan domestik dan mancanegara dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan intra wilayah. Selain itu, program dan kegiatan dalam APBN dan APBD harus diarahkan untuk mendukung geliat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

f. Regional Maluku-Papua

Pemerintah perlu untuk terus mendorong peningkatan kemandirian Regional Maluku-Papua. Upaya pemerintah dapat dimulai dengan upaya untuk mengentaskan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi serta meningkatkan indeks IPM yang masih rendah melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar hidup lainnya seperti penyediaan sumber daya penunjang berupa pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar. Selain itu, respon fiskal pemerintah perlu diarahkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Pembangunan sarana transportasi baik darat, laut, maupun udara dapat meningkatkan aksesibilitas

terhadap daerah-daerah yang selama ini sulit untuk dijangkau. Dengan begitu alur distribusi produk yang dihasilkan serta kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan lancar dan biaya yang dikeluarkan dapat ditekan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat mendukung aksesibilitas terhadap objek-objek wisata yang ada di regional ini, sehingga potensi setor pariwisata yang ada di regional Maluku-Papua dapat berkembang dengan lebih baik. Formulasi alokasi Dana Desa wilayah Maluku-Papua, khususnya Papua dan Papua Barat, perlu mendapat perhatian khusus terutama pada besaran persentase alokasi afirmasi, mengingat tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan masih tertinggalnya infrastruktur desa-desa di Papua. Program-program lainnya seperti PKH dan Bantuan Langsung baik Tunai, maupun non Tunai dapat diprioritaskan dalam seiring tingginya tingkat kemiskinan di Regional Maluku-Papua.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 2018-2020

NAMA PROVINSI		REGIONAL	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB		
			2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	4,61%	4,15%	-0.37%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	5,18%	5,22%	-1.07%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	5,16%	5,05%	-1.60%
4	Provinsi Riau	Sumatera	2,37%	2,84%	-1.12%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	4,58%	4,89%	-3.80%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	4,74%	4,40%	-0.46%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	6,04%	5,71%	-0.11%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	5,25%	5,27%	-1.67%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	4,99%	4,96%	-0.02%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,46%	3,32%	-2.30%
11	Provinsi Banten	Jawa	5,82%	5,53%	-3.38%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	6,17%	5,89%	-2.36%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	5,66%	5,07%	-2.44%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	5,31%	5,41%	-2.65%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	6,20%	6,60%	-2.69%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	5,50%	5,52%	-2.39%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	5,07%	5,00%	-1.82%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	5,65%	6,16%	-1.40%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	5,12%	4,08%	-1.81%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	2,67%	4,77%	-2.85%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	6,05%	6,91%	-1.11%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	6,33%	5,63%	-9.31%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	-4,46%	4,01%	-0.64%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5,13%	5,20%	-0.83%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	7,06%	6,92%	-0.70%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	6,25%	5,66%	-2.42%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	6,28%	7,15%	4.86%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	6,42%	6,51%	-0.65%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	6,50%	6,41%	-0.02%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	6,01%	5,66%	-0.99%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	7,92%	6,13%	4.92%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	5,94%	5,57%	-0.92%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	6,25%	2,66%	-0.77%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	7,37%	-15,72%	2.32%
NASIONAL			5,17%	5,02%	-2.02%
1	Regional Sumatera		4,54%	4,57%	-1.19%
2	Regional Jawa		5,72%	5,52%	-2.51%
3	Regional Kalimantan		3,91%	4,99%	-2.27%
4	Regional Sulawesi		6,65%	6,65%	0.23%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		2,68%	5,07%	-5.01%
6	Regional Maluku-Papua		6,99%	-7,40%	1.44%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan LPI BI 2020

LAMPIRAN II NOMINAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2018-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Nominal PDRB (Juta Rupiah)					
			2018		2019		2020	
			Nominal	Kontri-busi	Nominal	Kontri-busi	Nominal	Kontri-busi
1	Provinsi Aceh	Sumatera	155.911.115,34	1,04%	164.210.636,34	1,02%	166.377.300,74	1,05%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	741.751.634,36	4,95%	801.733.339,98	4,99%	811.282.839,90	5,14%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	230.571.985,59	1,54%	246.422.724,79	1,53%	242.118.758,01	1,53%
4	Provinsi Riau	Sumatera	755.435.017,01	5,04%	765.198.298,61	4,76%	729.166.642,82	4,62%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	249.075.503,75	1,66%	268.079.987,44	1,67%	254.253.285,08	1,61%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	208.366.820,85	1,39%	217.711.779,47	1,35%	206.846.285,59	1,31%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	419.723.506,88	2,80%	455.232.776,78	2,83%	458.430.304,74	2,90%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	333.670.882,90	2,23%	360.663.624,81	2,24%	354.631.688,11	2,25%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	66.412.895,04	0,44%	72.143.372,88	0,45%	73.336.576,79	0,46%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	73.121.005,38	0,49%	75.829.323,69	0,47%	75.533.923,05	0,48%
11	Provinsi Banten	Jawa	615.107.750,43	4,11%	664.963.401,57	4,14%	626.437.444,58	3,97%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	2.599.326.206,69	17,35%	2.840.827.863,08	17,67%	2.772.381.118,28	17,56%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	1.962.231.581,05	13,10%	2.125.157.989,07	13,22%	2.088.038.735,09	13,23%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	1.268.454.783,96	8,47%	1.362.457.380,57	8,47%	1.348.600.397,72	8,54%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	129.874.337,94	0,87%	141.400.183,08	0,88%	138.388.752,76	0,88%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	2.189.823.643,19	14,62%	2.352.425.220,74	14,63%	2.299.464.873,31	14,57%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	194.198.963,33	1,30%	212.318.428,46	1,32%	214.001.753,68	1,36%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	138.718.387,22	0,93%	150.283.195,64	0,93%	152.190.908,25	0,96%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	171.690.510,92	1,15%	180.737.964,03	1,12%	179.151.113,73	1,13%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	636.454.482,60	4,25%	653.677.102,66	4,07%	607.320.779,28	3,85%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	86.048.886,79	0,57%	97.458.405,05	0,61%	100.544.335,57	0,64%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	233.791.856,28	1,56%	252.597.504,04	1,57%	224.214.110,14	1,42%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	123.965.938,60	0,83%	132.674.150,90	0,83%	133.521.764,68	0,85%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	99.094.457,65	0,66%	106.892.840,68	0,66%	106.506.130,02	0,67%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	461.719.487,85	3,08%	504.746.873,15	3,14%	504.478.540,39	3,20%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	43.454.250,67	0,29%	46.360.393,14	0,29%	45.908.787,03	0,29%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	150.032.469,55	1,00%	166.402.665,13	1,03%	197.440.782,70	1,25%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	118.090.929,09	0,79%	129.260.128,71	0,80%	130.184.074,75	0,82%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	37.734.313,09	0,25%	41.150.593,35	0,26%	41.725.902,64	0,26%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	119.547.702,97	0,80%	130.201.361,04	0,81%	132.299.413,87	0,84%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	36.497.642,54	0,24%	39.715.966,50	0,25%	42.142.239,37	0,27%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	43.066.430,77	0,29%	46.257.180,82	0,29%	46.263.797,67	0,29%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	79.642.922,20	0,53%	84.347.692,51	0,52%	83.566.219,55	0,53%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	210.755.725,55	1,41%	189.716.395,47	1,18%	198.928.895,01	1,26%
NASIONAL			14.983.364.028,03	100,00%	16.079.256.744,18	100,00%	15.785.678.474,94	100,00%
1	Regional Sumatera		3.234.040.367,10	21,58%	3.427.225.864,79	21,31%	3.371.977.604,83	21,36%
2	Regional Jawa		8.764.818.303,26	58,50%	9.487.232.038,11	59,00%	9.273.311.321,74	58,75%
3	Regional Kalimantan		1.227.111.230,86	8,19%	1.294.475.095,84	8,05%	1.253.208.890,51	7,94%
4	Regional Sulawesi		930.579.153,22	6,21%	1.018.122.014,52	6,33%	1.052.037.501,38	6,66%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		456.852.252,53	3,05%	492.164.495,62	3,06%	464.242.004,84	2,94%
6	Regional Maluku-Papua		369.962.721,06	2,47%	360.037.235,30	2,24%	370.901.151,60	2,35%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

LAMPIRAN III TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH 2018-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	SUKU BUNGA ^{*)}			INFLASI ^{**)}			NILAI TUKAR (Rp) ^{***)}		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	1,84%	1,69%	3,59%	14.481	13.901	14.105
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	2,72%	2,33%	1,96%	14.481	13.901	14.105
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	2,58%	1,67%	2,11%	14.481	13.901	14.105
4	Provinsi Riau	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	2,45%	2,36%	2,42%	14.481	13.901	14.105
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	3,47%	2,03%	1,18%	14.481	13.901	14.105
6	Provinsi Jambi	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	3,34%	0,81%	3,01%	14.481	13.901	14.105
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	2,74%	2,06%	1,55%	14.481	13.901	14.105
8	Provinsi Lampung	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	2,73%	3,35%	2,00%	14.481	13.901	14.105
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	2,35%	2,91%	0,89%	14.481	13.901	14.105
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	6,00%	5,00%	3,75%	3,18%	2,62%	1,08%	14.481	13.901	14.105
11	Provinsi Banten	Jawa	6,00%	5,00%	3,75%	3,42%	3,30%	1,45%	14.481	13.901	14.105
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	6,00%	5,00%	3,75%	3,27%	3,23%	1,59%	14.481	13.901	14.105
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	6,00%	5,00%	3,75%	3,54%	3,21%	2,18%	14.481	13.901	14.105
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	6,00%	5,00%	3,75%	2,82%	3,37%	1,56%	14.481	13.901	14.105
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	6,00%	5,00%	3,75%	2,66%	2,77%	1,40%	14.481	13.901	14.105
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	6,00%	5,00%	3,75%	2,89%	2,12%	1,44%	14.481	13.901	14.105
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	6,00%	5,00%	3,75%	3,99%	2,64%	4,68%	14.481	13.901	14.105
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	6,00%	5,00%	3,75%	4,52%	2,45%	1,03%	14.481	13.901	14.105
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	6,00%	5,00%	3,75%	2,63%	4,01%	1,68%	14.481	13.901	14.105
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	6,00%	5,00%	3,75%	3,24%	1,66%	0,78%	14.481	13.901	14.105
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	6,00%	5,00%	3,75%	5,00%	1,47%	1,32%	14.481	13.901	14.105
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	6,00%	5,00%	3,75%	2,64%	2,40%	0,80%	14.481	13.901	14.105
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	6,00%	5,00%	3,75%	3,31%	1,87%	0,60%	14.481	13.901	14.105
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	6,00%	5,00%	3,75%	3,07%	0,67%	0,61%	14.481	13.901	14.105
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	6,00%	5,00%	3,75%	3,19%	2,35%	2,04%	14.481	13.901	14.105
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	6,00%	5,00%	3,75%	3,13%	2,72%	1,78%	14.481	13.901	14.105
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	6,00%	5,00%	3,75%	6,33%	2,30%	1,62%	14.481	13.901	14.105
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	6,00%	5,00%	3,75%	2,55%	3,22%	1,37%	14.481	13.901	14.105
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	6,00%	5,00%	3,75%	2,68%	2,84%	0,81%	14.481	13.901	14.105
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	6,00%	5,00%	3,75%	3,83%	3,52%	-0,18%	14.481	13.901	14.105
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	6,00%	5,00%	3,75%	4,12%	2,02%	2,13%	14.481	13.901	14.105
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	6,00%	5,00%	3,75%	3,13%	2,08%	0,21%	14.481	13.901	14.105
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	6,00%	5,00%	3,75%	5,21%	1,93%	0,71%	14.481	13.901	14.105
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	6,00%	5,00%	3,75%	1,62%	0,66%	1,64%	14.481	13.901	14.105
NASIONAL			6,00%	5,00%	3,75%	3,13%	2,72%	1,68%	14.481	13.901	14.105

Sumber:

*)BI;

**)BRS masing-masing Provinsi;

***) situs BPS RI data dinamis.

LAMPIRAN IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2018-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	71,19	71,90	71,99
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	71,18	71,74	71,77
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	71,73	72,39	72,38
4	Provinsi Riau	Sumatera	72,44	73,00	72,71
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	74,84	75,48	75,59
6	Provinsi Jambi	Sumatera	70,65	71,26	71,29
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	69,39	70,02	70,01
8	Provinsi Lampung	Sumatera	69,02	69,57	69,69
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	70,64	71,21	71,40
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	70,67	71,30	71,47
11	Provinsi Banten	Jawa	71,95	72,44	72,45
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	80,47	80,76	80,77
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	71,30	72,03	72,09
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	71,12	71,73	71,87
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	79,53	79,99	79,97
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	70,77	71,50	71,71
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	66,98	67,65	67,66
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	70,42	70,91	71,05
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	70,17	70,72	70,91
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	75,83	76,61	76,24
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	70,56	71,15	70,63
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	74,77	75,38	75,50
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	67,30	68,14	68,25
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	64,39	65,23	65,19
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	70,90	71,66	71,93
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	65,10	65,73	66,11
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	68,88	69,50	69,55
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	70,61	71,20	71,45
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	67,71	68,49	68,68
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	72,20	72,99	72,93
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	67,76	68,70	69,49
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	68,87	69,45	68,49
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	63,74	64,70	65,09
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	60,06	60,84	60,44
NASIONAL			71,39	71,92	71,94

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

LAMPIRAN V TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2018-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	TINGKAT KEMISKINAN			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	15,68%	15,01%	15,43%	831.500	809.760	833.910
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	8,94%	8,63%	9,14%	1.291.990	1.260.500	1.356.720
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	6,55%	6,29%	6,56%	353.240	343.090	364.790
4	Provinsi Riau	Sumatera	7,21%	6,90%	7,04%	494.260	483.920	491.220
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	5,83%	5,80%	6,13%	125.360	127.760	142.610
6	Provinsi Jambi	Sumatera	7,85%	7,51%	7,97%	281.470	273.370	288.100
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	12,82%	12,56%	12,98%	1.076.400	1.067.160	1.119.650
8	Provinsi Lampung	Sumatera	13,01%	12,30%	12,76%	1.091.600	1.041.480	1.091.140
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	15,41%	14,91%	15,30%	303.550	298.000	306.000
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,77%	4,50%	4,89%	69.930	67.370	72.050
11	Provinsi Banten	Jawa	5,25%	4,94%	6,63%	668.740	641.420	857.640
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	3,55%	3,42%	4,69%	372.260	362.300	496.840
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	7,25%	6,82%	8,43%	3.539.400	3.375.890	4.188.520
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	11,19%	10,58%	11,84%	3.867.420	3.679.400	4.119.930
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	11,81%	11,44%	12,80%	450.250	440.890	503.140
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	10,85%	10,20%	11,46%	4.292.150	4.056.000	4.585.970
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	7,37%	7,28%	7,24%	369.730	370.470	370.710
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	5,10%	4,81%	5,26%	136.450	131.240	141.780
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	4,65%	4,47%	4,83%	195.010	190.290	206.920
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	6,06%	5,91%	6,64%	222.390	220.910	243.990
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	6,86%	6,49%	7,41%	49.590	48.610	52.700
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	3,91%	3,61%	4,45%	168.340	156.910	196.920
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	14,63%	13,88%	14,23%	735.620	705.680	746.040
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	21,03%	20,62%	21,21%	1.134.110	1.129.460	1.173.530
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	8,87%	8,56%	8,99%	779.640	759.580	800.240
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	11,22%	10,95%	11,50%	152.830	151.870	159.050
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	13,69%	13,18%	13,06%	413.490	404.030	403.740
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	11,32%	11,04%	11,69%	301.850	299.970	317.320
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	15,83%	15,31%	15,59%	188.300	184.710	185.310
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	7,59%	7,51%	7,78%	189.050	188.600	195.850
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	6,62%	6,91%	6,97%	81.930	87.180	87.520
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	17,85%	17,65%	17,99%	317.840	319.510	322.400
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	22,66%	21,51%	21,70%	213.670	207.590	215.220
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	27,43%	26,55%	26,80%	915.220	900.950	912.230
NASIONAL			9,66%	9,22%	10,19%	25.674.580	24.785.870	27.549.700

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

LAMPIRAN VI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI) 2018-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	TINGKAT KETIMPANGAN		
			2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	0,318	0,321	0,319
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	0,311	0,315	0,314
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	0,305	0,307	0,301
4	Provinsi Riau	Sumatera	0,347	0,331	0,321
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	0,339	0,337	0,334
6	Provinsi Jambi	Sumatera	0,335	0,324	0,316
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	0,341	0,339	0,338
8	Provinsi Lampung	Sumatera	0,326	0,331	0,320
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	0,355	0,329	0,323
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	0,272	0,262	0,257
11	Provinsi Banten	Jawa	0,367	0,361	0,365
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	0,390	0,391	0,400
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	0,405	0,398	0,398
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	0,357	0,358	0,359
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	0,422	0,428	0,437
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	0,371	0,364	0,364
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	0,325	0,318	0,325
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	0,344	0,335	0,320
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	0,340	0,334	0,351
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	0,342	0,335	0,335
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	0,304	0,292	0,300
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	0,364	0,370	0,369
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	0,372	0,374	0,386
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	0,359	0,355	0,356
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	0,388	0,391	0,382
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	0,366	0,365	0,356
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	0,317	0,330	0,321
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	0,392	0,393	0,388
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	0,417	0,410	0,406
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	0,372	0,376	0,368
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	0,336	0,310	0,290
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	0,326	0,320	0,326
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	0,391	0,381	0,376
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	0,398	0,391	0,395
NASIONAL			0,384	0,380	0,385

* Situs BPS RI data per-September; September 2020 dari BRS

LAMPIRAN VII INDIKATOR KETENAGAKERJAAN 2017-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Tingkat Partisipasi Angka-tan Kerja (TPAK)*)			Tingkat Pengangguran**)			Jumlah Pengangguran (orang)***)		
			2017	2018	2019	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	64,24%	63,36%	65,10%	6,34%	6,17%	6,59%	149.723	146.622	166.600
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	71,82%	70,19%	68,67%	5,55%	5,39%	6,91%	396.027	382.438	507.805
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	67,26%	67,51%	69,01%	5,66%	5,38%	6,88%	141.680	138.459	190.609
4	Provinsi Riau	Sumatera	65,23%	65,10%	65,24%	5,98%	5,76%	6,32%	192.801	190.143	203.837
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	64,72%	64,76%	66,28%	8,04%	7,50%	10,34%	69.113	69.479	117.176
6	Provinsi Jambi	Sumatera	68,46%	66,09%	67,79%	3,73%	4,06%	5,13%	69.075	73.965	9.399
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	68,69%	67,86%	68,65%	4,27%	4,53%	5,51%	175.087	185.918	238.363
8	Provinsi Lampung	Sumatera	69,67%	69,09%	70,16%	4,04%	4,03%	4,67%	171.689	171.455	209.568
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	70,06%	69,30%	71,73%	3,35%	3,26%	4,07%	35.061	34.439	43.801
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	67,79%	67,70%	66,89%	3,61%	3,58%	5,25%	26.552	26.871	38.756
11	Provinsi Banten	Jawa	64,72%	64,52%	64,48%	8,47%	8,11%	10,64%	496.732	490.808	661.061
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	63,95%	64,81%	63,81%	6,65%	6,54%	10,95%	314.841	320.901	57.278
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	62,92%	65,07%	64,53%	8,23%	8,04%	10,46%	1.848.234	1.901.498	2.533.076
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	68,56%	68,62%	69,43%	4,47%	4,44%	6,48%	814.347	819.355	1.214.342
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	73,37%	72,94%	71,12%	3,37%	3,18%	4,57%	73.350	69.170	101.846
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	69,37%	69,45%	70,33%	3,91%	3,82%	3,84%	850.474	843.754	1.301.145
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	68,65%	68,30%	68,83%	4,18%	4,35%	5,81%	104.518	110.272	151.561
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	70,03%	69,68%	68,40%	3,91%	4,04%	4,58%	54.397	56.790	63.309
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	70,27%	69,41%	69,33%	4,35%	4,18%	4,74%	95.278	91.730	103.648
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	64,99%	66,44%	65,50%	6,41%	5,94%	6,87%	114.313	110.574	124.884
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	67,81%	66,28%	66,51%	5,11%	4,49%	4,97%	17.797	15.380	1.729
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	76,78%	73,87%	74,32%	1,40%	1,57%	5,63%	34.485	37.551	1.445
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	65,91%	68,65%	70,45%	3,58%	3,28%	4,22%	83.257	84.516	11.343
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	70,17%	68,50%	73,11%	2,85%	3,14%	4,28%	74.748	83.030	121.884
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	63,02%	62,90%	63,40%	4,94%	4,62%	6,31%	213.105	200.304	269.817
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	68,46%	69,27%	70,19%	3,01%	2,98%	3,32%	20.227	21.054	23.132
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	69,52%	67,59%	69,44%	3,37%	3,11%	3,77%	51.481	46.802	59.381
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	69,78%	69,07%	69,83%	3,19%	3,52%	4,58%	40.724	45.292	6.186
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	67,34%	66,83%	66,46%	3,70%	3,76%	4,28%	23.347	23.809	2.541
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	63,01%	63,87%	63,42%	6,61%	6,01%	7,37%	80.664	75.485	90.248
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	65,21%	64,49%	64,28%	4,63%	4,81%	5,15%	25.831	27.303	29.997
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	62,90%	63,12%	65,07%	6,95%	6,69%	7,57%	54.891	54.575	63.489
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	67,88%	68,27%	69,55%	6,45%	6,43%	6,80%	28.086	28.846	33.501
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	79,11%	76,92%	72,16%	3,00%	3,51%	4,28%	58.756	67.173	75.658
NASIONAL			67,26%	67,49%	67,77%	5,30%	5,23%	7,07%	7.000.691	7.045.761	9.767.754

Sumber:

*)BRS masing2 Provinsi;

**)BRS data per-agustus;

***) Statistik Indonesia 2018, 2019, dan 2020.

LAMPIRAN VIII JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 2018-2020

NAMA PROVINSIREGIONAL			Jumlaht Penduduk (orang)					
			2018		2019		2020	
			Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
1	Provinsi Aceh	Sumatera	5.281.300	1,99%	5.371.532	2,00%	5.274.871	1,95%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	14.415.400	5,43%	14.562.549	5,43%	14.799.361	5,48%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	5.382.100	2,03%	5.441.197	2,03%	5.534.472	2,05%
4	Provinsi Riau	Sumatera	6.814.900	2,57%	6.971.700	2,60%	6.394.087	2,37%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	2.136.500	0,80%	2.189.700	0,82%	2.064.564	0,76%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	3.570.300	1,34%	3.624.600	1,35%	3.548.228	1,31%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	8.370.300	3,15%	8.470.700	3,16%	8.467.432	3,13%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	8.370.500	3,15%	8.447.700	3,15%	9.007.848	3,33%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	1.963.300	0,74%	1.991.800	0,74%	2.010.670	0,74%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	1.459.900	0,55%	1.488.800	0,56%	1.455.678	0,54%
11	Provinsi Banten	Jawa	12.689.700	4,78%	12.927.300	4,82%	11.904.562	4,41%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	10.467.600	3,94%	10.557.800	3,94%	10.562.088	3,91%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	49.316.712	18,56%	49.316.712	18,40%	48.274.162	17,87%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	34.490.800	12,98%	34.718.200	12,95%	36.516.035	13,51%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	3.802.900	1,43%	3.842.932	1,43%	3.668.719	1,36%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	39.500.900	14,87%	39.698.631	14,81%	40.665.696	15,05%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	5.001.700	1,88%	5.069.100	1,89%	5.414.390	2,00%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	2.660.200	1,00%	2.714.859	1,01%	2.669.969	0,99%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	4.182.700	1,57%	4.244.100	1,58%	4.073.584	1,51%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	3.648.800	1,37%	3.721.389	1,39%	3.766.039	1,39%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	716.400	0,27%	742.245	0,28%	701.814	0,26%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	4.292.200	1,62%	4.336.900	1,62%	4.317.404	1,60%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	5.013.700	1,89%	5.070.400	1,89%	5.320.092	1,97%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5.371.500	2,02%	5.456.203	2,04%	5.325.566	1,97%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	8.772.000	3,30%	8.851.240	3,30%	9.073.509	3,36%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	1.355.600	0,51%	1.380.256	0,51%	1.419.229	0,53%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	3.010.400	1,13%	3.054.000	1,14%	2.985.734	1,10%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	2.653.700	1,00%	2.704.737	1,01%	2.624.875	0,97%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	1.185.500	0,45%	1.202.600	0,45%	1.171.681	0,43%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	2.484.400	0,94%	2.507.000	0,94%	2.621.923	0,97%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	1.232.600	0,46%	1.255.800	0,47%	1.282.937	0,47%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	1.773.800	0,67%	1.802.900	0,67%	1.848.923	0,68%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	937.500	0,35%	959.617	0,36%	1.134.068	0,42%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	3.322.500	1,25%	3.379.302	1,26%	4.303.707	1,59%
NASIONAL			265.648.312	100,00%	268.074.501	100,00%	270.203.917	100,00%
1	Regional Sumatera		57.764.500	21,74%	58.560.278	21,84%	58.557.211	21,67%
2	Regional Jawa		150.268.612	56,57%	151.061.575	56,35%	151.591.262	56,10%
3	Regional Kalimantan		16.209.800	6,10%	16.491.693	6,15%	16.625.796	6,15%
4	Regional Sulawesi		19.461.600	7,33%	19.699.833	7,35%	19.896.951	7,36%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		14.677.400	5,53%	14.863.503	5,54%	14.963.062	5,54%
6	Regional Maluku-Papua		7.266.400	2,74%	7.397.619	2,76%	8.569.635	3,17%

Sumber: Statistik Indonesia 2018, 2019, dan 2020

LAMPIRAN IX NTP DAN NTN 2018-2020

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	NTP			NTN		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Sumatera	93,71	98,38	98,74	106,30	100,02	97,49
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	97,31	104,39	109,83	111,84	100,86	99,52
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	95,16	100,05	100,59	108,32	98,27	98,10
4	Provinsi Riau	Sumatera	92,70	106,39	118,79	120,66	99,33	99,49
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	97,13	101,75	107,62	113,37	104,22	107,31
6	Provinsi Jambi	Sumatera	91,51	98,92	95,37	98,74	96,78	100,36
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	94,08	104,83	114,10	107,29	97,23	94,31
8	Provinsi Lampung	Sumatera	105,60	96,96	94,73	117,10	101,23	101,35
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	84,41	102,35	103,95	112,35	103,02	105,56
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	97,02	101,11	99,19	116,31	101,32	103,56
11	Provinsi Banten	Jawa	100,44	99,86	99,55	110,11	98,21	95,19
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	110,90	101,33	101,41	119,11	100,02	99,39
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	103,64	101,85	101,79	118,22	99,89	102,71
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	101,26	102,57	101,12	120,93	101,99	106,66
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	108,61	101,17	100,77	126,08	98,44	95,77
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	100,52	101,71	102,27	123,25	101,28	98,73
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	103,87	98,16	94,27	111,88	98,77	99,27
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	110,91	104,54	107,30	118,02	102,85	104,89
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	107,02	97,07	95,93	112,23	96,07	94,20
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	94,66	102,87	108,46	110,65	101,99	102,13
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	95,02	102,66	103,55	112,65	102,11	102,38
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	95,43	99,95	100,98	114,86	102,46	99,83
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	94,48	105,38	111,36	113,78	101,67	103,17
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	-	100,81	102,75	-	104,83	102,84
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	95,38	97,27	98,80	111,91	100,52	100,83
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	95,72	96,08	95,27	112,61	96,10	98,11
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	103,31	96,21	96,97	107,63	98,91	99,64
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	94,93	96,90	96,35	121,80	98,40	97,45
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	103,91	99,91	99,42	107,20	94,64	95,23
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	109,78	103,59	109,45	115,84	99,43	99,23
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	101,74	98,41	96,77	107,39	103,34	101,26
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	96,13	97,99	96,52	107,77	100,03	97,29
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	100,98	101,98	100,78	101,06	97,62	95,56
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	91,82	100,67	102,25	106,39	107,09	110,52
NASIONAL			102,56	100,90	101,65	114,16	100,23	100,22

LAMPIRAN X IKHTISAR REALISASI APBN MENURUT REGIONAL 2018-2020

REGIONAL		Pendapatan APBN					
		2018		2019		2020	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.943.674,88	100,00%	1.960.633,57	100,00%	1.647.765,43	100,00%
1	Sumatera	87.460,23	4,50%	92.115,64	4,70%	79.024,92	4,80%
2	Jawa	1.750.608,06	90,07%	1.755.583,34	89,54%	1.476.418,36	89,60%
3	Kalimantan	44.468,68	2,29%	48.242,59	2,46%	38.535,72	2,34%
4	Sulawesi	24.446,43	1,26%	27.985,12	1,43%	23.137,68	1,40%
5	Bali-Nusa Tenggara	19.015,62	0,98%	20.301,98	1,04%	15.684,67	0,95%
6	Maluku-Papua	17.675,86	0,91%	16.404,90	0,84%	14.964,08	0,91%

REGIONAL		Belanja APBN					
		2018		2019		2020	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		2.213.186,54	100,00%	2.309.287,24	100,00%	2.593.300,04	100,00%
1	Sumatera	305.626,82	13,81%	326.902,15	14,16%	128.839,07	4,97%
2	Jawa	1.446.905,34	65,38%	1.492.563,29	64,63%	2.273.350,47	87,66%
3	Kalimantan	118.616,83	5,36%	129.726,68	5,62%	45.176,64	1,74%
4	Sulawesi	143.403,73	6,48%	147.431,05	6,38%	62.659,12	2,42%
5	Bali-Nusa Tenggara	77.143,12	3,49%	81.238,01	3,52%	37.446,82	1,44%
6	Maluku-Papua	121.490,70	5,49%	131.426,06	5,69%	45.827,92	1,77%

REGIONAL		Surplus/Defisit APBN					
		2018		2019		2020	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		-269.511,66	100,00%	-348.653,67	100,00%	-945.534,61	100,00%
1	Sumatera	-218.166,59	80,95%	-234.786,51	67,34%	-49.814,15	5,27%
2	Jawa	303.702,72	-112,69%	263.020,05	-75,44%	-796.932,11	84,28%
3	Kalimantan	-74.148,15	27,51%	-81.484,09	23,37%	-6.640,92	0,70%
4	Sulawesi	-118.957,30	44,14%	-119.445,92	34,26%	-39.521,44	4,18%
5	Bali-Nusa Tenggara	-58.127,50	21,57%	-60.936,03	17,48%	-21.762,15	2,30%
6	Maluku-Papua	-103.814,84	38,52%	-115.021,16	32,99%	-30.863,84	3,26%

LAMPIRAN XI IKHTISAR REALISASI APBD MENURUT REGIONAL 2018-2020

REGIONAL		Pendapatan APBD					
		2018		2019		2020	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.072.559,68	100,00%	1.163.879,21	100,00%	1.053.392,89	100,00%
1	Sumatera	259.830,41	24,23%	282.285,63	24,25%	256.578,43	24,36%
2	Jawa	440.564,09	41,08%	456.474,73	39,22%	427.763,85	40,61%
3	Kalimantan	109.066,71	10,17%	118.639,22	10,19%	109.240,21	10,37%
4	Sulawesi	108.345,75	10,10%	122.595,55	10,53%	105.554,27	10,02%
5	Bali-Nusa Tenggara	69.015,86	6,43%	75.548,80	6,49%	65.480,74	6,22%
6	Maluku-Papua	85.736,85	7,99%	108.335,27	9,31%	88.775,39	8,43%

REGIONAL		Belanja APBD					
		2018		2019		2020	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.047.078,30	100,00%	1.136.023,64	100,00%	1.038.667,01	100,00%
1	Sumatera	248.880,93	23,77%	272.482,63	23,99%	253.888,03	24,44%
2	Jawa	426.487,83	40,73%	470.426,54	41,41%	416.903,31	40,14%
3	Kalimantan	100.899,45	9,64%	106.479,11	9,37%	109.518,29	10,54%
4	Sulawesi	107.948,94	10,31%	112.190,71	9,88%	103.904,59	10,00%
5	Bali-Nusa Tenggara	69.775,24	6,66%	74.303,18	6,54%	66.088,30	6,36%
6	Maluku-Papua	93.085,92	8,89%	100.141,47	8,82%	88.364,49	8,51%

REGIONAL		Surplus/Defisit APBD					
		2018		2019		2020	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		25.481,38	100,00%	27.855,57	100,00%	14.725,88	100,00%
1	Sumatera	10.949,48	42,97%	9.803,00	35,19%	2.690,40	18,27%
2	Jawa	14.076,26	55,24%	-13.951,81	-50,09%	10.860,54	73,75%
3	Kalimantan	8.167,26	32,05%	12.160,11	43,65%	-278,08	-1,89%
4	Sulawesi	396,81	1,56%	10.404,84	37,35%	1.649,68	11,20%
5	Bali-Nusa Tenggara	-759,37	-2,98%	1.245,62	4,47%	-607,56	-4,13%
6	Maluku-Papua	-7.349,07	-28,84%	8.193,80	29,42%	410,90	2,79%

LAMPIRAN XII REALISASI APBN (i-Account) 2018-2020 (LKPP)

I-Account (dalam Miliar Rp)	REALISASI APBN (Miliar Rupiah)					
	2018			2019		
	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.894.720,33	1.943.674,88	102,58%	2.165.111,82	1.960.633,57	90,56%
Pendapatan Perpajakan	1.618.095,49	1.518.789,78	93,86%	1.786.378,65	1.546.141,89	86,55%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	275.427,97	409.320,24	148,61%	378.297,86	408.994,34	108,11%
Hibah	1.196,87	15.564,86	1300,47%	435,31	5.497,34	1262,86%
BELANJA NEGARA	2.220.656,97	2.213.186,54	99,66%	2.461.112,05	2.309.287,25	93,83%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	1.454.494,39	1.455.393,60	100,06%	1.634.339,52	1.496.313,84	91,55%
Belanja Pegawai	365.691,53	346.890,76	94,86%	381.327,10	376.074,25	98,62%
Belanja Barang	340.130,20	347.468,34	102,16%	355.613,15	334.418,20	94,04%
Belanja Modal	203.879,41	184.127,63	90,31%	179.252,02	177.841,48	99,21%
Belanja Bantuan Sosial	81.259,76	84.318,41	103,76%	101.998,22	112.480,25	110,28%
Belanja Hibah	1.460,85	1.520,56	104,09%	1.940,65	6.476,21	333,71%
Belanja Lain-Lain	67.237,41	16.163,85	24,04%	114.002,26	11.699,74	10,26%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	238.607,12	257.952,03	108,11%	275.885,27	275.521,16	99,87%
Belanja Subsidi	156.228,13	216.952,03	138,87%	224.320,86	201.802,56	89,96%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	766.162,58	757.792,94	98,91%	826.772,53	812.973,40	98,33%
Dana Transfer Umum (DTU)	490.714,92	495.193,62	100,91%	524.223,75	524.890,20	100,13%
Dana Alokasi Umum	401.489,58	401.489,58	100,00%	417.873,58	420.910,23	100,73%
Dana Bagi Hasil	89.225,34	93.704,04	105,02%	106.350,16	103.979,97	97,77%
Dana Transfer Khusus (DTK)	185.888,07	173.449,58	93,31%	200.368,84	186.394,66	93,03%
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-	69.326,70	64.165,65	92,56%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	-	-	-	131.042,14	122.229,01	93,27%
Dana Otsus, DIY, DID	29.559,58	29.290,33	99,09%	32.179,94	31.874,39	99,05%
Dana Otsus, DIY, DID	29.559,58	29.290,33	99,09%	32.179,94	31.874,39	99,05%
Dana Desa	60.000,00	59.859,41	99,77%	70.000,00	69.814,15	99,73%
Dana Desa	60.000,00	59.859,41	99,77%	70.000,00	69.814,15	99,73%
SURPLUS/DEFISIT	(325.936,64)	(269.511,66)	82,69%	(296.000,24)	(348.653,67)	117,79%
PEMBIAYAAN	325.936,66	305.687,60	93,79%	296.000,24	402.051,51	135,83%
Penerimaan Pembiayaan	399.402,39	372.192,48	93,19%	374.250,58	453.164,49	121,09%
Pengeluaran Pembiayaan	(73.465,72)	(66.504,88)	90,53%	(78.250,35)	(51.112,98)	65,32%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	-	36.175,94	-	-	53.397,78	-

Sumber: LKPP 2017, 2018, 2019

Sumber: Kajian Fiskal Regional 2016, 2017, 2018

I-Account (dalam Miliar Rp)	2018			REALISASI APBD (Miliar Rupiah)			2020		
	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI	PAGU	REALISASI	%REAL-ISASI
PENDAPATAN DAERAH	1.112.178,27	1.072.559,68	96,44%	1.218.259,63	1.163.879,21	95,54%	1.121.437,88	1.053.392,89	93,93%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	278.392,63	270.215,98	97,06%	298.676,60	291.070,43	97,45%	270.306,10	264.205,12	97,74%
Pendapatan Transfer	772.788,70	757.589,99	98,03%	850.083,01	812.970,01	95,63%	790.469,03	748.120,02	94,64%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.996,95	44.753,71	73,37%	69.500,01	59.838,76	86,10%	60.772,91	41.067,75	67,58%
BELANJA DAERAH	1.165.007,13	1.047.078,30	89,88%	1.261.360,30	1.136.023,64	90,06%	1.203.594,43	1.038.667,01	86,30%
Belanja Pegawai	405.407,95	367.583,48	90,67%	424.546,71	385.041,29	90,69%	407.651,09	367.268,59	90,09%
Belanja Barang	276.605,03	263.321,54	95,20%	326.951,10	292.347,92	89,42%	302.358,42	264.720,31	87,55%
Belanja Bunga	547,46	288,91	52,77%	941,32	689,17	73,21%	1.041,39	486,96	46,76%
Belanja Subsidi	6.685,39	3.311,09	49,53%	6.301,15	3.439,86	54,59%	5.369,59	4.208,34	78,37%
Belanja Hibah	78.818,65	73.733,41	93,55%	72.965,12	77.844,07	106,69%	88.584,90	75.431,47	85,15%
Belanja Bantuan Sosial	11.699,73	11.195,45	95,69%	11.901,22	11.895,10	99,95%	96.204,11	74.460,21	77,40%
Belanja Bagi Hasil	58.104,01	58.995,83	101,53%	74.301,81	75.065,40	101,03%	56.582,34	51.496,71	91,01%
Belanja Bantuan Keuangan	87.695,88	72.685,37	82,88%	88.257,52	77.185,58	87,45%	96.204,11	74.460,21	77,40%
Belanja Modal	232.093,21	194.749,91	83,91%	249.194,02	211.199,91	84,75%	184.382,25	151.501,06	82,17%
Belanja Tidak Terduga	7.349,82	1.213,31	16,51%	6.000,33	1.315,33	21,92%	45.584,18	33.941,10	74,46%
SURPLUS/ (DEFISIT)	(52.828,85)	25.481,38	-48,23%	(43.100,67)	27.855,57	-64,63%	(82.156,55)	14.725,88	-17,92%
PEMBIAYAAN	71.114,63	73.781,03	103,75%	75.216,89	77.537,33	103,08%	88.078,51	93.063,45	105,66%
Penerimaan Pembiayaan	79.854,40	87.843,86	110,01%	84.500,08	94.324,90	111,63%	105.049,37	104.524,92	99,50%
Pengeluaran Pembiayaan	8.739,77	14.062,83	160,91%	9.283,19	16.787,57	180,84%	16.970,86	11.461,47	67,54%
Pembiayaan Netto	71.114,63	73.781,03	103,75%	75.216,89	77.537,33	103,08%	88.078,51	93.063,45	105,66%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	18.285,78	99.262,41	542,84%	32.116,22	105.392,90	328,16%	5.921,97	107.789,33	1820,16%



KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN